PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# PERUBAHAN
# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
## KABUPATEN SUMEDANG
## TAHUN 2018-2023

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan terjadinya pandemi *corona virus disease* 2019, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar;
c. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat telah berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

33. Peraturan ...

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Perubahan RPJMD meliputi:
   a. Visi dan Misi Bupati;
   b. Tujuan, Sasaran dan Strategi;
   c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
   d. Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Isi dan Uraian Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:

   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
   e. BAB V : Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   i. BAB IX : Penutup.

(3) Perubahan RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD, perubahan Renstra, Renja SKPD serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (14/242/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tetap harus menjadikan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 20 Maret 2019. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pasal 342 menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJMD adalah terjadinya Perubahan yang mendasar, yang mencakup terjadinya Bencana Alam, Krisis Ekonomi dan atau perubahan kebijakan Nasional.

Adapun perubahan mendasar yang menjadikan landasan perlu dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, antara Lain:

1. Peraturan ...

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berdampak terhadap Perubahan Struktur APBD;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengharuskan setiap Pemerintah Daerah melakukan Standarisasi Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab Sumedang Tahun 2018-2023 ditetapkan sehingga diperlukan penyelarasan dan sinkronisasi;
4. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang memberikan pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada berbagai sektor khususnya dari sisi Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.

Untuk itu, berdasarkan rujukan di atas pemerintah daerah memandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa proses perubahan RPJMD secara mutatis mutandis memiliki proses dan tahapan yang sama dengan penyusuan RPJMD.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dlaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan ...

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Dengan adanya perubahan RPJMD ini tidak mengubah rumusan visi dan misi Bupati.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 25

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# DAFTAR ISI

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# DAFTAR ISI

**hal**

**DAFTAR ISI..... i**
**DAFTAR GAMBAR..... iii**
**DAFTAR TABEL..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN..... I-1**
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I-12
1.4 Maksud dan Tujuan..... I-31
1.5 Sistematika Penulisan..... I-32
**BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH..... II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II-1
2.1.1.1. Letak Geografis..... II-1
2.1.1.2. Pembagian Wilayah Administratif..... II-2
2.1.1.3. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan..... II-3
2.1.1.4. Kondisi Klimatologi..... II-5
2.1.1.5. Kondisi Geologi..... II-7
2.1.1.6. Kondisi Hidrologi..... II-13
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana..... II-15
2.1.1.8. Daya Dukung Lingkungan Hidup..... II-17
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-22
2.1.1.10. Kawasan Budidaya..... II-28
2.1.2. Demografi..... II-34
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-40
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Impact/Makro)..... II-40
2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-40
2.2.1.2. Struktur Perekonomian..... II-41
2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Perekonomian..... II-43
2.2.1.4. PDRB per Kapita..... II-45
2.2.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan... II-45

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-45
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia..... II-50
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender..... II-53
2.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender..... II-54
2.2.2.4. Indikator Pendidikan..... II-55
2.2.2.5. Indikator Kesehatan..... II-56
2.2.2.6. Indikator Ketenagakerjaan..... II-57
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-58
2.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-59
2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II-59
2.3.1.1. Urusan Pendidikan..... II-59
2.3.1.2. Urusan Kesehatan..... II-65
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-94
2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-101
2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-104
2.3.1.6. Urusan Sosial..... II-106
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... II-108
2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja..... II-108
2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-111
2.3.2.3. Urusan Pangan..... II-113
2.3.2.4. Urusan Pertanahan..... II-115
2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup..... II-117
2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-121
2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-124
2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II-126
2.3.2.9. Urusan Perhubungan..... II-129
2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika..... II-131
2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... II-132

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal..... II-133
2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga..... II-134
2.3.2.14. Urusan Statistik..... II-135
2.3.2.15. Urusan Persandian..... II-137
2.3.2.16. Urusan Kebudayaan..... II-138
2.3.2.17. Urusan Perpustakaan..... II-139
2.3.2.18. Urusan Kearsipan..... II-140
2.3.3. Fokus Urusan Pilihan..... II-141
2.3.3.1. Urusan Pertanian..... II-141
2.3.3.2. Urusan Pariwisata..... II-143
2.3.3.3. Urusan Kelautan dan Perikanan..... II-145
2.3.3.4. Urusan Perdagangan..... II-146
2.3.3.5. Urusan Perindustrian..... II-147
2.3.3.6. Urusan Transmigrasi..... II-148
2.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... II-151
2.3.4.1. Sekretariat Daerah..... II-151
2.3.4.2. Sekretariat DPRD..... II-152
2.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-154
2.3.5.1. Unsur Perencanaan..... II-154
2.3.5.2. Urusan Keuangan..... II-156
2.3.5.3. Unsur Kepegawaian..... II-158
2.3.5.4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan..... II-159
2.3.5.5. Unsur Penelitian dan Pengembangan..... II-160
2.3.6. Fokus Fungsi Unsur Pengawasan..... II-160
2.3.7. Fokus Fungsi Unsur Kewilayahan (Kecamatan)..... II-162
2.3.8. Fokus Fungsi Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)..... II-163
2.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-164
2.4.1. PDRB per Kapita..... II-164
2.4.2. Ketersediaan Air Bersih..... II-165
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi..... II-166
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia..... II-167
2.4.4.1. Rasio Ketergantungan..... II-167
2.4.4.2. Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3 dan Penduduk usia 15 tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan... II-168

2.4.4.3. Jumlah PNS menurut Pendidikan yang ditamatkan..... II-170
2.5. Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020..... II-171
2.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II-193
2.7. Pandemi Covid-19..... II-199
2.8 Inovasi Tahun 2019-2020..... II-205
2.8.1 Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi..... II-206
2.8.2 Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19..... II-207
2.8.3 Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE MANDIRI) V.1.1..... II-209
2.8.4 Aplikasi e-Office..... II-211
2.8.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa..... II-213
**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III-1**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu..... III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD..... III-3
3.1.1.1. Kinerja Penerimaan Daerah..... III-4
3.1.1.2. Kinerja Pengeluaran Daerah..... III-13
3. 1. 2. Neraca Daerah..... III-19
3. 1. 3. Kinerja Pendanaan Non APBD..... III-27
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III-27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran..... III-27
3.2.2. Analisis Pembiayaan..... III-31
3.3. Kerangka Pendanaan..... III-35
3.3.1. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah..... III-39
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... III-46
3.3.3. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya..... III-49
**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH..... IV-1**
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV-1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... IV-2
4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... IV-4
4.2. Isu Strategis..... IV-29

4.2.1 Telaahan Isu Strategis Internasional..... IV-29
4.2.2 Telaahan Isu Strategis Nasional..... IV-32
4.2.2.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019..... IV-32
4.2.2.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024..... IV-33
4.2.3 Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023..... IV-36
4.2.4 Telaahan RPJMD Kabupaten Berbatasan Kabupaten Sumedang..... IV-38
4.2.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025..... IV-42
4.2.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023..... IV-44
4.2.7. Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023..... IV-76
**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... V-1**
5.1 Visi ..... V-1
5.2 Misi ..... V-3
5.2.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025..... V-6
5.2.2 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023..... V-8
5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... V-9
5.4 Program Unggulan..... V-17
5.4.1. Sumedang Agamis..... V-18
5.4.2. Rumah Besar Fakir Miskin Sampai Tingkat Desa..... V-18
5.4.3. Sumedang Buludru..... V-18
5.4.4. Pemenuhan Pelayanan Dasar..... V-19

5.4.5. Pembangunan Infrastruktur.....V-19
5.4.6. Pengembangan Pariwisata.....V-20
5.4.7. Pengembangan Agribisnis..... V-20
5.4.8. Profesionalisme ASN..... V-20
5.4.9. Membangun Sumedang Preuneurship..... v-20
**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VI-1**
6.1 Strategi Pembangunan Daerah ..... VI-2
6.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spsasial... VI-6
6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ..... VI-35
6.4 Program unggulan.....VI-82
6.5 Inovasi ..... VI-86
6.5.1 Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Updating Data/Informasi Tata Ruang (Sistem Informasi Perencanaan Berbasis GIS)..... VI-86
6.5.2 Conversational Government..... VI-89
**BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH..... VII-1**
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah ..... VII-1
**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII-1**
8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... VIII-1
**BAB IX PENUTUP..... IX-1**
9.1 Pedoman Transisi..... IX-1
9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020..... IX-1
9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)..... IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan..... IX-3

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# DAFTAR GAMBAR

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# DAFTAR GAMBAR


| | | hal |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023..... | I-5 |
| Gambar 1.2 | Kerangka Pikir Integrasi KLHS ke dalam Dokumen RPJMD..... | I-30 |
| Gambar 1.3 | Bagan Hubungan antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... | I-31 |
| Gambar 2.1 | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sumedang..... | II-1 |
| Gambar 2.2 | Peta Topografi Kabupaten Sumedang..... | II-4 |
| Gambar 2.3 | Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang..... | II-5 |
| Gambar 2.4 | Curah Hujan di Kabupaten Sumedang berdasarkan Bulan Pada Tahun 2019..... | II-6 |
| Gambar 2.5 | Peta Geologi Kabupaten Sumedang..... | II-13 |
| Gambar 2.6 | Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang..... | II-14 |
| Gambar 2.7 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang..... | II-17 |
| Gambar 2.8 | Daya Dukung Air Kabupaten Sumedang ..... | II-21 |
| Gambar 2.9 | Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020 | II-36 |
| Gambar 2.10 | Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020..... | II-37 |
| Gambar 2.11 | Arsitektur Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... | II-39 |
| Gambar 2.12 | Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (trilyun rupiah)..... | II-40 |
| Gambar 2.13 | Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Tahun 2020 (Persen)..... | II-42 |
| Gambar 2.14 | PDRB berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2020 (persen)..... | II-42 |
| Gambar 2.15 | Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (persen)..... | II-43 |
| Gambar 2.16 | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2020 (persen)..... | II-44 |
| Gambar 2.17 | Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (juta rupiah)..... | II-45 |
| Gambar 2.18 | Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (rupiah)..... | II-46 |
| Gambar 2.19 | Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2020..... | II-46 |
| Gambar 2.20 | Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan Tahun 2018-2020..... | II-47 |
| Gambar 2.21 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Sumedang dan Prov. Jawa Barat Tahun 2010-2020 ..... | II-48 |
| Gambar 2.22 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... | II-48 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.23 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Sumedang dan Prov. Jabar Tahun 2010-2020 ..... | II-49 |
| Gambar 2.24 | Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... | II-49 |
| Gambar 2.25 | IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2020 ..... | II-52 |
| Gambar 2.26 | Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020 ..... | II-53 |
| Gambar 2.27 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... | II-54 |
| Gambar 2.28 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 ..... | II-55 |
| Gambar 2.29 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..... | II-60 |
| Gambar 2.30 | Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..... | II-62 |
| Gambar 2.31 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) | II-71 |
| Gambar 2.32 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 ..... | II-72 |
| Gambar 2.33 | Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..... | II-73 |
| Gambar 2.34 | Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%) ..... | II-74 |
| Gambar 2.35 | Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..... | II-76 |
| Gambar 2.36 | Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 -2020 ..... | II-77 |
| Gambar 2.37 | Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 ..... | II-79 |
| Gambar 2.38 | Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 ..... | II-81 |
| Gambar 2.39 | Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 ..... | II-83 |
| Gambar 2.40 | Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)..... | II-84 |
| Gambar 2.41 | Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 ..... | II-86 |
| Gambar 2.42 | Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) ..... | II-87 |
| Gambar 2.43 | Jumlah Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang di Sumedang Tahun 2015-2020 (orang) ..... | II-88 |
| Gambar 2.44 | Jumlah Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pakuwon di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2020 (orang) ..... | II-88 |
| Gambar 2.45 | Data Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga Tahun 2015-2020 (orang) ..... | II-89 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.46 | Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang ..... | II-91 |
| Gambar 2.47 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... | II-101 |
| Gambar 2.48 | Rumah Tangga ber-Sanitasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... | II-102 |
| Gambar 2.49 | Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... | II-103 |
| Gambar 2.50 | Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang ..... | II-116 |
| Gambar 2.51 | Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang ..... | II-116 |
| Gambar 2.52 | Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... | II-118 |
| Gambar 2.53 | Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... | II-121 |
| Gambar 2.54 | Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2015-2019 (%) .... | II-122 |
| Gambar 2.55 | Rasio Pasangan ber-Akte Nikah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%) | II-122 |
| Gambar 2.56 | Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (kwintal per Ha) ..... | II-142 |
| Gambar 2.57 | Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... | II-165 |
| Gambar 2.58 | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (%)..... | II-166 |
| Gambar 2. 59 | Pertumbuhan dan Kontirbusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020 ..... | II-200 |
| Gambar 2. 60 | Tujuan Penggunaan Internet Berdasarkan Perbedaan Generasi (Persen) ..... | II-201 |
| Gambar 2. 61 | Dampak Covid-19 terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang ..... | II-202 |
| Gambar 2.62 | Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 ..... | II-203 |
| Gambar 2.63 | Dokumentasi Prestasi Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi ..... | II-207 |
| Gambar 2.64 | Dokumentasi Inovasi Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19 ..... | II-209 |
| Gambar 2.65 | Dokumentasi Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE MANDIRI) V.1.1..... | II-211 |
| Gambar 2.66 | Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office..... | II-212 |
| Gambar 2.67 | Dokumentasi Inovasi SAKIP Desa..... | II-214 |
| Gambar 4.1 | Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan..... | IV-35 |
| Gambar 4.2 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... | IV-45 |
| Gambar 4.3 | Hasil Analisa Isu-isu Strategis Berdasarkan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017..... | IV-76 |
| Gambar 5.1 | Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang Tahun 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023..... | V-8 |

Gambar 5.2 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat Tahun 2018-2023..... V-9
Gambar 6.1 Kawasan Strategis Kabupaten ..... VI-13
Gambar 6.2 Ekosistem Operasionalisasi Program Simpati 2023..... VI-92

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# DAFTAR TABEL

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# DAFTAR TABEL


| | | hal |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Keterkaitan Perubahan RPJMD Sumedang 2019-2023 dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024 | I-13 |
| Tabel 1.2 | Keterkaitan Perubahan RPJMD Sumedang 2019-2023 dengan Program Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 | I-16 |
| Tabel 1.3 | Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa – Bali | I-23 |
| Tabel 1.4 | Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap Ke-4 RPJPD Tahun 2025-2025 | I-24 |
| Tebel 1.5 | Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2020 | I-27 |
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang | II-2 |
| Tabel 2.2 | Klasifikasi curah hujan di Kabupaten Sumedang | II-6 |
| Tabel 2.3 | Suhu Udara Kabupaten Sumedang | II-7 |
| Tabel 2.4 | Kawasan Rawan Bencana | II-16 |
| Tabel 2.5 | Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang | II-18 |
| Tabel 2.6 | Hasil rekapitulasi perhitungan kebutuhan air untuk non-domestik | II-20 |
| Tabel 2.7 | Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%) | II-26 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 | II-35 |
| Tabel 2.9 | Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (Tahun) | II-50 |
| Tabel 2.10 | APK, APM, dan Persentase Guru Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 | II-55 |
| Tabel 2.11 | Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 | II-56 |
| Tabel 2.12 | Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – Tahun 2020 (%) | II-57 |
| Tabel 2.13 | Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 | II-59 |
| Tabel 2.14 | Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) | II-61 |
| Tabel 2.15 | Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) | II-61 |
| Tabel 2.16 | Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang Tahun Ajaran 2019-2020 | II-62 |
| Tabel 2.17 | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) | II-63 |
| Tabel 2.18 | Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) | II-64 |
| Tabel 2.19 | Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Renstra 2018-2023 | II-64 |

Tabel 2.20 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 ..... II-65
Tabel 2.21 Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-66
Tabel 2.22 Rasio Pelayanan Puskesmas sesuai jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 .. II-66
Tabel 2.23 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-68
Tabel 2.24 Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-70
Tabel 2.25 Kasus DBD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (orang) ..... II-74
Tabel 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%) ..... II-75
Tabel 2.27 Jumlah Puskesmas dan Pustu per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ..... II-78
Tabel 2.28 Jumlah Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-80
Tabel 2.29 Jumlah Kasus *Filariasis* di KabupatenSumedang Tahun 2015-2020 ..... II-82
Tabel 2.30 Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (orang) ..... II-82
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-90
Tabel 2.32 Data Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (unit) ..... II-93
Tabel 2.33 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-95
Tabel 2.34 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-96
Tabel 2.35 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-97
Tabel 2.36 Rekapitulasi Informasi Tata Ruang Tahun 2017 – 2020 . II-99
Tabel 2.37 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-2023 (%) ..... II-100
Tabel 2.38 Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-103
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-2023 ..... II-104
Tabel 2.40 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-105
Tabel 2.41 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%).. II-106
Tabel 2.42 Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-107

Tabel 2.43 Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-108
Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-109
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-111
Tabel 2.46 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-111
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-113
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-114
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-115
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-117
Tabel 2.51 Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang Terangkut Tahun 2015-2019 ..... II-119
Tabel 2.52 Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan Penegakan Hukum Lingkungan ..... II-120
Tabel 2.53 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di KabupatenSumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-120
Tabel 2.54 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%) ..... II-123
Tabel 2.55 Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-123
Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-123
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ... II-124
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%) ..... II-126
Tabel 2.59 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 (%)..... II-126
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%).. II-128
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-129

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-130
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-131
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 .. II-132
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-133
Tabel 2.66 Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-133
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-134
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 ..... II-135
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-135
Tabel 2.70 Indikator Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 ..... II-136
Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-136
Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... II-137
Tabel 2.73 Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)..... II-137
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-139
Tabel 2.75 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-140
Tabel 2.76 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 ..... II-141
Tabel 2.77 Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%) II-143
Tabel 2.78 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 ..... II-144
Tabel 2.79 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2019 ..... II-145
Tabel 2.80 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%) ..... II-146
Tabel 2.81 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... II-146
Tabel 2.82 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%) ..... II-147

Tabel 2.83 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... II-147
Tabel 2.84 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Smedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%) ..... II-148
Tabel 2.85 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019..... II-150
Tabel 2.86 Indikator Kinerja Unsur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023..... II-152
Tabel 2.87 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019..... II-153
Tabel 2.88 Indikator Kinerja Unsur Sekretariat DPRD di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)..... II-154
Tabel 2.89 Indikator Kinerja Unsur Perencanaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020..... II-154
Tabel 2.90 Indikator Kinerja Unsur Perencanaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Bedasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)..... II-156
Tabel 2.91 Indikator Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019..... II-157
Tabel 2.92 Indikator Kinerja Unsur Keuangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023..... II-158
Tabel 2.93 Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019..... II-159
Tabel 2.94 Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (poin)..... II-159
Tabel 2.95 Indikator Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)..... II-160
Tabel 2.96 Indikator Kinerja Unsur Pengawasan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 (%)..... II-161
Tabel 2.97 Indikator Kinerja Unsur Pengawasan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023..... II-162
Tabel 2.98 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020..... II-163
Tabel 2.99 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023..... II-164
Tabel 2.100 Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020..... II-167
Tabel 2.101 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Smedang Tahun 2015-2020 ..... II-168
Tabel 2.102 Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3 di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)..... II-169
Tabel 2.103 Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (jiwa)..... II-169

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.104 | Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (orang)..... | II-170 |
| Tabel 2.105 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | II-171 |
| Tabel 2.106 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020 ..... | II-172 |
| Tabel 2.107 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020..... | II-187 |
| Tabel 2.108 | Capaian Indikator SPM Tahun 2020 Berdasarkan Hasil Penilaian Kemendagri Tahun 2021..... | II-194 |
| Tabel 2.109 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2020 Berdasarkan Indikator SDG's..... | II-195 |
| Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 s.d 2019..... | III-5 |
| Tabel 3.2 | Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019..... | III-6 |
| Tabel 3.3. | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terkahir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ..... | III-9 |
| Tabel 3.4 | Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir Tahun 2017-2019 ..... | III-14 |
| Tabel 3.5 | Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun 2017 s.d Tahun 2019 ..... | III-15 |
| Tabel 3.6 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun 2019 ..... | III-18 |
| Tabel 3.7 | Analisis Rasio Likuiditas. Rasio Solvabilitas. dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019..... | III-21 |
| Tabel 3.8 | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 s.d Tahun Anggaran 2019..... | III-24 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2015 - 2019..... | III-28 |
| Tabel 3.10 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017 – 2019..... | III-30 |
| Tabel 3.11 | Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019..... | III-32 |
| Tabel 3.12 | Analisis Surplus/ (defisit) Riil terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019..... | III-34 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Struktur APBD..... | III-36 |
| Tabel 3.14 | Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang | |

| | | |
|---|---|---|
| | selama 4 Tahun Mendatang (2020 – 2023)..... | III-40 |
| Tabel 3.15 | Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017 – 2019 | III-43 |
| Tabel 3.16 | Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 – 2023..... | III-44 |
| Tabel 3.17 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2023..... | III-48 |
| Tabel 4.1 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... | IV-2 |
| Tabel 4.2 | Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas..... | IV-5 |
| Tabel 4.3 | Telaahan RPJMD Daerah Lain..... | IV-38 |
| Tabel 4.4 | Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung..... | IV-46 |
| Tabel 4.5 | Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap Data Indikator TPB yang 'sudah tercapai, sudah dilaksanakan' dan 'tidak ada data'..... | IV-70 |
| Tabel 4.6 | Indikator SDGs bersifat Makro..... | IV-73 |
| Tabel 4.7 | Indikator SDGs bersifat outcome Program..... | IV-74 |
| Tabel 4.8 | Indikator SDGs dalam RENSTRA..... | IV-75 |
| Tabel 4.9 | Perumusan dan Penetapan Isu-isu Strategis Daerah..... | IV-77 |
| Tabel 4.10 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019..... | IV-95 |
| Tabel 4.11 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020..... | IV-100 |
| Tabel 4.12 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 – 2020 | IV-104 |
| Tabel 5.1 | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat ..... | V-13 |
| Tabel 5.2 | Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2018-2023 (Sebelum Perubahan) | V-22 |
| Tabel 5.3 | Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2021-2023 (Setelah Perubahan).. | V-28 |
| Tabel 6.1 | Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah..... | VI-7 |
| Tabel 6.2 | Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang ..... | VI-13 |
| Tabel 6.3 | Indikasi Pembangunan Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023..... | VI-14 |
| Tabel 6.4 | Strategi dan Arah Kebijakan..... | VI-35 |
| Tabel 6.5 | Perubahan Tema Tahunan..... | VI-38 |
| Tabel 6.6 | Fokus Arah Kebijakan pada Tema Tahunan..... | VI-39 |
| Tabel 6.7 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023..... | VI-42 |
| Tabel 6.8 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi ..... | VI-47 |
| Tabel 6.9 | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023..... | VI-49 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 6.10.a | Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sumedang Tahun 2021 | VI-53 |
| Tabel 6.10.b | Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023..... | VI-68 |
| Tabel 7.1 | Kerangka dan Realisasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 | VII-2 |
| Tabel 7.2 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 – 2023..... | VII-3 |
| Tabel 7.3a | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020..... | VII-6 |
| Tabel 7.3b | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023..... | VII-93 |
| Tabel 7.3c | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2022..... | VII-133 |
| Tabel 8.1 | Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023 ..... | VIII-2 |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)..... | VIII-3 |
| Tabel 8.3 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)..... | VIII-5 |
| Tabel 8.4a | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020..... | VIII-7 |
| Tabel 8.4b | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023..... | VIII-28 |
| Tabel 8.5 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Target Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020..... | VIII-55 |
| Tabel 8.6.a | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2021 | VIII-86 |
| Tabel 8.6.b | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023 | VIII-108 |

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB I
# PENDAHULUAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 adalah Pasangan Dr. H. Dony Ahmad Munir S.T., M.M dan H. Erwan Setiawan S.E yang mengusung visi 'SUMEDANG SIMPATI PADA TAHUN 2023'. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam proses perencanaan pembangunan, perubahan RPJMD ini merupakan hal yang dimungkinkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat 2 kebijakan nasional dan 1 peristiwa besar yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Terbitnya kebijakan nasional yang mengatur Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

   Dalam perjalanan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2020, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (12 Maret 2019) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (12 November 2019) yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Oktober 2020). Terbitnya peraturan tersebut, menyebabkan perubahan pada struktur Program-Kegiatan menjadi Program-Kegiatan-Sub Kegiatan, dan perubahan indikator kinerja serta perubahan struktur APBD.
2. Terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024

   RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

Tahun 2015-2019 yang di dalamnya mengatur NAWA CITA atau 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional. Pada Tahun 2020, sesuai dengan masa kepemimpinan presiden & wakil presiden Republik Indonesia periode Tahun 2020-2024 maka disusunlah RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (20 Januari 2020) dengan mengusung 7 (tujuh) prioritas nasional atau TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN.

Berdasarkan peraturan perundangan, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mengacu pada perencanaan nasional sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan berubahnya kebijakan perencanaan nasional yang ditandai dengan perubahan program prioritas pembangunan, maka daerah pun harus menyesuaikannya.

3. Terjadinya Pandemi Covid-19

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2018-2023 terjadi Pandemi Covid-19. Pemerintah secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi pada awal Maret Tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), diantaranya mengurangi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan memakai masker. AKB telah menyebabkan perubahan yang sangat signifikan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri. Sebagai upaya penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi Undang-Undang (18 Mei 2020).

Penyebaran Covid-19, menurut *World Health Organization* (WHO) telah menyerang hampir sebagian besar negara di dunia sehingga ditetapkan sebagai Pandemi. Pandemi telah menyebabkan dunia mengalami tekanan yang cukup kuat terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat termasuk di Kabupaten Sumedang. Respon kebijakan keuangan daerah dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk

mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan pemulihan ekonomi daerah. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berkolaborasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Disamping 3 hal diatas, perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mengacu kepada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa salah satu tahapan perencanaan adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Hasil evaluasi capaian target indikator kinerja sampai akhir Tahun 2020, menunjukkan perlunya penyesuaian sasaran dan target pada beberapa indikator kinerja.

Berkenaan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2020 dapat dilakukan perubahan yang prosesnya *mutatis mutandis* dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan tidak terlepas dari substansi RPJMD Tahun Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Perubahan RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2018-2023 menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Data yang digunakan dalam pendekatan teknokratik ini, adalah kondisi Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Perubahan RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala

daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tetap menjadikan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain itu penyusunan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi: (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2018-2023 juga tetap harus mengikuti prinsip rencana pembangunan Daerah yang harus dirumuskan secara: (a) transparan; (b) responsif; (c) efisien; (d) efektif; (e) akuntabel; (f) partisipatif; (g) terukur; (h) berkeadilan; (i) berwawasan lingkungan; dan (j) berkelanjutan.

Dengan demikian secara substansial Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan tematik holistik bermakna dilakukannya penanganan menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian program prioritas sehingga kegiatan yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna kegiatan-kegiatan direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

**Gambar 1.1**
**Tahapan dan Tata Cara Penyusunan**
**Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**

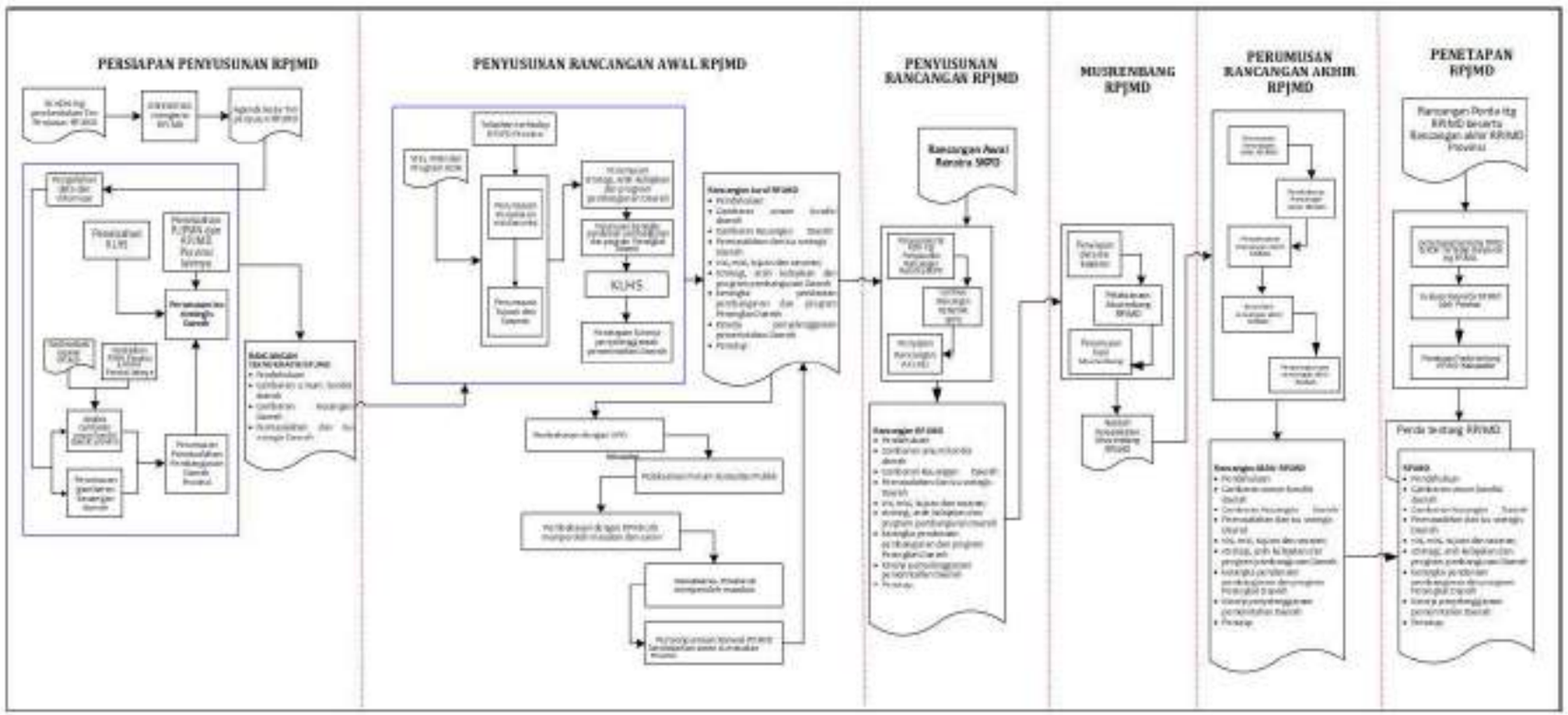

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 berdasarkan atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
40. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2018-2023 tetap harus melakukan sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya, yaitu dokumen perencanaan Naional, Provinsi, Kabupaten/ Kota tetangga dan dokumen perencanaan lainnya. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dimaksud, dilakukan dengan menelaah

kebijakan yang berdampak dan harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Berkenaan hal tersebut, maka akan dilakukan penelaahan atas dokumen perencanaan sebagai berikut:

### 1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana sebelumnya RPJMD Kabupaten Sumedang mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 ini dilakukan mengikuti RPJMN dimana Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2)Pembangunan Infrastruktur, (3)Penyederhanaan Regulasi, (4)Penyederhanaan Birokrasi, dan (5)Transformasi Ekonomi yang diturunkan menjadi arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sumedang.

**Tabel 1.1**
**Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024**

| RPJMN 2015-2019 | RPJMN 2020-2024 | PERUBAHAN RPJMD 2018-2023 |
|---|---|---|
| 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 1) | 1. Akselerasi Pelayanan Dasar (PN 3 & PN 5) |

| RPJMN 2015-2019 | RPJMN 2020-2024 | PERUBAHAN RPJMD 2018-2023 |
|---|---|---|
| 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2) | 2. Penguatan Sumedang Agamis (PN 4) |
| 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan | 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN 3) | 3. Penguatan Ketahahan Daerah (PN 6) |
| 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya | 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4)<br>5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5) | 4. Akselerasi Pemulihan Ekonomi (PN 1, 2, dan 5) |
| 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia | 6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim (PN 6) | 5. Penguatan inovasi pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan (PN 7) |

| RPJMN 2015-2019 | RPJMN 2020-2024 | PERUBAHAN RPJMD 2018-2023 |
|---|---|---|
| 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya<br><br>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik<br><br>8. Melakukan revolusi karakter bangsa<br><br>9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia | 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7) | |

Sumber : RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024, dan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023,

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sumedang.

**Tabel 1.2**
**Keterkaitan Perubahan RPJMD Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Program Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024**

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| 1 | SPALD-T Skala Permukiman | Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | Kemen PUPR | **Pembangunan/ Renovasi IPAL Komunal (SR)** |
| 2 | SPALD-T Skala Permukiman | Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Komunal (SR) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | DAK/Pemda | Pembangunan/ Renovasi IPAL Komunal (SR) |
| 3 | SPALD-T Skala Kota/Regional | Jumlah sambungan rumah yang terlayani IPAL Kota/Regional (SR) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | Kemen PUPR | Pembangunan/ Renovasi IPAL Komunal (SR) |
| 4 | SPALD-S Skala Individu | Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | DAK/Pemda | Pembangunan fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT) |
| 5 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota | Jumlah TPA yang dibangun (unit) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | Kemen PUPR | Pembangunan/ renovasi TPA |
| 6 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan | Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | Kemen PUPR | Pembangunan TPS3R |
| 7 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan | Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang**, Kab Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, | Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis | DAK/Pemda | Pembangunan TPS3R |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| | | | Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung | | | |
| 8 | Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa<br><br>Pendampingan pada 74.957 Desa | Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Penerimaan/ rekruitment pendamping desa baru |
| 9 | Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa<br><br>Pengendalian Penggunaan Dana Desa | Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Monev penggunaan dana desa |
| 10 | Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar<br><br>Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa | Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa | Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, **Sumedang**, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka | Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting | | Peningkatan program angka stunting di setiap desa |
| 11 | Desa Digital (P3PD) | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | | Pengadaan fasilitas akses internet di setiap desa |
| 12 | Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan | Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, | | | Pengembangan sarana sumber daya air minum berkelanjutan di tiap kecamatan |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek** | **Indikator** | **Lokasi** | **Proyek Prioritas Strategis (Major Project)**<br><br>**Program K / L** | **Instansi Pelaksana** | |
| | Berbasis Masyarakat | berkelanjutan berbasis masyarakat | Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | | |
| 13 | Pengembangan Usaha Ekonomi Desa<br><br>Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes | Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | | Peningkatan program BUMDes |
| 14 | BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | | | Peningkatan/ pengembangan produk unggulan desa |
| 15 | Pengembangan komoditas unggulan kelapa<br><br>Kawasan Kelapa | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat<br><br>Kawasan Karet (ha) | Provinsi Jawa Barat, Kab. **Sumedang** | Program K / L<br><br>Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan | Kementan | Peningkatan produk unggulan di tiap kabupaten |
| 16 | ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung) | | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. **Sumedang** | | | Peningkatan kualitas akses layanan umum di tiap kecamatan |
| 17 | Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat<br><br>(Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; | Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan | | Kemenhub | Dukungan fasilitasi |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| | Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN) | | Transportasi Perkeretaapian | | | |
| 18 | Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat<br><br>(Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU) | Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | | KPBU | Dukungan fasilitasi |
| 19 | Jalan Tol Non Trans Jawa | Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Program Penyelenggaraan Jalan | KemenPUPR | Penyelenggaraan/ pengembangan akses Jalan Tol |
| 20 | Jalan Tol Non Trans Jawa | Panjang Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) yang dibangun | Kab. Bandung, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Program Penyelenggaraan Jalan | KemenPUPR (KPBU) | Pembangungan akses Jalan Tol |
| 21 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan | Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Kementerian PUPR | Pembinaan terkait penyelnggaraan bangunan Gedung dan tata lingkungan |
| 22 | Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM | Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi | KPBU | Penerapan Smart Grid Water Management pada PDAM setempat |
| 23 | SPALD-T Skala Permukiman | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman (SR) | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR) | Pembangunan /pengembangan SPALD-T di Permukiman |
| 24 | SPALD-S Skala Kota (IPLT) | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT (unit) | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. **Sumedang** (Provinsi Jawa Barat) | Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Kementerian PUPR | Pembangunan dan rehabilitasi IPLT |
| 25 | Pembangunan Desa Terpadu | Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, | 1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa<br><br>2. Bina Pemerintahan Desa | 1. Kementerian Desa PDTT<br><br>2. Kementerian Dalam Negeri | Peningkatan Indeks desa |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| | | | Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh | | | |
| 26 | Desa Digital (P3PD) | Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa | Kementerian Desa PDTT | Pengembangan dan pembinaan akses digital di desa |
| 27 | Penetapan Batas Desa | Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa | Kementerian Dalam Negeri | Peninjauan/ Pembaharuan batas desa |
| 28 | Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat | Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa | Kementerian Desa PDTT | Pengembangan akses sumber daya air minum ditiap kecamatan |
| 29 | BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa | Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, | Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa | Kementerian Desa PDTT | Peningkatan/ Pengembangan BUMDes |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| | | | **Sumedang**, Tasikmalaya | | | |
| 30 | Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional | Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang) | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa | Kementerian Dalam Negeri | Pelatihan Aparat Desa dan Lembaga Desa lainya |
| 31 | Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD) | Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa) | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa | Kementerian Dalam Negeri | Penguatan Lembaga Pemerintah Desa |
| 32 | Pendampingan pada 74.957 Desa | Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang) | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa | Kementerian Desa PDTT | Penambahan pendamping desa ditiap kecamatan/ desa |
| 33 | Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota) | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Bina Pemerintahan Desa | Kementerian Dalam Negeri | Pembinaan administrasi pengelolaan aset Desa |
| 34 | Pengendalian Penggunaan Dana Desa | Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, | Pembangunan dan Permberdayaan | Kementerian Desa PDTT | Monev Penggunaan dana desa |

| No | RPJMN 2020-2024 | | | | | P-RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Prioritas (PP) / Kegiatan Prioritas (KP) / Proyek Prioritas (ProP) / Proyek | Indikator | Lokasi | Proyek Prioritas Strategis (Major Project)<br><br>Program K / L | Instansi Pelaksana | |
| | | Dana Desa (provinsi) | Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Masyarakat Desa | | |
| 35 | Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes | Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes | Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, **Sumedang**, Tasikmalaya | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kemendesa PDTT | Integrasi Usaha Ekonomi Desa dengan BUMDes |
| 36 | Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa | Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten) | Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, **Sumedang**, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kemendesa PDTT | Peningkatan program pencegahan stunting di Desa |

Sumber : RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mencapai target RPJMN dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, (Bab 3 RPJMN 2020- 2024), maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.

**Tabel 1.3**
**Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa-Bali**

| Provinsi | No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | No. | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|
| **Koridor Pertumbuhan** | | | | | |
| Banten | 1 | Kota Cilegon* | Jawa Tengah | 1 | Kabupaten Brebes |
| | 2 | Kabupaten Serang | | 2 | Kota Tegal* |
| | 3 | Kota Serang* | | 3 | Kabupaten Tegal |
| | 4 | Kabupaten Lebak | | 4 | Kabupaten Pemalang |
| | 5 | Kabupaten Tangerang | | 5 | Kabupaten Pekalongan |
| | 6 | Kota Tangerang | | 6 | Kota Pekalongan* |
| | 7 | Kota Tangerang Selatan | | 7 | Kabupaten Batang |
| DKI Jakarta | 1 | Kabupaten Kepulauan Seribu | | 8 | Kabupaten Kendal |
| | 2 | Kota Jakarta Barat | | 9 | Kota Semarang |
| | 3 | Kota Jakarta Pusat | | 10 | Kabupaten Demak |
| | 4 | Kota Jakarta Selatan | | 11 | Kabupaten Kudus |
| | 5 | Kota Jakarta Timur | | 12 | Kabupaten Pati |
| | 6 | Kota Jakarta Utara | | 13 | Kabupaten Rembang |
| Jawa Barat | 1 | Kota Depok | | 14 | Kabupaten Semarang |
| | 2 | Kabupaten Bogor | | 15 | Kabupaten Grobogan |
| | 3 | Kota Bogor | | 16 | Kota Salatiga |
| | 4 | Kota Bekasi | | 17 | Kabupaten Boyolali |
| | 5 | Kabupaten Bekasi | | 18 | Kabupaten Sukoharjo |
| | 6 | Kabupaten Karawang | | 19 | Kota Surakarta* |
| | 7 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Timur | 1 | Kabupaten Tuban |
| | 8 | Kabupaten Bandung Barat | | 2 | Kabupaten Lamongan |
| | 9 | Kota Cimahi | | 3 | Kabupaten Gresik |
| | 10 | Kota Bandung | | 4 | Kota Surabaya |
| | 11 | Kabupaten Sumedang | | 5 | Kabupaten Sidoarjo |
| | 12 | Kabupaten Majalengka | | 6 | Kabupaten Mojokerto |
| | 13 | Kabupaten Cirebon | | 7 | Kota Mojokerto |
| | 14 | Kota Cirebon* | | 8 | Kabupaten Bangkalan |
| Bali | 1 | Kabupaten Tabanan | | 9 | Kabupaten Pasuruan |
| | 2 | Kabupaten Badung | | 10 | Kota Pasuruan* |
| | 3 | Kota Denpasar | | 11 | Kabupaten Probolinggo |
| | 4 | Kabupaten Gianyar | | 12 | Kota Probolinggo* |
| | 5 | Kabupaten Klungkung | | 13 | Kabupaten Situbondo |
| | | | | 14 | Kabupaten Banyuwangi |
| | | | | 15 | Kabupaten Malang |
| | | | | 16 | Kota Malang* |
| | | | | 17 | Kota Batu* |

Sumber : RPJMN 2020-2024

### 1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

### 1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 merupakan bagian dari tahap ke-empat perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD. Adapun fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

**Tabel 1.4**
**Fokus Perencanaan Pembangunan**
**Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025**

| No | Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025 |
|---|---|
| 1. | Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan |
| 2 | Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi *supporting system* bagi aktivitas ekonomi kreatif |
| 3 | Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagamaan yang beragam dalam suasana penuh toleransi |
| 4 | Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi *customer satisfaction* |
| 5 | Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi *supporting system* bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah |
| 6 | Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila |
| 7 | Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan |
| 8 | Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat |
| 9 | Meningkatkan kemandirian desa |
| 10 | Pemantapan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi dan drainase jalan serta jalur pejalan kaki (trotoar) dan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, irigasi, |

| No | Fokus Perencanaan Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Tahun 2005-2025 |
|---|---|
| | telekomunikasi, energi termasuk di dalamnya energi alternatif, dan sumberdaya air yang handal dan terintegrasi, efisien, efektif dan modern serta berkualitas yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup |
| 11 | Peningkatan penanganan bencana alam antara lain longsor, banjir, kekeringan bahkan kebakaran |
| 12 | Pemantapan penanganan jaringan air kotor/limbah dan persampahan |
| 13 | Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman termasuk penanganan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih, pengembangan jaringan air kotor/limbah rumah tangga, pengembangan pengelolaan sampah rumah tangga dan peningkatan sanitasi lingkungan |
| 14 | Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi, dan nasional termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia |
| 15 | Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2050 |
| 16 | Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat |
| 17 | Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan |
| 18 | Pemantapan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian |
| 19 | Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional |
| 20 | Pemantapan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah |
| 21 | Pemantapan realisasi rencana pembangunan strategis seperti jalan tol Cisumdawu dan waduk Jatigede |
| 22 | Pemantapan partisipasi dan kemitraan dunia usaha serta masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai |

Sumber : RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

### 1.3.4 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan serta kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang, begitupun di daerah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan landasan bagi pembangunan daerah yang memanfaatkan ruang.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang menjadi pedoman untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian informasi

pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan akan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang, baik dalam perwujudan rencana struktur ruang maupun perwujudan rencana pola ruang.

### 1.3.5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5**
**Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran**
**RPJMD Tahun 2018-2020**

| RPJMD | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | TUJUAN | SASARAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| **MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau** | | | | | |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya | Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan |
| 2 | Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar |
| 3 | Terwujudnya penanggulangulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat | Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan |
| | | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak | | | |
| **Misi 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.** | | | | | |
| 1 | Terwujudnya kehidupan yang Agamis di | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam | | Mewujudkan Nilai-Nilai Agama Pada Tatanan Sosial Masyarakat dan |

| RPJMD | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | TUJUAN | SASARAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| | Kabupaten Sumedang | | kehidupan bermasyarakat | | Pemerintahan dalam Perilaku Kehidupan |
| | | Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar | | Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Serta Pelayanan Dasar Lainnya | |
| | | | | | |
| **Misi 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.** | | | | | |
| 1 | Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air | Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru | Peningkatan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat | Pengembangan Wilayah Ekonomi yang Berkelanjutan |
| | | Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat | Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah | | |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata | |
| | | Menjamin Ketahanan Pangan Daerah | | Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan | |
| | | Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata | | Peningkatan Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan | |
| | | Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang | | | |
| | | | | | |
| 2 | Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan | Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan | Peningkatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan | |
| | | Pengurangan indeks resiko bencana | | Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | |
| **Misi 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat** | | | | | |
| 1 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel | | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik |

| RPJMD | | | PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | TUJUAN | SASARAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| | | Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | |
| | | Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara | Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah | | |
| | | | | | |
| 2 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik |
| | | Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT | | | |
| | | | | | |
| **Misi 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang** | | | | | |
| 1 | Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang | | |
| | | Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat; | | Mengembangkan Kewirausahaan dan Mempeluas Kesempatan Kerja |

*Sumber : RKPD 2018-2020*

### 1.3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD juga harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

**Gambar 1.2**
**Kerangka Pikir Integrasi KLHS ke dalam Dokumen RPJMD**

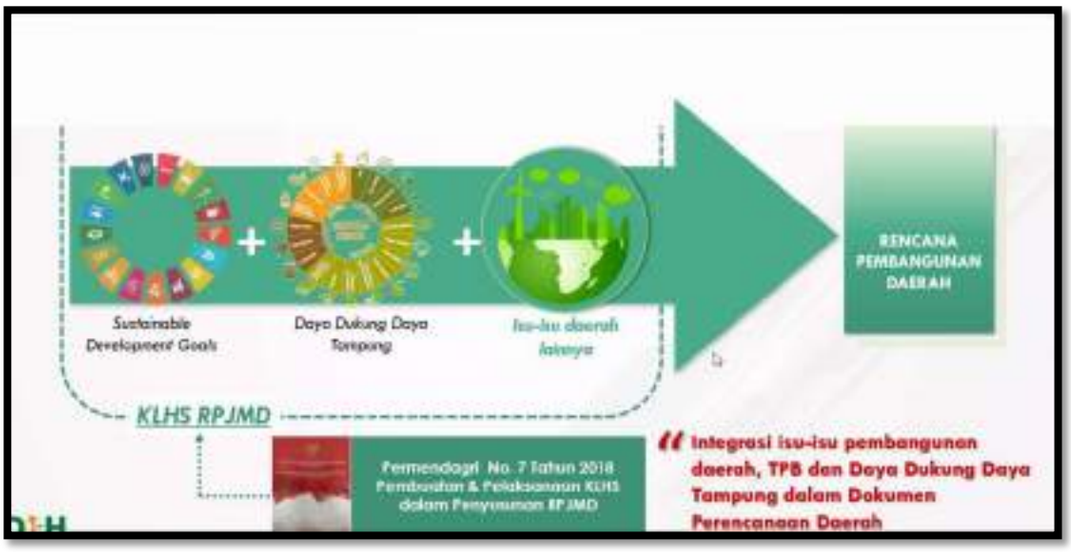


Sumber: KLHS P-RPJMD 2018-2023 Kab.Sumedang

### 1.3.6 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis atau Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.3**
**Bagan Hubungan antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

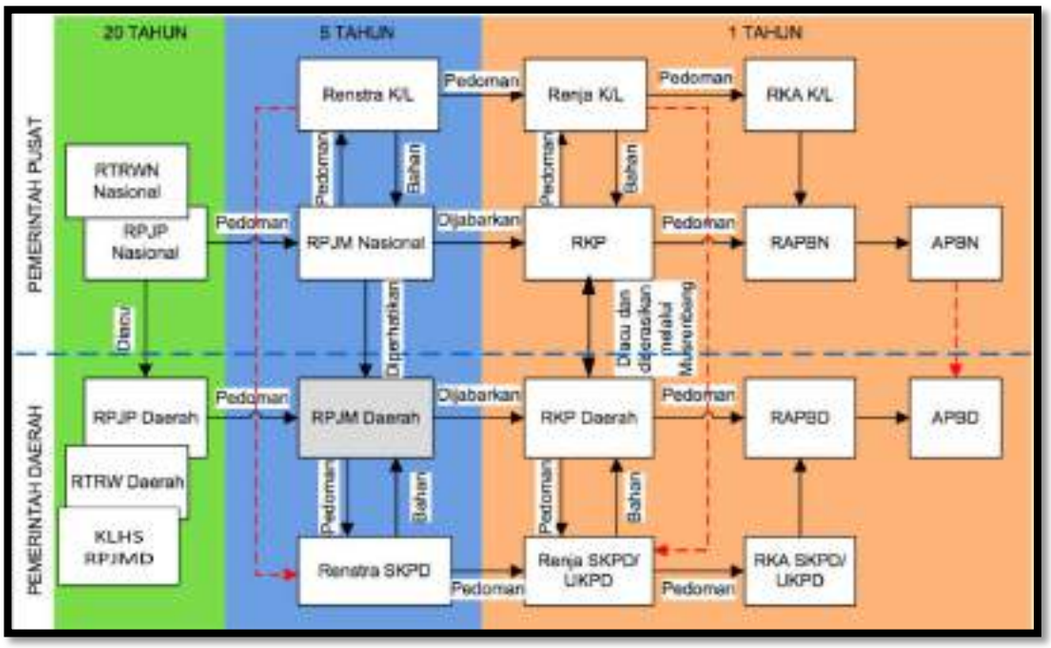


## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 terdiri dari 9 bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**
Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kabupaten Sumedang serta gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran Bupati dan wakil Bupati terpilih

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini menguraikan hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bagian ini menguraikan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 3 (tiga) Tahun ke depan, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX PENUTUP**

Bagian ini menguraikan peran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya Perubahan RPJMD merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### 2.1.1.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06$^0$34’46,18”-7$^0$00’56,25” Lintang Selatan dan 107$^0$01’45,63”- 108$^0$12’59,04” Bujur Timur.

**Gambar 2.1**
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sumedang**

*Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038*

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;

c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;

d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunng Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

### 2.1.1.2. Pembagian Wilayah Administratif

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede (7,31%) dari total luasan Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua (0,93%). Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini

**Tabel 2.1.**
**Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang**

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Desa | Kelurahan | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wado | 7.334 | 10 | | 4,71% |
| 2 | Jatinungggal | 6.311 | 9 | | 4,05% |
| 3 | Darmaraja | 5.403 | 12 | | 3,47% |
| 4 | Cibugel | 4.999 | 7 | | 3,21% |
| 5 | Cisitu | 6.398 | 10 | | 4,10% |
| 6 | Situraja | 5.666 | 15 | | 3,64% |
| 7 | Conggeang | 11.220 | 12 | | 7,20% |
| 8 | Paseh | 3.382 | 10 | | 2,17% |
| 9 | Surian | 7.645 | 9 | | 4,90% |
| 10 | Buahdua | 11.149 | 14 | | 7,15% |
| 11 | Tanjungsari | 4.319 | 12 | | 2,77% |
| 12 | Sukasari | 3.899 | 7 | | 2,50% |
| 13 | Pamulihan | 5.367 | 11 | | 3,44% |

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Desa | Kelurahan | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cimanggung | 4.298 | 11 | | 2,76% |
| 15 | Jatinangor | 2.562 | 12 | | 1,64% |
| 16 | Rancakalong | 5.596 | 10 | | 3,59% |
| 17 | Sumedang Selatan | 9.659 | 10 | 4 | 6,20% |
| 18 | Sumedang Utara | 3.132 | 10 | 3 | 2,01% |
| 19 | Ganeas | 2.525 | 8 | | 1,62% |
| 20 | Tanjungkerta | 4.393 | 12 | | 2,82% |
| 21 | Tanjungmedar | 6.688 | 9 | | 4,29% |
| 22 | Cimalaka | 4.755 | 14 | | 3,05% |
| 23 | Cisarua | 1.450 | 7 | | 0,93% |
| 24 | Tomo | 7.592 | 9 | | 4,87% |
| 25 | Ujungjaya | 8.738 | 9 | | 5,61% |
| 26 | Jatigede | 11.392 | 11 | | 7,31% |
| Jumlah | | 155.872 | 270 | 7 | 100% |

*Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038 (Ditayangkan dalam SIPD)*

### 2.1.1.3. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah uncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;

5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta Topografi dan Kemiringan Lahan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2038 diperlihatkan pada Gambar dibawah ini.

**Gambar 2.2**
**Peta Topografi Kabupaten Sumedang**

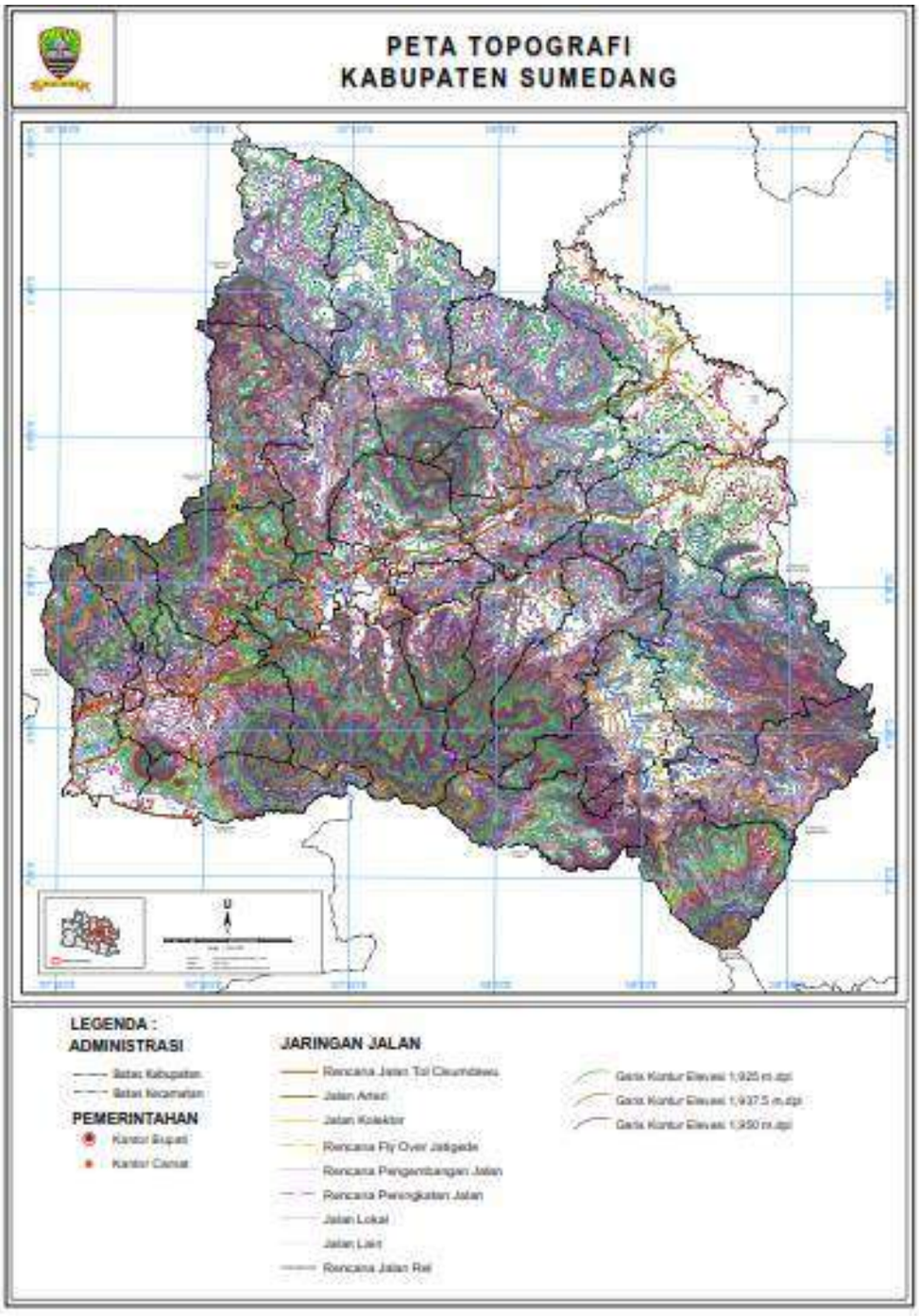


*Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038*

**Gambar 2.3**
**Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang**

*Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018- 2038*

### 2.1.1.4. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 24,70$^0$C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. Kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini terkait dengan persebaran curah hujan di wilayah Kabupaten Sumedang.

Dengan klasifikasi curah hujan yang terbagi menjadi 7 kategori, yaitu pada Tabel 2.2 berikut

**Tabel 2.2**
**Klasifikasi curah hujan di Kabupaten Sumedang**

| No | Curah Hujan (mm) | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | 1500 - 2000 mm | 1,35 |
| 2 | 2000 - 2500 mm | 15.956,44 |
| 3 | 2500 - 3000 mm | 59.443,31 |
| 4 | 3000 - 3500 mm | 55.375,50 |
| 5 | 3500 - 4000 mm | 19.563,93 |
| 6 | 4000 - 4500 mm | 4.487,64 |
| 7 | 4500 - 5000 mm | 1.656,91 |

*Sumber: id.climate-data.org, hasil pengolahan 2020*

**Gambar 2.4**
**Curah Hujan di Kabupaten Sumedang**
**berdasarkan Bulan Pada Tahun 2019**

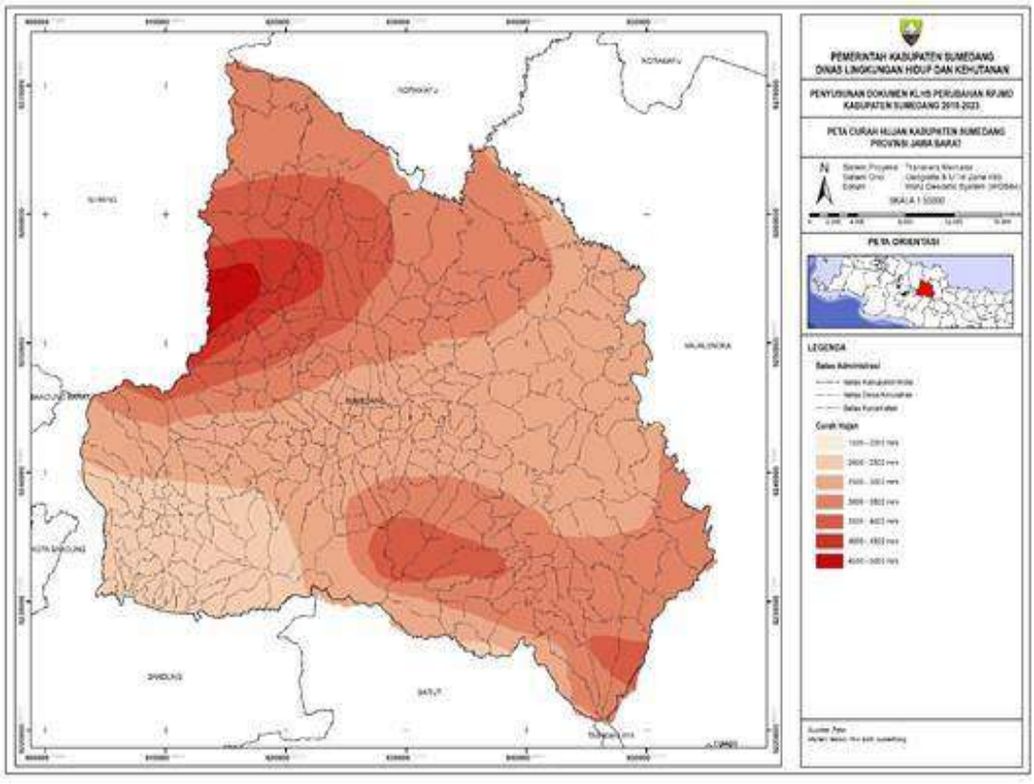


*Sumber : id.climate-data.org, dioolah*

Berdasarkan Tabel 2.3, bulan Oktober adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Suhu di Oktober rata-rata 25.3 °C. Sedangkan pada bulan Juli, suhu rata-rata adalah 24.1 °C yang merupakan suhu rata-rata terendah sepanjang tahun.

**Tabel 2.3**
**Suhu Udara Kabupaten Sumedang**

| Bulan | Suhu rata-rata (°C) | Suhu maksimum rata-rata (°C) | Suhu minimum rata-rata (°C) |
|---|---|---|---|
| Januari | 24,5 | 20,5 | 28,6 |
| Februari | 24,5 | 20,3 | 28,7 |
| Maret | 24,6 | 20,3 | 29,0 |
| April | 24,9 | 20,4 | 29,5 |
| Mei | 24,9 | 20,3 | 29,6 |
| Juni | 24,4 | 19,3 | 29,5 |
| Juli | 24,1 | 18,9 | 29,3 |
| Agustus | 24,3 | 18,7 | 29,9 |
| September | 24,8 | 19,1 | 30,5 |
| Oktober | 25,3 | 19,8 | 30,8 |
| November | 25,1 | 20,3 | 29,9 |
| Desember | 24,8 | 20,4 | 29,3` |
| Rata-rata tahunan | 24,7 | 19,9 | 29,6 |

*Sumber : id.climate-data.org, diolah (2020)*

### 2.1.1.5. Kondisi Geologi

Berdasarkan peta geologi lembar Bandung dan Arjawinangun satuan batuan di daerah Sumedang dapat dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) satuan,urutan stratigrafi dari muda ke tua adalah sebagai berikut :

1. Aluvium (Qa)

Aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil yang merupakan endapan sungai. Penyebaran batuan ini, meliputi daerah bagian utara, timur sampai bagian tengah daerah pemetaan, yaitu di sekitar lembah S.Cimanuk, S.Cilutung dan daerah Lembah tamba dengan luas penyebaran 641,28 $km^2$ (21,11%).

Tanah pelapukan dari satuan batuan ini berupa lempung lanauan sampai pasir lempungan, berwarna abu-abu kecoklatan, kepadatan sedang, plstisitas rendah, kesarangan tinggi, tebal 1-2,50 meter.

Pelapukan satuan batu ini mempunyai berat jenis = 2,60 $g/cm^3$, berat isi asli = 1,44 $g/cm^3$, berat isi jenuh = 1,46 $g/cm^3$, berat isi kering = 0,78$g/cm^3$, batas

cair = 123,28%, indek plastis = 66,94 %, kohesi = 0,08 kg/cm$^2$ dan sudut geser dalam = 17,13$^0$.

2. Hasil Gunung Api Tua Tak Teruraikan (Qvu)

Satuan batuan ini terdiri dari breksi gunung api, lahar dan lava bersifat andesit dan basal. Breksi berwarna abu-abu tua agak kekuningan, keras, komponen batuan beku andesit, kemas terbuka, masa dasar pasir halus.

Lava berwarna abu-abu, keras dan kompak. Penyebaran satuan ini terdapat di bagian barat dan timur daerah pemetaan,yaitu sekitar daerah Nanggerang, Sidopati, Batur, Wonohayu, Padahantan, G.Putri, Pasir Munjul dan daerah Mandirancam, mencangkup luas 236,07 km$^2$ (7,77%).

Tanah pelapukannya berupa lanau lempungan, berwarna coklat kemerahan, bersifat agak lunak-teguh, plastisitas rendah, kesarangan sedang, dengan ketebalan 2-3 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,61 g/cm3, berat isi asli = 1,47 g/cm3, berat isi jenuh = 1,58 g/cm$^3$, berat isi kering = 0,91 g/cm$^3$, batas cair = 101,04%, indek plastis = 56,07%, kohesi = 0,18 kg/cm$^2$ dan sudut geser dalam = 3,44$^0$.

3. Breksi terlipat (Qob)

Satuan ini terdiri dari breksi gunungapi, breksi tufaan, batupasir, lempung tufaan dan graywake. Breksi berwarna abu-abu, keras, komponen batuan beku andesit, masa dasar pasir tufa.Penyebaran satuan batu ini terdapat di bagian tengah daerah pemetaan yang membentuk bukit kecil antara lain G.Kemunding, G.Jongkang, Pasir Paregeg dan G.Senepah dengan luas 35,20 km$^2$ (1,16%) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa lempung pasiran sampai pasir lempungan, berwarna coklat kekuningan sampai kemerahan, bersifat teguh–agak urai, plastisitas sedang-rendah, kesarangan rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,5 - 2,5 meter.

Pelapukan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,57 g/cm$^3$,berat isi asli = 1,56g/cm$^3$, berat isi jenuh = 1,56 g/cm$^3$, berat isi kering = 1,02 g/cm$^3$, batas cair = 102,93%, indek plastis = 56,75%, kohesi = 0,122 kg/cm$^2$, dan sudur geser dalam = 8,43$^0$.

4. Formasi Cilanang (Pt)

Formasi Cilanang terdiri dari batupasir tufaaan,lempung tufaan, konglomerat dan kadang-kadang ditemukan lensa-lensa batu pasir gampingan. Batu pasir tufaan berwarna coklat muda, keras dan kompak, berbutir halus-sedang. Penyebaran terdapat di bagian tengah dan barat daerah pemetaan, yaitu sekitar Pasir Laja, Cihandap, Pasir Darawal, Pasir

Juring dan sekitar daerah Sukahaji dengan luas 71,7 km$^2$ (2,36%) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa lanau lempungan,berwarna coklat kekuningan, bersifat agak teguh, plastisitas rendah, kesarangan rendah, dengan ketebalan 1 - 2,75 meter.

Sifat fisik dari tanah pelapukan satuan batuan ini ialah : berat jenis = 2,50 g/cm$^3$, berat isis asli = 1,33 g/cm$^3$, berat isi jenuh = 1,43 g/cm$^3$, berat isis kering = 0,71 g/cm$^3$, batas cair = 117,60%, indek plastis = 36,53%, kohesi = 0,14 kg/cm$^2$ dan sudut geser dalam = 10,10$^0$.

5. Formasi Kliwungu (Pk)

Formasi Kaliwungu terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu pasir tufaan, konglomerat. Batu lempung berwarna abu-abu tua, bersifat keras. Penyebaran batuan terdapat di bagian selatan dan tengah daerah pemetaan,yaitu di sekitar Cisalak, Cikubang, Tarikolot, Bongas, Ciwaringin dan Leuwimunding dengan luas 91,15 km$^2$ (3,00%) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa lempung,berwarna abu-abu agak kekuningan, lunak-teguh, plastisitas tinggi, kesarangan rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50-2,50 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,71g/cm$^3$, berat isi asli = 1,49 g/cm3, berat isi jenuh = 1,61 g/cm$^3$, berat isi kering = 0,97 g/cm$^3$, batas cair = 88,26%, indek plastis = 44,30%, kohesi = 0,24 kg/cm$^2$, dan sudut geser dalam = 7,58$^0$.

6. Formasi Subang Anggota Batulempung (Msc)

Formasi Subang batulempung terdiri dari batulempung terdiri dari batu lempung yang mengandung lapisan batugamping dan kadang-kadang ditemukan sisipan batu pasir goukonit. Batulempung berwarna abu-abu tua, bersifat hancur (britle) bila kering dan mudah lunak bila basah. Penyebaran batuan ini terdapat di bagian tengah daerah pemetaan, yaitu di sekitar Pasir Soga, Pasir Panenjauan, Warungbuah, Pasir Kibodas Kerep dan Pasir Gedongan, dengan luas 166,4 km$^2$ (5,485) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa lempung,berwarna abu-abu tua, bersifat lunak bila basah, plastisitas tinggi, kesarangan sangat rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan 2 - 3,50 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,65 g/cm$^3$, berat isi asli = 1,32 g/cm$^3$, berat isi jenuh = 1,45 g/cm$^3$, berat isi kering = 0,78 g/cm3, batas cair = 83,43%, indek plastis = 22,72%, kohesi = 0,20 kg/cm$^2$, sudut geser dalam = 5,48$^0$.

7. Formasi Halang Anggota Atas (Mhu)

Formasi Halang Anggota Atas terdiri dari batupasir tufa, lempung dan konglomerat. Batu pasir merupakan bagian yang utama, berwarna abu-abu kekuningan, berbutir halus, keras. Penyebaran batuan meliputi daerah Bantarujeg, Bojongsalam dan Pasir Jawa, dengan luas 35,10 $km^2$ (1,16%) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa pasir lanauan, berwarna coklat kemerahan, bersifat urai, plastisitas rendah, kesarangan sedang dengan ketebalan tanah pelapukan 1,00-2,50 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,57 $g/cm^3$, berat isi asli = 1,38 $g/cm^3$, berat isi jenuh = 1,51 $g/cm^3$, berat isi kering = 0,80 $g/cm^3$, batas cair = 111,41%, indek plastis = 51,01%, kohesi = 0,23 $kg/cm^2$, sudut geser dalam = $4,97^0$.

8. Formasi Halang Anggota Bawah (Mhl)

Formasi Halang Anggota Bawah terdiri dari breksi,tufa,lempung dan konglomerat. Breksi berwarna abu-abu, komponen andesit, keras, masa dasar pasir. Penyebaran batuan terdapat di bagian tengah dan selatan daerah pemetaan,yaitu di sekitar Pasir Jatilawang, G.Halarang, Pasir Cimanggulang, Pasir Dangdeur dan sekitar daerah Talaga dengan luas 51,70 $km^2$ (1,70%).

Tanah pelapukan berupa lanau lempungan,berwarna coklat kekuningan sampai kemerahan, bersifat agak lunak sampai teguh,plastisitas rendah, agak sarang,dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50 - 2,00 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,61 $g/cm^3$, berat isi asli = 1,44 $g/cm^3$, berat isi jenuh = 1,56 $g/cm_3$, berat isi kering = 0,91 $g/cm^3$, batas cair = 94,68%, indek plastis = 43,65%, kohesi = 0,15 $kg/cm^2$, sudut geser dalam = $3,13^0$.

9. Formasi Cinambo Anggota Serpih (Omtu)

Formasi Cinambo terdiri dari batulempung dengan selingan batu-pasir gampingan,pasir gampingan dan pasir tufaan. Batulempung berwarna abu-abu tua, bersifat hancur (britle) bila kering. Penyebaran satuan batuan ini menempati di bagian tengah daerah pemetaan,yaitu di sekitar selatan Cicuruk kolot, Pasir Bangengek, Pasir Bawagung dan di sekitar daerah Maja, dengan luas 64,45 $km^2$ (2,12%) dari luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan dari batuan ini berupa lempung berwarna abu-abu tua, bersifat lunak bila basah, plastisitas tinggi, kesarangan sangat rendah, dengan ketebalan tanah pelapukan berkisar antara 1,5 - 2,5 meter.

Tanah pelapukan satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2.60 $g/cm^3$, berat isi asli = 1,44 $g/cm^3$, berat isi jenuh = 1,56 $g/cm^3$, berat isi kering =

0,91 g/cm$^3$, batas cair = 117,30%, indek plastis = 66,65%, kohesi = 0,18 kg/cm$^2$, sudut geser dalam = 3,75$^0$.

10. Formasi Cinambo Anggota Batupasir (Omtl)

Formasi Cinambo ini terdiri dari batupasir, tufa, lempung, batupasir gampingan dan lanau. Satuan ini berwarna abu-abu kekuningan sampai abu-abu gelap, sangat kompak, pada batu pasir mempunyai ciri perlapisan tebal dengan sisipan serpih dan lempung yang tipis dan padat berwarna kehitam-hitaman. Penyebaran batuan terdapat di bagian tengah dan timur daerah pemetaan,antara lain terdapat di sekitar Pasir Mojagede, G.Walik, Cikadang dan Cipicung, dengan luas 96,05 km$^2$ (3,16%) dari seluruh luas daerah pemetaan.

Tanah pelapukan berupa lempung lanauan, berwarna coklat kemerahan, teguh, plastisitas sedang, dengan ketebalan tanah pelapukan 1,50 - 2,00 meter.

Tanah pelapukan dari satuan batuan ini mempunyai berat jenis = 2,69 g/cm$^3$, berat isi jenuh = 1,59 g/cm3, berat isi asli = 1,50 g/cm$^3$, berat isi kering = 0,94 g/cm$^3$, batas cair = 100,44%, indek plastis = 60,77%, kohesi = 0,22 kg/cm$^2$, sudut geser dalam = 5,19$^0$.

11. Batuan Terobosan (ha)

Satuan ini berupa andesit hornblende berwarna abu-abu, keras dan berbentuk lempeng dengan lebar 20-30 meter. Penyebaran satuan ini sangat terbatas dan setempat-setempat membentuk bukit-bukit kecil, seperti di daerah Palasari, G.Jajar, G.Kuda dan G.Maung, dengan luas 16,45 km$^2$ (0,54%).

12. Lava Hasil Gunungapi Muda (Qy1)

Satuan ini berupa aliran lava muda G.Cereme bersifat andesit dan basal, berwarna abu-abu tua,keras dan kompak. Penyebaran satuan ini menempati bagian utara dan selatan G.Cereme, dan setempat-setempat menempati di bagian barat daerah pemetaan, yaitu sekitar Pasir Dayeuh Munggung dengan luas 46,35 km$^2$ (1,53%). Tanah pelapukan berupa lanau, berwarna coklat tua kemerahan, agak lunak, plastisitas rendah, kesarangan sedang,dengan ketebalan 0,75-1,5 meter.

13. Hasil Gunungapi Muda Tak Teruraikan (Qyu)

Satuan ini merupakan hasil endapan G.Tampomas yang terdiri dari breksi, lava bersifat andesit dan basal, pasir tufaan, dan lapili. Penyebaran satuan ini menempati di bagian utara yang memanjang ke bagian tengah,bagian selatan dan bagian timur daerah pemetaan dengan luas penyebaran 855,35 km$^2$ (28,15%).

Tanah pelapukan berupa lanau lempungan,berwarna abu-abu kekuningan sampai kemerahan,bersifat teguh-lunak, plastisitas sedang sampai sangat rendah, kesarangan sedang, dengan ketebalan 1-2,50 meter.

14. Lava Hasil Gunungapi Tua (Qvl)

Satuan ini berupa aliran lava tua yang bersifat andesit, berwarna abu-abu tua, keras dengan kekar lempengan (sheeting jonit). Satuan ini mempunyai penyebaran setempat-setempat, yaitu terdapat di sebelah barat Nanggerang dan Pasir Mungkal dengan luas penyebaran 62,20 $km^2$ (2,05%).

Tanah pelapukan dari satuan ini berupa lanau lempungan, berwarna coklat kemerahan,bersifat teguh, plastisitas sedang,kesarangan rendah, dengan tebal tanah pelapukan 1-2 meter.

15. Breksi Hasil Gunungapi Tua (Qvb)

Satuan batuan ini terdiri dari breksi gunungapi dan endapan lahar. Breksi berwarna abu-abu tua, keras, komponen terdiri dari batuan beku andesit dan basal, masa dasar pasir tufa. Penyebaran satuan ini terdapat di bagian selatan daerah pemetaan, yaitu sekitar Pasir Guranteng, Tagog dan Pasir Waru, dengan luas 107,90 $km^2$ (3,55%).

Tanah pelapukannya berupa pasir lempungan, berwarna coklat kemerahan, bersifat urai, plastisitas sangat rendah, kesarangan sedang – tinggi, dengan ketebalan 1,5 - 2,5 meter.

**Gambar 2.5**
**Peta Geologi Kabupaten Sumedang**

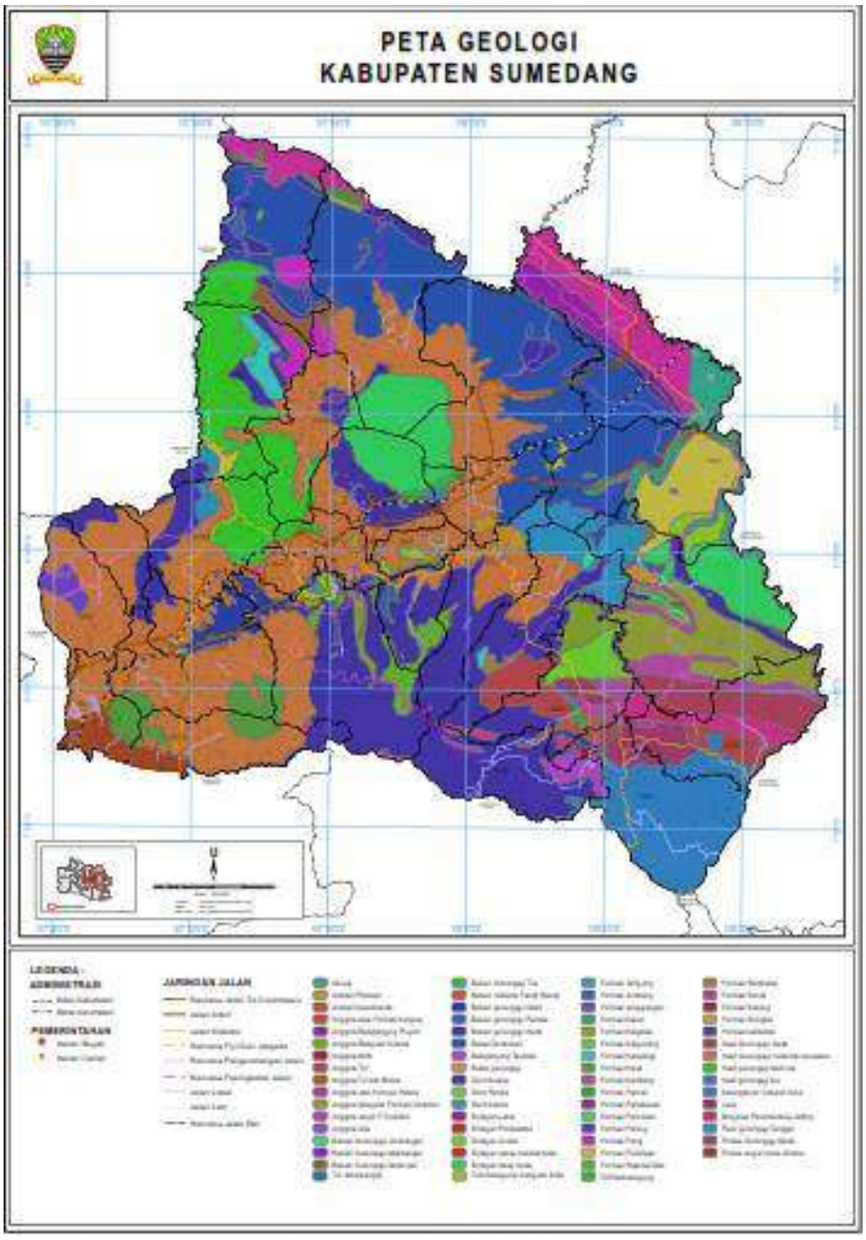


*Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038*

### 2.1.1.6. Kondisi Hidrologi

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten, dimana sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten Sumedang dan wilayah kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut meliputi :

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai Cipunagara;

2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah, dan Sungai Cikandung;
3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh dan Sungai Citarik (relatif kecil);
4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cilutung.

**Gambar 2.6**
**Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang**

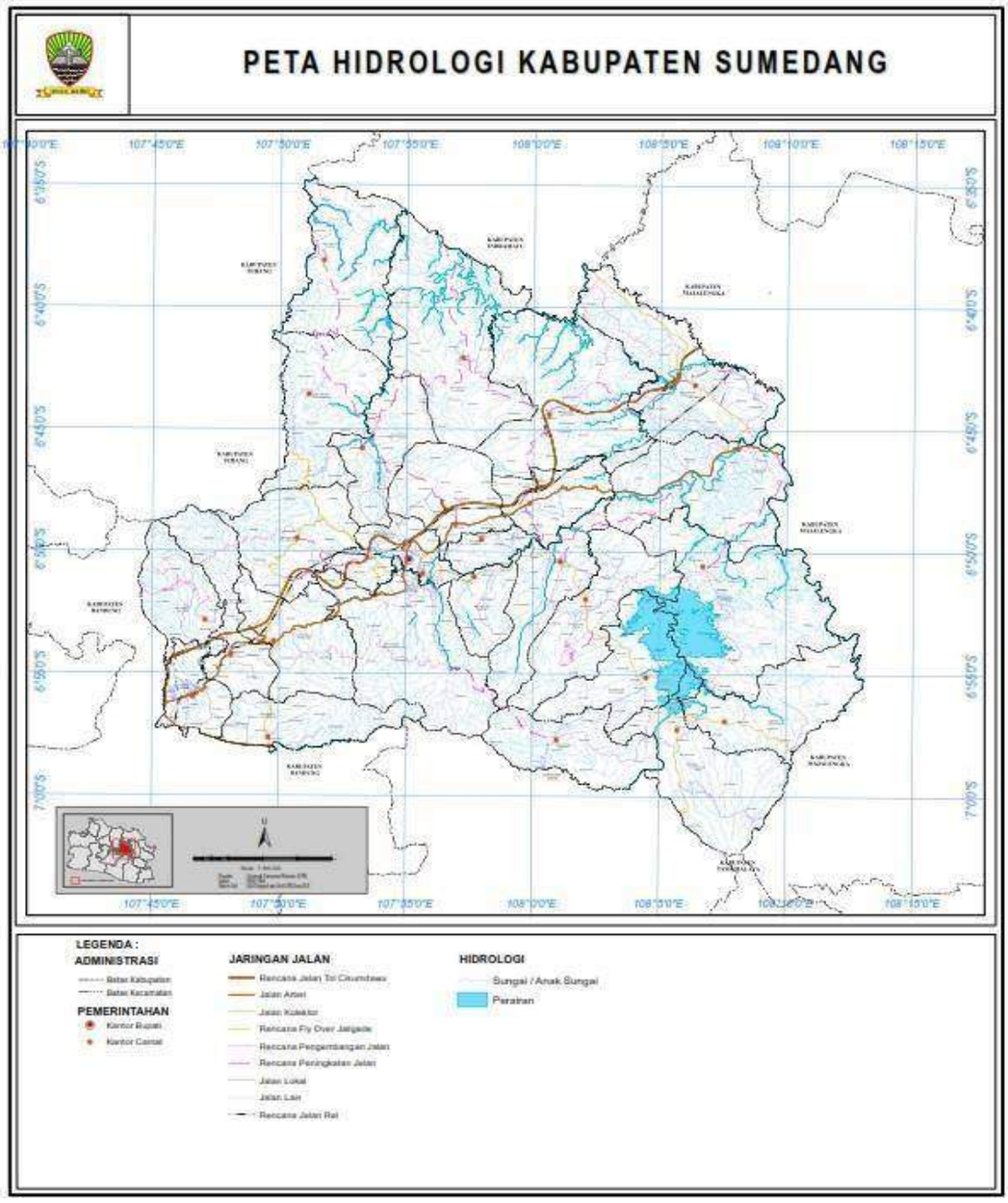


*Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038*

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS, yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.

### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai- sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**
**Kawasan Rawan Bencana**

| No | Kawasan Bencana | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerakan Tanah | Tersebar di sebagian wilayah kabupaten | Luas kurang lebih 21.612 Ha |
| 2 | Banjir | a. Kecamatan Jatinangor;<br>b. Kecamatan Cimanggung;<br>c. Kecamatan Ujungjaya;<br>d. Kecamatan Tomo;<br>e. Kecamatan Sumedang Utara; dan<br>f. Kecamatan Sumedang Selatan. | - |
| 3 | Puting Beliung | a. Kecamatan Cimanggung;<br>b. Kecamatan Cimalaka;<br>c. Kecamatan Cisarua;<br>d. Kecamatan Ujungjaya; dan<br>e. Kecamatan Wado. | - |
| 4 | Gempa Bumi | a. Kecamatan Jatinangor;<br>b. Kecamatan Cimanggung;<br>c. Kecamatan Pamulihan;<br>d. Kecamatan Tanjungsari;<br>e. Kecamatan Sukasari;<br>f. Kecamatan Rancakalong;<br>g. Kecamatan Sumedang Utara;<br>h. Kecamatan Sumedang Selatan;<br>i. Kecamatan Ganeas;<br>j. Kecamatan Cisarua;<br>k. Kecamatan Cimalaka;<br>l. Kecamatan Paseh;<br>m. Kecamatan Tanjungkerta;<br>n. Kecamatan Tanjungmedar;<br>o. Kecamatan Situraja;<br>p. Kecamatan Cisitu;<br>q. Kecamatan Darmaraja;<br>r. Kecamatan Wado;<br>s. Kecamatan Jatinunggal;<br>t. Kecamatan Jatigede;<br>u. Kecamatan Tomo;<br>v. Kecamatan Ujungjaya;<br>w. Kecamatan Conggeang;<br>x. Kecamatan Buahdua; dan<br>y. Kecamatan Surian. | - |

*Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038*

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar 2.7 dibawah ini:

**Gambar 2.7**
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang**

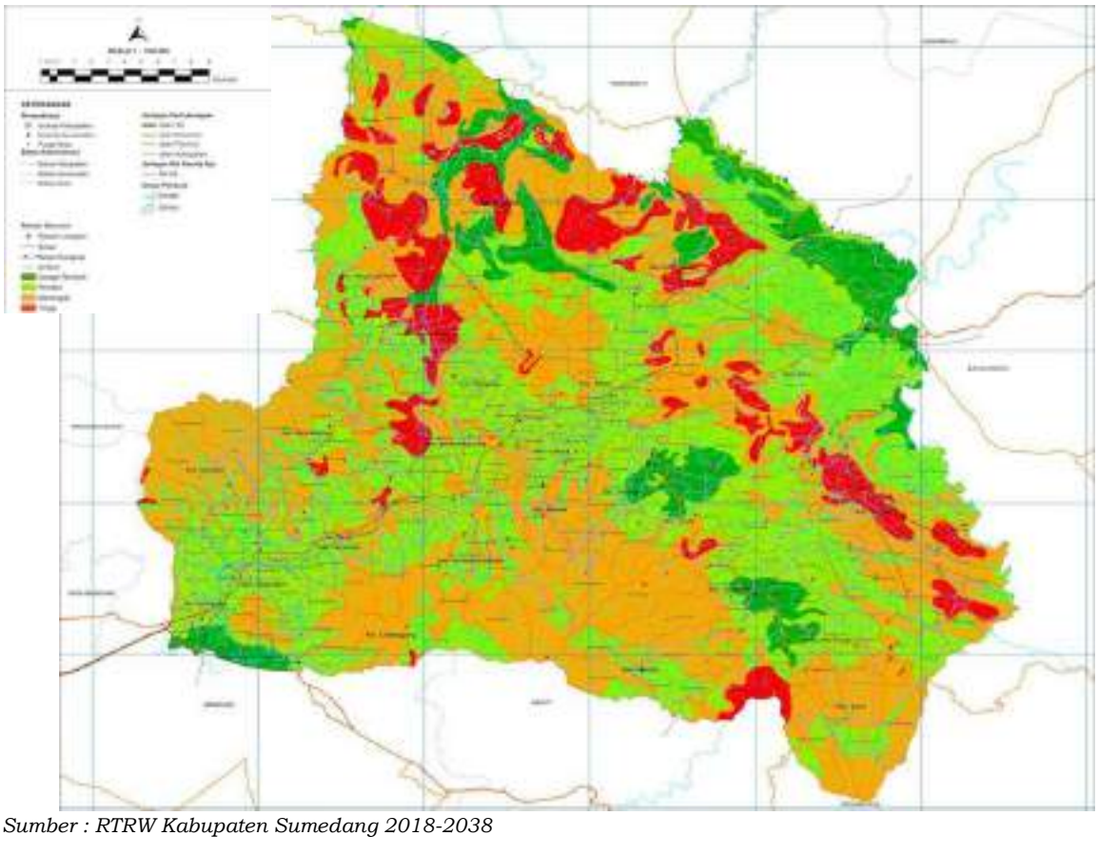

*Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038*

### 2.1.1.8. Daya Dukung Lingkungan Hidup

#### 1) Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai suplai, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai permintaan. Idealnya, nilai *demand* tidak melebihi kemampuan *supply*. Jika nilai demand lebih besar dari suplai, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian.

Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakup tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup *(basic need)*. Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 $m^3$/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard Nasional Indonesia SNI

19-6728.1-2002 untuk jumlah penduduk sama dengan 1 juta sebesar 150 l/orang/hari atau 55 $m^3$/kapita/tahun.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 mencapai 3.025 mm/tahun, dengan kondisi tutupan lahan terakhir yang diamati (Tahun 2017), ketersediaan pergerakan air (*runoff*) sepanjang Tahun 2017 mencapai 1.334.103.864 $m^3$/tahun. Potensi air dari sumber lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang adalah dari air sungai. Potensi air sungai yang ada di Kabupaten Sumedang dapat dimanfaatkan, terlebih Kabupaten Sumedang dilintasi oleh aliran-aliran sungai besar dan anak sungai yang membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu: 1) DAS Cimanuk meliputi Sub-DAS Cimanuk Hulu, Cipeles, Cimanuk Hilir, Cilutung, 2) DAS Citarum meliputi Sub-DAS Citarik, 3) DAS Cipunagara meliputi Sub-DAS Cikandung; dan 4) DAS Cipanas. Adapun potensi air sungai yang ada di Kabupaten Sumedang mencapai 11.333.088 $m^3$/tahun. Bila dijumlahkan ketersediaan air di Kabupaten Sumedang mencapai 1.345.436.952 $m^3$/tahun. Berikut pada Tabel 2.5 adalah koefisien limpasan yang terdapat pada lahan penggunaan Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.5**
**Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan**
**di Kabupaten Sumedang**

| No | Nama | Luas (Ha) | Koefisien | Luas x Koef. (A x C) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air danau/Situ | 9,37 | 0,1 | 0,94 |
| 2 | Air empang | 0,49 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | Air tawar sungai | 1.071,98 | 0,1 | 107,20 |
| 4 | Air waduk | 3.509,1 | 0,1 | 350,91 |
| 5 | Hutan rimba | 31.145,89 | 0,18 | 5.606,26 |
| 6 | Jalan | 10,05 | 0,7 | 7,03 |
| 7 | Padang rumput | 485,84 | 0,35 | 170,04 |
| 8 | Pasir/bukit pasir darat | 68,86 | 0,2 | 13,77 |
| 9 | Pemakaman | 62,33 | 0,2 | 12,47 |
| 10 | Perkebunan/kebun | 38.108,26 | 0,18 | 6859,49 |
| 11 | Permukiman | 14.393,59 | 0,7 | 10.075,511 |
| 12 | Pertambangan | 440,19 | 0,4 | 176,08 |
| 13 | Sawah | 18.802,94 | 0,3 | 5.640,88 |
| 14 | Sawah tadah hujan | 11.388,46 | 0,3 | 3.416,54 |
| 15 | Semak belukar | 5.845,63 | 0,35 | 2.045,97 |

| No | Nama | Luas (Ha) | Koefisien | Luas x Koef. (A x C) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Tanah kosong/ladang | 707,36 | 0,2 | 141,47 |
| 17 | Tegalan/ladang | 29.821,66 | 0,35 | 10.437,58 |
| | Total | 155.872 | 0,28 | 45.062,19 |

*Sumber: Penggunaan Lahan Data Spasial BAPPEDA, 2017 & Hasil perhitungan mengacu ke Permen LH Nomor 17 Tahun 2009*

Dalam menentukan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Sumedang yang bersumber dari limpasan (*runoff*) akan digunakan persamaan berikut.

SA = 10 x C x R x A

Diketahui:

1. Nilai koefisien x luas = 45.062,19
2. Luas wilayah Kabupaten Sumedang (A) = 155.872 Ha
3. Curah hujan rata-rata per tahun (R) = 3.025 mm/tahun

SA = 10 x 45.062,19 x 3.025

SA = 1.363.131.248 m^3/tahun

Kebutuhan air di Kabupaten Sumedang dalam hal ini juga perlu diperhitungkan. Perhitungan kebutuhan air terdiri dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk kegiatan non-domestik yang terdiri dari kebutuhan air untuk pertanian, industri, perkebunan dan peternakan, disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Perhitungan kebutuhan air total dilakukan dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

1. Kebutuhan air domestik

   Standar kebutuhan air domestik dilihat dari besarnya jumlah penduduk suatu wilayah. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Sumedang telah mencapai 1.159.454 jiwa. Menurut Ditjen Cipta Karya (2000), daerah dengan jumlah penduduk tersebut masuk kedalam kategori metropolitan dan dengan standar kebutuhan air minum sebesar 120 liter/orang/hari. Berdasarkan analisis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 diprediksikan pada Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Sumedang mencapai 1.188.479 jiwa. Atas dasar tersebut kebutuhan air domestik di Kabupaten Sumedang selama satu tahun dihitung berdasarkan prediksi jumlah penduduk Tahun 2024 dan standar kebutuhan air minum setiap penduduk dalam satu tahun. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa

kebutuhan air domestik di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 adalah sebesar 52.055.380,2 $m^3$/tahun.

2. Kebutuhan air non-domestik

   Kebutuhan air non-domestik di Kabupaten Sumedang dihitung pada aktivitas perikanan, peternakan, pertanian dan industri. Berdasarkan analisis pada KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, uraian kebutuhan air non-domestik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**
**Hasil rekapitulasi perhitungan kebutuhan air untuk non-domestik**

| No | Aktivitas non-domestik | Kebutuhan air ($m^3$/tahun) |
|---|---|---|
| 1 | Perikanan | 41.626.187,75 |
| 2 | Peternakan | 1.568.715 |
| 3 | Pertanian | 499.858.592,83 |
| 4 | Industri | 12.551.328 |
| Total | | 555.604.823,39 |

*Sumber: hasil pengolahan 2020*

Jadi apabila dijumlahkan kebutuhan air domestik dan non-domestik akan diperoleh total kebutuhan air di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 607.660.204 $m^3$/tahun. Besarnya daya dukung air (DDA) didapatkan dengan membandingkan ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Formula untuk menghitung keduanya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009.

$$DDA = SA/DA$$

$$DDA = 1.363.131.248/607.660.204$$

$$DDA = 2,24$$

Keterangan:

DDA: < 1 Daya Dukung Air terlampaui atau tidak aman

DDA: 1 - 2 Daya Dukung Air aman bersyarat

DDA: > 2 Daya Dukung Air aman

*Sumber: Pedoman Penentuan Status Daya Dukung Lahan dan Daya Dukung Air KLHK, 2008*

Berdasarkan perhitungan di atas, Daya Dukung Air di Kabupaten Sumedang berada pada status Daya Dukung Air aman. Namun jika dianalisis secara detail terdapat 4 kecamatan yang daya dukung airnya telah melampaui yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungkerta,

Kecamatan Tanjungmedar dan Kecamatan Surian sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 2.8**

**Daya Dukung Air Kabupaten Sumedang**

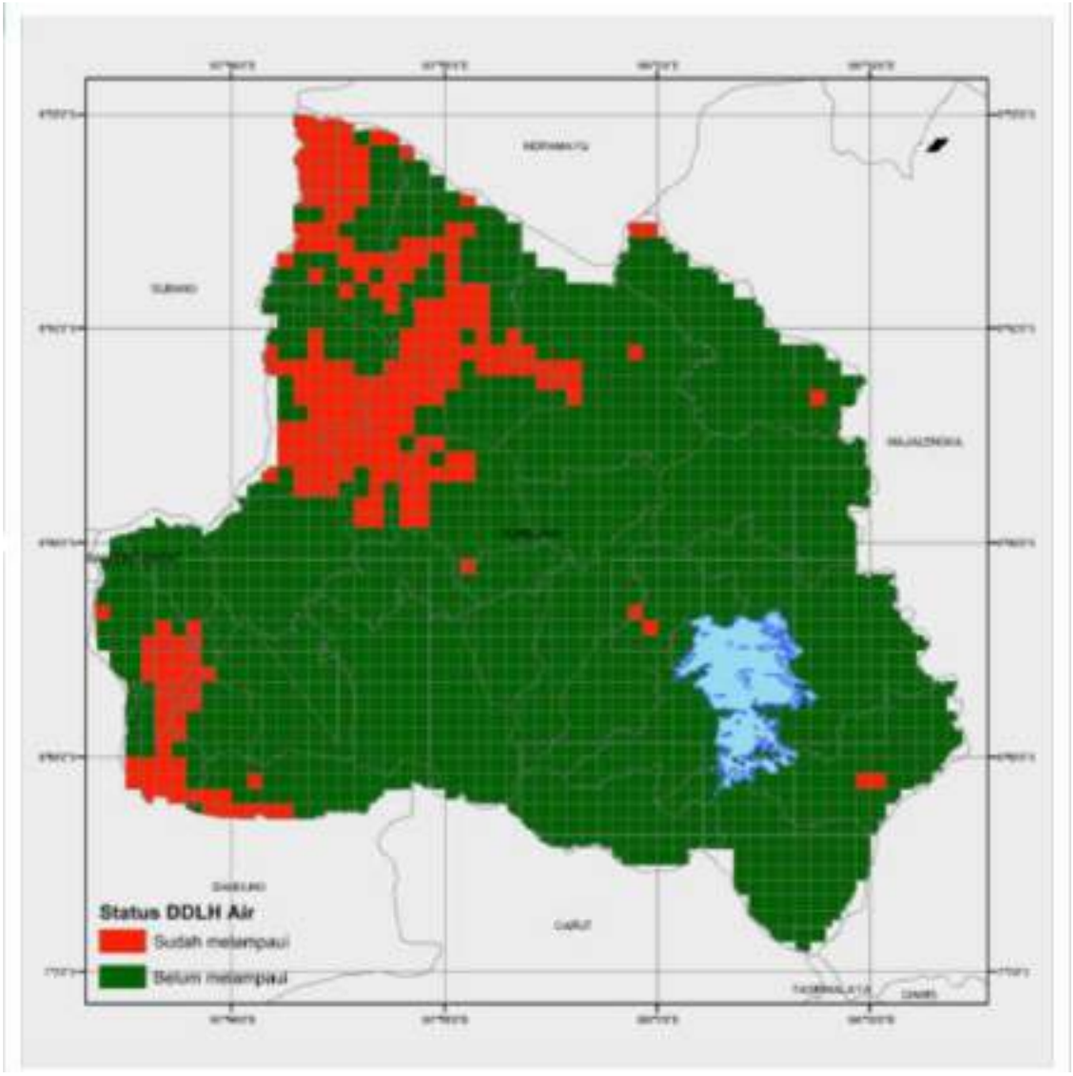


*Sumber : KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023*

**2) Daya Dukung Pangan**

Perhitungan daya dukung pangan menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan terhadap produksi beras dan jumlah konsumsi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk. Berdasarkan analisis dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 produksi rata-rata beras di Kabupaten Sumedang adalah 18 ton/ha/tahun, dan konsumsi beras masyarakat Sumedang per tahunnya diperkirakan 120 Kg/orang/tahun.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting luas lahan pertanian sebesar 30.191,40 Ha dan asumsi konversi dari gabah menjadi beras sebesar 70%, maka ketersediaan beras di Kabupaten Sumedang surplus sebesar 236.252 ton/tahun. Dengan demikian Daya Dukung Pangan (DDP) terhadap ketersediaan beras (pangan) di Kabupaten Sumedang mencapai 2,65 (konversi gabah-beras/jumlah beras yang dikonsumsi). Beras menjadi sumber utama dalam makanan pokok sehari-hari, sehingga dalam menghitung ketersediaan pangan ini harus diperhatikan agar proyeksi tahun mendatang dapat dihitung surplus maupun defisit dari beras. Hasil perhitungan ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan program terkait dengan daya dukung beras.

Selain kebutuhan beras sebagai karbohidrat utama, diperlukan juga serat berupa protein dari hasil kegiatan pangan. Protein bermanfaat untuk memperbaiki sel dan membangun jaringan sel tubuh. Oleh karena itu, ketersediaan bahan baku berupa protein harus tersedia mengingat penduduk Kabupaten Sumedang sebagian besar berada pada usia produktif.

### 2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

**A. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Sumedang, memiliki luas kurang lebih 9.085 Ha yang meliputi :

a. Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi lindung; dan
b. Kawasan Hutan Lindung yang direncanakan sebagai fungsi lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi lindung dengan luas kurang lebih 8.776 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:

a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Situraja; j. Kecamatan Cisitu; k. Kecamatan Darmaraja; l. Kecamatan Cibugel; m. Kecamatan Jatinunggal; n. Kecamatan Jatigede; o. Kecamatan Tomo; p. Kecamatan Conggeang; q. Kecamatan Paseh; r. Kecamatan Cimalaka; s. Kecamatan Tanjungkerta; t. Kecamatan Tanjungmedar; dan u. Kecamatan Buahdua.

Kawasan Hutan Lindung yang direncanakan sebagai fungsi lindung lainnya berupa Kawasan Hutan Lindung yang dibebani fungsi lindung lainnya dengan penggambaran melalui mekanisme outline dengan luas kurang lebih 309 (tiga ratus sembilan) hektar.

**B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Resapan Air dengan luas kurang lebih 20.151 (dua puluh ribu seratus lima puluh satu) hektar tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

**C. Kawasan Perlindungan Setempat**

**C.1. Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 2.318 Ha yang meliputi: a.Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Rancakalong; d.Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g.Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Cisarua; j.Kecamatan Cimalaka; k. Kecamatan Paseh; l. Kecamatan Tanjungkerta; m.Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Darmaraja; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Cibugel; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

**C.2. Kawasan Sempadan Waduk**

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 1.255 Ha, meliputi : a. Kecamatan Situraja; b. Kecamatan Cisitu; c. Kecamatan Darmaraja; d. Kecamatan Cibugel; e. Kecamatan Wado; f. Kecamatan Jatinunggal; g.Kecamatan Jatigede; h.Kecamatan Ujungjaya; i.Kecamatan Conggeang; j. Kecamatan Paseh; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

**C.3 Kawasan Danau**

Kawasan danau dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Tomo; c. Kecamatan Pamulihan; d.

Kecamatan Tanjungkerta; e. Kecamatan Tanjungmedar; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.

**C.4 Kawasan Waduk**

Kawasan waduk dengan luas kurang lebih 3.301 (tiga ribu tiga ratus satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Cisitu; b. Kecamatan Darmaraja; c. Kecamatan Cibugel; d. Kecamatan Wado; e. Kecamatan Jatinunggal; f. Kecamatan Jatigede; g. Kecamatan Ujungjaya; h. Kecamatan Buahdua; i. Kecamatan Conggeang; dan j. Kecamatan Surian.

**C.5 Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m.Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Cibugel; s. Kecamatan Wado; t. Kecamatan Jatinunggal; u. Kecamatan Jatigede; v. Kecamatan Tomo; w. Kecamatan Ujungjaya; x. Kecamatan Conggeang; y. Kecamatan Buahdua; dan z. Kecamatan Surian.

**D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

**D.1 Kawasan Cagar Alam**

Kawasan cagar alam berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 133 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinunggal; dan b. Kecamatan Jatigede.

**D.2 Kawasan Taman Hutan Raya**

Kawasan taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 34 Ha terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi: a. Gunung Palasari; dan b. Gunung Kunci.

**D.3 Kawasan Taman Wisata Alam**

Kawasan taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.074 Ha meliputi:a. Kecamatan Cimalaka; b. Kecamatan Conggeang; dan c. Kecamatan Buahdua.

**D.4 Kawasan Lindung Geologi**

D.4.1 Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi:

a) cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
b) cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan
c) cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi: 1. Kecamatan Cimanggung; 2. Kecamatan Pamulihan; 3. Kecamatan Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukasari; 5. Kecamatan Rancakalong; 6. Kecamatan Sumedang Utara; 7. Kecamatan Sumedang Selatan; 8. Kecamatan Ganeas; 9. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Cimalaka; 12. Kecamatan Paseh; 13. Kecamatan Tanjungkerta; 14. Kecamatan Situraja; 15. Kecamatan Cisitu; 16. Kecamatan Darmaraja; 17. Kecamatan Cibugel; 18. Kecamatan Wado; 19. Kecamatan Jatinunggal; 20. Kecamatan Tomo; 21. Kecamatan Ujungjaya; 22. Kecamatan Conggeang; 23. Kecamatan Buahdua; dan 24. Kecamatan Jatinangor.

D.4.2 Kawasan Sempadan Mata Air dengan luas 1.194 Ha meliputi : a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Jatigede; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Conggeang; f. Kecamatan Paseh; g. Kecamatan Cimalaka; h.Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; dan j. Kecamatan Buahdua.

**D.5 Kawasan Lindung Lainnya**

D.5.1 Kawasan Taman Buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 Ha meliputi :

a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.263 ha;
b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 ha;
c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.364 ha;
d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 ha;
e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 832 ha;
f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 ha;
g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 ha; dan
h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 ha.

D.5.2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Situs dan Wisata Sejarah.

D.5.3 Kawasan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 ha yang ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan meliputi:

a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan
b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10%.

Dalam perspektif tata ruang perkotaan, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

**Tabel 2.7**
**Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Luas Wilayah Kota di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| RTH dari luas wilayah kota | 5,16 | 5,86 | 7,13 | 11,04 | 11,04 | 11,07 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumedang (2021)*

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase RTH di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 persentase RTH mencapai angka 11,04%. Namun demikian, kondisi tersebut belum memenuhi besaran target RTH sesuai dengan amanat undang-undang sebesar 30%.

Jenis RTH di Kabupaten Sumedang terdiri dari taman kota yaitu Alun-alun Kabupaten, Taman Tegalkalong dan Taman Endog, dan jalur hijau jalan. RTH dengan fungsi tertentu yaitu pemakaman yang lokasinya sebagian besar di perkotaan Sumedang ~~yang merupakan ibu kota kabupaten~~, sedangkan untuk RTH di perkotaan lainnya belum dikelola dan belum adanya penetapan.

**E. Kawasan Rawan Bencana Alam**

**E.1. Kawasan rawan bencana gerakan tanah**

Kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten.

**E.2. Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan Rawan Bencana Banjir meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan

**E.3. Kawasan rawan bencana angin puting beliung**

Kawasan rawan bencana angin puting beliung meliputi: a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.

**E.4. Kawasan rawan bencana gempa bumi**

Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian

**F. Kawasan Lindung Geologi**

**F.1. kawasan cekungan air tanah**

Kawasan cekungan air tanah meliputi:

a. cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
b. cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan
c. cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi: 1. Kecamatan Cimanggung; 2. Kecamatan Pamulihan; 3. Kecamatan Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukasari; 5. Kecamatan Rancakalong; 6. Kecamatan Sumedang Utara; 7. Kecamatan Sumedang Selatan; 8. Kecamatan

Ganeas; 9. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Cimalaka; 11. Kecamatan Paseh; 12. Kecamatan Tanjungkerta; 13. Kecamatan Situraja; 14. Kecamatan Cisitu; 15. Kecamatan Darmaraja; 16. Kecamatan Cibugel; 17. Kecamatan Wado; 18. Kecamatan Jatinunggal; 19. Kecamatan Tomo; 20. Kecamatan Ujungjaya; 21. Kecamatan Conggeang; 22. Kecamatan Buahdua; dan 23. Kecamatan Jatinangor.

**F.2. kawasan sempadan mata air**

Kawasan sempadan mata air dengan luas kurang lebih 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi: a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Jatigede; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Conggeang; f. Kecamatan Paseh; g. Kecamatan Cimalaka; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; dan j. Kecamatan Buahdua

**2.1.1.10. Kawasan Budidaya**

**A. Kawasan Hutan Produksi**

**A.1 Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan peruntukan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 8.301 (delapan ribu tiga ratus satu) hektar terdiri atas:

a. Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah; dan
b. Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya.

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d.Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k.Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n.Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya dengan luas kurang lebih 1.180 (seribu seratus delapan puluh) hektar.

**A.2 Hutan Produksi Tetap**

Kawasan Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 17.988 (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar terdiri atas:

a. Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; dan
b. Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan memiliki luas kurang lebih 13.606 Ha, meliputi : a. Kecamatan Pamulihan; b.Kecamatan Sumedang Selatan; c. Kecamatan Wado; d. Kecamatan Jatigede; e.Kecamatan Tomo; f. Kecamatan Ujungjaya; g. Kecamatan Conggeang; h.Kecamatan Paseh; i. Kecamatan Cimalaka; j. Kecamatan Tanjungmedar; k.Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.
Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas 4.382 Ha.

Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.
Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas kurang lebih 1.180 Ha.

**B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 4.734 Ha, meliputi : a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Sumedang Selatan; d. Kecamatan Ganeas; e. Kecamatan Cisarua; f. Kecamatan Cimalaka; g. Kecamatan Paseh; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; j. Kecamatan Situraja; k. Kecamatan Cisitu; l. Kecamatan Darmaraja; m. Kecamatan Cibugel; n. Kecamatan Wado; o. Kecamatan Jatinunggal; p. Kecamatan Jatigede; q. Kecamatan Tomo; r. Kecamatan Ujungjaya; s. Kecamatan Conggeang; t. Kecamatan Buahdua; dan u. Kecamatan Surian.

**C. Kawasan Pertanian**

**C.1 Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan**

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi: a**.** lahan beririgasi; dan b. lahan tidak beririgasi.

**C.2 Kawasan Peruntukan Hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**C.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**C.4 Kawasan Peruntukan Peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

a. kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional, dan kawasan ternak besar lainnya;
b. kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pakan Tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**C.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)**

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 30.069 Ha.

**D. Kawasan Perikanan**

**D.1 Kawasan Perikanan Budidaya Kolam**

Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, dan embung tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**D.2 Kawasan Perikanan Budidaya Waduk**

Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede, dan Waduk-waduk lainnya (Bendung Rengrang, Bendung Cipanas dan Bendung Sadawarna) dan Kawasan Cincin Tampomas direncanakan menjadi kawasan minapolitan.

**E. Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan berdasarkan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Adapun kawasan wilayah usaha pertambangan meliputi : a. Kecamatan Tanjungsari; b. Kecamatan Pamulihan; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sumedang Utara; e. Kecamatan Situraja; f. Kecamatan Cisitu; g.

Kecamatan Darmaraja; h. Kecamatan Jatinunggal; i. Kecamatan Jatigede; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Paseh; n. Kecamatan Cimalaka; o. Kecamatan Cisarua; p. Kecamatan Tanjungkerta; q. Kecamatan Tanjungmedar; r. Kecamatan Buahdua; dan Kecamatan Surian.

**F. Kawasan Pariwisata**

**F.1 Pariwisata Budaya**

Pengembangan pariwisata budaya meliputi:

a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
e. Tradisi dan Budaya Tarawangsa dan Ngalaksa Desa;
f. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
g. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
h. relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
    1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
    2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
    3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
i. Wisata *Geotheatre* di Kecamatan Rancakalong;
j. Wisata Situs Makama Keramat; dan
k. Wisata budaya lainnya.

**E.2 Pariwisata Alam**

Pengembangan pariwisata alam meliputi: a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor; b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari; c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka; d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari; e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan; f. Curug Sindulang di Kecamatan Cimanggung; g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan; h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan; i. TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan; j. TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan; k. Situ Sari di Kecamatan Tomo; l. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua; m. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua; n. Pangjugjugan di Kecamatan Pamulihan; o. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong; p. Bumi

Kahiyangan di Kecamatan Sukasari; q. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan r. Wisata Alam lainnya.

**E.3 Pariwisata Buatan**

Pengembangan pariwisata buatan meliputi: a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede; b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede; c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan; d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede; e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede; f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan g. Wisata buatan lainnya.

**E.4 Pariwisata Minat Khusus**

Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi: a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan; b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu; c. pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.

**E.5 Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di kawasan pariwisata jatigede.

**F. Kawasan Peruntukan Industri**

**F.1 Kawasan Industri Besar**

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi:

a. optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi:
   1. Kecamatan Jatinangor; dan
   2. Kecamatan Cimanggung.
b. pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.517 Ha meliputi:
   1. Kecamatan Ujungjaya; dan
   2. Kecamatan Tomo.
c. pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

**F.2 Kawasan Industri Menengah**

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:

a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
b. pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
c. pengembangan sentra-sentra IKM di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.

**F.3 Kawasan Industri Kecil**

Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**G. Kawasan Permukiman**

**G.1 Kawasan Permukiman Perkotaan**

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 9.246 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Cimalaka; i. Kecamatan Paseh; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Cisarua; dan n. Kecamatan Tanjungkerta.

**G.2 Kawasan Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 7.772 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

**H. Kawasan Peruntukan Lainnya**

**H.1 Pusat Pemerintahan Kabupaten**

Kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki luas kurang lebih 32 Ha terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

**H.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka; b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan; c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan; d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan e. Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

**H.3. Sarana prasarana Instalasi PLTA Parakan Kondang dan Instalasi lainnya**

Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya memiliki luas kurang kebih 275 Ha terletak di Kecamatan Jatigede. Instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten. PLTA Parakan Kondang berada pada daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk yang bermata air di Gunung Mandalagiri Kabupaten Garut. Jenis PLTA nya adalah Run Of River, yaitu PLTA yang menggunakan aliran sungai langsung. Dari data yang didapatkan PT. Indonesia Power, Sub Unit PLTA Parakan Kondang memproduksi listrik sebesar 7,5 MW dengan debit konstan 6 m3 /detik.

**H.4 Kawasan Pendidikan Tinggi**

Kabupaten Sumedang memiliki Kawasan pendidikan tinggi dengan luas sekitar 370 Ha terletak di Kecamatan Jatinangor terdiri dari Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia. Sementara itu, terdapat pula perguruan tinggi di wilayah perkotaan Sumedang, yaitu Universitas Sebelas April dengan multidisiplin ilmu, dan Unversitas Winaya Mukti di Kecamatan Tanjungsari yang merupakan sekolah tinggi pertanian. Keberadaan kawasan pendidikan tinggi, khususnya di Jatinangor, menyebabkan meningkatkatnya penggunaan ruang untuk kebutuhan akomodasi seperti perumahan, kos-kosan, hingga apartemen.

### 2.1.2.Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2020 semester II mengenai Jumlah Penduduk, Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga yang tersebar di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.159.454 jiwa yang terdiri atas 584.770 jiwa penduduk laki-laki (50,43%) dan 574.684 jiwa penduduk perempuan (49.57%). Dengan demikian jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4.996 jiwa. Dengan besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,75, dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai angka 744 jiwa per $Km^2$

dan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.245 jiwa per Km$^2$.

Pertambahan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggung sebanyak 1.889 jiwa, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Conggeang dengan pengurangan penduduk sebanyak 403 jiwa.

**Tabel 2.8**
**Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km$^2$) | Kepadatan (Jiwa/Km$^2$) | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wado | 44.064 | 84,27 | 523 | 542 |
| 2 | Jatinunggal | 45.893 | 72,12 | 636 | 439 |
| 3 | Darmaraja | 36.978 | 49,38 | 749 | (70) |
| 4 | Cibugel | 24.646 | 59,52 | 414 | 252 |
| 5 | Cisitu | 30.481 | 65,03 | 469 | (151) |
| 6 | Situraja | 42.095 | 43,23 | 974 | (136) |
| 7 | Conggeang | 28.928 | 106,98 | 270 | (403) |
| 8 | Paseh | 38.141 | 31,62 | 1,206 | (311) |
| 9 | Surian | 11.623 | 70,88 | 164 | 27 |
| 10 | Buahdua | 32.934 | 107,68 | 306 | 60 |
| 11 | Tanjungsari | 84.128 | 44,86 | 1,875 | 488 |
| 12 | Sukasari | 33.187 | 41,82 | 794 | 1.147 |
| 13 | Pamulihan | 61.845 | 50,70 | 1,220 | 1.045 |
| 14 | Cimanggung | 86.799 | 55,55 | 1,563 | 1.889 |
| 15 | Jatinangor | 90.861 | 31,60 | 2,875 | 387 |
| 16 | Rancakalong | 40.788 | 55,07 | 741 | 323 |
| 17 | Sumedang Selatan | 80.590 | 92,51 | 871 | 63 |
| 18 | Sumedang Utara | 98.636 | 30,40 | 3,245 | 354 |
| 19 | Ganeas | 25.915 | 22,90 | 1,132 | (343) |
| 20 | Tanjungkerta | 34.524 | 43,72 | 790 | (341) |
| 21 | Tanjungmedar | 26.272 | 60,67 | 433 | 123 |
| 22 | Cimalaka | 62.008 | 43,29 | 1,432 | (137) |
| 23 | Cisarua | 20.860 | 17,71 | 1,178 | (132) |
| 24 | Tomo | 23.465 | 84,74 | 277 | 79 |
| 25 | Ujung Jaya | 31.385 | 86,23 | 364 | (338) |
| 26 | Jatigede | 22.408 | 106,24 | 211 | 140 |
| | **Total Kabupaten** | **1.159.454** | **1.558,72** | **744** | **4.996** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020), Ditayanagkan dalam SIPD*

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.9 dibawah ini.

**Gambar 2.9**
**Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2020**

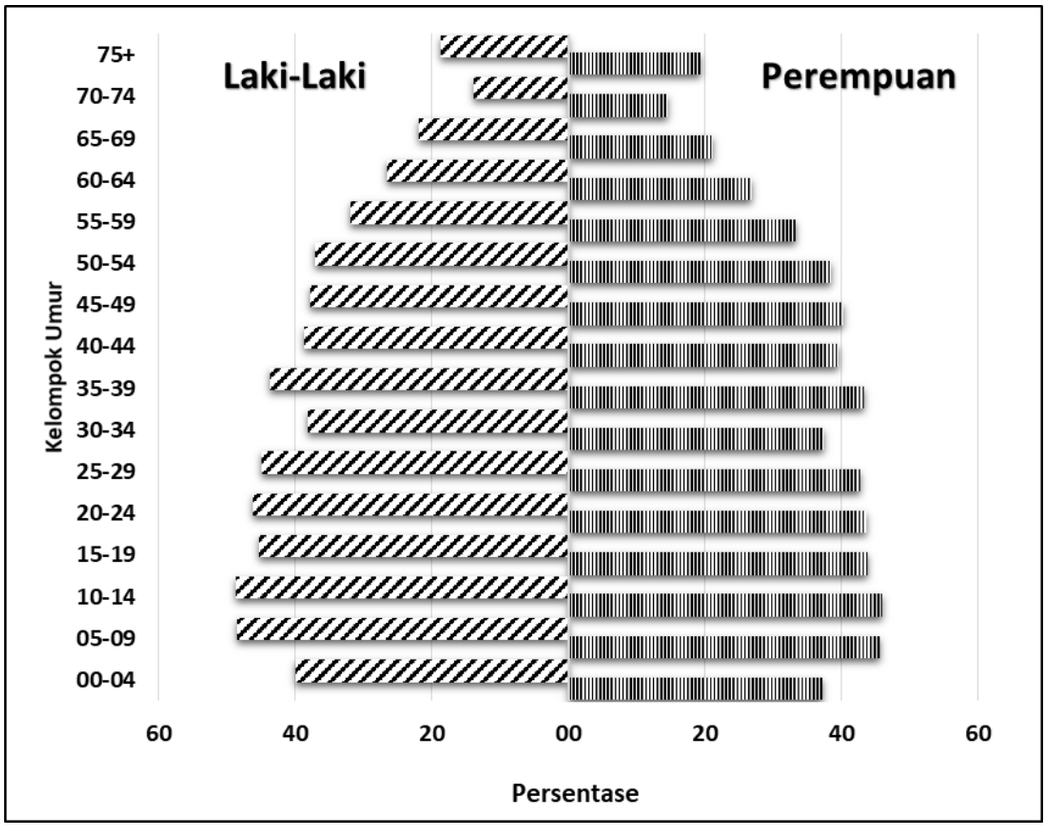


*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2021)*

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 19 tahun) sebesar 32,04 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 67,46 persen, dan jumlah penduduk lansia ( ≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 8,79 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2020 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang.

ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.10**
**Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

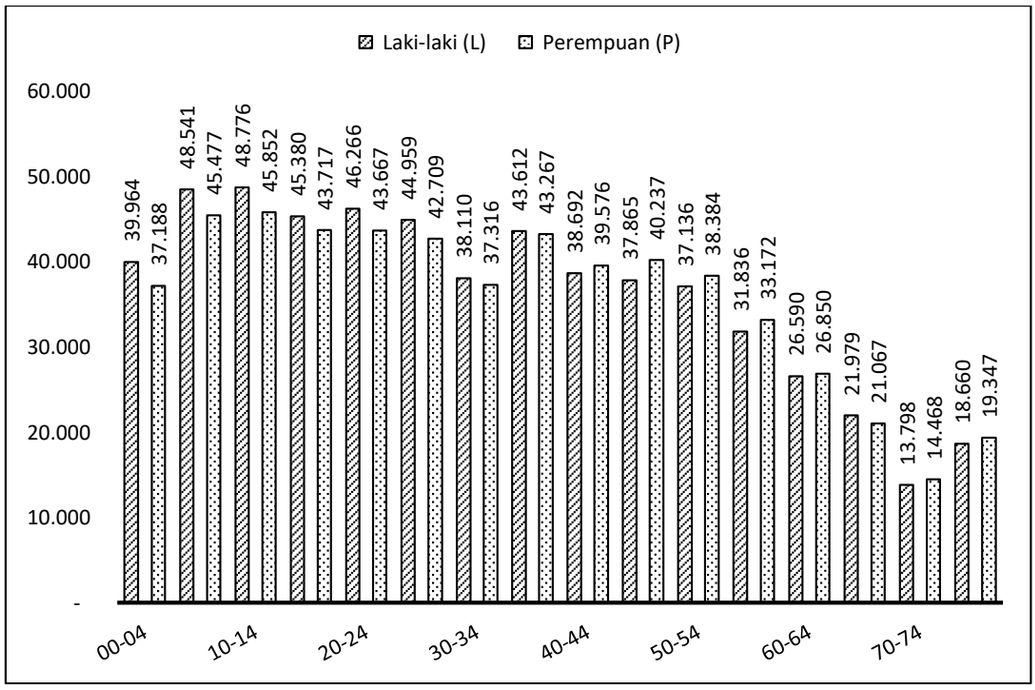


*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020), Dityayangkan dalam SIPD*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk penduduk laki-laki jumlah terbesar berada pada rentang umur 15 – 19 Tahun sebanyak 487.917 jiwa dengan proporsi sebesar 4,20%, dan jumlah penduduk Laki-laki terendah berada pada rentang umur 70-74 Tahun sebanyak 11.751 jiwa atau sebesar 1,01%. Begitu pula bagi penduduk perempuan, jumlah terbesar berada direntang usia 15 – 19 Tahun sebanyak 47.258 jiwa atau 4,07% dari jumlah total penduduk perempuan, sedangkan jumlah terkecil berada direntang usia 70 – 74 Tahun sebanyak 12.719 jiwa atau 1,09%.

Rentang usia produktif yang berada pada usia 15 – 49 Tahun, melihat tabel di atas merupakan keuntungan bagi Kabupaten Sumedang, karena jumlah usia produktif tersebut jumlahnya di atas jumlah usia tua. Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri,

dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 94,74% dari penduduk yang wajib mempunyai KTP, dengan persentase data ganda atau anomali sebesar 0,35%, sehingga penduduk yang tidak mempunyai KTP di Kabupaten Sumedang terhitung relatif rendah. Hal ini meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kependudukan, yaitu di skor 80,18.

**Gambar 2.11**
**Arsitektur Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

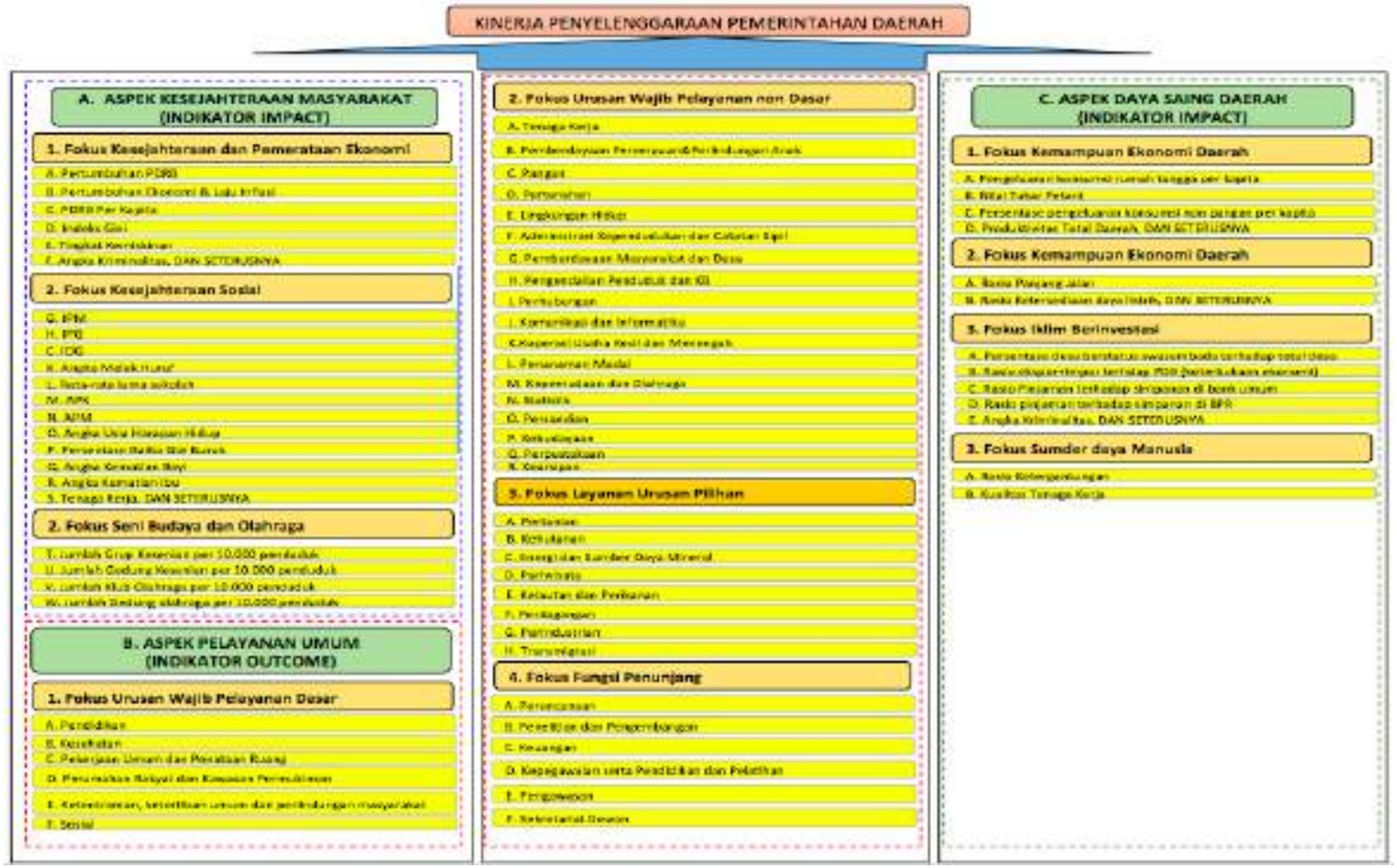


*Sumber : Lampiran Permendagri 86/2017 (diolah)*

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Impact/Makro)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sumedang.

#### 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 mencapai Rp35,490 trilyun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp51,12 milyar atau sekitar 0,14%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sebesar Rp23,665 trilyun atau turun 1,12% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan disajikan pada Gambar 2.12.

**Gambar 2.12**
**Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang**
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010**
**(trilyun rupiah)**

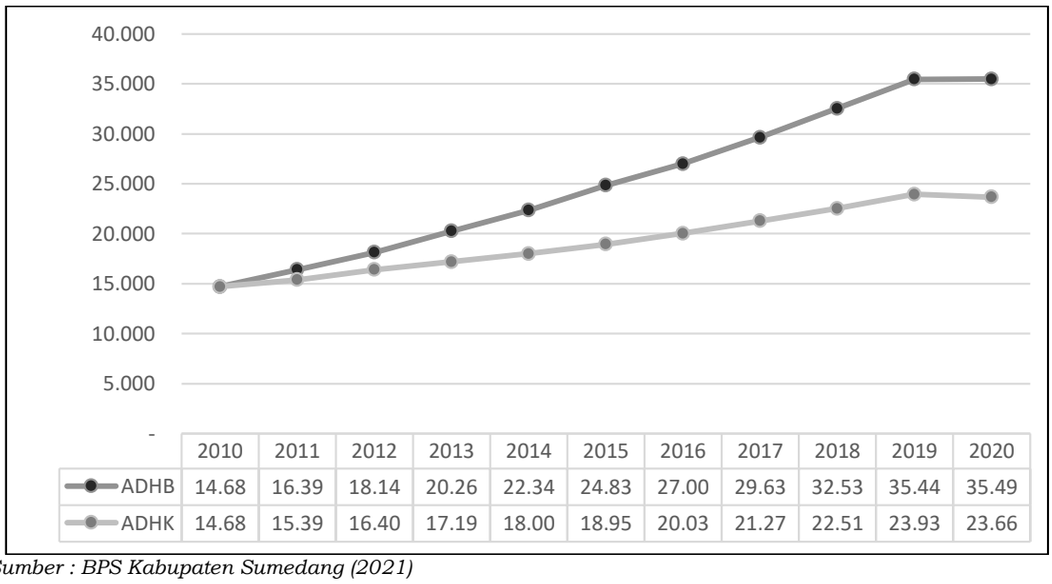


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADHB | 14.68 | 16.39 | 18.14 | 20.26 | 22.34 | 24.83 | 27.00 | 29.63 | 32.53 | 35.44 | 35.49 |
| ADHK | 14.68 | 15.39 | 16.40 | 17.19 | 18.00 | 18.95 | 20.03 | 21.27 | 22.51 | 23.93 | 23.66 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

Berdasarkan grafik di atas, terdapat kontradiksi antara pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan pada Tahun 2020. PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan.

**2.2.1.2 Struktur Perekonomian**

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Secara umum kontribusi terbesar terhadap PDRB didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu 1) sektor Industri Pengolahan; 2) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta 4) sektor Konstruksi. Sejak Tahun 2019 terjadi pergeseran peranan tertinggi dalam PDRB Kab. Sumedang yaitu peranan Industri Pengolahan yang mampu melebihi peranan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Berdasarkan gambar 2.13, di antara keempat lapangan usaha tersebut, hanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif, sedangkan 3 sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan. Meski demikian, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan belum menggeser posisi industri Pengolahan sebagai sektor dengan persentase distribusi tertinggi. Dari 17 sektor lapangan usaha, 12 sektor mengalami pertumbuhan negatif, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar minus 7,78%, diikuti sektor Jasa Perusahaan menurun sebesar 6,73%, sektor Transportasi dan Pergudangan menurun sebesar 6,57%, sektor Real Estate menurun sebesar 5,21% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menurun sebesar 4,50%.

**Gambar 2.13**
**Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha**
**Tahun 2020 (Persen)**

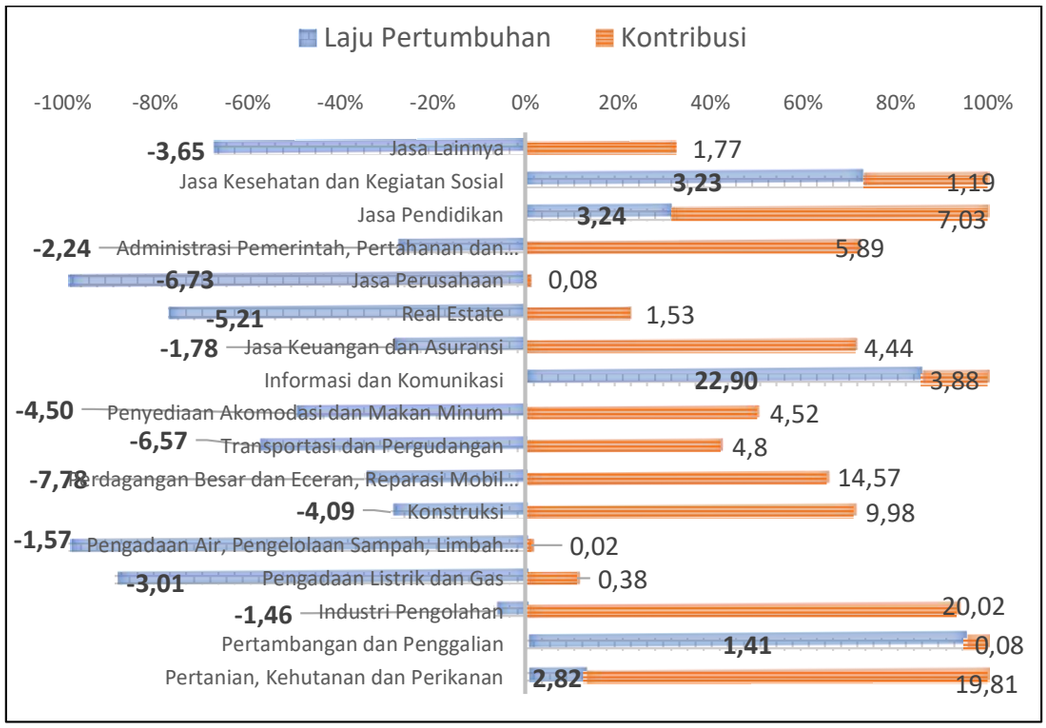


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2021)*

PDRB juga dipengaruhi oleh komponen-komponen lain, diantaranya Komponen Pengeluaran. Pada Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa Komponen Pengeluaran Rumah Tangga masih memdominasi PDRB, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto.

**Gambar 2.14**
**PDRB berdasarkan Komponen Pengeluaran Tahun 2010 – 2020 (persen)**

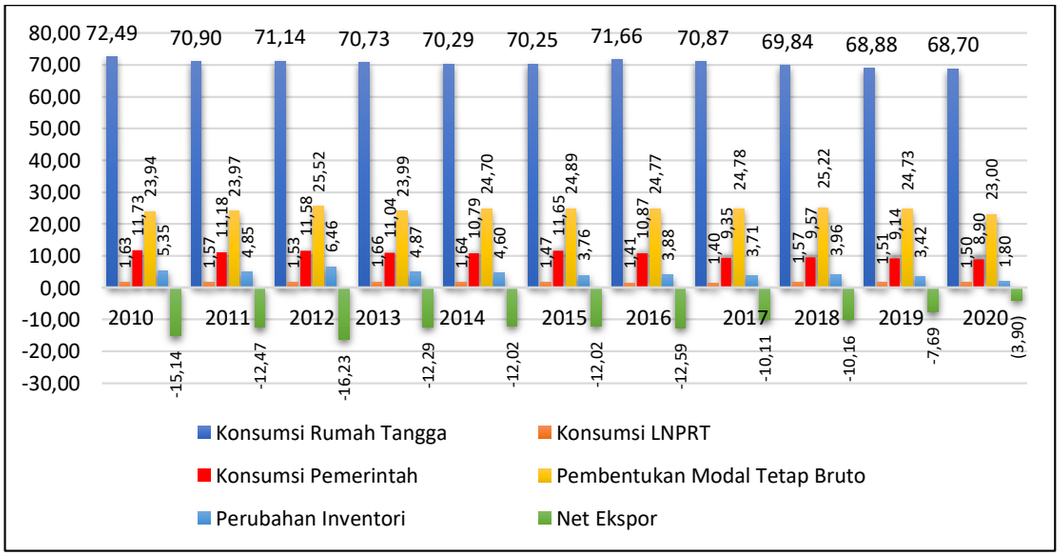


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.2.1.3 Laju Pertumbuhan Perekonomian

Jika dilihat dari Gambar 2.15, Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan. Namun Tahun 2020 merupakan tahun terjadinya bencana nasional berupa penyebaran pandemik COVID-19 membuat perekonomian Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,12%. Angka tersebut masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa yang berada pada angka minus 2,44% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar minus 2,07%

**Gambar 2.15**
**Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang**
**(persen)**

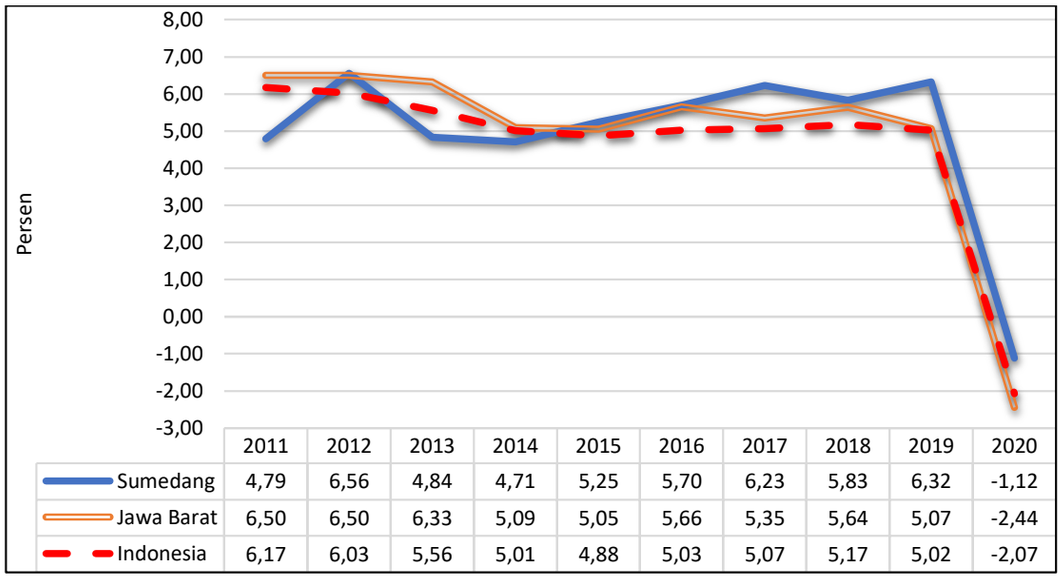


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumedang | 4,79 | 6,56 | 4,84 | 4,71 | 5,25 | 5,70 | 6,23 | 5,83 | 6,32 | -1,12 |
| Jawa Barat | 6,50 | 6,50 | 6,33 | 5,09 | 5,05 | 5,66 | 5,35 | 5,64 | 5,07 | -2,44 |
| Indonesia | 6,17 | 6,03 | 5,56 | 5,01 | 4,88 | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 | -2,07 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

Gambar 2.16. menunjukkan bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Tahun 2020 adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 22,90%. Lapangan usaha lain yang memiliki pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor Jasa Pendidikan sebesar 3,24%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,23%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,82% dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,41%. 12 sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan.

**Gambar 2.16**
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2020 (persen)**

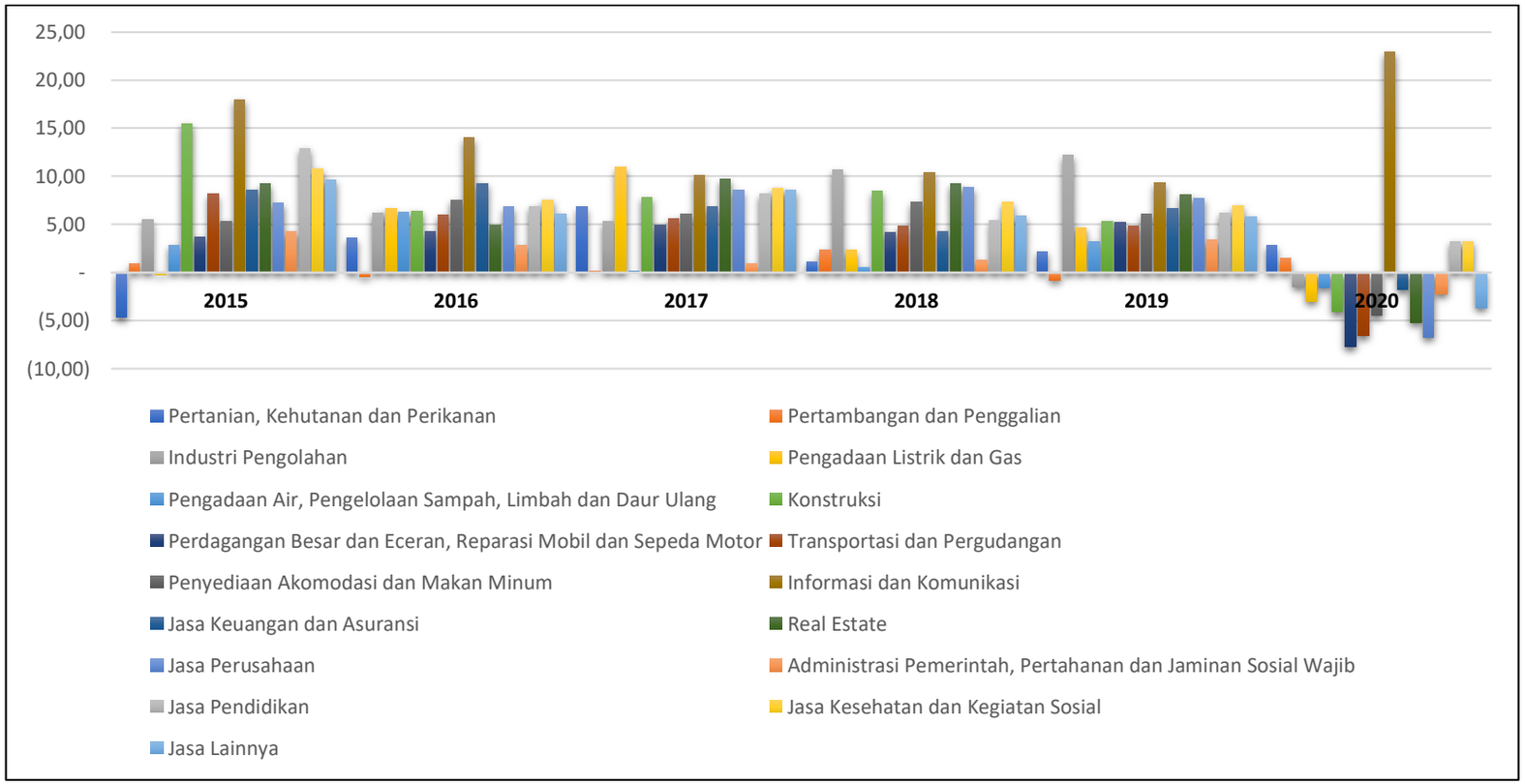


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)*

### 2.2.1.4. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan pada rentang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp35,49 juta meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih berada dibawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp41,81 juta, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.17.

**Gambar 2.17**
**Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang**
**(juta rupiah)**

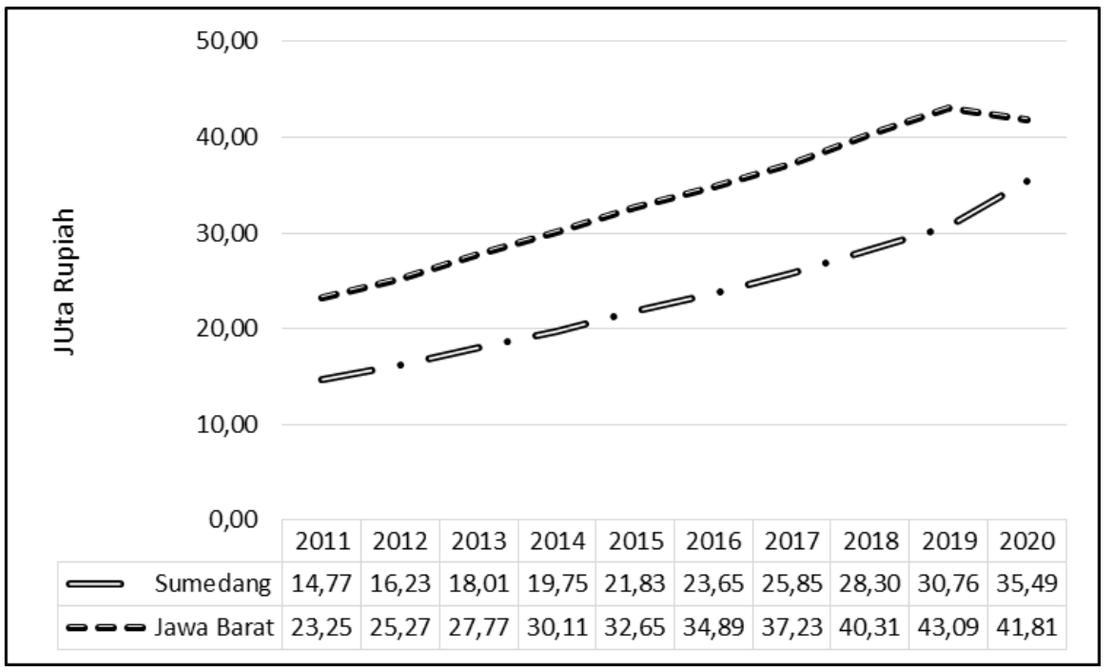


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumedang | 14,77 | 16,23 | 18,01 | 19,75 | 21,83 | 23,65 | 25,85 | 28,30 | 30,76 | 35,49 |
| Jawa Barat | 23,25 | 25,27 | 27,77 | 30,11 | 32,65 | 34,89 | 37,23 | 40,31 | 43,09 | 41,81 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.2.1.5 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Jika diamati Kabupaten Sumedang berada dibawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang masih berada di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara umum, seperti yang tampak pada Gambar 2.18

**Gambar 2.18**
**Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota**
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**
**(rupiah)**

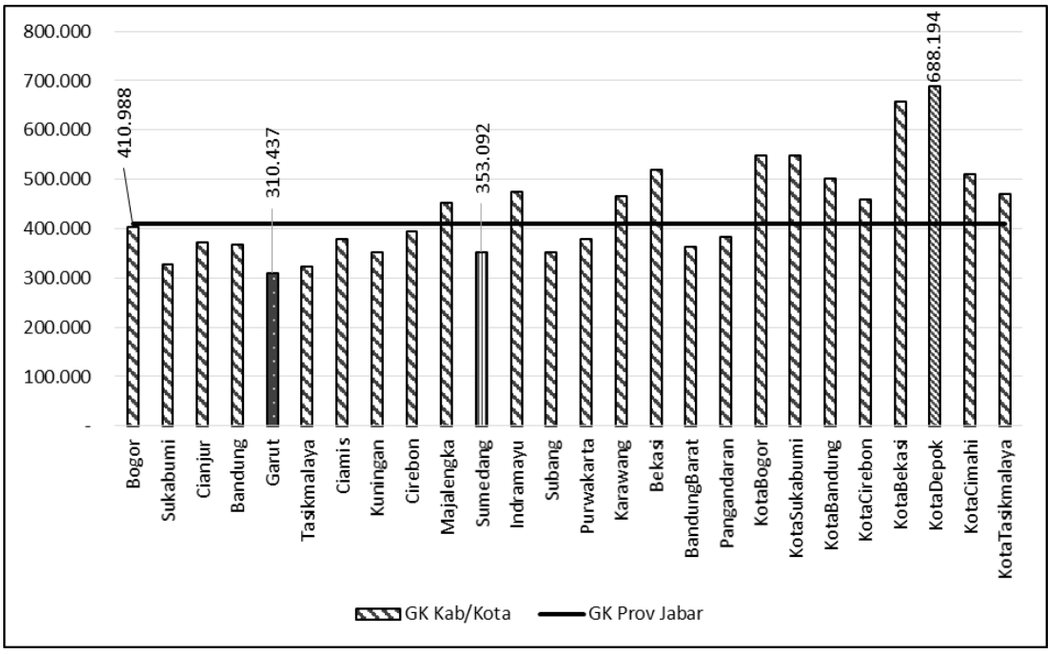


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai 10,26% atau naik sekitar 1,21 poin dari tahun sebelumnya dengan kisaran penduduk sekitar 118 ribu jiwa.

**Gambar 2.19**
**Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2020**

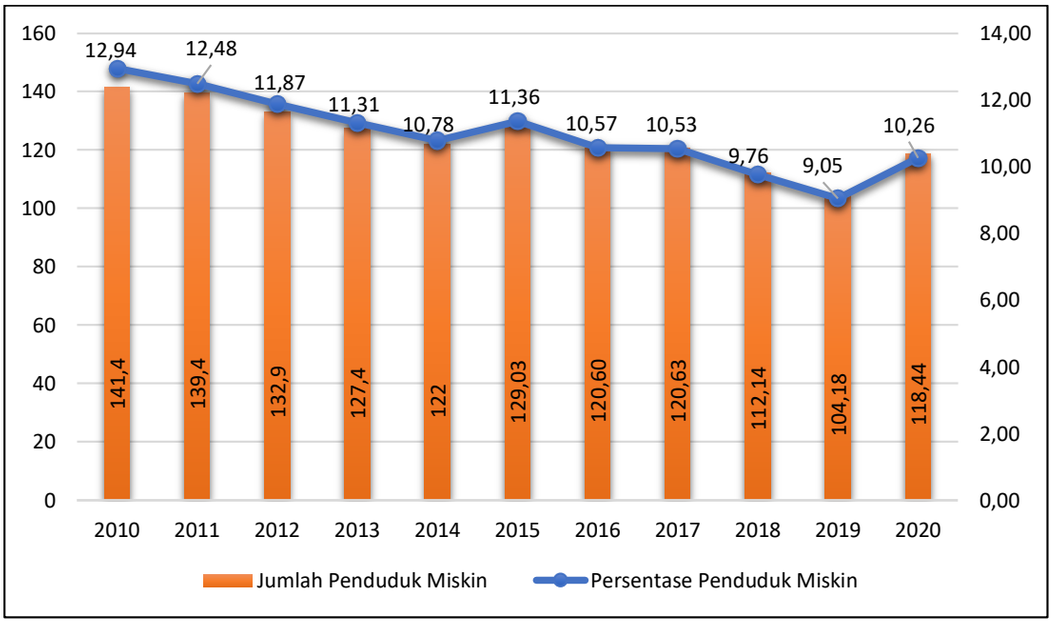


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021), Ditaya*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,2 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan daerah perbatasan Kabupaten Sumedang, pada Tahun 2020 penduduk miskin terendah terdapat di Kota Bandung dengan jumlah 100 ribu jiwa, kemudian penduduk miskin kedua terendah adalah Kabupaten Sumedang, pada urutan ketiga ditempati Kabupaten Majalengka sebesar 138,20 ribu jiwa.

**Gambar 2.20**
**Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang dan Daerah Perbatasan Tahun 2018-2020**

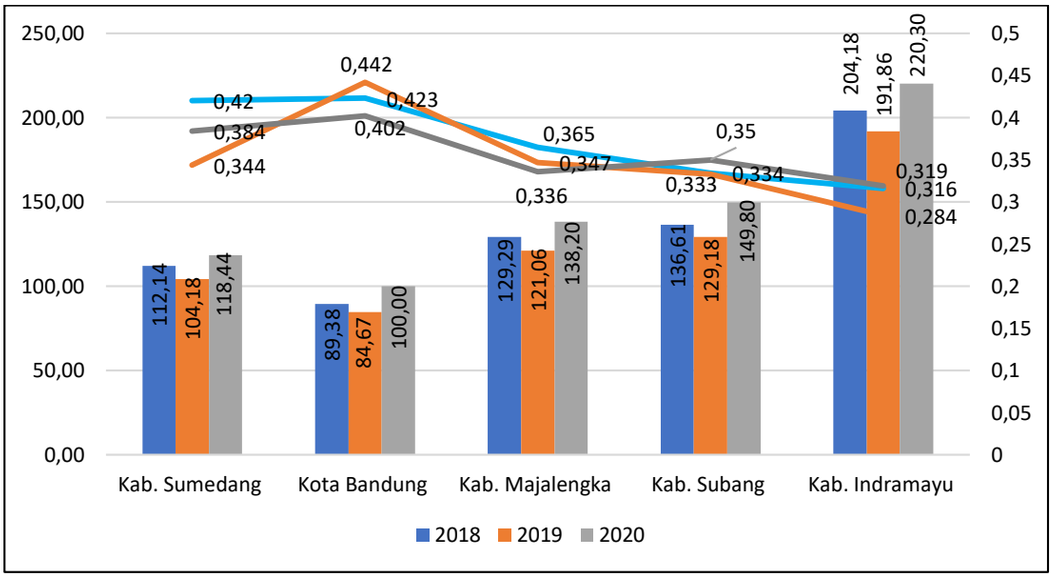


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)*

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan indeks 0,040 poin dari 0,344 di Tahun 2019 menjadi 0,384 di Tahun 2020. Hal ini bermakna terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Sumedang masih dibawah capaian Provinsi Jawa Barat (0,403 pada Tahun 2020) dan capaian nasional (0,391 pada Tahun 2020).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, Indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk 10 Tahun ini dengan capaian fluktuatif dan Tahun 2020 sebesar 1,72% lebih tinggi 0,59% dari Provinsi Jawa Barat dengan capaian 1,13%.

**Gambar 2.21**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**
**Kab. Sumedang dan Prov. Jawa Barat**
**Tahun 2010-2020**

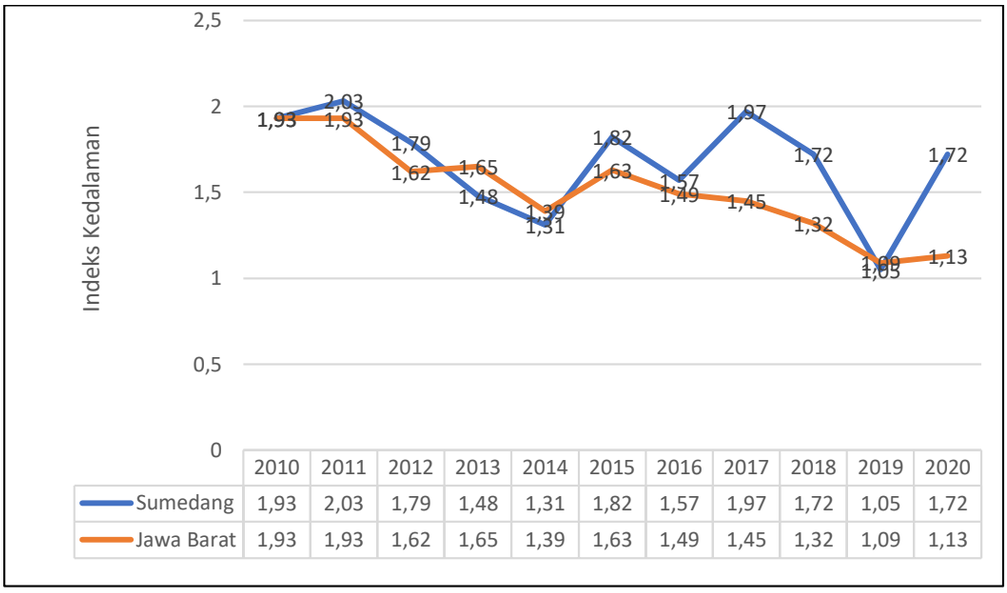


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumedang | 1,93 | 2,03 | 1,79 | 1,48 | 1,31 | 1,82 | 1,57 | 1,97 | 1,72 | 1,05 | 1,72 |
| Jawa Barat | 1,93 | 1,93 | 1,62 | 1,65 | 1,39 | 1,63 | 1,49 | 1,45 | 1,32 | 1,09 | 1,13 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)*

**Gambar 2.22**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota**
**di Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2020**

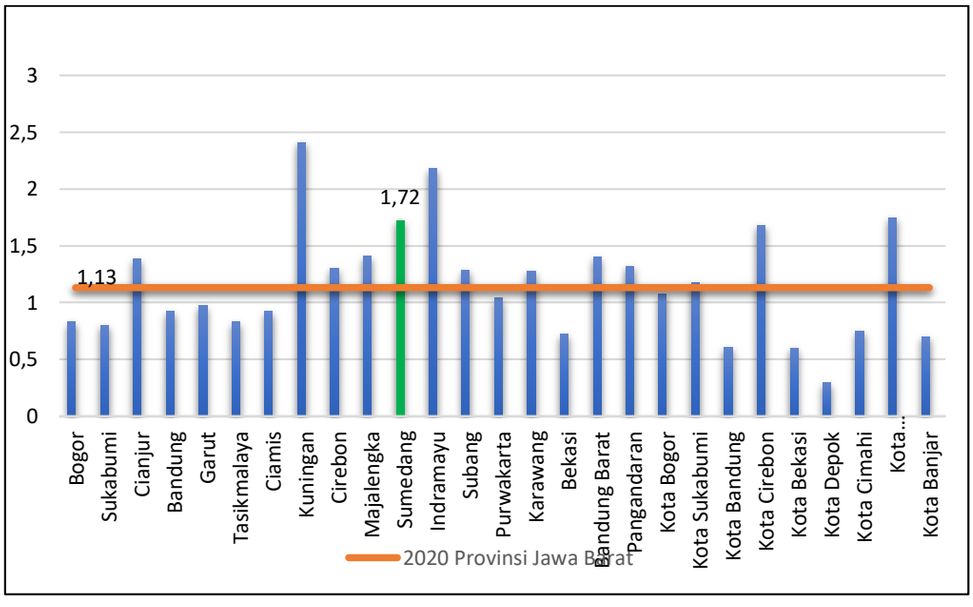


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)*

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indek keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk 10 Tahun ini dengan sangat fluktuatif dan Tahun 2020 sebesar 0,42% lebih tinggi 0,19% dari Provinsi Jawa Barat dengan capaian 0,23%.

**Gambar 2.23**
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**
**Kab. Sumedang dan Prov. Jabar**
**Tahun 2010-2020**

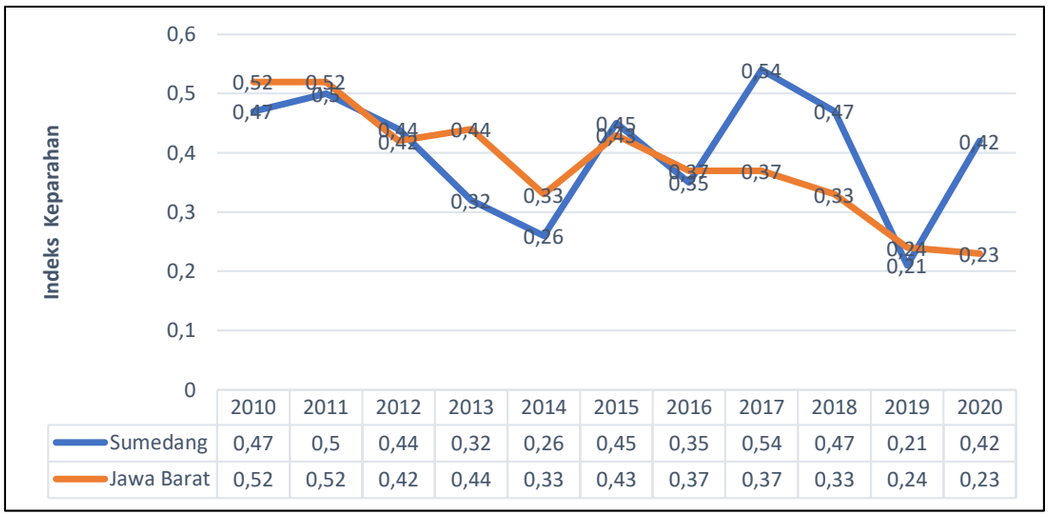


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumedang | 0,47 | 0,5 | 0,44 | 0,32 | 0,26 | 0,45 | 0,35 | 0,54 | 0,47 | 0,21 | 0,42 |
| Jawa Barat | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,44 | 0,33 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,23 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)*

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sumedang jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Tahun 2020 berada di peringkat 3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.24**
**Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota**
**di Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2020**

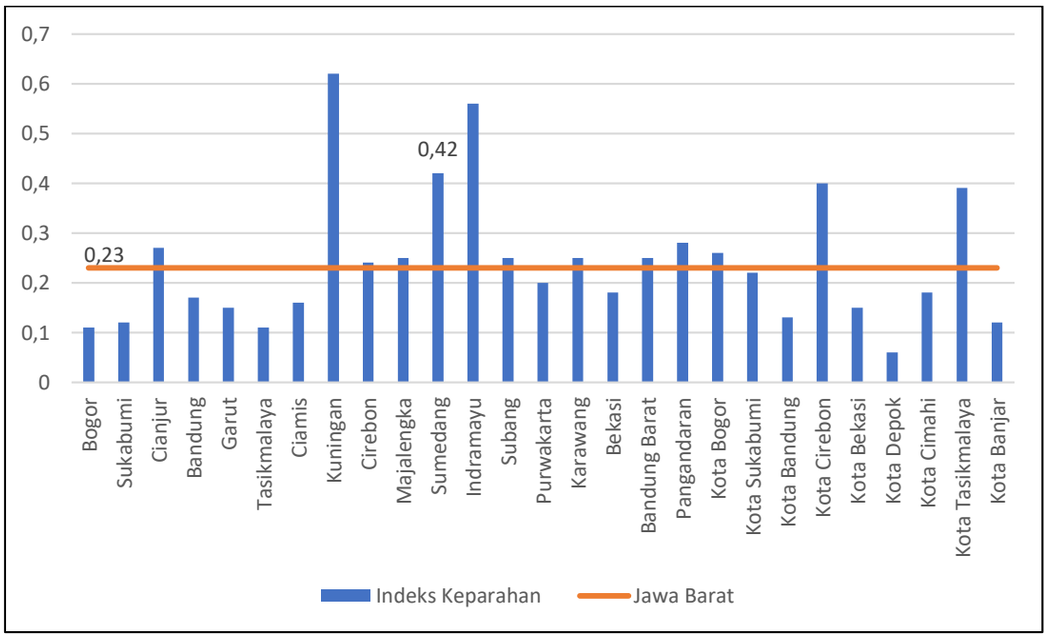


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021*

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah dan pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**
**Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (Tahun)**

| No | Komponen IPM | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Asia Harapan Hidup (AHH) | 71,91 | 71,96 | 72,00 | 72,14 | 72,29 | 72,43 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,9 | 12,91 | 12,93 | 12,94 | 12,96 | 12,97 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 7,66 | 7,72 | 7,98 | 8,17 | 8,27 | 8,51 |
| 4 | Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) | 9,279 | 9,339 | 9,569 | 9,570 | 10,410 | 10,220 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Sumedang terus mengalami kenaikan. UHH Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mencapai 72,43 tahun, ini berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir di Tahun 2019 mempunyai harapan usia sampai 72,43 tahun atau lebih lama 0,14 tahun dari tahun sebelumnya. Perkembangan UHH mengalami tren positif walaupun peningkatannya tidak terlalu besar. Peningkatan UHH dapat berindikasi adanya perbaikan status

kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, walaupun peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Sumedang masih lebih lambat dari pada Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan cenderung semakin tertinggal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Komponen HLS berdasarkan data di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sekitar 0,01 tahun setiap tahunnya. Sehingga dapat diperkirakan untuk anak di Tahun 2020 yang berusia 7 tahun dapat memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,97 tahun untuk sampai jengjang diploma lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Tahun 2020 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,51 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,51 tahun atau lebih lama 0,24 tahun dari Tahun 2019. Ini berarti kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang mengalami perbaikan.

Salah satu indikator membaiknya IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita ini dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2020 pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Sumedang sebesar Rp10.220.000,00 (*sepuluh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*). Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sumedang selama setahun sebesar ± Rp15 juta-an dan mengalami peningkatan sebesar 30,80% dari tahun sebelumnya.

Target capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, dengan tujuan target tersebut melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Kabupaten Sumedang masih berada pada urutan ke-12 di Jawa Barat, sedikit tertinggal dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Jawa Barat. Seperti pada Gambar 2.25.

**Gambar 2.25**
**IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat**
**Tahun 2020**

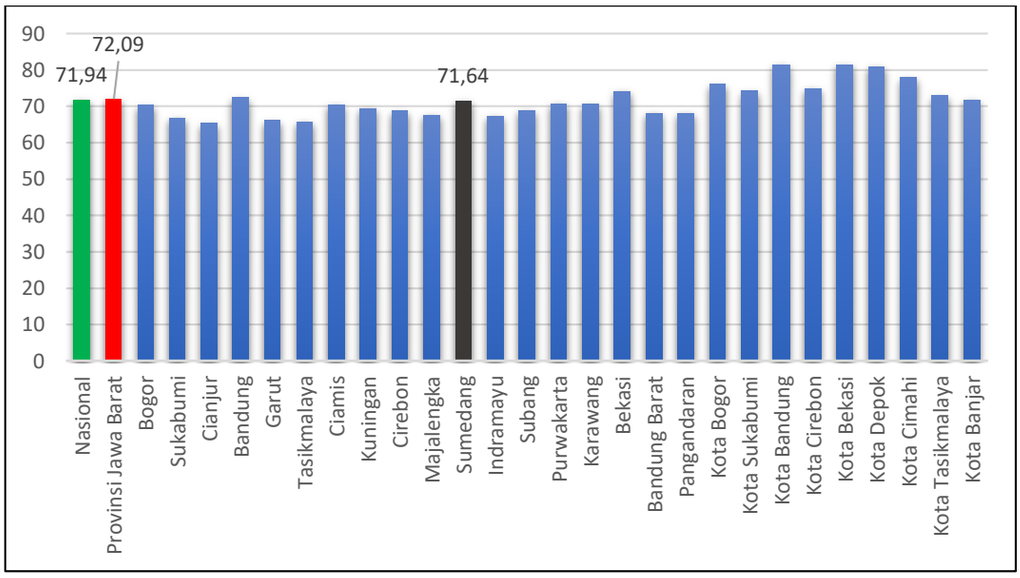


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

Capaian pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tiap tahunnya, seieiring dengan tren kenaikan IPM secara Nasional dan Provinsi. Selama 6 (enam) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan capaian IPM di Kabupaten Sumedang (70,48) masih di bawah rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Barat (70,94) dengan rata-rata pertumbuhan IPM Nasional (70,99). Walaupun pada masa Pandemi Covid-19, di Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil mencapai IPM yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

**Gambar 2.26**
**Perbandingan Capaian IPM**
**Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2010-2020**

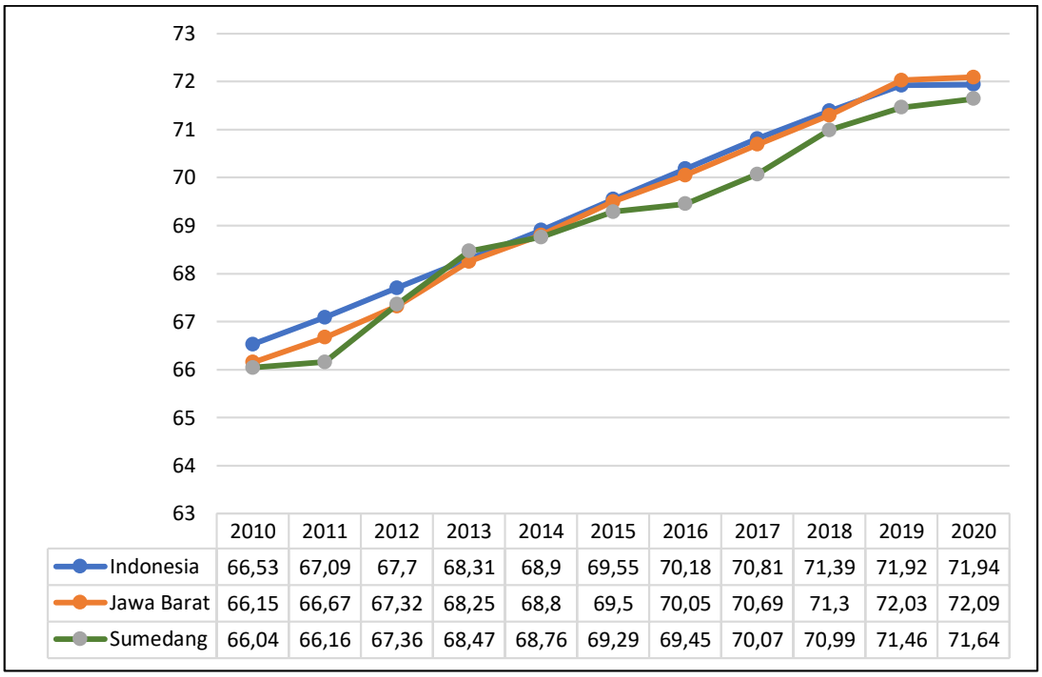


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 66,53 | 67,09 | 67,7 | 68,31 | 68,9 | 69,55 | 70,18 | 70,81 | 71,39 | 71,92 | 71,94 |
| Jawa Barat | 66,15 | 66,67 | 67,32 | 68,25 | 68,8 | 69,5 | 70,05 | 70,69 | 71,3 | 72,03 | 72,09 |
| Sumedang | 66,04 | 66,16 | 67,36 | 68,47 | 68,76 | 69,29 | 69,45 | 70,07 | 70,99 | 71,46 | 71,64 |

*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2021)*

### 2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.

IPG Kabupaten Sumedang Tahun 2020 merupakan terbaik di Jawa Barat mengalahkan wilayah kota dengan poin 95,18, bahkan Provinsi Jawa Barat hanya mendapat poin 89,20. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin setara.

**Gambar 2.27**
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/ Kota**
**di Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2020**

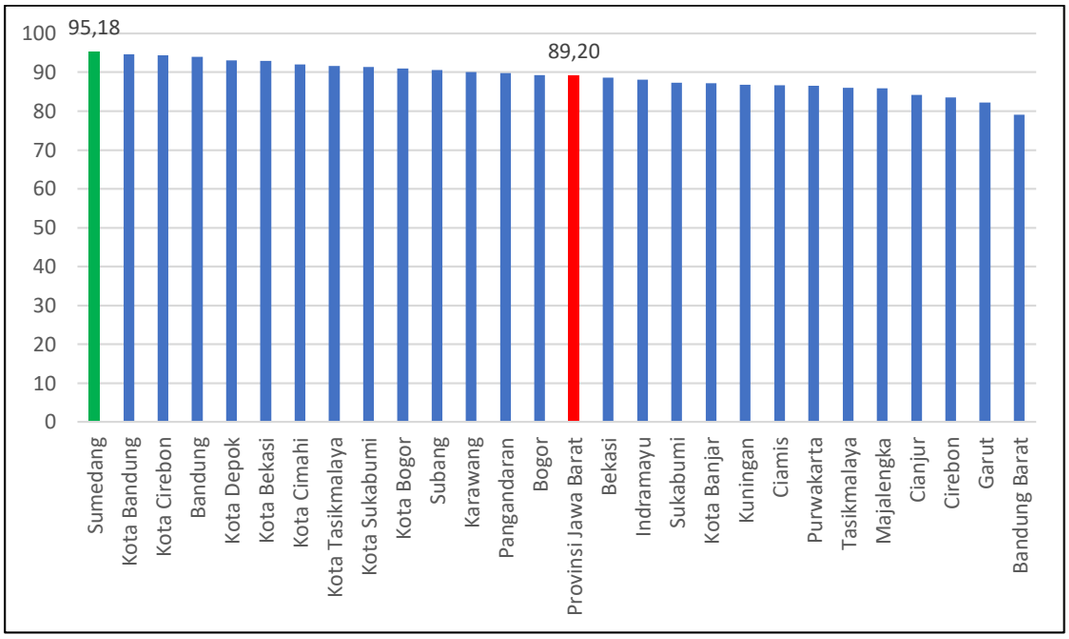


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan indikator berupa peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG Kabupaten Sumedang selama 4 (empat) tahun terakhir memiliki rata-rata 70,09 atau lebih baik dari Jawa Barat yang rata-ratanya 69,99. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang, peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik secara rata-rata lebih baik dari peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 2.28**
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota**
**di Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2017-2020**

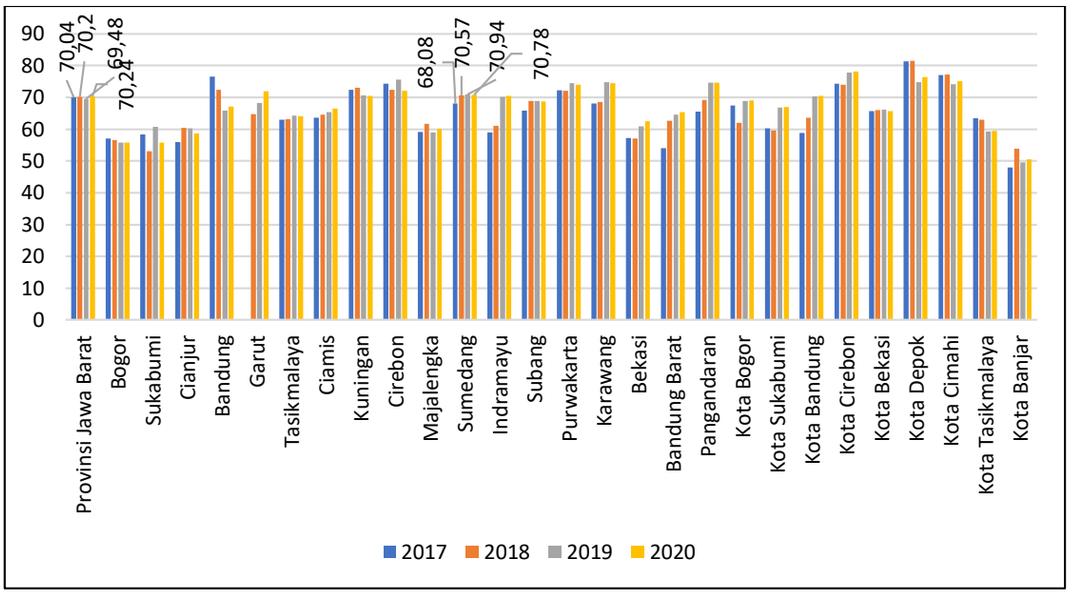


*Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.2.2.4 Indikator Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut, sehingga peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas Pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

**Tabel 2.10**
**APK, APM, dan Persentase Guru Berprestasi**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 109,96 | 102,45 | 109,33 | 106,75 | 106,83 | 99,34 |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 86,54 | 89,23 | 96,60 | 103,42 | 103,62 | 97,96 |
| 3. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 99,75 | 98,04 | 97,93 | 105,23 | 105,34 | 97,45 |
| 4. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 79,53 | 89,65 | 83,51 | 102,78 | 102,99 | 88,51 |
| 5. | Persentase Guru yang Bersertifikasi | n/a | n/a | n/a | 65,03 | 63,26 | 90,23 |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Sumedang (2021), Diatayangkan dalam SIPD*

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK terdiri dari APK Paud, SD dan SMP. Tahun 2019 APK SD mencapai 106,83% dan APK SMP mencapai 103,62%, namun di Tahun 2020 menurun menjadi di bawah 100%. APK SD menjadi sebesar 99,34% dan APK SMP menjadi sebesar 97,96%. Kemungkinan penyebab turunnya persentase APK SD dan APK SMP ini karena adanya penurunan keterlibatan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Tahun 2019 sebesar 105,34% dan mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi sebesar 97,45%. Untuk APM SMP mengalami penurunan dari 102,99% di Tahun 2019 menjadi 88,51% di Tahun 2020.

Peningkatan mutu pendidikan juga tak luput dari peran serta guru sebagai pengajar/pendidik. Persentase guru di Kabupaten Sumedang yang bersertifikasi di Tahun 2019 sebesar 63,26% dan trennya meningkat di tahun berikutnya menjadi 90,23%.

### 2.2.2.5 Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Desa Siaga Aktif, Jumlah Kematian Bayi, dan Jumlah Kematian Ibu sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.11**
**Indikator Kesehatan Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Balita Gizi Buruk (%) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 2 | Desa Siaga Aktif (%) | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah Kematian Bayi (jiwa) | 181 | 120 | 145 | 155 | 134 | 137 |
| 4 | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) | 84 | 111 | 22 | 16 | 13 | 21 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Jumlah Kematian Bayi sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2020 sebanyak 137 jiwa dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi kasus kematian bayi 134 jiwa bayi.

Jumlah Kematian Ibu menurut SPM Kementerian Kesehatan ditetapkan 0 kasus, namun di Kabupaten Sumedang kelahiran belum mencapai 100.000 sehingga indikator yang digunakan adalah Jumlah Kematian Ibu (jiwa). Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 21 kasus kematian ibu, meningkat dari Tahun 2019 yang mencapai 13 kasus kematian ibu. Hal ini disebabkan oleh tenaga kesehatan yang kurang untuk menangani ibu melahirkan serta ketika terjadi komplikasi, rujukan ke Rumah Sakit tidak memungkinkan sebab Rumah Sakit tengah berkonsentrasi untuk perawatan Pasien COVID-19.

### 2.2.2.6 Indikator Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

**Tabel 2.12**
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – Tahun 2020 (%)**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 9,00 | 8,07 | 7,15 | 7,52 | 7,63 | 9,89 |
| 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | n/a | 61,21 | 62,06 | 62,01 | 63,98 | 68,96 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Sumedang jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 433.386 orang dengan jumlah TPT-nya di Tahun 2020 sebesar 9,89% jumlahnya meningkat dari Tahun 2019 yang hanya 7,63%. Dengan demikian TPT di Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebab jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengggangguran. Namun walaupun demikian Kabupaten Sumedang tetap memberikan perhatian khusus dalam hal mengurangi persentase TPT dengan terus mengupayakan peningkatan kompetensi masyarakat pencari kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2020 mengalami kenaikan 2,62% dari tahun sebelumnya yaitu 63,98% menjadi 68,96%. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang di rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni budaya dan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi daerah melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan pembangunan seni, budaya dan olahraga, perlu dilakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan, lembaga/organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan seni, budaya dan keolahragaan.

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Minat masyarakat kabupaten Sumedang akan budaya lokal menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Jumlah kelompok kesenian yang telah mendapat pembinaan dari Pemerintah juga menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah sanggar seni yang telah dibina mencapai 140 kelompok meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 138 kelompok.

Bidang keolahragaan di Kabupaten Sumedang secara organisasi ditangani oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani. Sehingga sampai dengan Tahun 2020, tercatat klub olahraga sebanyak 147 dan jumlah gedung olahraga sebanyak 785.

**Tabel 2.13**
**Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2018-2020**

| No | Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Sanggar Seni | 136 | 138 | 140 |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah Klub Olahraga | 145 | 145 | 147 |
| 4 | Jumlah Gedung Olahraga | 750 | 770 | 785 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2021)*

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan ini, pemerintah pusat membagi kewenangan tingkat pemerintahan berdasarkan jenjang pendidikan. Urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

**1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

APK PAUD Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebesar 80,60%. Angka ini menurun sebesar 8,93% dari tahun sebelumnya yang mencapai 89,53%. Penyebab menurunnya persentase APK PAUD diindikasikan karena banyak rumah tangga yang mempunyai anak rentang usia 4-6 tahun tidak mendaftarkan anaknya ke PAUD dikarenakan dampak pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dapat tertular Covid-19 dan proses belajar mengajar tidak efektif karena sistem pembelajaran secara online.

**Gambar 2.29**
**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

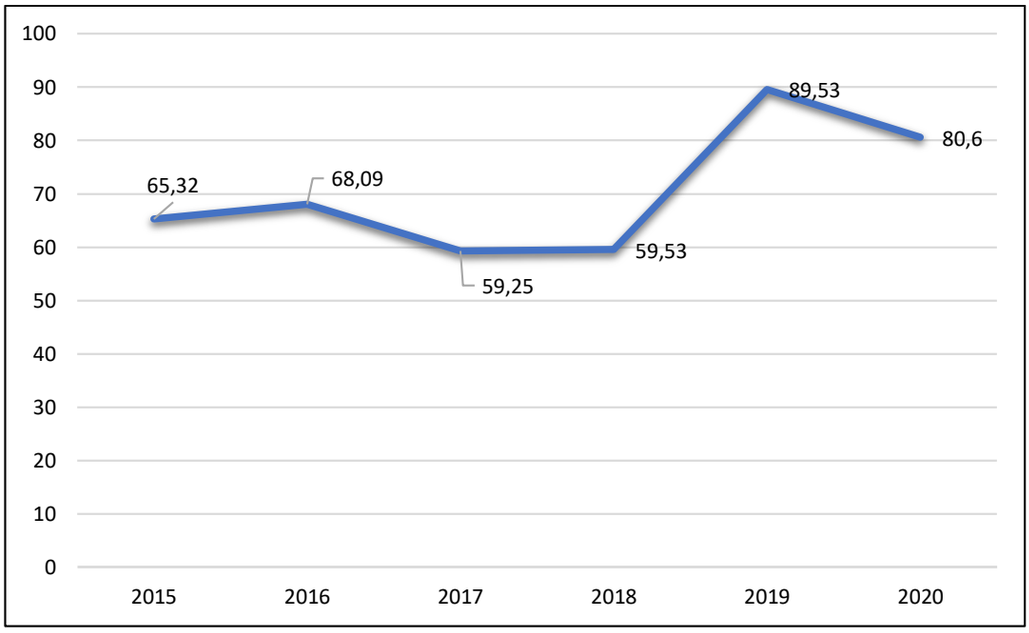


*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

## 2. Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan

Tidak semua masyarakat memiliki keberuntungan dapat mengenyam dan menyelesaikan pendidikan formal. Pemerintah menyediakan paket pendidikan non formal kesetaraan yang mencakup program paket A (setara SD/MI), paket B (setara SMP/MTs) dan paket C (setara SMA/SMK/MAN) yang memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MAN sehingga mereka yang memiliki ijazah Pendidikan Kesetaraan memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memasuki jenjang pekerjaan tertentu.

Tidak hanya memberikan kesempatan yang sama, pendidikan kesetaraan juga menjadi pengungkit kualitas SDM. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Terjadi peningkatan APK Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sumedang. APK Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 sebesar 1,63% meningkat menjadi 3% pada Tahun 2020. APK Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14**
**Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| APK Pendidikan Kesetaraan | n/a | n/a | n/a | 1,35 | 1,63 | 3 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)*

### 3. Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukan tingkat putus sekolah atau tidak menamatkan di suatu jenjang Pendidikan. Sesuai kewenangan, APS SD dan APS SMP di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami tren positif. Selama 2 (dua) tahun terakhir, Tahun 2019-2020 telah mencapai 0%. Capaian ini mengindikasikan semakin baik dan meratanya kondisi Pendidikan di Kabupaten Sumedang. Data APS SD dan SMP terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.15**
**Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0 |
| 2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,81 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 4. Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan dari SD ke SMP

Angka kelulusan atau angka yang menunjukkan telah diselesaikannya pendidikan pada jenjang tertentu. Angka Kelulusan jenjang Pendidikan SD ataupun SMP di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukan tren positif dan telah mencapai target nasional. Demikian juga untuk angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat pada Tahun 2017 angka melanjutkan mencapai lebih dari 100%, yaitu 100,29% bahkan pada Tahun 2020 mencapai 119,25%. Hal ini menunjukkan peningkatan minat murid dari luar Kabupaten Sumedang untuk melanjutkan pembelajaran/studi ke tingkat selanjutnya pada sekolah

yang berada di Kabupaten Sumedang yaitu dari 1,91% pada Tahun 2019 menjadi 19,25% pada Tahun 2020.

**Gambar 2.30**
**Angka Kelulusan SD dan SMP serta Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)**

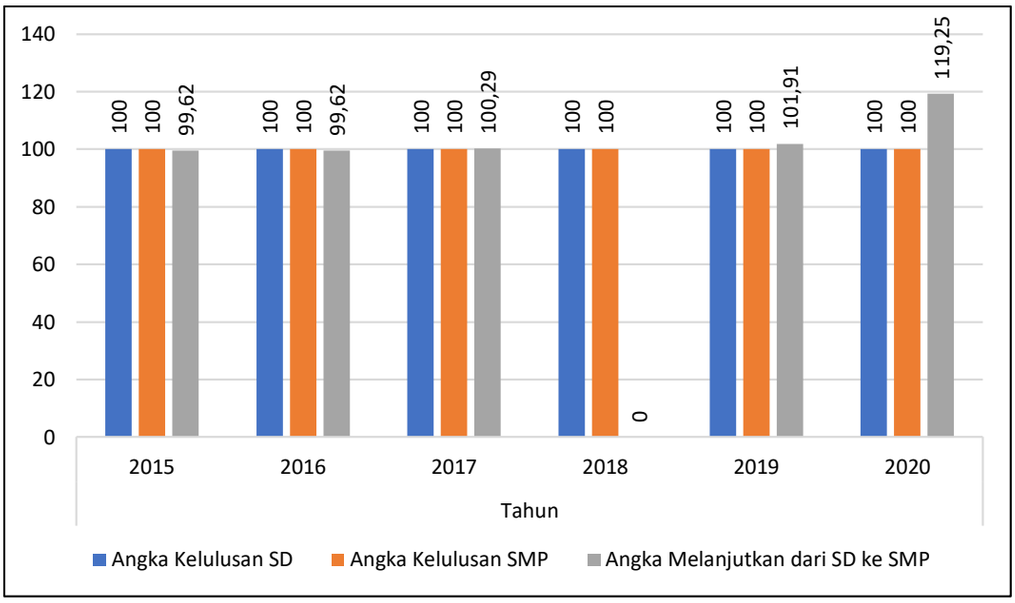


*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)*

## 5. Persentase Siswa Bersertifikat Diniyah

Pendidikan diniyah merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Data Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.16**
**Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumedang**
**Tahun Ajaran 2019-2020**

| No | Uraian | Tahun |
|---|---|---|
| | | 2019-2020 |
| 1 | Jumlah Lembaga | 1.396 |
| 2 | Jumlah Tenaga Pendidik : | |
| | a. MTD | 2.241 |
| | b. TPA | 1.550 |
| | c. TPQ | 2.529 |
| 3 | Siswa Bersertifikat Diniyah | 68.904 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020)*

Pembelajaran pendidikan diniyah dimulai pada Tahun Ajaran 2019/2020, sehingga untuk persentase siswa bersertifikat diniyah masih belum dapat dihitung besar persentasenya. Namun jumlah pendidikan

diniyah di tahun pertama telah mencapai 1.396 lembaga dengan total jumlah pendidik 6.380 orang.

### 6. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Tenaga pendidik atau guru merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan di suatu wilayah. Salah satu aspek penunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik atau guru adalah kualifikasi pendidikannya seperti memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV. Dari tabel di bawah, dapat dilihat persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan demikian pun dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut diindikasikan dari banyaknya Guru yang memiliki kualifikasi S-1/ D-IV yang memasuki usia pensiun, sementara guru yang baru masuk sebagian adalah guru-guru Kober/ PAUD yang berpendidikan SMA.

**Tabel 2.17**
**Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV | 85,77 | 84,40 | 83,58 | n/a | 96,27 | 94,50 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)*

### 7. Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik

Salah satu penunjang tercapainya peningkatan Pendidikan di suatu wilayah tidak lepas dari unsur penunjang bangunan sekolah sebagai sarana atau tempat proses pembelajaran/belajar mengajar dilaksanakan. Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Sumedang di Tahun 2018 hanya 13,45% kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2020 menjadi 37,92%. Peningkatan jumlah kondisi bangunan sekolah yang baik ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang sehingga siswa dapat mendapatkan Pendidikan dengan suasana yang nyaman.

**Tabel 2.18**
**Persentase Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase Bangunan Sekolah kondisi baik | 11,80 | 14,92 | 12,53 | 13,45 | 31,84 | 37,92 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2020), Ditayangkan dalam SIPD E-Database*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.19**
**Indikator Kinerja Urusan Pendidikan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Berdasarkan Renstra 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | 106,75 | 106,83 | 99,34 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 103,42 | 103,62 | 97,96 |
| 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 105,23 | 105,34 | 97,45 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 102,78 | 102,99 | 88,51 |
| 5 | Persentase Guru yang Bersertifikasi | 65,03 | 63,26 | 90,23 |
| 6 | Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik | 13,45 | 21,51 | 37,92 |
| 7 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD) | 1 : 27 | 1 : 27 | 1:17 |
| 8 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP) | 1 : 32 | 1 : 32 | 1:15 |
| 9 | APK PAUD | 88,44 | 89,53 | 80,60 |
| 10 | Persentase PAUD yang terakreditasi | 31,08 | 74,70 | 45,32 |
| 11 | Angka partisipasi kasar kesetaraan | 1,35 | 1,63 | 3,00 |
| 12 | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah | n/a | 0,00 | 100,00 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (2021)*

### 2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan dalam pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat dan dibantu oleh petugas kesehatan. Rasio posyandu digunakan untuk menghitung efektifitas pelayanan posyandu di suatu daerah.

**Tabel 2.20**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**

| Tahun | Jumlah Posyandu (Aktif) | Jumlah Balita (0-4 Tahun) | Rasio Posyandu Per Satuan Balita |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.644 | 86.901 | 1:52 |
| 2016 | 1.635 | 85.504 | 1:52 |
| 2017 | 1.636 | 96.072 | 1:58 |
| 2018 | 1.649 | 88.237 | 1:53 |
| 2019 | 1.659 | 83.034 | 1:50 |
| 2020 | 1.683 | 84.937 | 1:50 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita secara keseluruhan cenderung fluktuatif, walaupun sempat naik di Tahun 2017 dengan rasio 1:58 yang artinya satu posyandu melayani 58 balita, dan rasio ini merupakan rasio tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita hanya 1:50 dan merupakan rasio terendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Rasio tersebut telah melampaui rasio ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, yakni satu posyandu melayani 100 balita atau 1:100.

Penyebab rendahnya rasio ini seiring dengan penurunan jumlah balita. Penurunan Balita dari tahun ke tahun terjadi cukup signifikan, sedangkan jumlah posyandu yang aktif terus mengalami kenaikan.

2) Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per penduduk. Perkembangan rasio puskesmas di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 sampai 2020 mengalami tren penurunan yang cukup signifikan.

**Tabel 2.21**
**Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rasio Puskesmas (dan Pustu) per satuan penduduk | 1:35.539 | 1:32.631 | 1:32.755 | 1: 32.755 | 1:11.318 | 1:11.367 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2021)*

Melihat tabel di atas, rasio puskesmas per satuan penduduk sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan yaitu 1:30.000. Namun apabila diukur jumlah penduduk per kecamatan maka terdapat beberapa puskesmas yang mengalami kelebihan beban atau overload dalam melaksanakan pelayanan dengan rasio di atas rata-rata 20.000 penduduk yaitu: Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka. Lebih jelasnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.22**
**Rasio Pelayanan Puskesmas sesuai jumlah Penduduk**
**per Kecamatan di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Penduduk | Puskesmas | Kelebihan Beban |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wado | 44.064 | 1 | 14.06 |
| 2. | Jatinunggal | 45.893 | 1 | 15.893 |
| 3. | Darmaraja | 36.978 | 1 | 6.978 |
| 4. | Cibugel | 24.646 | 1 | - |
| 5. | Cisitu | 30.481 | 1 | 481 |
| 6. | Situraja | 42.095 | 1 | 2.095 |
| 7. | Conggeang | 28.928 | 1 | - |
| 8. | Paseh | 38.141 | 1 | 8.141 |
| 9. | Surian | 11.623 | 1 | - |
| 10. | Buahdua | 32.934 | 2 | - |
| 11. | Tanjungsari | 84.128 | 2 | 24.128 |
| 12 | Sukasari | 33.187 | 1 | 3.187 |
| 13. | Pamulihan | 61.845 | 2 | 1.845 |
| 14. | Cimanggung | 86.799 | 2 | 26.799 |
| 15. | Jatinangor | 90.861 | 2 | 30.861 |
| 16. | Rancakalong | 40.788 | 1 | 10.788 |
| 17. | Sumedang Selatan | 80.590 | 2 | 20.590 |
| 18. | Sumedang Utara | 98.636 | 3 | 8.636 |
| 19. | Ganeas | 25.915 | 1 | - |
| 20. | Tanjungkerta | 34.524 | 2 | 4.524 |
| 21. | Tanjungmedar | 26.272 | 1 | - |

| No | Kecamatan | Penduduk | Puskesmas | Kelebihan Beban |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Cimalaka | 62.008 | 1 | 32.008 |
| 23. | Cisarua | 20.860 | 1 | - |
| 24. | Tomo | 23.465 | 1 | - |
| 25. | Ujung Jaya | 31.385 | 1 | 1.385 |
| 26 | Jatigede | 22.408 | 1 | - |
| **Jumlah** | | **1.159.454** | **35** | |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2021)*

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah menghadapi kemungkinan lonjakan pasien positif terinfeksi virus korona saat ini adalah kapasitas rumah sakit. Sebab, perlu diingat bahwa rumah sakit tidak hanya merawat pasien korona, tetapi juga pasien yang menderita penyakit lain.

Secara umum, berdasarkan data, rasio jumlah tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk *(bed to population ratio*) di Indonesia sebesar 1,21:1.000. Artinya, per 1.000 pendudukan, hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Saat ini, dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, di Indonesia terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun tidak memiliki aturan mengenai rasio ideal, merekomendasikan setiap negara memiliki *bed to population ratio* sebesar 1:1.000, atau satu tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 fluktuatif. Di Tahun 2016 rasionya mencapai 1:571.048 merupakan ratio tertinggi di Kabupaten Sumedang. Ini berarti beban pelayanan kelebihan 471.000 penduduk, sehingga perlu adanya peningkatan ketersediaan rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2020 rasio rumah sakit sebesar 1:1.889, penurunan rasio ini dikarenakan adanya pelayanan kesehatan di puskesmas dan di puskesmas pembantu (pustu) yang disebar di Kecamatan, Desa dan Kelurahan di seluruh Kabupaten Sumedang, walaupun rasio rumah sakit per jumlah penduduk meningkat namun belum mencapai kondisi ideal sesuai rekomendasi WHO. Di Kabupaten Sumedang terdapat 3 Rumah Sakit yaitu 1) Rumah Sakit Umum Daerah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 450 buah; 2) Rumah Sakit Pakuwon dengan jumlah tempat tidur sebanyak 115 buah; dan 3) Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan jumlah tempat tidur sebanyak 46 buah. Dari 3 (tiga) Rumah Sakit tersebut, tersedia 611 tempat

tidur perawatan. Berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 1.159.454 jiwa maka untuk memenuhi SPM Kementerian Kesehatan, di Kabupaten Sumedang diperlukan sekitar 1.159 tempat tidur atau kekurangan 548 tempat tidur.

**Tabel 2.23**
**Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk | 1: 568.636 | 1: 571.048 | 1: 382.145 | 1: 384.071 | 1: 384.819 | 1: 386.485 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

4) Rasio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi : 1) Tenaga Medis, 2)Psiko klinis, 3) Keperawatan, 4) Kebidanan (Bidan), 5) Kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian), 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat, 7) Kesehatan Lingkungan, 8) Gizi (Nutrisionis dan Dietisien), 8) Keterapian Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara, Akupuntur), dan 9) Keteknisan Medis. Sedangkan Asisten Tenaga Kesehatan meliputi : 1) Asisten Perawat, 2) Asisten Tenaga Kefarmasian, 3) Asisten Dental, 4) Asisten teknisi Laboratorium Medik dan 5) Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

Tahun 2019 rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk mencapai 1:3.000, yang artinya satu tenaga kesehatan melayani 3.000 penduduk. Idealnya rasio tenaga kesehatan adalah 1:1.000. Ini berarti di Kabupaten Sumedang masih minim tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan standar ideal sehingga diperlukan usaha pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan jumlah tenaga kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 - 2018 mengalami

peningkatan. Dengan demikian untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kabupaten Sumedang harus bekerja keras untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Selain itu juga pemenuhan fasilitas pendidikan kesehatan diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas tenaga kesehatan yang muncul.

**Tabel 2.24**
**Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Tahun 2015 | | | | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JENIS NAKES | JML NAKES | JML PENDK | RASIO | JML NAKES | JML NAKES | JML NAKES | JML NAKES | JML PENDK | RASIO | JML NAKES | JML PENDK | RASIO | JML NAKES | JML PENDK | RASIO |
| 1 | Dokter Umum | 31 | 1.137.273 | 36.686 | 29 | 217 | 217 | 217 | 1.146.811 | 39.545 | 256 | 1.148.198 | 4485 | 217 | 1.154.458 | 5.320 |
| 2 | Dokter Spesialis | n/a | | 21.870 | 46 | 180 | 180 | 180 | - | - | 48 | 1.148.198 | 23921 | 180 | 1.154.458 | 6.364 |
| 3 | Dokter Gigi | 14 | 1.137.273 | 81.233 | 14 | 63 | 63 | 63 | 1.146.811 | 88.216 | 29 | 1.148.198 | 39593 | 63 | 1.154.458 | 18.325 |
| 4 | Perawat | 227 | 1.137.273 | 5.010 | 227 | 752 | 752 | 752 | 1.146.811 | 5.008 | 766 | 1.148.198 | 1499 | 752 | 1.154.458 | 1.535 |
| 5 | Perawat Gigi | 28 | 1.137.273 | 40.617 | 28 | n/a | n/a | n/a | 1.146.811 | 42.474 | 43 | 1.148.198 | 26702 | n/a | 1.154.458 | n/a |
| 6 | Bidan | 249 | 1.137.273 | 4.567 | 249 | 403 | 403 | 403 | 1.146.811 | 3.295 | 481 | 1.148.198 | 2387 | 403 | 1.154.458 | 2.865 |
| 7 | Nutrisionis | 19 | 1.137.273 | 59.856 | 19 | 32 | 32 | 32 | 1.146.811 | 60.358 | 31 | 1.148.198 | 37039 | 32 | 1.154.458 | 36.077 |
| 8 | Sanitarian | 22 | 1.137.273 | 51.694 | 22 | 32 | 32 | 32 | 1.146.811 | 57.340 | 38 | 1.148.198 | 30216 | 32 | 1.154.458 | 36.077 |
| 9 | Penyuluh Kesehatan | 14 | 1.137.273 | 81.233 | 14 | 21 | 21 | 21 | 1.146.811 | 88.216 | n/a | 1.148.198 | | 21 | 1.154.458 | 54.974 |
| 10 | Pranata Laboratorium | 15 | 1.137.273 | 75.818 | 15 | 44 | 44 | 44 | 1.146.811 | 81.915 | n/a | 1.148.198 | | 44 | 1.154.458 | 26.237 |
| 11 | Epidemiologi Kes | 3 | 1.137.273 | 379.091 | 3 | n/a | n/a | n/a | 1.146.811 | 382.270 | 33 | 1.148.198 | 34794 | n/a | 1.154.458 | n/a |
| 12 | Apoteker | 2 | 1.137.273 | 568.636 | 2 | 19 | 19 | 19 | 1.146.811 | 573.405 | 227 | 1.148.198 | 5058 | 19 | 1.154.458 | 60.761 |
| 13 | Asisten Apoteker | 17 | 1.137.273 | 66.898 | 17 | n/a | n/a | n/a | 1.146.811 | 67.459 | n/a | 1.148.198 | | n/a | 1.154.458 | n/a |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (diolah) (2020), Ditayangkan dalam SIPD

5) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani adalah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 -2020 belum sepenuhnya mencapai 100%, yang artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani seluruhnya. Walaupun demikian, capaian tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan RI sebesar 80%. Hal tersebut sebagaimana data pada gambar di bawah.

**Gambar 2.31**
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

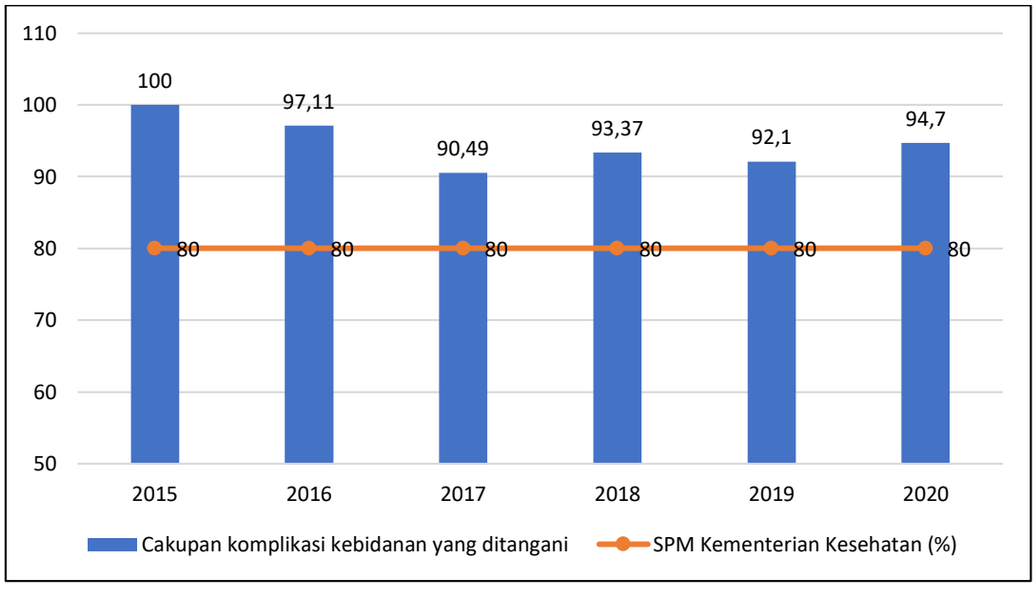


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Tahun 2015 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100%, akan tetapi terus menurun bahkan di Tahun 2017 mencapai 90,49% merupakan persentase terendah selama 6 (enam) tahun terakhir. Namun demikian, secara trend semakin baik, pada Tahun 2020 berada pada posisi 94,7%.

6) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami tren positif. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 100% yang artinya bahwa seluruh proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Data tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 yaitu 105,9%, walaupun sempat mengalami penuruna tetapi tetap telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 95%.

**Gambar 2.32**
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020**

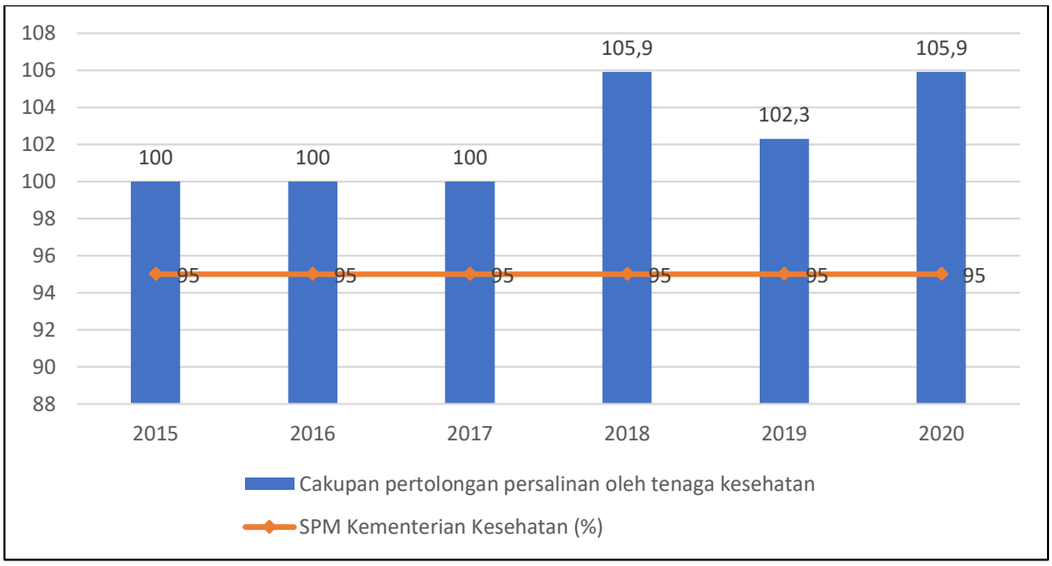


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

7) Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah umur 1 (satu) tahun). Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 96%, yang berarti masih terdapatnya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap Desa/Kelurahan dalam waktu satu tahun. Namun demikian, meskipun angka capaiannya mengalami penurunan, tetapi posisinya masih melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%.

**Gambar 2.33**
**Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020**
**(%)**

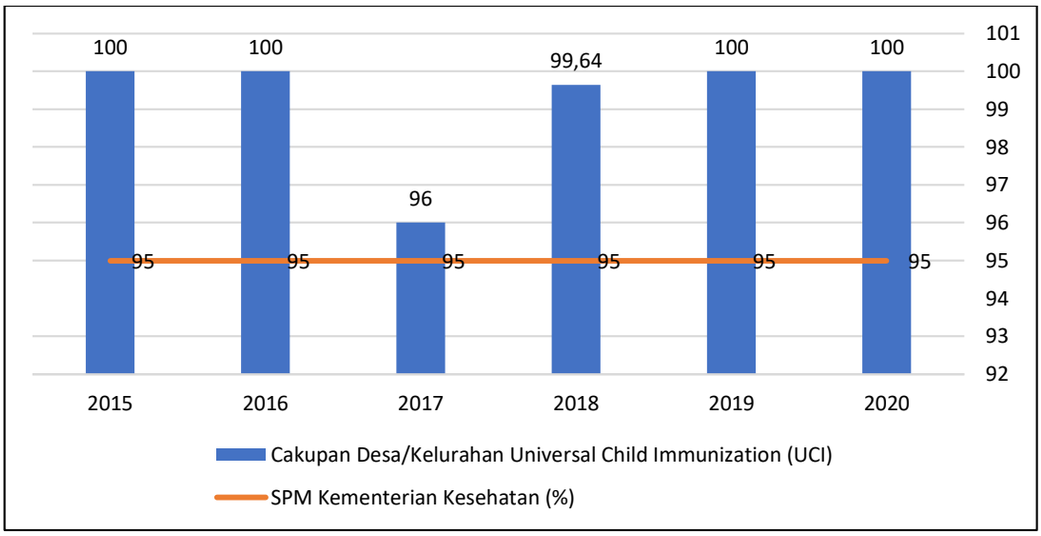


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

8) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015 - 2019 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

**Gambar 2.34**
**Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)**

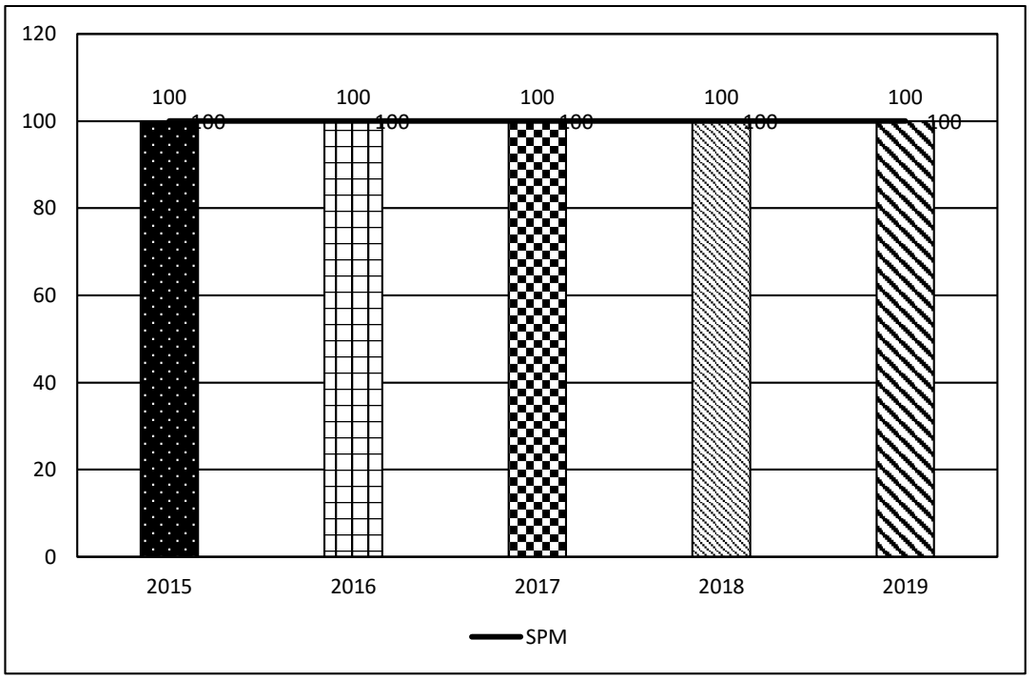


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020)*

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus *dengue* yang ditandai demam 2 – 7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (trombositopenia) disertai juga dengan gejala-gejala tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri otot dan tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata. Cakupan Kasus DBD dan penanganannya di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.25**
**Kasus DBD di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**
**(orang)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kasus DBD berdasarkan data Puskesmas | 691 | 944 | 184 | 408 | 35 | 707 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Berdasarkan data di atas, kasus DBD di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebanyak 944 orang dan Tahun 2020 sebanyak 707 orang. Hal ini disebabkan banyaknya tempat-tempat umum yang kebersihan

lingkungan nya tidak terjaga sehingga memungkinkan menjadi sarang nyamuk penular virus *Dengue*.

10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Menurut Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai dengan Tahun 2020, Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

**Tabel 2.26**
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Pembiayaan dan jaminan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan di setiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan pada Tahun 2018 sebesar 74,77% dengan sasaran penduduk 1.149.906 jiwa. Sedangkan di Tahun 2019 naik menjadi 102% dengan sasaran penduduk 1.154.458 jiwa. Kenaikan kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

a. Advokasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah dan *stakeholder* terkait;
b. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN total *coverage;*
c. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total *coverage* bagi PBI daerah;
d. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di semua tingkatan; dan
e. Bekerja sama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan diri penjadi peserta JKN.

11) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 (empat) kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar 90%.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sumedang pada grafik dibawah dapat dilihat sejak Tahun 2015 telah mencapai 100%, dan tren terus meningkat. Tahun 2018 persentasenya mencapai 110,8% walau mengalami penurunan di Tahun 2019 dan meningkat kembali di Tahun 2020. Walaupun demikian, posisi capaian Kabupaten Sumedang masih di atas SPM Kementerian Kesehatan.

**Gambar 2.35**
**Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

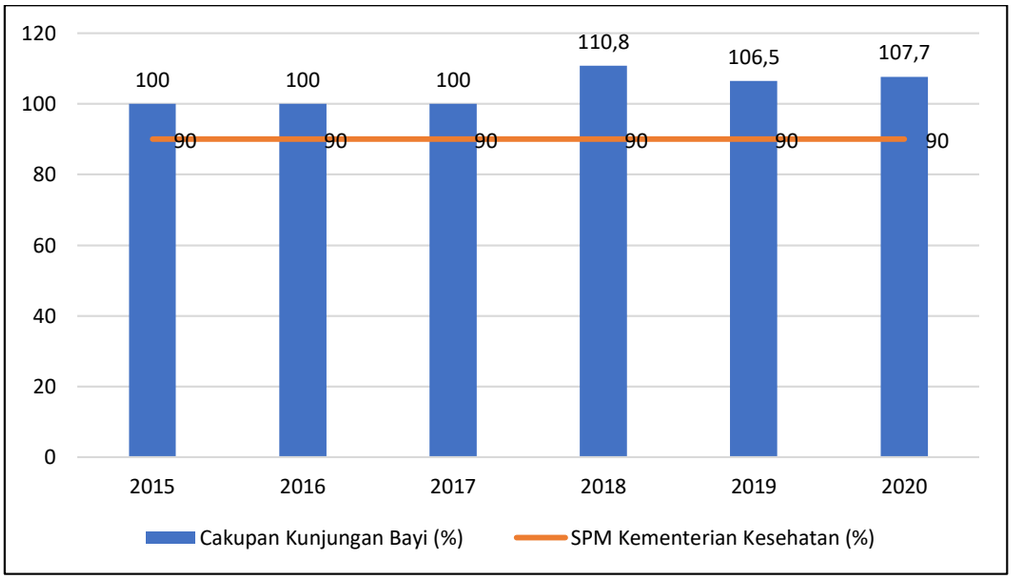


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

12) Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.

**Gambar 2.36**
**Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 -2020**

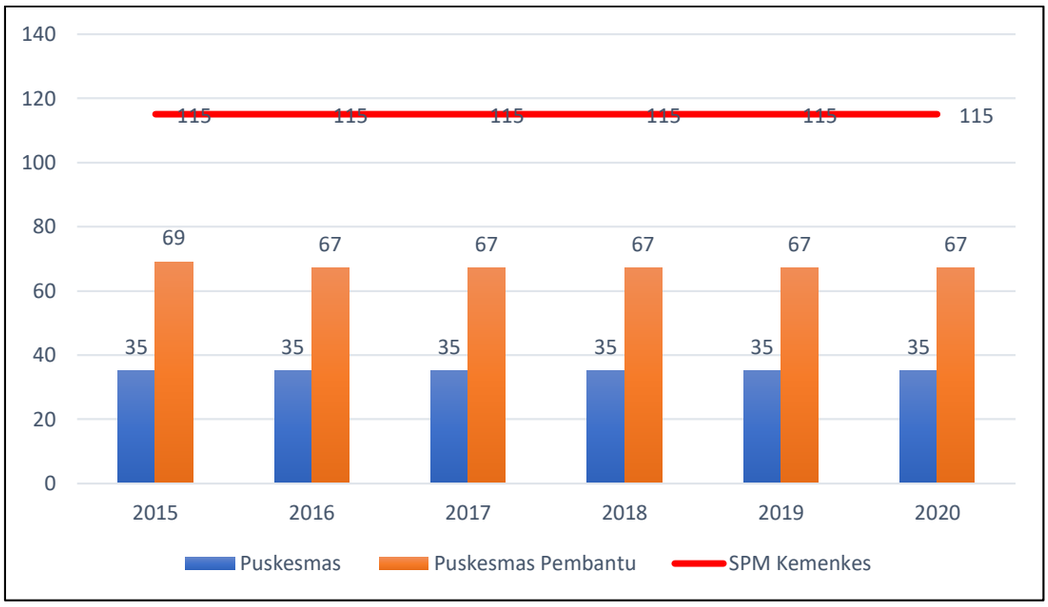


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas dari Tahun 2015 – 2020 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang. Idealnya jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 harus sudah memiliki 115 puskesmas dengan asumsi jumlah penduduk Tahun 2020 sebesar 1.159.454 jiwa.

Untuk membantu pelayanan kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas, dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Jumlah Pustu di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2016 mengalami penurunan 2 Pustu dari

69 Pustu pada Tahun 2015 menjadi 67 Pustu. Penurunan Pustu sebagai dampak penggenangan Waduk Jatigede.

**Tabel 2.27**
**Jumlah Puskesmas dan Pustu per Kecamatan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2019**

| KECAMATAN | | Jumlah Puskesmas | Jumlah Pustu | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wado | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Jatinunggal | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Darmaraja | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Cibugel | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cisitu | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Situraja | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Conggeang | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Paseh | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Surian | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Buahdua | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Tanjungsari | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Sukasari | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Pamulihan | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Cimanggung | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Jatinangor | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Rancakalong | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Sumedang Selatan | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Sumedang Utara | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Ganeas | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Tanjungkerta | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Tanjungmedar | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Cimalaka | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Cisarua | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Tomo | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Ujungjaya | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Jatigede | 1 | 4 | 5 |
| Jumlah | | 35 | 67 | 102 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020), Ditayangkan dalam SIPD*

Untuk mengukur kualitas puskesmas salah satunya dilihat dari indikator persentase ketersediaan obat di Puskesmas. Pada grafik 2.18 sejak Tahun 2015-2019 persentase ketersediaan obat di Puskesmas telah mencapai 100% atau dengan kata lain telah mencapai target SPM Kemenkes sebesar 90%.

**Gambar 2.37**
**Persentase Ketersediaan Obat**
**di Puskesmas Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2020**

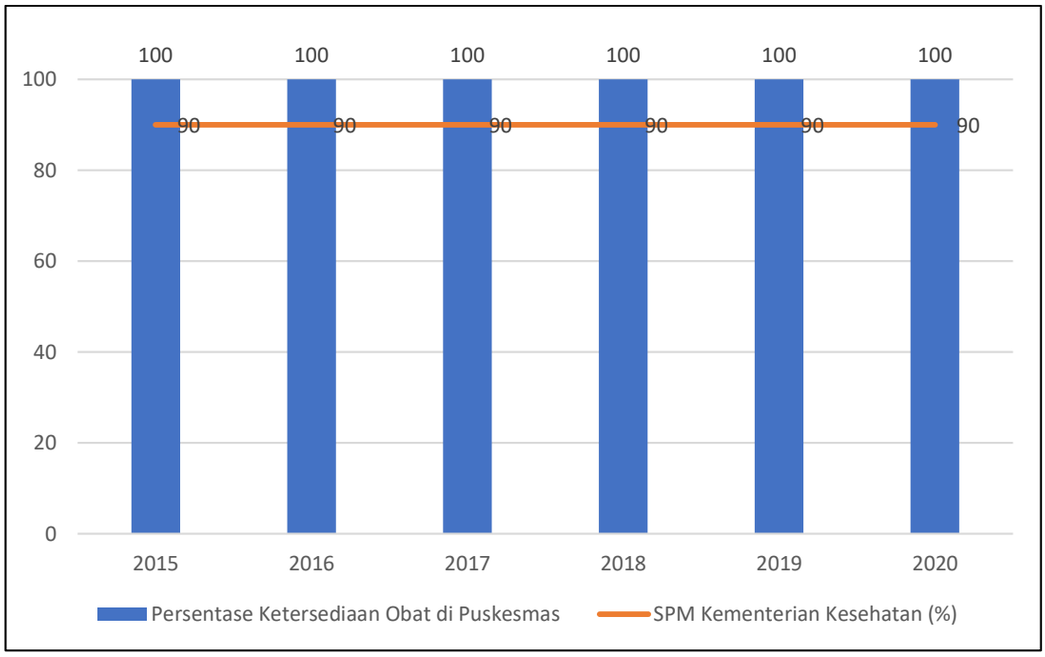


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

13) Penyakit Menular

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Penularannya dapat terjadi melaluui perantara ataupun langsung. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah dan sering terjadi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Malaria

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasite plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi (Nyamuk *Anoplehes*). Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu kelompok bayi, balita, anak dan ibu hamil. Berikut adalah data mengenai kasus penyakit malaria yang ditemukan di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.28**
**Jumlah Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kasus Penyakit Malaria | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Kasus penyakit malaria terbanyak ditemukan pada Tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kasus. Penyebar penyakit ini disebabkan adanya mobilitas penduduk ke Sumedang dari daerah endemis penyakit malaria, seperti Papua. Kasus ini menurun di Tahun 2018 hanya 8 kasus suspek malaria, dan meningkat kembali di Tahun 2019 menjadi 9 kasus. Dengan melakukan beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan, maka pada Tahun 2020, kasus penyakit Malaria menjadi nol.

b. Diare

Diare biasanya disebabkan oleh virus atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit diare berhubungan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan perilaku masyarakat. Untuk itu perlu upaya mereduksi kasus melalui sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, kasus diare di Tahun 2019 hanya 35 kasus terbilang kecil jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai ± 6.000 kasus. Walaupun tinggi, kasus diare tetap dapat 100% ditangani dan tidak ada kasus yang menyebabkan kematian.

c. Penyakit *Tuberculosis* Bakteri Tahan Asam (TB BTA) Positif

*Tuberculosis* Bakteri Tahan Asam (TB BTA) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri M. tubercolusis. Indonesia termasuk kedalam 5 (lima) besar Negara pengidap TB di Asia Tenggara. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk penanganan dan pengobatan TB BTA cukup besar dan berdampak langsung terhadap penderita maupun keluarga karena menyebabkan penurunan kinerja dan produktivitas penderita sehingga berdampak terhadap penurunan angka penghasilan keluarga.

Tahun 2020 di Kabupaten Sumedang ditemukan kasus TB BTA positif sebanyak 1.507 orang yang tersebar di 26 Kecamatan. Data sebaran kasus TB BTA di Kabupaten Sumedang ditampilkan pada gambar berikut.

**Gambar 2.38**
**Sebaran Kasus TB BTA Positif di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2020**

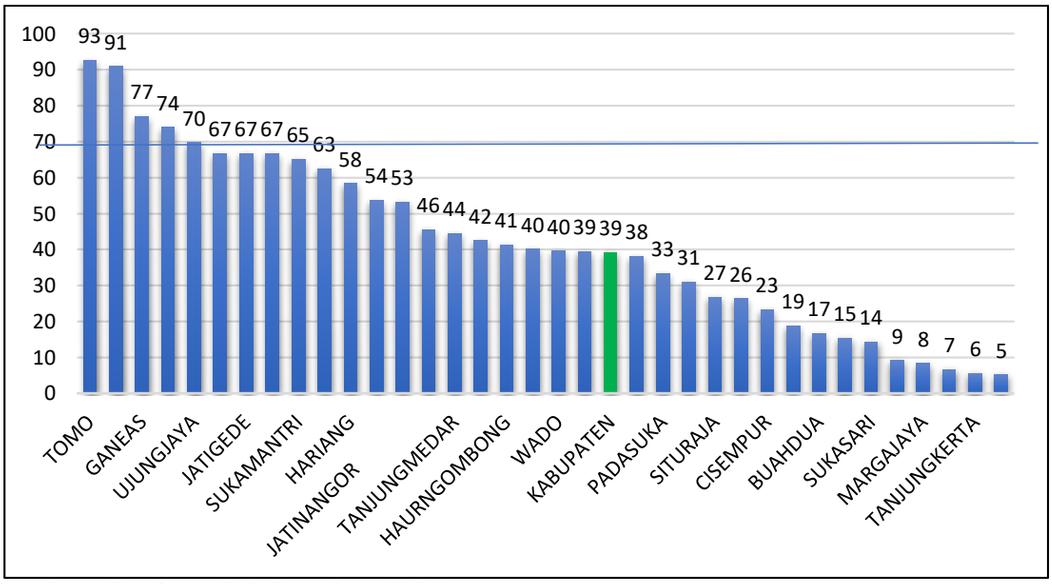


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Data diatas merupakan data kasus TB BTA Positif yang tersebar di 26 Kecamatan. Puskesmas Kecamatan Tomo merupakan penyumbang data tertinggi penemuan kasus TB BTA sedangkan untuk penemuan kasus terendah terdapat di Puskesmas Cimanggung.

*d. Filariasis*

*Filariasis* (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing *Filaria* yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, *glandula mammae*, dan *scrotum*, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya serta berdampak pada penurunan produktifitas kerja penderita. Penyakit ini juga dapat ditularkan secara tidak langsung oleh nyamuk yang telah terinfeksi cacing *Filaria.*

**Tabel 2.29**
**Jumlah Kasus *Filariasis***
**di KabupatenSumedang**
**Tahun 2015-2020**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kasus *Filariasis* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

Kasus *Filariasis* di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020, hanya ditemukan di Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya tidak terdapat kasus *Filariasis* di Kabupaten Sumedang. Hal ini berarti masyarakat dan tenaga kesehatan telah meningkatkan kebersihan lingkungan serta upaya pemberantasan dan pencegahan perkembangan nyamuk yang dianggap sebagai vektor penyakit.

e. HIV/AIDS

HIV (*Human immunodeficiency virus*) merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh, sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV. Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang beberapa tahun terakhir menyebabkan masalah HIV/AIDS bukan hanya masalah medis dari penyakit menular saja tetapi sudah menjadi aspek kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, psikologi, social dan budaya. Intensif nya usaha yang dilakukan oleh tenaga medis dalam penemuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang disajikan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.30**
**Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**
**(orang)**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kasus HIV | 42 | 50 | 132 | 60 | 47 | 53 |
| 2 | Kasus AIDS | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 3 | Jumlah Kematian | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

14) Cakupan Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk Ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Tujuannya untuk pengawasan tumbuh kembang janin dalam Rahim. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan cakupan K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 kali pada trimester ke- 1 dan 1 kali pada trimester ke- 2 serta 2 kali pada trimester ke 3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tren pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang cenderung fluktuatif. Untuk pelayanan K1 dan K4 tren tertinggi pelayanan terjadi pada Tahun 2015 sebesar 109,1% dan 99%. Dan di Tahun 2020 pelayanan K1 dan K4 mencapai 108,8% dan 98,12%, atau mengalami tren meingkat dari tahun sebelumnya. Namun demikina, untuk pelayanan K4 masih harus ditingkatkan karena belum mencapai 100%.

**Gambar 2.39**
**Cakupan Pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**

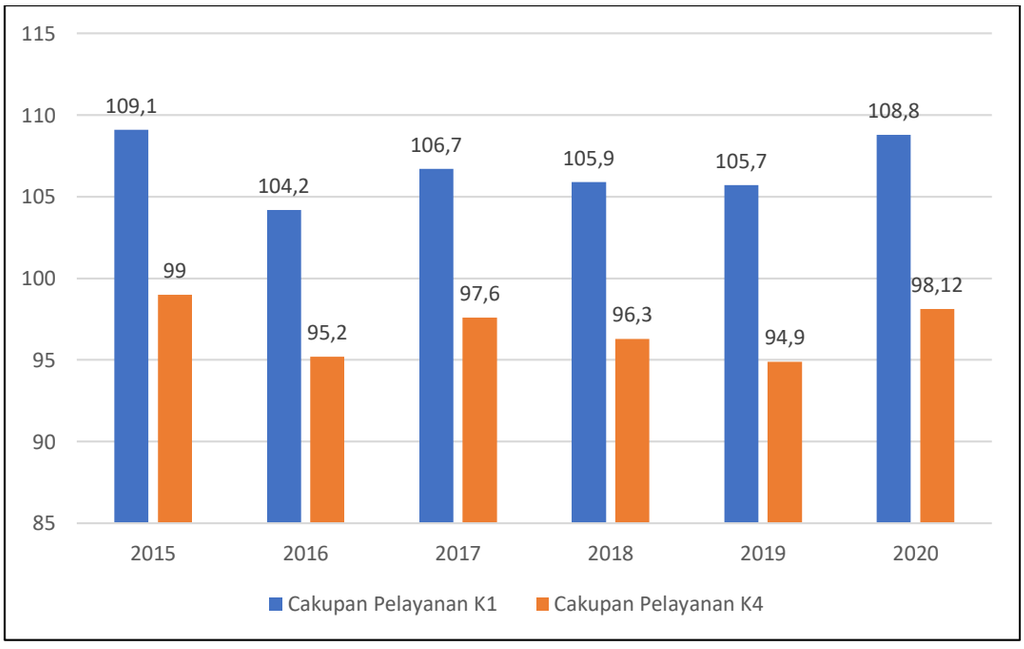


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

15) Cakupan Kunjungan Neonatus

Neonatus adalah bayi baru lahir (0-28 hari), neonatal adalah periode yang paling rentan untuk bayi yang sedang menyempurnakan penyesuaian fisiologis yang dibutuhkan pada kehidupan ektrauterin. Sedangkan kunjungan Neonatus atau disebut juga kunjungan neonatal merupakan pelayanan kesehatan kepada neonatus.

Kunjungan neonatal (KN) adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik baik di dalam maupun di luar puskesmas seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehinga dapat mengetahui sedini mungkin apabila terdapat kelainan atau masalah pada bayi.

Cakupan kunjungan neonatal adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui efektifitas dan pelayanan kesehatan neonatal. Cakupan pelayanan neonatal dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui jangkauan layanan kesehatan neonatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat melakukan layanan kesehatan neonatal.

Tren cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang fluktuatif dari Tahun 2015 – 2020, perkembangannya dapat dilihat pada grafik yang terdapat pada Gambar berikut:

**Gambar 2.40**
**Tren Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020 (%)**

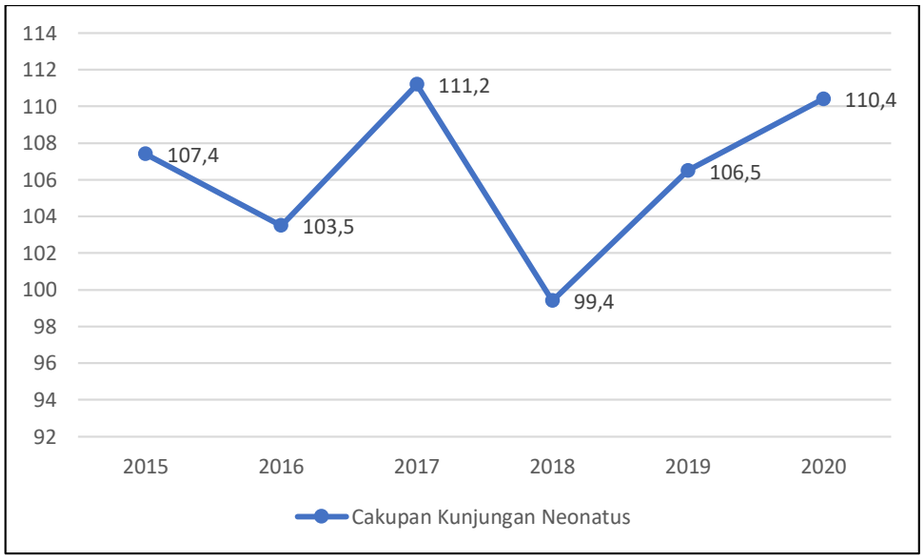


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021*

Cakupan kunjungan neonatal pada Tahun 2018 sebesar 99,4% tidak terlalu rendah akan tetapi merupakan persentase terendah selama 6 (enam) tahun terakhir, yang kemudian meningkat di Tahun 2019 menjadi 106,6% dan Tahun 2020 menjadi 110,4%. Peningkatan ini bisa diindikasikan bahwa petugas kesehatan terus memantau layanan kesehatan neonatal serta

didukung oleh meningkatnya pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan neonatal.

16) Pemberian ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 (enam) bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. ASI menyediakan semua nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung antibodi yang berfungsi melawan penyakit serta membantu menyempurnakan sistem kekebalan tubuh bayi. Proses untuk keberhasilan ASI eksklusif bayi 6 bulan dilaksanakan selama rentang usia bayi 0 sampai 6 bulan.

Keberhasilan ASI eksklusif di Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 79,22 %, dan terus menunjukkan tren menurun dengan persentase terendah 72,53% di Tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena banyaknya jumlah bayi ASI Eksklusif yang gugur sebelum usia 6 bulan. Penurunan dilatar belakangi oleh minimnya kesadaran ibu atas pentingnya ASI bagi pertumbuhan anak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu dalam menyaring informasi yang diterima, terutama mengenai pentingnya ASI Eksklusif. Selain itu juga rendahnya implementasi regulasi pemberian ASI, sehingga terlihat regulasi tersebut agak teracuhkan.

Pada Tahun 2019 tren cakupan ASI Eksklusif kembali meningkat menjadi 78,66%, peningkatan yang cukup signifikan walaupun persentase masih belum menyentuh angka 90%. Peningkatan ini terjadi karena intensifnya sosialisasi yang digalakkan oleh petugas kesehatan yang mendorong ibu memberikan ASI Ekslusif, serta meningkatnya kesadaran para ibu akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif terhadap pertumbuhan bayi. Pada intinya keberhasilan ASI Eksklusif ditentukan oleh kerjasama dari semua pihak.

**Gambar 2.41**
**Cakupan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015 – 2020**

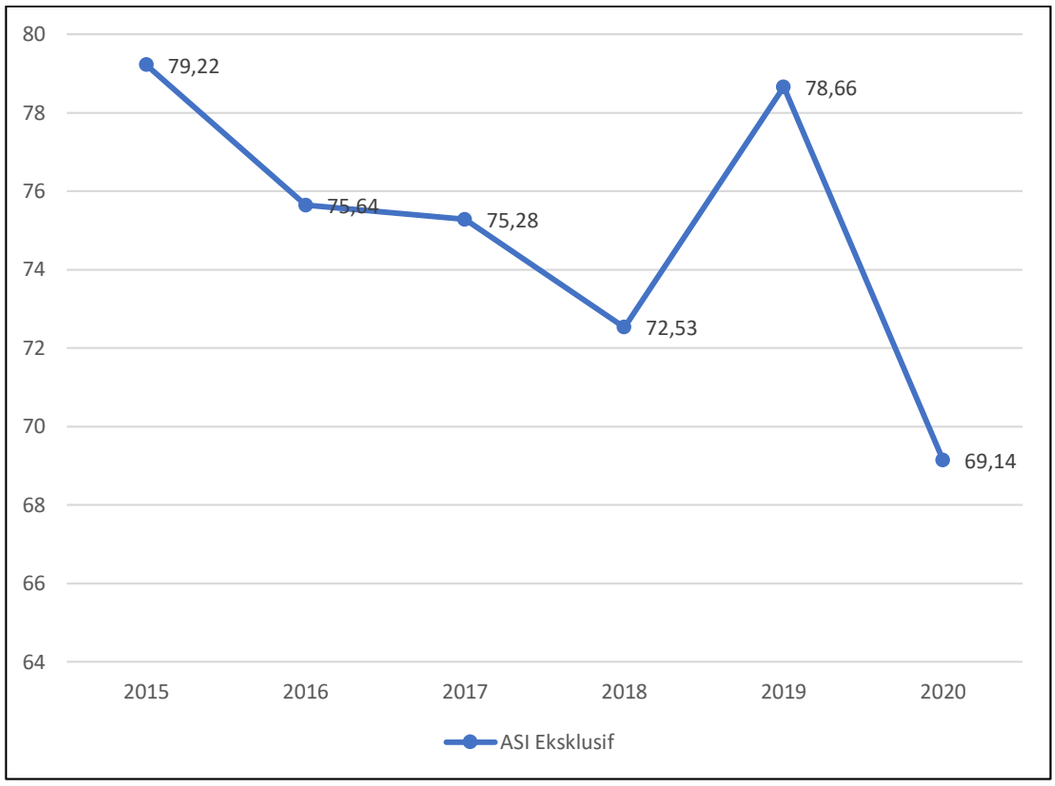


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

17) Deteksi Bawah Garis Merah (BGM)

Balita Bawah Garis Merah (Balita BGM) merupakan balita yang mempunyai berat badan sangat kurang dan jika dilihat pada Kartu Menuju Sehat (KMS) kurva menuju pita berwarna merah maka balita akan divonis telah mengalami gizi buruk. BGM dipakai sebagai deteksi awal bagi kejadian masalah gizi balita.

Tren balita BGM di Kabupaten Sumedang menunjukan penurunan tiap tahunnya. Deteksi BGM pada balita, jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2015 sebesar 2,29%, dan terendah mencapai 0,45% di Tahun 2018. Untuk mencapai penurunan tren balita BGM diperlukan adanya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta status gizi balita. Tren balita BGM terdapat pada grafik berikut.

**Gambar 2.42**
**Perkembangan Balita Bawah Garis Merah (BGM)**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2020 (%)**

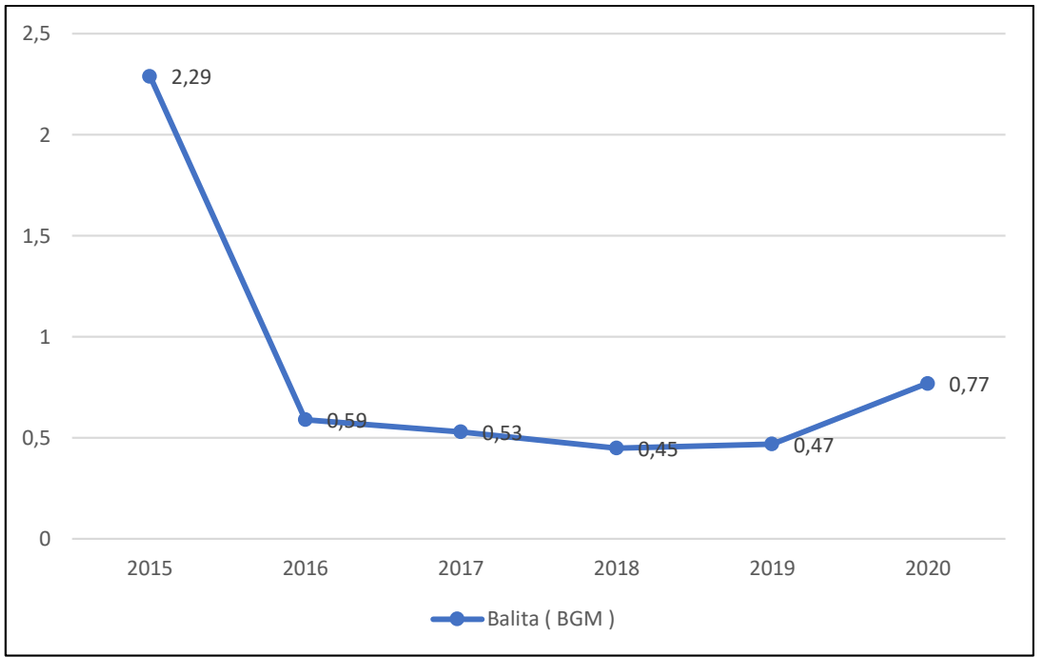


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

18) Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem pelayanan kesehatan rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horiontal. Sistem rujukan mengatur dari mana dan harus kemana seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu memeriksakan keadaan sakitnya. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri namun berada dalam suatu sistem dan saling berhubungan. Sistem rujukan akan berjalan dengan baik apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi, transportasi) terpenuhi, sehingga kebutuhan masyarakat akan segera tertangani dengan tepat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang mewakili 35 Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Sumedang membuat perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan program rujuk balik dengan Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang ada 3 (tiga) yaitu :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang
2. Rumah Sakit Umum Pakuwon.

3. Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga

Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum terdapat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.43**
**Jumlah Rawat Inap dan Rawat Jalan**
**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang**
**di Sumedang Tahun 2015-2020**
**(orang)**

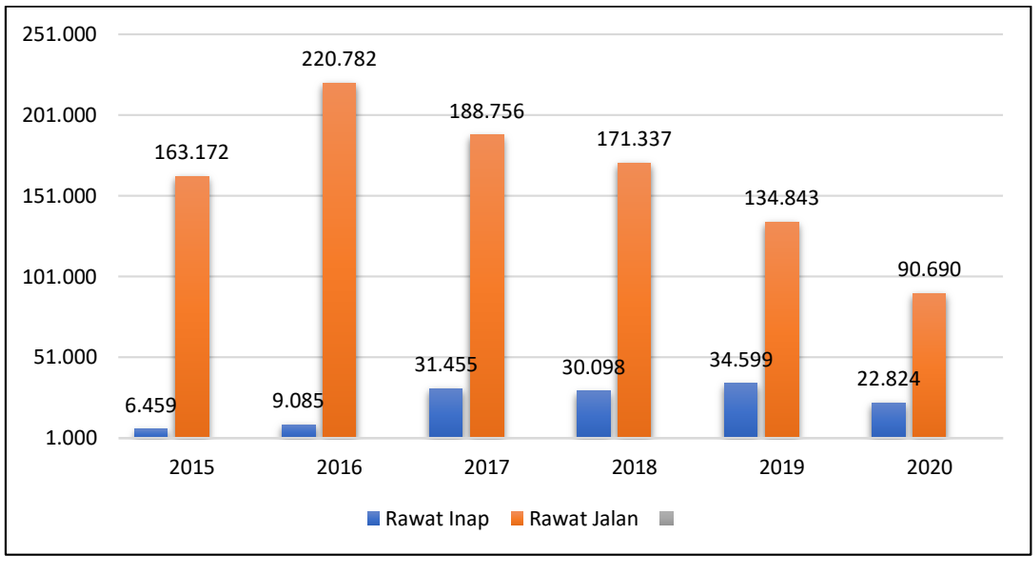


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sumedang, RSUD Kab. Sumedang.* (2021)

**Gambar 2.44**
**Jumlah Rawat Inap dan Rawat Jalan**
**Rumah Sakit Umum Pakuwon**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2016-2020**
**(orang)**

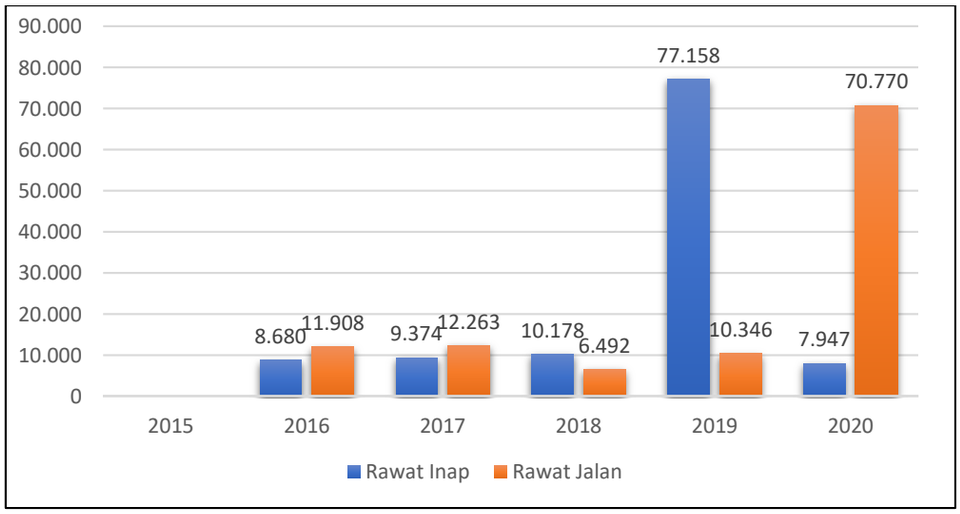


*Sumber : Dinas Kesehatan Kab Sumedang, RSU Pakuwon. (2021)*

**Gambar 2.45**
**Data Rawat Inap dan Rawat Jalan**
**Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga**
**Tahun 2015-2020**
**(orang)**

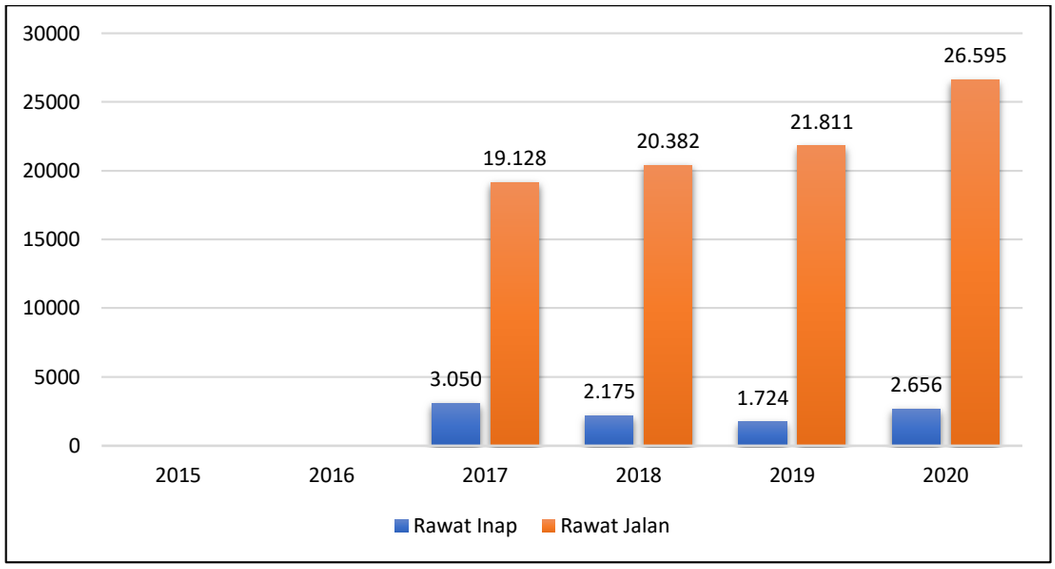


*Sumber : Dinas Kesehatan ,RSU Harapan Keluarga. (2021)*

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa untuk kasus rujukan baik rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Kabupaten Sumedang fluktuatif. Untuk rujukan rawat inap tren tertinggi terjadi di Tahun 2019 yang mencapai 34.599 orang sedangkan tren tertinggi untuk rawat jalan terjadi di Tahun 2016 yang mencapai 220.782 orang. Terjadi penurunan jumlah kasus rawat inap di Tahun 2018, karena adanya mekanisme sistem rujukan berjenjang dan mapping rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di Kabupaten Sumedang semakin lebih baik. Selain itu juga adanya peningkatan jumlah saran adan prasarana rujukan dengan bertambahnya satu Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang, yaitu RSU Harapan Keluarga.

Data untuk kasus rawat jalan dan rawat inap di RSU Pakuwon terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan RSU Harapan Keluarga. Ini berarti FKTP di Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk RSU Harapan Keluarga jumlah kasus rawat jalan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus rawat inap. Hal ini menunjukan bahwa kasus-kasus yang dirujuk ke RSU Harapan Keluarga masih ditangani dengan rawat jalan.

Berdasarkan penjelasan beberapa indikator urusan kesehatan pada bagian-bagian sebelumnya dan pertimbangan sinkronisasi prioritas nasional

dan provinsi, maka sejak Tahun 2018 terjadi perubahan indikator kinerja urusan Kesehatan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31**
**Indikator Kinerja Urusan Kesehatan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) | 16 | 14 | 21 |
| 2 | Jumlah Kematian Bayi (jiwa) | 155 | 114 | 137 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan (poin) | 78,73 | 82,5 | 87 |
| 4 | Prevalensi Stunting (%) | 32,2 | 24,4 | 17, 5 |
| 5 | Prevalensi HIV/AIDS (%) | <0.04 | <0,04 | <0.04 |
| 6 | Angka Kesakitan Penyakit Menular | 113/ 100.000 | 56/100.000 | 113/100.000 |
| 7 | Universal Health Coverage (UHC)(%) | 73,17 | 76,46 | 73,17 |
| 8 | Indeks Keluarga Sehat (IKS)(poin) | 0,12 | 0,13 | 0,12 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2021)*

19) Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiapsiagaan sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pascakrisis kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Penanganan KLB terjadi pada Tahun 2020, yaitu adanya *Coronavirus Disease* atau disebut juga *Covid-19* yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Penyebaran virus *Covid-19* terjadi melalui droplet dalam kontak dekat tanpa pelindung. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat dianjurkan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.

Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor:443/Kep.161-BPBD/2020

tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Gugus Tugas Covid-19 melibatkan multi stakeholder yang secara sinergi bertugas melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 baik dari aspek medis maupun non medis dengan pelaporan rutin setiap hari yang hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan. Kebijakan diantaranya berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanakaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Pananganan Covid 19.

Kebijakan ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah karena memiliki konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terganggu ketika pembatasan sosial berlaku. Sementara di sisi kesehatan masyarakat, ancaman penyebaran virus yang massif jika tidak membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah bisa mengancam jiwa yang berdampak pada kehilangan modal manusia, khususnya tenaga medis. Secara garis besar kebijakan yang diambil adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.46**
**Kebijakan Penanganan Covid-19**
**di Kabupaten Sumedang**

Upaya pelayanan kesehatan dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang terdiri dari upaya promotif, preventif, dan kuratif. Promotif artinya peningkatan, Preventif artinya pencegahan dan kuratif artinya pengobatan.

**1) Promotif**

Langkah promotif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga pola

hidup bersih dan sehat. Selain itu juga, memberikan himbauan agar masyarakat memperbanyak asupan vitamin dan buah-buahan karena dengan kondisi daya tubuh yang kuat maka peluang terhindar dari Covid-19 semakin besar. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penyuluhan melalui beberapa media promosi kepada masyarakat tentang Covid-19 dan perlunya kewaspadaan serta pencegahannya.

**2) Preventif**

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain 5M, masyarakat juga dihimbau agar melaporkan kepada Sat Gas Covid-19 apabila terdapat saudara atau tetangga terkonfirmasi terpapar Covid-19.

Adapun upaya preventif yang dilakukan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyelidikan epidemiologi, pemantauan dan pendataan kepada seluruh kriteria kasus beserta kontak eratnya
b. Melakukan analisa terhadap peningkatan kasus, pemetaan persebaran kasus, dan kejadian transmisi lokal (pelacakan klaster)
c. Memberlakukan dan mengawasi pelaksanaan social distancing, seperti meliburkan anak sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah, memberlakukan bekerja dari rumah secara bergantian, membatasi kegiatan di tempat umum dan membatasi kegiatan yang mengumpulkan massa.
d. Melaksanakan rapid test pada OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), petugas kesehatan, TNI/Polri
e. Bekerja sama dengan UKM dengan membuat APD (Face Shield dan Coverall) secara mandiri dan membagikannya ke masyarakat
f. membagikan masker kain kepada petugas lapangan, OTG, ODP dan PDP beserta kontak eratnya.
g. membagikan hand sanitizer untuk ruang publik seperti kelurahan, kecamatan, dan OPD
h. memberikan bantuan berupa obat terapi Covid-19 dan Pemberian vitamin C dan vitamin B kompleks

i. penyemprotan atau disinfeksi di tempat-tempat umum
j. pembagian makanan tambahan tinggi protein seperti telur dan biskuit serta minuman herbal untuk menjaga stamina kepada petugas kesehatan, petugas lapangan, OTG, kontak erat kriteria ODP dan PDP
k. menyediakan fasilitas karantina khusus bagi kriteria OTG, dan kontak erat dari kriteria ODP dan PDP untuk memastikan physical distancing
l. membagikan thermal infra red di ruang publik
m. pelayanan pemulasaraan jenazah dan pemakaman bagi jenazah pasien Covid 19

**3) Kuratif**

Sementara itu, langkah kuratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah dengan menyiapkan puskesmas untuk melaksanakan pelayanan, menunjuk dan mengkoordinasikan rumah sakit untuk pelayanan dan sarana rujukan. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten menyediakan obat-obatan untuk menangani kasus Covid-19.

Seiring perkembangan dampak Covid 19 bagi kesehatan, pasien Covid 19 tanpa gejala agar melakukan Isolasi Mandiri selama 14 hari di rumah. Sedangkan pasien Covid 19 dengan Gejala, maka dilakukan perawatan di RSUD Sumedang.

Salah satu upaya lain dalam menangani Covid 19 adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh (*herd immunity*) melalui pemberian Vaksin Covid-19 secara masif. Melalui upaya ini diharapkan Covid-19 dapat segera diatasi. Adapun Barang Habis Pakai dan Aset Tetap Penanggulangan Covid-19 yang digunakan pada Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.32**
**Data Barang Habis Pakai dan Aset Tetap**
**Penanggulangan *Covid-19***
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2020**
**(unit)**

| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| A | Barang Habis Pakai | |
| 1 | Alat Pelindung Diri (APD) | 3.500 |
| 2 | Masker | 210.000 |
| 3 | Kaos Tangan | 210.000 |
| 4 | Hand Sanitizer 250 ml | 10.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Alat Rapid test | 7.200 |
| B | Aset Tetap | |
| 1 | Thermo Gun | 70 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2020), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

a. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 mengalami penurunan sepanjang 21,450 km yaitu dari semula sepanjang 796,056 km pada Tahun 2016 menjadi 774,606 km. Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh proyek penggenangan Waduk Jatigede yaitu berkurangnya 4 (empat) ruas jalan sepanjang 16,20 km (ruas jalan Cadasngampar-Cijeungjing sepanjang 3,7 km, ruas jalan Wado-Cadasngampar sepanjang 5 km, ruas jalan Cisurat-Cipasang sepanjang 4,5 km, dan ruas jalan Cikawung-Cipaku sepanjang 3 km). Selain dampak penggenangan waduk Jatigede, pengurangan panjang jalan juga disebabkan oleh pengalihan status jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi sebanyak 2 (dua) ruas jalan sepanjang 9,10 km (ruas jalan Cibuntu-Parakanmuncang sepanjang 3,8 km dan ruas jalan Warungsimpang-Cibuntu sepanjang 5,3 km).

Pada Tahun 2019, total Panjang jalan Kabupaten kembali mengalami penurunan yaitu dari semula 774,606 km pada Tahun 2018 menjadi 774,368 km. Penurunan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2016 yang menetapkan penurunan status fungsi jalan kabupaten menjadi jalan lingkungan sepanjang 7,238 km pada 10 ruas jalan dan penambahan ruas jalan sepanjang 7 km pada 3 ruas jalan. Ruas jalan yang mengalami penurunan status yaitu ruas jalan Masjid (depan Masjid Agung) sepanjang 0,100 km; ruas jalan Pendopo Tegalkalong sepanjang 0,123 km; ruas jalan Terminal Ketib sepanjang 0,157 km; ruas jalan Talun Pojok sepanjang 0,458 km; ruas jalan Mekarsari sepanjang 0,750 km; ruas jalan komplek Persekolahan Licin sepanjang 1,100 km; ruas jalan komplek Workshop sepanjang 0,700 km; ruas jalan komplek Prabu Kian Santang sepanjang 1,500 km; ruas jalan Joglo-Paseh sepanjang 1,500 km; dan ruas jalan komplek Puskopad sepanjang 0,850 km. Adapun ruas jalan yang mengalami penambahan yaitu ruas jalan Citengah-Cigumentang/

Sindangwangi (Batas Kabupaten Bandung) sepanjang 5 km; ruas jalan Wado-Cikareo sepanjang 0,5 km; dan ruas jalan Cikawung-Darmaraja sepanjang 1,5 km.

Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan (Tabel 2.33). Pada Tahun 2015 tercatat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 239,746 km dengan persentase 30,12% dan merupakan persentase terendah selama 6 (enam) tahun terakhir. Tren jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat hingga di Tahun 2020 mencapai 79,96% dengan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 595,992 km.

**Tabel 2.33**
**Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Total Panjang Jalan (km) | 796,056 | 796,056 | 774,606 | 774,606 | 774,368 | 774,368 |
| 2 | Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (km) | 239,746 | 345,279 | 424,702 | 486,454 | 547,868 | 595,992 |
| 3 | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) (%) | 30,12 | 43,37 | 54,83 | 62,80 | 70,75 | 76,96 |

*Sumber : Dinas PUPR Kab Sumedang (2021)*

b. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 Jiwa)

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di

wilayah tertentu. Rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 6,7 km/10.000 jiwa. Penurunan rasio disebabkan karena adanya pengurangan Panjang Ruas Jalan akibat pembangunan bendungan Jatigede dan Tol Cisumdawu. Hal ini berimbas pada rasio Panjang jalan, apalagi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan.

**Tabel 2.34**
**Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Total Panjang Jalan (km) | 796,056 | 796,056 | 774,606 | 774,606 | 774,368 | 774,368 |
| 2 | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.110.841 | 1.132.459 | 1.139.564 | 1.148.198 | 1.154.458 | 1.159.454 |
| 3 | Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (jiwa/km$^2$) | 0,00072 | 0,00070 | 0,00070 | 0,00067 | 0,00067 | 0,00067 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (diolah) (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Jika mengacu pada Permen PU Nomor 14 Tahun 2010, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk 500 ≤ KP < 1000 jiwa/km$^2$, maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 5 Km/10.000 jiwa. Kabupaten Sumedang memiliki kepadatan penduduk 737 jiwa/ km$^{2,}$ dengan demikian rasio Panjang jalan terhadap penduduk di Kabupaten Sumedang sebesar 6,7 km/ 10.000 jiwa telah melampaui target SPM.

c. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 32%, kemudian selama enam tahun meningkat menjadi 43,79% di Tahun 2020. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio jaringan irigasi mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 4,31% dari semula 6,46% di Tahun 2016. Hal ini dikarenakan

adanya pengurangan panjang saluran irigasi yang baik dari semula 203.070 m di Tahun 2016 menjadi 135.450 m di Tahun 2018. Sedangkan di Tahun 2019 rasio jaringan irigasinya meningkat kembali menjadi 4,53% karena adanya penambahan panjang saluran irigasi yang baik menjadi 142.321,61 m. Pada Tahun 2020, rasio irigasi semakin membaik yaitu meningkat 0,07% dari 4,53% menjadi 4,60%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian.

**Tabel 2.35**
**Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(%) | 32 | 38 | 41 | 41,15 | 43,08 | 43,79 |
| a | Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha) | 18.420 | 21.619 | 23.333 | 23.452 | 24.552,6 | 24.957,2 |
| b | Luas Irigasi Kabupaten (Ha) | 56.993 | 56.993 | 56.993 | 56.993 | 56.993 | 56.993 |
| 2 | Rasio Jaringan Irigasi | 2,97 | 6,46 | 4,31 | 4,31 | 4,53 | 4,60 |
| a | Panjang Saluran Irigasi Yang Baik (m) | 93.240 | 203.070 | 135.450 | 135.941,96 | 142.321,61 | 144.667,2 |
| b | Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha) | 31.417 | 31.417 | 31.417 | 31.417 | 31.417 | 31.417 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2021)*

2) Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa undang-undang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Semula, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Setelah berlakunya Undang-undang cipta kerja maka wewenang pemerintah daerah kabupaten berubah menjadi Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Kewenangan penyelenggaraan penataan ruang tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang baik yang diselenggarakan dengan pembiayaan sendiri maupun pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Sebelum Tahun 2018 Kabupaten Sumedang sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, namun setelah dilakukan review maka disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten yang baru pada Tahun 2018 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038.

Produk perencanaan tata ruang yang sudah disusun mulai dari Tahun 2018 adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020 – 2040;
3. Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ujungjaya Tahun 2019;
4. Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Buahdua Tahun 2019;

5. Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukasari Tahun 2020;
6. Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jatinangor Tahun 2020;
7. Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cimanggung Tahun 2020;

Dokumen materi teknis DRTR yang sedang disusun tahun ini adalah RDTR Kecamatan Tanjungsari dan RDTR Kecamatan Cimalaka.

Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah, dengan keluaran meningkatkannya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah, adapun alur kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang (berita acara persyaratan dokumen) berdasarkan permohonan dari masyarakat/notifikasi SI ICE MANDIRI dalam pelayanan informasi ruang dan persetujuan/pengesahan rencana tapak (site plan)
2. Melaksanakan survey lapangan
3. Membuat kajian kesesuaian pemanfaatan ruang
5. Pembahasan dengan dinas-dinas teknis terkait

Berikut rekspitulasi pemberian informasi ruang yang sudah dilaksanakan dalam proses pemanfaatan ruang dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020:

**Tabel 2.36**
**Rekapitulasi Informasi Tata Ruang Tahun 2017 – 2020**

| Tahun | Luas Total ($m^2$) | Perumahan ($m^2$) | Industri ($m^2$) | Lain - Lain ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5,851,997.00 | 1,009,097.00 | 47,345.00 | 4,791,080.00 |
| 2018 | 15,104,764.00 | 1,590,795.00 | 9,668,614.00 | 3,714,398.00 |
| 2019 | 4,262,342.00 | 1,621,033.00 | 988,527.00 | 1,574,050.00 |
| 2020 | 10,356,731.00 | 3,055,489.00 | 4,292,504.00 | 2,962,871.30 |
| JUMLAH | 35,575,834.00 | 7,276,414.00 | 14,996,990.00 | 13,042,399.30 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, 2021*

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup tata ruang kawasan/kabupaten. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten,

kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah menyusun database pengendalian pemanfaatan ruang, dengan alur:

1. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan program/ pengaduan masyarakat yang diindikasikan terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang seuai dengan rencana tata ruang (RTRW/RDTR) atau pengesahan sitepan
2. Melaksanakan survey lapangan
3. Membuat kajian kesesuaian pemanfaatan ruang
5. Bila terjadi pelanggaran maka akan disuratkan surat pemberitahuan

Pengawasan dan pengendalian pada Tahun 2019 dilakukan terhadap 29 (dua puluh sembilan) kegiatan perizinan, Tahun 2020 dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) kegiatan perizinan dengan jenis kegiatannya adalah pendidikan, gudang, perumahan, pabrik, rumah sakit, mini market, ruko, kantor dan lain sebagainya.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.37**
**Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | 62,80 | 70,75 | 76,96 |
| 2 | Rasio jaringan irigasi | 60,00 | 62,02 | 64,46 |
| 3 | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang | 100,00 | 70,22 | 75,11 |
| 4 | Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi | 0 | 23,00 | 40,06 |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang telah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan gambar di bawah, jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang tercatat 79,92% rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih atau sekitar 239.760 rumah tangga yang mempunyai akses air minum. Namun kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih. Sehingga pemerintah masih perlu terus meningkatkan akses air bersih ke seluruh Desa/kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan.

**Gambar 2.47**
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

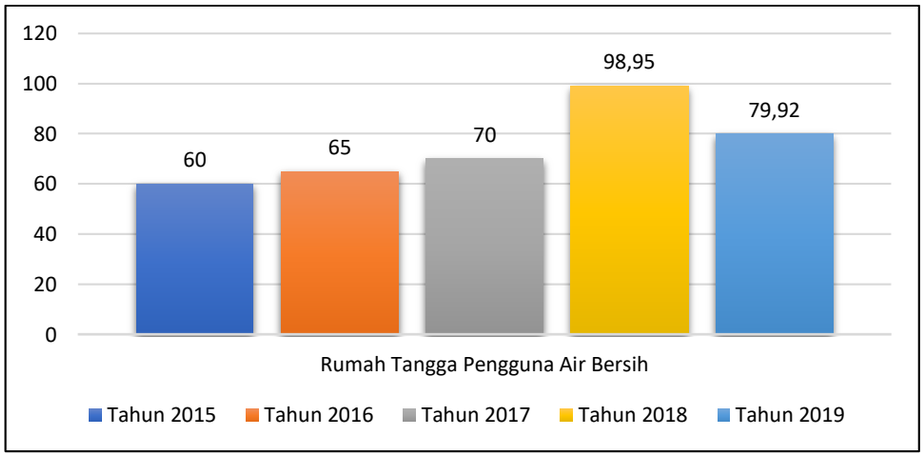


*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)*

2) Rumah Tangga ber-Sanitasi

Rumah tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%. Di Kabupaten Sumedang peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi tidak terlalu signifikan. Sampai dengan Tahun 2019 rumah tangga bersanitasi baru mencapai 55,23% dan jika dijumlahkan hanya 165.690 rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi.

**Gambar 2.48**
**Rumah Tangga ber-Sanitasi**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

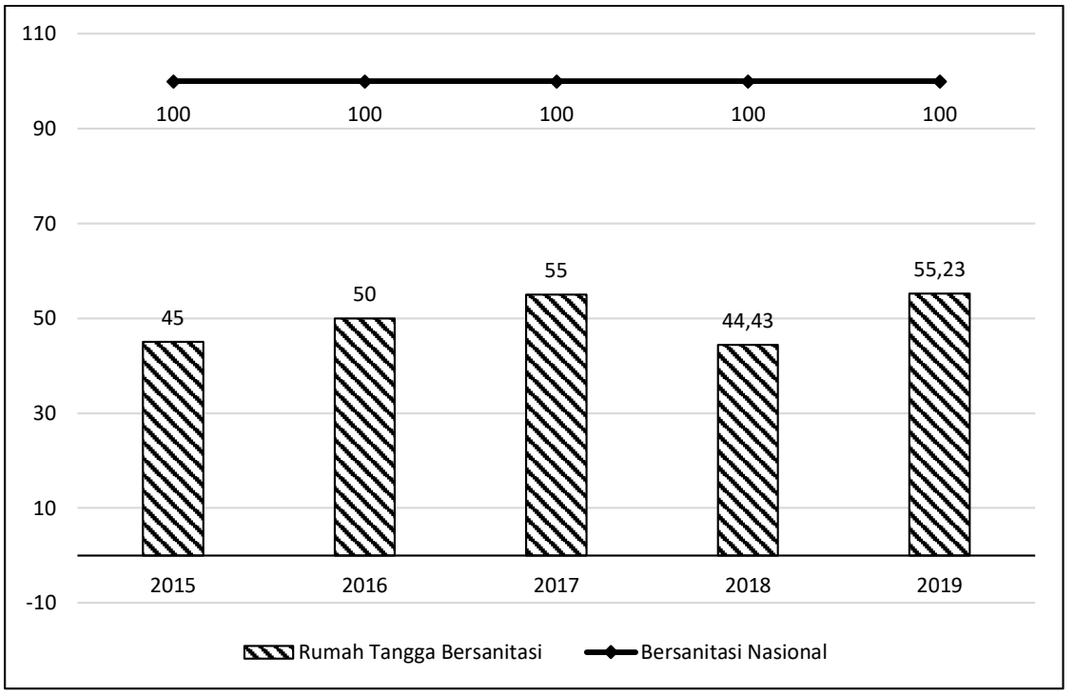


*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)*

3) Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Permukiman kumuh pada umumnya mencakup 3 (tiga) segi yaitu kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan dan sumber pencemaran. Kawasan permukiman kumuh merupakan penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Permukiman kumuh di Kabupaten Sumedang semula tersebar hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cimanggung. Tahun 2015 luas total permukiman kumuh hanya 53,04 Ha dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 164,69 Ha. Penambahan luasan wilayah terjadi karena adanya penambahan lokus permukiman kumuh di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Data luas permukiman kumuh Tahun 2018 masih null karena pada tahun tersebut sedang melakukan kajian mengenai permukiman kumuh dan kajian baru selesai pada awal Tahun 2019.

Untuk data pengurangan luasan lingkungan permukiman kumuh terjadi pada Tahun 2015 – 2017. Di Tahun 2018 dan 2019 tidak terjadi pengurangan karena terdapat penambahan lokus permukiman kumuh, sehingga menyebabkan penambahan luasan permukiman kumuh.

**Tabel 2.38**
**Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pengurangan luasan Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha) | 2,27 | 2,28 | 0,75 | - | - |
| 2 | Luas Total Pemukiman Kumuh (Ha) | 53,04 | 50,76 | 50,01 | n/a | 169,64 |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)*

4) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%. Tercatat sampai dengan Tahun 2019 mencapai 80,67% atau sekitar 242.010 rumah yang sudah layak huni, sehingga rasio capaian rumah layak huni Kabupaten Sumedang telah mencapai target.

**Gambar 2.49**
**Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

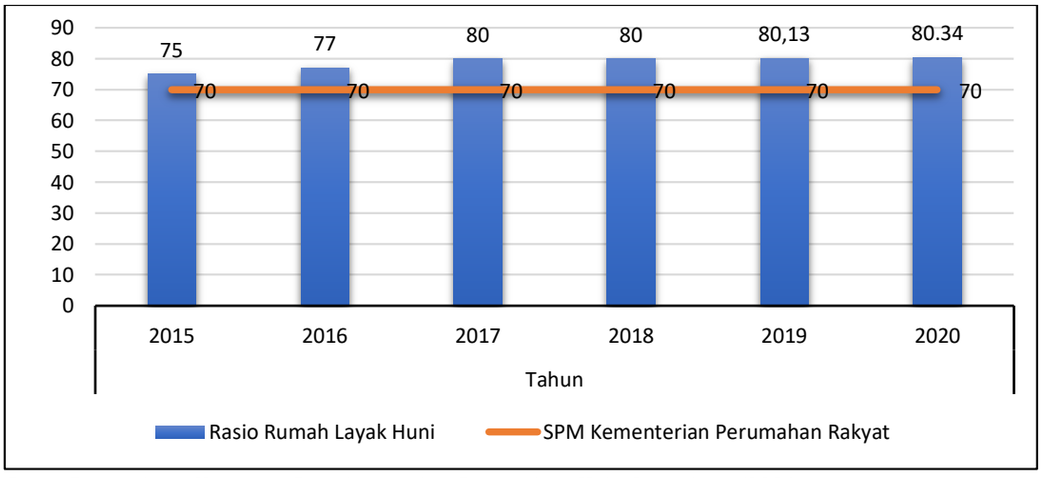


*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39**
**Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat**
**dan Kawasan Pemukiman**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Rumah Layak Huni | 80,00 | 80,13 | 80,34 |
| 2 | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh | 0,31 | 0,30 | 0 |
| 3 | Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum | 79,02 | 79,92 | 80,45 |
| 4 | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | 55,00 | 55,23 | 55,29 |
| 5 | Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata | 20,00 | 35,00 | 58,75 |
| 6 | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 79,82 |
| 7 | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100,00 | 96,37 | 99,19 |

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2021)*

### 2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi cakupan petugas perlindungan masyarakat, cakupan penegakan Perda dan cakupan patroli petugas Satpol PP. Berdasarkan data pada Tabel diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat standarnya adalah 1 (satu) RT memiliki 1 (satu) orang Linmas. Selama 5 (lima) tahun terakhir cakupan terendah terjadi pada Tahun 2016 sekitar 46,15%, dan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dan 2018 sekitar 69,23%. Namun posisi kembali mengalami penurunan menjadi 60,55% di Tahun 2019. Posisi tersebut masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu 75%.

Cakupan penegakan Perda Kabupaten Sumedang dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Hal ini tidak lepas dari intensifnya Satpol PP melakukan patroli. Cakupan patroli petugas Satpol PP dari Tahun 2015 hingga Tahun 2018 mengalami peningkatan, pada Tahun 2015 tercatat 15,38% dan di Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 69,23%. Begitu juga dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun

terakhir ini telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Hubungan antara ketuga indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga semakin intensnya petugas Satpol PP melakukan patrol maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten tidak terlalu mengalami perubahan sejak Tahun 2015 – 2017 dengan kisaran 32,04%, artinya masih 68% wilayah yang belum terjangkau pelayanan bencana kebakaran. Pada Tahun 2020 persentase cakupan pelayanan kebakaran mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai angka 93,17% atau naik sekitar 30% dari tahun-tahun sebelumnya dan capaian ini telah melampaui target sekitar 80%. Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (*response time*) di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (*respon rate*) sebesar 75%, sementara itu sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 waktu tanggap di Kabupaten Sumedang telah mencapai lebih dari 80%. Walaupun di Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 75,10% namun masih berada di atas SPM Kemendagri.

**Tabel 2.40**
**Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (1 RT, 1 orang Linmas) | 57,39 | 46,15 | 69,23 | 69,23 | 60,55 | 60,55 |
| 2 | Penegakan PERDA (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan patroli petugas Satpol PP (%) | 15.38 | 19,23 | 19,23 | 23,08 | 26,92 | 26,92 |
| 4 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 54,15 | 63,22 | 80,64 |

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) | 85.71 | 80 | 87.50 | 88,41 | 75,10 | 86,01 |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.41**
**Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | 60,55 | 60,55 | 81,42 |
| 2 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 3 | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 4 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 32,04 | 32,04 | 93,17 |
| 5 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 87,50 | 75,1 | 94,32 |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.3.1.6. Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui

bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PMKS disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.42**
**Indikator Kinerja Urusan Sosial**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya | n/a | n/a | n/a | 1,71 | 2,91 | 0,79 |
| 2 | Persentase PMKS yang Direhabilitasi | n/a | n/a | n/a | n/a | 25,72 | n/a |
| 3 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 100,79 | 99,34 | 99,75 | 81,98 | 69,91 | 63,25 |
| 4 | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 | |

*Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2020)*

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada Tahun 2019 persentase PMKS yang direhabilitasi baru mencapai 25,72% yang berarti masih perlunya peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan

kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial trennya mengalami penurunan. Tren tertinggi terjadi Tahun 2015 dengan persentase 100,79% dan tren terendah terjadi di Tahun 2019 sebesar 69,91%. Penurunan ini dikarenakan dengan adanya Bantuan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama dengan sasaran PMKS. Dan untuk persentase korban bencana alam sosial setelah tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumedang telah mencapai 100% di Tahun 2018 dan 2019.

Pada Tahun 2019, istilah PMKS telah diganti menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Istilah PPKS di dalam dokumen perencanan pembangunan Kabupaten Sumedang digunakan sejak penyusunan Tahun 2021.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Sosial sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.43**
**Indikator Kinerja Urusan Sosial**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 10,05 | 9,11 | 8,1 |

*Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2021)*

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bahwa penyebutan PMKS menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPK), oleh Kabupaten Sumedang akan mulai digunankan pada perencanaan Perubahan Tahun 2021.

### 2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan,

pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.44**
**Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 54 | 73 | 24 | 100 | 9 |
| 2 | Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) | 20 | 15 | 16 | 20 | 39,60 |
| 3 | Keselamatan dan perlindungan (%) | 20,46 | 21,33 | - | - | n/a |
| 4 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%) | 47 | 59 | 64 | 86,5 | 73,5 |
| 6 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%) | n/a | n/a | a/n | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2020)*

Untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) secara tren mengalami peningkatan. Tahun 2015 terdapat 54 kasus, dan meningkat signifikan menjadi 100 kasus.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan mengalami penurunan tren sejak Tahun 2015 – 2017. Hal ini disebabkan karena para pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning atau dengan kata lain tidak melapor kembali ke Disnakertrans, sehingga tidak dapat dihitung persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan secara akurat. Pada Tahun 2019 persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan kembali meningkat menjadi 39,60 atau naik 19,60% dari tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kenaikan akan tetapi

persentase masih dibawah 50%, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja kepada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning agar dapat terhitung persentase jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan secara akurat.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2016 hanya tercatat 21,33% perusahaan yang menerapkan K3, sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 79% perusahaan yang belum menerapkan K3. Selain itu juga diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan akan penerapan K3 di perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 100% sejak Tahun 2015 – 2019. Hal ini bermakna seluruh perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah telah diselesaikan.

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja dengan sasaran para pencari kerja atau usia kerja. Indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi mengalami tren peningkatan sampai Tahun 2018. Pada Tahun 2019, tren menurun menjadi 73,5%, hal ini terjadi karena kurangnya peminat para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah.

Perselisihan Hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 persentase

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah mencapai 100%, baik itu yang penyelesaiannya dilakukan melalui konsiliasi ataupun mediasi.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Tenaga Kerja sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.45**
**Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,52 | 7,63 | 9,89 |
| 2 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100,00 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Sumedang masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lain. Hal ini karena kurangnya keterlibatan perempuan di bidang politik, sebagai sumber pendapatan dan proporsi perempuan sebagai tenaga professional yang masih tertinggal dari laki-laki. Partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan.

**Tabel 2.46**
**Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | OPD Responsif Gender (%) | n/a | n/a | n/a | 9,68 | 48,39 | 100 |
| 2 | Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang Dihasilkan | n/a | n/a | n/a | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Persentase Kecamatan yang telah Membentuk Forum Anak dan Sekolah Ramah Anak (%) | n/a | n/a | n/a | 3,85 | 19,23 | 61 |
| 4 | Persentase Organisasi Wanita yang aktif (%) | n/a | n/a | n/a | 9,52 | 9,52 | 70 |
| 5 | Persentase Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (%) | n/a | n/a | n/a | 12,84 | 12,84 | 75 |

*Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2021)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak yang Ditangani (%) | 68 | 125 | 55 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Rasio KDRT (%) | 29,09 | 26,47 | 16 | 30,91 | n/a | n/a |

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan 112amper112 yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dari data diatas untuk OPD responsif gender pada Tahun 2020 telah mencapai 100% meningkat dengan sangat tinggi dari Tahun 2018 yang hanya 9,68%, artinya pada Tahun 2020, semua OPD telah melaksanakan perencanaan responsive gender. Untuk mendukung perencanaan responsive gender di Kabupaten Sumedang maka dibuat sebuah kebijakan yang mengatur pengarusutamaan gender. Sampai dengan Tahun 2020 telah dihasilkan 5 (lima) buah kebijakan mengenai pengarusutamaan gender.

Salah satu indikator perlindungan anak di Indonesia adalah dengan membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Di Kabupaten Sumedang SRA mulai digalakkan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2020 persentase SRA sudah mencapai 61%, ini berarti semakin banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Sumedang yang menerapkan SRA.

Selanjutnya peran wanita dalam pembangunan adalah dengan turut aktif pada organisasi wanita. Di Kabupaten Sumedang sendiri pada Tahun 2020 persentase organisasi wanita yang aktif baru 70%, sehingga perlu mendorong agar wanita berperan aktif dalam pembangunan melalui aktif berpartisipasi di organisasi wanita yang sudah terbentuk. Salah satu peran organisasi wanita ini adalah membentuk perempuan-perempuan untuk menjadi lebih berdaya sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Sumedang baru sekitar 75% di

Tahun 2020. Diharapkan persentase ini terus meningkat sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Sumedang secara umum.

Untuk indikator rasio KDRT di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Rasio KDRT terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 16% akan tetapi tahun berikutnya mengalami peningkatan 113amper dua kali lipat menjadi 30,91%. Hal ini sejalan dengan pengaduan tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani, yang mana di Tahun 2017 hanya terdapat 55 kasus pengaduan, sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 kasus pengaduan mencapai 100 kasus. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasa dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.47**
**Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kabupaten Layak Anak | 801 | 549,7 | 0 |
| 3 | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya | 5,7 | 0,7 | 9,7 |

*Sumber : Dinas Sosial, P3A Kab. Sumedang (2021)*

Pada Tahun 2020, Pemerintah Pusat tidak melakukan penilaian kepada Kabupaten/Kota dengan demikian tidak terdapat angka capaian Tahun 2020

### 2.3.2.3 Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif. Ketersediaan pangan utama tertinggi pada Tahun 2017 yang mencapai 921,66 kg/jiwa/tahun, sedangkan ketersediaan pangan utama terendah pada Tahun 2019 yaitu sebesar 200,621 kg/jiwa/tahun. Penurunan tersebut dikarenakan perbedaan cara perhitungan di tahun sebelumnya mengunakan perhitungan Gabah Kering Giling sedangkan untuk Tahun 2019 perhitungannya menggunakan standar beras hasil giling dengan perbedaan 62% dari gabah kering giling. Namun walaupun terjadi penurunan masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sumedang karena didukung juga oleh adanya regulasi ketahanan pangan, sehingga pasokan pangan aman.

**Tabel 2.48**
**Indikator Kinerja Urusan Pangan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Regulasi ketahanan pangan | ada | ada | ada | ada | Ada |
| 2 | Ketersediaan pangan utama (Kg/jiwa/Tahun) | 777.45 | 806.14 | 921.66 | 486.196 | 200,621 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2020), Ditayangkan dalam SIPD*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pangan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.49**
**Indikator Kinerja Urusan Pangan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra 2018-2023**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Sektor Pola Pangan Harapan (PPH) | 85,00 | 87,70 | 89,10 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.3.2.4. Urusan Pertanahan

1) Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang

Urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah pusat. Namun ada beberapa hal yang merupakan urusan pemerintah daerah seperti izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah, penetapan objek dan subjek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, penetapan tanah ulayat, penerbitan izin membuka tanah, dan perencanaan penggunaan tanah.

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sejak 5 (lima) Tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (Diantara Pemilik Lahan). Sampai dengan Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah 100% memfasilitasi sengketa pertanahan, akan tetapi mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 79,82%. Sedangkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang difasilitasi sudah mencapai 96,37% di Tahun 2019 dan menjadi 99,19% di Tahun 2020

Hasil Verifikasi Administrasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 2.031 Bidang Tanah, sedangkan yang telah bersertifikat saat ini sebanyak 149 sertifikat.

**Gambar 2.50**
**Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumedang**

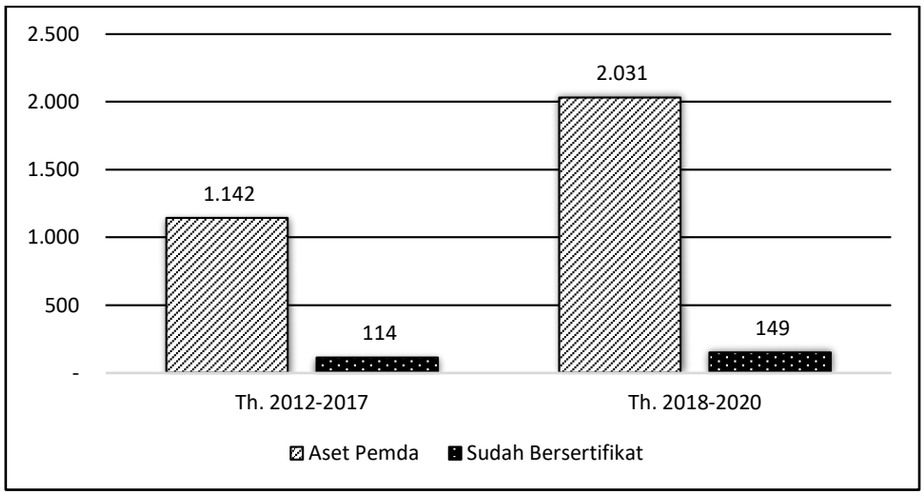


*Sumber : BPKAD Kabupaten Sumedang*

2) Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2019 yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek (Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang dll) sebagian lagi merupakan konflik (Diantara Pemilik Lahan).

3) Izin Lokasi

Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, yang leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Sumedang yang saat ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.51**
**Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Sumedang**

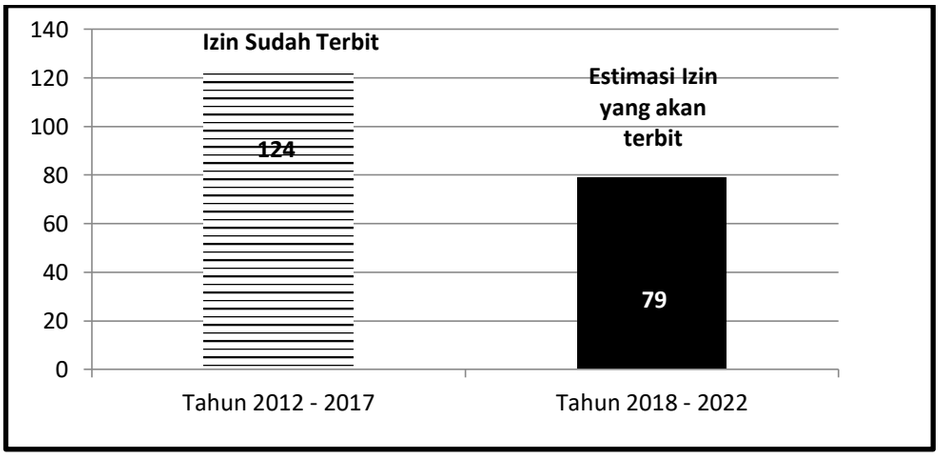


*Sumber : Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang*

**Tabel 2.50**
**Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 79,82 |
| 2 | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100,00 | 96,37 | 99,19 |

*Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (2021)*

### 2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1) Persampahan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha untuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah yang ditujukan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2019 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2018 mencapai 39% atau ± 169,86 ton/hari. Sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbulan sampah ± 436 ton/hari. Sampah terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Tahun 2019 persentase penanganan sampah melonjak naik menjadi 80,02% kemudian turun kembali menjadi 75,02 di Tahun 2020.

Pengurangan sampah dikelola di sumber sampah melalui aktivitas 3 R (*Ruduce, Reuse, Recycle*) oleh 9 (Sembilan) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 13 Bank Sampah, 12 pelaku sektor informal, dan pemilahan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Sisanya dikelola secara tradisonal oleh masyarakat di pedesaan. Tahun 2019 persentase pengurangan sampah di Kabupaten Sumedang baru 19,98% sehingga diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk mengurangi timbulan sampah.

Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sebagaimana Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah TPAS yang selama ini dipergunakan sudah melebihi daya tampung (*over load*) dan pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai antisipasi kedepan saat ini sedang dibangun TPAS di Cijeruk melalui kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan skema kewajiban Kementerian PUPR membangun fisik TPAS dan pemerintah Kabupaten Sumedang membangun jalan akses menuju TPAS. Sampai dengan saat ini pembangunan fisik TPAS dimaksud baru pada tahap komponen utama.

**Gambar 2.52**
**Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

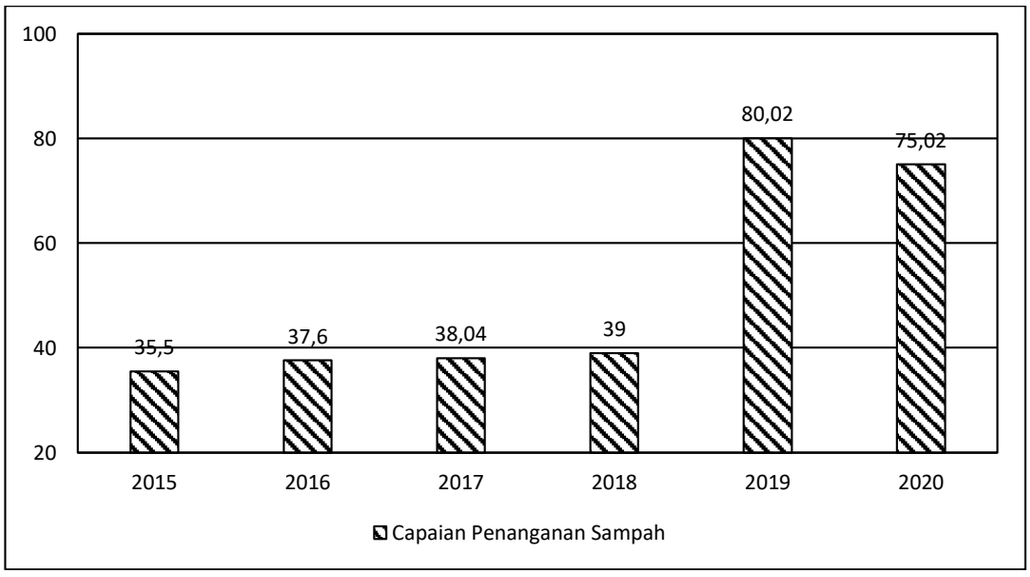


*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2021)*

2) Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3 R, Timbulan Sampah dan Volume Sampah terangkut ($M^3$/Hari)

Jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan rotasi pengangkutan sampah ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dan pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan pengolahan sampah secara 3R, walaupun secara

kondisi eksisting belum optimal dan masih sangat memerlukan pembinaan dan pendampingan. Berikut disajikan kondisi jumlah dan kapasitas TPSS/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan sampah dan Volume sampah terangkut di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2015-2019.

**Tabel 2.51**
**Jumlah dan Kapasitas Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS)/Transfer Depo, TPS 3 R, Jumlah Timbulan Sampah, dan Volume Sampah yang Terangkut**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah TPSS/Transfer Depo (unit) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah TPS 3 R (unit) | 5 | 8 | 8 | 9 | 24 |
| 3 | Kapasitas Daya Tampung TPSS/TransperDepo ($M^3$) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Kapasitas Daya Tampung TPS 3 R ($M^3$) | 170 | 200 | 230 | 245 | 1.440 |
| 5 | Timbulan Sampah (Ton/hari) | 432 | 434 | 432 | 436 | 439 |
| 6 | Volume Sampah yang terangkut ke TPAS (ton/hari) | 153,42 | 163,18 | 164,27 | 169,86 | 205 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*
* = 60 $M^3$ x 24 unit = 1.440

3) Pengawasan Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

Indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan atau UKL/UPL di Kabupaten Sumedang pada periode Tahun 2013-2018 telah mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2013 tercatat 65%, kemudian meningkat mencapai 90 % pada Tahun 2018. Namun demikian capaian Tahun 2018 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib AMDAL dan atau UKL/UPL akan meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2019 dan 2020 tidak ada pelaku usaha yang mengajukan izin wajib AMDAL.

**Tabel 2.52**
**Indikator Pengawasan AMDAL dan atau UKL/UPL dan Penegakan Hukum Lingkungan**

| No | Indikator | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pengawasan AMDAL (%) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Penegakan Hukum Lingkungan | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 13 | n/a | n/a |

*Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang (2021)*

Sedangkan indikator penegakan hukum ingkungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2013 tercatat 7 penegakan, kemudian penegakan tertinggi di Tahun 2016 dan 2018 sebanyak 13 penegakan. Banyaknya jumlah pelanggaran mengindikasikan masih perlunya pemahaman bagi *stakeholder* (pengusaha dan masyarakat) tentang peraturan terkait hukum lingkungan, namun bermakna pula meningkatnya kesadaran kritis di masyarakat sekitar usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan sehingga mereka berani melakukan pengaduan. Kondisi tersebut pada perspektif pembangunan periode Tahun 2018-2023 perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya guna meningkatkan kesadaran lingkungan bagi semua pihak.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.53**
**Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di KabupatenSumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase penanganan sampah (%) | n/a | 80,02 | 75,02 |
| 2 | Persentase pengurangan sampah (%) | n/a | 19,98 | 24,98 |
| 3 | Persentase RTH Terkelola (%) | 11,04 | 11,04 | 11,07 |
| 4 | Indeks Kualitas Air (IKA)(poin) | 47,89 | 48,15 | 64,29 |
| **No.** | **Indikator** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 5 | Indeks Kualitas Udara (IKU)(poin) | 80,29 | 80,60 | 85,24 |
| 6 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)(poin) | 50,57 | 50,96 | 58,31 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Sumedang (Tahun 2021)*

### 2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Tren rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan dan secara umum target per tahunnya tidak tercapai.

Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif (Gambar 2.53). Tren pada Tahun 2016 merupakan tren terendah pelayanan KTP dengan persentase hanya 85,05%, dan terus meningkat hingga mencapai 94,74% di Tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengadaan blanko KTP.

**Gambar 2.53**
**Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019 (%)**

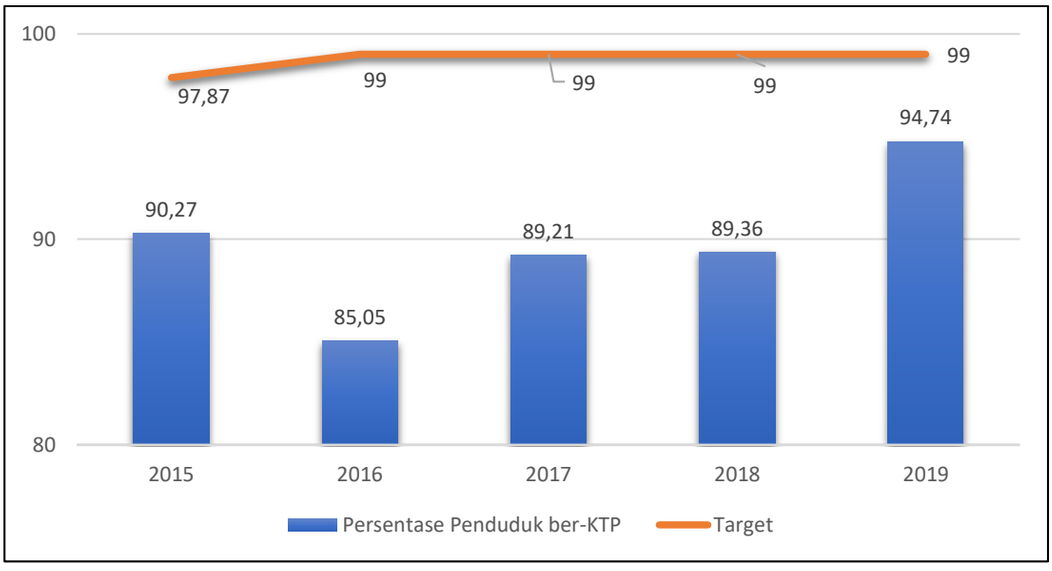


*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Untuk indikator rasio bayi ber-akte kelahiran secara tren menunjukan kenaikan. Tahun 2015 hanya 58,22% bayi lahir yang memiliki akte kelahiran, lalu Tahun 2019 naik menjadi 91,02%. Kenaikan ini karena adanya kerjasama yang dibangun oleh Disdukcapil dengan berbagai pihak yang membantu menangani proses kelahiran bayi, seperti Rumah Sakit dan Klinik Bersalin.

**Gambar 2.54**
**Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran**
**Tahun 2015-2019 (%)**

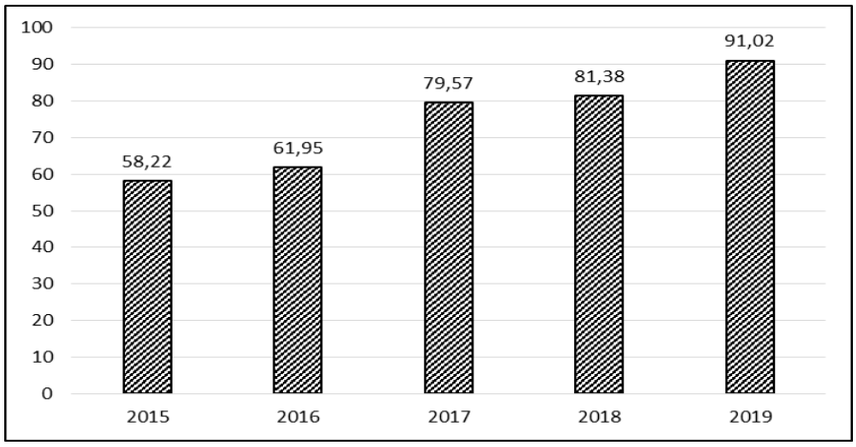


*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Rasio pasangan ber-akte nikah cenderung fluktuatif. Pada Gambar diketahui bahwa di Tahun 2015 persentase pasangan ber-akte nikah di Kabupaten Sumedang hanya 2,53% yang merupakan rasio terendah salama 5 (lima) Tahun terakhir. Peningkatan rasio terjadi sampai Tahun 2017 yang mencapai 83,23% yang turun kembali di Tahun 2018 menjadi 82,64%. Pada Tahun 2019 terdapat penurunan menjadi 81,82%.

**Gambar 2.55**
**Rasio Pasangan ber-Akte Nikah di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019 (%)**

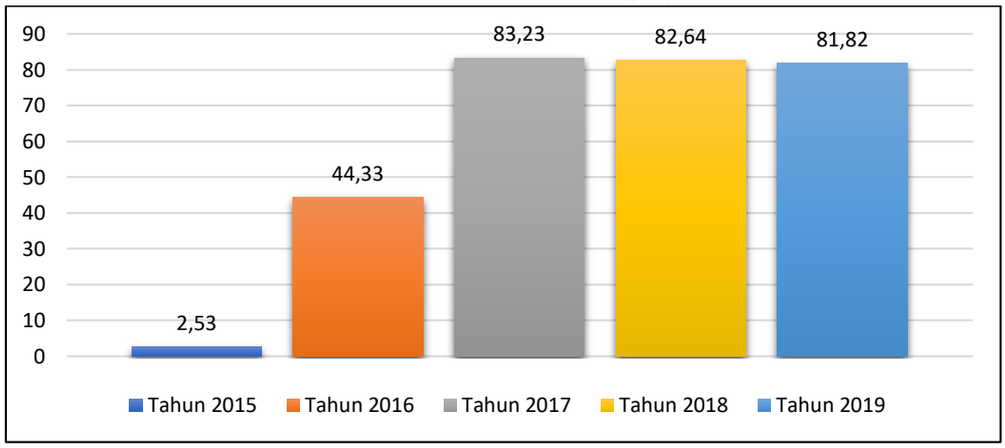


*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan. pada Tahun 2019 baru mencapai 47,07% atau dengan kata lain hanya terdapat 470 penduduk yang memiliki akta kelahiran dari 1.000 penduduk. Pencapaian ini masih belum mencapai SPM yakni sebesar 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri secara administrasi kependudukan dan diduga masih adanya masyarakat

berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir sehingga menyebabkan rendahnya persentase kepemilikan akte kelahiran.

**Tabel 2.54**
**Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk | 56,74 | 49,87 | 49,40 | 47,60 | 47,07 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2020)*

Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi sejak Tahun 2015.

**Tabel 2.55**
**Database Kependudukan dan KTP Nasional Berbasis NIK**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | ada | ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.56**
**Indikator Kinerja**
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | 76 | 80,00 | 86,74 |

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP | 89 | 97,00 | 98,26 |
| 3 | Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran | 81 | 91,20 | 95,42 |
| 4 | Persentase Data Ganda dan Anomali | 17,00 | 9,00 | 0,17 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.57**
**Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 283 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 309 | 303 | 303 | 303 | 277 | 277 |
| 3 | Persentase PKK Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Posyandu aktif | 1.661 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.692 |
| 5 | Cakupan pembinaan lembaga Adat | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| 7 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (kecamatan) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 8 | Jumlah desa yang menerapkan siskudes | 0 | 72 | 204 | 270 | 270 | 270 |
| 9 | Cakupan pembinaan lembaga BUMDesa | 37 | 77 | 141 | 183 | 270 | 270 |
| 10 | Jumlah desa yang memiliki administrasi Pemdes sesuai aturan | 276 | 270 | 270 | 270 | 277 | 270 |
| 11 | Rata -rata Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina | 833 | 794 | 1.036 | 971 | 633 | 633 |

*Sumber : DPMPD Kabupaten Sumedang (2021)*

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK mengalami penurunan tren disebabkan karena adanya penghapusan desa di wilayah Genangan Waduk Jatigede sebanyak 6 (enam) Desa. Sejak Tahun 2016 – 2020 rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD dan PKK berjumlah 277 kelompok dengan persentase PKK yang aktif mencapai 100%. Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif, Tahun 2015 tercatat berjumlah 1661 posyandu aktif dan setahun setelahnya hingga Tahun 2020 meningkat menjadi 1.692. Berdasarkan Undang-undang Desa, Lembaga Adat merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Pada Tahun 2020 jumlah Lembaga adat di Kabupaten Sumedang masih tetap 9 (sembilan) lembaga adat dibandingkan Tahun 2019.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang dimulai dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat persentase jumlah swadaya masyarakat yang semula hanya 18% di Tahun 2015 meningkat signifikan menjadi 100% di Tahun 2020.

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebagai sumber kegiatan ekonomi Desa. Pertumbuhan BUMDes dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah BUMDes yang dibina mencapai 270 BUMDes, dengan rincian sebanyak 5 (lima) BUMDes maju, 73 BUMDes berkembang dan sisanya BUMDes pemula atau perkembangannya masih jalan ditempat.

Dalam rangka peningkatan perencanaan dan penganggaran di Desa maka dibentuk Siskudes. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa. Apliksi ini mulai dikembangkan dan diperkenalkan pada Tahun 2015 dan mulai diterapkan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2016, sehingga pada tahun

tersebut hanya 72 Desa yang menerapkan Siskeudes. Siskeudes mengalami perkembangan yang positif, Tahun 2020 seluruh desa telah menerapkan Siskudes secara optimal yaitu sebanyak 270 Desa.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.58**
**Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang | 56,30 | 94,00 | 95,50 |
| 2 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | 24,80 | 29,37 | 82,22 |
| 3 | Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal | 32,20 | 100,00 | 80,47 |

*Sumber : DPMD Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah keluarga sejahtera 1, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan yang menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed), dan Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Aktif. Data indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.59**
**Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 (%)**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | 4,12 | n/a | 3,74 | 4,48 | 3,64 | 4,51 |
| 2 | Persentase Keluarga Sejahtera I | 67,03 | n/a | 36,18 | 15,74 | 42,26 | 18,26 |
| 3 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | 79,76 | 81,64 | 81,64 | 80,87 | 81,96 | 81,64 |

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | bagi perempuan menikah usia 15-49 | | | | | | |
| 4 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmetneed)* | 8,25 | 8,48 | 7,67 | 8,55 | 8,00 | 8,22 |
| 5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 93,15 | 93,62 | 93,50 | 95,62 | 86,77 | 50,54 |

*Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tren jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2019 persentase keluarga pra sejahtera mencapai 3,64% atau turun sekitar 0,48% dari Tahun 2018 sebesar 4,48%. Akan tetapi pada Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, persentase keluarga pra sejahtera meningkat signifikan menjadi 4,51% atau capaian yang kurang baik selama 6 (enam) tahun terakhir. Peran pemerintah dalam mengupayakan turunnya jumlah keluarga pra sejahtera salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa kebutuhan pokok ataupun uang.

Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Jumlah Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan tiap Tahunnya. Tren tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 67,03%. Hal tersebut diantaranya sebagai akibat perpindahan status keluarga, dari keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera I karena diperkirakan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2019 persentase jumlah keluarga sejahtera turun menjadi 42,26% dan pada masa pandemi Covid-19 yaitu Tahun 2020 capaiannya menjadi 18,26%. Penurunan jumlah keluarga Sejahtera I apabila dibandingkan dengan peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera maka dapat dimungkinkan sejumlah keluarga Sejahtera I beralih ke Keluarga Pra Sejahtera sebagai dampak pandemi Covid-19.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun belum mencapai 100%. Pada Tahun 2019 angka pemakaian kontrasepsi mencapai 81,96 yang merupakan pencapaian tertinggi selama 6 (enam) tahun terakhir.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) merupakan kondisi yang mengisyaratkan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga diambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 8,55%. Tingginya angka *unmetneed* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevelensi kontrasepsi yang akan berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadinya ledakan penduduk. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi kepada PUS terus digalakan sehingga pada Tahun 2020 cakupan *unmeet need* KB menjadi 8,22%.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2015-2019 telah mencapai target Tahunan yang ditentukan. Meskipun demikian, realisasi Tahunan bersifat fluktuatif, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 95,62% kemudian mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 86,77% bahkan pada masa pandemic Covid-19 Tahun 2020 hanya mencapai 50,54.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.60**
**Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Total Fertility Rate* (TFR) | 2,10 | 2,18 | 2,12 |
| 2 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | 4,26 | 3,64 | 4,51 |
| 3 | Persentase Keluarga Sejahtera 1 | 17,76 | 42,26 | 18,26 |

Sumber : *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Secara umum pencapaian indikator urusan perhubungan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.61**
**Indikator Kinerja Urusan Perhubungan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Rasio Ijin Trayek (%) | 21,88 | 25,40 | 26,20 | 31,84 | Rubah Indikator |
| 2 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kendaraan) | 3.088 | 2.211 | 3.413 | 3.893 | Rubah Indikator |
| 3 | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | 27,72 |
| 5 | Persentase Kendaraan Laik Jalan (%) | n/a | n/a | n/a | 83,40 | 91,92 |
| 6 | Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%) | 64,75 | 74,75 | 43,65 | 67,03 | Rubah Indikator |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2020)*

Rasio izin trayek merupakan indikator yang perhitungan nya dari 2015-2018 dan capaian pada Tahun 2015 sebesar 21,88%, meningkat menjadi 31,84% di Tahun 2018, untuk capaian Tahun 2019 tidak ada data dikarenakan Tahun 2019 indikator Rasio izin trayek berubah menjadi indikator Cakupan Trayek Angkutan Umum yang data perhitungannya sama dengan indikator sebelumnya, dimana pada Tahun 2019 cakupan trayek angkutan umum mencapai 52,86%. Peningkatan rasio izin trayek ini terjadi karena adanya penambahan jalur angkutan umum serta penambahan jumlah kendaraan umum.

Uji KIR angkutan umum merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Sumedang masih fluktuatif. Tahun 2016 jumlah uji KIR angkutan umum hanya 2.211 kendaraan dan terus meningkat mencapai 3.893 kendaraan di Tahun 2018, pada Tahun 2019 tidak terdapat data dikarenakan pada Tahun 2019 berubah menjadi indikator Persentase Kendaraan Laik Jalan dengan perhitungan persentase menjadi 91,92%

dengan jumlah kendaraan angkutan umum yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 589 bis dan 1432 angkutan kota. dan pada Tahun 2020 berkurang menjadi 62,59%.

Salah satu peningkatan angka keselamatan di jalan raya adalah dengan pemasangan rambu-rambu di beberapa jalan yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta Kawasan pendidikan. Persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sumedang sangat flukuatif karena tidak setiap tahun di adakan pemasangan baru rambu-rambu. Pada Tahun 2018 pemasangan rambu-rambu sekitar 67,03% dan perhitungan indikator ini hanya dari Tahun 2015-2018. Selanjutnya dikarenakan adanya perubahan SOTK muncul pengelolaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu perlengkapan jalan, maka untuk Tahun 2019 indikator pemasangan rambu-rambu berubah menjadi Cakupan ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan capaian 27,72%, perbedaan perhitungan maka adanya penurunan capaian dikarenakan pada indikator yang baru mencakup ketersediaan prasarana berupa dokumen, fasilitas perhubungan berupa jumlah terminal, jumlah rambu-rambu, dan jumlah Penerangan Jalan Umum.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.62**
**Indikator Kinerja Urusan Perhubungan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%) | 25,31 | 98,47 | 79,04 |
| 2 | Cakupan Trayek Angkutan Umum (%) | 58,45 | 88,32 | 50,74 |
| 3 | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum (orang) | 10.044 | 10.284 | 10.428 |
| 4 | Persentase Kendaraan Laik Jalan (%) | 83,40 | 91,92 | 62,59 |
| 5 | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas (kasus) | 1.787 | 30 | 1.535 |
| 6 | Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)(%) | 50 | 60 | 70 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime).* Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 18%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/ notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sumedang belum mencapai target, pada Tahun 2018 hanya sebesar 52%, dengan demikian masih terdapat 48% rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Namun secara keseluruhan pada Tahun 2020 pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 100% dengan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,81 atau *predikat sangat baik*. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.63**
**Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi (%) | n/a | 100 | 100 |
| 2 | Nilai SPBE (poin) | 2,46 | 2,51 | 3,81 |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, pada Tahun 2015 tercatat sebesar 71,03% koperasi aktif, kemudian terjadi kenaikan walaupun tidak besar menjadi 71,67% di Tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan keaktifan koperasi di Kabupaten Sumedang masih rendah, hal ini dapat bermakna menurunnya sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2015-2018 mengalami tren positif, di Tahun 2015 tercatat terdapat 15.149 usaha mikro dan kecil dan jumlahnya terus bertambah menjadi 20.760 usaha mikro dan kecil di Tahun 2018. Peningkatan ini diindikasikan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan potensi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan suatu produk usaha. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.64**
**Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Persentase koperasi aktif | 71,03 | 71,63 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| 2 | Jumlah usaha mikro dan kecil | 15.149 | 15.400 | 15.467 | 15.467 | 18.267 |

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.65**
**Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%) | 4,21 | 5,50 | -7,78 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan (%) | 10,64 | 12,15 | -1,46 |
| 3 | Cakupan Koperasi Aktif (%) | 72,93 | 77,41 | 38,39 |
| 4 | Jumlah UMKM (UMKM) | 15.467 | | 22.220 |

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2021.*

### 2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis. Pada Tahun 2015 jumlah investor sebanyak 33 naik tajam di Tahun 2019 dengan jumlah investor mencapai 139. Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak Tahun 2015, tenaga kerja yang terserap baik melalui PMDM maupun PMD mencapai 24,93% dan terus naik rasionya menjadi 51,70% di Tahun 2019, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja melalui PMDM.

Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP tren nya fluktuatif. Pada Tahun 2019 jumlah perizinan turun menjadi 2.519 dikarenakan proses perijinan melalui Sistem ICE MANDIRI, sehingga tahapan proses lebih tranparan dan akuntabel.

**Tabel 2.66**
**Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 33 | 56 | 106 | 106 | 139 |
| 2 | Jumlah Perizinan yang dikeluarkan | 5.088 | 6.224 | 4.790 | 4.790 | 2.519 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 24,93 | 33,70 | 51,41 | 51,41 | 51,70 |

*Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2020)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Penanaman Modal sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.67**
**Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang (Rp) | 1.106.170.000.000 | 915.825.600.000 | 1.338.465.700.000 |
| 2 | Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan (poin) | 84,11 | 85,25 | 86,25 |

*Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sampai dengan Tahun 2019, tercatat 213 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini berarti bahwa pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Jumlah organisasi kepemudaan terbagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu organisasi bidang politik sebanyak 42 organisasi; bidang olahraga sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang ekonomi sebanyak 1 (satu) organisasi; bidang sosial sebanyak 50 organisasi; dan Karang Taruna sebanyak 277 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Cakupan pembinaan olahraga sejak Tahun 2015 membina 4 (empat) cabang olahraga secara bergantian dengan jumlah klub olahraga yang tercatat pada Tahun 2019 mencapai 309 klub olah raga yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk atlet berprestasi Tahun 2019 terdapat 13 atlet yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Sumedang sampai Tingkat Nasional. Adapun untuk pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi di Tahun

2015 sejumlah 40 pelatih, dan meningkat menjadi 55 pelatih di Tahun 2019. Kedepannya perlu adanya peningkatan jumlah pelatih yang bersertifikasi terutama pada cabang olahraga populer, sehingga akan meningkatkan cabang olahraga yang dibina serta jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sumedang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.68**
**Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2018-2020**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
| 2 | Jumlah Atlet yang berprestrasi tingkat Nasional | 14 | 13 | 20 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.69**
**Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif (%) | 100 | 80 | 100 |
| 2 | Jumlah perolehan Medali/ Penghargaan Atlet Berprestasi (Medali) | 20 | 20 | 21 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.14. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup

daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dibuat "Buku Kabupaten Sumedang dalam Angka". Sejak Tahun 2015 buku tersebut selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Sumedang yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sumedang yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Buku tersebut berfungsi sebagai penyedia data yang akurat dan berkualitas. Sampai dengan Tahun 2019 persentase ketersediaan data yang akurat dan berkualitas di Kabupaten Sumedang baru mencapai 68,08%, sehingga perlu dilakukan berbagai survey serta kajian untuk mendapatkan data akurat dan berkualitas sampai 100%. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.70**
**Indikator Urusan Statistik di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Buku "kabupaten/kota dalam angka" | ada | ada | Ada | ada | Ada | Ada |
| 2 | Buku "PDRB kabupaten/kota" | ada | ada | Ada | ada | Ada | Ada |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.71**
**Indikator Kinerja Urusan Statistik**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | 45,50 | 67,80 | 100 |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Sumedang (2021)*

Sebagai upaya optimalisasi Satu Data, maka pada Tahun 2020 telah dirintis Desa Cantik Desa Simpatik. Program ini kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPS. Tujuan digulirkan program ini adalah sebagai upaya penyediaan data statistik yang dimulai dari tingkat Desa.

### 2.3.2.15. Urusan Persandian

Pengamanan informasi dalam konteks urusan persandian, yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja Urusan Persandian dapat diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. Sejak Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah. Sejak Tahun 2015 sampai dengan Taun 2018, capaian indikator hanya mencapai 3,34%, tetapi pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mencapai 99,53% atau dengan kata lain hampir seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang telah menggunakan persandian dalam komunikasinya walaupun masih belum optimal.

**Tabel 2.72**
**Indikator Kinerja Urusan Persandian**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019 (%)**

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 82,78 | 99,53 |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2021)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018, terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Persandian sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.73**
**Indikator Kinerja Urusan Persandian**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | n/a | 27,59 (8 OPD) | 100 (29 OPD) |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Indikator urusan kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian; jumlah gedung kesenian; jumlah museum; penyelenggaraan festival seni dan budaya; sarana penyelenggaraan seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; dan cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pada Tahun 2017, jumlah grup kesenian di Kabupaten Sumedang hanya 72 grup yang meningkat tajam pada Tahun 2019 menjadi 772 grup kesenian.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa gedung kesenian terjadi penambahan, di Tahun 2017 Kabupaten Sumedang baru mempunyai 1 (satu) buah gedung kesenian dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 2 (dua) buah gedung kesenian, dengan demikian para pelaku seni dapat lebih leluasa untuk mempresentasikan keseniannya.

Untuk tempat pameran hasil budaya atau kebudayaan atau museum dari tahun ke tahun jumlah museum di Kabupaten Sumedang hanya mempunyai 1 (satu) museum.

Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sumedang mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) acara yang meningkat signifikan di Tahun 2019 menjadi 23 (dua puluh tiga) acara.

Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya mulai dilakukan pada Tahun 2017 di 22 lokasi yang kemudian menurun menjadi 20 lokasi di Tahun 2018, dan menggeliat kembali di Tahun 2019 menjadi 224 lokasi.

Pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018-2023 terdapat perubahan Indikator kinerja yaitu indikator Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang sudah mencakup indikator kinerja sebelumnya serta capaian pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 100% dikarenakan peran serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melindungi dan menjaga situs-situs dan cagar budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai potensi kunjungan wisata religi maupun wisata lainnya dan sebagai warisan budaya leluhur, selain itu intens dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku-pelaku budaya dan seniman di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.74**
**Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Realisasi Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Group kesenian | 56 | 60 | 72 | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Jumlah Gedung kesenian | 1 | 1 | 1 | n/a | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah Museum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | n/a | n/a | 5 | n/a | 23 | n/a |
| 5 | Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya | 1 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 0 | 0 | 22 | 20 | 224 | n/a |
| 7 | Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan | - | - | - | - | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren indikator kinerja urusan perpustakaan selama periode Tahun 2015-2018, rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Untuk jumlah perpustakaan mengalami tren positif, dan di Tahun 2018 jumlah perpustakaan mencapai 1.011 perpustakaan di seluruh Kabupaten Sumedang (mencakup perpustakaan SD-SMP-Perpus di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah pengunjung, yang terus menurun dari tahun sebelumnya diakibatkan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan smartphone menjadi kebutuhan pokok maka jumlah pengunjung menurun sebanyak 73.671 pengunjung di Tahun 2019 menjadi 12.304 pengunjung di Tahun 2020.

Adapun untuk jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan Tahun 2020 belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, dan strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu perlu terus diupayakan adanya pustakawan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan sesuai hasil survey dari responden pengunjung terdapat 88,05% merasa puas terhadap pelayanan

perpustakaan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019, tetapi mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 82%. Dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan lebih dekat kepada masyarakat maka adanya perpustakaan keliling ke Desa dan Kecamatan dengan Cakupan Lokasi yang terlayani hanya 31% dikarenakan keterbatasan kendaraan Puskesmas Keliling, bahkan pada Tahun 2020 hanya mencapai 0,038%. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.75**
**Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah Perpustakaan | 674 | 695 | 834 | 1.011 | n/a | |
| 2 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | 30.150 | 30.632 | 33.552 | 81.679 | 73.671 | 12.304 |
| 3 | Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah | 344.250 | 179.353 | 316.200 | 81.679 | 890.319 | n/a |
| 4 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| 5 | Tingkat Kepuasan Pengunjung | - | - | - | 74,40 | 88,05 | 82,00 |
| 6 | Cakupan Lokasi yang terlayani melalui Pusling | - | - | - | 22,22 | 31 | 0,038 |

*Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Pada Tahun 2018-2020, indeks Pembangunan Literasi Masyarakat belum menjadi indikator aspek pelayanan umum urusan perpustakaan. Indikator tersebut akan mulai digunakan pada perencanaan Tahun 2021.

### 2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip secara baku, berdasarkan data menunjukkan tren yang meningkat. Pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 25% OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi 40% OPD, hal ini bermakna terdapat 12 OPD yang telah mengelola arsip secara baku pada Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sesuai Renstra Tahun 2018-2023, indikator tersebut diganti menjadi Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan Standar. Pada Tahun 2018 hanya sebesar 3,64% dan meningkat tajam pada Tahun 2020 menjadi 40%. Sedangkan untuk indikator

peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2015 terdapat 130 arsiparis yang mengikuti pelatihan peningkatan pengelolaan kearsipan, akan tetapi pada Tahun 2018 hanya 20 arsiparis yang berpartisipasi dalam pelatihan. Penurunan terjadi karena kurangnya minat ASN untuk menjadi arsiparis.

**Tabel 2.76**
**Indikator Kinerja Urusan Kearsipan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 25 | 35 | 40 | 40 | Ganti Indikator | |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 130 | 130 | 20 | 20 | n/a | n/a |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan Standar | - | - | - | 3,64 | 21,82 | 40,00 |

*Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras. Secara tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target tahunannya. Pada Tahun 2015 dan 2016 produktivitas hanya mencapai 63,02 /Ha dan 63,89/Ha, sedangkan di Tahun 2017 mengalami penurunan, produktivitas hanya mencapai 62,25/Ha padahal target tahunannya sudah diturunkan menjadi 60,68/Ha.

Pada Tahun 2019 diketahui Kabupaten Sumedang mempunyai luas tanah untuk persawahan, perkebunan dan hortikultura mencapai 91.531,84 Ha, yang terbagi atas luas areal persawahan sebesar 31,166,8 Ha, areal hortikultura 36.503,56 dan areal perkebunan 23.861,48 Ha dengan rincian 19.313,48 Ha merupakan areal tanaman tahunan dan 4.548 Ha merupakan areal tanaman semusim. Luasnya tanah untuk pertanian di Kabupaten

Sumedang berimbas pada jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk tanaman pangan di Tahun 2019 menghasilkan 837.031 ton, tanaman hortikultura (sayuran dan buah) menghasilkan 177.517 ton sedangkan perkebunan hanya mencapai 7.676 ton.

**Gambar 2.56**
**Realisasi dan Target Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**
**(kwintal per Ha)**

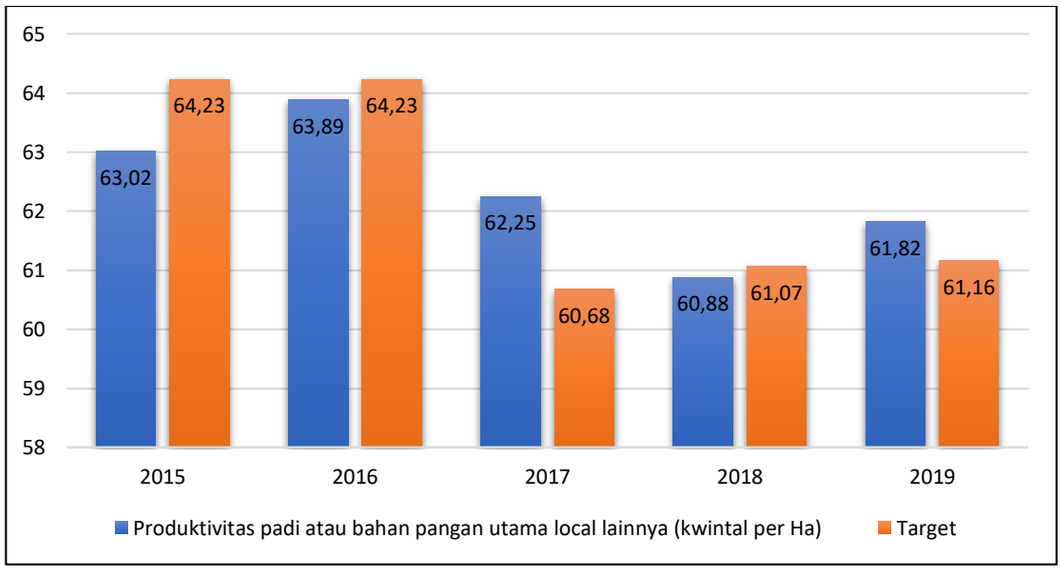


*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2020)*

Urusan pertanian tidak hanya meliputi persawahan, perkebunan dan hortikultura saja, akan tetapi meliputi juga hewan ternak. Pada Tahun 2019 populasi hewan ternak di Kabupaten Sumedang mencapai 3.389.303 ekor ternak yang terdiri dari ternak sapi (sapi perah dan sapi potong), kerbau, kuda kambing, domba, ayam (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging) dan itik. Dari hewan ternak tersebut penyumbang popilasi terbanyak adalah ayam ras pedaging yang populasinya mencapai 2.496.850 ekor, adapun populasi ternak yang terendah adalah jura hanya 402 ekor. Disamping populasi terdapat juga jumlah produksi komoditas pangan hewani sebanyak 35.909.657 ton, dengan produksi terbanyak komoditas ayam ras pedaging sebanyak 19.640.222 ton sedangkan yang terendah komoditas ayam ras petelur hanya 136,539 ton.

Memperhatikan paparan diatas bahwa indikator kinerja urusan pertanian pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023 terdapat perubahan Indikator kinerja. Dengan penjelasan bahwa untuk indikator pertumbuhan PDRB Sub sektor pertanian yang terdiri dari a) Tanaman Pangan, b) Tanaman Holtikultura dan 3) Tanaman

Perkebunan adanya peningkatan pada Tahun 2019 dari tahun sebelumnya Tahun 2018 sedangkan untuk Tahun 2020 semua indikator mencapai realisasi yang terkontraksi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

**Tabel 2.77**
**Indikator Kinerja Urusan Pertanian**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian : | | | |
| a. Tanaman Pangan | 10,04 | 19,14 | 2,18 |
| B. Tanaman Hortikultura | 3,20 | 4,00 | 1,38 |
| c. Tanaman Perkebunan | 4,12 | 18,79 | 6,52 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Sampai Tahun 2019 jumlah objek wisata di Kabupaten Sumedang 39 objek yang tersebar di 26 Kecamatan dan masih didominasi wisata berskala lokal.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2019 tercatat di Kabupaten Sumedang baru mempunyai 30 hotel saja dengan total jumlah kamar 870 kamar dan klasifikasi hotel masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan cafetaria masing-masing berjumlah 117 restoran dan 80 cafetaria. Penunjang pariwisata lainnya seperti biro wisata dan toko souvenir yang mempunyai tujuan salah satunya untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk

biro wisata baru terdapat 15 biro wisata, sedangkan upaya promosi potensi wisata baik secara lokal, nasional dan internasional sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali melalui pameran pariwisata dan sosial media. Untuk toko cenderamata baru terdapat sekitar 27 toko cenderamata saja yang tersebar di seluruh daerah wisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat aktif dalam pengembangan potensi wisata sehingga Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabpaten Sumedang cukup tinggi pada Tahun 2019 sebanyak 81.494 orang dan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 717.800 pengunjung ke berbagai objek wisata walaupun pada masa pandemi Covid 19 tidak mengurangi kunjungan wisata

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang sangat berkembang pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan mudah diakses secara nasional maupun internasional, dari Tahun 2018 hanya 44% adanya peningkatan menjadi 63% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 100%. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.78**
**Indikator Kinerja Urusan Pariwisata**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kunjungan wisatawan (orang) | 498.472 | 81.494 | 881.822 |
| 2 | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional (%) | 44,00 | 63,00 | 105,00 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

Dalam upaya peningkatan pariwisata, Kabupaten Sumedang telah memiliki acuan yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021-2025.

### 2.3.3.3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan sub sektor perikanan pada Tahun 2020 sebesar 3,48% yang didukung oleh 17.984 orang pembudidaya perikanan. Hal ini berdampak pada produksi perikanan di Kabupaten Sumedang yang terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 produksi perikanan baru 6.673 ton dan terus meningkat menjadi 9.629 ton di Tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga perikanan selama periode Tahun yang sama. Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan di masyarakat Kabupaten Sumedang per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.79**
**Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2019**

| No. | Indikator | | Realisasi Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Produksi perikanan (ton) | 5.987 | 6.301 | 6.673 | 8.026 | 8.146 | 8.286 | 9.020 | 9.269 |
| 2 | Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) | 15,20 | 13,17 | 15,04 | 16,36 | 16,40 | 16.53 | 16.62 | 17,29 |
| 3 | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | | | | | | | | |
| | A. Atas dasar harga berlaku (%) | n/a | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0,65 | 0.65 | BPS |
| | B. Atas dasar harga konstan (%) | n/a | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | BPS |
| 6 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RT) | 19.160 | 19.160 | 21.131 | 22.096 | 22.097 | 21.102 | 21.108 | 21.952 |

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2020), Ditayangkan dalam SIPD*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.80**
**Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | 2,32 | 2,34 | 3,48 |
| 2 | Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan | 6,48 | 4,18 | 5,78 |

*Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor kehutanan perikanan dan sektor industri pengolahan. Pada Tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumedang tercatat 15,65%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat 305 pedagang/usaha informal kemudian meningkat menjadi 665 pedagang/usaha informal pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dan 2019 data dimaksud tidak dapat dihitung kembali dikarenakan bukan menjadi indikator kinerja urusan perdagangan.

**Tabel 2.81**
**Indikator Kinerja Urusan Perdagangan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 305 | 600 | 665 | Ganti Indikator | |

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2020)*

Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2019 menjadi Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan capaian Tahun 2015 sebesar 3,67% dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar 5,23%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan aktifitas perdagangan yang positif seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sera bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah ke atas. Namun demikian, karena Pandemi Covid-19

menyebabkan pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran terkontraksi sangat dalam yaitu mencapai minus 7,78%. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.82**
**Indikator Kinerja Urusan Perdagangan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | 4,21 | 5,23 | -7,78 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2017, urusan Perindustrian memiliki indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dengan angka capaian 321 kelompok pengrajin. Tahun 2019 sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumedang dengan kontribusi sebesar 12,15%. Jika berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil, industri dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala besar. Dan yang merupakan kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Peran pemerintah Kabupaten Sumedang pada pertumbuhan industri pengolahan sangat intens dengan mengembangkan *One Vilage One Product (OVOP)* sehingga mendorong lapangan usaha di masyarakat berkembang.

**Tabel 2.83**
**Indikator Kinerja Urusan Perindustrian**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (%)**

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan bina kelompok pengrajin | 303 | 315 | 321 | n/a | n/a |

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang (2018)*

Indikator Kinerja selanjutnya sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2023 diubah menjadi Indikator Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan. Pada Tahun

2020, laju pertumbuhan terkontraksi menjadi minus 1,46% yang disebabkan terjadinya pandemic Covid-19.

**Tabel 2.84**
**Indikator Kinerja Urusan Perindustrian**
**di Kabupaten Smedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | 10,64 | 12,17 | -1,46 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.3.6. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh Pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah ysng padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan- permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini

mungkin. Selama periode Tahun 2015-2017 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 42 KK, yaitu masing-masing 16 KK pada Tahun 2015, 21 KK pada Tahun 2016, dan 5 KK pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada transmigran yang ditempatkan karena pada tahun ini Kabupaten Sumedang tidak mempunyai kuota. Dan pada Tahun 2019 Sumedang kembali mendapatkan kuota untuk melakukan transmigrasi akan tetapi hanya 6 (enam) KK saja. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.85**
**Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| Uraian/ Indikator | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Lokasi | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Lokasi | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Lokasi | Jumlah KK | Jumlah KK |
| Jumlah Peserta Transmigran Umum | 5 Kk | 18 Jiwa | Upt Kancu'u Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah | 6 Kk | 21 Jiwa | Upt Malakoni Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu | 5 Kk | 18 Jiwa | Upt Parudongka Kec. Rauta Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara | Tidak Ada Penempatan Dikarnakan tidak ada kuota | 6 KK |
| | 6 Kk | 21 Jiwa | Upt Malakoni Bengkulu Utara Prov. Bengkulu | 10 Kk | 51 Jiwa | Upt Parudongka Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara | | | | | |
| | 5 Kk | 15 Jiwa | Upt Laeya Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara | 5 Kk | 16 Jiwa | Upt Jud Nganti Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan | | | | | |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2020)*

### 2.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

#### 2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada Tahun 2018-2020 telah melaksanakan beberapa indikator yaitu Nilai LPPD, Nilai Sakip Kabupaten, Indeks Reformasi Birokrasi dan Persentase Perangkat Daerah yang capaian target kinerja tahunannya 'Baik'

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kedua terbawah se-Jawa Barat. Pada Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan menjadi BB dan Tahun 2020 menjadi BB. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak Tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Sejak Tahun 2018, penilaian LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD.

**Tabel 2.86**
**Indikator Kinerja Unsur Sekretariat Daerah**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai LPPD Kabupaten | 3,15 | | Kemendagri |
| 2 | Nilai SAKIP Kabupaten | B | B | BB |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | 56,05 | 22,38 | 66,74 |
| 4 | Presentase perangkat daerah yang capaian target kinerja tahunannya "baik" | n/a | 100 | 75,94 |

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD jika ditinjau dari realisasi indikator pada Tabel 2.87 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk indikator tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2015 telah mencapai target, karena rencana kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang disusun setiap Tahun.

Kemudian indikator tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) juga tercapai dengan adanya dokumen RKPD setiap Tahun.

Adapun indikator terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD setiap Tahunnya telah tercapai. Dan untuk Persetujuan APBD sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu tiap Tahunnya.

**Tabel 2.87**
**Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Realisasi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang (ada/tidak) | ada | ada | ada | ada | Ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak) | tidak (RPJM), ada (RKPD) | tidak (RPJM), ada (RKPD) | tidak (RPJM), ada (RKPD) | tidak (RPJM), ada (RKPD) | Tidak (RPJM), ada (RKPD) |
| 3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak) | ada | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Sekretariat DPRD Dewan Kabupaten Sumedang (2020)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Pengawasan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.88**
**Indikator Kinerja Unsur Sekretariat DPRD**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**
**(%)**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 93,4 | 92,75 | 93,68 |

*Sumber : Sekretariat DPRD Dewan Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3.5.1. Unsur Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018 - 2023 sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023. Selain itu, selama periode Tahun 2018 – 2023 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 juga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018.

**Tabel 2.89**
**Indikator Kinerja Unsur Perencanaan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2021)*

Selain tersedianya dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu diperhatikan juga mengenai tingkat kesesuaian antar dokumen, seperti kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, dan Renja dengan RKPD. Apabila sinkronisasi program dan kegiatan antar dokumen sudah sesuai maka akan menghasilkan sistem perencanaan yang baik serta tercapainya sasaran dan target pembangunan Sumedang. Perencanaan di Kabupaten Sumedang selama ini dilakukan melalui sistem RKPD online yang sudah terintegrasi dengan system keuangan Sumedang (SIPKD), sehingga penganggaran program dan kegiatan tidak akan keluar dari perencanaan yang sudah disepakati sesuai dengan tema pembangunan serta prioritas pembangunan.

Untuk dapat melihat pencapaian target dari indikator-indikator pembangunan maka dilakukan evaluasi kinerja dari tiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga dengan melakukan evaluasi kinerja akan terukur seberapa berhasilnya perencanaan dan seberapa besar target dan sasaran pembangunan yang sudah tercapai.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa untuk Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan SIPD. Demikian pun dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem aplikasi tersebut adalah sistem yang terintegrasi antara pemerintah Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan terintegrasinya sistem maka kesesuaian perencanaan antar pemerintahan diharapkan menjadi konsisten dan sinergi.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Perencanaan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.90**
**Indikator Kinerja Unsur Perencanaan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Bedasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD | 85,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD | 85,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD | 85,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik" | 96,50 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (2021)*

### 2.3.5.2. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan dapat dipertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas LPP APBD sejak Tahun 2015. Dari Tahun 2015 -2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan Belanja untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam peraturanperundangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan dalam perencanan penganggaran.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain persentase SILPA terhadap Penerimaan Daerah dan persentase terhadap Belanja Daerah yang diharapkan akan semakin menurun, dan realisasi Belanja Tidak Langsung yang masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung.

**Tabel 2.91**
**Indikator Kinerja Urusan Keuangan**
**di Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja) (%) | 6,65 | 6,22 | 0,86 | 4,06 | 3,74 | 4,71 |
| 3 | Persentase SILPA terhadap Total Penerimaan Daerah (%) | 6,23 | 6,12 | 0,84 | 3,97 | 3,42 | 3,83 |
| 4 | Persentase program yang tidak terlaksana (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| 5 | Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%) | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | n/a | n/a |
| 6 | Persentase belanja pendidikan (20%) (%) | 39,70 | 38,93 | 37,34 | 38,52 | 39,45 | 39,04 |
| 7 | Persentase belanja kesehatan (10%) (%) | 13,30 | 14,59 | 15,64 | 12,95 | 11,81 | 15,29 |
| 8 | Persentase Belanja Langsung (%) | 48.53 | 38.96 | 42.22 | 40.16 | 54,82 | 43,24 |
| 9 | Persentase Belanja tidak langsung (%) | 51.47 | 61.04 | 57.78 | 59.84 | 45,18 | 56,76 |
| 10 | Persentase belanja bagi hasil ke desa (%) | 0.24 | 0.22 | 0.54 | 0.68 | 0,81 | 0,69 |
| 11 | Ketepatan waktu penetapan APBD | Tidak Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)*

Seiring dengan digunakannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 telah difasilitasi oleh aplikasi SIPD. Terintegrasinya sistem antara perencanan dengan penganggaran melalui SIPD, selain memudahkan Pemerintah Daerah juga memudahkan bagi Pemerintah Pusat untuk memantau pelaksanaan APBD.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Keuangan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.92**
**Indikator Kinerja Unsur Keuangan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP |
| 2 | APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 16,47 | 13,80 | 17,30 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah | 77,34 | n/a | 90,49 |

*Sumber : Bappppeda (2021) (diolah)*

### 2.3.5.3. Unsur Kepegawaian

Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator kinerja urusan kepegawaian. Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 4 (empat) hal yang dinilai dalam IP ASN yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Tahun 2020 IP ASN Kabupaten Sumedang 65,03, artinya tingkat profesionalitas ASN di Sumedang belum tercapai maksimal sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan IP ASN Sumedang.

Indeks Sistem Merit ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Indeks sistem merit ASN di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebesar 74,47. Indikator kinerja urusan Kepegawaian pada Tahun 2018-202 sebagaimana tabel di bawah

**Tabel 2.93**
**Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 30 | 30 | 33 | 33 | 23 |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 1128 | 1128 | 1042 | 1042 | 987 |
| 3 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | 11.799 | 10.497 | 10.269 | 10.269 | 6.894 |

*Sumber: Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kab. Sumedang (2020)*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Kepegawaian sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.94**
**Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**
**(poin)**

| No | Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN | 59,00 | 59,45 | 65,03 |
| 2 | Indeks Sistem Merit ASN | 48,90 | 60,88 | 74,47 |

*Sumber: Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kab. Sumedang (2021)*

### 2.3.5.4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik suatu pekerjaan. Pendidikan dan Pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Sampai dengan Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Sumedang belum dapat menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan secara mandiri, dengan demikian untuk urusan Pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sumedang tidak memiliki indikator kinerja sasaran kepala Perangkat Daerah.

### 2.3.5.5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan infromasi kebutuhan pengguna yang dilanjutkan dengan untuk mendapatkan hasil dan mengkaji keefektifan hasil penelitian dimaksud.

Dalam kontek perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dilaksanakan melalui studi literatur maupun kunjungan lapangan untuk menghasilkan rancangan kebijakan. Adapun pengembangan berupa pengujian efektivitas dan validasi rancangan kebijakan hasil penelitian sehingga rancangan kebijakan tersebut menjadi kebijakan teruji dan dapat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel 2.95**
**Indikator Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 (%)**

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: BAPPPPEDA (2021)*

### 2.3.6. Fokus Fungsi Unsur Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Sumedang oleh BPK RI sejak Tahun 2015, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan yang cukup baik dan memadai, terutama di bidang keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja pengawasan terkait tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan SKPD terkait yang mencapai hampir 40%, pada Tahun 2019. Sedangkan untuk indikator Penurunan Temuan Penyimpangan tehadap APBD pada Tahun 2019 ditemukan hanya 8%. Hal ini menunjukkan adanya kualitas dan kuantitas yang memadai dari tenaga auditor dan sarana penunjang tugasnya, selain itu juga didukung oleh Tingkat Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model (IACM)) Pengawas/Auditor di Kabupaten Sumedang yang sudah berada di level 3.

Indikator persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK mencapai capaian tertinggi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 92,45%. Akan tetapi pada tahun-tahun selanjutnya, capaian semakin menurun. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan

pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD.

Indikator Jumlah Pelanggaran Pegawai pada Tahun 2020 telah menunjukkan capaian 0%. Hal tersebut menunjukkan sudah semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan peraturan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja koordinasi Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya.

**Tabel 2.96**
**Indikator Kinerja Unsur Pengawasan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020 (%)**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | 73,23 | 72,82 | 71,23 | 55,76 | 40,08 | 60,20 |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | 0,07 | 0,15 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | 65,7 | 92,45 | 66,67 | 67,80 | 66,00 | 79,60 |

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang (2020)*

Salah satu indikator urusan pengawasan adalah mengevaluasi Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD yang terdapat di Kabupaten Sumedang menunjukan hasil yang memuaskan. Rata-rata nilai yang dicapai sudah diatas 60% atau dengan kata lain sudah mencapai kategori “B”. Untuk SKPD yang mencapai kategori nilai “A” dengan nilai hasil evaluasi diatas 71%, meliputi RSUD, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Bappppeda, dan untuk SKPD lainnya baru mencapai kategori “B” dan “BB”, sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam hal kinerja aparaturnya. Sedangkan untuk nilai hasil evaluasi kinerja implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang masih banyak yang berkategori “C” yang didominasi oleh

Kecamatan. Untuk itu pembinaan SAKIP perlu terus dilakukan sehingga kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih baik.

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja fungsi Pengawasan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.97**
**Indikator Kinerja Unsur Pengawasan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah (%) | 20 | 80 | 80 |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" (%) | 36 | 80 | 80 |
| 3 | Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM | Level 3 | Level 3 | level 3 |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (%) | n/a | 20 | 100 |
| 5 | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi (%) | 75 | 82 | 85 |
| 6 | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD (%) | 8,79 | 8 | 7 |

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.3.7. Fokus Fungsi Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Kabupaten Sumedang memiliki 26 (dua puluh enam) kecamatan dan 7 (tujuh) kelurahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Kinerja Kecamatan diukur sebagai bagian dari indikator kinerja program di Sekretariat Daerah yaitu indikator persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori 'baik'. Untuk itu, pada Tahun 2018-2020, indikator kinerja kewilayahan tidak diukur secara khusus dalam RPJMD.

Namun demikian, dalam Perubahan RPJMD, apabila memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Kecamatan memiliki program tersendiri yaitu (1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, (3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan (4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

### 2.3.8. Fokus Fungsi Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Secara umum kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik selama periode Tahun 2015 - 2017 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya konflik antar suku dan konflik antar umat beragama/keyakinan di Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah LSM, Ormas, dan OKP selama periode Tahun 2015 - 2017 mengalami fluktuasi. Dari 517 ormas yang tedata pada Tahun 2016 turun menjadi 257 ormas di Tahun 2017. Kemudian untuk jumlah organisasi politik daerah selama periode Tahun 2015 - 2017 tidak mengalami perubahan yakni 12 organisasi politik daerah. Dalam perspektif kedepan, pembinaan terhadap ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan ormas, serta kewaspadaan daerah perlu terus ditingkatkan dalam membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dalam lingkup kehidupan majemuk yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.98**
**Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Frekwensi Konflik Antar Suku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah LSM, Ormas, dan OKP | 60 | 517 | 257 | 186 | 186 | 565 |
| 4 | Jumlah Organisasi Politik Daerah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |

*Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang (2019), Ditayangkan dalam SIPD*

Namun demikian seiring dengan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Tahun 2018 terdapat perubahan indikator kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.99**
**Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020**
**Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023**

| No. | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks kerukunan umat beragama | 72,2 | n/a | n/a |
| 2 | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | 80,6 | 83,5 | 79 |
| 4 | Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Kesbangpol Kabupaten Sumedang (2020)*

Indikator Indeks Kerukunan Beragama, sejak Tahun 2019 sudah tidak dilakukan pengukuran untuk tingkat Kabupaten. Demikian juga dengan indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu pada perencanaan tahun selanjutnya tidak dijadikan indikator karena Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali sehingga apabila dijadikan indikator tahunan, akan sulit diukur capaian per tahun nya.

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. PDRB per Kapita

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing Tinggi dengan nilai 2,5940.

Tren pengeluaran per kapita masyarakat Sumedang secara umum selalu mengalami kenaikan, namun dari Tahun 2019, semula mencapai Rp10,406 juta mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp10,217 juta. Hal tersebut tidak terlepas dari akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Secara tren pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang masih berada di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10,845 juta.

**Gambar 2.57**
**Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2015-2020**

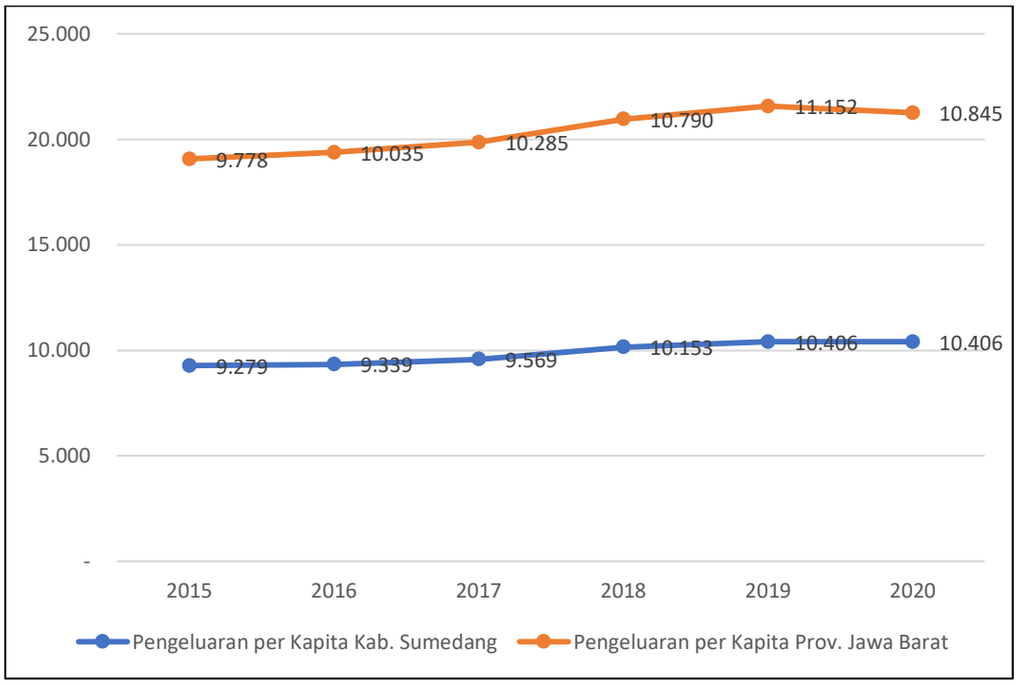


*Sumber: BPS Kab. Sumedang dan Bappppeda Kab. Sumedang (2021)*

### 2.4.2. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Sumedangan masih berada pada angka 70% masyarakat yang dapat mengakses air bersih pada Tahun 2017. Capaian ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 yang baru mencapai angka 60%. Untuk mencapai target nasional sebesar 100% penduduk yang memiliki akses air bersih di Tahun 2019, akan tetapi pada tahun tersebut pun masih 79,92% masyarakat yang terlayani akses air bersih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang masih harus terus melakukan perbaikan. Terutama dalam hal penyediaan air di wilayah-wilayah yang memiliki akses sulit terhadap sumber air bersih.

**Gambar 2.58**
**Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (%)**

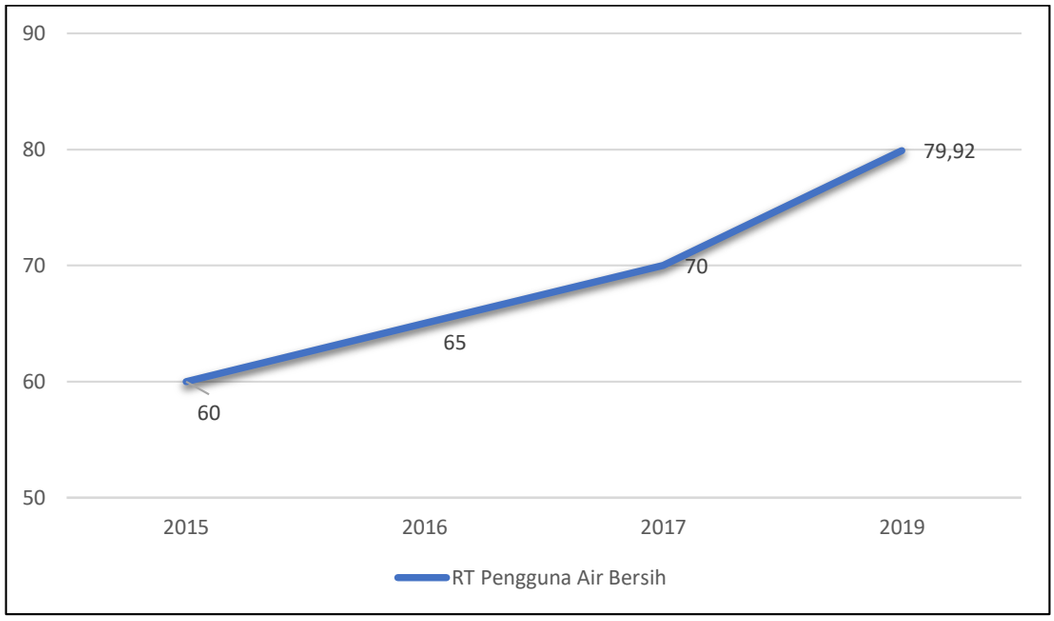


*Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang (2020)*

Untuk Kecamatan penyumbang akses air bersih terendah yaitu Kecamatan Cimanggung, diperkirakan sumber-sumber air bersih untuk masyarakat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi terutama produksi makanan dan minuman di wilayah tersebut. Sedangkan untuk penyumbang akses air bersih tertinggi yaitu Kecamatan Tanjungmedar, diperkirakan pada wilayah tersebut masih banyaknya sumber mata air yang dapat dipakai sebagai sarana air bersih.

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah : (1) lama proses perizinan; (2) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.100**
**Indikator Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020**

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Lama Proses Perizinan | 14 HK | 14 HK | 14 HK | Max. 5 HK | Max. 5 HK | Max. 5 HK |
| Jumlah dan macam pajak retribusi daerah | Retribusi IMB, Ho dan Trayek | Retribusi IMB, Ho dan Trayek | Retribusi IMB, Ho dan Trayek | Retribusi IMB, Ho dan Trayek | Retribusi IMB, Ho dan Trayek | Retribusi IMB, Ho dan Trayek |
| Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu | Perda Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3) jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait. Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

#### 2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakan tergolong sebagai negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tahun 2020 angka ketergantungan Kabupaten Sumedang mencapai 48,23%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak

produktif lagi. Walaupun kenaikan penduduk terbesar di Kabupaten Sumedang berkisar di usia < 15 tahun yang merupakan usia non produktif, namun secara total jumlah penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun tetap tertinggi, sehingga berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

**Tabel 2.101**
**Rasio Ketergantungan**
**di Kabupaten Smedang**
**Tahun 2015-2020**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun | 256.688 | 256.140 | 259.870 | 267.175 | 265.798 | 275.312 |
| Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun | 94.584 | 100.345 | 95.447 | 100.574 | 109.319 | 101.934 |
| Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 Tahun + usia >64 Tahun) | 351.272 | 356.485 | 355.317 | 367,749 | 375.117 | 377.246 |
| Penduduk Usia 15-64 | 759.569 | 775.974 | 784.247 | 780.449 | 779.341 | 782.208 |
| Rasio ketergantungan | 46,25 | 45,94 | 48,87 | 47,12 | 48,13 | 48,23 |

*Sumber : Bappppeda Kab. Sumedang (diolah) (2021)*

### 2.4.4.2. Rasio Pencari Kerja Lulusan S1/S2/S3 dan Penduduk usia 15 tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa pada Tahun 2020 pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S-1 mencapai 390 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 di mana pencari kerja yang terdaftar berjumlah 1.576 orang, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk pencari kerja yang terdaftar dengan tingkat pendidikan S-

2 dan S-3 di tahun yang sama tidak tredapat data pencari kerja. Hal tersebut kemungkinan banyak tenaga kerja yang tidak menggunakan kartu kuning pada saat mencari kerja. Dari sisi rasio lulusan pun terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia pencari kerja di Kabupaten Sumedang masih rendah, karena rasio lulusan S-1/S-2/S-3 pencari kerja di Kabupaten Sumedang hanya 0,03%

**Tabel 2.102**
**Rasio Pencari Kerja Lulusan S-1/S-2/S-3**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019**
**(%)**

| Uraian | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-1 | 960 | 108 | 143 | 1.576 | 511 | 390 |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Pencari kerja yang terdaftar lulusan S-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Lulusan S-1/S-2/S-3 | 964 | 113 | 150 | 1.588 | 513 | 390 |
| Jumlah Penduduk | 1.137.273 | 1.142.097 | 1.146.435 | 1,148,198 | 1.154.458 | 1.159.454 |
| Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 | 8,48 | 1,0 | 1,31 | 13,83 | 0,04 | 0,03 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2021)*

Jika mengamati data tabel di bawah, pada Tahun 2020 terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa, ini berarti sektor jasa saat ini mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu peningkatan jenjang pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pengangguran.

**Tabel 2.103**
**Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas**
**Berdasarkan Lapangan Pekerjaan**
**di Kabupaten Sumedang Tahun 2020**
**(jiwa)**

| No | Lapangan Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1, | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 148.643 |
| 2. | Industri Pengolahan | 153.930 |

| No | Lapangan Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 3 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 272.033 |
| Jumlah | | 574.606 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2021)*

### 2.4.4.3. Jumlah PNS menurut Pendidikan yang ditamatkan

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (*Benjamin S. Bloom, 1956*).

Namun demikian dalam perspektif kedepan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.104**
**Jumlah PNS yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (orang)**

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah PNS di Pemda Sumedang | 12.957 | 11.656 | 11.344 | 10.614 | 10.006 | 9.945 |
| PNS Lulusan SMA ke Bawah | - | 2.054 | - | 1.858 | 1.616 | 1.448 |
| PNS Lulusan S1 | 7.228 | 6.450 | 6.305 | 6.337 | 6.038 | 6.416 |
| PNS Lulusan S2 | 567 | 574 | 552 | 538 | 548 | 539 |
| PNS Lulusan S3 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 |

*Sumber : Bappppeda Kabupaten Sumedang dan BKPSDM Kab. Sumedang (2021), Ditayangkan dalam SIPD*

## 2. 5. Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVK). Adapun kriteria penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.105**
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|---|---|---|
| 1 | 91 % ≤ Nilai ≤ 100 % | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 % ≤ Nilai ≤ 90 % | Tinggi |
| 3 | 66 %≤ Nilai ≤ 75 % | Sedang |
| 4 | 51 % ≤ Nilai ≤ 65 % | Rendah |
| 5 | Nilai ≤ 50 % | Sangat Rendah |

*Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017*

Evaluasi dilaksanakan atas kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020. dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.106**
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**
**Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020**

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **1.1.** | **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | |
| 1.1.1. | PDRB ADHB (trilyun rupiah) | 32,53 | 35,44 | 35,49 | | BT |
| 1.1.2. | PDRB ADHK 2010 (trilyun rupiah) | 22,51 | 23,93 | 23,67 | | BT |
| 1.1.3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,48 | 6,32 | -1,12 | 2,1 | BT |
| 1.1.4. | PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah) | 28,30 | 30,76 | 30,74 | | BT |
| 1.1.5. | Persentase Penduduk Miskin | 9,76 | 9,05 | 10,26 | 10,70 | M |
| 1.1.6. | Indek Kedalaman Kemiskinan | 1,72 | 1,05 | 1,72 | | BT |
| 1.1.7. | Indeks Keparahan Kemiskinan | 0,47 | 0,21 | 0,42 | | BT |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| **1.2.** | **Fokus Kesejahteraan Sosial** | | | | | |
| 1.2.1. | Indeks Pembangunan Manusia (poin) | 70,99 | 71,46 | 71,64 | 72,25 | BT |
| 1.2.2. | Angka Harapan Hidup (tahun) | 72,14 | 72,29 | 72,43 | 72,44 | BT |
| 1.2.3. | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,94 | 12,96 | 12,97 | 13,44 | BT |
| 1.2.4. | Rata – rata lama sekolah (tahun) | 8,17 | 8,27 | 8,51 | 8,48 | M |
| 1.2.5. | Pengeluaran per kapita (juta rupiah) | 9,57 | 10,41 | 10,22 | 10,38 | BT |
| 1.2.6. | Indeks Pembangunan Gender | 94,40 | 95,01 | 95,18 | 95,34 | BT |
| 1.2.7. | Indeks Pemberdayaan Gender | 68,70 | 70,57 | 70,78 | 69,77 | M |
| 1.2.8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,52 | 7,63 | 9.89 | 9,38 | BT |
| 1.2.9. | Indeks Gini | 0,420 | 0,344 | 0,384 | 0,35 | BT |
| **2** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **2.1** | **Fokus Urusan Wajib** | | | | | |
| **2.1.1.** | **Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar** | | | | | |
| **2.1.1.1** | **Urusan Pendidikan** | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| . | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | 106,75 | 106,83 | 99,34 | 106,93 | BT |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 103,42 | 103,62 | 97,96 | 103,72 | BT |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 105,23 | 105,34 | 97,45 | 105,44 | BT |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 102,78 | 102,99 | 88,51 | 203,19 | BT |
| | Persentase Guru yang Bersertifikat (%) | 65,03 | 63,26 | 90,23 | 73,77 | BT |
| | Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik (%) | 13,45 | 21,51 | 37,92 | 29,5 | M |
| | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD) | 1 : 27 | 1 : 27 | 1:17 | 1:27 | M |
| | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP) | 1 : 32 | 1 : 32 | 1:15 | 1:32 | M |
| | APK PAUD (%) | 88,44 | 89,53 | 80.60 | 89,62 | BT |
| | Persentase PAUD yang terakreditasi (%) | 31,08 | 74,70 | 45.32 | 74,7 | BT |
| | Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan (%) | 1,35 | 1,63 | 3.00 | 1,9 | M |
| | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah (%) | n/a | 0 | 100 | 100 | S |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| **2.1.1.2.** | **Urusan Kesehatan** | | | | | |
| | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) | 16 | 14 | 21 | 10 | BT |
| | Jumlah Kematian Bayi (jiwa) | 155 | 114 | 137 | 120 | BT |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan (poin) | 78,73 | 82,50 | 87 | 87 | S |
| | Persentase Balita Stunting (%) | 32,20 | 26,00 | 12,05 | 26 | M |
| | Prevalensi HIV/AIDS | <0.04 | <0,04 | <0.04 | <0.04 | S |
| | Angka Kesakitan Penyakit Menular | 113/100.000 | 56/100.000 | 113/100.000 | 109/100.000 | BT |
| | Universal Health Coverage (UHC) (%) | 73,17 | 76,46 | 73,17 | 97 | BT |
| | Indeks Keluarga Sehat (IKS) (poin) | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,3 | BT |
| **2.1.1.3.** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | |
| | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap (%) | 62,80 | 70,75 | 76,96 | 70,8 | M |
| | Rasio jaringan irigasi (%) | 60,00 | 62,02 | 64,46 | 64 | M |
| | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang (%) | 100,00 | 70,22 | 75,11 | 100 | BT |
| | Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi (%) | 0,00 | 23,00 | 40,06 | 40 | M |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | | | | | | |
| **2.1.1.4.** | **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | | |
| | Rasio Rumah Layak Huni | 80,00 | 80,13 | 80,34 | 81,33 | BT |
| | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh | 0,31 | 0,30 | - | 0,27 | BT |
| | Persentase Rumah Tangga berakses air minum | 79,02 | 79,92 | 80,45 | 83 | BT |
| | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | 55,00 | 55,23 | 55,29 | 65 | BT |
| | Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata | 20,00 | 35,00 | 58,75 | 48,75 | M |
| **2.1.1.5.** | **Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | |
| | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | 69,23 | 60,55 | 56,99 | 70 | BT |
| | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | S |
| | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | S |
| | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 32,04 | 32,04 | 65,22 | 70 | BT |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 87,50 | 75,10 | 84,89 | 90 | BT |
| **2.1.1.6.** | **Sosial** | | | | | |
| | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 10,05 | 9,11 | 8,1 | 8,45 | BT |
| **2.1. 2.** | **Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar** | | | | | |
| **2.1.2.1** | **Urusan Tenaga Kerja** | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,52 | 7,63 | 9,89 | 6,35 | BT |
| | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | S |
| **2.1.2.2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | |
| | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | S |
| | Kabupaten Layak Anak | 501 | 549,70 | 549 | 650 | BT |
| | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya | 0,70 | 0,70 | 9.7 | 2,7 | M |
| **2.1.2.3.** | **Pangan** | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 85,00 | 87,70 | 89,10 | 88,50 | M |
| **2.1.2.4.** | **Pertanahan** | | | | | |
| | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | 100,00 | 100,00 | 79,82 | 100 | BT |
| | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | 100,00 | 96,37 | 99.19 | 100 | BT |
| **2.1.2.5.** | **Lingkungan Hidup** | | | | | |
| | Persentase Penanganan Sampah | n/a | 80,02 | 75,02 | 75 | M |
| | Persentase Pengurangan Sampah | n/a | 19,98 | 24,98 | 25 | BT |
| | Persentase RTH Terkelola | 11,04 | 11,04 | 11,07 | 11,07 | S |
| | Indeks Kualitas Air (IKA) | 47,89 | 48,15 | 64,25 | 48,29 | M |
| | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 80,29 | 80,60 | 85,24 | 80,69 | M |
| | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 50,57 | 50,96 | 58,31 | 51,22 | M |
| **2.1.2.6.** | **Administrasi Kependudukan** | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | 76 | 80,00 | 86,74 | 83 | M |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP | 89,00 | 97,00 | 98,26 | 97 | M |
| | Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran | 81,00 | 91,20 | 95,42 | 91 | M |
| | Persentase Data Ganda dan Anomali | 17,00 | 9,00 | 0,17 | 3 | M |
| **2.1.2.7.** | **Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | | |
| | Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang | 56,30 | 94,00 | 95,50 | 92,60 | M |
| | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | 24,80 | 29,37 | 82,22 | 81,50 | BT |
| | Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal | 32,20 | 100,00 | 80.47 | 100 | BT |
| **2.1.2.8.** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| | *Total Fertility Rate* | 2,09 | 2,07 | 2,12 | 2,05 | M |
| | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | 4,12 | 4,01 | 4,51 | 3,3 | BT |
| | Persentase Keluarga Sejahtera 1 | 67,03 | 17,28 | 18,26 | 49,42 | BT |
| **2.1.2.9.** | **Perhubungan** | | | | | |
| | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 25,31 | 98,47 | 79,04 | 42,12 | M |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Cakupan Trayek Angkutan Umum | 58,45 | 88,32 | 50,74 | 61,24 | BT |
| | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum | 10,044 | 10.280 | 10.428 | 10.524 | BT |
| | Persentase Kendaraan Laik Jalan | 83,40 | 91,92 | 62,59 | 90,05 | BT |
| | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas | 1,787 | 30,00 | 1.535 | 1.133 | BT |
| | Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP) | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | S |
| **2.1.2.10.** | **Komunikasi Dan Informasi** | | | | | |
| | Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi | n/a | 100 | 100 | 100 | S |
| | Nilai SPBE | 2,46 | 2,51 | 3.81 | 3,30 | M |
| **2.1.2.11.** | **Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah** | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | 4,21 | 5,50 | -7,78 | 5,19 | BT |
| | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | 10,64 | 12,15 | -1,46 | 5,35 | BT |
| | Cakupan Koperasi Aktif | 72,93 | 77,41 | 38,39 | 78 | BT |
| | Jumlah UMKM | 15.467 | 2.800 | 22.220 | 17.467 | M |
| **2.1.2.12.** | **Penanaman Modal** | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang (Rupiah) | 1.106.170.000.000 | 915.825.600.000 | 1,338,465,700,000 | 1,338,465,700,000 | S |
| | Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | 84,11 | 85,25 | 86,25 | 86,25 | S |
| **2.1.2.13.** | **Kepemudaan Dan Olahraga** | | | | | |
| | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | n/a | 80,00 | 100 | 90 | M |
| | Jumlah Atlet yang berprestrasi tingkat Nasional | 14 | 13,00 | 21 | 20 | M |
| **2.1.2.14.** | **Statistik** | | | | | |
| | Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | 45,50 | 67,80 | 100 | 85 | M |
| **2.1.2.15.** | **Persandian** | | | | | |
| | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | n/a | 27,59 (8 OPD) | 207.14 (29 OPD) | 50 (14 OPD) | M |
| **2.1.2.16.** | **Kebudayaan** | | | | | |
| | Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan | 100,00 | 100,00 | 115 | 100 | M |
| **2.1.2.17.** | **Perpustakaan** | | | | | |
| | Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan | 70,235 | 73.671 | 12.304 | 75.716 | BT |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Cakupan lokasi yang terlayani melalui pusling | 22,22 | 31,00 | 0,038 | 48 | BT |
| | Tingkat kepuasan pengunjung | 74,40 | 88,05 | 82,00 | 80 | M |
| **2.1.2.18.** | **Kearsipan** | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | 3,64 | 21,82 | 40.00 | 40,00 | S |
| **2.1.3.** | **FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN** | | | | | |
| **2.1.3.1** | **Pertanian** | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian : | | | | | |
| | Tanaman Pangan (%) | 10,04 | 19,14 | 2,18 | 10,24 | BT |
| | Tanaman Hortikultura (%) | 3,20 | 4,00 | 1,38 | 4,7 | BT |
| | Perkebunan (%) | 4,12 | 18,79 | 6,52 | 4,8 | M |
| | Laju Pertumbuhan Subsektor Peternakan (%) | 6,48 | 4,18 | 5,78 | 4,9 | M |
| **2.1.3.2.** | **Pariwisata** | | | | | |
| | Jumlah kunjungan wisatawan (orang) | 498.472 | 81.494 | 881.822 | 717.800 | M |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional | 44,00 | 63,00 | 100 | 75 | M |
| **2.1.3.3** | **Kelautaan Dan Perikanan** | | | | | |
| | Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | 2,32 | 2,34 | 3,48 | 4,6 | BT |
| **2.1.3.4** | **Perdagangan** | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | 4,21 | 5,23 | -7,78 | 5,19 | BT |
| **2.1.3.5** | **Perindustrian** | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | 10,64 | 12,17 | -1,46 | 5,35 | BT |
| **2.1.3.6** | **Transmigrasi** | | | | | |
| | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 51 | 6,00 | 56,00 | 61,00 | BT |
| **2.1.4** | **FOKUS UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **2.1.4.1.** | **Sekretariat Daerah** | | | | | |
| | Nilai LPPD Kabupaten | 3,09 | KEMENDAGRI | | 3,3 | |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | 56,06 | 22,38 | 66,74 | 70 | BT |
| | Nilai SAKIP Kabupaten | B | B | BB | BB | T |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik” | 60,00 | 100 | 75,94 | 100 | BT |
| **2.1.4.2** | **Sekretariat DPRD** | | | | | |
| | Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 93,40 | 92,75 | 93,68 | 100 | BT |
| **2.1.5** | **FOKUS FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **2.1.5.1** | **Unsur Perencanaan** | | | | | |
| | Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD | 85,00 | 100 | 100 | 100 | S |
| | Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD | 85,00 | 100 | 100 | 100 | S |
| | Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD | 85,00 | 100 | 100 | 100 | S |
| | Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik" | 96,50 | 100 | 100 | 100 | S |
| **2.1.5.2** | **Unsur Keuangan** | | | | | |
| | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | S |
| | APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | S |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 16,47 | 13,80 | 17,30 | 17,77 | BT |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah | 77,34 | n/a | 90,49 | 87 | M |
| **2.1.5.3** | **Unsur Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan** | | | | | |
| | Indeks Profesionalitas ASN | 59,00 | 59,45 | 65,03 | 70 | BT |
| | Indeks Sistem Merit ASN | 48,90 | 60,88 | 74,47 | 66,25 | M |
| **2.1.5.4** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | |
| | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan | 80,00 | 100 | 100 | 100 | S |
| **2.1.6** | **FOKUS FUNGSI UNSUR PENGAWASAN** | | | | | |
| **2.1.6.1** | **Inspektorat** | | | | | |
| | Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | S |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" | 36,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | S |
| | Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM | Level 3 | Level 3 | level 3 | level 3 | S |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | n/a | 20,00 | 100 | 100 | S |

| NO | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018) | Capaian Kinerja | | Standar | Belum Tercapai/ Sesuai/ Melampaui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | | |
| | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | 75,00 | 82,00 | 85,00 | 90,00 | BT |
| | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD | 8,79 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | S |
| **2.1.7** | **FOKUS FUNGSI UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | |
| **2.1.8** | **FOKUS FUNGSI UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | |
| **2.1.8.1** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | |
| | Indeks kerukunan umat beragama | 72,20 | Kemenag | | 73 | - |
| | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
| | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | 80,60 | 83,50 | 79,00 | 80,65 | BT |
| | Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
| **3** | **ASPEK DAYA SAING** | | | | | |
| 3.1. | PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah) | 28,30 | 30,76 | 30,74 | | BT |
| 3.2 | Rasio Ketergantungan | 47,12 | 48,13 | 48,23 | | BT |

# Tabel 2.107
# Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang
# Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **MISI I : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** | | **Angka Harapan Hidup** | **Tahun** | **72,07** | **72,26** | **72,29** | **72,44** | **72,43** | **73** |
| | 1.1 | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | Jumlah Kematian Ibu | Jiwa | 16 | 13 | 14 | 10 | 21 | 6 |
| | | | Jumlah Kematian Bayi | Jiwa | 155 | 140 | 114 | 120 | 137 | 50 |
| | | | Persentase Balita Stunting | Persen | 32,2 | 29 | 8,7 | 26 | 12,05 | 17 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan | Poin | 78,73 | 85 | 82,5 | 87 | 87 | 92 |
| | | | IKM Rumah Sakit | poin | 83,7 | 90 | 98,92 | 91 | 96,12 | 95 |
| **2** | **Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata** | | **Rata – rata lama sekolah** | **Tahun** | **8,1** | **8,29** | **8,27** | **8,48** | **8,51** | **9,07** |
| | | | **Angka harapan lama sekolah** | **Tahun** | **13** | **13,22** | **12,96** | **13,44** | **12,97** | **14,11** |
| | 2.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | 106,75 | 106,83 | 106,83 | 106,93 | 99,34 | 107,23 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 103,42 | 103,62 | 103,62 | 103,72 | 97,96 | 104,02 |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 105,23 | 105,34 | 105,23 | 105,44 | 97,45 | 105,76 |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 102,78 | 102,99 | 102,78 | 103,19 | 88,51 | 103,81 |
| | | | APK PAUD | Persen | 88,44 | 89,53 | 89,53 | 89,62 | 80,60 | 89,89 |
| | | | Angka partisipasi kasar kesetaraan | Persen | 1,35 | 1,63 | 1,63 | 1,9 | 3 | 2,7 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **3** | **Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak** | | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **9,76** | **8,96** | **9,05** | **10,70** | **10,26** | **5,76** |
| | | | **Indeks Pembangunan Gender** | **Poin** | **94,4** | **94,87** | **95,01** | **95,34** | **95,18** | **96,75** |
| | | | **Indeks Pemberdayaan Gender** | **Poin** | **68,7** | **69,23** | **70,57** | **69,77** | **70,78** | **71,37** |
| | 3.1 | Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persen | 10,05 | 9,25 | 9,11 | 8,45 | 8,1 | 6,05 |
| | 3.2 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Kabupaten Layak Anak | Skor | 501 | 601 | 549,7 | 650 | 0 | 801 |
| | | | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya | Persen | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 9,7 | 5,7 |
| **MISI II : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang** | | **Indeks kerukunan umat beragama** | **Poin** | **72,2** | **72,5** | **n/a** | **73** | **n/a** | **74,5** |
| | 1.1 | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 72,2 | 72,5 | 0 | 73 | 0 | 74,5 |
| | 1.2 | Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah | Persen | n/a | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **MISI III: MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata** | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **6,48** | **6,74** | **6,32** | **7,01** | **(-1,12)** | **7,88** |
| | 1.1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,75 | 70,8 | 76,96 | 82,8 |
| | | | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persen | 25,31 | 31,27 | 98,47 | 42,12 | 79,04 | 77,27 |
| | | | Rasio jaringan irigasi | Persen | 60 | 62 | 62,02 | 64 | 64,46 | 70 |
| | 1.2 | Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat | Cakupan Trayek Angkutan Umum | Persen | 58,45 | 59,85 | 88,32 | 61,24 | 50,74 | 65,43 |
| | | | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum | orang/ hari | 10.044 | 10.284 | 10.280 | 10.524 | 10.428 | 11.244 |
| | 1.3 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian : | | | | | | | |
| | | | Tanaman Pangan | Persen | 10,04 | 10,14 | n/a | 10,24 | 2,18 | 10,55 |
| | | | Tanaman Hortikultura | Persen | 3,2 | 4 | 19,14 | 4,7 | 1,38 | 6,8 |
| | | | Perkebunan | Persen | 4,12 | 4,2 | 4 | 4,8 | 6,52 | 6,9 |
| | | | Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan | Persen | 3,68 | 4,3 | 18,79 | 4,9 | 5,78 | 6,7 |
| | | | Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | Persen | 3,15 | 4 | n/a | 4,6 | 3,48 | 6,4 |
| | 1.4 | Menjamin Ketahanan Pangan Daerah | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Persen | 85 | 87,3 | n/a | 88,5 | 89,1 | 92,5 |
| | 1.5 | Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 498.472 | 598.166 | 81.494 | 717.800 | 881.822 | 4.451.316 |
| | 1.6 | Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp x1.000) | 1.106.170.000 | 1.216.787.000 | 915.825.600 | 1.338.465.700 | 1.338.465.700 | 2.505.607.790 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **2** | **Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Poin** | **58,68** | **58,92** | **59,01** | **59,18** | **70,89** | **60,11** |
| | | | **Indeks Resiko Bencana** | **Poin** | **162** | **155** | **157** | **150** | **150** | **135** |
| | 2.1 | Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 47,89 | 48,09 | 100,12 | 48,29 | 64,25 | 48,89 |
| | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 80,29 | 80,49 | 100,14 | 80,69 | 85,24 | 81,29 |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | 50,57 | 50,86 | 100,2 | 51,22 | 58,31 | 52,63 |
| | | | Persentase penanganan sampah | Persen | n/a | 80 | 99,98 | 75 | 75,02 | 60 |
| | | | Persentase pengurangan sampah | Persen | n/a | 20 | 99,9 | 25 | 24,98 | 40 |
| | | | Persentase RTH Terkelola | Persen | 11,04 | 11,04 | 100 | 11,07 | 11,07 | 11,17 |
| | | | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 80 | 80,67 | 80,13 | 81,33 | 80,34 | 83,33 |
| | | | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh | Persen | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0 | 0,06 |
| | | | Persentase Rumah Tangga berakses air minum | Persen | 79,02 | 80 | 79,92 | 83 | 80,45 | 90 |
| | | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 55 | 60 | 55,23 | 65 | 55,29 | 80 |
| | | | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang | Persen | 100 | 100 | 70,22 | 100 | 75,11 | 100 |
| | 2.2 | Pengurangan indeks resiko bencana | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 155 | 157 | 150 | 150 | 135 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **MISI 4: MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi** | | **Opini BPK** | **Opini** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** |
| | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **56,05** | **65** | **79,34** | **70** | **66,74** | **85** |
| | | | **Nilai SAKIP Kabupaten** | **Kategori** | **B** | **B** | **B** | **BB** | **BB** | **A** |
| | 1.1 | Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | APBD Tepat Waktu | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | | | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | Persen | 75 | 80 | 82 | 90 | 85 | 100 |
| | | | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD | Persen | 8,79 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| | 1.2 | Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,05 | 65 | 22,38 | 70 | 66,74 | 85 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | 75,94 | 100 |
| | | | Nilai LPPD Kabupaten | Angka | 3,092 | 3,15 | 3,15 | 3,3 | n/a | 3,75 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" | Persen | 36 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| | 1.3 | Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 59 | 65 | 59,45 | 70 | 65,03 | 85 |
| | | | Indeks Sistem Merit ASN | Poin | 48,9 | 60 | 60,88 | 66,25 | 74,47 | 85 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| | **Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas** | | **Indeks kepuasan masyarakat** | **Poin** | **80,74** | **81** | **82,27** | **83** | **83,80** | **92** |
| **2** | 2.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | Poin | 76 | 80 | 80 | 83 | 83 | 90 |
| | | | Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | Poin | 84,11 | 84,95 | 85,25 | 86,25 | 86,25 | 90 |
| | 2.2 | Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT | Nilai SPBE | Poin | 2,46 | 3 | 2,51 | 3,3 | 3,81 | 4,2 |
| **MISI V : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG** | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing** | | **Pengeluaran per kapita** | **Rp (juta)** | **9,67** | **10,06** | **10,406** | **10,38** | **10,217** | **11,35** |
| | | | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **Persen** | **7,04** | **6,55** | **7,63** | **6,35** | **9,89** | **5,68** |
| | 1.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | Persen | 4,59 | 4,89 | 4,89 | 5,19 | -7,78 | 6,09 |
| | | | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | Persen | 5,29 | 5,32 | 5,32 | 5,35 | -1,46 | 5,44 |
| | | | Cakupan Koperasi Aktif | Persen | 72,93 | 75 | 77,41 | 78 | 38,39 | 85 |
| | 1.2 | Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,04 | 6,55 | 7,63 | 6,35 | 9,89 | 5,68 |
| | | | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 17.717 | 17.467 | 20.507 | 20.467 |

## 2.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM terdiri dari 6 (enam urusan) yaitu (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

*1. Urusan Pendidikan*

1.1. Pendidikan anak usia dini;

1.2. Pendidikan dasar; dan

1.3. Pendidikan kesetaraan;

*2. Urusan Kesehatan*

2.1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

2.2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

2.3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

2.4. Pelayanan kesehatan balita;

2.5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

2.6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

2.7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

2.8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

2.9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

2.10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

2.11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

2.12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

*3. Urusan Pekerjaan Umum*

3.1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

3.2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

*4. Urusan Perumahan Rakyat*

4.1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

4.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerahkabupaten/ kota;

*5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*

5.1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
5.2. Pelayanan informasi rawan bencana;
5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5.5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

*6. Urusan Sosial*

6.1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
6.2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
6.3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
6.4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
6.5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

Berdasarkan penilaian Kemendagri atas indikator SPM sebagaimana dimaksud pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.108**
**Capaian Indikator SPM Tahun 2020**
**Berdasarkan Hasil Penilaian Kemendagri Tahun 2021**

| No | Urusan | Capaian (%) |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | 94 |
| 2 | Kesehatan | 11 |
| 3 | Pekerjaan Umum | 10 |
| 4 | Perumahan Rakyat | 13 |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 97 |
| 6 | Sosial | 34 |

*Sumber: Kemendgari (2021)*

Pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, seperti halnya penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Peraturan perundangan yang mengamaatkannya adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS RPJMD. Salah satu yang menjadi kajiannya adalah capaian SPM berdasarkan indikator *Sustainable Development Goals (SDG)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjuta, adalah sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di Kabupaten Sumedang adalah sebagaimana disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.109**
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017-2020 Berdasarkan Indikator SDG's**

| NO | Substansi | Urusan | Pertanyaan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jawaban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SPM | Sosial | Berapa persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang haknya dapat dipenuhi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 1.17 | 1.07 | 5.2 | NA | Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017 1.17% menjadi 5.2% pada Tahun 2019 |
| 2 | SPM | Trantiblinmas | Berapa proporsi korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?<br><br>- Meninggal (orang)<br>- Hilang (orang)<br>- Terkena dampak (orang) | <br><br><br><br><br>NA | <br><br><br><br>5<br>0<br>3.859 | <br><br><br><br>4<br>0<br>2143 | <br><br><br><br>3<br>1<br>6457 | Tahun 2018 korban meninggal sebanyak 5 orang, hilang 0, yang terkena dampak sebanyak 3.859 orang dan Tahun 2019 korban meninggal sebanyak 4 orang, Hilang 0, yang terkena dampak 2.143 orang dan Tahun 2020 korban meninggal 3 orang, hilang 1 dan yang terkena dampak 6.457 orang. Resiko bencana di Kabupaten Sumedang sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan yang tinggi. |
| 3 | SPM | Trantiblinmas | Berapa total jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | NA | NA | Na | 11 | 11 lokasi penguatan pengurangan resiko bencana |
| 4 | SPM | Trantiblinmas | Berapa jumlah korban bencana sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 0 | 0 | 0 | 0 | Di kabupaten Sumedang tidak ada kejadian bencana sosial |
| 5 | SPM | Sosial | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan psikososial korban bencana sosial? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 0 | 0 | 0 | 0 | Di Kabupaten Sumedang tidak ada kejaidan bencana sosial |
| 6 | SPM | Pendidikan | Apakah daerah anda merupakan daerah rawan bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Di Kabupaten Sumedang tidak ada bencana sosial |

| NO | Substansi | Urusan | Pertanyaan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jawaban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | SPM | Trantiblinmas | Berapa jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 8 | 8 | 8 | 8 | Kabupaten Sumedang sudah menyusun Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sebanyak 8 dokumen |
| 10 | SPM | Kesehatan | Berapa besar tingkat prevalensi anemia pada ibu hamil? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 8,5% | 8,07 | 7,55 | 5.31 | prevalensi anemia pada ibu hamil di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurun dari tahun 2017 sebesar 8.5% menjadi 5.31% ditahun 2020. |
| 11 | SPM | Kesehatan | Berapa rata-rata persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 75.28 % | 78.22 | 78,66 | 82.02 | Rata-rata persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 75.28% ditahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 82.02% |
| 12 | SPM | Kesehatan | Apakah daerah anda memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 35 | 35 | 35 | 35 | kabupaten sumedang memiliki 35 Puakesmas dan semuanya sudah menyelenggarakan uapaya kesehatan jiwa. |
| 13 | SPM | Kesehatan | Berapa tingkat unmet need pelayanan kesehatan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | NA | NA | NA | NA | Tidak tersedia data jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan |
| 14 | SPM | Kesehatan | Berapa tingkat persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 100 | 100 | 100 | 100 | Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sudah 100% dari tahun 2017 sampai tahun 2020 |
| 15 | SPM | Kesehatan | Berapa besar kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 0.054 | 0,192 | 0,12 | 0,127 | distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 sebesar 0.054, tahun 2018 sebesar 0.192, tahun 2019 sebesar 0.12 dan tahun 2020 sebesar 0.127.<br>Permasalahannya adalah masih terbatasya tenaga medis, penyebaran tenaga medis terutama pada wilayah perbatasan dan fasilitas pelayanannya yang kurang |
| 16 | SPM | Pendidikan | Berapa proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | Data proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang sudah mencapai standar kemampuan minimum dalam kemampuan |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | | | | | membaca dan data kemampuan matematika sudah 100%. |
| 17 | SPM | Pendidikan | Berapa tingkat proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 71,70 | 72,54 | 73,18 | 89,72 | Tingkat proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik sudah 100%.<br>Namun Belum ada data yang akurat tentang proporsi sekolah yang sudah mendapatkan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas merupakan kewenangan Provinsi, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) |
| 18 | SPM | Pendidikan | Berapa besar angka persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | SD 67,51%<br>SMP75,90% | SD 68,59%<br>SMP 76,68% | SD 68,81%<br>SMP 77,55% | NA | guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang telah memiliki bersertifikat pendidik belum mencapai 100%. |
| 19 | SPM | Pekerjaan Umum | Berapa besar kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 7,404,322,343 .70 (RT)<br><br>5,186,656.30 (Industri) | 7,164,127,701 .00<br>(RT)<br><br>7,171,299.00 (Industri) | 7,634,057,159. 40<br>(RT)<br><br>6,876,840.60 (Industri) | NA | Prasarana air baku di Kabupaten Sumedang disuplai dari PDAM, dengan kapasitas prasarana terbesar (99,9%) untuk melayani rumah tangga dan hanya sebagian kecil untuk melayani industri (0,08%)<br>Rencana kedepannya ketersediaan air baku di Kabupaten Sumedang bersumber dari waduk jatigede . |
| 20 | SPM | Pekerjaan Umum | Berapa besar angka persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 93.95 | 55% | 55.15% | 55.30 | Rumah tangga di Kabupaten Sumedang yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum seluruhnya. Tahun 2018 sebanyak 55%, Tahun 2019 sebanyak 55.15%, dan Tahun 2020 sebanyak 55.30% |
| 21 | SPM | Pekerjaan Umum | Apakah daerah anda telah membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Belum ada data | Kabupaten Sumedang belum membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.<br>Permasalahannya penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur air limbah kawasan dan komunal sulit dilakukan terutama di kawasan padat penduduk. |

| NO | Substansi | Urusan | Pertanyaan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jawaban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | SPM | Trantiblinmas | Berapa jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | NA | 50 desa | 59 | NA | Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebanyak 59 Desa dari 260 Desa di Kabupaten Sumedang |
| 25 | SPM | Trantiblinmas | Apakah daerah anda memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | ada | ada | ada | ada | Kabupaten Sumedang sudah memiliki dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 8 dokumen. |
| 26 | SPM | Trantiblinmas | Berapa jumlah strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | 8 | 8 | 8 | 8 | Kabupaten Sumedang sudah menyusun Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah sebanyak 8 dokumen |
| 27 | SPM | | Berapa jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? | - | - | - | - | fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister masih belum tersedia.<br>Permasalahannya pemerintah daerah masih belum memiliki data yang akurat. |

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2021) (diolah)

**2.7.**

## 2.7. Pandemi Covid-19

Sejak masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Indonesia, dan menyebar ke seluruh wilayah termasuk Kabupaten Sumedang, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan, perekonomian dan sosial. Akibatnya, terjadi disrupsi pada capaian pembangunan di Kabupaten Sumedang. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar Pandemi Covid-19 tidak menyebabkan krisis yang semakin dalam.

Penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 dilakukan pemerintah diawali dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) hingga berlanjut menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya pembatasan sosial ini menyebabkan mobilitas penduduk yang menurun, dan hingga akhir Tahun 2020 mobilitas penduduk masih lebih rendah dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian, terutama di lapangan usaha yang tinggi interaksi seperti industri dan perdagangan.

Menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat terlihat jelas dari data PDRB berdasarkan lapangan usaha. Pada Tahun 2020, dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha, hanya 5 (lima) lapangan usaha yang mampu tumbuh positif yaitu Informasi dan komunikasi (22,90% ); Jasa Pendidikan (3,24%); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,23%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,82%); dan Pertambangan dan Penggalian (1,41%). Sementara lapangan usaha lainnya, terutama yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kabupaten Sumedang seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi serta 9 sektor lainnya mengalami kontraksi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 menjadi -1,12%. Adapun lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam adalah Perdagangan (-7,78%). Tumbuh pesatnya sektor infokom dan terkontraksinya sektor perdagangan mengindikasikan bahwa penduduk yang bekerja di sektor perdagangan belum adaptif dengan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) di masa terjadinya pandemi Covid-19.

**Gambar 2. 59**
**Pertumbuhan dan Kontirbusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020**

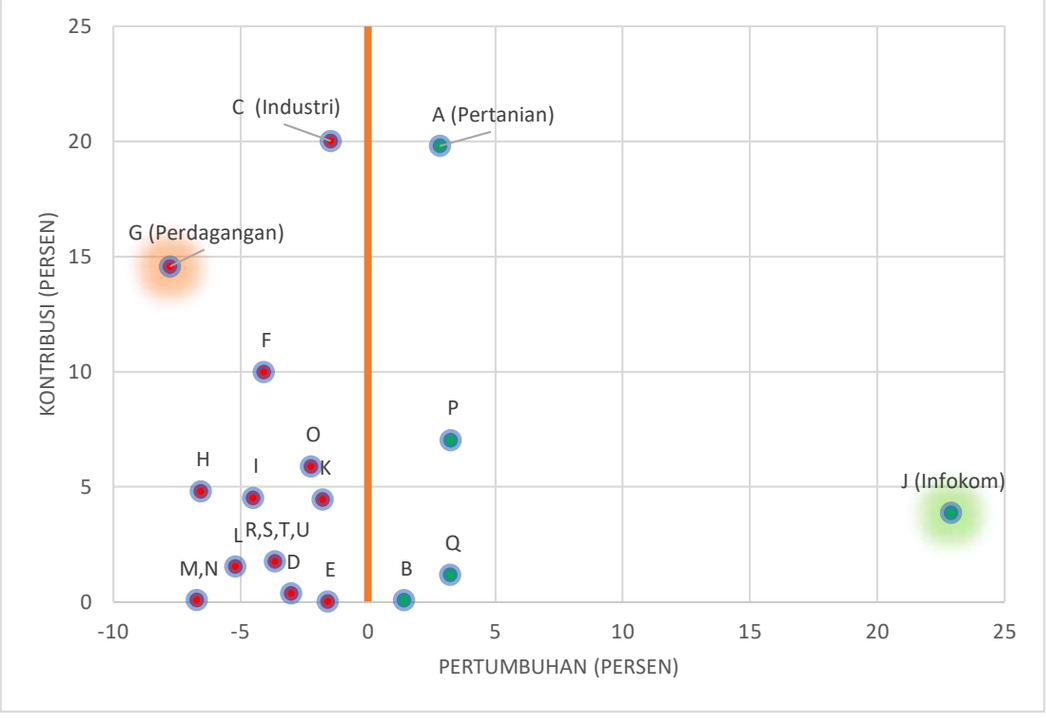


Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Tumbuhnya sektor infokom disebabkan meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat, seperti rapat – rapat di pemerintahan dan dunia usaha, pendidikan secara daring, bimbingan belajar online. Namun, masih sangat sedikit internet digunakan untuk jual beli secara online oleh masyarakat Sumedang sehingga tidak mengherankan jika sektor perdagangan paling terpuruk ketika terjadi pembatasan sosial.

Hal ini dapat dijelaskan dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2020 dimana penggunaan internet terbanyak adalah untuk media sosial, diikuti oleh mencari berita/informasi, hiburan, dan belajar daring. Padahal dari total pengguna internet di Sumedang, terbanyak bekerja di Sektor Perdagangan (22%). Namun, hanya 65% saja dari seluruh pelaku usaha perdagangan yang memanfaatkan internet dan dari pengguna internet tersebut hanya sekitar 2% saja yang memanfaatkan untuk jual beli online.

Idealnya fasilitas internet dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelangsungan usaha bahkan melakukan ekspansi pemasaran yang lebih luas lagi secara digital. Rendahnya literasi digital untuk aktivitas jual beli online

menjadi salah satu penyebab sektor perdagangan belum adaptif di masa pandemi sehingga sektor perdagangan paling terpuruk di tahun 2020.

**Gambar 2. 60**
**Tujuan Penggunaan Internet Berdasarkan Perbedaan Generasi (Persen)**

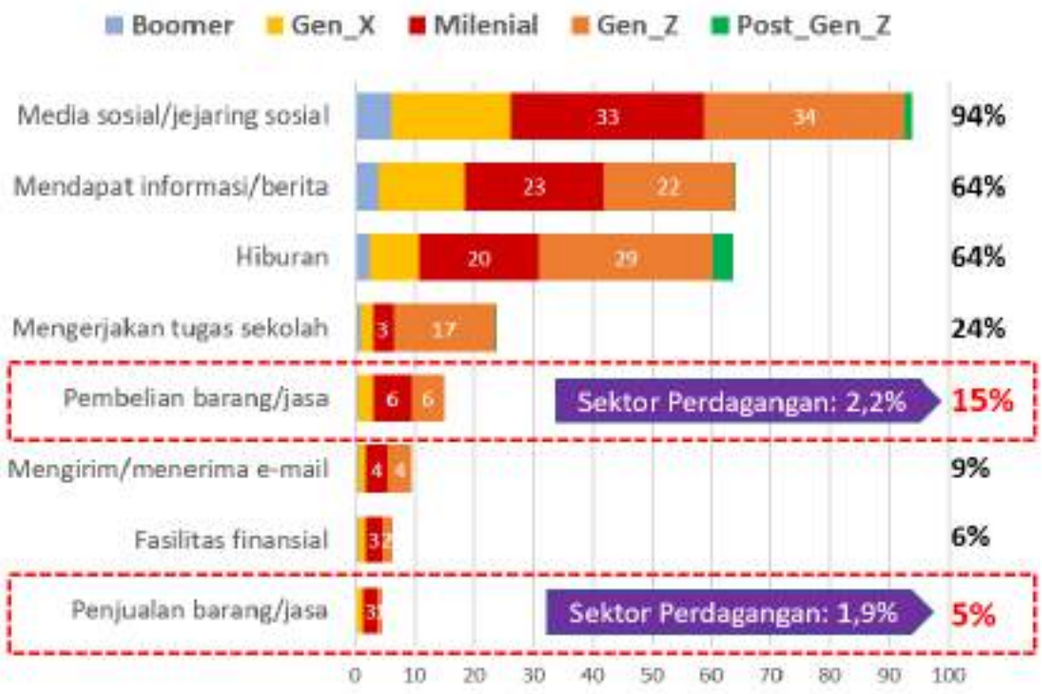


*Sumber: BPS, 2021 (diolah)*

Dampak dari menurunnya aktivitas perekonomian adalah menurunnya produktivitas masyarakat dalam bekerja. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang setidaknya dirasakan oleh sekitar 214.206 orang penduduk usia kerja atau 34% dari total angkatan kerja. Pengurangan jam kerja merupakan dampak pandemi covid-19 paling banyak dialami angkatan kerja Sumedang di tahun 2020, diikuti oleh banyaknya yang berhenti bekerja dan bertambahnya pengangguran.

Terdapat sekitar 74 ribu dari angkatan kerja di Kabupaten Sumedang yang pada Agustus 2020 terpaksa berhenti bekerja dengan alasan utama karena dipicu adanya kebijakan PSBB sehingga menyebabkan sebagian orang tidak bisa lagi bekerja seperti sebelum adanya PSBB, misalnya dialami oleh pedagang di kantin sekolah atau kampus yang tidak lagi dapat menjalankan usaha. Sekitar 22 ribu orang memilih sementara tidak bekerja, dan sebanyak 146 ribu orang harus mengalami pengurangan jam kerja.

**Gambar 2. 61**
**Dampak Covid-19 terhadap Angkatan Kerja**
**di Kabupaten Sumedang**

Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Terganggunya pekerjaan masyarakat dengan adanya Pandemi covid-19 ini menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, IPM Kab Sumedang pada Tahun 2020 masih mengalami peningkatan menjadi 71,64 dari posisi Tahun 2019 sebesar 71,46. Namun, dari tiga indikator pembentuk IPM yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli, hanya pada daya beli (pengeluaran per kapita) yang mengalami penurunan yaitu dari 10,41 juta rupiah di Tahun 2019 menjadi 10,22 juta rupiah pada Tahun 2020.

**Gambar 2.62**
**Indikator Pembentuk IPM**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020**

*Sumber: BPS, 2021 (diolah)*

Dampak berikutnya dari pandemi Covid-19 yang melemahkan daya beli masyarakat adalah meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,05% pada Tahun 2019 menjadi 10,26% pada Tahun 2020 yang juga disertai dengan meningkatnya kedalaman (1,05 menjadi 1,72) dan keparahan kemiskinan (0,21 menjadi 0,42). Demikian juga dengan ketimpangan (*gini ratio*) yang semakin melebar antara perkotaan (0,371 menjadi 0,419) dan perdesaan (0,299 menjadi 0,322).

Berdasarkan distribusi pengeluaran terlihat bahwa proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah (bottom 40) dan menengah (middle 50%) menurun. Proporsi pengeluaran penduduk 40% terbawah menurun menjadi 17,7% dari angka 19,5% pada Tahun 2019. Demikian pula dengan 50% penduduk berpendapatan menengah yang menurun dari 53,5% pada Tahun 2019 menjadi 51,7% pada Tahun 2020. Sementara proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan atas (top 10) meningkat menjadi 30,6% dari angka 27,0% pada Tahun 2019. Hal tersebut menyebabkan peningkatan Gini Ratio menjadi 0,384 pada Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan penganggaran, untuk penanganan Covid-19, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan memfokuskan target

kinerja pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengamanan sosial. Hal tersebut sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Adapun beberapa regulasi yang dijadikan dasar pergeseran anggaran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (14 Maret 2020);
2) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (31 Maret 2020);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 2019) (31 Maret 2020);
4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid - 2019)(27 April 2020);
5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Dana Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 2019) (14 Maret 2020);
6) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:19/Km.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 2019) (16 Maret 2020);
7) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:23/KM.3/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (21 Maret 2020);

8) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 2019) (3 April 2020);
9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadanan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong (11 Mei 2021); dan
10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (2 Juli 2021).

## 2.8 Inovasi Tahun 2019-2020

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Visi misi maupun arah pembangunan, di dalam Undang-Undang tersebut, menekankan tentang pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan Nasional jangka panjang Tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" yang salah satu implementasinya dituangkan ke dalam Misi ke–2 yaitu "mewujudkan Bangsa yang berdaya saing" dengan salah satu arahan kebijakannya adalah "…**penguatan sistem inovasi** dalam rangka pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan….".

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka

diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa inovasi, yaitu:

### 2.8.1 Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pada akhir Tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan 100 Kabupaten/Kota prioritas penurunan stunting di Indonesia dimana salah satunya adalah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, Prevalensi Stunting Kabupaten Sumedang cukup tinggi yaitu sebesar 32,2 persen. Menyikapi hal di atas, dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, salah satu Indikator Kinerta Utama Bupati dalam mewujudkan Sumedang Simpati adalah Persentase Balita Stunting. Target penurunan persentase balita stunting adalah sebesar 3% per tahun sehingga pada Tahun 2023 target prevalensi stunting hanya tinggal 17%.

Untuk percepatan pencapaian target persentase balita stunting maka pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun inovasi dengan membentuk Gugas Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 441/Kep.325-Bappppeda/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Tujuan inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi ini adalah menurunkan persentase balita stunting setiap tahun di Kabupaten Sumedang. Sedangkan manfaat inovasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi adalah program pencegahan stunting lintas sektor dapat berjalan secara sinergi (integrasi), efektif, efisien dan berhasil guna dalam menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Sumedang.

Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat. Penghargaan itu merupakan kerja keras dari aparatur pemerintah didukung berbagai komponen masyarakat untuk mewujudkan Sumedang Simpati, Sumedang yang lebih baik, maju dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk tingkat Provinsi, penghargaan yang diarih adalah Terbaik I Kategori Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Tahun

ke II Tingkat Jawa Barat. Sedangkan untuk tingkat Nasional, Pemkab Sumedang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Kabupaten Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Inovasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi SIMPATI. Aplikasi SIMPATI merupakan bentuk kerjasama dengan PT. Telkomsel yang memberikan aplikasi dan 300 ponsel beserta kartu seluler kepada KPM. Aplikasi SIMPATI untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan tujuan agar seluruh orang tua dan pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak secara berkala.

**Gambar 2.63**
**Dokumentasi Prestasi Inovasi**
**Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi**

Terbaik Ke-3 Wilayah Regional II (Wilayah Tengah) dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020

Dashboard Aplikasi SIMPATI

Sumber: Bappppeda (2021)

### 2.8.2 Strategi Komplementer 7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19

Sesuai dengan kalender pendidikan Tahun 2020/2021, satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Namun bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak

memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah sebagaimana dalam keadaan normal.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama bahwa hanya bagi kabupaten/kota dengan status zona hijau yang diizinkan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah mulai tanggal 13 Juli 2020 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang tidak/belum berstatus zona hijau dilarang menyelenggarakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah untuk dan dengan alasan apapun. Bahkan bagi daerah kabupaten/kota yang sudah dinyatakan berstatus menjadi zona hijau pun tidak dapat secara serta merta melakukan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, tetapi harus didahului oleh kajian dan pembahasan yang cermat dengan mempertimbangkan banyak hal demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga dengan demikian proses belajar mengajar tatap muka harus melalui tahapan dan prosedur yang cermat antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam pengecekan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, skrining kesehatan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta SOP pembelajaran.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka harus dicari terobosan (inovasi) agar proses pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik tetap berlangsung walaupun dimasa pandemi. Alternatif pembelajaran dapat dilasanakan melalui media daring, namun kondisi di Kabupaten Sumedang belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Disisi lain, bahwa pendidikan dan pengajaran harus berpegang teguh pada prinsip adil, merata, dan menjangkau semua siswa. Sehingga diperlukan sebuah strategi yang bersifat komplementer (saling mengisi dan melengkapi antara teknik daring dan luring). Maka langkah dibentuklah sebuah inovasi berupa Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran.

Strategi pembelajaran komplementer yang telah dirumuskan merupakan jawaban sekaligus salah satu alternatif pemecahan masalah yang kami temui diawal masa darurat pandemi Covid-19 yaitu pembelajaran jarak jauh (Belajar Dari Rumah) yang lebih menitikberatkan kepada metode pembelajaran Daring yang ternyata kurang efektif karena secara nyata tidak

mampu memenuhi unsur keadilan dan pemerataan, karena berdasarkan data kasar yang kami miliki di Kabupaten Sumedang metode pembelajaran Daring hanya mampu menjangkau 31% peserta didik, serta kurang efisien karena setiap individu guru dan peserta didik harus mengeluarkan biaya kuota internet yang tidak murah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Inovasi Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19 ini bahkan telah didaftarkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor EC00202049761 tanggal 15 November 2020.

**Gambar 2.64**
**Dokumentasi Inovasi Strategi Komplementer**
**7 (Tujuh) Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19**

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Hak Cipta Strategi Komplemeter 7 Metode Pembelajaran Masa Darurat Covid-19

Metode Pembelajaran Daring

### 2.8.3 Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri (SI ICE MANDIRI) V.1.1

Si Ice Mandiri merupakan sebuah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara mandiri. Aplikasi ini

berbasis *online* sehingga masyarakat dapat melakukan pengajuan perizinan dengan memanfaatkan teknologi internet. Sistem informasi ini sangat cocok digunakan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di kabupaten/kota. Sistem informasi ini dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang dapat memudahkan baik dari sisi pemohon (masyarakat) maupun dari sisi petugas (DPMPTSP). Semua tahapan pemrosesan permohonan dapat dipantau oleh pemohon sehingga ada kejelasan waktu penyelesaian.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan perizinan maupun non perizinan semuanya menggunakan arsip digital, pemohon diharuskan mengunggah semua berkas-berkas tersebut ke SI ICE MANDIRI. Dengan demikian satu berkas tersebut dapat digunakan untuk seluruh proses termasuk yang berkaitan dengan SKPD Teknis terkait (single submission). Berkas digital juga memudahkan pemohon jika suatu saat membutuhkan kembali berkas-berkas tersebut.

Produk hukum perizinan maupun non perizinan yang telah selesai dan diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Sumedang melalui SI ICE MANDIRI berupa soft file yang dapat diunduh oleh pemohon kapan saja dan dimana saja. Jika pemohon membutuhkan salinannya maka pemohon dapat mencetaknya secara mandiri. Soft file ini memiliki kekuatan hokum yang sama dengan dokumen yang menggunakan cap dan tanda tangan basah karena telah ditanda tangan secara digital dan memiliki keamanan yang baik. Soft file dari produk SI ICE MANDIRI juga dilengkapi dengan QR Code untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memeriksa keabsahannya.

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan adanya pengembangan aplikasi ini diantaranya adalah waktu pemrosesan perizinan lebih cepat; keamanan data lebih terjamin; pemohon lebih cepat mengetahui terkait dengan progres permohonan ijin melalui notifikasi email dan fasilitas tracking ijin pada SI ICE MANDIRI 1.1 serta terimplementasikannya konfirmasi Status Wajib Pajak (KSPW) pada aplikasi SI ICE MANDIRI 1.1 sehingga pemrosesan permohonan ijin hanya dilakukan kepada pemohon yang sudah memenuhi kewajibannya atas pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

**Gambar 2.65**
**Dokumentasi Inovasi**
**Pengembangan Sistem Informasi Izin Cetak mandiri**
**(SI ICE MANDIRI) V.1.1**

Aplikasi SI ICE MANDIRI

### 2.8.4 Aplikasi e-Office

Pengelolaan surat secara konvensional seringkali menghadapi kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan penandatanganan surat, disposisi surat, posisi surat sulit dilacak, surat terlambat disampaikan kepada penerima, arsip surat menumpuk, sulit mengecek keaslian tanda tangan, format surat yang berbeda dan tidak sesuai pedoman tata naskah dinas, penggunaan stempel yang berbeda/tidak resmi, serta penomoran surat yang tidak tersentralistik.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut guna meningkatkan kinerja dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan administratif, maka dibuatlah inovasi berupa aplikasi *e-Office* Sumedang. Tujuan penerapan *e-office* yaitu untuk mendukung pelaksanaan *e-government* dalam rangka percepatan menuju *Sumedang Digital Region* serta untuk efisiensi pelaksanaan surat menyurat (menjadi lebih cepat, mudah, hemat, dan aman).

Aplikasi *e-offfice* dalam rangka penerapan tata naskah dinas secara elektronik merupakan inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan dalam rangka pelaksanaan *e-government (e-Gov)*. Dalam paradigma *Bureaucracy 3.0* (*dinamic government*) di masa industri 4.0, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keniscayaan, penyelenggaraan pemerintahan dituntut serba cepat dan praktis. Digitalisasi administrasi

persuratan mengubah kultur konvensional ke digital yang selaras dengan kemajuan zaman.

Aplikasi *e-Office* Sumedang merupakan hasil modifikasi dan penyempurnaan aplikasi *e-office* KemenpanRB. Modifikasi dan penyempurnaan tersebut diantaranya dengan penambahan/penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) yang dikeluarkan oleh BSSN melalui BSrE. Sementara pihak KemenpanRB tidak menggunakan tangan digital melainkan hanya *QR code* atau *barcode*. Tanda tangan digital legalitasnya sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhi stempel. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang ITE.

Saat ini, e-Office telah dikembangkan hingga ke pemerintahan desa melalui e-Office Desa. Dengan adanya aplikasi e-Office Desa, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Pemerintahan Desa.

**Gambar 2.66**
**Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office**

Aplikasi e-Office Kabupaten Sumedang

Dokumentasi Inovasi aplikasi e-office Desa

Aplikasi e-Office Desa

### 2.8.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meluncur ke 270 desa di Kabupaten Sumedang sangat besar, yakni mencapai Rp 303,565 milyar namun pengelolaannya belum berbasis kinerja (perencanaan lemah, serta tidak melakukan perjanjian, pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengelolaan DD dan ADD tersebut juga belum berorientasi hasil, sehingga angka kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Sumedang masih tinggi, serta pelayanan publik belum optimal. Angka kemiskinan 9,76 % (Jawa Barat 7,83 %), angka stunting 9,7 % (Angka prevalensinya di atas rata-rata Jawa Barat yakni 32,2 %, sementara Jawa Barat 29,2 %), serta hasil survei kepuasan masyarakat baru mencapai 80,74. Di sisi lain tata kelola pemerintahan desa belum bersinergi dengan tata kelola pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Desa-desa belum fokus membidik permasalahan kemiskinan, stunting dan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, agar tata kelola pemerintahan desa berbasis kinerja, berorientasi hasil dan fokus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sinergi dengan agenda pembangunan kecamatan dan kabupaten, maka diluncurkan kebijakan SAKIP Desa. Melalui penerapan SAKIP Desa, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa berlangsung lebih optimal, serta Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) pun dapat dilakukan lebih baik lagi, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sampai dengan pemantaunnya. Dengan penerapan SAKIP Desa yang ditunjang dengan pengembangan SPIP tersebut, tata kelola pemerintahan desa semakin akuntabel, transparan dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan desa pun menjadi lebih baik, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Good Villlage Governance.

SAKIP Desa adalah adalah sebuah terobosan yang unik karena untuk pertama kalinya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil (performance based budgeting), diterapkan secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang juga memiliki nilai kebaruan dalam pengembangan Good Village Governance, karena yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Setelah penerapan SAKIP Desa, 270 Desa sudah di Kabupaten Sumedang kini sudah berorientasi hasil (Angka Kemiskinan turun (9.06 %) dan Stunting turun (8,7 %), serta hasil Survei Kepuasan Publik semakin meningkat (82,27). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sumedang

tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan (Desa Mandiri : 4; Desa Maju : 91; Desa Berkembang: 175; Desa Tertinggal : 0).

Keberlanjutan SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dapat dijamin karena desain program ini dikembangkan secara TERSTRUKTUR (melibatkan peran aktif lintas jenjang pemerintahan, yakni SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa), SISTEMIK (dilakukan melalui pendekatan sistem "performance management"), MASIF (dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memobilisasi berbagai potensi daerah), INTEGRATIF (desain SAKIP Desa ditransformasi ke platform digital dan diintegrasikan dengan Super App e-Office Desa).

Sebagai landasan yuridis, agar SAKIP Desa terjamin keberlanjutannya, telah diterbitkan 2 (dua) regulasi kunci, yakni : Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa.

**Gambar 2.67**
**Dokumentasi Inovasi SAKIP Desa**

SAKIP Desa yang terintegrasi dengan e-Office Desa

Replikasi SAKIP Desa

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa kewenangan urusan Pemerintahan Daerah terbagi kepada Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sebagaimana dimaksud, diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan.

Seiring terjadinya Pandemi Covid-19, maka pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut memberikan dampak yang siginifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mulai

melakukan re-fokusing dan re-alokasi anggaran, terutama untuk penanganan Covid-19 maupun dampaknya terhadap masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2020, kebijakan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan tunai kepada masyarakat sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun masyarakat non DTKS. Pemerintah juga menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berikut dengan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri dari sisi keuangan. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

## 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan

Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Sumedang masa lalu secara umum disajikan berupa data realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk Tahun 2023, adapun data realisasi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 disesuaikan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan proyeksi Tahun 2022 disesuaikan dengan RKPD Tahun 2022, karena pada saat penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 posisi RKPD Tahun 2022 telah lebih dahulu ditetapkan.

Sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2020, Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Sejak digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pengelolaan keuangan daerah, maka komponen APBD Tahun Anggaran 2021 dan tahun selanjutnya akan berubah menjadi (1) Pendapatan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep kinerja pelaksanaan APBD adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan membandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan

pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan daerah. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

#### 3.1.1.1. Kinerja Penerimaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Untuk memahami kinerja penerimaan daerah, akan dibahas antara Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagai berikut:

**(1) Kinerja Pendapatan Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**
**Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2013 – 2019**

| No | Tahun | Target – T (Rp) | Realisasi – R (Rp) | Rasio | +/(-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 | 6 = 4-3 |
| 1 | 2013 | 1.693.437.294.982,40 | 1.715.190.458.848,53 | 101,28% | 21.753.163.866,13 |
| 2 | 2014 | 2.069.304.340.061,76 | 2.087.159.777.352,30 | 100,86% | 17.855.437.290,54 |
| 3 | 2015 | 2.422.651.891.199,66 | 2.357.057.542.810,11 | 97,29% | (65.594.348.389,55) |
| 4 | 2016 | 2.456.781.204.564,55 | 2.393.284.649.759,39 | 97,42% | (63.496.554.805,16) |
| 5 | 2017 | 2.728.997.402.083,07 | 2.658.969.231.750,18 | 97,43% | (70.028.170.332,89) |
| 6 | 2018 | 2.824.592.857.777,75 | 2.749.896.713.734,04 | 97,36% | (74.696.144.043,71) |
| 7 | 2019 | 3.195.814.751.475,50 | 3.069.549.278.172,47 | 96,05% | (126.265.473.303,03) |

Sumber : BAPPPPEDA (Data Diolah)

Adapun rincian target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,**
**Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
**Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013 - 2019**

| No. | Uraian | Target – T (Rp) | Realisasi – R (Rp) | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **1.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2013** | | | |
| | a. PAD | 170.748.718.708,50 | 189.612.071.919,53 | 111,05% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.415.438.067.582,40 | 1.423.049.021.101,00 | 100,54% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah | 107.250.508.691,50 | 102.529.365.828,00 | 95,60% |
| | **Jumlah** | **1.693.437.294.982,40** | **1.715.190.458.848,53** | **101,28%** |
| **2.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2014** | | | |
| | a. PAD | 260.719.911.434,66 | 301.800.842.760,30 | 115,76% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.534.742.814.840,00 | 1.543.460.191.373,00 | 100,57% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 273.841.613.787,10 | 241.898.743.219,00 | 88,34% |
| | **Jumlah** | **2.069.304.340.061,76** | **2.087.159.777.352,30** | **100,86%** |
| **3.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2015** | | | |
| | a. PAD | 318.552.026.399,66 | 327.369.262.021,11 | 102,77% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.312.916.320.326,00 | 1.269.358.454.244,00 | 96,68% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 791.183.544.474,00 | 760.329.826.545,00 | 96,10% |
| | **Jumlah** | **2.422.651.891.199,66** | **2.357.057.542.810,11** | **97,29%** |
| **4.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2016** | | | |
| | a. PAD | 340.660.537.990,55 | 345.783.041.953,39 | 101,50% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.668.033.854.411,00 | 1.611.298.154.638,00 | 96,60% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 448.086.812.163,00 | 436.203.453.168,00 | 97,35% |
| | **Jumlah** | **2.456.781.204.564,55** | **2.393.284.649.759,39** | **97,42%** |
| **5** | **Pendapatan Daerah Tahun 2017** | | | |
| | a. PAD | 523.547.667.603,07 | 553.283.177.791,18 | 105,68% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.683.414.964.628,00 | 1.594.548.731.778,00 | 94,72% |
| | c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 522.034.769.852,00 | 511.137.322.181,00 | 97,91% |
| | **Jumlah** | **2.728.997.402.083,07** | **2.658.969.231.750,18** | **97,43%** |
| **6.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2018** | | | |
| | a. PAD | 464.361.703.852,86 | 432.181.933.419,04 | 93,07% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.675.041.304.197,00 | 1.638.676.633.162,00 | 97,83% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 685.189.849.727,89 | 679.038.147.153,00 | 99,10% |
| | **Jumlah** | **2.824.592.857.777,75** | **2.749.896.713.734,04** | **97,36%** |
| **7.** | **Pendapatan Daerah Tahun 2019** | | | |
| | a. PAD | 525.971.744.632,50 | 463.528.449.322,47 | 88,13% |
| | b. Dana Perimbangan | 1.796.616.013.732,00 | 1.742.184.434.785,00 | 96,97% |
| | c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 873.226.993.111,00 | 863.836.394.065,00 | 98,92% |
| | **Jumlah** | **3.195.814.751.475,50** | **3.069.549.278.172,47** | **96,05%** |

Sumber : BAPPPPEDA (Data Diolah)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa, secara umum, kinerja Pendapatan Daerah cukup mengalami fluktuasi. Trend pergerakan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan peningkatan. Namun di sisi lain, rasio realisasi terhadap target Pendapatan Daerah menunjukkan trend yang menurun.

Rasio realisasi terhadap target PAD menunjukkan volatilitas tertinggi di antara dua komponen lainnya yang membentuk Pendapatan Daerah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan standar deviasi dari rasio tersebut sebesar 9,62%, dengan rata-rata rasio per tahun adalah sebesar 102,56%. Walaupun demikian, rasio realisasi terhadap target PAD mampu menunjukkan kinerja di atas 100% hingga Tahun Anggaran 2017, yang mana kondisi tersebut tidak dapat diikuti oleh rasio dua komponen pembentuk pendapatan daerah lainnya yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Standar deviasi atas rasio dua komponen lain, yaitu rasio realisasi Dana Perimbangan dan rasio realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap masing-masing targetnya, secara berturut-turut adalah 2,16% (rata-rata rasio 97,70%); dan 3,70% (rata-rata rasio 96,19%).

Pencapaian kinerja Pendapatan Daerah terbaik Kabupaten Sumedang terjadi pada Tahun Anggaran 2013, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,28% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang masing-masing di atas target, yaitu sebesar 111,05% dan 100,54%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di bawah target yaitu sebesar 95,60%.

Pencapaian kinerja Pendapatan Daerah terbaik kedua Kabupaten Sumedang terjadi pada Tahun Anggaran 2014, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,54% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD dan Dana Perimbangan yang masing-masing di atas target, yaitu sebesar 115,76% dan 100,57%. Sementara itu, kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di bawah target, yaitu sebesar 88,34%. Sedangkan, kinerja Pendapatan Daerah terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2019 dengan pencapaian hanya 96,05% dari yang ditargetkan. Rendahnya kinerja realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah. Kinerja realisasi PAD masih di

bawah target yaitu sebesar 88,13%, sedangkan Dana Perimbangan mencapai 96,97% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 98,92%.

Untuk dapat menghitung proyeksi Pendapatan Daerah di masa mendatang maka perlu menganalisa terlebih dahulu pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3.**
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019**

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | Rata–Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. PENDAPATAN** | | | | | | | |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **327.369.262.021,00** | **345.783.041.953,00** | **553.283.177.791,00** | **432.181.933.419,04** | **463.528.449.322,47** | **12.75%** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 124.772.329.005,00 | 120.609.781.305,00 | 157.256.500.230,00 | 188.935.600.771,00 | 205.521.153.763,00 | 13.99% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 12.886.553.881,00 | 14.283.756.947,00 | 11.985.080.540,00 | 1 1.186.704.824,00 | 1 0.263.528.592,00 | -5.04% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4.026.882.393,00 | 5.802.145.037,00 | 7.846.040.130,00 | 8.659.141.530,00 | 9.727.083.922,00 | 25.50% |
| 1.1.4 | Lain - Lain PAD yang Sah | 185.683.496.742,00 | 205.087.358.664,00 | 376.195.556.891,00 | 223.400.486.294,04 | 238.016.683.045,47 | 14.95% |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | **1.269.358.454.244,00** | **1.611.298.154.638,00** | **1.594.548.731.778,00** | **1.638.676.633.162,00** | **1.742.184.434.785,00** | **8.75%** |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak | 71.391.592.244,00 | 94.023.930.389,00 | 95.607.165.916,00 | 103.162.614.015,00 | 8 6.594.143.619,00 | 6.31% |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.118.845.812.000,00 | 1.138.929.785.000,00 | 1.119.198.604.000,00 | 1.125.798.410.000,00 | 1.180.828.452.000,00 | 1.39% |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 79.121.050.000,00 | 378.344.439.249,00 | 379.742.961.862,00 | 409.715.609.147,00 | 474.761.839.166,00 | 100.58% |
| 1.2.4 | Dana Tunjangan Profesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.3** | **Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **760.329.826.545,00** | **436.203.453.168,00** | **511.137.322.181,00** | **679.038.147.153,00** | **863.836.394.065,00** | **8.65%** |
| | Hibah | 2.259.000.000,00 | 12.656.108.102,00 | 34.473.960.000,00 | 120.505.200.000,00 | 128.579.320.000,00 | 222.22% |
| | Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Darah Lainnya | 119.155.952.280,00 | 113.033.738.140,00 | 122.309.363.299,00 | 138.154.127.057,00 | 136.437.021.093,00 | 3.69% |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 409.203.357.000,00 | - | - | - | - | - |
| | Dana Desa | 77.442.881.000,00 | 169.408.490.000,00 | 217.268.983.000,00 | 192.462.067.600,00 | 218.940.541.600,00 | 37.34% |
| | Bantuan Keuangan Provinsi | 152.268.636.265,00 | 141.105.116.926,00 | 137.085.015.882,00 | 202.916.752.496,00 | 330.657.094.372,00 | 25.20% |
| | **JUMLAH REALISASI PENDAPATAN** | **2.357.057.542.810,00** | **2.393.284.649.759,00** | **2.658.969.231.750,00** | **2.749.896.713.734,04** | **3.069.549.278.172,47** | **6.92%** |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | | | **1.515.408.909.024,00** | **1.609.720.022.262,00** | **1.656.888.704.313,00** | **4.58%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | 1.118.190.996.924,00 | 1.205.162.614.047,00 | 1.234.484.280.762,00 | 5.11% |

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | 35.249.088.900,00 | 61.460.999.575,00 | 35.591.700.000,00 | 16.14% |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | 1.491.098.000,00 | 2.567.849.500,00 | 3.367.912.900,00 | 51.68% |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | | | 346.248.239.700,00 | 322.137.755.740,00 | 360.093.456.751,00 | 2.41% |
| 2.1.7 | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa | | | 14.229.485.500,00 | 18.318.958.800,00 | 23.338.654.000,00 | 28.07% |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | 0,00 | 71.844.600,00 | 12.699.900,00 | 0.00% |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | | | **1.107.120.878.484,00** | **1.080.366.587.064,22** | **1.365.733.116.844,97** | **12.00%** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | 79.017.359.422,00 | 91.775.414.448,00 | 71.746.152.040,00 | (2.84%) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | 529.353.267.345,00 | 578.242.459.226,20 | 688.288.613.792,69 | 14.12% |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | 498.750.251.717,00 | 410.348.713.390,02 | 605.698.351.012,28 | 14.95% |
| | **JUMLAH BELANJA** | | | **2.622.529.787.508,00** | **2.690.086.609.326,22** | **3.022.621.821.157,97** | **7.46%** |
| | | | | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **3.1** | **Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan** | 156,543,702,544.35 | 156,099,506,859.46 | 22,521,812,431.85 | 68,929,367,789.03 | 231,610,506,672.67 | 89.05% |
| | Penggunaan SiLPA | 156,543,702,544.35 | 156,099,506,859.46 | 22,521,812,431.85 | 47,929,367,789.03 | 107,166,975,872.67 | 37.64% |
| | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000,000.00 | 124,443,530,800.00 | 0.00% |
| | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | Total Realisasi Penerimaan Daerah | 2.513.601.245.354,35 | 2.549.384.156.618,46 | 2.681.491.044.181,85 | 2.818.826.081.523,07 | 3.301.159.784.845,14 | 7.21% |
| **3.2** | **Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan** | | | 9.223.306.332,00 | 19.380.182.607,00 | 165.607.119.744,00 | 432,32% |
| | - Pembentukan Dana Cadangan | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | 7.623.306.332,00 | 7.649.367.436,00 | 6.918.552.264,00 | (4,61%) |

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pembayaran Pokok Utang | | | 1.600.000.000,00 | 11.730.815.171,00 | 158.688.567.480,00 | 942,96% |
| | - Pemberian Pinjaman | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Sumber : BAPPPPEDA (Data Diolah)

Berdasarkan data selama Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan hampir di seluruh komponen Pendapatan Daerah khususnya peningkatan yang cukup signifikan pada Hibah dan Dana Alokasi Khusus.

Peningkatan signifikan pada DAK, terjadi karena pemindahan pencatatan Tunjangan Profesi Guru yang semula pada Belanja Tidak Langsung, dialihkan menjadi DAK Fisik, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, bahwa proyeksi pendapatan Dana Tunjungan Profesi Guru dialokasikan pada Dana Alokasi Khusus.

Peningkatan Hibah pada Tahun 2018 bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat yaitu Hibah kepada Dinas Pendidikan untuk Dana BOS sebesar Rp116.794.200.000,00 dan Hibah kepada PDAM untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp3.711.000.000,00. Adapun pada Tahun 2019, Hibah direncanakan pada hal yang sama, yaitu Hibah BOS sebesar Rp114.376.320.000,00, BOS Afirmasi sebesar Rp7.596.000.000,00, BOS Kinerja sebesar Rp3.085.000.000,00 dan Hibah PDAM sebesar Rp3.522.000.000,00

**(2) Kinerja Penerimaan Pembiayaan**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa realisasi Penerimaan Daerah terdiri dari realisasi Pendapatan Daerah ditambah realisasi Penerimaan Pembiayaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA saja. Perkembangan penerimaan Pembiayaan Daerah dan Penerimaan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 89,05% atau di atas rata-rata pertumbuhan Penerimaan Daerah yang hanya sebesar 7,21%.

### 3.1.1.2. Kinerja Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah terbagi menjadi Belanja Daerah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, Pengeluaran Pembiayaan masuk dalam Pembiayaan Daerah, bersama dengan Penerimaan Pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan Pembiayaan Daerah sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun berikutnya. Berikut analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 (tiga) tahun terakhir.

**(1) Kinerja Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupeten/Kota. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada Tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp2.622.493.127.800,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp2.690.093.109.326,22 di Tahun Anggaran 2018, kemudian pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp3.022.621.821.157,97 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 7,47%. Selain itu dari sisi Belanja Langsung rata-rata pertumbuhan realisasinya 12,00% per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditopang dari rata-rata pertumbuhan Belanja Modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu mencapai 14,96%, diikuti dengan Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,12%.

Sedangkan, Belanja Pegawai pada Belanja Langsung justru cenderung menurun dengan pertumbuhan negatif sebesar (2,84%).

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa selama periode Tahun Angggaran 2017 sampai dengan Tahun Angggaran 2019 untuk realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,58%. Demikian juga untuk Belanja Langsung setiap tahunnya juga mengalami kenaikan lebih besar rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 12,00%. Selain itu, belanja Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya yaitu sebesar 51.68%. Khusus Belanja Pegawai pada Belanja Langsung mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan. Sedangkan, sebaliknya Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal sama-sama tumbuh dengan rata-rata masing-masing sebesar 14,12% dan 14,95%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan kedua belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan yang terjadi pada Pendapatan Daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja baik dalam Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, nilai rata-rata pertumbuhannya relatif tinggi.

Untuk melihat gambaran kinerja Belanja Daerah disajikan dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5 di bawah.

**Tabel 3.4.**
**Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sumedang**
**selama 3 Tahun Terakhir**
**Tahun Anggaran 2017 – 2019**
**(%)**

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BELANJA DAERAH | | | |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 95,95% | 94,69% | 92,78% |
| | Belanja Pegawai | 94,65% | 94,26% | 93,48% |
| | Belanja Bunga | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Belanja Subsidi | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Belanja Hibah | 99,62% | 98,13% | 99,77% |
| | Belanja Bantuan Sosial | 87,24% | 100,00% | 81,68% |

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 100,00% | 99,80% | 99,81% |
| | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | Belanja Tidak Terduga | 0,00% | 0,47% | 0,03% |
| 2 | Belanja Langsung | 95,20% | 92,93% | 93,24% |
| | Belanja Pegawai | 95,08% | 97,81% | 93,97% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 95,90% | 91,19% | 93,35% |
| | Belanja Modal | 94,48% | 94,41% | 93,03% |
| | TOTAL BELANJA DAERAH | 95,63% | 93,97% | 92,99% |

Sumber : BAPPPPEDA (Data Diolah)

Tabel 3.4 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90%. Kinerja Belanja Langsung mengalami kecenderungan membaik dari 92,93% di Tahun Anggaran 2018 meningkat menjadi 93,24% di Tahun 2019, yang didukung dengan kinerja penyerapan Belanja Modal di atas 92%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang cukup perhatian dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu juga, pada komponen Belanja Tidak Langsung, penyerapan anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa relatif baik dengan tingkat penyerapan hampir atau mencapai 100%.

Untuk melihat gambaran kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total Belanja Daerah berikut.

**Tabel 3.5.**
**Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir**
**Tahun Anggaran 2017 – 2019**
(%)

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **1** | **Belanja Tidak Langsung** | **57,79%** | **59,84%** | **54,82%** |

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Pegawai | 42,64% | 44,80% | 40,84% |
| | Belanja Bunga | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Belanja Subsidi | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Belanja Hibah | 1,34% | 2,28% | 1,18% |
| | Belanja Bantuan Sosial | 0,06% | 0,10% | 0,11% |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 13,20% | 11,97% | 11,91% |
| | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa | 0,54% | 0,68% | 0,77% |
| | Belanja Tidak Terduga | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| **2** | **Belanja Langsung** | **42,21%** | **40,16%** | **45,18%** |
| | Belanja Pegawai | 3,01% | 3,41% | 2,37% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 20,19% | 21,50% | 22,77% |
| | Belanja Modal | 19,01% | 15,25% | 20,04% |
| | **TOTAL BELANJA DAERAH** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

Sumber : BAPPPPEDA (Data Diolah)

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang lebih besar dibanding jenis belanja lainnya, selain Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan). Meskipun porsi Belanja Langsung cenderung menurun, hal tersebut seiring dengan perubahan proporsi dalam Belanja Daerah. Hal ini terlihat jelas pada menurunnya persentase proporsi realisasi kedua belanja selama 3 tahun terakhir meskipun pada Tahun Anggaran 2018 proporsi Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan, searah dengan proporsi Belanja Langsung yang juga menunjukkan peningkatan pada Tahun Anggaran 2019. Untuk dapat menghitung proyeksi Belanja Daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi Belanja Daerah selama 3 tahun terakhir, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Informasi realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan Belanja Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan komponen Pengeluaran Daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Berdasarkan Tabel 3.3 pertumbuhan yang sangat besar terjadi pada realisasi pembayaran pokok utang sebesar 942,96%. Hal tersebut dialokasikan untuk pembayaran pinjaman BLUD RSUD kepada Lembaga keuangan Bank sebesar Rp114.443.530.000,00, pembayaran utang Pemda kepada Lembaga keuangan Bank sebesar Rp104.221.800,00, dan pembayaran tunggakan iuran wajib Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp44.140.814.880,00.

Secara komprehensif, gambaran kinerja keuangan masa lalu di Kabupaten Sumedang yaitu sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, adalah sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

| No. | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | (%) |
| **1** | **PENDAPATAN** | **2.357.057.542.810,11** | **2.393.284.649.759,39** | **2.658.943.386.756,18** | **2.749.896.713.734,04** | **3.069.549.278.172,47** | **6,92** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | **327.369.262.021,11** | **345.783.041.953,39** | **553.257.332.797,18** | **432.181.933.419,04** | **463.528.449.322,47** | **12,75** |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 124.772.329.005,00 | 120.609.781.305,00 | 157.256.500.230,00 | 188.935.600.771,00 | 205.521.153.763,00 | 13,99 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 12.886.553.881,00 | 14.283.756.947,00 | 11.985.080.540,00 | 11.186.704.824,00 | 10.263.528.592,00 | (5,04) |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.026.882.393,00 | 5.802.145.037,00 | 7.846.040.130,00 | 8.659.141.530,00 | 9.727.083.922,00 | 25,50 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 185.683.496.742,11 | 205.087.358.664,39 | 376.169.711.897,18 | 223.400.486.294,04 | 238.016.683.045,47 | 14,95 |
| **1.2.** | **Dana Perimbangan** | **1.269.358.454.244,00** | **1.611.298.154.638,00** | **1.594.548.731.778,00** | **1.638.676.633.162,00** | **1.742.184.434.785,00** | **8,75** |
| 1.2. 1. | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 71.391.592.244,00 | 94.023.930.389,00 | 95.607.165.916,00 | 103.162.614.015,00 | 86.594.143.619,00 | 6,31 |
| 1.2. 2. | Dana Alokasi Umum | 1.118.845.812.000,00 | 1.138.929.785.000,00 | 1.119.198.604.000,00 | 1.125.798.410.000,00 | 1.180.828.452.000,00 | 1,39 |
| 1.2. 3. | Dana Alokasi Khusus | 79.121.050.000,00 | 378.344.439.249,00 | 379.742.961.862,00 | 409.715.609.147,00 | 474.761.839.166,00 | 100,58 |
| **1.3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **760.329.826.545,00** | **436.203.453.168,00** | **511.137.322.181,00** | **679.038.147.153,00** | **863.836.394.065,00** | **8,65** |
| 1.3.1. | Hibah | 2.259.000.000,00 | 12.656.108.102,00 | 34.473.960.000,00 | 120.505.200.000,00 | 128.579.320.000,00 | 222,22 |
| 1.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 119.148.505.714,00 | 113.033.738.140,00 | 122.309.363.299,00 | 138.154.127.057,00 | 136.437.021.093,00 | 3,70 |
| 1.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 1.298.900.000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 152.268.636.265,00 | 140.851.084.926,00 | 137.085.015.882,00 | 202.916.752.496,00 | 330.657.094.372,00 | 25,20 |

| No. | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | (%) |
| 1.3.6 | Bagi Hasil Bukan Pajak dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 7.446.566,00 | - | - | | | (25,00) |
| 1.3.7 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | - | 254.032.000,00 | - | 25.000.000.000,00 | 49.222.417.000,00 | (0,78) |
| 1.3.8 | Dana Tunjangan Profesi Guru | 407.904.457.000,00 | - | | | | (25,00) |
| 1.3.9 | Dana Desa | 77.442.881.000,00 | 169.408.490.000,00 | 217.268.983.000,00 | 192.462.067.600,00 | 218.940.541.600,00 | 37,34 |
| | | | | | | | |
| **2** | **BELANJA** | **2.352.851.738.495,00** | **2.510.877.751.388,00** | **2.622.493.127.800,00** | **2.690.093.109.326,22** | **3.022.621.821.157,97** | **6,53** |
| **2.1.** | **Belanja Tidak Langsung** | **1.294.438.098.208,00** | **1.594.163.233.329,00** | **1.515.408.909.024,00** | **1.609.720.022.262,00** | **1.656.888.704.313,00** | **6,84** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 1.153.409.315.444,00 | 1.277.969.349.634,00 | 1.118.190.996.924,00 | 1.205.162.614.047,00 | 1.234.484.280.762,00 | 2,13 |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 12.751.800.000,00 | 17.893.600.000,00 | 35.249.088.900,00 | 61.460.999.575,00 | 35.591.700.000,00 | 42,40 |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 1.702.274.450,00 | 1.514.317.000,00 | 1.491.098.000,00 | 2.567.849.500,00 | 3.367.912.900,00 | 22,70 |
| 2.1.6. | Belanja Bagi Hasil | 5.620.871.300,00 | 5.538.073.000,00 | 14.229.485.500,00 | 18.318.958.800,00 | 23.338.654.000,00 | 52,90 |
| 2.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan | 120.876.298.187,00 | 290.967.589.695,00 | 346.248.239.700,00 | 322.137.755.740,00 | 360.093.456.751,00 | 41,13 |
| 2.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 77.538.827,00 | 280.304.000,00 | - | 71.844.600,00 | 12.699.900,00 | 19,79 |
| **2.2.** | **Belanja Langsung** | **1.058.413.640.287,00** | **916.714.518.059,00** | **1.107.084.218.776,00** | **1.080.373.087.064,22** | **1.365.733.116.844,97** | **7,84** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 85.803.580.171,00 | 64.190.953.986,00 | 79.017.359.422,00 | 91.775.414.448,00 | 71.746.152.040,00 | (1,94) |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 415.386.334.860,00 | 387.161.956.171,00 | 529.493.918.310,00 | 578.242.459.226,20 | 688.288.613.792,69 | 14,55 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 557.223.725.256,00 | 465.361.607.902,00 | 498.572.941.044,00 | 410.355.213.390,02 | 605.698.351.012,28 | 5,14 |
| | | | | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **151.093.702.544,35** | **139.843.398.757,46** | **13.298.506.099,85** | **49.549.185.182,03** | **66.003.386.928,67** | **51,97** |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 156.543.702.544,35 | 156.099.506.859,46 | 22.521.812.431,85 | 68.929.367.789,03 | 231.610.506.672,67 | 89,05 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.450.000.000,00 | 16.256.108.102,00 | 9.223.306.332,00 | 19.380.182.607,00 | 165.607.119.744,00 | 254,91 |

### 3. 1. 2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Tabel berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 3.7.**
**Analisis Rasio Likuiditas. Rasio Solvabilitas. dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019**

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| **A** | **Rasio Likuiditas** | | | | | |
| | Aset Lancar | 205.518.272.139,87 | 112.568.711.893,05 | 113.747.163.575,75 | 205.862.740.451,48 | 219.115.997.800,17 |
| | Persediaan | 20.182.906.634,97 | 17.019.457.672,66 | 22.541.407.993,99 | 22.901.746.607,30 | 25.510.468.901,21 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 83.570.661.118,41 | 138.016.018.915,40 | 126.813.331.098,40 | 103.585.032.149,00 | 65.373.177.634,00 |
| 1 | Rasio Lancar | 2,46 | 0,82 | 0,90 | 1,99 | 3,35 |
| 2 | Rasio Quick | 2,22 | 0,69 | 0,72 | 1,77 | 2,96 |
| **B** | **Rasio Solvabilitas** | | | | | |
| | Total Aset | 2.228.850.997.710,41 | 2.489.847.478.601,45 | 2.401.866.601.548,11 | 3.084.379.217.263,35 | 3.400.816.817.776,45 |
| | Total Hutang | 85.081.992.639,41 | 138.016.018.915,40 | 126.813.331.098,40 | 103.585.032.149,00 | 65.373.177.634,00 |
| | Total Ekuitas | 2.143.769.005.071,00 | 2.351.831.459.686,05 | 2.275.053.270.449,71 | 2.980.794.185.114,35 | 3.335.443.640.142,45 |
| 1 | DAR | 0,0382 | 0,0554 | 0,0528 | 0,0336 | 0,0192 |
| 2 | DER | 0,0397 | 0,0587 | 0,0557 | 0,0348 | 0,0196 |
| **C** | **Rasio Aktivitas** | | | | | |
| | Pendapatan Daerah | 2.357.057.542.810,11 | 2.393.284.649.759,39 | 2.658.969.231.750,18 | 2.749.896.713.734,04 | 3.069.549.278.172,47 |
| | Saldo Awal Piutang | 35.406.039.774,00 | 53.039.467.223,00 | 86.482.147.771,33 | 62.312.826.198,33 | 30.305.017.786,33 |
| | Saldo Akhir Piutang | 53.039.467.223,00 | 86.482.147.771,33 | 62.312.826.198,33 | 30.305.017.786,33 | 26.029.140.817,79 |
| 1 | Rata-rata Umur Piutang | 6,8481 | 10,6392 | 10,2126 | 6,1467 | 3,3493 |

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| | Nilai Persediaan (Beban Persediaan) | 481,961,478,189.90 | 42,781,380,521.00 | 481,961,478,189.90 | | |
| | Saldo Awal Persediaan | 18,351,813,351.45 | 20,182,906,634.97 | 17,019,457,672.66 | 22,541,407,993.99 | 22.901.746.607,30 |
| | Saldo Akhir Persediaan | 20,182,906,634.97 | 17,019,457,672.66 | 22,541,407,993.99 | 22.901.746.607,30 | 25.510.468.901,21 |
| 2 | Rata-rata Umur Persediaan | 14.5916 | 158.7006 | 14.9802 | NA | NA |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar, Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2016 cenderung meningkat. Mulai Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kedua rasio tersebut sudah berada di atas nilai 1, Rasio lancar pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 1,99 dan 3,35. Sejalan dengan rasio lancar, rasio cepat (*quick ratio*) sejak Tahun Anggaran 2016 juga cenderung meningkat dengan rasio berada di atas nilai 1 untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 1,77 dan 2,96. Hal ini menggambarkan kondisi yang perlu diperhatikan karena munculnya kewajiban lancar yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dikhawartirkan akan membebani kas daerah di masa mendatang.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai jauh di bawah 1%, bahkan di bawah 1 per 1000, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 apabila dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Secara keseluruhan, rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sumedang dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana pada tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8**
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**
**Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2015 s.d Tahun Anggaran 2019**

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | (%) |
| **1.** | **ASET** | | | | | | |
| **1.1.** | **ASET LANCAR** | **205.518.272.139,87** | **112.568.711.893,05** | **135.952.186.448,93** | **205.862.740.451,48** | **219.115.997.799,54** | **8,99** |
| 1.1.1 | Kas | 156.171.960.312,46 | 22.521.812.431,85 | 47.929.367.789,03 | 109.359.289.589,85 | 112.930.843.942,54 | 51,80 |
| 1.1.2. | Piutang | 29.163.405.192,44 | 73.027.441.788,54 | 65.405.555.154,91 | 73.601.704.254,33 | 80.674.684.955,79 | 50,83 |
| 1.1.3. | Persediaan | 20.182.906.634,97 | 17.019.457.672,66 | 22.617.263.504,99 | 22.901.746.607,30 | 25.510.468.901,21 | 6,16 |
| | | | | | | | |
| **1.2.** | **ASET TETAP** | **1.948.821.707.094,07** | **2.299.997.960.640,83** | **2.733.627.666.328,89** | **2.738.407.730.688,34** | **3.034.920.899.216,34** | **12,35** |
| 1.2.1. | Tanah | 348.203.073.915,35 | 360.681.434.236,35 | 364.970.882.957,73 | 369.769.092.957,73 | 389.251.186.845,73 | 2,03 |
| 1.2.2. | Peralatan dan Mesin | 521.867.694.513,52 | 576.192.737.674,40 | 617.324.741.920,44 | 782.666.160.990,94 | 1.026.797.559.353,59 | 14,78 |
| 1.2.3. | Gedung dan Bangunan | 766.553.250.269,15 | 831.398.672.687,34 | 919.391.509.453,10 | 1.010.422.917.144,10 | 1.132.017.035.902,45 | 9,65 |
| 1.2.4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.707.969.916.902,32 | 2.082.609.849.240,32 | 2.369.600.349.534,32 | 2.504.668.763.258,32 | 2.661.557.313.054,32 | 13,81 |
| 1.2.5. | Aset Tetap Lainnya | 70.786.190.166,42 | 81.662.369.124,07 | 110.136.993.026,25 | 137.031.219.529,25 | 168.247.839.819,25 | 24,88 |
| 1.2.6. | Konstruksi dalam Pengerjaan | 16.497.937.850,00 | 32.452.172.360,00 | 582.000.000,00 | - | 20.489.119.698,00 | (33,83) |
| 1.2.7. | Akumulasi Penyusutan | - 1.483.056.356.522,69 | - 1.664.999.274.681,65 | - 1.648.378.810.562,95 | - 2.066.150.423.192,00 | - 2.363.439.155.457,00 | 12,20 |
| | | | | | | | |
| **1.3.** | **ASET LAINNYA** | **29.244.121.469,79** | **26.939.428.950,52** | **69.469.434.775,49** | **61.030.001.507,74** | **52.834.370.253,23** | **45,95** |
| 1.3.1. | Tuntutan Ganti Rugi | 103.537.012,00 | 101.537.012,00 | 101.537.012,00 | 101.537.012,00 | 32.000.412,00 | (0,64) |
| 1.3.2. | Aset Tak Berwujud | 2.141.934.832,00 | 4.057.285.064,12 | 38.498.059.480,59 | 39.937.819.562,59 | 42.362.157.305,59 | 314,01 |

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | (%) |
| 1.3.3. | Amortisasi | - | - | - 2.688.273.453,59 | - 11.868.626.230,74 | - 21.344.548.740,85 | 113,83 |
| 1.3.4. | Aset Lain-lain | 26.998.649.625,79 | 22.780.606.874,40 | 33.558.111.736,49 | 32.859.271.163,89 | 31.784.761.276,49 | 9,87 |
| **JUMLAH ASET DAERAH** | | **2.228.850.997.710,41** | **2.489.847.478.601,45** | **3.003.485.228.916,66** | **3.084.379.217.263,35** | **3.400.816.817.775,82** | **11,68** |
| | | | | | | | |
| **2.** | **KEWAJIBAN** | **85.081.992.639,41** | **138.016.018.915,40** | **136.883.871.016,40** | **103.585.032.149,00** | **65.373.177.634,00** | **12,36** |
| **2.1.** | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **85.081.992.639,41** | **138.016.018.915,40** | **136.883.871.016,40** | **103.585.032.149,00** | **65.373.177.634,00** | **12,36** |
| | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | - | 1.394.085,00 | - | - | - | |
| 2.1.1. | Utang Bunga | 770.425.178,00 | 770.425.178,00 | 770.425.178,00 | - | - | |
| 2.1.2. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 3.391.286.971,40 | 2.435.036.971,40 | 835.036.971,40 | 104.221.800,00 | - | (60,47) |
| 2.1.3. | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.102.505.699,25 | 6.149.227.806,00 | 6.183.697.706,00 | 6.101.335.179,00 | 395.951.308,00 | 152,33 |
| 2.1.4. | Utang Belanja | 59.971.966.896,00 | 82.174.704.161,00 | 89.749.911.140,00 | 46.926.761.955,00 | 3.946.795.220,00 | (0,49) |
| 2.1.5. | Utang Jangka Pendek Lainnya | 19.845.807.894,76 | 46.485.230.714,00 | 39.344.800.021,00 | 50.452.713.215,00 | 61.030.431.106,00 | 49,03 |
| | | | | | | | |
| **3.** | **EKUITAS DANA** | **2.143.769.005.071,00** | **2.351.831.459.686,05** | **2.866.601.357.900,27** | **2.980.794.185.114,35** | **3.335.443.640.142,45** | **11,86** |
| **3.1.** | **EKUITAS DANA LANCAR** | **2.143.769.005.071,00** | **2.351.831.459.686,05** | **2.866.601.357.900,27** | **2.980.794.185.114,35** | **3.335.443.640.142,45** | **11,86** |
| 3.1.1. | SILPA | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Cadangan Piutang | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Cadangan Persediaan | - | - | - | - | - | - |
| **3.2.** | **EKUITAS DANA INVESTASI** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.2.1. | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | - | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | | | | | (%) |
| 3.2.2. | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | | **2.228.850.997.710,41** | **2.489.847.478.601,45** | **3.003.485.228.916,67** | **3.084.379.217.263,35** | **3.400.816.817.776,45** | **11,68** |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

### 3. 1. 3. Kinerja Pendanaan Non APBD

Pendanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang, selain bersumber dari APBD juga bersumber dana-dana yang lain. Konsep yang digunakan adalah pentahelix yaitu kolaborasi antara akademisi dari perguruan tinggi, pelaku bisnis, penggiat di komunitas, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta modal sosial yang ada di masyarakat. Sampai dengan saat ini, yang paling dominan adalah program yang bersumber dari *corporate social Responsibility* (*CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Lembaga yang berperan aktif dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Sumedang, diantaranya Bank Sumedang, Bank bjb, Baznas, Dewan Kebudayaan Sumedang, APINDO, HAKLI, UNPAD, UNWIM, ITB, IPDN, Yayasan Pendidikan Sebelas April, Coca Cola Amatil Sumedang, dan PT Kahatex. CSR tidak selalu berbentuk pendanaan, tetapi dapat juga berupa ide atau gagasan demi kemajuan Kabupaten Sumedang.

Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, CSR dari Bank Sumedang dan Bank bjb sebesar Rp1.758.565.828,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Sumedang Sejahtera sebesar Rp170.378.828,00; Sumedang Agamis sebesar Rp652.500.000,00; Sumedang Maju sebesar Rp766.187.000,00; dan Sumedang Kreatif sebesar Rp169.500.000,00

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja, dan Kebijakan Pembiayaan. Kebijakan disusun agar pendapatan daerah yang terbatas dapat digunakan untuk membiayai Kebijakan Belanja Daerah dengan efektif dan efisien sehingga dapat tercapai kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupatem Sumedang.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 3.9**
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**
**Kabupaten Sumedang selama 5 Tahun Terakhir**
**Tahun Anggaran 2015 - 2019**

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **1.250.162.630.359,00** | **1.282.429.794.252,00** | **1.123.307.283.294,00** | **1.211.937.980.824,00** | **1.242.023.391.147,00** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1.153.409.315.444,00 | 1.170.300.670.938,00 | 1.014.968.297.633,00 | 1.067.142.032.964,00 | 1.036.312.329.300,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 82.954.804.498,00 | 97.621.334.444,00 | 92.020.649.150,00 | 122.475.189.250,00 | 185.490.996.819,00 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 8.952.589.550,00 | 9.285.682.725,00 | 10.814.988.250,00 | 13.998.687.125,00 | 17.314.305.400,00 |
| 4 | Belanja pemungutan Pajak Daerah | 4.845.920.867,00 | 5.222.106.145,00 | 5.503.348.261,00 | 8.322.071.485,00 | 2.905.759.628,00 |
| B | **Belanja Langsung** | **137.354.644.067,00** | **116.773.630.806,00** | **185.742.892.482,00** | **248.477.154.009,00** | **337.918.166.796,00** |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 44.086.932.170,00 | 35.691.657.500,00 | 36.604.514.500,00 | 39.549.204.325,00 | 3.603.237.500,00 |
| 2 | Belanja Uang Lembur PNS | 1.713.296.150,00 | 1.969.916.500,00 | 2.009.192.500,00 | 1.894.580.000,00 | 2.335.805.000,00 |
| 3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 419.845.000,00 | 15.000.000,00 | 173.750.000,00 | - | - |
| 4 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS | 4.164.502.025,00 | 2.410.621.130,00 | 3.417.026.375,00 | 4.458.123.000,00 | 7.547.582.205,00 |
| 5 | Belanja premi asuransi kesehatan | - | 6.096.408.000,00 | 6.058.597.500,00 | 10.727.956.000,00 | 25.584.830.030,00 |
| 6 | Belanja makanan dan minuman pegawai | 9.862.412,00 | 5.893.219.575,00 | 3.850.973.825,00 | 3.646.346.850,00 | 4.438.452.090,00 |
| 7 | Belanja pakaian dinas dan atributnya | 647.384.000,00 | 1.004.080.300,00 | 266.084.000,00 | 792.969.000,00 | 1.374.403.350,00 |
| 8 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 3.480.080.450,00 | 2.597.567.100,00 | 1.729.700.500,00 | 2.318.145.955,00 | 2.922.326.115,00 |

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 9 | Belanja perjalanan dinas | 26.950.701.129,00 | 29.754.803.209,00 | 33.020.703.352,00 | 46.787.653.134,00 | 60.309.224.971,04 |
| 10 | Belanja perjalanan pindah tugas | - | - | - | - | - |
| 11 | Belanja Pemulangan Pegawai | - | - | - | - | - |
| 12 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) | 55.882.040.731,00 | 31.340.357.492,00 | 98.612.349.930,00 | 138.302.175.745,00 | 229.802.305.534,96 |
| **Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur** | | **1.387.517.274.426,00** | **1.399.203.425.058,00** | **1.309.050.175.776,00** | **1.460.415.134.833,00** | **1.579.941.557.943,00** |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

Jika dilihat dari tabel di atas, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Penurunan hanya terjadi pada Tahun 2017.

Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

**Tabel 3.10**
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017 - 2019**

| No | Tahun Anggaran | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) (a) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b) | Prosentase ((a)/ (b)) x 100% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahun Anggaran 2015 | 1.387.517.274.426,00 | 2.357.501.738.495,00 | 59,05 |
| 2 | Tahun Anggaran 2016 | 1.399.203.425.058,00 | 2.527.133.860.388,00 | 55,37 |
| 3 | Tahun Anggaran 2017 | 1.309.050.175.776,00 | 2.631.716.434.132,00 | 49,74 |
| 4 | Tahun Anggaran 2018 | 1.460.415.134.833,00 | 2.709.466.791.933,22 | 53,90 |
| 5 | Tahun Anggaran 2019 | 1.579.941.557.943,00 | 3.188.128.940.901,97 | 49,56 |

Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada Tahun Anggaran 2015, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 59,05% dari total realisasi Pengeluaran Daerah. Kemudian realisasinya menurun pada Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar 55,37% dan pada Tahun Anggaran 2017 menjadi hanya sebesar 49,97% di Tahun Anggaran 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018, kebutuhan Belanja Aparatur kembali mengalami peningkatan menjadi 53,90%. Walaupun demikian, pada Tahun Anggaran 2018 (Tabel 3.12) telah terjadi efisiensi pada Belanja Uang Lembur

PNS dan Belanja Makanan dan Minuman Pegawai. Apabila dilihat per komponen Belanja Aparatur, maka terlihat bahwa yang mengalami peningkatan signifikan adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Modal.

Pada Tahun 2019, kebutuhan Belanja Aparatur menurun signifikan dari kebutuhan Tahun 2018, yaitu menjadi sebesar 49,56%. Penurunan ini disebabkan penurunan pembayaran Gaji dan Tunjangan, TPP, serta honorarium PNS pada Belanja Langsung. Adapun peningkatan signifikan terjadi pada pembayaran asuransi jaminan kesehatan, yaitu selaian pembayaran tahun berjalan yang indeksnya mengalami peningkatan, juga ditambah pembayaran beban tahun-tahun sebelumnya.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah. Sedangkan pengeluaran dalam Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang adalah pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Dan Pembayaran Pokok Utang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan rata-rata pertumbuhan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.8. Jika dilihat dari tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami peningkatan yang sangat signifikan tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir). Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

**Tabel 3.11.**
**Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran**
**Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019**

| No. | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.357.057.542.810,11 | 2.393.284.649.759,39 | 2.658.943.386.756,18 | 2.749.896.713.734,04 | 3.069.549.278.172,47 |
| | Dikurangi realisasi | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 2.352.851.738.495,00 | 2.510.877.751.388,00 | 2.622.493.127.800,00 | 2.690.086.609.326,22 | 3.022.621.821.157,97 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 4.650.000.000,00 | 16.256.109.000,00 | 9.223.306.332,00 | 19.380.182.607,00 | 165.507.119.744,00 |
| **Surplus (Defisit) Riil** | | **(444.195.684,89)** | **(133.849.210.628,61)** | **27.226.952.624,18** | **40.429.921.800,82** | **(118.579.662.729,50)** |

Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 terjadi defisit riil pada realisasi anggaran, sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 terjadi surplus riil realisasi anggaran. Meskipun terjadi defisit riil pada Tahun Anggaran 2016, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2019 meski terjadi defisit riil realisasi anggaran, saldo penggunaan SiLPA relatif cukup besar karena dampak adanya surplus riil yang cukup besar pada 2 tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2017 surplus riil sebesar Rp27.226.952.624,18 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp22.521.812.431,85 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp49.748.765.056,03. Pada Tahun Anggaran 2018 surplus riil yang terjadi justru bertambah signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang mencapai sebesar Rp40.429.921.800,82 ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp68.929.367.789,03 sehingga SILPA Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar Rp109.359.289.589,85 jauh lebih besar dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Demikian pun pada Tahun 2019, terjadi defisit riil sebesar Rp.118.579.662.729,50 dapat ditutupi dengan SiLPA sebesar Rp.107.166.975.872,67 sehingga SILPA sebesar Rp112.930.843.943,17. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**
**Analisis Surplus/ (defisit) Riil terhadap**
**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**
**Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019**

| No | Uraian | Tahun Anggaran | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | surplus/ defisit riil | (444.195.684,89) | (133.849.210.628,61) | 27.226.952.624,18 | 40.429.921.800,82 | (118.579.662.729,50) |
| 2 | SiLPA | 156.543.702.544,35) | 156.099.506.859,46 | 22.521.812.431,85 | 68.929.367.789,03 | 107.166.975.872,67 |
| 3 | SILPA | 156.099.506.859,46) | 22.250.297.128,85 | 49.748.765.056,03 | 109.359.289.589,85 | 112.930.843.943,17 |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan akan membahas kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Dengan demikian, pada sub bab ini akan dibahas proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah untuk kurun waktu sampai dengan Tahun 2023.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis kinerja keuangan masa lalu menggunakan data realisasi APBD berdasarkan Perda Pertanggungjawaban APBD. Dengan demikian, walaupun penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dilaksanakan pada Tahun 2021 tetapi analisis keuangan masa lalu hanya sampai dengan Tahun 2019 karena realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan dalam Perda Pertanggungjawaban APBD.

Pada Tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya secara teknis diatur melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberlakuan peraturan sebagaimana dimaksud dimulai sejak penyusunan Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan memberikan dampak yang signifikan pada perubahan struktur APBD. Secara lebih jelas, digambarkan dalam gambar di bawah ini:

**Tabel 3.13**
**Perbandingan Struktur APBD**

| PP No.58 Tahun 2005 | | PP No.12 Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | 1 | **PENDAPATAN** |
| **1.1.** | **Pendapatan Asli Daerah** | 1. 1 | **Pendapatan Asli Daerah** |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 1.1.1 | Pajak Daerah |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 1.1.2 | Retribusi Daerah |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah |
| **1.2.** | **Dana Perimbangan** | **1. 2** | **Pendapatan Transfer** |
| 1.2. 1. | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 1. 2. 1 | Transfer Pemerintah Pusat |
| 1.2. 2. | Dana Alokasi Umum | 1. 2. 2 | Transfer Antar Daerah |
| 1.2. 3. | Dana Alokasi Khusus | **1. 3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** |
| **1.3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 1. 3. 1 | Hibah |
| 1.3.1. | Hibah | 1. 3. 2 | Dana Darurat |
| 1.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 1. 3. 3 | Lain-lain Pendapatan |
| 1.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1.3.6 | Bagi Hasil Bukan Pajak dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1.3.7 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat | | |
| 1.3.8 | Dana Tunjangan Profesi Guru | | |
| 1.3.9 | Dana Desa | | |

| PP No.58 Tahun 2005 | | PP No.12 Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA** | **2** | **BELANJA** |
| **2.1.** | **Belanja Tidak Langsung** | **2. 1** | **Belanja Operasi** |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 2. 1. 1 | Belanja Pegawai |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 2. 1. 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 2. 1. 3 | Belanja Bunga |
| 2.1.6. | Belanja Bagi Hasil | 2. 1. 4 | Belanja Subsidi |
| 2.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan | 2. 1. 5 | Belanja Hibah |
| 2.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 2. 1. 6 | Belanja Bantuan Sosial |
| **2.2.** | **Belanja Langsung** | **2.2** | **Belanja Modal** |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 2. 2. 1 | Belanja Modal Tanah |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2. 2. 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 2. 2. 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
| | | 2. 2. 4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |
| | | 2. 2. 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
| | | **2. 3** | **Belanja Tidak Terduga** |
| | | **2. 4** | **Belanja Transfer** |
| | | 2. 4. 1 | Belanja Bagi Hasil |
| | | 2. 4. 2 | Belanja Bantuan Keuangan |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | **3** | **PEMBIAYAAN** |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** | **3. 1** | **Penerimaan Pembiayaan** |
| 3. 1. 1 | SiLPA | 3. 1. 1 | SiLPA |
| 3. 1. 2 | | 3. 1. 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3. 1. 3 | | 3. 1. 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| 3. 1. 4 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah | 3. 1. 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah |
| | | 3. 1. 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |

| PP No.58 Tahun 2005 | | PP No.12 Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|
| | | 3. 1. 6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
| | | **3. 2** | **Pengeluaran Pembiayaan** |
| | | 3. 2. 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| | | 3. 2. 2 | Penyertaan Modal Daerah |
| | | 3. 2. 3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | 3. 2. 4 | Pemberian Pinjaman Daerah |
| 3. 2. 1 | | 3. 2. 5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
| 3. 2. 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 3. 2. 3 | Pembayaran Pokok Utang | | |

### 3.3.1. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 12,75% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Dana Perimbangan relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,75%, meski tingkat pertumbuhan DAK dinilai terlalu optimistik, yaitu rata-rata naik 100,58% per tahun. Begitu juga, pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pertumbuhan pada pos Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Desa perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pemerintah Provinsi sebesar 6,31% dinilai terlalu optimistik.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif.

**Tabel 3.14.**
**Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang selama 4 Tahun Mendatang (2020 – 2023)**

| NO. | URAIAN | PERTUMBUHAN (%) | TAHUN ANGGARAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **PENDAPATAN** | | **2.806.868.856.166,22** | **3.142.346.284.137,00** | **3.278.316.625.319,43** | **3.444.838.830.207,80** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **12,75** | **449.530.481.156,22** | **535.215.807.457,00** | **582.556.794.774,78** | **654.249.377.891,68** |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 13,99 | 194.937.625.000,00 | 235.250.400.000,00 | 253.243.162.513,82 | 298.826.931.766,30 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | -5,04 | 6.983.173.826,00 | 12.427.169.157,00 | 13.721.303.520,28 | 14.681.794.766,69 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25,50 | 12.844.923.113,00 | 9.977.870.000,00 | 9.906.368.126,25 | 10.599.813.895,09 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 14,95 | 234.764.759.217,22 | 277.560.368.300,00 | 305.685.960.614,44 | 330.140.837.463,59 |
| **1.2.** | **Pendapatan Transfer** | | **2.223.488.275.010,00** | **2.490.621.697.365,00** | **2.579.251.051.229,65** | **2.674.080.673.001,12** |
| 1.2.1. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8,75 | 1.951.622.658.414,00 | 2.069.642.041.220,00 | 2.145.939.248.862,40 | 2.227.994.453.832,21 |
| 1.2.2. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | | 271.865.616.596,00 | 420.979.656.145,00 | 433.311.802.367,25 | 446.086.219.168,91 |
| **1.3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | | **133.850.100.000,00** | **116.508.779.315,00** | **116.508.779.315,00** | **116.508.779.315,00** |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 222,22 | 133.850.100.000,00 | 116.508.779.315,00 | 116.508.779.315,00 | 116.508.779.315,00 |
| **2.** | **BELANJA** | **6,53** | **2.908.219.300.667,39** | **2.035.731.579.432,00** | **2.037.549.479.432,00** | **2.170.601.460.438,91** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | - | **2.060.690.475.718,76** | 1.312.937.626.432,00 | 1.312.937.626.432,00 | 1.398.672.453.438,01 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | - | 1.338.780.225.810,96 | 639.362.943.000,00 | 639.362.943.000,00 | 681.113.343.177,90 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14,55 | 685.638.615.407,80 | 78.327.715.000,00 | 78.327.715.000,00 | 78.327.715.000,00 |
| 2.1.3 | Belanja Hibah | 42,40 | 35.048.884.500,00 | 5.103.295.000,00 | 6.921.195.000,00 | 7.373.149.033,50 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 22,70 | 1.222.750.000,00 | **2.035.731.579.432,00** | **2.037.549.479.432,00** | **2.170.601.460.438,91** |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **5,14** | **384.776.339.220,93** | **516.765.139.594,00** | **585.500.538.115,80** | **623.733.723.254,76** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | | | 1.203.570.000,00 | 585.500.538.115,80 | 623.733.723.254,76 |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | 208.722.837.875,00 | | - |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | 202.290.297.419,00 | | - |

| NO. | URAIAN | PERTUMBUHAN (%) | TAHUN ANGGARAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | | | 103.614.520.550,00 | | - |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | 810.150.000,00 | | - |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | | | 123.763.750,00 | | - |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | | **89.758.682.087,70** | **105.926.585.111,00** | **50.349.760.773,03** | **53.637.600.151,51** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 19,79 | 89.758.682.087,70 | 105.926.585.111,00 | 50.349.760.773,03 | 53.637.600.151,51 |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | | **372.993.803.640,00** | **483.922.980.000,00** | **604.916.846.998,60** | **644.417.917.107,61** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 52,90 | 20.139.850.000,00 | 29.627.252.700,00 | 49.627.252.700,00 | 52.867.912.301,31 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 41,13 | 352.853.953.640,00 | 454.295.727.300,00 | 555.289.594.298,60 | 591.550.004.806,30 |
| | | | | | | |
| **surplus/ (defisit)** | | | **- 101.350.444.501,17** | **0,00** | **0,00** | **- 47.551.870.744,99** |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** | | | | | **- 27.882.100.000,00** |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **89,05** | **37.726.130.693,55** | **37.726.130.693,55** | **2.160.068.607,70** | **21.036.991.957,70** |
| 3.1.1 | SiLPA | | **49.326.130.693,55** | **49.326.130.693,55** | **48.919.091.957,70** | **48.919.091.957,70** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **51,97** | 49.326.130.693,55 | 49.326.130.693,55 | 48.919.091.957,70 | 48.919.091.957,70 |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | **11.600.000.000,00** | | 20.000.000.000,00 | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal | | | 11.600.000.000,00 | 26.759.023.350,00 | 27.882.100.000,00 |
| | | | 11.600.000.000,00 | 26.759.023.350,00 | 27.882.100.000,00 | |
| **SILPA** | | | **0,00** | **37.726.130.693,55** | **2.160.068.607,70** | **- 26.514.878.787,29** |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

Perhitungan pada Tabel 3.17 dilakukan dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Tahun Anggaran 2021 didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan pandemi Covid-19. Oleh karenanya, proyeksi untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tidak berbasiskan rata-rata pertumbuhan selama Tahun Anggaran 2015 – 2019, tetapi dengan memanfaatkan batas bawah distribusi pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019. Batas bawah tersebut didapatkan dengan mengurangi rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019 dengan standar deviasinya;
4. Proyeksi Tahun 2021, 2022, dan 2023 akan merujuk pada 1 tahun sebelumnya dengan penyesuaian adalah rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019. Skema ini disebut sebagai proyeksi moderat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sumedang selama 3 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

**Tabel 3.15.**
**Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun Terakhir Tahun Anggaran 2017 – 2019**

| No | Uraian | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | Rata – Rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Total Belanja Tidak Langsung | 1.515.408.909.024,00 | 1.609.720.022.262,00 | 1.656.888.704.313,00 | 4,58% |
| B | Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan | 9.223.306.332,00 | 19.380.182.607,00 | 165.607.119.744,00 | 432.,2% |
| **Jumlah** | | **1.524.632.215.356,00** | **1.629.100.204.869,00** | **1,822,495,824,057.00** | **9,36%** |

Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran, maka data yang ada menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya. Misalnya, pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa. Selain Belanja Hibah, dua belanja lainnya relatif menunjukkan grafik peningkatan (lihat tabel 3.7 di atas).

**Tabel 3.16.**
**Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang**
**Tahun Anggaran 2020 – 2023**

| Uraian | Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2019) | Rata-rata Pertumbuhan (2015 - 2019) (%) | Batas Bawah Proyeksi untuk Tahun 2020 (%) | PROYEKSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 (RP) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Total Belanja Tidak Langsung** | **1.656.888.704.313,00** | **6,84%** | **(5,00%)** | **1.574.065.986.337,05** | **1.681.765.138.247,82** | **1.796.833.172.672,40** | **1.919.774.275.841,95** |
| Belanja Pegawai | 1.234.484.280.762,00 | 2,13% | (8,22%) | 1.132.993.450.521,42 | 1.157.091.268.902,95 | 1.181.701.627.626,61 | 1.206.835.427.994,65 |
| Belanja Bunga | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 35.591.700.000,00 | 42,40% | (18,55%) | 28.988.017.987,25 | 41.277.939.467,56 | 58.778.364.475,87 | 83.698.367.094,44 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.367.912.900,00 | 22,70% | (14,93%) | 2.864.936.602,73 | 3.515.234.837,21 | 4.313.141.152,56 | 5.292.160.399,92 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 360.093.456.751,00 | 52,90% | (17,84%) | 295.841.896.169,30 | 452.347.667.413,35 | 691.647.852.666,55 | 1.057.542.210.472,18 |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa | 23.338.654.000,00 | 41,13% | (26,15%) | 17.235.528.079,58 | 24.325.068.150,62 | 34.330.769.431,61 | 48.452.145.024,57 |
| Belanja Tidak Terduga | 12.699.900,00 | | | | | | |
| **Total Pengeluaran Pembiayaan** | **165.607.119.744,00** | **267,74%** | **(78,11%)** | **36.246.865.887,12** | **133.295.213.417,58** | **490.183.454.077,66** | **1.802.614.006.091,65** |

| Uraian | Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2019) | Rata-rata Pertumbuhan (2015 - 2019) (%) | Batas Bawah Proyeksi untuk Tahun 2020 (%) | PROYEKSI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 (RP) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 6.918.552.264,00 | 43,12% | (84,97%) | 1.039.811.765,29 | 1.488.229.658,75 | 2.130.027.367,57 | 3.048.599.764,10 |
| Pembayaran Pokok Hutang | 158.688.567.480,00 | | | | | | |
| Pemberian Pinjaman | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH PENGELUARAN DAERAH** | **1.822.495.824.057,00** | **9,34%** | **(2,79%)** | **1.610.312.852.224,17** | **1.815.060.351.665,40** | **2.287.016.626.750,06** | **3.722.388.281.933,60** |

Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)

Perhitungan proyeksi pada Tabel 3.16 dilakukan dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Tahun Anggaran 2021 didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan pandemi Covid-19. Oleh karenanya, proyeksi untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tidak berbasiskan rata-rata pertumbuhan selama Tahun Anggaran 2015 – 2019, tetapi dengan memanfaatkan batas bawah distribusi pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019. Batas bawah tersebut didapatkan dengan mengurangi rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019 dengan standar deviasinya.
4. Proyeksi Tahun 2021, 2022, dan 2023 akan merujuk pada satu tahun sebelumnya dengan penyesuaian adalah rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2015 – 2019. Skema ini disebut sebagai proyeksi moderat.

Dari tabel 3.16 di atas, penyesuaian angka pertumbuhan yang digunakan dilakukan dengan mengkalikan angka rata-rata pertumbuhan sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap dianggarkan dengan pertumbuhan 0%. Hasil perhitungan proyeksi di atas menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 diperkirakan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp1.478.854.962.925,15 atau cenderung meningkat dari Tahun Anggaran 2022

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total Keuangan Daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir Tahun 2023, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah

dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 2(dua) tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.17 berikut

**Tabel 3.17**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2023**

| No | Uraian | Perubahan APBD TA 2020 | APBD TA 2021 | Poyeksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 2.806.868.856.166,22 | 2.172.149.980.418,00 | 2.762.590.732.401,85 | 3.502.084.352.992,80 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | 20.000.000.000,00 |
| 3 | Sisa Lebih (riil) Perhitungan Anggaran | 112.930.843.943,17 | 4.680.000.000,00 | - | |
| | **Total Penerimaan** | **2.919.799.700.109,39** | **2.176.829.980.418,00** | **2.762.590.732.401,85** | **3.522.084.352.992,80** |
| | Dikurangi | | | | |
| 1 | Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama | 1.877.784.745.480,66 | 1.524.564.972.544,00 | 1.404.839.202.051,94 | 1.478.854.962.925,15 |
| **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan** | | **1.042.014.954.628,73** | **652.265.007.874,00** | **1.357.751.530.349,91** | **2.043.229.390.067,65** |

*Sumber: BAPPPPEDA (Data Diolah)*

Tabel di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang cukup tinggi. Hal ini akan terwujud apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang mampu menjaga efisiensi penganggaran daerah dan menjaga ketercapaian Pendapatan Daerah. Perbaikan tata kelola keuangan menjadi hal yang wajib harus dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian keuangan dengan munculnya kewajiban-kewajiban dan perkiraan keuangan dan anggaran di kemudian hari. Peningkatan Pendapatan Daerah selama 2 (dua) tahun mendatang ternyata diikuti dengan kenaikan Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat yang cukup signifikan dengan adanya kenaikan pada alokasi Belanja Pegawai (BTL), Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Penyertaan Modal. Kenaikan tersebut menyebabkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tidak lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 2 (dua) tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam Perubahan RPJMD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat;
b. Prioritas II adalah untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

### 3.3.3. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat

integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, APBDes, CSR, Pinjaman Keuangan kepada Lembaga Keuangan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan Kerjasama dengan Media.

**a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/Kota.

**b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat**

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi Jawa barat diarahkan untuk pendanaan infrastruktur serta program prioritas lainya yang selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan dari APBD Propinsi Jawa Barat, dapat dilaksanakan melalui Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang tempatnya di kabupaten/kota dan mendukung pencapaian Visi Misi Bupati/Walikota.

**c. Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pendanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk berperan dalam pembangunan daerah yang bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyusunan Program Pembangunan dimaksud meliputi bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana keagamaan, serta program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

**d. Sinergitas APBDes**

Keterbatasan Sumber Pendanaan Pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan dapat disinergikan melalui pembiayaan dari APBDes sehingga diperlukan sinkronisasi dalam

menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Desa sehingga antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaan.

**e. Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan**

Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, bahwa Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana dan atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah.

**f. Kerjasama Pemerintah dengan Perguruan Tinggi/Akademisi**

Konsep pembangunan model Pentahelix, memberikan peran kepada akademisi sebagai konseptor. Pembangunan Kabupaten Sumedang memerlukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan teknologi. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan dinamika perkembangan zaman di Kabupaten Sumedang

Melalui keberadaan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang, diharapkan lebih memudahkan kolaborasi pembagunan antara Pemerintah Daerah dan Institusi Perguruan Tinggi. Penerapan tridharma perguruan tinggi terutama Penelitian dan Pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat diharapkan lebih banyak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dan pada berbagai urusan daerah.

**g. Kerjasama Pemerintah dengan Media**

Jenis hubungan antara Pemerintah Daerah dan media adalah dalam kerangka koordinasi. Melalui saling berbagi sumber daya yang minimal namun hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan media tetap bersifat resmi. Salah satu peran media pada pembangunan daerah adalah melalui publikasi program kepala daerah, kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, serta capaian pembangunan.

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

## 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintahan Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 dilaksanakan atas dasar permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada disusun dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada akhir tahun kelima.

Pada awal Tahun 2021, RPJMD telah dilaksanakan selama dua Tahun. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi atas capaian perencanaan pembangunan sampai dengan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian tersebut telah diuraikan pada Bab II kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang atas capaian kinerja pelayanan pemerintah di seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Kinerja pembangunan periode Tahun 2018 sampai Tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target sebagaimana tercantum pada RPJMD Tahun 2018-2023. Akan tetapi pada Tahun 2020 telah terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan asumsi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi tidak sesuai dengan perkembangan Kabupaten Sumedang di masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian, terutama berkenaan dengan kodefikasi dan dampak kondisi Pandemi Covid-19.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sumedang dapat dianalisis dengan menggunakan metode *gap analysis* atau analisis dengan membandingkan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Apabila terdapat gap, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar pada akhir Tahun RPJMD, kesejahteraan masyarakat tetap tercapai sesuai yang direncanakan, yaitu masyarakat Sumedang yang SIMPATI. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Untuk itu, dari data yang sudah digambarkan pada Bab-bab sebelumnya, maka pada Bab 4 ini akan dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Permasalahan yang saat ini telah teridentifikasi secara garis besar dapat dibagi dalam dua cakupan permasalahan, yaitu yang pertama identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan yang kedua adalah identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada urusan penyelenggaran pemerintah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan. Adapun masing-masing identifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

### 4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat penganggauran terbuka yang masih tinggi, angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan, masih tidak meratanya distribusi diantara kelompok masyarakat, dan rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Sumedang masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020, mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang harus merelokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi data pada Bab II, maka di Kabupaten Sumedang masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran | • Angka kemiskinan 10,26% pada Tahun 2020 masih sangat tinggi dibandingkan dengan target SDG's (0%);<br>• Indeks Gini menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi selama 5 Tahun terakhir (Tahun 2015 sebesar 0,349 meningkat menjadi 0,384 di Tahun 2020);<br>• Tingkat Pengangguran Terbuka semakin meningkat (7,15% pada | • Akses pelayanan dasar (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) masih terbatas dan belum merata;<br>• Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam;<br>• Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah;<br>• Kebijakan yang belum menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | Tahun 2019 meningkat menjadi 9,89% pada Tahun 2020). | dengan memperhatikan *community empowerment*;<br>• Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan). |
| 2 | Kualitas Infrastruktur Dasar | • Kualitas jalan dan jembatan masih rendah;<br>• Kualitas infrastruktur perhubungan masih rendah;<br>• Kualitas permukiman dan sarana prasarana pendukungnya masih rendah. | • Penentuan prioritas kebutuhan layanan infrastruktur dasar tidak memadai (data dan informasi sebagai landasan pembuatan kebijakan sangat kurang);<br>• Perencanaan kurang terkoordinasi. |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia | • Capaian IPM Kabupaten Sumedang masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat; | • Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar; |
| | | • Angka Harapan Hidup masih di bawah capaian provinsi;<br>• Rata-rata lama sekolah masih dibawah capaian provinsi;<br>• Harapan Lama sekolah masih dibawah standar UNDP;<br>• Pengeluaran per kapita masih dapat ditingkatkan seiring dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi; | • Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;<br>• Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. |
| 4. | Struktur Perekonomian | • Masih Rendahnya kontribusi sektor produktif terhadap PDRB;<br>• Kontribusi sektor swasta masih rendah (minat investasi rendah);<br>• Pertumbuhan sektor industri belum berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.<br>• Capaian PDRB Kabupaten Sumedang masih rendah (peringkat 14 dari total 27 kabupaten kota di Jabar Tahun 2020); | • Belum ada sistem yang menyediakan akses permodalan dan pemasaran produk lokal;<br>• Pemanfaatan SDA lokal belum optimal;<br>• Belum terdorongnya produk-produk unggulan sebagai penciptaan peningkatan ekonomi rakyat masyarakat Kabupaten Sumedang.<br>• Pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian masih rendah. |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 5. | Rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah | • Manajemen pemerintahan yang kurang baik;<br>• Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berada pada posisi 83,80 (survei Tahun 2020). | • Profesionalisme aparatur masih rendah dengan beban yang ada;<br>• Prosedur kerja sesuai standar pelayanan yang baik masih belum tersedia;<br>• Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai. |

*Sumber : FGD P-RPJMD*

### 4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

**Tabel 4.2**
**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas**

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| **PRIORITAS AKSELERASI PELAYANAN DASAR** | | | | |
| 1 | Urusan Pendidikan | Masih rendahnya APK PAUD Sederajat | 1. Masih kurangnya standar pelayanan pendidikan tingkat Usia Dini;<br>2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan tingkat usia dini; | 1. Melakukan pembinaan standar pendidikan pada jenjang PAUD;<br>2. Melakukan sosialisasi pendidikan jenjang PAUD untuk wilayah (kecamatan) yang APK dan APM PAUD nya rendah; |
| | | Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan | 1. Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2020, masih pada angka 8,51;<br>2. Angka partisipasi pada Tahun 2020 masih pada angka 3,00%; | Peningkatan program sekolah Paket A, B dan C; |
| | | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni | Meskipun APK dan APM menujukkan angka di atas 100 pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hal tersebut akibat tidak diketahui distribusi siswa beralamat Sumedang dan Siswa di luar Sumedang yang bersekolah di Sumedang serta siswa beralamat Sumedang bersekolah di luar Sumedang, terutama kelompok margin penduduk usia sekolah Sumedang yang tidak bersekolah. | Koordinasi antara Dinas Kependudukan Dinas Pendidikan merekap/melaporkan anak usia sekolah *by name by address* |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | Belum memadainya sarana dan prasarana sekolah | 1. Belum meratanya ruang Lab IPA di jenjang SD-SMP;<br>2. Belum meratanya Lab Komputer di jenjang SD-SMP | Membangun Lab IPA dan Lab Komputer di jenjang SD-SMP; |
| | | Masih rendahnya persentase Guru yang bersertifikasi | Masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1 berdampak pada kurangnya jumlah guru yang bersertifikat pendidik; | Melakukan bantuan pendidikan lanjutan untuk guru baik dari Pemerintah maupun Swasta (CSR); |
| | | Karakter siswa harus terus dikembangkan | Asal siswa dari bermacam kalangan dan golongan menghasilkan berbagai macam karakter dan akhlak baik dan kurang baik, | Penyelenggaraan pendidikan berbasis Eksotis dan PERKASA |
| 2 | Urusan Kesehatan | Pelayanan kesehatan belum optimal | 1. Jumlah Nakes masih Kurang;<br>2. Jumlah Sarpras (alkes) masih kurang untuk meningkatkan status RS Tipe B ke RS Tipe B Pendidikan;<br>3. Jumlah tempat tidur rawat inap masih kurang. | 1. Penambahan tenaga kesehatan ;<br>2. Pengajuan kenaikan status RS Tipe B ke Tipe B Pendidikan;<br>3. Penambahan jumlah tempat tidur (Pembangunan Rumah Sakit) |
| | | Masih terdapat Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting sebanyak 12,05% | Kurangnya pendamping makanan tambahan ASI | Tersedianya bantuan MP ASI; |
| | | Masih terjadi kasus Kematian Ibu | 1. Belum adanya sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu sehingga adanya keterlambatan penanganan pasien<br>2. Masih terdapat kasus komplikasi yang lahir di rumah sakit Sumedang dari penduduk di luar | Pelatihan penanganan kegawatdaruratan neonatal (Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus) |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten Sumedang yang terlaporkan;<br>3. Penanganan ibu hamil dan melahirkan di puskesmas belum sesuai standar karena SDM belum terlatih penanganan kegawatdaruratan neonatal; | |
| | | Masih terjadi kasus Kematian Bayi | Banyak kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) | Peningkatan kondisi dan gizi ibu hamil; |
| | | Masih tingginya rasio Puskesmas per Satuan penduduk | Kurangnya jumlah puskesmas; | Peningkatan status puseksmas pembantu menjadi puskesmas |
| | | Kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) masih terjadi | Kasus DBD mencapai 707 kasus pada Tahun 2020 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD dengan cara menjaga kebersihan lingkungan |
| | | 1. Dokter Umum<br>2. Dokter Spesialis<br>3. Dokter Gigi<br>4. Rasio Bidan per 10.000 penduduk | 1. Tidak ada pengangkatan PNS Nakes, PTT Nakes, maupun TKD Nakes;<br>2. Kurang diminatinya praktek dokter di Sumedang | 1. Mengadakan perekrutan Nakes dengan pola PPK BLUD;<br>2. Pengajuan PNS Nakes dan PTT ke Pusat dan Provinsi |
| | | Remaja perokok sebanyak 7,1% | 1. Kurangnya pendidikan karakter pada anak usia sekolah<br>2. Akses mudah bagi remaja untuk mendapatkan rokok | 1. Penyebaran informasi secara intensif tentang bahaya merokok kepada para remaja<br>2. Pelaksanaan secara konsisten regulasi kawasan tanpa rokok |
| | | Cakupan peserta UHC 73,17% | Masih banyak penduduk yang tidak terdaftar JKN | Perbarui data DTKS untuk urusan JKN |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Rumah tangga bersanitasi | 1. Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat;<br>2. Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes);<br>3. Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal belum tersedia sehingga saat ini septitank masih dibuang ke sungai; | 1. Menyediakan sarpras sanitasi;<br>2. Menyediakan tanah untuk sanitasi komunal;<br>3. Melaksanakan STBM.<br>4. Menyediakan sanitasi komunal;<br>5. Penyediaan layanan sedotan tinja. |
| | | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | 1. Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; | 1. Menyediakan akses air bersih |
| | | Lingkungan Permukiman Kumuh | 1. Pertumbuhan penduduk miskin;<br>2. Kurangnya peran pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. | Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan. |
| | | Rasio Rumah Layak Huni | Pertumbuhan penduduk miskin | Konsistensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan angka kemiskinan. |
| 4 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase aparatur dan kendaraan pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | Jumlah pegawai Petugas Damkar masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk serta jumlah kendaraan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang | Penambahan personil Petugas Damkar serta penambahan sarana Damkar |
| | | Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan daerah | 1. Tingginya pelanggaran Perda<br>2. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara ilegal | Konsistensi personil Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Urusan Sosial | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1. Masih tingginya jumlah PMKS dan munculnya PMKS baru;<br>2. belum adanya regulasi daerah tentang penanganan PMKS (penangan ODGJ, orang terlantar, korban bencana, kaum minoritas);<br>3. Belum sinkronnya data penerima bantuan program pusat dengan data kabupaten/kota | 1. Melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial;<br>2. Penyusunan perda/perbup;<br>3. Verifikasi data secara rutin. |
| **PRIORITAS PENGUATAN SUMEDANG AGAMIS** | | | | |
| 1. | Urusan Pendidikan | Belum semua siswa Pendidikan dasar memiliki sertifikat Diniyah | 1. Belum optimalnya pendidikan dasar Agama Islam bagi siswa sekolah dasar dan menengah; | 1. Melaksanakan program wajib belajar madrasah diniyah selama 4 tahun;<br>2. Sertifikat diniyah menjadi salah satu persyaratan dalam melanjutkan sekolah ke tingkat menengah bagi siswa muslim. |
| 2. | Urusan Kebudayaan | Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan | 1. Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas;<br>2. Belum optimal kontribusi budayawan lokal dalam pengembangan Kabupaten Sumedang sebagai daerah Puseur Budaya Sunda;<br>3. Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara); | 1. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta);<br>2. Merangkul/mengkoordinasikan budayawan lokal untuk berkontribusi menyumbangkan ide dan gagasan dalam menciptakan suatu produk budaya yang dapat mewujudkan sumedang puseur budaya sunda;<br>3. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya | |
| **PRIORITAS PENGUATAN KETAHANAN DAERAH** | | | | |
| 1. | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR | 1. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten;<br>2. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;<br>3. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; | 1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW;<br>2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal;<br>3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; |
| 2. | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Sumedang merupakan kawasan rawan bencana tinggi | Belum komprehensifnya komunikasi dan informasi tentang rawan bencana | Terlaksananya KIE rawan bencana |
| | | Belum bisa diprediksinya bencana Pandemi COVID 19 akan berakhir | Tingkat kesadaran masyarakat dalam merubah kebiasaan terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru belum optimal | Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid 19 |
| 3. | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Responsif Gender | Kurangnya pemahaman masyarakat atas responfif gender | 1. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan kaum disabilitas<br>2. Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga disabilitas<br>3. Sarana publik yang inklusif. |
| | | Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan | masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak | 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;<br>2. pemenuhan hak anak; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Peningkatan pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); |
| | | Pemberdayaan perempuan | Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan |
| 4. | Urusan Lingkungan Hidup | Pengelolaan sampah dan pertamanan | 1. Masih rendahnya cakupan ketersediaan TPS<br>2. Kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau | 1. Peningkatan pengelolaan sampah melalui 3R (recycle, reduce, reuse);<br>2. Optimalnya Penanganan dan pengurangan sampah<br>3. Penyerahan TPS dari Kemen PUPR sehingga memudahkan pengelolaan TPS<br>4. Bertambahnya luasan RTH sesuai dengan standar |
| | | Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi | 1. Kualitas Air Sungai masih rendah;<br>2. Kualitas Udara masih rendah;<br>3. Kualitas Tutupan Lahan/Vegetasi masih belum optimal<br>3. Kualitas lingkungan hidup masih rendah | 1. Perketat AMDAL pada perusahaan yang mempunyai buangan limbah;<br>2. Penerapan hari bebas kendaraan;<br>3. Penghijauan |
| 5. | Urusan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan | 1. Skor Pola Pangan Harapan masih pada angka 89,10;<br>2. Rendahnya ketersediaan pangan utama | 1. Penyuluhan kebutuhan gizi;<br>2. Peningkatan cadangan pangan sesuai jumlah penduduk;<br>3. Izin ketat IMB di atas lahan persawahan. |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Urusan Pertanian | Produksi komoditas pertanian yang masih rendah | 1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian);<br>2. Masih kurangnya peralatan yang dapat mendukung sesuai kondisi geografis (dataran tinggi dan Bukit);<br>3. Ketersediaan sumber air masih minim;<br>4. Perlu adanya integrasi antara kewenangan pertanian (jaringan tersier) dalam hal jaringan irigasi pertanian dengan pupr dalam hal irigasi-pengairan (bendungan-jaringan primer, sekunder);<br>5. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang;<br>6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah;<br>7. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil, dampak relokasi jatigede);<br>8. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi);<br>9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian); | 1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;<br>2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah;<br>3. Perlu penyediaan fasilitas sumber-sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian (infrastruktur pertanian);<br>4. Peningkatan koordinasi antar sektor (leading sektor Bappeda)<br>5. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan);<br>6. Perlu ditambah pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan);<br>7. Penguatan cadangan pangan masyarakat;<br>8. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola konsumsi masyarakat;<br>9. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dalam memproduksi komoditas non beras;<br>10. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar;<br>11. Penindakan terhadap penggunaan bahan berbahaya untuk pangan segar. |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10. Masih lemahnya pengawasan terhadap pangan segar;<br>11. Belum memadai sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner,<br>12. Belum adanya rumah pemotongan hewan;<br>13. Belum adanya pasar hewan regional | 12. Penyediaan sarpras kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner;<br>13. Pembangunan rumah pemotongan hewan;<br>14. Pembangunan pasar hewan regional |
| 7. | Urusan Kelautan dan Perikanan | Produksi perikanan masih rendah<br>Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah | 1. Sarana dan prasarana budidaya-tangkap perikanan;<br>2. Belum optimalnya unit pembenihan perikanan (Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat);<br>3. Belum terintegrasinya kebijakan hulu dan hilir antar sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian);<br>4. Kesadaran masyarakat dalam konsumsi ikan masih kurang;<br>5. Belum terimplementasi regulasi terkait pelestarian perikanan dan penggunaan alat-alat perikanan yang ramah lingkungan. | 1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap;<br>2. Penyediaan pakan ikan- induk ikan dan sarana pendukung lainnya;<br>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pembenihan (Penyuluh);<br>4. Koordinasi antar sektor yang terkait ;<br>5. Menumbuhkan gerakan gemar makan ikan (diversifikasi produk pengolahan ikan, sosialisasi ke masyarakat);<br>6. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan |
| **PRIORITAS AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI** | | | | |
| 1. | Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap | 1. Masih rendahnya kondisi jalan yang mantap;<br>2. Masih rendahnya standar jalan yang dibangun oleh Pemerintah; | 1. Peningkatan kualitas jalan dengan kondisi mantap;<br>2. Peningkatan kualitas jalan; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Banyaknya jembatan yang masih di bawah standar; | 3. Peningkatan jembatan sesuai dengan standar kebinamargaan; |
| | | Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik | Permasalahan bidang Sumber Daya Air<br>1. Adanya penurunan kualitas system irigasi<br>2. Tumpang tindihnya data status daerah irigasi | 1. Peningkatan kualitas system irigasi<br>2. Tertibnya data status daerah irigasi |
| | | Kesesuaian pemanfaatan ruang | Permasalahan bidang Penataan Ruang<br>4. Masih terbatasnya dokumen RDTR, sehingga yang menjadi dasar perizinan masih berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten;<br>5. Masih terbatasnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;<br>6. Masih terbatasnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; | 1. Tersedianya dokumen RDTR sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW;<br>2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang optimal;<br>3. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; |
| | | Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis | Belum optimalnya pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis; | Meningkatkan kualitas pelatihan yang diukur melalui pre dan post test pada saat pelatihan |
| 2 | Urusan Tenaga Kerja | Masih tingginya angkatan kerja pencari kerja dan tingginya pengangguran akibat PHK. | 1. Jumlah lowongan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja;<br>2. kompetensi calon tenaga kerja tidak dapat memenuhi bursa kerja;<br>3. pencari kerja yang telah ditempatkan tidak mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja tidak melapor kembali ke disnaker); | 1. kerjasama dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja Kab Sumedang dan sosialisasi Perpres No 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan dan meningkatkan pendataan perusahaan;<br>2. pelaksanaan jobfair serta meningkatkan kualitas tenaga kerja |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Wajib lapor dari pihak perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan terutama dalam hal penerimaan pekerja/buruh.<br>5. Laporan rutin tentang keadaan jumlah pekerja/buruh dari perusahaan belum dilaksanakan sepenuhnya.<br>6. Banyaknya perusahaan yang merasionalkan pekerjanya akibat dari pandemi Covid 19. | sesuai kebutuhan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan;<br>3. Peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning;<br>4. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesaui formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lemabaga lainnya.Wajib lapor baik data<br>5. pekerja/buruh baik penerima pekerjaan dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan<br>6. Pemanfaatan Balai Latihan Kerja sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan dan munculnya kemandirian dalam berwirausaha<br>7. Adanya pelatihan kewirausahaan bagi para korban PHK. |
| 3 | Urusan Perhubungan | Masih rendahnya kenyamanan dan keamanan pengguna jalan | 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | 1. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Kurang tertatanya jaringan trayek angkutan umum | Tertatanya jaringan trayek angkutan umum |
| 4. | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat | 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi;<br>2. Tingginya persaingan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya;<br>3. Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi;<br>4. Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi. | Melakukan pembinaan tata kelola dan penguatan kelembagaan perkoperasian; |
| | | Peningkatan UMKM belum optimal | 1. Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha;<br>2. Database UMKM belum tersedia secara akurat;<br>3. Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing;<br>4. Kualitas produk dan kontinyuitas produksi usaha mikro belum terjaga<br>5. Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan Cakupan pemasaran masih terbatas. | 1. Megoptimalkan pengelolaan data (melakukan pendataan/updating data UMK);<br>2. Melakukan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif (proses hulu hingga hilir)<br>3. Bantuan Modal Usaha bagi UMK dalam meningkatkan dan pengembangan usaha. |
| 5. | Urusan Perdagangan | Pembinaan pelaku usaha perdagangan masih kurang | Sub sektor perdagangan merupakan penyumbang ketiga terbesar pada PDRB Kabupaten Sumedang, namun perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha masih kurang | Peningkatan pembinaan bekelanjutan bagi pelaku usaha perdagangan |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | Pengawasan perdagangan | 1. Mata rantai terlalu panjang sehingga mempengaruhi harga jual<br>2. Kecilnya nilai tambah yang diterima produsen | Memberikan pendidikan manajemen pemasaran bagi produsen |
| | | Revitalisasi Pasar Rakyat | 1. Permasalahan social<br>2. Kondisi pasar rakyat yang representatif belum merata | 1. Intervensi Pemda dalam menyelesaikan permasalahan sosial<br>2. Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat |
| 6. | Urusan Perindustrian | Belum akuratnya data industri kecil menengah | Industri kecil menengah jarang melaporkan usahanya sehingga terlambat terdeteksi oleh Pemda | Pemutakhiran data |
| | | Sertifikasi hasil industri | Masih rendahnya hasil industri yang tersertifikasi halal dan PIRT | Pemda menjadi penghubung untuk proses sertifikasi |
| | | Laju Pertumbuhan Industri pengolahan terkontraksi minus 1,46% | Banyak industri pengolahan yang terdampak akibat pandemic Covid 19 | Perlu adanya intervensi Pemerintah Daerah untuk mendorong keberlangsungan industri pengolahan. |
| 7. | Urusan Penanaman Modal | 1. Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi<br>2. Pelayanan perizinan yang belum optimal | 1. Adanya aturan yang overlaping satu dengan lainnya, sehingga menghambat proses perizinan;<br>2. implementasi perda/perbup terkait insentif-disinsentif belum optimal;<br>3. Masih adanya oknum (internal-eksternal) yang menghambat proses perizinan;<br>4. Belum mendukung infrastruktur wilayah dalam konteks peningkatan investasi (lintas sektor);<br>5. Belum efektifnya fungsi tim teknis | 1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah;<br>2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada;<br>3. Pembaruan regulasi yang mengatur investasi;<br>4. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda;<br>5. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam penyelenggaraan PTSP;<br>6. Belum bisa menyediakan data investasi yang jelas dan *update* | 6. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi;<br>7. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun; |
| 8 | Urusan Pariwisata | Rendahnya kunjungan wisata | 1. Infrastruktur/sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai (khususnya akses jalan menuju destinasi wisata);<br>2. Terbatasnya pelaksanaan event festival/pagelaran seni, budaya, olahraga;<br>3. Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya;<br>4. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;<br>5. Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. | 1. Revitalisasi/penataan kawasan pariwisata;<br>2. Meningkatkan pelaksanaan event (Melakukan kerjasama penyelenggaraan event dengan swasta);<br>3. Melakukan promosi pariwisata seni dan budaya;<br>4. Pembangunan galeri ekonomi kreatif sekaligus kepariwisataan;<br>5. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penggerak ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan. |
| | | Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang sampai skala nasional | Sub sektor ekonomi kreatif masih membidik pasar lokal | 1. Peningkatan kualitas produk sub sektor ekonomi kreatif;<br>Penciptaan pasar pada level nasional, |
| **PRIORITAS PENGUATAN INOVASI PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN** | | | | |
| 1. | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penerbitan dokumen kependudukan dan | 1. Minimnya alat dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik; | 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP elektronik; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | pencatatatan sipil belum optimal | 2. Ketersediaan blanko KTP El tidak kontinue karena mengikuti blanko yang disediakan kementerian (Ditjen Adminduk);<br>3. ~~Perlakuan masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan masih sangat rendah ??~~Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen pencatatan sipil<br>4. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran;<br>5. Program/kegiatan percepatan kepemilikan akte kelahiran baru membidik target 0-18 th (bayi dan usia sekolah);<br>6. Pelayanan online belum ada;<br>7. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran bagi usia lebih dari 38 Tahun keatas masih rendah;<br>8. Akte kematian jarang diurus oleh masyarakat;<br>9. Data yang sudah ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD pengguna disebabkan kewenangan penerbitan user id ada di Kemendagri. | 2. Perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pemahaman pentingnya dokumen kependudukan;<br>3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pencetakan akte kelahiran;<br>4. Percepatan kepemilikan akte kelahiran untuk usia lebih dari 18 Tahun. |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Peningkatan kulitas pengelolaan desa belum optimal | Desa dengan status Desa Cepat Berkembang masih sedikit | Peningkatan kualitas perencanaan desa, inovasi kegiatan dan ketajaman prioritas pembangunan desa. |
| | | 2. Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal | 1. Masih terdapat LKD dan LAD yang belum memenuhi standar;<br>2. Belum optimalnya BUMDes yang maju, berkembang dan mandiri | Dinas berperan aktif dalam pembinaan penerapan Siskeudes |
| | | 3. Kualitas penerapan Siskeudes belum optimal | Penerapan Siskeudes belum optimal | Perlunya peningkatan peran kecamatan dalam sistem pengelolaan aset dan keuangan desa. |
| | | 4. Kualitas dan kuantitas data sosial ekonomi desa masih rendah | Tingkat pengelolaan data dan informasi yang rendah | Optimalisasi Integrasi Pengolahan dan Informasi data sosial ekonomi |
| 3. | Urusan Komunikasi dan Informatika | Layanan komunikasi dan informasi | Masih terdapat wilayah *blind spot* | 1. Pelayanan fasilitas wifi gratis sampai ke pelosok desa<br>2. Penguatan jaringan telekomunikasi di wilayah *blind spot* |
| | | Nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2020 berada pada 3,81 poin (ideal 5) | Nilai SPBE dinilai sangat tinggi, namun untuk mencapai nilai memuaskan (>4) terdapat penilaian tambahan berupa penilaian instrument domain manajemen SPBE yang terdiri atas jaringan, | 1. Peningkatan jaringan, infrastruktur dan aplikasi<br>2. Komponen infrastruktur harus terfasilitasi Cloud |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | infrastruktur dan aplikasi yang harus diaudit oleh BPPT | |
| 4. | Urusan Statistik | Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas | 1. Belum tersediaanya data yang akurat dan berkualitas;<br>2. Belum tersedianya data real time | Super Apps yang mengintegrasikan semua system aplikasi ke Command Center |
| 5. | Urusan Persandian | Pengamanan Informasi daerah | Skor pengamanan informasi daerah 275 pada Tahun 2020 (skor tertinggi 645 menurut ISO 270001) | Peningkatan keamanan informasi daerah memenuhi 113 kontrol keamanan informasi sesuai ISO 270001 |
| 6. | Urusan Perpustakaan | Minimnya minat baca | 1. Terbatasnya bahan pustaka (eksemplar dan judul) sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang;<br>2. Masih rendahnya pemeliharaan koleksi bahan pustaka | Penambahan dan pemeliharaan koleksi dan jumlah eksemplar bahan pustaka |
| | | | 3. Materi dan tampilan bahan bacaan kurang menyesuaikan dengan perkembangan generasi milenial | |
| 7. | Urusan Perencanaan | Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 1. Belum sama nya pemahaman Perencanaan Pembangunan antara PD Perencana dengan PD teknis<br>2. Perencanaan yang dilakukan masih ego sektoral<br>3. Keterlibatan masyarakat/ *stakeholder* masih rendah dalam | 1. Peningkatan kualitas SDM Perencana<br>2. Penambahan jumlah fungsional Perencana<br>3. Peningkatan koordinasi horizontal antar sektor dan Lintas Perangkat Daerah |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah<br>4. Perencanaan belum didasarkan pada hasil kajian (*by evidence*)<br>5. Keterlambatan penyampaian kebijakan Nasional dan Provinsi kepada Daerah | 4. Peningkatan koordinasi vertical dengan perangkat daerah provinsi dan kementerian/ lembaga<br>5. Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam proses perumusan perencanaan pembangunan<br>6. Peningkatan penelitian dan pengembangan permasalahan pembangunan di daerah |
| | | Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik | 1. Kualitas dokumen perencanaan yang belum specific, measureable, achievable, relevant dan timebound (SMART)<br>2. Pendekatan perencanaan tidak mengambarkan holistic, integratif, thematic dan spasial (HITS) | 1. Penyamaan pemahaman Perencanaan di internal satuan Perangkat Daerah mulai dari pelaksana sampai dengan pejabat tinggi pratama;<br>2. Kolaborasi dan koordinasi antar elemen di internal satuan Perangkat Daerah |
| 8. | Urusan Penelitian dan Pengembangan | Hasil kelitbangan belum diimplementasikan secara optimal | 1. Belum memiliki fungsional peneliti<br>2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan<br>3. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan litbang daerah dengan kementerian/lembaga pusat | 1. Menyediakan fungsional peneliti<br>2. Peningkatan kuantitas fungsional di bidang kelitbangan<br>3. Penyebarluasan informasi rencana kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan *Stakeholder* lainnya<br>4. Penyebarluasan hasil kelitbangan kepada semua Perangkat Daerah dan *Stakeholder* lainnya<br>Koordinasi kelitbangan antar kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi serta kementerian/ Lembaga di tingkat pusat. |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Urusan Pengawasan | Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang | 1. Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;<br>2. Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah;<br>3. Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal;<br>4. Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal;<br>5. Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi;<br>6. Tingkat kapabilitas APIP/IACM masih berada pada level 3;<br>7. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas<br>8. Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal | 1. Penambahan jumlah auditor fungsional;<br>2. Peningkatan kompetensi pemeriksaan bidang infrastruktur, PBJ, Perencanaan, dan Investigasi;<br>3. Peningkatan intensitas pendampingan SPIP kepada Perangkat Daerah;<br>4. Peningkatan intensitas pendampingan evaluasi Sakip kepada Perangkat Daerah |
| 10 | Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan Daerah) | Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah | Masih sulitnya pemenuhan data dari seluruh Perangkat Daerah untuk penyusunan LPPD | Perlunya penggunaan sistem informasi data LPPD yang terintegrasi<br>Penguatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah |
| | | Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020) | Masih rendahnya kualitas SAKIP (Level BB pada Tahun 2020) | Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | Reformasi birokrasi harus ditingkatkan | Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah | Peningkatan berkelanjutan atas situasi yang mendukung reformasi birokrasi |
| | | Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah | Masih perlu ditingkatkan capaian target kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan pengawasan dan bimbingan pada Perangkat Daerah |
| 11. | Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | Masih kurangnya kompetensi, kinerja, disiplin ASN dan pelayanan kepegawaian yang bersih dan melayani. | 1. Masih kurangnya PNS mendapat kesempatan pendidikan dan pelatihan<br>2. Masih kurang fokusnya antara kebutuhan diklat dengan unit organisasinya | Harus ditingkatkan kesempatan PNS dalam mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS |
| | | | Belum efektifnya koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (setiap Perangkat Daerah yang mengirimkan pegawai atas undangan provinsi/K/L tidak menginformasikan kepada BKPSDM) | Meningkatkan koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lainnya (Kasubag Umum Kepegawaian) lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan. |
| | | | Masih banyak jumlah pejabat yang belum mendapatkan kesempatan diklat sebagai syarat menduduki jabatan; | Membuat skala prioritas pejabat yang sudah menduduki jabatan dalam mendapatkan kesempatan diklat untuk syarat menduduki jabatan |
| | | | 1. belum optimalnya identifikasi kebutuhan jabatan fungsional tertentu; | Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda dalam identifikasi jabatan fungsional tertentu; |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | Belum adanya perhitungan beban kerja untuk kebutuhan jumlah jabatan fungsional tertentu. | |
| 12 | Urusan Administrasi Pemerintahan (Kesekretariatan DPRD) | Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 1. Jadwal kegiatan DPRD yang tidak displin belum sesuai dengan ketersediaam anggaran;<br>2. Masih banyaknya penyampaian proposal aspirasi yang bukan merupakan tugas kesekretariatan DPRD;<br>3. Adanya pemahaman sebagian anggota DPRD bahwa kewenangannya harus difasilitasi secara penuh;<br>4. Masih rendahnya kualitas notulensi persidangan;<br>5. Masih rendahnya produktivitas penyusunan Perda;<br>6. Belum adanya tenaga fungsional perancang produk hukum. | 1. Penyediaan Juklak dan Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;<br>2. Penyediaan tenaga fungsional perancang produk hukum. |
| 13. | Urusan Keuangan Daerah | Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah | 1. Kualitas layanan pendataan masih rendah;<br>2. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur; | 1. Pembinaan terhadap kolektor desa;<br>2. Penerbitan regulasi dengan penyertaan system reward and punishment;<br>3. Menyusun system perencanaan pendapatan daerah;<br>4. Kajian analisis potensi pajak daerah |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Belum ada sistem baku dalam perencanaan penerimaan pendapatan;<br>4. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi. | |
| | | Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah | 1. Masih terdapat ketidakkonsistenan anggaran kas dengan pelaksanaan pengajuan pembayaran;<br>2. Sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian belum terintegrasi;<br>3. Sistem informasi akuntansi dengan asset belum terintegrasi. | 1. Sosialisasi terhadap PD yang masih belum konsisten dalam pengajuan pencairan;<br>2. Integrasi system kepegawaian dan penggajian;<br>3. Integrasi system akuntansi dan asset. |
| 14. | Urusan Kesatuan Bangsa Politik | Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideology negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat | 1. Adanya potensi konflik antar suku agama, ras dan antar golongan<br>2. Belum optimalnya koordinasi forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)<br>3. Belum optimalnya pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat | 1. Peningkatan sistem kewaspadaan daerah dalam menghadapi konflik,<br>2. Peningkatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat<br>3. Peningkatan koordinasi forum-forum strategis masyarakat<br>4. Peningkatan kondisi yang kondusif di masyarakat<br>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades<br>6. Peningkatan pembinaan Ormas berkategori aktif. |
| | | Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi | | |
| **URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN SERTA URUSAN PENUNJANG LAINNYA** | | | | |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1, Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB | Angka TFR masih tinggi | Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor pengendalian penduduk |
| | | 2. Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal | 1. Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi<br>2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Peningkatan Peran DPPKB sebagai leading sektor keluarga berencana |
| 2. | Urusan Kepemudaan dan olahraga | 1. Peningkatan jumlah atlet berprestasi<br>2. Masih kurangnya wirasuahawan muda | 1. Masih terbatasnya pelaksanaan event olahraga;<br>2. Masih terbatasnya sarana prasarana di bidang olahraga<br>3. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi para pemuda | 1. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi;<br>2. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlit disabilitas;<br>3. Meningkatkan penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten maupun tingkat nasional;<br>4. Penyediaan sarpras olahraga<br>5. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda |
| 3. | Urusan Kearsipan | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 1. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap kearsipan<br>2. Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan<br>3. Belum memadainya sarana prasarana kearsipan<br>4. Belum tersedianya sistem elektornik kearsipan | 1. Pembinaan PD tentang pentingnya kearsipan<br>2. Peningkatan sarana dan prasaran kearsipan (gedung, depo)<br>3. Penyediaan sistem elektornik kearsipan<br>4. Penyusunan Perbup Kearsipan |

| No | Bidang Urusan /Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Akar Masalah | Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Belum adanya regulasi daerah tentang kearsipan<br>6. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan di setiap PD<br>7. Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan | |
| 4. | Urusan Kehutanan | Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat | Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal | Pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar Tahura |
| 5. | Urusan Transmigrasi | Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan | 1. Terbatasnya kuota Transmigran dari Provinsi<br>2. Belum adanya legalitas hak kepemilikan tanah pada Transmigran lokal ( Tanah tersebut masih milik kas Desa )<br>3. Pengalokasian dana pemberangkatan Transmigran yang dulu dibiayai dari Pusat sekarang menjadi beban Kabupaten | 1. Perlu adanya kesepakatan pemenuhan kuota transmigran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang<br>2. Harus adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk kepemilikan Tanah ( Tukar guling Tanah )<br>3. Perlunya adanya dana dari tingkat kabupaten untuk penangan Transmigran/ Pemberangkatan Transmigran |

*Sumber : Bappppeda 2021 (diolah)*

## 4.2. Isu Strategis

### 4.2.1 Telaahan Isu Strategis Internasional

Isu-Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Sumedang antara lain:

1) Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala/ *Internet Of Things (IoT),* sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri ke empat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran, bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambilalih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik.

2) *Society* 5.0

*Society* 5.0, didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Di *Society* 5.0, itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.

3) Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Lokal Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi

internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obatobatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat kedepan.

4) Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil, sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun an-organik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global. Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomass, surya (solar) dan Bahan Bakar Nabati (BBN);
2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi;
3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energy terbarukan;
4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, *solar cell* dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri);
5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding)* untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBM, khususnya untuk skala kecil;
6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.

5) Antisipasi Perubahan Iklim Global *(Global Warming/ Climate Change)*

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini, menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup, sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk degan akibat ancaman *global warming*. *Global warm*ing merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi

penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

### 4.2.2 Telaahan Isu Strategis Nasional

#### 4.2.2.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Visi RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023.

#### 4.2.2.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan kawasan bahan baku, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

**Gambar 4.1**
**Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan**

### 4.2.3 Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunanProvinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"** Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa**, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif**, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan,** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil,** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan PusatPusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

**5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**.

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pendemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

### 4.2.4 Telaahan RPJMD Kabupaten Berbatasan Kab. Sumedang

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

**Tabel 4.3**
**Telaahan RPJMD Daerah Lain**

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan RPJMD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Garut | Tahun 2019-2024 | **VISI :**<br>”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”<br>**MISI :**<br>1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.<br>2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.<br>3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.<br>4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. | Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 |
| 2. | Kabupaten Subang | Tahun 2018 - 2023 | **VISI :**<br>“KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKARAKTER”<br>**MISI :**<br>1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat; | Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor .. Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 |

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan RPJMD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang Berkarakter Kebudayaan Lokal dan PemerataanPembangunan Perdesaan;<br>3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Berdaya Saing serta Perluasan Lapangan Kerja;<br>4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, serta Penggalian Potensi Kepariwisataan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;<br>5. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; | tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023 |
| 3. | Kabupaten Indramayu | Tahun 2016 - 2021 | **VISI :**<br>'Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah' (Indramayu Remaja Tiga)<br><br>**MISI :**<br>1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;<br>2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;<br>3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;<br>4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal; | Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramyu Tahun 2016-2021 |

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan RPJMD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;<br>6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;<br>7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. | |
| 4. | Kabupaten Majalengka | Tahun 2018 - 2023 | **VISI :**<br>Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA<br>**MISI :**<br>1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;<br>2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;<br>3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;<br>4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.<br>5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 |

| No | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan RPJMD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Kabupaten Tasikmalaya | Tahun 2016 - 2021 | **VISI :**<br>"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"<br><br>**MISI :**<br>1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.<br>2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.<br>3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).<br>4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan | Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 |
| 6. | Kabupaten Bandung | Tahun 2016 - 2021 | **VISI:**<br>"Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"<br><br>**MISI :**<br>1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan<br>2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan<br>3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan<br>4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat<br>5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif<br>6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup<br>7. Meningkatkan Kemandirian Desa<br>8. Meningkatkan reformasi birokrasi<br>9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah | Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 |

### 4.2.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 dan merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Sumedang. Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025 adalah "**Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis, dan Demokratis pada Tahun 2025"**. Visi tersebut dapat diringkas menjadi "***SUMEDANG SEHATI***".

Kabupaten Sumedang yang **Sejahtera** ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Sumedang yang memenuhi standar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan bermatapencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. **Agamis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha kuasa, sesuai keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional; **Demokratis** ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pewarisan nilai nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri;
3. Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD tahap ke-4 pembangunan Sumedang diharapkan makin mencerminkan sebuah lingkungan masyarakat daerah yang mantap kesejahteraannya, mantap dalam kehidupan berdemokrasi yang dewasa dan jiwa solidaritas mantap dalam menjaga kesatuan dan persatuan nasional serta kehidupan sosial yang makin menempatkan agama sebagai wahana untuk menyeimbangkan jatidirinya selaku makhluk beragama dan makhluk sosial yang beragam. Dari tahapan dan prioritas pada RPJMD ke-4 ini, terdapat fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu:

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-4;
2. Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan;
3. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supportin sistem bagi aktivitas ekonomi kreatif;
4. Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagaan yang beraam dalam suasana penuh toleransi;
5. Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi *customer satisfaction*;
6. Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah;
7. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila;
8. Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan;

9. Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat;
10. Meningkatkan kemandirian desa;
11. Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, provinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol cisumdawu serta rencana induk pusat pemerintahan) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
12. Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD 2025-2050;
13. Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat; dan
14. Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

### 4.2.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Develoment Goals* (SDGs) sebagaimana gambar 4.2 dibawah ini. Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

**Gambar 4.2**
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**
**Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang**
**Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka mengahadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perlu adanya perubahan perencanaan. Termasuk dalam konteks KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang telah disusun rekomendasi hasil dari analisis KLHS terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan pada Tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4**
**Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung**

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| **PILAR SOSIAL** | | | | |
| 1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.2.1*. | Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | 1. Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru<br>2. Melakukan pemberdayaan pada PMKS<br>3. Mendorong produktifitas petani gurem<br>4. Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja<br>5. Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan<br>6. Menggerakan UMKM dan ekonomi kereatif | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah<br>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>5. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian<br>6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | 1.3.1 (a) | Belum terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan | Perlu ditingkatkan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN Bidang Kesehatan sampai dengan 98% | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Rumah Sakit Umum Daerah |
| | 1.3.1. (d) | Masih kurangnya rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Perlu dilakukan sinkronisasi data masyarakat miskin antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun BPS | 1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial<br>2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>3. Badan Pusat Statistik<br>4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | 1.4.1 (a) | Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tetang pentingnnya menggunakan fasilitas kesehatan | 1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>2. Dinas Kesehatan |
| | 1.4.1. (d) | Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkatkan penyediaan sarana air minum | Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | 1.5.1* | Masih adanya korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana saat ini mencapai 9 orang per 100.000 orang. | • Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana<br>• Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.5.1. (a) | Masih kurangnya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | • Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.5.1. (e) | Masih tingginya risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | •Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana<br>•Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang Tahun. | 2.1.1(a) | Masih adanya Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. | • Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga kekurangan gizi<br>• Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 2.2. Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah | 2.2.1* | Masih tingginya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. | • Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga baduta stunting<br>• Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat | Dinas Kesehatan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| lima Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | 2.2.1.(a) | Masih adanya Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua Tahun/baduta. | • Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi stunting<br>• Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | 2.2.2* | Masih adanya Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun | • Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting<br>• Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | 2.2.2.(a) | Rendahnya Prevalensi anemia pada ibu hamil. | • Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil | Dinas Kesehatan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | 2.2.2.(c) | Masih rendah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi | • Melakukan pendampingan dan perbaikan gizi kepada keluarga prevalensi malnutrisi/ wasting<br>• Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | 3.1.1* | Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). | • Menurunkan tingkat anemia pada ibu hamil<br>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil<br>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | 3.1.2.(a) | Masih rendahnya perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tetang pentingnnya menggunakan fasilitas kesehatan | Dinas Kesehatan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka | 3.2.1* | Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup. | • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil<br>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan<br>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita<br>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita | - Dinas Kesehatan<br>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | 3.2.2* | Masih adanya Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. | • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil<br>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan<br>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita<br>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita<br>• Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan | |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. | 3.2.2. (a) | Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. | • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil<br>• Meningkatkan kegawatdaruratan kesehatan<br>• Pemberian asupan gizi makanan tambahan pada balita<br>• Meningkatkan peran posyandu dalam kesehatan balita<br>• Pendampingan kesehatan pada ibu hamil 9 bulan | - Dinas Kesehatan<br>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang | 3.3.1.(a) | Masih adanya Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan HIV | Dinas Kesehatan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 3.3.2.(a) | Masih tingginya resiko masyarakat terjangkit TB karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat. | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan TB | Dinas Kesehatan |
| | 3.3.1.(a) | Masih tingginya kejadian masyarakat yang terjangkit demam berdarah karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat. | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan penanganan demam berdarah | Dinas Kesehatan |
| 3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan | 3.4.1.(a) | Masih adanya penduduk merokok pada umur ≤18 Tahun. | • pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat terhadap anak kurang dari usia 18 Tahun dan<br>• Penyusunan regulasi penjualan rokok kepada pembeli rokok pada usia anak kurang dari 18 Tahun. | Dinas Kesehatan |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | 3.7.1. (b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang MKJP | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR). | Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang (Age Specific Fertility Rate /ASFR). | |
| 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | 3.8.2. (a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD). | perlu sinkronnya data kependudukan masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Dukcapil; dan jangkauan luas wilayah yang yang sangat besar | - Dinas Kesehatan<br>- Badan Pusat Statistik<br>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | • Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan (fisik, seksual, atau emosional ) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |
| | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | • Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi tentang dampak kekerasan seksual | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| **PILAR EKONOMI** | | | | |
| 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang. | 8.1.1* | Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDB per kapita | • Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita<br>• Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung untuk meningkatkan investasi<br>• Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal<br>• Meningkatkan kualitas SDM<br>• Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi | 1. Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>4. Dinas Peternakan dan Perikanan<br>5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang<br>7. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan<br>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 8.1.1.(a) | Masih rendahnya PDB per kapita | • Mendorong sektor-sektor unggulan dalam meningkatkan PDRB per Kapita<br>• Menyediakan kelengkapan kebijakan dan data dukung | 1. Dinas UMKM dan Perdagangan dan Perindustrian<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | untuk meningkatkan investasi<br>• Meningkatkan perlindungan terhadap komoditas lokal<br>• Meningkatkan kualitas SDM<br>• Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi | 4. Dinas Peternakan dan Perikanan<br>5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga<br>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang<br>7. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan<br>8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin | Menyamakan persepsi bahwa perempuan bekerja di sektor formal dianggap lebih prestisius daripada yang bekerja pada sektor non formal | 1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi<br>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | Mengurangi pengaruh2 faktor lingkungan yang menyebabkan penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, adanya pengaruh faktor gaya hidup. | 1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>3. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga<br>4. Dinas Perhubungan<br>5. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik |
| 8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan produk lokal. | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | Peningkatan jumlah dan kemampuan pekerja yang ahli dan terampil dalam sektor pariwisata | 1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | 9.1.1. (a) | Belum tercapainya jalan dengan kondisi mantap. | • Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas jalan dan jembatan<br>• Peningkatan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan<br>• Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan jalan baru | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang<br>2. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang | 9.2.1.(a) | minimnya pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui industri manufaktur. | 1. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | 10.1.1* | Masih tingginya tingkat kesenjangan masyarakat. | • Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru<br>• Melakukan pemberdayaan pada PMKS<br>• Mendorong produktifitas petani gurem<br>• Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja<br>• Mendorong peningkatan sector pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembeangan Daerah<br>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>3. Dinas Perikanan dan Peternakan<br>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | • Mengerakan UMKM dan ekonomi kereatif | 6. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian<br>7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | 10.1.1. (a) | Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | • Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui wirausahaan baru<br>• Melakukan pemberdayaan pada PMKS<br>• Mendorong produktifitas petani gurem<br>• Memberikan pelatihan kerja terhadap usia kerja pencari kerja<br>• Mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan pekerjaan<br>• Menggerakan UMKM dan ekonomi kreatif | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembeangan Daerah<br>2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>3. Dinas Perikanan dan Peternakan<br>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial<br>6. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian<br>7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| **PILAR LINGKUNGAN** | | | | |
| 6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1. (a) | Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | • Meningkatkan penyediaan sarana air minum | Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | • Penyediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | 1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan<br>2. Dinas Kesehatan |
| | 6.2.1. (b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | • Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum | 1. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan<br>2. Dinas Kesehatan |
| | 6.2.1. (d) | Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | • Pengawasan hyginies terhadap sanitasi tempat umum<br>• Penyuluhan pengunaan sanitas rumah tangga | Dinas Kesehatan |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | 11.5.1. (a). | Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Kabupaten Sumedang. | • Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi peringatan dini bencana<br>• Meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan (membentuk desa/kelurahan tangguh bencana)<br>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.<br>• Perlu disusun kajian kebencanaan termasuk menyusun kontijensi plan, mitigasi dll | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | 11.6.1. (a). | Masih tingginya sampah perkotaan yang belum tertangani. | • Peningkatan jangkauan pelayanan penanganan sampah | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| UJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 11.7 Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas | 11.7.2. (a) | Masih adanya korban dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | • Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |
| 12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | 12.5.1. (a) | Masih rendahnya timbulan sampah yang yang diolah dengan sistem 3R. | • Peningkatan pengelolaan sampah 3R (recycle, reduce, reuse) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | 15.1.1. (a). | Berkurangnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | • Pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| **PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** | | | | |
| 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 16.6.1. (d) | Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang optimal (A) | • Perlu penyempurnaan indikator kinerja utama sesuai dengan standar<br>• Perlu dilakukan pembinaan masing-masing unit kerja | Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) |
| 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | • Peningkatan kemampuan (kompetensi) masyarakat perempuan agar mempunyai kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas Sosial |
| 16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 Tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | • Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | • Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| TUJUAN/TARGET | KODE INDIKATOR | ISU STRATEGIS | REKOMENDASI TAHUN 2021-2023 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | • Meningkatkan pelayanan kependudukan dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | • Meningkatkan jumlah PPID yang memiliki sertifikat . | Sekretariat Daerah |

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 juga perlu memperhatikan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi terhadap ketercapaian indikator pada empat pilar TPB maka dirumuskan alternatif dan rekomendasi skenario sebagai berikut:

**Tabel 4.5**
**Alternatif dan Rekomendasi Skenario terhadap**
**Data Indikator TPB yang 'sudah tercapai, sudah dilaksanakan' dan 'tidak ada data'**

| No | Pilar Pembangunan Berkelanjutan | TPB | Klasifikasi | Total Jumlah Indikator | Rekomendasi Tahun 2019-2023 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILAR SOSIAL | 1. TPB1 : Tanpa Kemiskinan<br>2. TPB2 : Tanpa Kelaparan<br>3. TPB3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera<br>4. TPB4 : Pendidikan Berkualitas<br>5. TPB5 : Kesetaraan Gender | Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan | 31 | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | Tidak Ada Data | 21 | 1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB<br>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi<br>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik | 1. Seluruh Perangkat Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | PILAR LINGKUNGAN | 1.TPB6 : Air Bersih & Sanitasi Layak<br>2.TPB11 : Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan<br>3.TPB12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab<br>4.TPB15 : Kehidupan/ ekosisitem di Daratan | Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan | 4 | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | Tidak Ada Data | 8 | 1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang | 1. Seluruh Perangkat Daerah |

| No | Pilar Pembangunan Berkelanjutan | TPB | Klasifikasi | Total Jumlah Indikator | Rekomendasi Tahun 2019-2023 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | berkaitan dengan indikator TPB<br>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi<br>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik | 2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3 | PILAR EKONOMI | 1. TPB8 : Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi<br>2. TPB9 : Industri, Inovasi, & Infrastruktur<br>3. TPB10 : Berkurangnya Kesenjangan | Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan | 3 | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapai | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | Tidak Ada Data | 12 | 1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB<br>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi<br>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen pelaporan secara periodik | 1. Seluruh Perangkat Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4 | PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA | 1. TPB16 : Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh | Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan | 4 | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan capaian program dan kegiatan yang terkait dengan indikator TPB yang sudah tercapa | Seluruh Perangkat Daerah |

| No | Pilar Pembangunan Berkelanjutan | TPB | Klasifikasi | Total Jumlah Indikator | Rekomendasi Tahun 2019-2023 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tidak Ada Data | 3 | 1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator kinerja yang berkaitan dengan indikator TPB<br>2. Menyediakan kelengkapan instrumen monitoring dan evaluasi<br>3. Perlu peningkatan kualitas sistem manajemen<br>4. pelaporan secara periodik | 1. Seluruh Perangkat Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

*Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)*

Indikator-indikator SDG's bersifat makro yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.6**
**Indikator SDGs bersifat Makro**

| KODE INDIKATOR | INDIKATOR GLOBAL | INDIKATOR NASIONAL | INDIKATOR KABUPATEN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN** | | | | |
| 1.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Angka Kemiskinan | Badan Pusat Statistik (Susenas) |
| **TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA** | | | | |
| 8.1.1 | | Laju pertumbuhan PDRB perkapita | Laju pertumbuhan PDRB | Badan Pusat Statistik |
| 8.1.1. (a) | | PDRB per kapita | PDRB per kapita | Badan Pusat Statistik |
| **TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA** | | | | |
| 10.1.1.(a) | | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Angka Kemiskinan | Badan Pusat Statistik |
| 10.1.1 | | Koefisien Gini | Indeks Gini | Badan Pusat Statistik |
| **TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH** | | | | |
| 16.6.1.(b) | | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) | Nilai SAKIP | Sekretariat Daerah (Bagian Oraganisasi) |

*Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)*

Indikator-indikator SDG's bersifat *Outcomes* Program yang perlu difokuskan pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.7**
**Indikator SDGs bersifat outcome Program**

| KODE INDIKATOR | INDIKATOR GLOBAL | INDIKATOR NASIONAL | INDIKATOR KABUPATEN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN** | | | | |
| 1.4.1 (d) | | Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan | Prosentase penduduk berakses air minum | Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| **TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA** | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Prosentase penduduk berakses air minum | Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.2.1.(b) | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Cakupan pelayanan sanitasi | Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan |
| **TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI** | | | | |
| 9.1.1. (a) | | Kondisi mantap jalan nasional | Persentase Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

*Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)*

Indikator-indikator SDG's yang perlu difokuskan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 -2023 antara lain sebagai berikut

**Tabel 4.8**
**Indikator SDGs dalam RENSTRA**

| KODE INDIKATOR | INDIKATOR GLOBAL | INDIKATOR NASIONAL | INDIKATOR KABUPATEN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) |
| **TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN** | | | | |
| 1.5.1 (e) | | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi | Prosentas kelurahan/desa Tangguh Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.3* | | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah | Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN** | | | | |
| 2.2.2 (c) | | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan<br>tingkat konsumsi Ikan | Skor Pola Pangan Harapan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan |
| **TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN** | | | | |
| 5.2.2 (a) | | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

*Sumber: Bappppeda, data diolah (2018)*

### 4.2.7. Perumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023

Berdasarkan hasil telaahan identfikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan melanjutkan dari perumusan Isu-Isu Strategis Sumedang yang telah disusun sebelumnya. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan mengunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

**Gambar 4.3**
**Hasil Analisa Isu-isu Strategis Berdasarkan kriteria Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 serta Permendagri No 90 Tahun 2020 sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023 yang melanjutkan dari perencanaan RPJMD sebelumnya, sebagaimana analisa isu-isu strategis daerah pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 4.9**
**Perumusan dan Penetapan Isu-isu Strategis Daerah**

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| 1 | ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN | 1. Tenaga Kesehatan Masih Kurang, Jika dibandingkan dengan target Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2025(kemenkes), maka idealnya Kab. Sumedang perlu menambah :<br>• 97 dokter spesialis;<br>• 891 dokter umum;<br>• 64 dokter gigi;<br>• 463 bidan;<br>• 314 sanitarian;<br>• 522 ahli gizi. | Penambahan Tenaga Kesehatan, Puskesmas, dan tempat tidur inap Rumah Sakit bermanfaat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| | | 2. Jumlah Puskesmas masih kurang, SPM Kemenkes 1:30.000, kondisi di Sumedang masih terdapat beberapa Puskesmas yang mengalami kelebihan beban | |
| | | 3. Jumlah rumah sakit masih kurang, SPM Kemenkes 1:100.000, kondisi di Sumedang Tahun 2020 adalah 1:386.485 (overload atau kelebihan beban 286.485 penduduk). Ketersediaan tempat tidur rawat inap di 3 rumah sakit Tahun 2020 berjumlah 611. Kondisi ideal WHO 1:1.000, sehingga perlu penambahan 548 tempat tidur. | |
| | | 4. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 berjumlah 21 Kasus | AKI dan AKB mencerminkan seberapa baik pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi |
| | | 5. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2020 berjumlah 137 kasus | |
| | | 6. Persentase Balita Stunting 12,05% pada Tahun 2020 | Angka capaian prevalensi berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan penurunan dan pencegahan kasus stunting |
| | | 7. Terdapat Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berjumlah 707 kasus pada Tahun 2020. | Kasus DBD merupakan salah satu barometer |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| | | | perilaku bersih masyarakat |
| | | 8. Pada Tahun 2020, UHC pada angka 73,17% | Berfungsi sebagai dasar perumusan kebiijakan penganggaran urusan kesehatan |
| | | 9. Masih rendahnya PUS memahami pentingnya penggunaan alat KB | Sebagai dasar penentuan strategi demi keberhasilan program KB |
| | | 10. Remaja Perokok sebanyak 7,1% | Dasar penentuan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan |
| 2 | ISU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN | 1. Ketersediaan dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) masih kurang. | Dasar penambahan Tenaga Pendidik yang dibutuhkan |
| | | 2. Rata-rata lama sekolah Tahun 2020 masih 8,51, artinya rata-rata lama sekolah baru mencapai jenjang SMP, jika dibandingkan dengan target nasional 12 Tahun. | Sebagai dasar penentuan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan pelayanan pendidikan |
| | | 3. Kapasitas daya tampung dan kelengkapan sarana sekolah yang belum memenuhi standar | Pernambahan saranan dan prasaranan pendidikan untuk peningkatan pelayanan pendidikan |
| | | 4. Ketersediaan Laboratorium IPA dan laboratorium computer masih minim. | |
| | | 5. Minimnya minat baca. | Minat baca berpengaruh terhadap kualitas bangsa |
| 3 | ISU PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK | 1. Tahun 2020 hanya 79,96% jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) | Jalan dengan kondisi baik menopang berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi |
| | | 2. Persentase pemasangan lampu lalu lintas menurun | Pemasangan lampu lalu |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| | | | lintas bermanfaat untuk kelancaran pengaturan lalu lintas |
| | | 3. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu pada RTR | Pembangunan sesuai RTR mempermudah Pemerintah Daerah melanjutkan pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan pembangunan |
| | | 4. Jumlah tempat pembuangan sampah perlu penambahan seiring peningkatan produksi sampah | Tingginya kualitas lingkungan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat |
| | | 5. Jaringan irigasi perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan keperluan lahan pertanian | Kualitas dan kuantitas produksi pertanian meningkat untuk mewujudkan ketahanan pangan |
| | | 6. Rendahnya kualitas jasa konstruksi | Peningkatan kualitas pengusaha jasa konstruksi diharapkan meningkatkan kuantitas pekerjaan yang dipercayakan pada para pengusaha jasa konstruksi |
| 4 | ISU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI | 1. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan; | Banyaknya koperasi aktif menyumbang pertumbuhan ekonomi |
| | | 2. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi akibat bencana COVID-19 (minus 1,12% pada Tahun 2020). | Angka pertumbuhan ekonomi merupakan barometer keberhasilan peningkatan |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| | | | ekonomi masyarakat |
| | | 3. Peningkatan ketimpangan pendapatan (Indeks gini Tahun 2019 sebesar 0,344 menjadi 0,384 di Tahun 2020). | Indeks gini merupan ketimpangan ekonomi antar rumah tangga, dijadikan barometer untuk penetuan kebijakan Pemda dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan ekonomi masyarakat |
| | | 4. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari 7,70% pada Tahun 2019 menjadi 9,89% pada Tahun 2020. | TPT dijadikan barometer untuk penentuan strategi penambahan lowongan kerja |
| | | 5. Rumah Tangga Bersanitasi layak masih 55,29% dari target 100% dan Akses sanitasi aman masih 13,65% | Merupakan salah satu syarat peningkatan kualitas hidup masyarakat |
| | | 6. Rumah Tangga berakses air minum masih 80,45% dari target 100% | |
| | | 7. Skor Pola Pangan Harapan masih berada pada poin 89,10. | Barometer peningkatan kualitas hidup masyarakat |
| | | 8. Jumlah penduduk miskin sebesar 115 ribu jiwa atau 10,26% (masih tinggi jika dibandingkan target SDG's 0%) | Dasar penentuan pengambilan kebijakan pengurangan kemiskinan |
| | | 9. Akses UMKM terhadap lembaga keuangan masih terbatas dan kredit UMKM terhadap seluruh investasi masih rendah. | Dasar untuk peningkatan kualitas UMKM menjadi layak investasi |
| | | 10. Nilai tambah industri masih minim | Dasar penetuan kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan pendapatan dari sektor industry |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| 5 | ISU PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH | 1. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor pariwisata perlu dikembangkan. | Pengembangan pariwisata dilaksanakan untuk menningkatkan nilai tambah pada sub sektor pariwisata |
| | | 2. Ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah masih kurang. | Pelestarian budaya Sumedang serta peningkatan ekonomi dari |
| | | 3. Benda, situs sejarah dan kawasan cagar budaya masih belum seluruhnya dilakukan pelestarian. | Pelestarian budaya terlaksanakan dengan baik |
| | | 4. Sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai (belum ada gedung kesenian, sarana penyelenggaraan festival budaya tidak ada). | |
| | | 5. Pengembangan destinasi wisata masih kurang. | Pengembangan pariwisata bertujuan menningkatkan jumlah wisatawan yang nantinya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dari sub sektor pariwisata |
| | | 6. Kunjungan wisatawan masih rendah. | |
| | | 7. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah masih rendah. | |
| | | 8. Sub sektor ekonomi kreatif belum belum berkembang secara optimal. | Peningkatan pendapatan masyarakat dari sub sektor ekonomi kreatif |
| 6 | ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN | 1. Nilai SAKIP masih pada kategori BB (target pada 2023 berkategori A). | Barometer keberhasilan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kulitas pelayanan publik |
| | | 2. Nilai LPPD belum optimal | |
| | | 3. Indeks Reformasi Birokrasi masih 66,74 | |
| | | 4. Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berkategori baik baru 75,94 | |
| | | 5. Pendapatan Asli Daerah masih minim. | PAD merupakan salah satu |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| | | | pendapatan daerah untuk digunakan belanja daerah |
| | | 6. Tingkat maturitas SPIP belum optimal | Barometer keberhasilan Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan |
| | | 7. Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah | |
| | | 8. Tingkat kapabilitas APIP/IACM masih rendah | |
| | | 9. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang diberi konsultasi masih rendah | Konsultasi untuk Pemda dan Pemdes untuk peningkatan kualitas pelayanan publik |
| | | 10. Jangkauan layanan akses telekomunikasi belum optimal | Mudahnya jangkauan telekomunikasi serta ketersediaan data dan informasi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat |
| | | 11. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi | |
| | | 12. Anggaran kelitbangan masih rendah | Kajian kelitbangan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah |
| 7 | ISU PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANTISIPASI BENCANA | 1. Indeks risiko bencana Kabupaten Sumedang memiliki skor 162 yang masuk dalam kategori tinggi**.** | Barometer untuk pengambilan kebijakan dalam kebencanaan daerah |
| | | 2. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam, antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi. | |
| | | 3. Jumlah lokasi yang mendapat penguatan pengurangan risiko bencana daerah masih rendah | |
| | | 4. Penanganan dan pengurangan sampah belum optimal. | Barometer peningkatan kualitas hidup manusia |

| NO | ISU STRATEGIS | ANALISIS | MANFAAT |
|---|---|---|---|
| | | 5. Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air belum optimal | Peningkatan Kelembagaan SDA bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup petani |
| | | 6. Penyediaan RTH belum optimal | Barometer peningkatan kualitas hidup manusia |
| | | 7. Pengplahan limbah belum optimal | |
| 8 | ISU PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 1. Penyediaan sanitasi komunal masih kurang | Barometer peningkatan kualitas hidup manusia |
| | | 2. Pelaksanaan STBM belum optimal | |
| | | 3. Lingkungan permukiman kumuh Tahun 2019 mencapai 164,69 Ha | |
| 9 | ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1. Kurangnya pemahaman masyarakat Sumedang atas responsif gender | Masyarakat merasakan manfaat pembangunan inklusif |
| | | 2. Pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih belum komprehensif | Barometer keberhasilan Pemda dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | 3. Pencanangan Kabupaten Layak Anak. Setelah Perbup Kabupaten Layak Anak diterbitkan, | Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup anak |

*Sumber : Hasil Analisis*

Penjelasan data pada tabel 4.9 adalah sebagai berikut:

**1. Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih belum merata apabila mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Kekurangan tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang adalah berupa penambahan: 97 dokter spesialis; 891 dokter umum; 64 dokter gigi; 463 bidan; 314 sanitarian; dan 522 ahli gizi. Demikian juga dengan fasilitas kesehatan, yang idealnya perlu menambah puskesmas dan rumah sakit, karena kelebihan beban pelayanan pada 17 (tujuh belas) Puskesmas dan

rumah sakit masih kekurangan 548 tempat tidur. Pada Tahun 2020 masih terdapat Jumlah Kematian Ibu (21) dan Jumlah Kematian Bayi (137). Pemerintah Daerah mengharapkan kedua indikator tersebut bisa ditekan sampai 0 kasus,

Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar Udara Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga potensi wabah penyakit dapat dihindari.

Pemerintah Kabupaten Sumedang juga perlu memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat, salah satunya adalah stunting. Kabupaten Sumedang termasuk salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki prevalensi cukup tinggi yaitu sebesar 17,5% pada Tahun 2020. Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK.

Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", atau yang dikenal sebagai "*window of opportunity*". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik,dangan gangguan metabolism dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Perlu ada langkah terobosan yang tidak hanya fokus pada upaya pengobatan, tetapi fokus pada upaya preventif (pencegahan) dan promotif berbasis siklus kehidupan manusia (*Continuum of Care*) melalui pendekatan keluarga.

**2. Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan**

Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit diharapkan sektor pendidikan dapat maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data pendidikan terutama akses terhadap data pendidikan yang sudah tersedia. Dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0 serta dalam mempersiapkan *bonus* demografi (proporsi populasi penduduk usia muda lebih besar) perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang mampu menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Karena jika pada saatnya *bonus* demografi terjadi sementara tingkat pendidikan penduduk masih rendah, maka ancaman yang berpotensi terjadi adalah *middle trap income,* dimana penduduk usia muda terjebak dalam penghasilan/upah rendah sehingga harapan adanya peluang penduduk usia muda dalam meningkatkan produktivitas dan kemajuan ekonomi khususnya di Kabupaten Sumedang sulit tercapai. Ancaman selanjutnya adalah posisi lapangan kerja strategis yang menghasilkan pendapatan tinggi berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing.

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 adalah 8,51 Tahun atau hanya mencapai tingkat pendidikan menengah pertama (SMP). Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana sekolah masih minim, terutama ketersediaan Laboratorium IPA, laboratorium matematika, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer, perpustakaan, dan ruang UKS. Adapun kapasitas daya tampung serta kelengkapan sarana sekolah harus memenuhi 8 standar manajemen yang terdiri atas (1) manajemen risiko, (2) manajemen SDM TIK, (3) manajemen data TIK, (4) manajemen pengetahuan, (5) manajemen perubahan, (6) manajemen asset, (7) manajemen layanan dan (8) manjemen system pengendalian internal.

Jika mengamati kondisi pendidikan dasar (SD-SMP) di Kabupaten Sumedang sebagaimana penjelasan paragraf di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu serius dalam mempertahankan angka kelulusan siswa-siswi SD-SMP dan perlu mendorong peningkatan angka melanjutkan siswa-siswi dari SD ke SMP serta SMP ke SMA/SMK harus optimal. Meskipun

saat ini kewenangan pelayanan pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, namun tetap perlu ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah menengah atas harus dapat menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan kerja, sehingga pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah vokasional/SMK (kejuruan) dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Sumedang menjadi hal utama. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai penjabaran program unggulan Sumedang Agamis, Kabupaten Sumedang mencanangkan program siswa bersertifikat diniyah. Setiap siswa lulusan SD dan SMP diharapkan mempunyai sertifikat Pendidikan Diniyah, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan untuk membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al Quran kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia.

### 3. Isu Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penunjang roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan data dan informasi terkait infrastruktur publik dan penataan ruang di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor infrastruktur publik dan penatan ruang sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 hanya 76,96% dalam kondisi baik (>40 Km/Jam). Hal ini berarti belum meratanya aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastruktur jalan yang baik. Selanjutnya jalan yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) mengalami pengurangan selama Tahun 2015-2019, untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas perlu penambahan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan. Lebih lanjut Kabupaten Sumedang belum memiliki terminal yang memadai sehingga berdampak pada terhambatnya mobilitas warga. Untuk mendukung adanya sistem transportasi yang baik Kabupaten Sumedang perlu menyusun analisa tatanan transportasi lokal yang sesuai dengan kondisi saat ini, analisa tersebut mencakup manajemen rekayasa lalu lintas, kapasitas ruas jalan, dan analisa trayek angkutan umum. Untuk infrastruktur tempat pembuangan sampah selama periode 2015-2020, penambahannya tidak sebanding dengan produksi sampah itu sendiri, sehingga perlu peninjauan kondisi pembuangan sampah lebih lanjut agar tempat pembuangan sampah dapat menampung sampah dengan baik. Hal ini menjadi penting karena dapat menjadi faktor yang menimbulkan permasalahan sistemik, yakni terganggunya kesehatan masyarakat dan keindahan dan kerapihan kota.

**4. Isu Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi**

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Berdasarkan data BPS laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 sebesar minus 1,12%, namun demikian angka ini masih diatas rata-rata laju pertumbuhan provinsi. Kondisi ini seiring dengan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan sebagaimana diukur oleh Indeks Gini yang menunjukkan kenaikan 0,04 poin dari 0,34 di Tahun 2019 menjadi 0,38 di Tahun 2020. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi, pada Tahun 2017 tercatat

62,06% kemudian menurun menjadi 61,93% di Tahun 2018, dan meningkat menjadi 68,96% pada Tahun 2020. Dengan kata lain dari 100 orang usia produktif (15-54 Tahun) hanya terdapat 69 orang memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya dapat dengan cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan peran koperasi dan pembinaan usaha mikro dan kecil baik yang baru maupun yang sudah berjalan. Kedua hal tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Kondisi koperasi aktif di Kabupaten Sumedang mengalami sedikit peningkatan, dari 72,93% di Tahun 2018 menjadi 77,41% di Tahun 2019. Namun karena pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 kondisi koperasi aktif mengalami penurunan yang signifikan menjadi 38,39%.

Dalam perspektif kedepan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menghidupkan wirausaha baru baik formal maupun informal. Karena jika hanya bertumpu pada lapangan pekerjaan formal yang disediakan perusahaan, lapangan kerja yang tersedia lebih didominasi level buruh. Dengan adanya program unggulan Sumedang Preneurship. Diharapkan tumbuh UMKM baru serta bertahannya UMKM yang sudah berjalan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar lokal dan regional cukup besar. Adapun hambatan dalam hal ini muncul dari penerapan teknologi produksi yang relatif rendah, keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja, sempitnya kepemilikan lahan, fluktuasi harga, sistem tata niaga hasil pertanian yang relatif panjang dan serangan organisme pengganggu tanaman. Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis komoditas unggulan dengan meningkatan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk dan penetrasi pasar, kerjasama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna menunjang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan

produktifitas sektor pertanian. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang. Dalam hal pemasaran produk-produk hasil pertanian, harus mulai memanfaatkan Teknologi Informatika dan Komunikasi. Hal tersebut adalah kondisi yang tidak dapat dihindari pada masa adaptasi kebiasaan baru semenjak terjadinya Pandemi Covid-19

**5. Isu Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah**

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan pariwisata perlu dikembangkan.

Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat. Hal ini diketahui dari (1) masih kurangnya ragam dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai upaya pelestarian dan promosi budaya serta menghidupkan perekonomian daerah; (2) masih minimnya pelestarian terhadap situs sejarah dan kawasan cagar budaya; (3) sarana prasarana pengembangan kesenian dan budaya tidak memadai; dan (4) pengembangan destinasi wisata masih sangat kurang. Dalam perspektif kedepan sektor pariwisata perlu diarahkan untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner yang bertemakan pariwisata halal. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

**6. Isu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi Birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat tiga elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu, *pertama* reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan tenggat waktu, indikator serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Beberapa indikator untuk menilai kondisi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan capaian yang baik, antara lain opini BPK selama tujuh tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan nilai LPPD Tahun 2020 yang masuk dalam kategori tinggi. Kemudian skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 berada pada kategori BB. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperbaiki pada delapan area reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta komponen *stakeholder* eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

**7. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Antisipasi Bencana**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas dari 3 (tiga) komponen pengukuran, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Sumedang memiliki indeks risiko bencana dengan skor 162 yang masuk dalam kategori tinggi. Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan potensi gempa bumi, terutama di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tomo dan Ujungjaya. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiap-siagaan masyarakat.

Sebagai upaya mengurangi penyebaran Covid-19, sejak awal Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020, Pemerintah mengharuskan sebagian besar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini, secara tidak langsung memberikah efek positif terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara meningkat secara signifikan. Namun demikian, terjadi juga peningkatan sampah rumah tangga karena semakin banyak aktivitas yang menggunakan kemasan sekali pakai dalam konsumsi makanan untuk mencegah penularan virus.

Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan upaya untuk penanganan dan pengurangan sampah serta peningkatan indeks kualitas tutupan lahah sebagai salah satu upaya antisipasi bencana.

### 8. Isu Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Namun keberadaan data dan informasi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memerlukan basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kondisi kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman yang telah menunjukkan capaian yang baik adalah rasio rumah layak huni yang pada Tahun 2020 telah mencapai 80,34%. Namun demikian, indikator lainnya menunjukkan capaian yang belum mencapai target, antara lain luas permukiman kumuh yang pada Tahun 2020 tidak memiliki aktivitas karena kurangnya pendanaan, kemudian rumah tangga ber-sanitasi data terakhir Tahun 2020 masih 55,29%.

**9. Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Responsif Gender merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu peran, akses, manfaat dan partisipasi yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Pada Perangkat Daerah, penerapan kebijakan responsif gender masih pada angka 48,39% pada Tahun 2019, serta kebijakan yang dihasilkan masih rendah, yaitu hanya mengeluarkan 3 kebijakan/perda/perbup pada tahun tersebut.

Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terjadi. Terdapat 24 kasus pada Tahun 2019, yang terdiri atas kasus kekerasan, pencabulan, penelantaran, eksploitasi anak serta pemerkosaan.

Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, Kabupaten Sumedang siap menjalani komitmen untuk mengarahkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

Indikator pembangunan untuk melihat pemenuhan hak anak dapat dilihat dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak dengan kategori Madya.

## 4.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga terkait pembangunan manusia, ketentraman, keselamatan dari gangguan bencana, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*).

### 4.3.1 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019

Realisasi dari indikator kinerja daerah pada Tahun 2019 telah mencapai terget yang telah ditetapkan, namun untuk indikator indeks kerukunan umat beragama yang selama ini data tersebut diperoleh langsung dari Kemeterian Agama Kabupaten Sumedang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target indikator indeks kerukunan umat beragama dikarenakan sejak Tahun 2019 Kementerian Agama Kabupaten Sumedang sudah tidak lagi melakukan pendataan mengenai indikator tersebut yang menyebabkan data pada Tahun 2019 null (tidak tersedia). Sedangkan capaian indikator kinerja Tahun 2019 terhadap target Tahun 2023 hampir seluruh indikator tingkat capaiannya

sudah baik, kecuali tingkat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih 65,67%, Nilai Sakip Kabupaten 66 %, dan Persentase Penduduk Miskin 42,88%, sehingga indikator tersebut perlu menjadi perhatian bagi perangkat daerah terkait agar menjadi prioritas pada tahun perencanaan berikutnya.

Berdasarkan Target Pesimis yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 capaian Tahun 2019 terhadap target Tahun 2023 secara umum seluruh indikator memiliki capaian baik diatas 80%. Akan tetapi jika didasarkan pada target optimis yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang masih rendah, diantaranya persentase penduduk miskin (42,88%), dan indeks pengangguran terbuka (65,67%). Data capaian indikator kinerja daerah sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.10 berikut

.

**Tabel 4.10**

**Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | |
| 1 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 72,07 | 72,26 | 72,29 | 100 | 73,00 | 99,03 | 73,20 | 98,76 | 73,58 | 98,25 | |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,10 | 8,29 | 8,27 | 99,76 | 9,07 | 91,18 | 9,00 | 91,89 | 9,50 | 87,05 | |
| 3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,00 | 13,22 | 12,96 | 98,03 | 14,11 | 91,85 | 13,05 | 99,31 | 13,33 | 97,22 | |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 9,76 | 8,96 | 9,05 | 99,00 | 5,76 | 42,88 | 7,94 | 86,02 | 5,76 | 42,88 | |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 94,4 | 94,87 | 95,01 | 100,15 | 96,75 | 98,20 | 96,75 | 98,20 | 96,75 | 98,20 | |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 68,7 | 69,23 | 70,94 | 102,47 | 71,37 | 99,40 | 71,37 | 99,40 | 71,37 | 99,40 | |
| 7 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 72,2 | 72,5 | n/a | n/a | 74,50 | - | 74,50 | - | 74,50 | - | Perhitungan dilakukan oleh instansi vertikal namun sudah tidak dilakukan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | sehingga data tdk tersedia |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,48 | 6,74 | 6,32 | 93,77 | 7,88 | 80,20 | 6,00 | 94,67 | 7,88 | 119,80 | |
| 9 | Presentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,75 | 105,91 | 82,80 | 85,45 | 85,30 | 82,94 | 85,30 | 82,94 | |
| 10 | Rasio Jaringan Irigasi | Persen | 60 | 62 | 62,02 | 100,03 | 70,00 | 88,60 | 70,00 | 88,60 | 70,00 | 88,60 | |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 58,68 | 58,92 | 59,01 | 100,15 | 60,11 | 98,17 | 71,80 | 82,19 | 71,80 | 82,19 | |
| 12 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 155 | 157 | 98,71 | 135,00 | 116,30 | 135,00 | 116,30 | 135,00 | 116,30 | |
| 13 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | 100 | WTP | 100,00 | WTP | 100,00 | WTP | 100,00 | |
| 14 | Nilai Sakip Kabupaten | Kategori | B | B | B | 100 | A | 66,00 | A (80.5) | 81,99 | A (80.5) | 74,53 | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2023 | |
| 15 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,06 | 65 | 79,34 | 122,06 | 85,00 | 93,34 | 85,00 | 93,34 | 85,00 | 93,34 | |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,74 | 81 | 82,27 | 101,57 | 90,00 | 91,41 | 90,00 | 91,41 | 90,00 | 91,41 | |
| 17 | Pengeluaran per Kapita | Rp (juta) | 9,67 | 10,06 | 10,41 | 103,48 | 11,35 | 91,72 | 10,45 | 99,62 | 10,82 | 96,21 | |
| 18 | Tingkat Penganggura n Terbuka | Persen | 7,04 | 6,55 | 7,63 | 83,51 | 5,68 | 65,67 | 6,95 | 90,22 | 5,68 | 65,67 | |
| 19 | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 17.717 | 107,59 | 20.467 | 86,56 | 20.467 | 86,56 | 26.507 | 66,84 | |

### 4.3.2 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020

Realisasi indikator kinerja daerah Tahun 2020 sebagian besar sudah mendekati target bahkan ada yang melampaui target, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya berada dibawah target, seperti persentase penduduk miskin (104,11%), Laju Pertumbuhan Ekonomi (0%), Indeks Reformasi Birokrasi (66,74%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (94,56%). Tingginya capaian persentase penduduk miskin dan TPT sebagai salah satu akibat dari adanya pandemi *covid-19* yang mulai masuk ke Indonesia, akibatnya banyak sektor usaha yang melakukan penutupan bahkan melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan sebagian pekerjanya. Hal ini berimbas pada peningkatan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Sumedang. Pandemi *covid-19* pun menyebabkan LPE Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 capaiannya 0% dikarenakan realisasi laju pertumbuhan ekonominya mengalami pertumbuhan negatif.

Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 berdasarkan rencana target perubahan RPJMD dengan target pesimis sudah dapat dikatakan memiliki capaian yang cukup baik, kecuali capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi yaitu 57,70%. Jika berdasarkan rencana target optimis Perubahan RPJMD masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja daerah Tahun 2020 yang capaiannya masih di bawah target di antaranya persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, indeks reformasi birokrasi serta tingkat pengangguran terbuka. Rendahnya capaian LPE serta tingginya persentase penduduk miskin dan TPT di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu dampak wabah *covid-19*, karena Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat ataupun Daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melakukan pembatasan mobilitas dan aktivitas, sekolah dari rumah, penutupan sarana olah raga, serta penutupan tempat hiburan dan kawasan wisata sebagai upaya penanganan dan percepatan dalam penanganan *covid-19*, kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan pengangguran dalam jumlah besar akibatnya angka kemiskinan pun meningkat, karena tidak dapat dihindari kebijakan ini membuat gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) disejumlah sektor usaha mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Dan tidak sedikit juga perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi pun mengalami

perlambatan yang cukup parah. Sedangkan belum tercapainya target indeks reformasi birokrasi diperkirakan karena adanya kebijakan *Work from Home* (WFH) yang belum sepenuhnya difahami oleh para ASN sehingga proses pelayanan kepada masyarakat selama pandemi *covid-19* sedikit terhambat.

Interval capaian kinerja daerah Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 rata-rata sudah mendekati target, kecuali untuk interval capaian presentase kemiskinan yang masih tinggi yaitu 78,40%-32,38%, hal ini disebabkan realisasi pada Tahun 2020 capaian indicator ini mengalami peningkatan yang sangat besar jauh melebihi target. Dengan menggunakan interval capaian diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka memperkecil persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Indikator lain yang mempunyai interval capaian yang masih rendah kurang dari target yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian 59,90% - 47,33%, dikarenakan Tahun 2020 LPE Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan negative, sehingga diperlukan *effort* yang besar untuk meningkatkan kembali pertumbuhan di berbagai sector usaha. Dengan adanya interval capaian maka Pemerintah Daerah mempunyai target terendah dalam upaya meningkatkan laju perumbuhan ekonominya. Untuk capaian TPT dengan interval 73,96% - 45,77% masih lebih rendah dari target. Tingginya capaian TPT merupakan dampak dari penurunan LPE sehingga sebagai upaya penurunan capaian TPT dan persentase kemiskinan maka diperlukan strategi dan kebijakan daerah untuk memulihkan kembali laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang, salah satu caranya dengan mempromosikan kembali potensi daerah mulai dari potensi pariwisata, invenstasi di kawasan industri serta pemberdayaan UMKM dan memasarkan hasil produksi UMKM. Data capaian indikator kinerja daerah Tahun 2020 selengkapnya disajikan pada Tabel. 4.11 berikut.

## Tabel 4.11
## Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2020 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 (Interval) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | | |
| 1 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 72,07 | 72,44 | 72,43 | 99,99 | 73,00 | 99,22 | 73,20 | 98,95 | 73,58 | 98,44 | 98.34-98.85 | |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,10 | 8,48 | 8,51 | 100,35 | 9,07 | 93,83 | 9,00 | 94,56 | 9,50 | 89,58 | 88.32-93.22 | |
| 3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,00 | 13,44 | 12,97 | 96,50 | 14,11 | 91,92 | 13,05 | 99,39 | 13,33 | 97,30 | 97.26-99.35 | |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 9,76 | 10,7 | 10,26 | 104,11 | 5,76 | 21,88 | 7,94 | 70,78 | 5,76 | 21,88 | 78.40-32.38 | |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 94,4 | 95,34 | 95,18 | 99,83 | 96,75 | 98,38 | 96,75 | 98,38 | 96,75 | 98,38 | 98,29 | |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 68,7 | 69,77 | 70,78 | 101,45 | 71,37 | 99,17 | 71,37 | 99,17 | 71,37 | 99,17 | 99,29 | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2020 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 (Interval) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | | |
| 7 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 72,2 | 73 | n/a | n/a | 74,50 | - | 74,50 | - | 74,50 | - | - | Perhitungan dilakukan oleh instansi vertikal namun sdh tidak dilakukan sehingga data tdk tersedia |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,48 | 2,1 | -1,12 | 0,00 | 7,88 | 0 | 6,00 | 0 | 7,88 | 0 | 59.90-47.33 | |
| 9 | Presentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 70,8 | 76,96 | 108,70 | 82,80 | 92,95 | 85,30 | 90,22 | 85,30 | 90,22 | 86,58 | |
| 10 | Rasio Jaringan Irigasi | Persen | 60 | 64 | 64,46 | 100,72 | 70,00 | 92,09 | 70,00 | 92,09 | 70,00 | 92,09 | 90,34 | |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 58,68 | 59,18 | 70,89 | 119,79 | 60,11 | 117,93 | 71,80 | 98,73 | 71,80 | 98,73 | 90,46 | |
| 12 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 150 | 150 | 100,00 | 135,00 | 111,11 | 135,00 | 111,11 | 135,00 | 111,11 | 113,70 | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2020 | | | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | TARGET PESIMIS | | TARGET OPTIMIS | | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 (Interval) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | Target P_RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | Target P.RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 | | |
| 13 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | 100 | WTP | 100,00 | WTP | 100,00 | WTP | 100,00 | 100,00 | |
| 14 | Nilai Sakip Kabupaten | Kategori | B | BB | BB (71,51) | 100 | A | 71,51 | A (80.5) | 88,83 | A (80.5) | 88,83 | 81.68-85.41 | |
| 15 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,06 | 70 | B (66,74) | 95,34 | 85,00 | 78,52 | 85,00 | 78,52 | 85,00 | 78,52 | 85,93 | |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,74 | 83 | 83,8 | 100,96 | 90,00 | 93,11 | 90,00 | 93,11 | 90,00 | 93,11 | 92,26 | |
| 17 | Pengeluaran per Kapita | Rp (juta) | 9,67 | 10,38 | 10,22 | 98,46 | 11,35 | 90,04 | 10,45 | 97,80 | 10,82 | 94,45 | 95.33-98.71 | |
| 18 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,04 | 9,38 | 9,89 | 94,56 | 5,68 | 25,88 | 6,95 | 57,70 | 5,68 | 25,88 | 73.96-45.77 | |
| 19 | Jumlah UMKM ) | UMKM | 15.467 | 17.467 | 20.507 | 117,40 | 20.467 | 100,20 | 20.467 | 100,20 | 26.507 | 77,36 | 72.10-93.38 | |

### 4.3.3 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 – 2020

Perkembangan capaian indikator kinerja daerah dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 secara keseluruhan telah mencapai target yang diharapkan dengan capaian rata-rata di atas 90%. Meskipun demikian masih terdapat indikator dengan capaian berada di bawah 50% seperti capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masih 46,88%. Rendahnya LPE Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan negative karena banyaknya sektor usaha penunjang ekonomi daerah yang secara sengaja ditutup untuk menekan perkembangan dan penularan virus *covid-19*. Hal ini berdampak juga pada tingginya capaian persentase kemiskinan (32,38%) dan tingkat pengangguran terbuka (45,77%). Penutupan berbagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah menyebabkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan sehingga menurunkan daya beli dan kemampuan finansial, faktor ini membuat tidak tercapainya target persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020.

Berdasarkan angka perkembangan capaian sampai dengan Tahun 2020, indicator-indikator dengan capaian yang masih jauh dari target perlu mendapat perhatian lebih dari perangkat daerah pengampu dan juga perlu dukungan berupa pemberian anggaran oleh Pemerintah Daerah. Data capaian indikator kinerja daerah Tahun 2020 selengkapnya disajikan pada Tabel. 4.12 berikut

## Tabel 4.12.
## Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 – 2020

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Capaian s/d Tahun 2020 | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | | | |
| 1 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 72,07 | 72,26 | 72,29 | 100 | 72,44 | 72,43 | 99,99 | 100 | 73,00 | 99,03 | 99,22 | 99,12 |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,10 | 8,29 | 8,27 | 99,76 | 8,48 | 8,51 | 100,35 | 100 | 9,07 | 91,18 | 93,83 | 92,50 |
| 3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,00 | 13,22 | 12,96 | 98,03 | 13,44 | 12,97 | 96,50 | 97,27 | 14,11 | 91,85 | 91,92 | 91,89 |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 9,76 | 8,96 | 9,05 | 99,00 | 10,7 | 10,26 | 104,11 | 102 | 5,76 | 42,88 | 21,88 | 32,38 |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 94,4 | 94,87 | 95,01 | 100,15 | 95,34 | 95,18 | 99,83 | 99,99 | 96,75 | 98,20 | 98,38 | 98,29 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 68,7 | 69,23 | 70,94 | 102,47 | 69,77 | 70,78 | 101,45 | 102 | 71,37 | 99,40 | 99,17 | 99,29 |
| 7 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 72,2 | 72,5 | n/a | n/a | 73 | n/a | n/a | 0,00 | 74,50 | - | - | - |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Capaian s/d Tahun 2020 | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | | | |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,48 | 6,74 | 6,32 | 93,77 | 2,1 | -1,12 | 0,00 | 46,88 | 7,88 | 80,20 | - | 40,10 |
| 9 | Presentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,75 | 105,91 | 70,8 | 76,96 | 108,70 | 107 | 82,80 | 85,45 | 92,95 | 89,20 |
| 10 | Rasio Jaringan Irigasi | Persen | 60 | 62 | 62,02 | 100,03 | 64 | 64,46 | 100,72 | 100 | 70,00 | 88,60 | 92,09 | 90,34 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 58,68 | 58,92 | 59,01 | 100,15 | 59,18 | 70,89 | 119,79 | 110 | 60,11 | 98,17 | 117,93 | 108,05 |
| 12 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 155 | 157 | 98,71 | 150 | 150 | 100,00 | 99,35 | 135,00 | 116,30 | 111,11 | 113,70 |
| 13 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | 100 | WTP | WTP | 100 | 100 | WTP | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Nilai Sakip Kabupaten | Kategori | B | B | B | 100 | BB | BB (71,51) | 100 | 100 | A | 66,00 | 71,51 | 68,76 |
| 15 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,06 | 65 | 79,34 | 122,06 | 70 | B (66,74) | 95,34 | 109 | 85,00 | 93,34 | 78,52 | 85,93 |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,74 | 81 | 82,27 | 101,57 | 83 | 83,8 | 100,96 | 101 | 90,00 | 91,41 | 93,11 | 92,26 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Capaian s/d Tahun 2020 | Target RPJMD Tahun 2023 | Capaian Tahun 2019 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian Tahun 2020 terhadap Target Tahun 2023 | Capaian s/d Tahun 2020 terhadap Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | | | | | |
| 17 | Pengeluaran per Kapita | Rp (juta) | 9,67 | 10,06 | 10,41 | 103,48 | 10,38 | 10,22 | 98,46 | 101 | 11,35 | 91,72 | 90,04 | 90,88 |
| 18 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,04 | 6,55 | 7,63 | 83,51 | 9,38 | 9,89 | 94,56 | 89,04 | 5,68 | 65,67 | 25,88 | 45,77 |
| 19 | Jumlah UMKM ) | UMKM | 15.467 | 16.467 | 17.717 | 107,59 | 17.467 | 20.507 | 117,40 | 112 | 20.467 | 86,56 | 100,20 | 93,38 |

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB V
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB V
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Visi, misi yang menjadi dasar dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018 – 2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 tidak merubah Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Akan tetapi terjadi perubahan indikator sasaran sebagai dampak diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta peraturan penyerta lainnya.

## 5.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023"***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Sejahtera** : kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**Agamis :** sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Maju :** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**Profesional :** *good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

**Kreatif :** masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-*

*down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

**5.2 Misi**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.**

   Misi ini dimaksudkan untuk: perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. **Misi Kedua: Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

   Misi ini dimaksudkan agar : setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis, tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma

memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah" langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

3. **Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk : Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu

daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

4. **Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

   Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

   Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) memungkinkan rakyat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual.

   Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannnya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. **Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

   Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di daerah tersebut.

   Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan

memanfaatkan peluang menuju sukses.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

### 5.2.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah "***Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis Dan Demokratis Pada Tahun 2025 (Sumedang Sehati)"*** *yang pada periode keempat* diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023".***

**Misi 1 jangka panjang** *"Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat"* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 2** *"Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan".*

**Misi 2 jangka panjang** "*Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri"* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** *"Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal"* dan **Misi 5** *"Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang".*

**Misi 3 jangka panjang** *"Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila"* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 1** *"Memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat secara mudah dan terjangkau "* dan Misi 2 *"Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan".*

**Misi 4 jangka menengah** "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*" diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 4** *"Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat"*.

**Misi 5 jangka menengah** *"Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia"* diwujudkan melalui misi jangka menengah **Misi 3** "*Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal"*

Pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Visi dan Misi Sumedang Simpati tidak mengalami perubahan atau sama dengan yang tercantum pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023. Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 5.1 di bawah ini.

**Gambar 5.1**
**Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Sumedang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023**

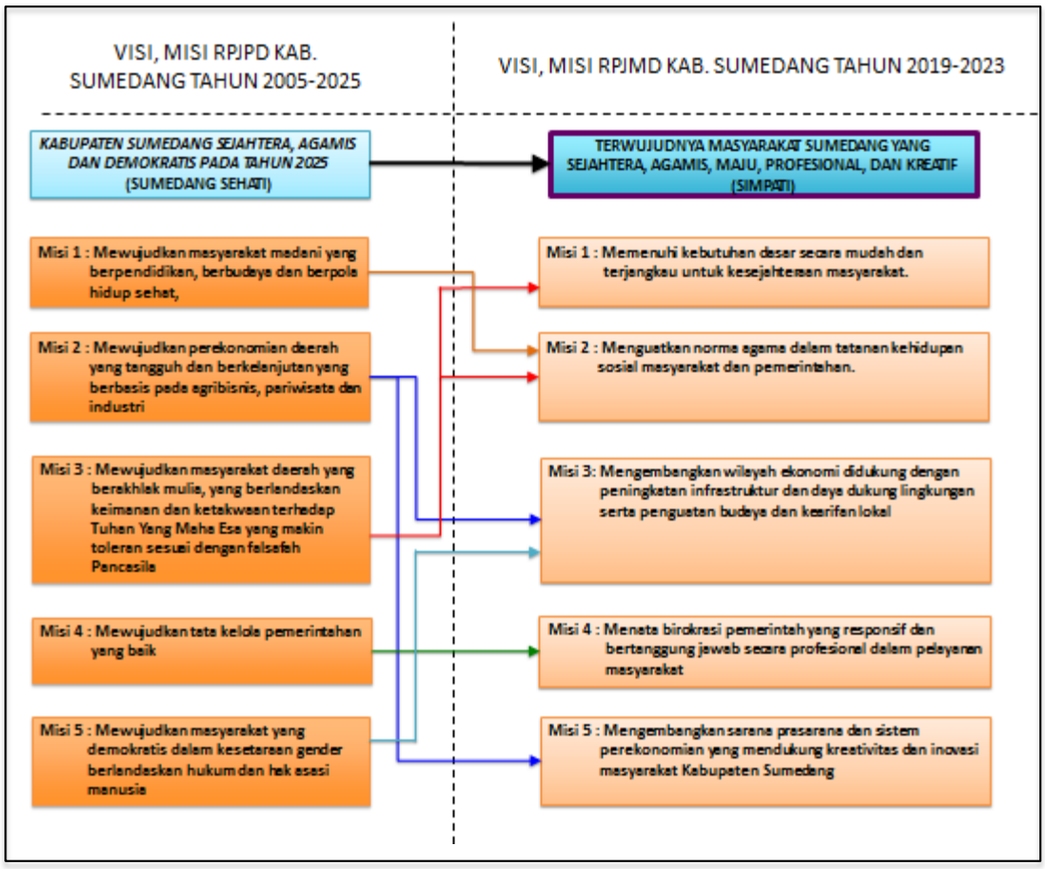


### 5.2.2 Keselarasan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi misi Provinsi dengan visi misi Kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang, diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 5.2**
**Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023 dengan Visi, Misi RPJMD Prov. Jawa Barat 2018-2023**

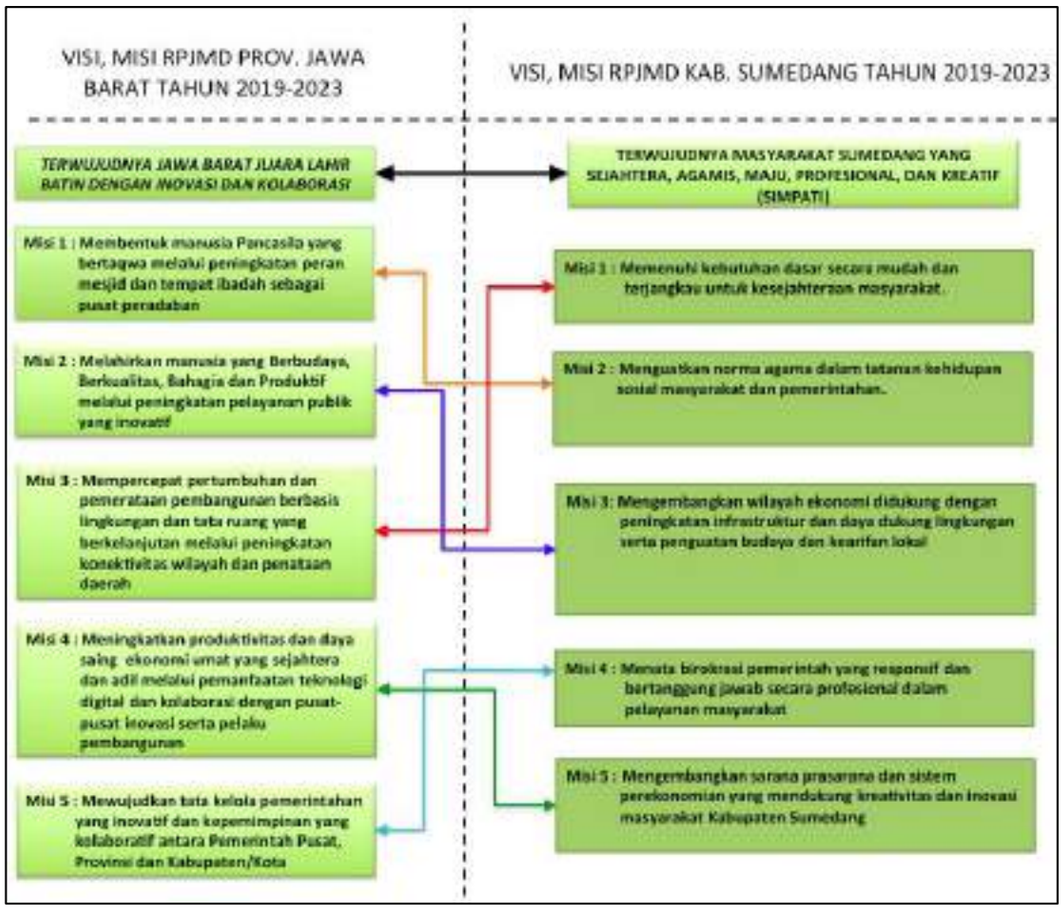


## 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat DaerahBerdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan 1 | : | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| Sasaran 1 | : | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan |
| Tujuan 2 | : | Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata |
| Tujuan 3 | : | Terwujudnya penanggulangulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak |

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan | : | Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| Sasaran 4 | : | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak |

2. **Misi Kedua : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

| | | |
|---|---|---|
| Tujuan 1 | : | Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang |

Sasaran 1 : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

Sasaran 2 : Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya kehidupan yang Agamis di Kabupaten Sumedang

Sasaran : Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama

**3. Misi Ketiga : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan 1 : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air

Sasaran 2 : Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis

Sasaran 4 : Menjamin Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata

Sasaran 6 : Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang

Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran 2 : Pengurangan indeks resiko bencana

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Daerah
Sasaran 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 8 : Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

**4. Misi Keempat : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan 1 : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran 2 : Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah

**5. Misi Kelima : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang**

**RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan 1 : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang inklusif

Sasaran 2 : Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar

**Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

Tujuan : Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat

Untuk menciptakan sinergitas tujuan dan sasaran antara RPJMD Kabupaten Sumedang dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dirumuskan sinkronisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat**

| Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang | Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar | Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar | Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| **MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau** | | | **Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban** |
| Tujuan 1.1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat | Terkait dengan Tujuan 2.1 Provinsi | | Tujuan 1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial |
| Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi | Sasaran 1.1.1 Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi |
| Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan | | Terkait dengan Sasaran 2.1.3 Provinsi | |

| Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang | Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar | Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar | Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Penanggulangan PPKS | | Terkait dengan Sasaran 2.1.1 Provinsi | |
| Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | | Terkait dengan Sasaran 2.1.2 Provinsi | |
| **MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan** | | | **Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif** |
| Tujuan 2.1 Terwujudnya kehidupan yang agamis dI Kabupaten Sumedang | Terkait dengan Tujuan 1.1 Provinsi | | Tujuan 2.1. Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat |
| Sasaran 2.1.1 Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | | Terkait dengan Sasaran 1.1.1 Provinsi | Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar |
| | | | Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak |
| | | | Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan |
| | | | Sasaran 2.1.4 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional |
| | | | Tujuan 2.2 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah |
| | | | Sasaran 2.2.1 Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal |
| | | | Sasaran 2.2.2 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial |

| Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang | Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar | Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar | Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| **MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal** | | | **Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah** |
| Tujuan 3.1 Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan | Terkait dengan Tujuan 3.1 Provinsi | | Tujuan 3.1 Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan |
| Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Kawasan industri | | Terkait dengan Sasaran 3.1.2; 3.1.3; dan 4.1.3. Provinsi | Sasaran 3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok |
| Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis | | Terkait dengan Sasaran 3.1.2 Provinsi | Sasaran 3.1.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian |
| Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata | | Terkait dengan Sasaran 4.1.2 provinsi | Sasaran 3.1.3 Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan |
| Sasaran 3.1.4 Meningkatnya kualitas infrastruktur sebagai penunjang perekonomian | | Terkait dengan Sasaran 3.1.2 dan 3.1.3 Provinsi | Sasaran 3.1.4 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa |
| Sasaran 3.1.5 Meningkatnya Ketahanan Daerah | | Terkait dengan Sasaran 3.2.3 Provinsi | Sasaran 3.1.5 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan |
| Sasaran 3.1.6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | | Terkait dengan sasaran 3.2.1 Provinsi | Tujuan 3.2 Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan |

| Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang | Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar | Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar | Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| Sasaran 3.1.7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | Terkait dengan sasaran 3.2.1 dan 3.2.2 Provinsi | Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat |
| | | | Sasaran 3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik |
| | | | Sasaran 3.2.3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana |
| Sasaran 3.1.8 Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi | Terkait dengan sasaran 4.1.4 Provinsi | Sasaran 4.1.4 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi |
| **MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.** | | | **Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan** |
| Tujuan 4.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | Terkait dengan Tujuan 5.1 Provinsi | | Tujuan 4.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi |
| Sasaran 4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | | Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi | Sasaran 4.1.1 Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan |
| Ssaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Provinsi | Sasaran 4.1.2 Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif |
| Sasaran 4.1.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja daerah | | Terkait dengan Sasaran 5.1.1 Provinsi | Sasaran 4.1.3 Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat |
| | | | Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi |
| **MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung** | | | **Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota** |

| Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang | Keterkaitan Tujuan RPJMD Kab. Sumedang dengan Tujuan RPJMD Prov. Jabar | Keterkaitan Sasaran RPJMD Kab. Sumedang dengan Sasaran RPJMD Prov. Jabar | Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat |
|---|---|---|---|
| **kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang** | | | |
| Tujuan 5.1 Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing | Terkait dengan Tujuan 4.1 Provinsi | | Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government |
| Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kompetensi dan produktivitas masyarakat | | Terkait dengan Sasaran 4.1.3 Provinsi | Sasaran 5.1.1 Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel |
| | | | Sasaran 5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. |

## 5.4 Program Unggulan

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Pada RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 9 (sembilan) program unggulan sedangkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi 8 (delapan) program unggulan. Perubahan tersebut sebagai hasil penelaahan kembali program unggulan pada dokumen visi-misi. Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

| RPJMD 2018-2023 | Perubahan RPJMD 2018-2023 |
|---|---|
| 1. Sumedang Agamis | 1. Sumedang Agamis |
| 2. Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan sampai tingkat desa | 2. Rumah Besar Fakir Miskin sampai Tingkat Desa |
| 3. Sumedang Buludru | 3. Sumedang Buludru |

| RPJMD 2018-2023 | Perubahan RPJMD 2018-2023 |
|---|---|
| 4. Pemenuhan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan Pelayanan Dasar |
| 5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas | 5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas |
| 6. Pengembangan Pariwisata | 6. Pengembangan Pariwisata |
| 7. Pengembangan Agribisnis | 7. Pengembangan Agribisnis |
| 8. Peningkatan Profesionalisme ASN | 8. Profesionalisme ASN |
| 9. Membangun Sumedang Preuneurship | 9. Membangun Sumedang Preuneurship |

Adapun penjelasan setiap program unggulan, adalah sebagai berikut:

**5.4.1. Sumedang Agamis.**

Program unggulan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan peningkatan mental dan spiritual dengan penguatan perwujudan nilai-nilai agama pada tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

**5.4.2. Rumah Besar Fakir Miskin Sampai Tingkat Desa.**

Rumah besar fakir miskin merupakan bentuk penanganan fakir miskin, anak terlantar dan lansia yang terintegrasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan serta dengan mendorong optimalisasi peran RT/RW, DKM, pontren**,** tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**5.4.3. Sumedang Buludru.**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Sumedang yang hijau, bersih, indah dan nyaman. Kabupaten Sumedang pernah dijuluki sebagai Kota Buludru pada tahun 1960 an dan memperoleh Piala Adipura pada Tahun 1984. Integrasi peran pemerintah dan masyarakat serta memperkuat budaya dan kearifan lokal memiliki peran penting dalam perwujudan Sumedang Kota Buludru.

**5.4.4. Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Program ini bertujuan mengakselerasi kewajiban pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Pelayanan pendidikan dasar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu untuk optimalisasi sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

### 5.4.5. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektifitas menjadi salah satu program unggulan karena akan berdampak pada penguatan aksesibilitas wilayah, pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah.

### 5.4.6. Pengembangan Pariwisata.

Kabupaten Sumedang memiliki Sumber Daya Alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat layak untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Pengembangan wisata ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Kabupaten Sumedang juga telah menyatakan sebagai Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) dimana filosofis “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda dimana menjadi nilai-nilai dalam pengembangan pariwisata dan pengembangan budaya daerah.

### 5.4.7. Pengembangan Agribisnis

Sektor pertanian (termasuk perikanan dan peternakan) secara tradisi menjadi bagian kehidupan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumedang. Pengembangan sektor pertanian menuju agribisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

### 5.4.8. Profesionalisme ASN.

Profesionalisme ASN sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan. Peningkatan kinerja ASN diwujudkan melalui Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Indeks Profesionalisme ASN

### 5.4.9. Membangun Sumedang Preuneurship

Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA), penyediaan sarana prasarana dan transformasi digital.

Kebijakan dari Pemerintah pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sumdang Tahun 2018-2023 dan Pandemi Covid-19 telah membawa arahan baru bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada hakikatnya perubahan perencanaan pembangunan ini merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama masalah pemulihan ekonomi akibat Pendemi COVID-19 dan perubahan kebijakan yang dialokasikan untuk mengatasi permasalahan dampak pandemic Covid-19.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka perumusan tujuan dan sasaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023 mengalami perubahan. Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Perangkat

Daerah menyesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan, dan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

# Tabel 5.2
# Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
# Kabupaten Sumedang 2018-2023
# (Sebelum Perubahan)

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| **MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** | | **Angka Harapan Hidup** | **Tahun** | **72,07** | **72,26** | **72,29** | **72,44** | **72,43** | **72.51-72.70** |
| | 1.1 | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | Jumlah Kematian Ibu | Jiwa | 16 | 13 | 14 | 10 | 21 | 8 |
| | | | Jumlah Kematian Bayi | Jiwa | 155 | 140 | 114 | 120 | 137 | 94 |
| | | | Persentase Balita Stunting | Persen | 32,2 | 29 | 8,7 | 26 | 12,05 | 23 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan | Poin | 78,73 | 85 | 82,5 | 87 | 100 | 90 |
| | | | IKM Rumah Sakit | poin | 83,7 | 90 | 98,92 | 91 | 96,12 | 92 |
| **2** | **Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan yang Berkualitas dan Merata** | | **Rata – rata lama sekolah** | **Tahun** | **8,1** | **8,29** | **8,27** | **8,48** | **8,51** | **8.50-8.57** |
| | | | **Angka harapan lama sekolah** | **Tahun** | **13** | **13,22** | **12,96** | **13,44** | **12,97** | **12.91-12.98** |
| | 2.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang merata | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | 106,75 | 106,83 | 106,83 | 106,93 | 99,34 | 107,03 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 103,42 | 103,62 | 103,62 | 103,72 | 97,96 | 103,82 |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 105,23 | 105,34 | 105,23 | 105,44 | 97,45 | 105,55 |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 102,78 | 102,99 | 102,78 | 103,19 | 88,51 | 103,40 |
| | | | APK PAUD | Persen | 88,44 | 89,53 | 89,53 | 89,62 | 80,6 | 89,71 |
| | | | Angka partisipasi kasar kesetaraan | Persen | 1,35 | 1,63 | 1,63 | 1,9 | 3 | 2,1 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| **3** | **Terwujudnya penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak** | | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **9,76** | **8,96** | **7,14** | **8,16** | **10,26** | **10,75-9,71** |
| | | | **Indeks Pembangunan Gender** | **Poin** | **94,4** | **94,87** | **95,01** | **95,34** | **95,18** | **95,81** |
| | | | **Indeks Pemberdayaan Gender** | **Poin** | **68,7** | **69,23** | **70,57** | **69,77** | | 70,80 |
| | 3.1 | Meningkatnya kualitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persen | 10,05 | 9,25 | 9,11 | 8,45 | 8,1 | 7,65 |
| | 3.2 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Kabupaten Layak Anak | Skor | 501 | 601 | 549,7 | 650 | 0 | 701 |
| | | | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya | Persen | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 9,7 | 3,70 |
| **MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang** | | **Indeks kerukunan umat beragama** | **Poin** | **72,2** | **72,5** | **n/a** | **73** | **n/a** | **73,5** |
| | 1.1 | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 72,2 | 72,5 | 0 | 73 | 0 | 73,5 |
| | 1.2 | Menguatnya pendidikan karakter berbasis pendekatan keagamaan bagi siswa usia pendidikan dasar | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah | Persen | n/a | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| **MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata** | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **6,48** | **6,74** | **6,32** | **7,01** | **(-1,12)** | **3.66 – 4.70** |
| | 1.1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan sumber daya air | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,75 | 70,8 | 76,96 | 74,80 |
| | | | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persen | 25,31 | 31,27 | 98,47 | 42,12 | 79,04 | 51,83 |
| | | | Rasio jaringan irigasi | Persen | 60 | 62 | 62,02 | 64 | 64,46 | 60 |
| | 1.2 | Tersedianya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat | Cakupan Trayek Angkutan Umum | Persen | 58,45 | 59,85 | 88,32 | 61,24 | 50,74 | 62,64 |
| | | | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum | orang/ hari | 10.044 | 10.284 | 10.280 | 10.524 | 10.428 | 10,764 |
| | 1.3 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian : | | | | | | | |
| | | | Tanaman Pangan | Persen | 10,04 | 10,14 | n/a | 10,24 | n/a | 10,34 |
| | | | Tanaman Hortikultura | Persen | 3,2 | 4 | 19,14 | 4,7 | n/a | 5,40 |
| | | | Perkebunan | Persen | 4,12 | 4,2 | 4 | 4,8 | n/a | 5,50 |
| | | | Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan | Persen | 3,68 | 4,3 | 18,79 | 4,9 | 5.78 | 5,50 |
| | | | Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | Persen | 3,15 | 4 | n/a | 4,6 | 3,48 | 58,18 |
| | 1.4 | Menjamin Ketahanan Pangan Daerah | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Persen | 85 | 87,3 | n/a | 88,5 | 89,1 | 89,60 |
| | 1.5 | Meningkatnya pelestarian budaya, cagar budaya, sejarah dan pengembangan destinasi wisata sebagai daya tarik pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 498.472 | 598.166 | 81.494 | 717.800 | 717.800 | 861.360 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| | 1.6 | Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Sumedang | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp x1.000) | 1.106.170.000 | 1.216.787.000 | 915.825.600 | 1.338.465.700 | 1.338.465.700 | 1.606.158.840.000 |
| **2** | **Terwujudnya wilayah ekonomi yang berkelanjutan** | | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Poin** | **58,68** | **58,92** | **59,01** | **59,18** | **70,89** | **63,85** |
| | | | **Indeks Resiko Bencana** | **Poin** | **162** | **155** | **157** | **150** | **150** | 145 |
| | 2.1 | Meningkatknya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 47,89 | 48,09 | 100,12 | 48,29 | 133,13 | 48,49 |
| | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 80,29 | 80,49 | 100,14 | 80,69 | 105,64 | 80,89 |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | 50,57 | 50,86 | 100,2 | 51,22 | 113,84 | 51,63 |
| | | | Persentase penanganan sampah | Persen | n/a | 80 | 99,98 | 75 | 99,97 | 70 |
| | | | Persentase pengurangan sampah | Persen | n/a | 20 | 99,9 | 25 | 99,92 | 30 |
| | | | Persentase RTH Terkelola | Persen | 11,04 | 11,04 | 100 | 11,07 | 100 | 11,11 |
| | | | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 80 | 80,67 | 80,13 | 81,33 | 80,34 | 82,00 |
| | | | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh | Persen | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0 | 0,15 |
| | | | Persentase Rumah Tangga berakses air minum | Persen | 79,02 | 80 | 79,92 | 83 | 80,45 | 85 |
| | | | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 55 | 60 | 55,23 | 65 | 55,29 | 70 |
| | | | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang | Persen | 100 | 100 | 70,22 | 100 | 75,11 | 100 |
| | 2.2 | Pengurangan indeks resiko bencana | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 155 | | 150 | 142 | 145 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA TUJUAN /SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | 2019 | | 2020 | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| **MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.** | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi** | | **Opini BPK** | **Opini** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** | **WTP** |
| | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **56,05** | **65** | **79,34** | **70** | **66,74** | **75** |
| | | | **Nilai SAKIP Kabupaten** | **Kategori** | **B** | **B** | **B** | **BB** | **BB** | **A** |
| | 1.1 | Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | APBD Tepat Waktu | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | | | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | Persen | 75 | 80 | 82 | 90 | 85 | 90 |
| | | | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD | Persen | 8,79 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| | 1.2 | Meningkatnya Efektivitas, Efesiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,05 | 65 | 22,38 | 70 | 66,74 | 75,00 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | 75,94 | 100 |
| | | | Nilai LPPD Kabupaten | Angka | 3,092 | 3,15 | 3,15 | 3,3 | n/a | 3,45 |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" | Persen | 36 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
| | 1.3 | Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 59 | 65 | 59,45 | 70 | 65,03 | 75,00 |
| | | | Indeks Sistem Merit ASN | Poin | 48,9 | 60 | 60,88 | 66,25 | 74,47 | 72,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas** | | **Indeks kepuasan masyarakat** | **Poin** | **80,74** | **81** | **82,27** | **83** | **83,80** | **86** |
| **2** | 2.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | Poin | 76 | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 |
| | | | Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | Poin | 84,11 | 84,95 | 85,25 | 86,25 | 86,25 | 87,23 |
| | 2.2 | Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT | Nilai SPBE | Poin | 2,46 | 3 | 2,51 | 3,3 | 3,81 | 3,60 |
| **MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG** | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing** | | **Pengeluaran per kapita** | **Rp (juta)** | **9,67** | **10,06** | **10,406** | **10,38** | **10,217** | **30.75-32.08** |
| | | | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **Persen** | **7,04** | **6,55** | **7,63** | **6,35** | **9,89** | **8.51-9.35** |
| | 1.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang inklusif | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | Persen | 4,59 | 4,89 | 4,89 | 5,19 | n/a | 5,49 |
| | | | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | Persen | 5,29 | 5,32 | 5,32 | 5,35 | n/a | 5,398 |
| | | | Cakupan Koperasi Aktif | Persen | 72,93 | 75 | 77,41 | 78 | 38,39 | 81 |
| | 1.2 | Menciptakan wirausahawan dan tenaga kerja kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,04 | 6,55 | 7,63 | 6,35 | 9,89 | 8.51-9.35 |
| | | | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 2.800 | 17.467 | 1.557 | 18.467 |

# Tabel 5.3
# Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
# Kabupaten Sumedang 2021-2023
# (Setelah Perubahan)

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | |
| **MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU** | | | | | | | |
| **'1** | **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat** | | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Poin** | **71.93-72.48** | **72.40-73.37** | **73.37** |
| | | | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **10.41-9,54** | **9,70-7,56** | **10,75-9,71** |
| | 1.1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 72.65-72.82 | 72.70-73.20 | 73.20 |
| | 1.2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8.58-8.80 | 8.81-9.00 | 9.00 |
| | | | Angka Harapan lama sekolah (HLS) | Tahun | 12.99-13.04 | 13.05-13.12 | 13.12 |
| | 1.3 | Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 8.95-9,70 | 7,56-8,94 | 8,94 |
| | 1.4 | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 96,28 | 96,75 | 96,75 |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 70,84 | 71,37 | 71,37 |
| **MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang** | | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | **Poin** | **74** | **74,5** | **74,5** |
| | **1.1** | Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 74 | 74,5 | 74,5 |
| **MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** | | | | | | | |
| | **Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan** | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **10.41-9,54** | **9,70-7,56** | **7,56** |
| | | | **Indeks Resiko Bencana** | **Poin** | **140** | **135** | **135** |
| | 1.1 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | persen | 2.20 - 4.15 | 4.15 - 6.40 | 6.40 |

| NO | TUJUAN/ SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | |
| | 1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen | 3.45-5.28 | 3.76-5.59 | 5,59 |
| | 1.3 | Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | 4.50-6.01 | 8.77-10.27 | 10.27 |
| | 1.4 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian | Indeks Kualitas Infrastruktur | Persen | 74,65 | 77,65 | 77,65 |
| | 1.5 | Meningkatnya Ketahanan Daerah | Indeks Ketahahan Daerah | poin | 0,49 | 0,52 | 0,52 |
| | 1.6 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Skor Pola Pangan Harapan | persen | 89,4 | 90,2 | 90,2 |
| | 1.7 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 64,26 | 64,67 | 64,67 |
| | 1.8 | Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Persen | 20 | 30 | 30 |
| **MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.** | | | | | | | |
| | **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **80** | **85** | **85** |
| | 1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | A | A | A |
| | | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP |
| | 1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 89 | 92 | 92 |
| | 1.3 | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| **MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG** | | | | | | | |
| | **Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing** | | **PDRB per Kapita** | **Rp (juta)** | **32.09-33.84** | **33.85-34.70** | **34.70** |
| | | Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 8.78-7.99 | 8.18-6.95 | 6,95 |

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB VI
# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB VI
# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2018-2023 sebagai periodesasi dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 juga harus selaras dengan periodesasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode keempat. Arah kebijakan yaitu pada RPJPD "Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada Tahun 2025 (SUMEDANG SEHATI)".

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

## 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu

melakukan analisis SWOT (*Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah internal atau eksternal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang. Analisis SWOT dalam merumuskan strategi Pembangunan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

| Eksternal / Internal | **PELUANG (O)** | **ANCAMAN (T)** |
|---|---|---|
| | 1. Letak geografis diantara Metropolitan Bandung Raya dan Kawasan Segitiga Rebana<br>2. Lokasi Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Bendungan Jatigede dan Jalan Tol Cisumdawu yang berada di Kabupaten Sumedang<br>3. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan segala aspek kehidupan<br>4. Bonus Demografi yang didominasi oleh generasi milenial | 1. Disrupsi akibat Pandemi Covid 19 dan kemungkinan pandemi lainnya<br>2. Disrupsi akibat Perkembangan Teknologi Informasi<br>3. Disrupsi akibat Generasi Milenial<br>4. Disrupsi Perubahan Iklim |
| **KEKUATAN (S)**<br>1. Masyarakat yang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan serta memiliki kekayaan budaya Sunda yang terjaga<br>2. Kondisi alam daerah yang berpotensi sebagai daya tarik wisata | **STRATEGI SO**<br>1. Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata<br>2. Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi<br>3. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan | **STRATEGI ST**<br>1. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat<br>2. Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Jumlah UMK yang semakin meningkat<br>4. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik | teknologi informasi dan *aritificial intellegence* | |
| **KELEMAHAN (W)**<br>1. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal dan merata<br>2. Masih rendahnya tingkat penanaman modal di Kabupaten Sumedang<br>3. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi<br>4. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka<br>5. Pertanian sebagai penopang perekonomian dan menjadi salah satu kantung kemiskinan Pertanian sebagai salah satu lapangan usaha penopang perekonomian Kabupaten Sumedang<br>6. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang masih rendah<br>7. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan | **STRATEGI WO**<br>1. Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang<br>2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi | **STRATEGI WT**<br>1. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi<br>2. Memperkuat ketahanan pangan daerah<br>3. Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PPKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

| Sebelum | Sesudah |
|---|---|
| Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan | Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan |

| Sebelum | Sesudah |
|---|---|
| | melalui pemanfaatan teknologi informasi |
| Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat | Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi |
| Meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani serta penguatan ketahanan pangan | Memperkuat ketahanan pangan daerah |
| Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata | Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata |
| Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang | Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang |
| Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan | Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan |
| Peningkatan kinerja aparatur pemerintah | Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan *aritificial intellegence* |
| Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil | Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi |

| Sebelum | Sesudah |
|---|---|
| Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja | Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja |

Strategi tersebut disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien.

## 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansi nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Dalam konteks mewujudkan keselarasan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Adapun Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 Pasal 4 yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6.1**
**Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| Kebijakan Penataan Ruang Wilayah | a. pengembangan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang; | a. mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan;<br>b. mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan;<br>c. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan;<br>d. meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan;<br>e. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;<br>f. meningkatkan produksi komoditas pertanian;<br>g. meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan<br>h. meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor. |
| | b. pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten; | a. mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;<br>b. mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;<br>c. meningkatkan produktivitas, intesifikasi, ekstensivikasi dan diversifikasi lahan pertanian;<br>d. meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan<br>e. mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan. |
| | c. pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten; | a. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;<br>b. mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;<br>c. meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;<br>d. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan;<br>e. mengembangkan Kawasan |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| | | peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;<br>f. mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;<br>g. mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan<br>h. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak. |
| | d. penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata; | a. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan<br>b. mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan;<br>c. meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata;<br>d. melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata;<br>e. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata;<br>f. mendatangkan investasi dari dunia usaha;<br>g. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;<br>h. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan<br>i. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. |
| | e. penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga; | a. mengembangkan Kawasan Industri manufaktur di Wilayah timur;<br>b. mengembangan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;<br>c. mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| | | industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan<br>d. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha. |
| | f. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; | a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung;<br>b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat;<br>c. meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan<br>d. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung. |
| | g. peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang; | a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur;<br>b. mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat;<br>c. mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan<br>d. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. |
| | h. peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah; | a. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;<br>b. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan–Perkotaan;<br>c. memanfaatkan kembali akses |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| | | jalur kereta api yang sudah tidak aktif;<br>d. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan<br>e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk. |
| | i. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum; | a. meningkatkan sistem penyediaan energi;<br>b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi;<br>c. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air;<br>d. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;<br>e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;<br>f. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan<br>g. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana. |
| | j. penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang; | a. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;<br>b. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh;<br>c. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;<br>d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan;<br>e. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;<br>f. mengendalikan jumlah |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| | | pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah;<br>g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan<br>h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung. |
| | k. pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten; | a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan<br>b. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW. |
| | l. pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede; | a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;<br>b. membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede;<br>c. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang;<br>d. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan;<br>e. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional;dan<br>f. Mengendalikan dampak pengembangan. |
| | m. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan | a. membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan;<br>b. meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten;<br>c. menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan;<br>d. mengembangkan potensi Daerah Kabupaten;<br>e. mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan;<br>f. mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga |

| Aspek | Kebijakan Penataan Ruang | Strategi Penataan Ruang |
|---|---|---|
| | | sebagai basis rantai pasokan; dan<br>g. mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. |
| | n. pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. | a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;<br>b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan;<br>c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan<br>d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia. |

*Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038*

Lebih lanjut, pada RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 telah ditetapkan pula Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Selanjutnya KSK tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang dan arahan penanganan yang disepakati oleh lintas sektor untuk mewujudkan penanganan kawasan secara terpadu. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6.2**
**Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang**

| No | Sudut Kepentingan | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | a. Kawasan Industri Ujungjaya;<br>b. Kawasan Waduk Jatigede;<br>c. Kawasan Industri Buahdua; dan<br>d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede. |
| 2 | Sosial Budaya | a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan<br>b. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong. |
| 3 | Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi | Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya. |
| 4 | Ketahanan Pangan | Tersebar di seluruh wilayah kabupaten |

*Sumber : RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038*

**Gambar 6.1**
**Kawasan Strategis Kabupaten**

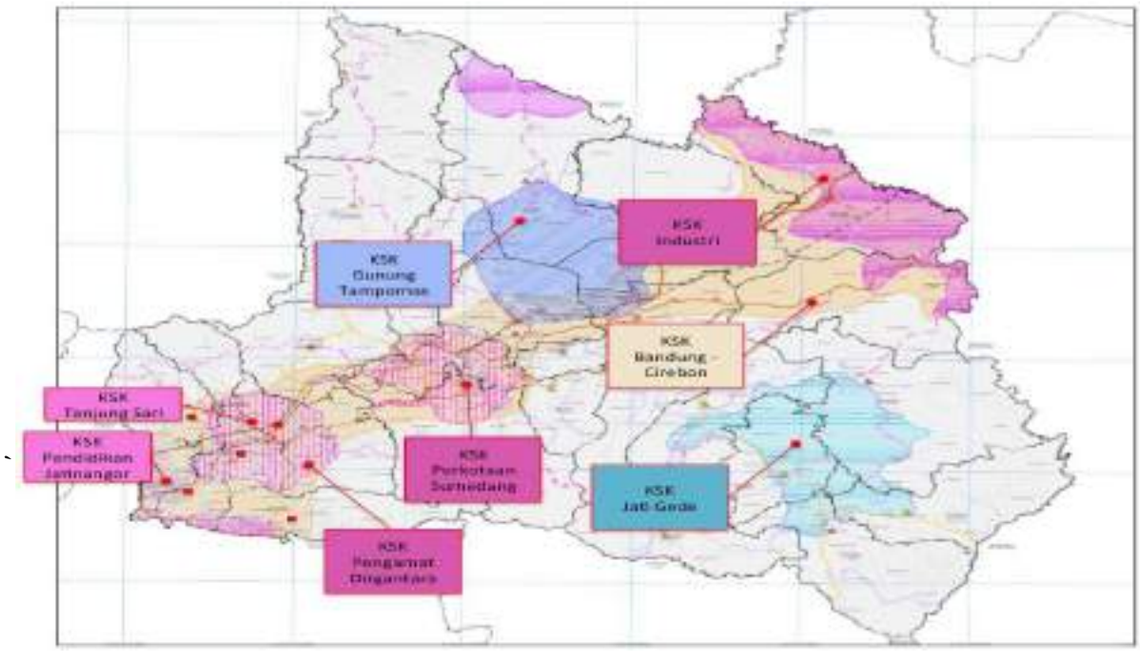


*Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumeadang Tahun 2018-2038, bahwa indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi Pembangunan Strategis sebagaimana tabel 6.3 di bawah ini:

# Tabel 6.3
# Indikasi Pembangunan Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

| No. | Program Utama | | Lokasi Kegiatan | | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Perwujudan Struktur Ruang** | | | | | |
| | **1 Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah** | | | | | |
| | 1.2.1 Prasarana Transportasi | | | | | |
| | 1.2.1.1. Jaringan Jalan Raya dan Jembatan | | | | | |
| | | a. PengembanganJalan Bebas Hambatan ( Jalan Tol Cisumdawu ) | Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisundawu) | | APBN/Swasta | 2019-2023 |
| | | b. Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Arteri | 1 | Batas Kota Cileunyi–Nagreg (Rancaekek– Cileunyi–Cicalengka/ Parakanmuncang) | APBN | 2021-2023 |
| | | | 2 | Jalan Raya Cipacing (Cileunyi), | APBN | 2020-2023 |
| | | | 3 | Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 4 | Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) /Cileunyi- Jatinangor | APBN | 2021-2023 |
| | | | 5 | Jalan Jatinangor-Batas Kota Sumedang | APBN | 2020-2023 |
| | | | 6 | Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 7 | Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 8 | Jalan Pangeran Kornel (Sumedang) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 9 | Jalan Palasari (Sumedang) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 10 | Batas Kota Sumedang-Cijelag | APBN | 2021-2023 |
| | | | 11 | Jalan Prabu Gajah Agung/Pang. Sugih (Sumedang) | APBN | 2020-2023 |
| | | | 12 | Cijelag-Kadipaten | APBN | 2020-2023 |
| | | c. Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer -3 (JKP-3) | 1 | Ruas jalan Sumedang-Batas Sumedang/ Subang (Cikaramas) | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | | 2 | Ruas jalan Sumedang-Situraja | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | | 3 | Ruas jalan Jalan Raya Situraja(situraja) | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | | 4 | Ruas jalan Situraja-Darmaraja | APBN/APBD Provinsi | 2020-2023 |
| | | | 5 | Ruas jalan raya Prabu Tajimalela (Sumedang) | APBN/APBD Provinsi | 2020-2023 |
| | | | 6 | Ruas jalan Lebakjati-Rancakalong-Selaawi | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | | 7 | Ruas jalan SP Kirisk (Wado)-BTS.Sumedang Garut | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | Ruas jalan Wado-Batas Kabupaten Sumedang/ Majalengka (Krisik) | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | 9 | Ruas jalan Cijelag-BTS Sumedang-Indramayu | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | 10 | Ruas jalan BTS Sumedang/Indramayu-Cikamurang | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | | 11 | Ruas jalan Parakan Muncang-Warung Simpang | APBN/APBD Provinsi | 2021-2023 |
| | d. Rencana pengembangan jalan kolektor Primer-3 (JKP-3) | Ruas Jalan Sukasari - Lembang | | APBN/APBD Provinsi | 2020-2023 |
| | e Peningkatan status kewenangan lokal Primer menjadi jalan kolektor primer-3 (JKP-3) | 1 | Ruas jalan Legok-Conggeang | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 2 | Ruas jalan Conggeang-Buahdua | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 3 | Ruas jalan Buahdua-Burujul | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 4 | Ruas jalan Burujul-Sanca | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 5 | Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 6 | Ruas jalan Ujungjaya-Palasah | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 7 | Ruas jalan Cae- Lemahsugih (Batas majalengka) | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 8 | Ruas jalan Jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor-Dangdeur); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 9 | Ruas jalan Jalan lingkar timur Jatigede (Wado Jatigede) | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 10 | Ruas jalan Lingkar Utara Jatigede | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 11 | Ruas jalan lingkar selatan Jatigede (Situraja – Wado) | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 12 | Ruas jalan Alternatif Cadas Pangeran. | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | f Peningkatan kualitas jalan lokal primer | 1 | Cimalaka – Cipadung; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Citengah - Cisoka; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 3 | Cisoka – Cibubut; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 4 | Cibubut – Cibugel; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 5 | Cibugel – BTS. Garut; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 6 | Warung Ketan – Cicau; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 7 | Tanjungsari – Genteng; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 8 | Gudang – Cijambu; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 9 | Parakan muncang – Tegal manggung; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 10 | Cicabe – Cisempur; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 11 | Kadakajaya – Sukasari; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 12 | Nanggerang – Genteng; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 13 | Cilayung – Cinumbangan; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 14 | Caringin – Lio; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 15 | Lio – Jatiroke; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 16 | Barukondang – Kiarapayung; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 17 | Tegalmanggung – Sindulang; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 18 | Cikuda – Nanggerang; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | Cikuda – Cisempur; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 20 | Ciromed – Cikandang; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 21 | Cikadu - Talun; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 22 | Jayalaras – Cipacing; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 23 | Nanggerang – Gunung lingga; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 24 | Jalan Angkrek; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 25 | Legok – Sukatali | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 26 | Babakan bandung – Limus nunggal. | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | g Pembangunan baru jalan lokal primer | 1 | Jalan Lingkar Selatan (Dano – Samoja); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 2 | Jalan Lingkar Utara (Samoja - Cimalaka); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 3 | Jalan Poros Tengah (Tegal Kalong – Karapyak); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 4 | Lingkar Kareumbi (Baginda - Mekarbakti); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 5 | Pasir ringkik – Batudua Gn Lingga; | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 6 | Ujungjaya – Maudin. | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | h Rencana Pengembangan dan Relokasi jalan kolektor primer-1 (JKP-1) | 1 | Jalan Kolektor (K-2) Darmaraja -Wado | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 2 | Jalan lingkar timur Jatigede (Wado Jatigede); | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | | 3 | Jalan Lingkar Barat Jatigede (Cisitu -Jatigede) | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | i Rehabilitasi Jalan dan Jembatan | Jembatan pada Jalan Arteri dan Kolektor | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2019-2023 |
| | | Jembatan pada jalan lokal danl lokal primer | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2019-2023 |
| | 1.2.1.2. Jaringan Prasarana Angkutan Darat dan Angkutan Umum Masal | | | |
| | a Optimaliasai Terminal Type A | Terminal Ciakar (Perkotaan Sumedang) | APBN | 2021-2022 |
| | b Terminal Type B | Terminal Tipe C di Kecamatan Wado dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2021-2022 |
| | c Pembangunan baru Terminal Tipe C | Kecamatan Sumedang Utara, Tanjungkerta, Conggeang, Buahdua, Rancakalong, Sumedang Selatan, Situraja, Tanjungsari, Tomo, Cibugel, dan Jatigede | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2020-2023 |
| | d Pembangunan Terminal Barang | Kec. Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov/APBD Kab | 2022-2023 |
| | 1.2.1.3. Pembangunan Jaringan Angkutan Penyeberangan | | | |
| | a Pembangunan Dermaga / Sub Dermaga | Waduk Jatigede | APBD Kab/Prov, APBN | 2022-2023 |
| | 1.2.1.4. Jaringan Jalan Kereta Api | | | |
| | Jalan Kereta Api | | | |
| | a Reaktivasi Jalur KA | Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari | APBD Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | b Pengembangan Jalan KA | Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon | APBD Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | c Pengembangan Stasiun KA | Perkotaan Jatinangor,Tanjungsari, Perkotaan Sumedang,Perkotaan Tomo dan kawasan industri Ujungjaya | APBD Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022 |
| | d Pembangunan stasiun kereta api cepat (LRT) | Kecamatan Jatinangor | APBD Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022 |
| | 1.2.2. Prasarana Energi | | | |
| | 1.2.2.1. Pengembangan jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas (PLT Panas Bumi/*Geotermal*) | Gunung Tampomas | APBD Prov/kab, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 1.2.2.2. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | Wilayah perkotaan | Swasta/Publik | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | 1.2.2.3. Pengembangan Statsiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) | Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Wado dan Kecamatan Tomo | Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 1.2.2.4. PLTA Waduk Jatigede | Waduk Jatigede | | 2020-2023 |
| | 1.2.2.5. Pengembangan Desa Mandiri Energi | Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan lainnya yang berpotensi menghasilkan biogas | | 2021-2022 |
| | 1.2.2.6. Pengembangan Jaringan dan kapasitas Listrik | Kabupaten Sumedang | | 2021-2023 |
| | 1.2.2.7. Pengembangan Mikrohidro/ energi lainnya | Kabupaten Sumedang | Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | 1.2.3. Prasarana Telekomunikasi | | | |
| | 1.2.3.1. Peningkatan kapasitas sistem sambungan telepon | Kacantel Limbangan, Kadipaten, Rancaekek, Subang, Sumedang dan Tanjungsari | PT. Telkom/Swasta | 2022-2023 |
| | 1.2.3.1. Pengembangan *Base Tranceiver Station* Bersama | Tersebar di Kabupaten Sumedang | PT. Telkom/Swasta | 2022-2023 |
| | 1.2.4. Prasarana Sumber Daya Air | | | |
| | 1.2.4.1. Prasarana Air Baku/Air Bersih | | | |
| | a Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih Perkotaan | Permukiman perkotaan di Kab. Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN | 2020-2023 |
| | b Peningkatan prasarana dan per luasan air baku/bersih perdesaan | Permukiman perdesaan di Kab. Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 1.2.4.2. Pengembangan waduk, situ dan embung | | | |
| | a Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) | 1 WS Cimanuk-Cisanggarung yang merupakan WS Lintas Provinsi; dan | APBN | 2020-2023 |
| | b Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) | DAS Cimanuk, DAS Cipunagara, DAS Citarum; dan DAS Cipanas. | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | c Pengembangan prasarana waduk, bendung dan situ | 1 Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2 Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 3 Waduk Cipasang di Kecamatan Cibugel; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 4 Waduk Kadumalik di Kecamatan Jatinunggal; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 5 Waduk Cipanas Saat di Kecamatan Ujungaya; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 6 Waduk Citarik di Kecamatan Cimanggung; | APBN/APBD Prov | 2019-2023 |
| | | 7 Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | 8 Bendungan Cipanas di Kecamatan Conggeang; | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 9 Situ Cilembang di Kecamatan Buahdua; | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | 10 Situ Lembang di Kec. Rancakalong;dan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | 11 Situ Pangeran di Kecamatan Tanjungkerta | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 1.2.4.3. Prasarana Irigasi | | | |
| | a Pengembangan jaringan irigasi DI Kewenangan Provinsi | 1 DI Sentig | APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2 DI Ujungjaya | APBD Prov | 2023 |
| | b Pengembangan jaringan irigasi DI lintas kabupaten | 1 DI Depok | APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2 DI Cangkuang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | 3 DI Ciranjeng | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2023 |
| | c Pengembangan jaringan irigasi DI kewenangan kabupaten | Seluruh DI yang ada di Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 1.2.4.4. Prasarana Waduk/Bendungan | | | |
| | a Pembangunan Infrastruktur umum di sekitar Waduk Jatigede | Kecamatan Jatigede | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2022 |
| | b Pengembangan antisipasi Genangan Waduk Sadawarna | Kecamatan Surian | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2022 |
| | 1.2.4.5. Sistem Pengendalian Banjir | | | |
| | a Pengembangan embung-embung dan sistem resapan air untuk menampung air hujan dan sekaligus sebagai pengendali banjir | Tersebar di 26 Kecamatan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | |
| | b Pemasangan tembok penahan banjir pada sungai besar di kawasan perkotaan | Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tomo, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | **c** Pengerukan dan pembesihan sampah pada sungai pada kawasan perkotaan | DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | d Peningkatan normalisasi saluran drainase pada kawasan permukiman | Tersebar di 26 Kecamatan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 1.2.5. Prasarana Pengelolaan Lingkungan | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 1.2.5.1. Sistem pengelolaan sampah | | | |
| | a Optimalisasi TPA Cibeureum Wetan menjadi sistem *Sanitary Landfill* | Kecamatan Cimalaka | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | b Pengembangan TPA | 1 Cijeruk Kecamatan Pamulihan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2 Sukanyiru Kecamatan Wado | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | |
| | c Pengembangan TPA regional Cirebon Raya sebagai alternatif lokasi TPA | Perkotaan ujungjaya dan tomo | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit | | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | e Pengembangan TPA Ramah Lingkungan berbasis masyarakat | Masing-masing PPK | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2022 |
| | f Pengembangan TPS | Masing-masing IKK | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2022 |
| | g Pengembangan Proses Pemilahan sampah | Masing-masing PPL hingga tingkat di Bawahnya | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2022 |
| | 1.2.5.2. Limbah Cair dan B3 | | | |
| | a Pengembangan sistem pembuangan limbah rumah tangga di permukiman perkotaan dan perdesaan | Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2021-2022 |
| | b Pengembangan sistem IPAL terpadu industri | 1 Kecamatan Ujungjaya | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2023 |
| | | 2 Jatinangor-Cimanggung | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2023 |
| | | 3 Kecamatan Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2023 |
| | c Penampungan LimbahBatu Bara | Zona Industri Ujungjaya | | 2020-2022 |
| | d Pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit | Kawasan Perkotaan Jatinangor - Cimanggung dan Perkotaan Sumedang | APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2022 |
| | e Pengembangan sistem Pengeloaan limbah pertanian | Seluruh kecamatan di Kab. Sumedang | APBD /Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2022 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | 1.2.5.3. Drainase | | | |
| | a Pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan | Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | b Pemeliharaan sistem drainase untuk mendukung permukiman Perkotaan dan perdesaan | Permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 1.2.6. Sitem sistem jaringan prasarana lainnya | | | |
| | 1.2.6.1. Penetapan jalur evakuasi bencana | Di seluruh desa/kampung yang ada di Kab. Sumedang yang diindikasi sebagai Daerah rawan bencana | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | a Pemetaan kawasan bencana | Tersebar di 26 Kecamatan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | b Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam | Tersebar di 26 Kecamatan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | c Pemasangan tanda / Peringatan dini terhadap daerah rawan Bencana / mitigai bencana | Tersebar di 26 Kecamatan | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 1.2.6.2. Rawan Banjir | Kec. Cimanggung, Sumedang Selatan, Ujungjaya, Tomo, Buahdua dan Surian | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | a Normalisasi Sungai | DAS Cimanuk, DAS Citarum, DAS Cipanas, dan DAS Cipunagara | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | b Rehabilitasi drainase | Jatinangor, Cimanggung | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | c Pengembangan drainase | Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | d Sistem resapan buatan | Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | e Jalur dan Ruang Evakuasi bencana alam | Kabupaten Sumedang | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| **II.** | **Perwujudan Pola Ruang** | | | |
| | 1 Perwujudan Kawasan Lindung | | | |
| | 2.1.1. Kawasan Hutan Lindung | | | |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | 2.1.1.1 Pemeliharaan kawasan hutan lindung; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.2. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.3. Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara kontinu dengan pemanfaatan secara lestari; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.4. Rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.5. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.6. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.7. Rehabilitasi hutan diselengggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah. | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.10. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.1.11. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | | |
| | 2.1.1.11. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua | APBD Kab/Prov, APBN, Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; | | | |
| | 2.1.2.1. Pengendalian dan pelestarian terhadap daerah resapan air | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.1.2.2. Pembuatan sumur resapan pada kawasan permukiman, kawasan industri, dan area rawan banjir dan kekeringan | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 202023 |
| | 2.1.3. kawasan perlindungan setempat; | | | |
| | 2.1.3.1. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan waduk, sempadan sungai, danau dan waduk | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | 2.1.4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; | | | |
| | 2.1.4.1. Penatanaan dan pelestarian Hutan Cagar Alam Gunung Jagat | Hutan Cagar Alam Gunung Jagat | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.1.4.2. Penataan dan Pelestarian Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari | Taman Hutan Raya (TAHURA) Gn. Kunci dan Gn. Palasari | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.1.4.3. Penataan dan Pelestarian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas | Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.1.5. kawasan rawan bencana alam; | | | |
| | 2.1.5.1. Menurunkan bahaya lonsor dengan pembuatan terasering, penghijauan kawasan rawan bencana gerakan tanah | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.5.2. Peningkatan dan perbaikan saluran drainase pada kawasan rawan bencana banjir | Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Ujungjaya, Tomo, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.1.5.3. Peringatan bahaya pada kawasan rawan bencana angin puting beliung | Kecamatan Cimanggung, Cimalaka, Cisarua, Ujungjaya dan Wado | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | 2.1.5.4. Antisipasi dan evakuasi terhadap kawasan rawan bencana Gempa Bumi | Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Cimalaka, Cimanggung, Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, Jatinangor, Jatinunggal, Pamulihan, Paseh, Rancakalong, Situraja, Sukasari, Surian, Tanjungekrta, Tanjungmedar, Tanjungsari, Tomo, Ujungjaya; dan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.1.5.5. Meningkatkan kapasitas direncanakan jalur dan tempat evakuasi bencana | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.1.5.6. Pemasangan tanda / peringatan dini terhadap daerah rawan bencana / mitigasi bencana | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.6. kawasan lindung geologi; | | | |
| | 2.1.6.1. Pengendalian dan pengawassan terhadap kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) | Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.6.2. Pembuatan delineasi zona kritis, zona rawan dan zona aman pada kawasan cenkungan air tanah | Kecamatan Cimanggung, Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua dan Jatinangor | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.6.3. Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sempadan mata air | Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Jatigede, Tomo, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar dan Buahdua | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.1.7. kawasan lindung lainnya | | | |
| | 2.1.7.1. Pelestarian terhadap kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi | Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi | APBN/APBD Prov /Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | 2.1.7.2. Penyediaan dan penataan terhadap ruang terbuka hijau publik pada kawasan perkotaan | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.1.7.3. Pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau privat pada pada halana rumah / gedung | Tersebar di 26 Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2 Perwujudan Kawasan Budidaya | | | |
| | 2.2.1. Kawasan Hutan Produksi | | | |

| No. | Program Utama | | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.1.1. | Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi terbatas | Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.1.2. | Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi terbatas secara lestari | Kecamatan Sumedang Selatan, Ganeas, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatigede, Tomo, Conggeang, Cimalaka, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.1.3. | Penetapan tata batas kawasan Hutan produksi tetap | Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.1.4. | Pemanfaatan/Penguasaan Hutan produksi tetap secara lestari | Kecamatan Pamulihan, Sumedang Selatan, Wado, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.2. | Kawasan Hutan rakyat | | | |
| | 2.2.2.1. | Pengelolaan Hutan berbasis masyarakat lestari | Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.2.2. | Pemanfaatan/ Pengembangan Hutan dengan perlibatan masyarakat/ sebagai inti dalam pola PIR | Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.2.3. | Pemanfaatan/Pengusahaan dan Pengembangan hutan rakyat dan plasma dalam pola PIR | Kecamatan Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Cisarua, Cimalaka, Paseh, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Buahdua, Surian | APBN/APBD Prov/ Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.3. | Kawasan Peruntukan Pertanian | | | |
| | 2.2.3.1. | Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.2. | Pelestarian dan pemanfaatan sumber mata air dalam mendukung sektor pertanian (Pembuatan embung / kolam penampungan air) | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.3. | Penyusunan kajian dan regulasi peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBD Kab | 2019-2023 |

| No. | Program Utama | | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.3.4. | Pengembangan perkebunan rakyat dengan perlibatan masyarakat atau sebagai inti dalam pola Perkebunan inti Rakyat (PIR); | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | |
| | 2.2.3.5. | Pengembangan kegiatan peternakan; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.6. | Optimalisasi budidaya peternakan; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.7. | Pengembangan budidaya peternakan; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.8. | Pengembangan peternakan besar dan kecil; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.9 | Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.10. | Pengembangan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.11. | Budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.12. | Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada di luar area rawan banjir dan longsor; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.13. | Dalam penetapan komoditas kopi, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.3.14. | Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan permukiman dalam perkebunan masing-masing. | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |

| No. | Program Utama | | | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.2.3.15. | Peningkatan dan pengembangan potensi unggulan serta penguatan kelembagaan terhadap para pelaku pertanian, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (Agrobisnis) | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2.2.3.16. | Penguatan industri pertanian dalam mendukung sektor pariwisata (Agrowisata) | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2.2.3.17. | Peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan petani/buruh tani serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan petani / buruh tani | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.4. | Kawasan Peruntukan perikanan | | | | |
| | | 2.2.4.1. | Pengembangan budidaya perikanan kolam dan mina padi | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2.2.4.2. | Pengembangan perikanan perairan umum | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2.2.4.3. | Pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk mendukung Kawasan wisata Waduk Jatigede | Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2.2.4.4. | Pembangunan sarana dan prasarana minapolitan kawasan Tampomas dan Kawasan Waduk Jatigede | Kecamatan Cimalaka, Tanjungkerta, Paseh, Buahdua, conggeang, Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darnaraja, Situraja dan Cisitu | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.5. | Kawasan Peruntukan Pertambangan | | | | |
| | | 2.2.5.1. | Penataan dan penelitian zonasi potensi pertambangan; | Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2.2.5.2. | Pendataan Ulang izin usaha pertambangan; | Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2.2.5.3. | Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap aktivitas pertambangan | Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | | 2.2.5.4. | Reboisasi tanaman untuk menahan tanah;dan | Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |

| No. | Program Utama | | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.5.5. | Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan *enclave* dalam kawasan budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal yang berlaku. | Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Situraja, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Conggeang, Paseh, Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Buahdua dan Surian | APBN/APBD Prov | 2022-2023 |
| | 2.2.6. | Kawasan Peruntukan Industri | | | |
| | 2.2.6.1. | Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri Besar | Kecamatan Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Tomo dan Buahdua | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022 |
| | 2.2.6.2. | Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati; | Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | | Kawasan Hutan Produksi Ujungjaya dan Tomo | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.3. | Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati; | Kecamatan Buahdua | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.5. | Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu di PKL, PPK, dan PPL serta desa dan kelurahan yang potensial; | Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.6. | Membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada *rest area* Tol Cisumdawu; | Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.7. | Menempatkan produk usaha mikro, kecil dan menengah pada rest-rest area dengan pola kemitraan; | Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.8. | Pengembangan aneka produk olahan; | Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.6.9. | Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.6.10. | Peningkatan kemampuan teknologi industri; dan | Kecamatan Ujungjaya, Tomo dan Buahdua | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.6.11. | Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, dan | Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Cimalaka, Paseh, Conggeang dan Ujungjaya | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
| | 2.2.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata | | | |
| | 2.2.7.1. Pengembangan satuan kawasan wisata; | 1 SKW Jatigede | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 2 SKW Kampung Toga | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | 3 SKW Cibimbing | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | | 4 SKW Gunung Lingga | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | | 5 SKW Tamphomas | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | | 6 SKW Jatinangor | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | | 7 SKW Cadaspangeran | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | 2.2.7.2. Penataan benda cagar budaya yang tergenang Waduk Jatigede; | Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.7.3. Pengembangan obyek wisata utama; | Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado, Darmaraja dan Cisitu | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.7.4. Pengembangan budaya, pariwisata dan cagar budaya; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.7.5. Pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya; | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.7.6. Penyusunan kalender wisata kabupaten; dan | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020 |
| | 2.2.7.7. Penyelenggaraan kegiatan festival gelar seni budaya. | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.7.8. Pengembangan Gedung Pusat Informasi dan Komunikasi Kawasan Wisata Jatigede | Kawasan Jatigede | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.7.9. Pengembangan Gedung Moseum Sejarah dan Benda Cagar Budaya Jatigede | Kecamatan Cisitu | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022-2023 |
| | 2.2.7.10 Peningkatan dan Pengembangan Sarana / Prasarana Pariwisata dan Olahraga | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2022 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | 2.2.7.11. Penyelenggaraan festival gelar seni budaya | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.7.12. Pengembangan terminal budaya pada kawasan wisata batudua | Kecamatan Rancakalong | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2022 |
| | 2.2.7.13. Pengembangan geotheater Rancakalong | Kecamatan Rancakalong | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2021 |
| | 2.2.8. Kawasan Peruntukan Permukiman | | | |
| | 2.2.8.1. Permukiman Perkotaan | | | |
| | a Penataan ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan | Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal: | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | b Penataan jalan lingkungan perkotaan | Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal: | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | c Penataan pedestrian lingkungan perkotaan | Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal: | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2021-2023 |
| | d Penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau | Kawasan Perkotaan/Semi Perkotaan/Awal: | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | f Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Kelurahan | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | g Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana keseharan di setiap kelurahan | Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | h Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap kelurahan | Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | i Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunokasi di setiap kelurahan | Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | j Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di perkotaan | Kecamatan Sumedang Setatan dan Sumedang Utara | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | 2.2.8.2. Permukiman Perdesaan | | | |
| | a Penataan ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perdesaan | Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | | |
| | b Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani | Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | c Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan pedesaan | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | d Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/Lansia/Anak terlantar/psikososial pada setiap Desa | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | e Peningkatan dan Pengembangan Pusat Pengelolaan dan Pemberdayaan petani dan buruh tani setiap Desa | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |

| No. | Program Utama | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | | |
| | f Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana keseharan di setiap desa | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | g Peningkatan dan pengembangan sarana ibadah di setiap desa | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | h Peningkatan pelayanan informasi dan telekomunikasi di setiap desa | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |
| | i Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan di pedesaan | Kecamatan Buahdua, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Situraja, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Surian, Kecamatan Tanjungekrta, Kecamatan Tanjungmedar, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tomo, Kecamatan Ujungjaya; dan Kecamatan Wado. | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |

| No. | Program Utama | | Lokasi Kegiatan | Sumber Dana | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.9. | Kawasan peruntukan Lainnya | | | |
| | 2.2.9.1. | Mengembangkan sarana dan prasarana instalasi pembangkit listri tenaga air parakan kondang di jatigede | Kecamatan Jatigede, Cibugel, Conggeang dan Surian | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.9.3. | Meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang; | Kecamatan Jatigede | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.9.4. | Pengembangan Kawasan Pendidikan Jatinangor sebagai Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) berbasis teknologi informasi; | Kecamatan Jatinangor | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.9.5. | Mengembangkan pendidikan tinggi; dan | Kecamatan Jatinangor | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.9.6. | Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan. | Tersebar di Kabupaten Sumedang | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2020-2023 |
| | 2.2.9.7. | Peningkatan dan penataan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) | Kecamatan Sumedang Utara | APBN/APBD Prov /APBD/Swasta/Publik | 2019-2023 |

*Sumber Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2023*

## 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama 5 tahun yang terhubung dengan arah kebijakan dan dipayungi oleh tema/fokus tahunan. Strategi terdiri dari langkah-langkah dalam sasaran yang secara berkesinambungan saling melengkapi dan membentuk rangkaian cerita yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Dalam penyusunan arah kebijakan perlu dipertimbangkan urgensi dari suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut penjelasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang dikorelasikan dengan sebelas strategi pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.4 di bawah ini.

**Tabel 6.4**
**Strategi dan Arah Kebijakan**
**(harus kelihatan arah kebijakan terkait disrupsi)**

| No | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa |
| | | Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif |
| | | Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat |
| 2 | Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan pelayanan | Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak |

| No | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | penanggulangan PMKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia |
| | | Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin |
| 3 | Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat | Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan |
| | | Mendorong pengembangan pendidikan karakter |
| 4 | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi | Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat |
| | | Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi |
| | | Meningkatkan infratruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan |
| 5 | Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang |
| | | Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik |
| | | Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam |
| | | Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan |
| | | Mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim |
| 6 | Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata | Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal |
| | | Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan *event visit wonderful Indonesia* |

| No | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 7 | Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan *aritificial intellegence* | Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima |
| | | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika |
| | | Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi |
| | | Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |
| 8 | Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah |
| | | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitaliasasi pasar tradisional |
| | | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat |
| 9 | Memperkuat ketahanan pangan daerah | Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam |
| 10 | Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang | Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan |
| 11 | Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja |
| | | Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda |
| | | Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif |

*Sumber : Hasil Analisis*

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 6.5**
**Perubahan Tema Tahunan**

| No | Tema Pembangunan Tahunan (Awal) | Perubahan Tema Pembangunan Tahunan |
|---|---|---|
| 1 | **Tema/Fokus Tahun 2019 :** Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang. | **Tema/Fokus Tahun 2019 :** Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang. |
| 2 | **Tema/Fokus Tahun 2020 :** Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk menciptkan pelayanan dasar prima dengan orientasi pada peningkatan pembangunan SDM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. | **Tema/Fokus Tahun 2020 :** Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk menciptkan pelayanan dasar prima dengan orientasi pada peningkatan pembangunan SDM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. |
| 3 | **Tema/Fokus Tahun 2021 :** Penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri. | **Tema/Fokus Tahun 2021 :** Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19 |
| 4 | **Tema/Fokus Tahun 2022 :** Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian daerah | **Tema/Fokus Tahun 2022 :** Akselerasi Sumedang Simpati melalui Inovasi dan Kolaborasi |
| 5 | **Tema/Fokus Tahun 2023 :** Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang agamis, produktif dan mandiri untuk meningkatkan daya saing daerah. | **Tema/Fokus Tahun 2023 :** Memantapkan pembangunan yang inovatif, kolaboratif dan Progresif. |

*Sumber : Hasil Analisis*

Berdasarakan tema diatas maka arah kebijakan dijabarkan dalam horison waktu sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Dengan adanya penentuan horison waktu maka susunan arah kebijakan secara logis akan dilaksanakan secara bertahap dimana suatu arah kebijakan dapat mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Fokus arah kebijakan pada periode RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.6.**
**Fokus Arah Kebijakan pada Tema Tahunan**

| No | Arah Kebijakan | Fokus pada Tema Tahunan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa | | | | | |
| 2 | Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif | | | | | |
| 3 | Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat | | | | | |
| 4 | Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak | | | | | |
| 5 | Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia | | | | | |
| 6 | Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin | | | | | |
| 7 | Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan | | | | | |
| 8 | Mendorong pengembangan pendidikan karakter | | | | | |
| 9 | Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat | | | | | |
| 10 | Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi | | | | | |
| 11 | Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan | | | | | |

| No | Arah Kebijakan | Fokus pada Tema Tahunan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12 | Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal | | | | | |
| 13 | Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia | | | | | |
| 14 | Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan | | | | | |
| 15 | Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam | | | | | |
| 16 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang | | | | | |
| 17 | Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik | | | | | |
| 18 | Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam | | | | | |
| 19 | Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan | | | | | |
| 20 | Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim | | | | | |
| 21 | Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima | | | | | |
| 22 | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis | | | | | |

| No | Arah Kebijakan | Fokus pada Tema Tahunan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | teknologi dan informatika | | | | | |
| 23 | Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi | | | | | |
| 24 | Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | | | | |
| 25 | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah | | | | | |
| 26 | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional | | | | | |
| 27 | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | | | | | |
| 30 | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja | | | | | |
| 31 | Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda | | | | | |
| 32 | Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif | | | | | |

*Sumber : Hasil Analisis*

Fokus arah kebijakan Selain program unggulan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program Dengan Indikator Program sebagaimana Tabel 6.7

**Tabel 6.7**
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2018-2023**

| No | JENIS PELAYAN DASAR SPM | PROGRAM LAMA | INDIKATOR PROGRAM | PROGRAM BARU | INDIKATOR PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **PENDIDIKAN** | | | | | |
| | Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD | Dinas pendidikan |
| | pendidikan dasar | Program Pendidikan Dasar | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP | |
| | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SD | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | | | |
| | | | Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik | | | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | | | |
| | pendidikan kesetaraan. | Program Kesetaraan | Angka Partisipasi Murni Paket A | | | |
| | | | Angka Partisipasi Murni Paket B | | | |
| | | | Angka Partisipasi Murni Paket C | | | |
| 2 | **KESEHATAN** | | | | | |
| | pelayanan kesehatan ibu hamil | | Persentase Anemia Pada Ibu Hamil | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| No | JENIS PELAYAN DASAR SPM | PROGRAM LAMA | INDIKATOR PROGRAM | PROGRAM BARU | INDIKATOR PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | | Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | yang memenuhi standar | |
| | pelayanan kesehatan ibu bersalin | | | | Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar | |
| | pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | Persentase BBLR | | Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan | |
| | pelayanan kesehatan balita; | | Persentase balita gizi lebih | | | |
| | pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; | | Persentase balita kurus | | | |
| | pelayanan kesehatan pada usia produktif; | | Persentase anak kelas 1-7 dan 10 mendapat screening kesehatan | | | |
| | pelayanan kesehatan pada usia lanjut; | | Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | | | |
| | pelayanan kesehatan penderita hipertensi; | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Surveialns epidemiologi | Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular sesuai standar | | | |
| | pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; | | | | | |
| | pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; | | | | | |
| | pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan | | Persentase Penanganan Penyakit Menular sesuai standar | | | |
| | pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus | | | | | |

| No | JENIS PELAYAN DASAR SPM | PROGRAM LAMA | INDIKATOR PROGRAM | PROGRAM BARU | INDIKATOR PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| | pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase sarana air minum yang terbangun | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik | 1. Prosentase Sanitasi yang terbangun<br>2. Jumlah SPALD yang terbangun | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 4 | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | |
| | penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; | Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1. Luas Pengurungan Permukiman kumuh<br>2. Cakupan Ketersedinaan Rumah Layak Huni | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh | |
| | | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Sarana, Prasarana dan Utulitas Umum yang dibangun dan dikembangkan | |
| | fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | | | | | |
| 5 | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT** | | | | | |
| | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; | Program Peningkatan Keamanan dan | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, | Satuan Polisi Pamomg Praja |

| No | JENIS PELAYAN DASAR SPM | PROGRAM LAMA | INDIKATOR PROGRAM | PROGRAM BARU | INDIKATOR PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kenyamanan Lingkungan | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | | Ketertiban, dan Ketentraman) | |
| | | | | | Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani | Satuan Polisi Pamomg Praja |
| | | Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | | | |
| | pelayanan informasi rawan bencana | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | Badan penanggulangan bencana daerah |
| | pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | |
| | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; d | | Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam | | Persentase Penanganan Pasca Bencana | |
| | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. | Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Satuan Polisi Pamomg Praja |
| | | | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | | | |
| 6 | SOSIAL | | | | | |
| | rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | | Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut | Dinas sosial |

| No | JENIS PELAYAN DASAR SPM | PROGRAM LAMA | INDIKATOR PROGRAM | PROGRAM BARU | INDIKATOR PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | |
| | rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; | | Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | | | |
| | rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; | | Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | |
| | rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | |
| | perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Program Perlindungan Sosial | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Program Penanganan Bencana | Persentase Penanganan Bencana | Dinas sosial |
| | | Program Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | | | |

Merujuk arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan di atas maka disampaikan keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pada Tabel 6.8 serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tabel 6.9 di bawah ini.

**Tabel 6.8.**
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**
**Kabupaten Sumedang**

| **VISI : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023** | | |
|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** |
| **MISI 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.** | | |
| **Tujuan 1 :** Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat | 1. **Sasaran 1.1:** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan dan Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi |
| | 2. **Sasaran 1.2:** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan | |
| | 3. **Sasaran 1.3:** Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | **Strategi:** Percepatan penangggulangan kemiskinan dan Peningkatan |
| | 4. **Sasaran 1.4**: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak | **Strategi:** pelayanan penanggulangan PPKS serta Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| **MISI 2 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.** | | |
| **Tujuan 2:** Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang | 1. **Sasaran 2.1:** Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama | **Strategi:** Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat |
| **MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal** | | |
| **Tujuan 3:** Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan | 1. **Sasaran 3.1:** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri | **Strategi:** Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani dan mendorong pengembangan wilayah ekonomi |
| | 2. **Sasaran 3.2:** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis | |
| | 3. **Sasaran 3.3:** Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata | **Strategi:** Pengembangan wilayah ekonomi pariwisata |
| | 4. **Sasaran 3.4:** Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian | |
| | 5. **Sasaran 3.5:** Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | **Strategi:** Memperkuat ketahanan pangan daerah |
| | 6. **Sasaran 3.6:** Meningkatnya Ketahanan Daerah | **Strategi:** Peningkatan fungsi kawasan lindung serta meningkatkan kelestarian, kebersihan, dan penataan lingkungan |
| | 7. **Sasaran 3.7:** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | |
| | 8. **Sasaran 3.8:** Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | **Strategi:** Peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sumedang |
| **MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat** | | |
| **Tujuan 4:** Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | 1. **Sasaran 4.1:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | **Strategi:** Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan *aritificial intellegence* |
| | 2. **Sasaran 4.2:** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | |

| **VISI : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023** | | |
|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** |
| | 3. **Sasaran 4.3:** Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah | |
| **MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang** | | |
| **Tujuan 5:** Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing | **1. Sasaran 5.1:** Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat | **1. Strategi:** Peningkatan kapasitas ekonomi usaha mikro dan kecil melalui digitalisasi dan kolaborasi antar generasi |
| | | **2. Strategi:** Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja |

**Tabel 6.9**
**Arah Kebijakan Pembangunan**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| | | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa | Meningkatkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa |
| | | Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif | Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif | Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif |
| | Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat | Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat | | Meningkatkan sarana prasarana dan inovasi dalam pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat |
| | | Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak | | Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | | Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia | | Meningkatkan Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan rumah besar penanganan fakir miskin/lansia |
| Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin | | Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin | | Meningkatkan pemenuhan perumahan dan pemukiman layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin |
| | | Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan | | Mewujudkan nilai-nilai Agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan |
| | | Mendorong pengembangan pendidikan karakter | | Mendorong pengembangan pendidikan karakter |
| Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan | | Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan | Meningkatkan kemantapan jalan sebagai koneksitas dan | |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat | | aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat | aksebilitas aktivitas perekonomian masyarakat | |
| Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi | | Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi | Meningkatkan kemantapan sistem perhubungan dan transportasi | |
| Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan | | Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan | Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan | |
| Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal | | Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal | Meningkatkan pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal | |
| Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia | | Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia | Mengembangkan destinasi pariwisata dan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event visit wonderful Indonesia | |
| Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan | | Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan | Meningkatkan jumlah penanaman modal yang mendukung pengembangan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan | |
| Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam | | Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam | Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam | |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang | |
| Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik | | Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik | Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah domestik | |
| Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung | | Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung | Meningkatkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung | |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam | | lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam | lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam | |
| Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan | | Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan | Meningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas lingkungan perumahan/permukiman yang berkelanjutan | |
| Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim | | Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim | Mengurangi Resiko Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim | |
| Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima | Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima | | Meningkatkan pelayanan administrasi dan perizinan yang prima | |
| Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika | | | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika |
| Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi | Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi | | | Menguatkan institusi pemerintahan dan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi |
| Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | | Mengembangkan sistem *e-government* untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |
| Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah | | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah | Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah |
| Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional | | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional |
| Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan | | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan | Menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan |

| Arah Kebijakan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| ekonomi masyarakat | | ekonomi masyarakat | ekonomi masyarakat | ekonomi masyarakat |
| Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja | | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan | Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan |
| Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda | | Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda | Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda | Membangun Sumedang *Preneurship* berbasis profesionalitas dan kreativitas melalui Gerakan Wirausaha Muda |
| Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif | | Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif | Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif | Mengoptimalikan pengembangan sektor ekonomi kreatif |

*Sumber : Hasil analisis*

Selanjutnya, sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan, maka sasaran, strategi dan arah kebijakan wajib dijabarkan ke dalam program-program yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan skenario penetapan target indikator dan target pagu indikatif yang realistis. Program-program tersebut dinamakan program prioritas yang langsung ditujukan untuk mencapai sasaran RPJMD atau sasaran kepala daerah. Secara rinci, penjelasan tersebut dijabarkan pada Tabel 6.10.a dan Tabel 6.10.b

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | **Angka harapan lama sekolah** | **Tahun** | **12.91-12.98** | | |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Kesiapan Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Persen | 100 | 271.991.941.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 119,37 | | |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 89,48 | | |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,06 | | |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,78 | | |
| | | Persentase Sekolah Pendiidkan Kondisi Bangunan Baik | Persen | 37,4 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,03 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,40 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 2,83 | | |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 99,00 | | |
| | | Rata rata peningkatan hasil UN | Persen | 57,20 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Pendidikan | Persen | 88,03 | | |
| | | Persentase siswa yang berpastisipasi aktif dalam pendidikan Diniyah | Persen | 100 | | |
| 1.3. | **Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **9,71-10,75** | | |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | | 2.325.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 21,91 | 2.980.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | Persen | 100 | 1.369.905.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Sarana Air | Persen | 71,4 | 8.632.373.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.4 | **Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak** | **Indeks Pembangunan Gender** | **Poin** | **95,81** | | |
| | | **Indeks Pemberdayaan Gender** | **Poin** | **70,80** | | |
| 2.08.03 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 1.050.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 29,03 | 975.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan | Persen | 100 | 1.200.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | Persen | 42,31 | 400.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Perlindungan Khusus Anak | Persen | 100 | 275.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 2,73 | 709.850.000,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| **Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang** | | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | **Poin** | **73,5** | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.1** | **Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama** | **Indeks kerukunan umat beragama** | **Poin** | **73,5** | | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 102.500.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat Pendidikan Partai Politik | Persen | 100 | 1.171.246.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang aktif | Persen | 70,10 | 105.000.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya | Persen | 100 | 412.000.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 2.195.300.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Rasio petugas Perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT) | Persen | 75 | 5.119.155.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) | Persen | 100 | | |
| | | Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | | |
| **MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** | | | | | | |
| Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **3.66 – 4.70** | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | **Indeks Resiko Bencana** | **Poin** | **145** | | |
| 1.1 | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri** | **Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan** | **Persen** | **5.38** | | |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | Persen | 40 | 1.431.860.000,00 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | Persen | 5 | 355.077.000,00 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Pembangunan Kawasan Industri | Persen | 15,00 | 1.169.597.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 1.2 | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis** | **Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** | **Persen** | **3.13-4.97** | | |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 35,77 | 434.395.044.980,97 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | 100,00 | 7.100.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3:27:03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1.824 | 12.306.500.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100,00 | 8.300.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | 100 | 75.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3:27:07 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 38,77 | 2.761.200.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 2.650.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 400.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 1.3 | **Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata** | **Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | **persen** | **0.23-1.74** | | |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase OPK yang dikembangkan | Persen | 63,64 | 1.650.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | persen | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.05 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | persen | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | Jumlah Kunjungan wisatawan musieum | persen | 5,67 | 400.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 5 | 670.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 2 | 1.350.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.4 | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian** | **Indeks Kualitas Infrastruktur** | **Persen** | **71,65** | | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 77,30 | 143.549.725.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase PSU di Lingkungan komplek Perumahan/ Permukiman (Pengembang) | Persen | 82,67 | 1.400.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 51,83 | 31.500.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Pelayanan Angkutan Laik Jalan | Persen | 50 | 7.617.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 33,33 | 670.944.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 45,20 | 32.402.003.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.5 | **Meningkatnya Ketahanan Daerah** | **Indeks Ketahahan Daerah** | **Poin** | **0,47** | | |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | Persen | 100 | 4.360.650.100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 3.200.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persen | 100 | 500.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 90 | 2.000.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3:27:05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95,00 | 712.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 15,00 | 812.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persen | 0 | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 1.050.000.000,00 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 1.6 | **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** | **Skor Pola Pangan Harapan** | **persen** | **88** | | |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 600.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 92,5 | 1.775.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 2.09.03 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 215.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 300.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.30.04 | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Presentase Pengawasan dan Pengendalian Stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 4,00 | 400.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 1.7 | **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Poin** | **71,1** | | |
| 3.30.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 4 | 715.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persen | 100 | 254.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Indeks Tutupan vegetasi (ITV) | Poin | 0,39 | 596.550.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 0 | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten | Persen | 31,82 | 655.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Komunitas | 0 | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Lembaga | 25 | 80.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penyelesain sengketa PPLH | Desa/ Kelurahan | 0 | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 68,54 | 440.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.** | | | | | | |
| **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **75** | | |
| 1.1 | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **Nilai SAKIP Kabupaten** | **Kategori** | **A** | | |
| | | **Opini BPK** | **Opini** | **WTP** | | |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 262.806.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 1.409.569.250,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 262.806.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 1.209.297.050,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 1.454.400.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 3.206.935.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 94 | 904.415.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 1.390.018.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 92 | 1.183.648.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 92 | 1.028.358.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 89 | 1.629.181.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 85 | 1.403.504.260,00 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar | Persen | 90 | 3.301.200.000,00 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan | Persen | 100 | 820.776.351,00 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 360 | 1.276.550.000,00 | Inspektorat Kabupaten |
| | | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 450 | 4.126.973.000,00 | Inspektorat Kabupaten |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Presentase pemenuhan elemen IACM | | | | Inspektorat Kabupaten |
| | | Cakupan Zona Integritas | | | | Inspektorat Kabupaten |
| **1.2** | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **Poin** | **86** | | |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 1.231.253.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 95 | 1.230.150.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 70 | 5.081.235.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 296.212.600,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| 2.12.01 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | Persen | 97 | 1.567.007.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Kepemilikan KTP | Persen | 97 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Kepemilikan KIA | Persen | 30 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun | Persen | 97 | 339.400.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Kepemilikan Akte Kematian | Persen | 10 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim | Persen | 4 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 80 | 294.122.000,00 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak | Persen | 90 | 885.704.489,00 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 2.16.02 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah | Persen | 42,50 | 1.675.000.000,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Persandian Dan Statistik |
| X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik | Persen | 100 | 58.370.290.368,00 | **Dinas Kesehatan** |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis | Persen | 91 | 166.514.864.016,00 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan | Persen | 91 | | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis | Persen | 91 | | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| 1.3 | **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah** | **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** | **Poin** | **4** | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | **Persen** | **100** | 37.411.957.500,00 | 26 Kecamatan |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 90 | 4.955.000.000,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Persandian Dan Statistik |
| | | Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 75 | 928.282.200,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Persandian Dan Statistik |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi | Persen | 100 | 534.000.000,00 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Persandian Dan Statistik |
| **MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG** | | | | | | |
| Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing | | **PDRB per Kapita** | **Rp (juta)** | **30.75-32.08** | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | Rp. | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1.1 | **Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat** | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **Persen** | **9,05-8,00** | | |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 1.906.897.000,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 100 | 1.320.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 2 | 1.150.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 0,15 | 1.885.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,15 | 7.374.500.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya | Orang | 60 | 650.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 125.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |

# Tabel 6.10.b
# Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sumedang
# Tahun 2022-2023

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **MISI 1 : MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT SECARA MUDAH DAN TERJANGKAU.** | | | | | | | | | |
| **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat** | | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Poin** | **71.93-72.48** | | **72.40-73.37** | | **73.37** | |
| | | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **10.41-9,54** | | **9,70-7,56** | | **7,56** | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** | **Angka Harapan Hidup** | **Persen** | **72.65-72.82** | | **72.70-73.20** | | **73.20** | |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar | Persen | 100 | 96.693.503.000,00 | 100 | 105.732.503.000,00 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 669.687.816.149,00 | 100 | 645.837.677.591,00 | 100 | |
| 1.02.03 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 60 | 1.575.000.000,00 | 75 | 1.950.000.000,00 | 75 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 | Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 100 | 550.000.000,00 | 100 | 960.000.000,00 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri | Persen | 20 | 750.000.000,00 | 25 | 1.000.000.000,00 | 25 | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga | | 60 | 300.000.000,00 | 65 | 600.000.000,00 | 65 | Dinas Kesehatan |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1.2 | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan** | **Rata – rata lama sekolah** | **Tahun** | **8.58-8.80** | | **8.81-9.00** | | **9.00** | |
| | | **Angka harapan lama sekolah** | **Tahun** | **12.99-13.04** | | **13.05-13.12** | | **13.12** | |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD | Persen | 100 | 195.786.517.680,00 | 100 | 234.943.821.216,00 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP | Persen | 100 | 91.559.372.400,00 | 100 | 109.871.246.880,00 | 100 | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | Persen | 100 | 11.296.390.800,00 | 100 | 13.555.668.960,00 | 100 | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Persen | 100 | 22.791.799.200,00 | 100 | 27.350.159.040,00 | 100 | |
| 1.3. | **Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** | **Persentase Penduduk Miskin** | **Persen** | **10.41-9,54** | | **9,70-7,56** | | **7,56** | |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | 12,64 | 275.000.000,00 | 16,2 | 275.000.000.000 | 16,25 | Dinas Sosial |
| | | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | 1.750.000.000,00 | 58,33 | 1.250.000.000,00 | 58,33 | Dinas Sosial |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 33,08 | 1.425.000.000,00 | 44,25 | 1.530.950.900,00 | 44,25 | Dinas Sosial |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar | Persen | 98,00 | 3.900.000.000,00 | 98 | 3.916.349.700,00 | 98 | Dinas Sosial |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak | Persen | 73,6 | 50.157.991.000,00 | 76,90 | 74.369.986.500,00 | 76,90 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana | Persen | 53,3 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.4 | **Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak** | **Indeks Pembangunan Gender** | **Poin** | **96,28** | | **96,75** | | **96,75** | |
| | | **Indeks Pemberdayaan Gender** | **Poin** | **70,84** | | **71,37** | | **71,37** | |
| 2.08.03 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 1.050.000.000,00 | 100 | 1.050.000.000,00 | 100 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 45,16 | 975.000.000,00 | 61,29 | 975.000.000,00 | 61,29 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan | Persen | 100 | 1.200.000.000,00 | 100 | 1.200.000.000,00 | 100 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persen | 46,15 | 550.000.000,00 | 65,38 | 550.000.000,00 | 57,69 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan | Persen | 100 | 1.400.000.000,00 | 100 | 1.400.000.000,00 | 100 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB, BKR dan BKL) | Persen | 18,30 | 980.637.300,00 | 20,87 | 389.651.962,00 | 20,87 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 3,53 | 980.637.300,00 | 4,33 | 389.651.961,00 | 4,33 | |
| **MISI 2 : MENGUATKAN NORMA AGAMA DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| **Terwujudnya kehidupan yang agamis di Kabupaten Sumedang** | | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | **Poin** | **74** | | **74,5** | | **74,5** | |
| **1.1** | **Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama** | **Indeks kerukunan umat beragama** | **Poin** | **74** | | **74,5** | | **74,5** | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 370.000.000,00 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat Pendidikan Partai Politik | Persen | 100 | 1.012.246.000,00 | 100 | 1.027.246.000,00 | 100 | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang aktif | Persen | 85,05 | 400.000.000,00 | 100 | 830.000.000,00 | 100 | |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya | Persen | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.195.000.000,00 | 100 | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 2.163.800.000,00 | 100 | 3.510.000.000,00 | 100 | |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) | Persen | 100 | 2,200,000,000,00 | 100 | 5,775,000,000,00 | 100 | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | | Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 1,270,000,000,00 | 100 | 1,650,000,000,00 | 100 | |
| **MISI 3 : MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL** | | | | | | | | | |
| Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **4.70-5.70** | | **5.20-6.20** | | **7,00** | |
| | | **Indeks Resiko Bencana** | **Poin** | **140** | | **135** | | **135** | |
| 1.1 | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri** | **Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan** | **Persen** | **2.20 - 4.15** | | **4.15 - 6.40** | | **6.40** | |
| 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Pembangunan Kawasan Industri | Persen | 30,00 | 2.573.258.200,00 | 45,00 | 3.000.000.000,00 | 45,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Jumlah pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota | Laporan | 14 | 400.000.000,00 | 14 | 400.000.000,00 | 28 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Jumlah pengelolaan sistem informasi industri nasional | Laporan | 4 | 900.000.000,00 | 12 | 900.000.000,00 | 16 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 1.2 | **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis** | **Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** | **Persen** | **3.45-5.28** | | **3.76-5.59** | | **5,59** | |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 52,92 | 459.597.287.831,29 | 70,07 | 609.273.656.266,83 | 70,07 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan pengembangan sarana pertanian | Persen | 47,08 | 2.700.000.000,00 | 29,93 | 3.150.000.000,00 | 29,93 | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | 100 | 8.900.000.000,00 | 100 | 10.350.000.000,00 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3:27:03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1.952 | 49.820.395.412,80 | 2.088 | 58.026.474.495,36 | 2.234 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100 | 9.950.000.000,00 | 100 | 5.250.000.000,00 | 100,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3:27:07 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 34,00 | 3.628.800.000,00 | 27,37 | 2.865.000.000,00 | 100,13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 5.175.000.000,00 | 100 | 5.750.000.000,00 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 1.450.000.000,00 | 100 | 805.000.000,00 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3:27:05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95,00 | 725.000.000,00 | 95,00 | 738.000.000,00 | 95,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 12,00 | 825.000.000,00 | 10,00 | 838.000.000,00 | 10,00 | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persen | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 1.3 | **Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata** | **Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** | **persen** | **4.50-6.01** | | **8.77-10.27** | | **10.27** | |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase OPK yang dikembangkan | Persen | 72,73 | 38.591.359.000,00 | 100 | 2.500.000.000,00 | 100 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 2.22.04 | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Sejarah Lokal yang dibina | persen | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | |
| 2.22.05 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | persen | 100 | 470.000.000,00 | 100 | 470.000.000,00 | 100 | |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | Jumlah Kunjungan wisatawan musieum | orang | 3000 | 17.400.000.000,00 | 4000 | 500.000.000,00 | 4000 | |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 6 | 3.750.000.000,00 | 7 | 1.650.000.000,00 | 25 | |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 14 | 2.650.000.000,00 | 14 | 3.000.000.000,00 | 14 | |
| **1.4** | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian** | **Indeks Kualitas Infrastruktur** | **Persen** | **74,65** | | **77,65** | | **77,65** | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 81,30 | 292.239.571.883,00 | 85,30 | 299.763.572.175,00 | 85,30 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Cakupan Drainase Lingkungan yang ditangani | Persen | 1,57 | 2.825.000.000,00 | 2,31 | 3.487.500.000,00 | 2,31 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 64,88 | 12.929.000.000,00 | 77,27 | 16.229.000.000,00 | 77,27 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Pelayanan Bidang Perhubungan | Persen | 80 | 7.992.500.000,00 | 90 | 8.094.675.000,00 | 90 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Jaringan dan Manaen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 50 | 910.000.000,00 | 66,67 | 260.000.000,00 | 66,67 | Dinas Perhubungan |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 46,60 | 86.035.336.000,00 | 47,50 | 34.253.356.006,00 | 47,50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.5 | **Meningkatnya Ketahanan Daerah** | **Indeks Ketahahan Daerah** | **Poin** | **0,49** | | **0,51** | | **0,51** | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | Persen | 100 | 6.953.338.750,00 | 100 | 7.053.338.750,00 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 3.500.000.000,00 | 100 | 3.888.396.450,00 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 90 | 2.800.000.000,00 | 90 | 6.675.00.,000,00 | 90 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 925.000.000,00 | 100 | 925.000.000,00 | 100 | Dinas Sosial |
| **1.6** | **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** | **Skor Pola Pangan Harapan** | **persen** | **89,4** | | **90,2** | | **90,2** | |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 5.110.000.000,00 | 100 | 7.060.000.000,00 | 100 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 94,5 | 4.115.000.000,00 | 95 | 4.760.000.000,00 | 95 | |
| 2.09.03 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 1.420.000.000,00 | 100 | 1.510.000.000,00 | 100 | |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 1.620.000.000,00 | 100 | 1.984.000.000,00 | 100 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.30.04 | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Presentase Pengawasan dan Pengendalian Stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 12,00 | 370.000.000,00 | 12,00 | 450.000.000,00 | 12,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| **1.7** | **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **Poin** | **71,1** | | **71,8** | | **71,8** | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 3.30.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 4 | 520.000.000,00 | 2 | 100.000.000,00 | 13 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persen | 100 | 458.000.000,00 | 100 | 602.000.000,00 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Indeks Tutupan vegetasi (ITV) | Poin | 0,41 | 914.200.000,00 | 0,42 | 1.008.100.000,00 | 0,42 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 5 | 20.000.000,00 | 7 | 30.000.000,00 | 45 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten | Persen | 34,04 | 337.500.000,00 | 36 | 430.000.000,00 | 36 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Komunitas | n/a | 100.000.000,00 | 2 | 100.000.000,00 | 2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Lembaga | 36 | 170.000.000,00 | 42 | 190.000.000,00 | 84 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penyelesain sengketa PPLH | Desa/ Kelurahan | 8 | 120.000.000,00 | 16 | 200.000.000,00 | 24 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 69,66 | 1.344.472.200,00 | 70,79 | 1.313.824.400,00 | 70,79 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1.8** | **Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang** | **Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang** | **Persen** | **20** | | **20** | | **30** | |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | | 60 | 1.200.026.650,00 | 90 | 1.236.442.036,00 | 90 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 | 4 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **MISI 4 : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT.** | | | | | | | | | |
| **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi** | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Poin** | **80** | | **85** | | **85** | |
| 1.1 | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan** | **Nilai SAKIP Kabupaten** | **Kategori** | **A** | | **A** | | **A** | |
| | | **Opini BPK** | **Opini** | **WTP** | | **WTP** | | **WTP** | |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 1.410.000.000,00 | 100 | 1.526.000.000,00 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Berkategori Baik | Persen | 100 | 1.210.100.000,00 | 100 | 1.234.350.000,00 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 2.512.500.000,00 | 100 | 2.690.750.000,00 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 2.876.000.000,00 | 100 | 2.940.000.000,00 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan | Persen | 100 | 4.442.769.300,00 | 100 | 4.817.046.230,00 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | | Kewilayahan berkategori Baik | | | | | | | |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 95 | 1.450.000.000,00 | 97 | 1.650.000.000,00 | 97 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 2.230.000.000,00 | 100 | 2.900.000.000,00 | 100 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 95 | 550.000.000.000,00 | 97 | 610.000.000.000,00 | 97 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 95 | 2.700.000.000,00 | 97 | 3.110.000.000,00 | 97 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 90 | 1.484.950.000,00 | 91 | 2.009.709.000,00 | 91 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 85 | 7.411.185.100,00 | 90 | 11.449.000.000,00 | 90 | Badan Pendapatan Daerah |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase pemenuhan unsur SPIP | Persen | 100 | 6.254.359.280,00 | 100 | 7.122.595.208,00 | 340 | Inspektorat Kabupaten |
| | | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi | Persen | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 400 | Inspektorat Kabupaten |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Presentase pemenuhan elemen IACM | Persen | 100 | 1.207.469.765,00 | 100 | 1.394.000.000,00 | 100 | Inspektorat Kabupaten |
| | | Cakupan Zona Integritas | Persen | 100 | 1.117.000.000,00 | 100 | 1.276.200.000,00 | 100 | Inspektorat Kabupaten |
| **1.2** | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **Poin** | **89** | | **92** | | **92** | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 2.730.000.000,00 | 100 | 3.003.000.000,00 | 100 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 98 | 1.916.800.000,00 | 100 | 2.108.480.000,00 | 100 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 85 | 16.614.485.600,00 | 100 | 18.275.934.160,00 | 100 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 835.600.000,00 | 100 | 919.160.000,00 | 100 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| 2.12.01 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependuduka | Persen | 98 | 1.951.206.860 00 | 98 | 2.243.888.050,00 | 98 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 98 | 1.408.200.000,00 | 99 | 1.619.430.000,00 | 99 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 83 | 598.672.695,00 | 87 | 632.416.648,00 | 87 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | | 80 | 450.000.000,00 | 85 | 450.000.000,00 | 85 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data PM dan Perizinan yang Valid | | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak | Persen | 91 | 1.135.704.489,00 | 91 | 2.050.000.000,00 | 91 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 2.16.02 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah | Persen | 50 | 2.180.000.000,00 | 60 | 2.470.000.000,00 | 60 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Persandian Dan Statistik |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan BLUD yang memadai | Persen | 100 | 225.283.024.166,00 | 100 | 263.02.,034.959,00 | 100 | **Dinas Kesehatan** |
| 1.3 | **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah** | **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** | **Poin** | **4,1** | | **4,2** | | **4,2** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 41.042.239.675,00 | 100 | 45.627.510.847,00 | **100** | 26 Kecamatan |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 95 | 5.370.000.000,00 | 100 | 5.515.000.000,00 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| | | Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 90 | 1.175.000.000,00 | 100 | 1.700.000.000,00 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi | Persen | 100 | 607.000.000,00 | 100 | 681.000.000,00 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| **MISI 5 : MENGEMBANGKAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG MENDUKUNG KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMEDANG** | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Perekonomian Sumedang yang Kreatif dan Berdaya Saing | | **PDRB per Kapita** | **Rp (juta)** | **32.09-33.84** | | **33.85-34.70** | | **34.70** | |
| 1.1 | **Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat** | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **Persen** | **8.78-7.99** | | **8.18-6.95** | | **6.95** | |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 3.550.350.000,00 | 100 | 3.550.350.000,00 | 100 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 100 | 1.750.000.000,00 | 100 | 1.597.200.000,00 | 100 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam | Persen | 100 | 110.000.000,00 | 100 | 130.000.000,00 | 100 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |

| Misi/Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) | SATUAN | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | Rp. | 2023 | Rp. | KONDISI AKHIR | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 2.17.03 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Persen | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.04 | Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian | Persen | 12,08 | 506.097.000,00 | 22,08 | 600.000.000,00 | 22,08 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.04 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | Persen | 5,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 5,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 0,34 | 7.440.000.000,00 | 0,5 | 8.090.000.000,00 | 0,5 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,22 | 7.040.000.000,00 | 0,4 | 7.640.000.000,00 | 0,4 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya | Orang | 120 | 700.000.000,00 | 140 | 1.000.000.000,00 | 320 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 1.475.000.000,00 | 16 | 2.000.000.000,00 | 16 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |

## 6.4 Program unggulan

Program Unggulan merupakan program khusus janji politik yang disampaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023. Dibuat sebagai suatu kegiatan yang mencirikan percepatan pencapaian sasaran pada misi dalam mewujudkan Visi Sumedang Simpati 2023. Dalam operasionalisasinya, Program Unggulan melebur kedalam program/kegiatan yang ada pada OPD karena tidak ada peraturan yang memungkinkan untuk membuat kodefikasi khusus untuk Program Unggulan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada setiap Program Unggulan adalah sebagai berikut :

1. Sumedang Agamis

   Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sertifikasi diniyah bagi lulusan SD dan sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan sederajat, memberikan insentif guru ngaji/ustad/takmir masjid, pelaksanaan Subuh Berjamaah di setiap mesjid kecamatan yang diikuti Bupati - Wakil Bupati dan para pejabat, taklim aparatur di setiap OPD, safari Ramadhan, pengembangan Koperasi Syariah di setiap Mesjid Besar Kecamatan, Magrib Mengaji On Line (MMO) setiap hari kerja dipandu oleh Bupati, Masjid Al Kamil IPP, dan Masjid Al Kami Panenjoan Jatigede. Program Unggulan Agamis ini mengakselerasi pencapain Sasaran Misi ke-2, yaitu Menguatnya kondisi kehidupan kerukunan umat beragama.

2. Rumah Besar Fakir Miskin sampai dengan Tingkat Desa

   Rumah Besar Fakir Miskin merupakan suatu sistem penanggulangan kemiskinan terpadu yang melibatkan berbagai program dan stakeholder mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Rantang Simpati (pemberian bantuan makanan harian dari Kecamatan kepada lansia miskin), Puskesos di 270 desa, Sekretariat Rumah Besar, Integrasi penanganan fakir miskin, SSQR/Sumedang Simpati Quick Response ( Saluran WA untuk menampung dan merespon keluhan/permohonan masyarakat atas permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan). Dengan adanya berbagai kegiatan Rumah Besar Fakir Miskin tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi sasaran Misi ke-1.

3. Sumedang Buludru :

Salah satu sasaran Misi ke-3 adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah. Kondisi lingkungan yang indah, bersih, nyaman, dan aman mendukung perwujudan ketahanan daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembentukan URC (Unit Reaksi Cepat) Persampahan. Penataan Alun-Alun Sumedang, Pemeliharaan RTH, Penguatan pengelolaan TPSA Cibeureum, URC (Unit Reaksi Cepat) Tambal Lubang, Penataan Trotoar, PJU Perkotaan.

4. Pemenuhan Layanan Dasar

   SDM yang sehat, kuat, dan cerdas merupakan modal utama pembangunan. Memiliki kualitas SDM seperti itu pada saat ini maupun masa mendatang merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah menjadi Sasaran Misi ke-1 menjadi kunci mewujudkan SDM yang sehat, kuat, dan cerdas tersebut. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C). Pendidikan kesetaraan ini sangat membantu masyarakat kurang beruntung untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan yang meningkat akan membantu dalam mencari pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya; Pendidikan Komplementer(jelaskan definisi dan fungsinya apa?); Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 Simpatik. PSC 119 Simpatik berfungsi sebagai Layanan Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan Gawat Darurat dengan Pelayanan Kesehatan Cepat, Tepat, Cermat dan Profesional (Respon Time) selama 24 jam sehingga dapat meminilisir bahkan menghilangkan kecacatan/kematian seseorang yang mengalami kegawatdaruratan kesehatan; peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu membantu jangkauan layanan dasar di wilayah kerja Puskesmas sehingga mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

   Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian merupakan Sasaran dari Misi ke – 3. Beberapa pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Lingkar Jatigede, peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata, peningkatan jalan di daerah perbatasan, dan peningkatan jaringan irigasi dipastikan

membantu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Terjadinya peningkatan pergerakan orang/barang/jasa dari dan menuju wilayah ekonomi karena semakin mudahnya aksesibilitas, peningkatan efisiensi usaha tani dan UMKM karena menurunnya biaya transportasi, peningkatan produktivitas komoditas pertanian karena ketersediaan kecukupan pengairan.

6. Pengembangan Pariwisata

   Kabupaten Sumedang dianugerahi alam indah serta budaya unik dan menarik yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata sehingga sangat tepat Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata juga menjadi Sasaran Misi ke – 3. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan KEK Pariwisata Jatigede, Pembangunan Tugu Kujang Sapasang, Kawasan Wisata Cisema Jatigede, peningkatan Wisata Museum Srimanganti, Geotheater Rancakalong, peningkatan Seni dan Budaya Daerah.

7. Pengembangan Agribisnis

   Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menduduki peringkat pertama. Penduduk Kabupaten Sumedang yang menjadi petani sekitar 131.264 orang atau 22% dari jumlah angkatan kerja (Tahun 2020). Bila diasumsikan sekitar 75% dari jumlah tersebut telah berkeluarga (dengan 3 orang anak), maka jumlah penduduk Sumedang yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada sektor pertanian sejumlah 229.712 jiwa. Menjadi tumpuan terbesar masyarakat dalam menggantungkan hidup, maka fokus peningkatan pertumbuhan sektor pertanian akan membantu pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Hal ini juga sesuai dengan Sasaran pada Misi ke-3, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis. Pengembangan Agribisnis akan meningkatkan produkstivitas, nilai tambah, dan pemasaran komoditas pertanian sehingga diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan petani. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembagan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sumedang, Kawasan Food Estate, Integrated Farming, pengembangan perikanan di kawasan waduk Jatigede.

8. Profesionalisme ASN

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, ASN memberikan pelayanan terhadap berbagi kebutuhan masyarakat. Sasaran dari Misi ke – 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitasnya terpelihara, dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang bersifat mempermudah, mempercepat, dan transparans yang telah dilaksanakan adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), apliklasi pelayanan perizinan melalui Si Ice Mandiri (sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang memungkinkan pemohon dapat mengunduh SK perizinan dan mencetaknya secara ***mandiri***.), pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi SilaSidakep (merupakan jenis layanan melalui daring bagi masyarakat Sumedang untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), WA KEPO (Whatapps Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online – memberikan pelayanan secara on line kepada masyarakat termasuk penyampaian saran dan keluhan), Commad Center (Pusat informasi memungkinkan pimpinan melihat secara real time mengenai program, output, dan kondisi daerah). Selain itu, tentunya pelayanan publik memerlukan ASN yang berkualitas. Oleh karena itu, dikembangkan Talent Poll (pengembangan karir ASN berdasarkan kompetensi dan kualifikasi), dan Sumedang Simpati Academy (pelatihan ASN melalui modul LMS).

9. Membangun Sumedang Preneurship

   Berwirausaha merupakan salah satu pilihan pekerjaan masyarakat Kabupaten Sumedang. Memberikan fasilitasi pemberdayaan kewirausahaan secara terintegrasi dari hulu – hilir akan meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Gerakan Wirausahawan Muda (GARUDA) yang telah menghasilkan One Village One Product (OVOP) seperti Kampung Kaos Kaki, Kampung Sepatu, Kampung Alumunium; One Pesantren One Product (OPOP), Gerai UMKM (SIMADU, GUMASEP), UMKM Go Digital, Festival Tahunan Kopi Sumedang, pelayanan pendaftaran NIB di desa – desa. Pembangunan Gedung Creative Center. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mengakselerasi pencapaian Sasaran Misi ke-5, yaitu Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat.

## 6.5. Inovasi

Peranan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pengembangannya yang berbasis kesisteman, telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Visi misi maupun arah pembangunan, di dalam undang-undang tersebut, menekankan tentang pentingnya inovasi dalam membangun daya saing.

Visi Pembangunan nasional jangka panjang tahun 2025 sebagaimana tercantum di dalam RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" yang salah satu implementasinya dituangkan ke dalam Misi ke–2 yaitu "mewujudkan Bangsa yang berdaya saing" dengan salah satu arahan kebijakannya adalah "…**penguatan sistem inovasi** dalam rangka pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan….".

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa inovasi, yaitu :

### 6.5.1 Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Updating Data/Informasi Tata Ruang (Sistem Informasi Perencanaan Berbasis GIS)

Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengelolaan data berupa kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang memadai menyebabkan lemahnya Pengendalian dan

evaluasi sebagai quality control perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan tidak lepas akan kebutuhan terhadap data dan informasi, data yang diperlukan tentunya data yang baik yaitu yang memenuhi kriteria :

a. Objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Representatif, artinya mewakili (persoalan yang ada) sesuatu yang lebih luas.
c. Mempunyai (Tingkat) Kesalahan Baku Yang Kecil.
d. Up To Date, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa.
e. Relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persolan yang akan dipecahkan.

Permasalahan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut :

a. Data tidak bisa memberikan informasi yang meyakinkan/tidak valid.
b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data yang besar

Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam rangka pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yaitu dengan membuat perencanaan pembangunan yang berbasis sistem informasi geografis, hal ini agar data tematik terintegrasi dengan ruang wilayah Kabupaten Sumedang.

Manfaat dari inovasi ini dalam perencanaan pembangunan adalah :

1) Optimalnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan;
2) Optimalnya Sistem Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3) Memudahkan proses evaluasi sehingga hasil evaluasi capaian target kinerja dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan daerah;
4) Memudahkan proses pengambilan keputusan bagi pimpian;
5) Jelasnya calon penerima dan calon lokasi yang menjadi sasaran pembangunan sesuai kebutuhan;
6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System* (GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis.

Dalam artian sederhana sistem informasi geografis adalah sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (database). SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi.

SIG selalu berkaitan dengan peta maka tidak dapat dipungkiri lagi kehadiran sebuah peta sangat dibutuhkan. Dengan adanya peta kita bisa mengekstraksi data yang terkandung di dalamnya dan dapat membantu kita dalam melancarkan tugas kita dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan.

Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu juga ditujukan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan

Terdapat dua pendorong utama dalam pembangunan data spasial. Pertama adalah pertumbuhan kebutuhan suatu pemerintahan dan dunia bisnis dalam memperbaiki keputusan yang berhubungan dengan keruangan dan meningkatkan efisiensi dengan bantuan data spasial. Faktor pendorong kedua adalah mengoptimalkan anggaran yang ada dengan meningkatkan informasi dan sistem komunikasi secara nyata dengan membangun teknologi informasi spasial. Didorong oleh faktor-faktor tersebut, maka banyak negara, pemerintahan dan organisasi memandang pentingnya data spasial, terutama dalam pengembangan informasi spasial atau yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan dan tujuannya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan aspek keruangan.

### 6.5.2 Conversational Government

Seiring dengan semakin majunya Teknologi Informasi, maka penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pandemic Covid-19 yang masih berlangsung juga mengharuskan kita untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat tanpa mengabaikan protocol Kesehatan sehingga adopsi teknologi *Conversational Government* menjadi alternatif yang tepat.

Conversational Government adalah salah satu platform digital yang mengintegrasikan layanan-layanan masyarakat ke dalam aplikasi percakapan yang telah tersedia dan sering digunakan oleh masyarakat. Melalui aplikasi perpesanan yang terpasang pada smartphone masyarakat dapat berinteraksi langsung untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan dari chatbot.

Chatbot atau yang sekarang lebih popular disebut Bot merupakan program computer berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dapat mensimulasikan percakapan seperti layaknya manusia dan dapat memberikan informasi yang relepan terhadap permintaan masyarakat. Bot inilah yang menjadi asisten virtual sebagai front office sebelum layanan tersebut di teruskan ke manusia sebagai aparatur pemeberi layanan.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tengah merancang sebuah Bot Pelayanan Masyarakat Desa melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp* pada nomor 081120000999 yang diintegrasikan dengan super aplikasi e-office desa dan tanda tangan digital dari Badan Sertifikasi Elektronik. Pelayanan melalui Chatbot tersebut diantaranya :

1. Surat Pengantar Catatan Kepolisian
2. Surat Keterangan Domisili
3. Surat Keterangan Usaha
4. Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Surat Keterangan Belum Menikah
6. Surat Keterangan Belum Menikah
7. Surat Keterangan Usaha
8. Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Sukat Keterangan Tidak Mampu (ybs)

10. Surat Keterangan KTP Kadaluarsa
11. Surat Keterangan Beda Nama
12. Surat Keterangan Ahli Waris
13. Surat Keterangan Kehilangan
14. Surat Keterangan Kebakaran
15. Surat Keterangan Tanah / Bangunan
16. Surat Keterangan Serba Guna
17. Surat Keterangan Penghasilan
18. Surat Keterangan Berada di Luar Kota
19. Surat Keterangan Janda / Duda

Sedangkan layanan Conversational Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah informasi pemerintahan, pariwisata, kuliner, layanan publik, berita/event terkini, potensi desa, dll. Selain itu juga bisa menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Sumedang.

Dengan adanya layanan percakapan melalui Chatbot tersebut, diharapkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat lebih interaktif, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

**7. Ekosistem Sumedang Simpati 2023**

SDM dan sistem memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Sebagus dan sebaik apapun perencanaan program bila pelaksanaa program tersebut hanya sebatas melaksanakan tugas, sasaran pembangunan bermental selalu ingin dibantu, dan pelaksanaan program tidak sinergi maka program tersebut hanya berhasil dalam tatanan administrasi dan kurang bahkan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu ekosistem operasionalisasi berbagai program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan program yang sinergi dan terintegrasi.

Untuk operasionalisasi program tahun 2021 – 2022 dibuat Eksosistem Simpati 2023 dengan tahapan operasionalisasi sebagai berikut :

**Gambar 6.2**
**Ekosistem Operasionalisasi Program Simpati 2023**

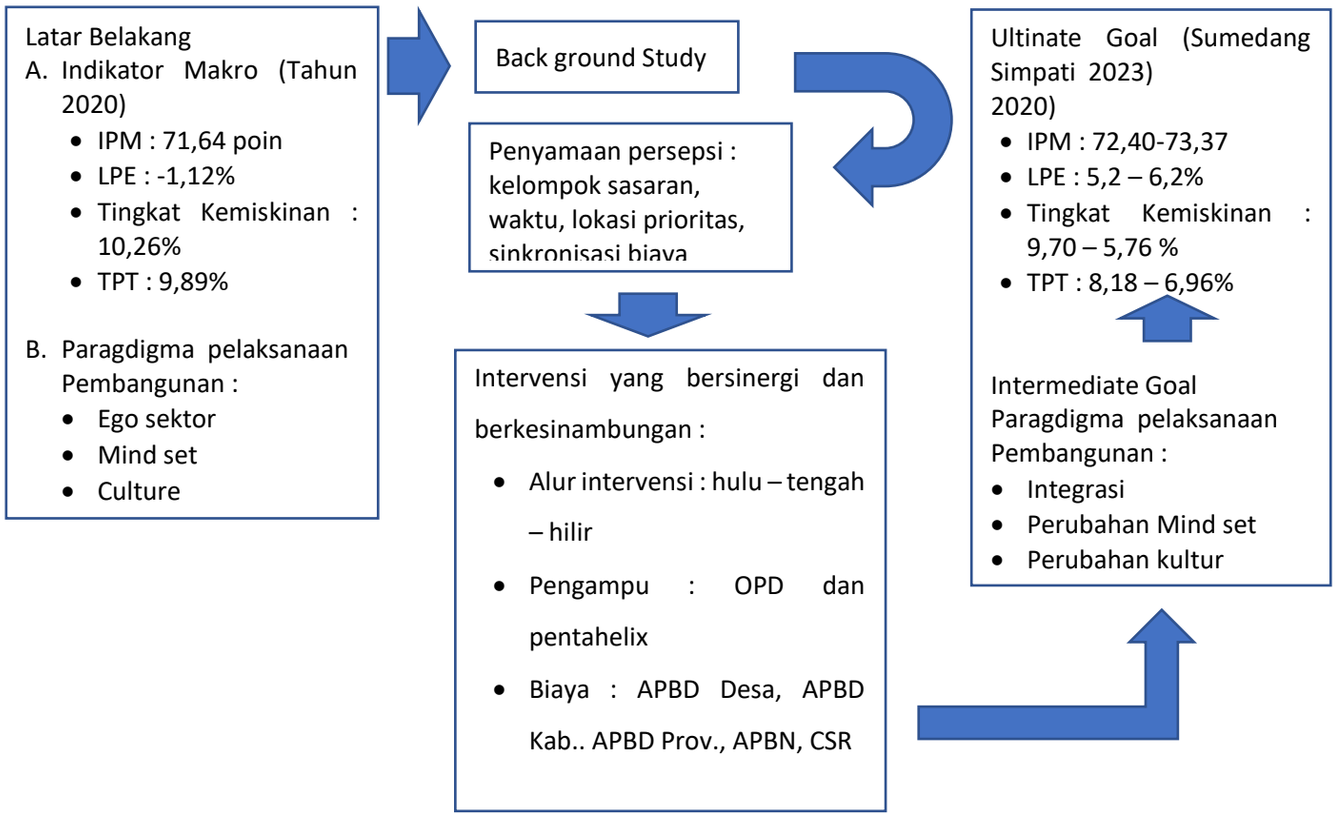


1. Latar Belakang

   Para Kepala Perangkat Daerah harus memahami kondisi awal Kabupaten Sumedang sebagai dasar perencanaan perogram. Tahun 2020 dijadikan sebagai tahun kondisi awal. Kondisi yang awal ini meliputi :

   a. Indikator Makro : IPM71, 64 Poin LPE -1,12% Tingkat Kemiskinan 10,26% Tingkat Pengangguran 9,89%

   b. Paradigma pelaksanaan pembangunan : masih bersifat ego sektoral; mind set pengampu yang hanya sekedar melaksanakan tugas; dan Kultur kelompok sasaran pembangunan yang bermental selalu ingin diberi bantuan.

2. Back ground study

   Para Kepala Perangkat Daerah harus melakukan analisis komprehensif mengenai latar belakang tersebut dikaitkan dengan kewenangannya.

3. Penyamaan persepsi

   Karena penyebab terjadinya satu permasalahan tidak berdiri sendiri maka penanganan masalahpun tidak bisa sendiri – sendiri. Harus terjadi persepsi yang sama antar Para Kepala Perangkat Daerah dalam

meyelesaikan permasalahan pembangunan. Penyamaan persepsi ini meliputi Sasaran kelompok/penerima manfaat, Lokasi prioritas, Waktu pelaksanaan, dan Sinkronisasi pembiayaan.

4. Intervensi yang bersinergi dan berkesinambungan

   Intervensi ini berupa operasionalisasi dari berbagai program antar perangkat daerah yang meliputi :

   a. Alur intervensi

      Intervensi terhadapa kelompok sasaran yang bersifat pada satu sisi tidak akan memberikan dampak siginifikam. Kalaupun ada hanya bersifat output dari suatu kegiatan. Diperlukan intevensi yang menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu dari hulu – tengah – hilir sehingga kelompok sasaran yang diintervensi tersebut memiliki kekuatan lebih paripurna untuk berdaya guna.

   b. Pengampu

      Karena penyebab terjadinya permalahan tidak berdiri sendiri maka pengampu penanganan masalahnyapun tidak bisa sendiri. Antar Perangkat Daerah dan bahkan dengan pengampu di luar pemerintahan (Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media) harus bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan suatu permasalahan.

   c. Biaya

      Pembiayaan harus proporsional dan berksenimambungan pada setiap alur intervensi. Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBD Desa, APBD Kabupaten Sumedang, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan CSR.

5. Intermediate Goal

   Pola pelaksanaan program seperti tersebut di atas diharapkan mengubah paradigma pelaksanaan pembangunan menjadi terintegrasi, perubahan mind set pengampu menjadi ke arah fungsi tidak sekedar melaksanakan tupoksi, dan kultur kelompok sasaran untuk maju.

6. Ultimate Goal

   Pencapaian intermediate goal akan mendukung mewujudkan ultimate goal, yaitu : IPM = 72,40-73,37 Poin; LPE =5,2 – 6,2%, Tingkat Kemiskinan = 9,70 – 5,76 %, dan Tingkat Pengangguran Terbuka = 8,18 – 6,96%.

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

## 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama Perubahan RPJMD Sumedang.

Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat, kedua program perangkat daerah yang terkait dengan perwujudan misi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib Pelayanan dasar serta yang ketiga program – program penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah

Sebagaimana analisis pada Bab III Perubahan RPJMD ini, maka penyajian kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Sumedang dapat dibagi 2 (dua) yaitu periode Tahun 2019-2020 (Tabel 7.1) dan Tahun 2021-2023 (Tabel 7.2) untuk tahun 2021. Masing-masing periode menggambarkan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

## Tabel 7.1
## Kerangka dan Realisasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
## Tahun 2019-2020

| Kode | | | Uraian | Proyeksi (dalam Rupiah) | | Realisasi | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **BELANJA** | | | | | |
| 5 | 1 | | **Total Belanja Tidak Langsung** | **1.755.219.631.997,40** | **1.794.447.312.510,65** | **1.656.888.704.313,00** | **1.628.133.985.918,00** | |
| | | | Belanja Pegawai | 1.338.422.488.394,40 | 1.347.657.603.564,32 | 1.234.484.280.762,00 | 1.173.462.517.916,00 | |
| | | | Belanja Bunga | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Belanja Subsidi | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Belanja Hibah | 33.398.800.000,00 | 25.000.000.000,00 | 35.591.700.000,00 | 33.562.360.500,00 | |
| | | | Belanja Bantuan Sosial | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.367.912.900,00 | 1.222.650.000,00 | |
| | | | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 355.359.689.603,00 | 389.083.324.146,33 | 360.093.456.751,00 | 353.440.572.232,00 | |
| | | | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa | 23.338.654.000,00 | 28.006.384.800,00 | 23.338.654.000,00 | 20.044.107.816,00 | |
| | | | Belanja Tidak Terduga | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 12.699.900,00 | 46.401.777.454,00 | |
| 5 | 2 | | **Total Belanja Langsung** | **1.393.348.028.992,00** | **1.590.884.036.513,00** | **1.365.733.116.844,97** | **1.240.132.723.565,00** | |
| | | | **JUMLAH BELANJA** | **3.148.567.660.989,40** | **3.385.331.349.023,65** | **3.022.621.821.157,97** | **2.868.266.709.483,00** | |

**Tabel 7.2**
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2021 - 2023**

| No | Uraian | Tahun 2021 (Rp) (APBD Murni) | Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp) | Proyeksi/Target Tahun 2023 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.660.497.474.917,00** | **1.660.497.474.917,00** | **1.768.927.960.029,08** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.096.675.547.544,00 | 1.096.675.547.544,00 | 1.168.288.460.798,62 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 538.264.232.373,00 | 538.264.232.373,00 | 573.412.886.746,96 |
| 5.1.03 | Belanja Hibah | 20.636.500.000,00 | 20.636.500.000,00 | 21.984.063.450,00 |
| 5.1.04 | Belanja Bantuan Sosial | 4.921.195.000,00 | 4.921.195.000,00 | 5.242.549.033,50 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **114.000.775.501,00** | **295.500.538.115,80** | 314.796.723.254,76 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 6.808.750.000,00 | 10.000.000.000,00 | **10.653.000.000,00** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **383.922.980.000,00** | **384.916.846.998,60** | **410.051.917.107,61** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 29.627.252.700,00 | 29.627.252.700,00 | 31.561.912.301,31 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 354.295.727.300,00 | 355.289.594.298,60 | 378.490.004.806,30 |
| | **TOTAL BELANJA DAERAH** | **2.165.229.980.418,00** | **2.735.831.707.030,00** | **3.866.561.370.811,62** |

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah, dan unsur pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) tabel yaitu program perangkat daerah tahun 2019 sampai dengan 2020 perangkat daerah tahun 2020, dan program perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program Tahun 2019-2020 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program Tahun 2019. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program. Selanjutnya, program-program Tahun 2020 dijabarkan kedalam kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah (Tabel 7.3.a)
b. Program Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Selain itu, indikator program mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 juga mengutamakan penggunaan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang setiap tahun dilaporkan oleh pemerintah daerah. Sebagai operasionalisasi dari

program-program perangkat daerah, maka perangkat daerah juga melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya, target dan pagu anggaran yang dimuat pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Tabel 7.3.b dan Tabel 7.3.c)

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel dibawah ini

# Tabel 7.3 a
# Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
# Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **URUSAN WAJIB** | | | | | **1.100.938.034.192,00** | | | **1.283.721.277.265,00** | | | |
| **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | **1.017.532.746.342,00** | | | **1.181.481.971.315,00** | | | |
| **URUSAN PENDIDIKAN** | | | | | **310.759.400.000,00** | | | **151.227.921.750,00** | | | |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Persen | n/a | 100 | 53.003.900.000,00 | 51.905.399.700,00 | 100 | 23.172.308.000,00 | 1.998.600.000,00 | Dinas Pendidikan | |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 119,01 | 119,13 | 253.112.182.000,00 | 232.934.652.272,00 | | - | - | Dinas Pendidikan | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada Tahun 2020 smapai dengan Tahun |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 88,69 | 88,95 | | | | | | | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,09 | 0,08 | | | | | | | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,81 | 0,80 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Prosentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik | Persen | 13,52 | 21,51 | | | | | | | 2023 menjadi Program Pendidikan Dasar |
| Program Pendidikan Dasar | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 119,01 | 119,13 | - | - | 119,25 | 105.571.400.000,00 | 81.160.898.157,00 | Dinas Pendidikan | |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 88,69 | 88,95 | | | 89,21 | | | | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,09 | 0,08 | | | 0,07 | | | | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,81 | 0,80 | | | 0,79 | | | | |
| | Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik | Persen | 13,45 | 21,51 | | | 29,5 | | | | |
| Program Pelayanan Pendidikan Non Formal | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,06 | 0,05 | 1.956.818.000,00 | 331.271.000,00 | | | | Dinas Pendidikan | Program Pelayanan Pendidikan Non Formal pada Tahun 2020 |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,71 | 0,60 | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 3,13 | 3,03 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Kesetaraan | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,01 | 0,05 | - | - | 0,04 | 4.954.558.500,00 | | Dinas Pendidikan | sampai dengan Tahun 2023 menjadi pada Program Kesetaraan |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,71 | 0,60 | | | 0,50 | | 1.423.129.750,00 | | |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 3,13 | 3,03 | | | 2,93 | | | | |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 97,20 | 97,49 | 694.000.000,00 | 615.562.400,00 | 98,00 | 7.327.750.000,00 | 534.530.000,00 | Dinas Pendidikan | |
| | Rata rata peningkatan hasil UN | Persen | 46,13 | 49,82 | | | 53,51 | | | | |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Cakupan Pelayanan Pendidikan | Persen | 85,47 | 86,32 | 1.992.500.000,00 | 331.271.000,00 | 87,17 | 4.901.905.250,00 | 13.965.454.113,00 | Dinas Pendidikan | |
| Program penyelenggaraan pendidikan wajib diniyah kabupaten | Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan diniyah | Persen | n/a | 0 | - | - | 100 | 5.300.000.000,00 | 4.400.350.000,00 | Dinas Pendidikan | |
| **URUSAN KESEHATAN** | | | | | **448.793.980.900,00** | | | **560.247.634.400,00** | | | |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 22.900.000.000,00 | 13.332.916.711,00 | 100 | 47.650.000.000,00 | 10.372.297.488,00 | Dinas Kesehatan | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Ketersediaan alat kesehatan | Persen | 60 | 70 | | | 80 | | | | |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik | Persen | 100 | 100 | 90.050.000.000,00 | - | 100 | 160.600.000.000,00 | 16.891.114.032,00 | Dinas Kesehatan | |
| | Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan | Persen | 83 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Desa siaga aktif | Persen | 100 | 100 | 1.850.000.000,00 | 699.946.369,00 | 100 | 2.250.000.000,00 | 228.395.200,00 | Dinas Kesehatan | |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Lingkungan Bersih Sehat | Persen | 72 | 80 | 11.600.000.000,00 | 3.044.375.976,00 | 85 | 4.800.000.000,00 | 1.692.611.764,00 | Dinas Kesehatan | |
| Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi | Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 6.471.319.000,00 | 5.269.914.464,00 | 100 | 5.500.000.000,00 | 1.577.897.863,00 | Dinas Kesehatan | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi | Persen | 77,78 | 100 | 4.340.262.600,00 | 3.174.841.328,00 | 100 | 1.800.000.000,00 | 1.157.592.562,00 | Dinas Kesehatan | |
| | Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi | Persen | 48 | 52 | | | 60 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | Persentase Anemia Pada Ibu Hamil | Persen | 8,07 | 7,67 | 5.604.999.000,00 | 2.895.441.770,00 | 7,27 | 7.200.000.000,00 | 1.019.781.550,00 | Dinas Kesehatan | |
| | Persentase BBLR | Persen | 3,09 | 2,49 | | | 1,81 | | | | |
| | Persentase balita gizi lebih | Persen | 1,01 | 0,95 | | | 0,79 | | | | |
| | Persentase balita gizi kurus | Persen | 2,11 | 1,01 | | | 0,91 | | | | |
| | Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | Persen | 54,20 | 100,0 | | | 100,00 | | | | |
| Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang | Persen | 73,13 | 95 | 35.324.532.000,00 | 22.214.734.337,00 | 96 | 52.011.744.000,00 | 26.456.761.097,00 | Dinas Kesehatan | |
| Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 51.952.868.300,00 | 45.175.332.442,00 | 100 | 55.335.890.400,00 | 36.358.840.563,00 | Dinas Kesehatan | |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Persentase Pengadaan kelengkapan Alat kesehatan Rumah Sakit | Persen | 98 | 98 | 15.000.000.000,00 | 4.884.450.330,00 | 98 | 15.300.000.000,00 | 9.492.101.000,00 | Rumas Sakit Umum Daerah | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis | Persen | 86,21 | 90 | 203.700.000.000,00 | 184.045.389.658,00 | 91 | 207.800.000.000,00 | 86.774.312.785,00 | Rumas Sakit Umum Daerah | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan | Persen | 88,64 | 90 | | | 91 | | | | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis | Persen | 87,96 | 90 | | | 91 | | | | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran | Persen | 89,08 | 90 | | | 91 | | | | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan | Persen | 87,64 | 90 | | | 91 | | | | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian | Persen | 90 | 91 | | | 92 | | | | |
| **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | **225.726.364.000,00** | | | **435.804.234.765,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penanganan Jalan dan Jembatan | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | Persen | 62,80 | 66,80 | 142.455.015.000,00 | 114.841.901.056,00 | 70,80 | 371.400.135.151,00 | 10.190.396.217,00 | Dinas PUPR | |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan | Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 42,00 | 43,40 | 32.624.497.000,00 | 29.573.936.480,00 | 44,80 | 32.397.703.291,00 | 6.919.543.200,00 | Dinas PUPR | |
| Program Peningkatan Pelayanan ke-PU-an | Jumlah Pelayanan Publik ke-PU-an | UPTD | 2 | 2 | 190.000.000,00 | 273.347.800,00 | | - | - | Dinas PUPR | |
| Program Pengendalian Banjir | Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor | Persen | 18,00 | 18,60 | 641.250.000,00 | 535.036.320,00 | 19,20 | 5.575.300.375,00 | 48.812.900,00 | Dinas PUPR | |
| Program Pembinaan Jasa Konstruksi | Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terverfikasi | Persen | 0 | 20 | 300.000.000,00 | 401.441.400,00 | 40 | 700.000.000,00 | 270.010.000,00 | Dinas PUPR | |
| Program Penataan Ruang | Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang | Persen | 100 | 100 | 2.820.000.000,00 | 3.005.220.095,00 | 100 | 2.969.742.000,00 | 1.681.137.013,00 | Dinas PUPR | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Sarana Air Minum yang terbangun | Persen | 70 | 80 | 7.387.377.000,00 | 6.207.014.543,00 | 83 | 6.766.634.200,00 | 180.273.250,00 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | |
| Program Pengembangan dan Penataan Wilayah | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata | Persen | 20 | 28,75 | 32.129.300.000,00 | 29.550.979.148,00 | 48,75 | 9.614.065.830,00 | 15.163.809.794,00 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | |
| | Persentase Bangunan yang tersertifikasi laik fungsi | Persen | n/a | 4,54 | | | 12,04 | | | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Timbulan Sampah yang ditangani | Persen | n/a | 80 | 7.028.925.000,00 | 3.021.562.399,00 | 75 | 6.222.688.918,00 | 4.312.843.593,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | |
| | Indek kepuasan masyarakat; | Persen | 71,31 | 77 | | | 78 | | | | |
| | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 5,38 | 5,52 | | | 5,68 | | | | |
| | Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Persen | 68,53 | 69,00 | | | 69,33 | | | | |
| | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal | Persen | 18,65 | 20 | | | 25 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase Luas RTH terkelola | Persen | 11,04 | 11,04 | 150.000.000,00 | 359.651.300,00 | 11,07 | 157.965.000,00 | 39.143.000,00 | Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang | |
| **URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **11.546.499.442,00** | | | **11.614.884.100,00** | | | |
| Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional | Persen | 50 | 52,61 | 4.424.000.000,00 | 4.608.867.450,00 | 55,22 | 4.848.249.900,00 | 4.286.786.735,00 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | |
| | Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | Persen | 80 | 80,13 | | | 80,30 | | | | |
| | Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang) | Persen | 0 | 1,5 | | | 4,50 | | | | |
| Program Penyediaan Sarana dan Pengelolaan Limbah Domestik | Persentase Sanitasi yang terbangun | Persen | 55 | 65 | 7.122.499.442,00 | - | 70,00 | 6.766.634.200,00 | 299.028.200,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | **12.846.502.000,00** | | | **12.257.296.300,00** | | | |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Persen | 100 | 100 | 2.991.500.000,00 | 3.126.723.590,00 | 100 | 2.230.992.350,00 | 563.863.800,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | Persen | 60,55 | 65 | | | 70 | | | | |
| Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 100 | 1.150.000.000,00 | 566.395.950,00 | 100 | 1.211.065.000,00 | 525.485.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | Persen | 32,04 | 60 | 1.100.000.000,00 | 1.344.547.000,00 | 70 | 1.158.410.000,00 | 1.445.558.700,00 | Satuan Polisi Pamong Praja | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 87,50 | 87,50 | | | 87,50 | | | | |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana | Desa/ kelurahan | 277 | 277 | 7.605.002.000,00 | 5.764.129.630,00 | 277 | 7.656.828.950,00 | 1.612.287.175,00 | Badan penanggulangan bencana daerah | |
| | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Desa/ Kelurahan | 0 | 5 | | | 10 | | | | |
| | Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN SOSIAL** | | | | | **7.860.000.000,00** | | | **10.330.000.000,00** | | | |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya | Persen | 1,71 | 2,86 | 2.250.000.000,00 | 20.000.000,00 | 4,01 | 2.300.000.000,00 | 3.852.048.000,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar | Persen | 8,53 | 16,88 | 2.250.000.000,00 | 743.922.488,00 | 26,17 | 2.205.000.000,00 | 616.357.223,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| | Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 2,77 | 11,17 | | | 20,74 | | | | |
| | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 5,73 | 14,89 | | | 24,05 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 0,68 | 10,61 | | | 20,54 | | | | |
| | Persentase PMKS yang direhabilitasi | Persen | n/a | 10 | | | 20 | | | | |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang aktif | Persen | 50 | 58,33 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 58,33 | 550.000.000,00 | 201.736.750,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| Program Perlindungan Sosial | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 100 | 200.000.000,00 | 182.880.000,00 | 100 | 550.000.000,00 | 145.371.624,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| Program Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | Persen | 52,14 | 53,24 | 2.850.000.000,00 | 1.489.776.926,00 | 53,24 | 4.600.000.000,00 | 914.517.250,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan | Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional | Persen | 100 | 100 | 110.000.000,00 | 103.690.000,00 | 100 | 125.000.000,00 | 90.522.500,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | **83.405.287.850,00** | | | **102.239.305.950,00** | | | |
| **URUSAN TENAGA KERJA** | | | | | **5.072.546.000,00** | | | **5.717.862.250,00** | | | |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat | Persen | 60 | 100 | 3.580.046.000,00 | 2.330.166.938,00 | 100 | 3.971.600.000,00 | 1.578.849.320,00 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 20 | 20 | 895.000.000,00 | 723.091.887,00 | 20 | 1.200.000.000,00 | 598.569.850,00 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | |
| Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial | Persentase kasus yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 597.500.000,00 | 484.955.000,00 | 100 | 546.262.250,00 | 383.797.900,00 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | |
| **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | **1.838.000.000,00** | | | **1.977.543.800,00** | | | |
| Program Penguatan Kelembagaan | Persentase OPD Responsif Gender | Persen | 9,68 | 16,13 | 220.000.000,00 | 214.999.850,00 | 33,87 | 595.000.000,00 | 89.292.100,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengarusutamaan Gender dan Anak | Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender yang dihasilkan | Perda/ Perbup | 1 | 3 | | | 4 | | | dan perlindungan anak | |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 288.000.000,00 | 264.752.500,00 | 100 | 535.000.000,00 | 88.829.700,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| | Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | Persen | 3,85 | 19,23 | | | 30,77 | | | | |
| Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Organisasi wanita yang aktif | Persen | 9,52 | 14,29 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 33,33 | 127.543.800,00 | 7.639.400,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga | Persen | 12,84 | 13,96 | 1.290.000.000,00 | 929.976.100,00 | 15,07 | 720.000.000,00 | 133.935.400,00 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| **URUSAN PANGAN** | | | | | **7.645.000.000,00** | | | **1.732.349.500,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 100 | 100 | 7.645.000.000,00 | 7.177.559.541,00 | 100 | 1.732.349.500,00 | 920.554.900,00 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan | |
| | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 91,50 | 92,50 | | | 93,50 | | | | |
| | Persentase Pembinaan dan Pengasawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN PERTANAHAN** | | | | | **21.760.050.000,00** | | | **23.155.508.700,00** | | | |
| Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 21.760.050.000,00 | 20.694.575.502,00 | 100 | 23.155.508.700,00 | 950.399.385,00 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan | |
| | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **1.245.002.600,00** | | | **1.305.799.500,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | Persen | 26,90 | 30,90 | 860.000.000,00 | 506.888.700,00 | 36,56 | 905.666.000,00 | 868.012.350,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | |
| | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup; | Persen | 15 | 30 | | | 50 | | | | |
| | Persentase pengujian kualitas air sungai; | Persen | 40,74 | 48,15 | | | 55,56 | | | | |
| | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan | Persen | 98,91 | 99,53 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan | Persen | 3,16 | 3,39 | | | 4,08 | | | | |
| | Persentase Pemantuan Kualitas Udara | Persen | 66,67 | 68,89 | | | 73,33 | | | | |
| Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati | Persen | 29,86 | 30,55 | 385.002.600,00 | 100.992.000,00 | 31,37 | 400.133.500,00 | 408.536.682,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | |
| | Persentase mata air yang dilindungi | Persen | 12,12 | 13,42 | | | 15,15 | | | | |
| **URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | **5.469.593.000,00** | | | **6.130.933.300,00** | | | |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu | Persen | 100 | 100 | 5.210.093.000,00 | 4.907.662.678,00 | 100 | 5.731.102.300,00 | 4.638.310.160,00 | Dinas Kependudukan dan | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pelayanan Administrasi Kependudukan | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 81 | 94 | 259.500.000,00 | 70.131.125,00 | 94 | 399.831.000,00 | 303.504.250,00 | Pencatatan Sipil | |
| | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 74 | 86 | | | 86 | | | | |
| | Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan | Instansi | 0 | 10 | | | 15 | | | | |
| **URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | **2.172.546.400,00** | | | **5.175.000.000,00** | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan | Persen | 30 | 33 | 1.050.000.000,00 | 1.244.314.250,00 | 36 | 1.250.000.000,00 | 328.066.100,00 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa | |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif | Persen | 35 | 50 | 385.546.400,00 | 833.108.400,00 | 95 | 750.000.000,00 | 355.682.625,00 | | |
| Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 0 | 10 | 737.000.000,00 | 858.865.925,00 | 40 | 3.175.000.000,00 | 71.635.689.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar | Persen | 32,20 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang akurat | Persen | 0 | 5 | | | 40 | | | | |
| **URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | **12.034.904.000,00** | | | **13.226.200.400,00** | | | |
| Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 74,28 | 74,47 | 11.774.904.000,00 | 11.929.882.914,00 | 74,77 | 12.952.394.400,00 | 9.144.375.200,00 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 8,37 | 9,08 | | | 9,07 | | | | |
| Program Ketahanan Keluarga | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif | Persen | 68,94 | 70 | 140.000.000,00 | 133.200.000,00 | 72 | 147.434.000,00 | 204.030.910,00 | | |
| | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif | Persen | 64,37 | 65 | | | 65,62 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif | Persen | 62,81 | 63 | | | 63,41 | | | | |
| | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 49,62 | 50,07 | | | 51,93 | | | | |
| Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita | Tahun | 19,50 | 19,60 | 120.000.000,00 | 116.300.000,00 | 19,70 | 126.372.000,00 | 65.185.175,00 | | |
| **URUSAN PERHUBUNGAN** | | | | | **9.722.500.000,00** | | | **10.238.764.750,00** | | | |
| Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan | Persentase Kelengkapan Dokumen perhubungan | Persen | 5,06 | 6,25 | 8.610.000.000,00 | 8.294.000.000,00 | 8,42 | 7.142.036.000,00 | 3.429.658.199,00 | Dinas Perhubungan | |
| | Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas | Persen | 7,59 | 9,38 | | | 12,64 | | | | |
| | Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum | Persen | 10,12 | 12,51 | | | 16,85 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase ketersedian Terminal/Dermaga | Persen | 2,53 | 3,13 | | | 4,21 | | | | |
| Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah Trayek Angkutan Umum | trayek | 837 | 857 | 1.112.500.000,00 | 1.505.782.230,00 | 877 | 3.096.728.750,00 | 1.160.256.300,00 | | |
| | Jumlah KIR Angkutan Umum | unit | 9.000 | 9.357 | | | 9.714 | | | | |
| | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/hari | orang/ hari | 10.044 | 10.284 | | | 10.524 | | | | |
| | Persentase Satuan Ruas Parkir | Persen | 50 | 60 | | | 70 | | | | |
| | Jumlah Operasi Lalu Lintas | Kali | 6 | 2 | | | 17 | | | | |
| **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | **3.040.950.000,00** | | | **2.949.564.000,00** | | | |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 27 | 50 | 3.040.950.000,00 | 3.926.212.666,00 | 100 | 2.949.564.000,00 | 4.760.440.724,00 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik | |
| | Cakupan Media Masa yang dikembangkan | Persen | n/a | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah | Persen | 25,45 | 50 | | | 100 | | | | |
| | Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan | Persen | 93,86 | 96,39 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | **7.406.600.000,00** | | | **7.083.050.000,00** | | | |
| Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 423 | 449 | 897.000.000,00 | 916.837.000,00 | 458 | 797.000.000,00 | 237.485.000,00 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan | |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi | Koperasi | 362 | 72 | 1.040.000.000,00 | 360.150.000,00 | 72 | 1.040.000.000,00 | 10.878.250,00 | | |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi | Peningkatan jumlah koperasi besar | Koperasi | 8 | 10 | 506.050.000,00 | 56.050.000,00 | 12 | 506.050.000,00 | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 1.823.550.000,00 | 1.320.718.250,00 | 17.467 | 1.200.000.000,00 | 386.684.939,00 | | |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah UMKM yang mendapat Sapras | UMKM | 2.566 | 3.530 | 3.140.000.000,00 | 526.500.000,00 | 4.561 | 3.540.000.000,00 | 2.596.899.281,00 | | |
| **URUSAN PENANAMAN MODAL** | | | | | **1.325.984.000,00** | | | **3.730.506.750,00** | | | |
| Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah | Persentase peningkatan jumlah investor | Persen | 10 | 20 | 770.000.000,00 | 280.714.974,00 | 30 | 845.000.000,00 | 34.273.900,00 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | |
| Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase izin yang terbit tepat waktu | Persen | 60 | 75 | 555.984.000,00 | 647.788.500,00 | 76 | 485.506.750,00 | 413.508.480,00 | | |
| Program peningkatan promosi dan kemitraan penanaman modal | Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | - | - | 100 | 1.900.000.000,00 | 13.041.500,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTS | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 50 | 50 | - | - | 60 | 500.000.000,00 | 132.122.450,00 | | |
| **URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | **2.390.000.000,00** | | | **2.727.529.000,00** | | | |
| Program Peningkatan peranserta Kepemudaan | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang di bina | Organisasi | n/a | 270 | 1.110.000.000,00 | 1.060.359.000,00 | 304 | 1.379.561.000,00 | 278.703.750,00 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga | |
| | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 1.010 | 2.387 | | | 2.542 | | | | |
| Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga | Jumlah atlet pemula yang dibina | orang | 14 | 20 | 1.280.000.000,00 | 699.338.750,00 | 20 | 1.347.968.000,00 | 201.101.850,00 | | |
| | Jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan | Kali | 6 | 10 | | | 15 | | | | |
| **URUSAN STATISTIK** | | | | | **211.750.000,00** | | | **270.950.000,00** | | | |
| Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | Persen | 45,5 | 70 | 211.750.000,00 | 113.709.000,00 | 85 | 270.950.000,00 | 103.994.750,00 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **URUSAN PERSANDIAN** | | | | | **240.000.000,00** | | | **412.744.000,00** | | | |
| Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen | n/a | 33,33 | 240.000.000,00 | 528.905.951,00 | 50,00 | 412.744.000,00 | 195.189.380,00 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik | |
| **URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | **650.000.000,00** | | | **850.000.000,00** | | | |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah objek pemajuan kebudayaan Daerah yang di lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Objek | 11 | 11 | 650.000.000,00 | 714.981.500,00 | 11 | 850.000.000,00 | 452.789.770,00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga | |
| **URUSAN PERPUSTAKAAN** | | | | | **522.874.150,00** | | | **6.051.000.000,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan | Orang | 70.235 | 73.511 | 522.874.150,00 | 702.165.650,00 | 75.716 | 6.051.000.000,00 | 437.652.750,00 | Dinas arsip dan perpustakaan | |
| | Tingkat kepuasan pengunjung | Persen | 74,4 | 76 | | | 80 | | | | |
| | Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling | Persen | 22,22 | 31 | | | 48 | | | | |
| **URUSAN KEARSIPAN** | | | | | **656.987.700,00** | | | **9.504.000.000,00** | | | |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang berstandar Arispnya | Persen | 3,64 | 21,82 | 656.987.700,00 | 729.180.925,00 | 40,00 | 9.504.000.000,00 | 601.255.700,00 | Dinas arsip dan perpustakaan | |
| **URUSAN PILIHAN** | | | | | **72.464.290.000,00** | | | **64.114.774.320,00** | | | |
| **URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | **5.080.000.000,00** | | | **6.860.250.000,00** | | | |
| Program Peningkatan Produksi Perikanan | Jumlah produksi perikanan | | | | 4.625.000.000,00 | 4.019.932.225,00 | | 5.618.750.000,00 | 1.832.306.050,00 | Dinas perikanan dan peternakan | |
| | 1.Ikan Konsumsi | Ton | 8.286 | 8.617 | | | 9.014 | | | | |
| | 2. Ikan Hias | Ekor | 612.470 | 636.969 | | | 666.269 | | | | |
| | 3. Benih Ikan | Ribu Ekor | 179.275 | 186.446 | | | 195.023 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina | Unit | 45 | 48 | 175.000.000,00 | - | 52 | 205.000.000,00 | 145.440.400,00 | | |
| Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi | Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan | Persen | 100 | 100 | 280.000.000,00 | - | 100 | 1.036.500.000,00 | 39.780.322,00 | | |
| **URUSAN PARIWISATA** | | | | | **5.889.231.000,00** | | | **6.420.044.700,00** | | | |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Kali | 2 | 4 | 1.250.000.000,00 | 2.417.808.840,00 | | - | - | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 menjadi Program Pengembangan |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan | Objek | 1 | 5 | 3.944.231.000,00 | 4.333.314.818,00 | | - | - | | |
| Program Pengembangan Kepariwisataan | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Kali | 2 | 4 | - | - | 5 | 5.720.044.700,00 | 356.652.900,00 | | |
| | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan | Objek | 1 | 5 | | | 10 | | | | |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 7 | 10 | 695.000.000,00 | 792.906.000,00 | 12 | 700.000.000,00 | 203.918.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | Kepariwisataan |
| **URUSAN PERTANIAN** | | | | | **49.337.916.000,00** | | | **36.721.832.000,00** | | | |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah produksi Tanaman Pangan | Ton | 740.732 | 815.842 | 2.650.000.000,00 | 1.741.052.750,00 | 899.384 | 2.790.715.000,00 | 7.407.420.350,00 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan | |
| | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura | Ton | 151.333 | 157.386 | | | 164.783 | | | | |
| | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan | Ton | 6.462 | 6.733 | | | 7.057 | | | | |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Jumlah penambahan alat mesin pertanian | Unit | 5.752 | 6.052 | 38.592.724.000,00 | 37.713.161.602,00 | 6.352 | 23.659.127.900,00 | 15.153.416.650,00 | | |
| | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) | Persen | 1,85 | 1,95 | | | 2,05 | | | | |
| | Jumlah penambahan panjang jalan pertanian | Km | 62 | 77,0 | | | 92 | | | | |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian | Kelompok | 105 | 120 | 1.300.000.000,00 | 3.612.881.700,00 | 138 | 1.369.030.000,00 | 1.042.718.600,00 | | |
| | Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani | Dokumen | 48 | 53 | | | 58 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani | teknologi/ penyuluh pertanian | 3 | 6 | 3.463.542.000,00 | 3.208.227.700,00 | 9 | 1.678.159.100,00 | 85.947.200,00 | | |
| | Penumbuhan Kelompok Tani Baru | Kelompok | 2.835 | 275 | | | 550 | | | | |
| | Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan : | Kelompok | 2.242 | 2.242 | | | 2.242 | | | | |
| | -Kelas Pemula (skor 0-250) | Kelompok | 767 | 762 | | | 757 | | | | |
| | -Kelas Lanjut (skor251-500) | Kelompok | 1.405 | 1.406 | | | 1.407 | | | | |
| | -Kelas Madya(skor 501-750) | Kelompok | 68 | 71 | | | 74 | | | | |
| | -Kelas Utama(skor 751-1000) | Kelompok | 2 | 3 | | | 4 | | | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Persentase pengendalian penyakit hewan | Persen | 100 | 100 | 100.000.000,00 | 65.368.350,00 | 100 | 105.000.000,00 | 89.975.000,00 | Dinas perikanan dan peternakan | |
| Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Jumlah populasi ternak: | | | | 2.949.150.000,00 | 2.361.297.850,00 | | 6.237.300.000,00 | 1.033.300.850,00 | | |
| | 1. Sapi potong | Ekor | 29.783 | 31.064 | | | 32.586 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2. Sapi perah | Ekor | 4.149 | 4.327 | | | 4.539 | | | | |
| | 3. Kambing | Ekor | 27.957 | 29.159 | | | 30.588 | | | | |
| | 4. Domba | Ekor | 111.324 | 116.111 | | | 121.800 | | | | |
| | 5. Ayam buras | Ekor | 519.506 | 541.845 | | | 568.395 | | | | |
| | 6. Ayam ras petelur | Ekor | 111.883 | 116.694 | | | 122.412 | | | | |
| | 7. Ayam ras pedaging | Ekor | 2.866.495 | 2.989.754 | | | 3.136.252 | | | | |
| | 8. Itik | Ekor | 49.553 | 51.684 | | | 54.216 | | | | |
| | Jumlah Produksi | | | | | | | | | | |
| | 1. Daging | Ton | 15.474 | 16.139 | | | 16.930 | | | | |
| | 2. Telur | Ton | 1.639 | 1.709 | | | 1.793 | | | | |
| | 3. Susu | Ton | 12.323 | 12.853 | | | 13.483 | | | | |
| Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina | Unit | 75 | 84 | 182.500.000,00 | 111.320.000,00 | 100 | 477.500.000,00 | 1.832.306.050,00 | | |
| Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) | Persen | 100 | 100 | 100.000.000,00 | 61.507.000,00 | 100 | 405.000.000,00 | 11.140.000,00 | | |
| **URUSAN KEHUTANAN** | | | | | **730.200.000,00** | | | **853.310.620,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi | Persen | 60 | 63 | 610.200.000,00 | 207.564.500,00 | 64 | 703.310.620,00 | 141.745.670,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan | |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Nilai Pengelolaan Hutan Kota | Nilai | 83 | 83 | 120.000.000,00 | 100.992.000,00 | 83 | 150.000.000,00 | 72.488.750,00 | | |
| **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | **8.725.000.000,00** | | | **8.725.000.000,00** | | | |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan | jenis | 4 | 4 | 2.550.000.000,00 | 158.920.000,00 | 4 | 2.550.000.000,00 | 160.014.000,00 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan | |
| | Jumlah UTTP yang di tera | UTTP | 28.502 | 28.502 | | | 28.502 | | | | |
| Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina | orang | 1.503 | 5.043 | 2.525.000.000,00 | 613.328.500,00 | 5.884 | 2.525.000.000,00 | 375.722.000,00 | | |
| | Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk | wilayah | 0 | 1 | | | 2 | | | | |
| Program Pemberdayaan, Penataan dan Perlindungan Pasar Rakyat | Jumlah pasar yang di revitalisasi | Pasar | 10 | 10 | 3.650.000.000,00 | 1.051.977.600,00 | 10 | 3.650.000.000,00 | 269.703.404,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | **2.150.000.000,00** | | | **3.700.000.000,00** | | | |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Peningkatan Jumlah IKM | IKM | 1.771 | 3.478 | 1.200.000.000,00 | 274.059.400,00 | 3.746 | 1.400.000.000,00 | 406.390.000,00 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan | |
| Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana | Jumlah Kelompok | 160 | 169 | 700.000.000,00 | 49.578.060,00 | 178 | 1.400.000.000,00 | 104.333.700,00 | | |
| Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial | Peningkatan Jumlah Sentra IndustrI | Sentra | 5 | 0 | 250.000.000,00 | - | 7 | 900.000.000,00 | 161.795.000,00 | | |
| **URUSAN TRANSMIGRASI** | | | | | **551.943.000,00** | | | **834.337.000,00** | | | |
| Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Jumlah transmigran yang telah dilatih dan ditempatkan | KK | 51 | 56 | 251.943.000,00 | - | 61 | 450.000.000,00 | 61.536.550,00 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi | |
| Program Transmigrasi Lokal | Jumlah Transmigran lokal yang terlatih | KK | 30 | 60 | 300.000.000,00 | - | 90 | 384.337.000,00 | 151.497.750,00 | | |
| **URUSAN PENUNJANG** | | | | | **36.196.013.250,00** | | | **39.497.436.935,00** | | | |
| **URUSAN INSPEKTORAT** | | | | | **6.118.800.000,00** | | | **8.254.633.000,00** | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penataan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase pemenuhan unsur SPIP | Persen | 100 | 100 | 5.100.000.000,00 | 3.364.389.250,00 | 100 | 6.614.633.000,00 | 2.467.466.500,00 | Inspektorat | |
| | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | Buah | 400 | 380 | | | 371 | | | | |
| | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | Buah | 545 | 500 | | | 475 | | | | |
| | persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi | Persen | 15,63 | 23,44 | | | 31,25 | | | | |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan | Persen | 25 | 33,33 | 519.000.000,00 | 295.109.000,00 | 41,67 | 851.000.000,00 | 221.660.000,00 | Inspektorat | |
| | Persentase elemen IACM yang terpenuhi | Persen | 66,67 | 100 | | | 100 | | | Inspektorat | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penegakan Integritas | Persentase Penilaian Zona Integritas | Persen | n/a | 100 | 499.800.000,00 | 125.770.000,00 | 100 | 789.000.000,00 | 77.145.000,00 | Inspektorat | |
| **URUSAN PERENCANAAN** | | | | | **5.242.500.000,00** | | | **8.074.050.000,00** | | | |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah; | Persen | 85 | 100 | 5.242.500.000,00 | 64.500.000,00 | 100 | 1.722.000.000,00 | 1.010.841.300,00 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik"; | Persen | 95 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik"; | Persen | 96,5 | 100 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik". | Persen | 98 | 100 | | | | | | | |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori "Baik"; | Persen | 95 | 100 | - | - | 100 | 3.208.000.000,00 | 629.921.895,00 | | |
| Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Ekonomi dan SDA | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori "Baik"; | Persen | 96,5 | 100 | - | - | 100 | 869.250.000,00 | 371.283.150,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik". | Persen | 98 | 100 | - | - | 100 | 2.274.800.000,00 | 763.318.250,00 | | |
| **URUSAN KEUANGAN** | | | | | **18.381.612.750,00** | | | **17.951.893.250,00** | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat akurasi dokumen penganggaran | Persen | 90 | 92 | 6.367.500.000,00 | 6.151.680.071,00 | 93 | 6.705.614.250,00 | 2.963.103.262,00 | Badan pengelolaan keuangan dan aset | |
| | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | Badan pengelolaan keuangan dan aset | |
| | Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan | Persen | 90 | 91 | | | 92 | | | Badan pengelolaan keuangan dan aset | |
| | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD | Persen | 80 | 85 | | | 90 | | | Badan pengelolaan keuangan dan aset | |
| | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas) | Persen | 86 | 87 | | | 88 | | | Badan pengelolaan keuangan dan aset | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak | poin | 77,34 | 85 | 12.014.112.750,00 | 10.833.134.441,00 | 87 | 11.246.279.000,00 | 3.789.535.058,00 | Badan pengelolaan pendapatan | |
| | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 60 | 75 | | | 80 | | | Badan pengelolaan pendapatan | |
| | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar | Persen | 70 | 80 | | | 85 | | | Badan pengelolaan pendapatan | |
| | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan | Persen | 80 | 90 | | | 100 | | | Badan pengelolaan pendapatan | |
| **URUSAN KEPEGAWAIAN** | | | | | **1.905.000.000,00** | | | **2.006.155.500,00** | | | |
| Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aparatur | Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik | Persen | 99,74 | 100 | 1.905.000.000,00 | 1.370.328.937,00 | 100 | 2.006.155.500,00 | 916.351.200,00 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | |
| | Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi | Persen | 56,31 | 65,00 | | | 73,79 | | | | |
| | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS | Persen | 0,020 | 0,018 | | | 0,016 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan | Persen | 7,56 | 26,05 | | | 44,53 | | | | |
| | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian | Persen | 90,17 | 95 | | | 96 | | | | |
| | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | **2.633.100.500,00** | | | **1.881.205.185,00** | | | |
| Program Pengembangan Kompetensi Aparatur | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 17,77 | 30 | 2.633.100.500,00 | 6.428.399.138,00 | 50 | 1.881.205.185,00 | 1.755.812.305,00 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | |
| | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi | Persen | 27,74 | 42,19 | | | 56,65 | | | | |
| **URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | **1.915.000.000,00** | | | **1.329.500.000,00** | | | |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 80 | 100 | 1.915.000.000,00 | 2.028.286.050,00 | 100 | 1.329.500.000,00 | 104.779.400,00 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi | Persen | n/a | 100 | | | 100 | | | dan pengembangan daerah | |
| **URUSAN PENDUKUNG** | | | | | **30.337.131.750,00** | | | **42.914.350.000,00** | | | |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | **14.113.456.750,00** | | | **17.246.000.000,00** | | | |
| Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah | persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 2.536.645.000,00 | 2.386.249.881,00 | | - | - | Sekretariat Daerah | |
| | persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan | Persen | 60 | 100 | | | | | | | |
| | Nilai LPPD | Persen | 3,09 | 3,15 | | | | | | | |
| | Persentase tertib administrasi kewilayahan | Persen | 60 | 100 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B" | Persen | 0 | 60 | | | | | | | |
| | Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi | Persen | n/a | 100 | | | | | | | |
| | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | B | B | | | | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | poin | 56,05 | 65 | | | | | | | |
| | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang | persen | 60 | 70 | | | | | | | |
| | Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih | persen | 60 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti | Persen | 100 | 100 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan | Persen | 70 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama | Persen | 46,67 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 85 | 100 | | | | | | | |
| Program Pengendalian Manajemen Pembangunan Daerah | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya berkategori“baik" | Persen | 80 | 100 | 4.319.720.000,00 | 4.643.286.802,00 | | - | - | Sekretariat Daerah | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik” | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori“baik” | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |
| | Tingkat Kematangan UKPBJ | Kategori | level 1 | level 3 | | | | | | | |
| | Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |
| Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah | Persen | 100 | 100 | 7.257.091.750,00 | 9.319.422.727,00 | | - | - | Sekretariat Daerah | |
| | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah | Persen | 60 | 70 | | | | | | | |
| | Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah | Persen | 0 | 80 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Tertib Administrasi Keuangan | Persen | 90 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien | Persen | 80 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 100 | 100 | | | | | | | |
| | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persen | 100 | 100 | | | | | | | |
| | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik | Persen | 80 | 85 | | | | | | | |
| | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati | Persen | 30 | 75 | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Administrasi Pemerintahan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah | persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | - | - | 100 | 2.525.000.000,00 | 916.455.608,00 | Sekretariat Daerah | |
| | persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan | Persen | 60 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Nilai LPPD | Persen | 3,09 | 3,15 | | | 3,30 | | | | |
| | Persentase tertib administrasi kewilayahan | Persen | 60 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B" | Persen | 0 | 60 | | | 69,23 | | | | |
| | Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi | Persen | n/a | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | B | B | | | BB | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | poin | 56,05 | 65 | | | 70,00 | | | | |
| | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang | Persen | 60 | 70 | | | 80,00 | | | | |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih | Persen | 60 | 100 | - | - | 100 | 1.860.000.000,00 | 409.737.900,00 | Sekretariat Daerah | |
| | Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan | Persen | 70 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama | Persen | 46,67 | 100 | - | - | 100 | 725.000.000,00 | 176.695.000,00 | Sekretariat Daerah | |
| | Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 85 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya “baik" | Persen | 80 | 100 | - | - | 100 | 5.596.000.000,00 | 1.641.626.350,00 | Sekretariat Daerah | |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik” | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik” | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Tingkat Kematangan UKPBJ | Kategori | Level 1 | Level 3 | | | Level 3 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah | Persen | 100 | 100 | - | - | 100 | 5.225.000.000,00 | 4.069.537.871,00 | Sekretariat Daerah | |
| | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah | Persen | 60 | 70 | | | 100 | | | | |
| | Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah | Persen | 0 | 80 | | | 100 | | | | |
| | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik | Persen | 80 | 85 | | | 85 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati | Persen | 30 | 75 | | | 80 | | | | |
| Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah | Cakupan Tertib Administrasi Keuangan | Persen | 90 | 100 | - | - | 100 | 1.315.000.000,00 | 394.753.100,00 | Sekretariat Daerah | |
| | Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien | Persen | 80 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | **16.223.675.000,00** | | | **25.668.350.000,00** | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan | Persen | 85 | 86 | 16.223.675.000,00 | 13.605.325.393,00 | 87 | 25.668.350.000,00 | 13.361.331.304,00 | Sekretariat DPRD | |
| | Persetujuan APBD Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Persentase Fungsi Pegawasan | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi | Persen | 95 | 95 | | | 95 | | | | |
| | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| | Prosentase Aktifitas Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | **3.500.000.000,00** | | | **3.659.300.000,00** | | | |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | **3.500.000.000,00** | | | **3.659.300.000,00** | | | |
| Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan | Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 900.000.000,00 | 396.429.250,00 | 100 | 579.205.000,00 | - | Kantor kesatuan bangsa dan politik | |
| Program Pendidikan Politik Masyarakat | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politk | Orang | 1.050 | 1.575 | 950.000.000,00 | 861.853.800,00 | 2.100 | 842.480.000,00 | 59.242.400,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Ormas yang dibina | Persen | 35,42 | 46,19 | | | 47,14 | | | | |
| Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya | Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya) | Persen | 100 | 100 | 0 | 48.885.000,00 | 100 | 110.115.000,00 | - | | |
| Program Kewaspadaan Nasional | Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 100 | 1.650.000.000,00 | 2.007.545.350,00 | 100 | 1.627.500.000,00 | 1.703.262.550,00 | | |
| Program Kerukunan Umat Beragama | Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 500.000.000,00 | 67.050.000,00 | | |
| **URUSAN KEWILAYAHAN** | | | | | **20.874.660.500,00** | | | **25.364.655.415,00** | | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81,42 | 83,14 | 2.923.840.000,00 | 4.239.206.550,00 | 84,85 | 3.996.500.000,00 | 3.061.283.000,00 | Kecamatan Sumedang Selatan | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 42.000.000,00 | 37.700.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 84.500.000,00 | 204.495.000,00 | 100 | 88.000.000,00 | 83.200.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 70,13 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 110.000.000,00 | 188.016.000,00 | 100 | 82.000.000,00 | 72.700.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 150.000.000,00 | 630.180.000,00 | 100 | 218.000.000,00 | 288.850.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 88,83 | 89,06 | 2.117.500.000,00 | 1.700.691.750,00 | 89,30 | 3.637.500.000,00 | 2.334.426.450,00 | Kecamatan Sumedang Utara | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 45.000.000,00 | - | 100 | 45.000.000,00 | 36.000.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 87.500.000,00 | 119.646.500,00 | 100 | 88.500.000,00 | 69.250.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 70,41 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 124.250.000,00 | 59.464.500,00 | 100 | 171.750.000,00 | 141.557.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 313.476.550,00 | 100 | 196.000.000,00 | 244.916.500,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Penegakan Perda | Persen | 100 | 100 | 99.250.000,00 | 87.600.000,00 | | - | - | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81.40 | 83,12 | 400.000.000,00 | 330.250.000,00 | 84,84 | 421.200.000,00 | 169.705.000,00 | Kecamatan Tanjungkerta | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 | 31.590.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 80.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100 | 84.240.000,00 | 3.750.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 81,02 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 100 | 24.248.300,00 | 3.185.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100 | 63.210.000,00 | 167.050.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 77,83 | 80,26 | 300.000.000,00 | 243.121.200,00 | 82,70 | 300.298.000,00 | 167.663.800,00 | Kecamatan Cimalaka | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 7.864.400,00 | 100 | 25.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 43.773.750,00 | 100 | 44.000.000,00 | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengelolaan Keuangan | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 79,75 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 47.516.000,00 | 100 | 44.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 145.000.000,00 | 34.839.500,00 | 100 | 152.250.000,00 | 124.283.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,45 | 82,36 | 350.050.000,00 | 357.590.000,00 | 84,27 | 403.205.035,00 | 511.330.500,00 | Kecamatan Tanjungsari | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 51.800.000,00 | 43.000.000,00 | 100 | 51.800.000,00 | 28.620.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 96.000.000,00 | 73.000.000,00 | 100 | 100.800.000,00 | 85.057.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 65,76 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 100 | 51.450.000,00 | 41.606.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 183.000.000,00 | 158.767.500,00 | 100 | 213.150.000,00 | 195.780.500,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81,40 | 83,12 | 255.163.500,00 | 258.600.000,00 | 84,84 | 252.500.000,00 | 310.019.700,00 | Kecamatan Rancakalong | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 22.600.000,00 | - | 100 | 85.000.000,00 | 40.500.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | 26.750.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 68,64 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 52.247.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 83.265.000,00 | 83.264.500,00 | 100 | 105.000.000,00 | 127.123.500,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 79,90 | 81,92 | 330.000.000,00 | 334.720.000,00 | 83,94 | 392.000.000,00 | 181.178.020,00 | Kecamatan Jatinangor | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 93.000.000,00 | 48.000.000,00 | 100 | 93.000.000,00 | 60.749.600,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 77.000.000,00 | 72.000.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | 48.165.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 80,95 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 42.000.000,00 | 39.100.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 37.350.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 181.000.000,00 | 163.000.000,00 | 100 | 228.000.000,00 | 183.903.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | Cakupan Penegakan Perda | Persen | 100 | 100 | 20.000.000,00 | 18.000.000,00 | | - | - | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 82,05 | 83,64 | 352.000.000,00 | 329.900.000,00 | 85,23 | 372.000.000,00 | 204.538.000,00 | Kecamatan Paseh | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 57.750.000,00 | 18.900.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 80.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100 | 83.000.000,00 | 66.150.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 76,26 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100 | 42.000.000,00 | 18.900.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 172.700.000,00 | 72.700.000,00 | 100 | 182.750.000,00 | 207.299.100,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81,01 | 82,81 | 242.000.000,00 | 234.875.000,00 | 84,61 | 272.638.700,00 | 363.192.600,00 | Kecamatan Conggeang | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 10.700.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 28.080.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 25.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengelolaan Keuangan | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 99,53 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 47.100.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 140.000.000,00 | 62.930.000,00 | 100 | 140.000.000,00 | 199.500.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 86,71 | 87,37 | 310.000.000,00 | 289.220.000,00 | 88,03 | 375.000.000,00 | 392.824.750,00 | Kecamatan Tomo | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 120.000.000,00 | 103.500.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | 78.750.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 112.000.000,00 | 96.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 46.052.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 74,75 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 110.000.000,00 | 91.445.000,00 | 100 | 95.000.000,00 | 37.650.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 72.500.000,00 | 100 | 182.500.000,00 | 182.795.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 82,00 | 83,60 | 456.649.000,00 | 462.849.000,00 | 85,20 | 415.408.802,00 | 377.124.300,00 | Kecamatan Buahdua | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 20.000.000,00 | 20.360.000,00 | 100 | 20.000.000,00 | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 67.800.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 19.588.950,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 86,39 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 45.000.000,00 | 12.700.000,00 | 100 | 52.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 138.771.000,00 | 159.000,00 | 100 | 186.000.000,00 | 204.729.200,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 87,08 | 87,66 | 313.000.000,00 | 255.850.000,00 | 88,25 | 242.250.000,00 | 391.350.000,00 | Kecamatan Darmaraja | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 65.083.300,00 | 22.500.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100 | 52.500.000,00 | 18.000.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 68,49 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 | 22.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 115.000.000,00 | 101.700.000,00 | 100 | 190.000.000,00 | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 78,00 | 80,40 | 282.500.000,00 | 267.000.000,00 | 82,80 | 282.500.000,00 | 409.720.000,00 | Kecamatan Situraja | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 | 100 | 24.750.000,00 | 19.800.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 70.400.000,00 | 56.840.000,00 | 100 | 70.400.000,00 | 7.320.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 86,97 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 100 | 22.500.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 110.000.000,00 | 98.975.000,00 | 100 | 110.000.000,00 | 170.170.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 65,49 | 70,39 | 360.000.000,00 | 340.862.500,00 | 75,29 | 403.000.000,00 | 135.669.500,00 | Kecamatan Jatigede | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 100 | 49.500.000,00 | 39.800.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 52.000.000,00 | 69.186.000,00 | 100 | 73.500.000,00 | 39.520.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 92,01 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 55.000.000,00 | 54.950.000,00 | 100 | 69.750.000,00 | 54.610.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 115.875.000,00 | 115.625.000,00 | 100 | 121.875.000,00 | 189.000.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 86,71 | 87,37 | 326.550.000,00 | 321.090.000,00 | 88,03 | 326.625.000,00 | 437.025.000,00 | Kecamatan Wado | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 45.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 100 | 65.000.000,00 | 18.100.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 65,11 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 57.600.000,00 | 100 | 65.000.000,00 | 30.000.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 70.000.000,00 | 81.000.000,00 | 100 | 182.500.000,00 | 192.800.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 76,82 | 79,46 | 413.177.000,00 | 380.882.000,00 | 82,09 | 518.000.000,00 | 356.105.000,00 | Kecamatan Ujungjaya | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 39.714.700,00 | - | 100 | 131.000.000,00 | 36.675.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 113.832.650,00 | 113.818.000,00 | 100 | 191.000.000,00 | 111.619.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengelolaan Keuangan | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 76,38 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 100.000.000,00 | - | 100 | 200.000.000,00 | 57.970.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 78.892.650,00 | 108.850.000,00 | 100 | 302.000.000,00 | 141.975.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,02 | 82,02 | 398.000.000,00 | 374.750.000,00 | 84,01 | 421.011.000,00 | 157.100.000,00 | Kecamatan Cimanggung | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 39.260.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | 78.000.000,00 | 100 | 117.000.000,00 | 65.765.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 84,8 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 40.510.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 135.000.000,00 | 134.900.000,00 | 100 | 135.000.000,00 | 135.340.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 82,79 | 84,23 | 355.550.000,00 | 309.370.000,00 | 85,67 | 392.000.000,00 | 319.706.000,00 | Kecamatan Cibugel | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 28.000.000,00 | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 65.000.000,00 | 61.500.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | 12.430.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 86,71 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | 45.730.000,00 | 100 | 52.382.100,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 75.450.000,00 | 69.665.500,00 | 100 | 80.000.000,00 | 134.049.000,00 | | |
| Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | Cakupan Penegakan Perda | Persen | 100 | 100 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | - | - | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81,84 | 83,47 | 275.000.000,00 | 268.250.000,00 | 85,10 | 280.311.500,00 | 171.235.000,00 | Kecamatan Tanjungmedar | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 57.300.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 30.400.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 95.000.000,00 | 82.200.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | 42.300.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 98,01 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 56.750.000,00 | 45.530.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 115.000.000,00 | 125.110.000,00 | 100 | 145.000.000,00 | 156.300.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 75,51 | 78,41 | 411.000.000,00 | 390.965.500,00 | 81,31 | 433.630.100,00 | 407.995.800,00 | Kecamatan Pamulihan | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 | 31.500.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 80.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100 | 84.000.000,00 | 42.461.300,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 76,16 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100 | 63.000.000,00 | 19.172.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100 | 94.500.000,00 | 368.862.900,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,02 | 82,02 | 321.800.000,00 | 312.000.000,00 | 84,01 | 291.800.000,00 | 319.232.500,00 | Kecamatan Sukasari | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 45.000.000,00 | - | 100 | 45.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 65.000.000,00 | 38.000.000,00 | 100 | 65.000.000,00 | 19.500.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 71,96 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 64.475.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 19.200.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 137.000.000,00 | 107.000.000,00 | 100 | 182.999.780,00 | 185.250.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 78,15 | 80,52 | 252.000.000,00 | 288.000.000,00 | 82,89 | 291.500.000,00 | 373.450.000,00 | Kecamatan Cisitu | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 38.000.000,00 | 19.500.000,00 | 100 | 46.000.000,00 | 27.000.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 35.000.000,00 | 39.508.600,00 | 100 | 70.557.200,00 | 36.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pengelolaan Keuangan | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 77,78 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 70.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100 | 55.057.200,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 135.000.000,00 | 70.500.000,00 | 100 | 95.028.600,00 | 133.640.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 76,17 | 78,94 | 255.000.000,00 | 279.500.000,00 | 81,70 | 246.750.000,00 | 294.249.000,00 | Kecamatan Ganeas | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 70.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100 | 26.250.000,00 | - | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 71.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100 | 74.550.000,00 | 69.500.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 91,56 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 62.000.000,00 | 24.999.500,00 | 100 | 45.100.000,00 | 12.829.500,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 72.000.000,00 | 42.000.000,00 | 100 | 124.431.000,00 | 166.000.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 79,00 | 81,20 | 360.000.000,00 | 283.750.000,00 | 83,40 | 380.177.998,00 | 393.092.400,00 | Kecamatan Jatinunggal | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 20.000.000,00 | 19.250.000,00 | 100 | 21.000.000,00 | 35.000.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 42.000.000,00 | 100 | 78.750.000,00 | 60.000.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 79,09 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 35.500.000,00 | 100 | 42.000.000,00 | 45.000.000,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 207.580.000,00 | 157.051.000,00 | 100 | 217.959.000,00 | 244.700.000,00 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80,23 | 82,18 | 330.000.000,00 | 266.450.000,00 | 84,14 | 350.000.000,00 | 217.212.000,00 | Kecamatan Surian | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | 50.250.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 33.200.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 100.500.000,00 | 89.525.000,00 | 100 | 125.500.000,00 | 59.180.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 93,76 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 55.000.000,00 | 27.791.000,00 | 100 | 81.139.000,00 | 37.025.100,00 | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 95.000.000,00 | 94.999.250,00 | 100 | 95.000.000,00 | 169.173.000,00 | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 81,22 | 82,98 | 232.000.000,00 | 149.950.000,00 | 84,73 | 229.824.400,00 | 283.359.500,00 | Kecamatan Cisarua | |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan Administrasi Desa | Persen | 100 | 100 | 40.000.000,00 | 12.450.000,00 | 100 | 55.974.400,00 | 27.920.000,00 | | |
| | Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan | Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 87.000.000,00 | 66.500.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | 62.235.000,00 | | |
| | Persentase Ketercapaian Target PBB | Persen | 89,27 | 100 | | | 100 | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik | Persen | 100 | 100 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 | 22.000.000,00 | - | | |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | | | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 140.000.000,00 | 110.000.000,00 | 100 | 170.000.000,00 | 170.244.444,00 | | |
| **NON URUSAN** | | | | | **129.037.899.300,00** | | | **131.612.242.578,00** | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Persen | 100 | 100 | 71.085.457.831,00 | | 100 | 73.903.765.745,00 | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur | Persen | 100 | 100 | 45.924.199.700,00 | | 100 | 41.210.853.502,00 | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100 | 100 | 2.011.750.000,00 | | 100 | 3.609.513.645,00 | | Perangkat daerah | |
| Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS | Cakupan Fasilitasi Pindah/Purna Tugas | Persen | 100 | 100 | 20.000.000,00 | | 100 | 10.250.000,00 | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100 | 100 | 2.531.016.500,00 | | 100 | 4.673.954.617,00 | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar pelaporan kinerja | Persen | 100 | 100 | 4.200.074.769,00 | | 100 | 4.476.062.374,00 | | Perangkat daerah | |

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | | | 2020 | | | | |
| | | | | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | TARGET | ANGGARAN (Rp) | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja deangan standar Akutansi Pemerintah Daerah | Persen | | | | | | | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD | Persen | 100 | 100 | 2.304.432.000,00 | | 100 | 2.558.067.415,00 | | Perangkat daerah | |
| | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD | Persen | | | | | | | | Perangkat daerah | |
| Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD | Persen | 100 | 100 | 960.968.500,00 | | 100 | 1.169.775.280,00 | | Perangkat daerah | |
| **JUMLAH** | | | | | **1.393.348.028.992,00** | | | **1.590.884.036.513,00** | | | |

*Sumber Hasil Analisis Bappppeda*

**Tabel 7.3.b**
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021**
**(Setelah Perubahan)**

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | **NON-URUSAN** | | | | | **1.458.477.763.740,00** | |
| X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 1.458.477.763.740,00 | 29 Perangkat Daerah Kabupaten dan 26 Perangkat Daerah Kecamatan |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik | Persen | 100 | 100 | 58.370.290.368,00 | Dinas Kesehatan |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis | Persen | 90,00 | 91 | 166.514.864.016,00 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan | Persen | 90,00 | 91 | | |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis | Persen | 90,00 | 91 | | |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran | Persen | 90,00 | 91 | | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan | Persen | 91,00 | 91 | | |
| | | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian | Persen | 91,00 | 92 | | |
| | | Persentase Layanan Keuangan dan Administrasi kepada DPRD yang memadai | Persen | 100 | 100 | | Sekretariat DPRD |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 60,01 | 75,00 | | |
| | | Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang memadai | Persen | 80 | 80 | | |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | **940.113.645.591,00** | |
| **1.01.** | **PENDIDIKAN** | | | | | **271.991.941.000,00** | |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Kesiapan Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Persen | 57,63 | 100 | 271.991.941.000,00 | Dinas Pendidikan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 101,91 | 119,37 | | |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 86,35 | 89,48 | | |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,02 | 0,06 | | |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,08 | 0,78 | | |
| | | Persentase Sekolah Pendiidkan Kondisi Bangunan Baik | Persen | 31,84 | 37,4 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,04 | 0,03 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,45 | 0,40 | | |
| | | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 2,05 | 2,83 | | |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 78,07 | 99,00 | | |
| | | Rata rata peningkatan hasil UN | Persen | Tdk Dilaksanakan | 57,20 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Pendidikan | Persen | 86,30 | 88,03 | | |
| | | Persentase siswa yang berpastisipasi aktif dalam pendidikan Diniyah | Persen | n/a | 100 | | |
| **1.02** | **KESEHATAN** | | | | | **261.254.121.516,00** | |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar | Persen | 97,47 | 100 | 14.476.564.365,00 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang memenuhi standar | Persen | 90,12 | 100 | 14.476.564.365,00 | |
| | | Cakupan Puskesmas yang Sesuai Standar | Persen | 28,5 | 37 | 14.476.564.365,00 | |
| | | Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan | Persen | 74 | 80 | 68.631.312.000,00 | |
| | | Persentase Pengadaan kelengkapan Alat kesehatan Rumah Sakit | Persen | 98 | 100 | 143.972.465.821,00 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 50 | 50 | 3.700.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 80 | 100 | 442.590.000,00 | |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri | Persen | 7,9 | 15 | 1.078.060.600,00 | |
| **1.03** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | **236.042.944.000,00** | |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | Persen | 43,79 | 45,20 | 32.402.003.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Sarana Air | Persen | 80 | 85 | 8.747.373.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 1.03.04 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 65 | 70 | 3.406.740.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Sanitasi yang Terbangun | Persen | 60 | 65 | 3.819.677.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase sistem drainase yang baik di wilayah perkotaan | Persen | n/a | 45 | 3.624.600.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.07 | Program Pengembangan Permukiman | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | | | 23.783.908.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata | Persen | 9 | 9 | 10.900.000.000,00 | |
| 1.03.09 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata | Persen | 50 | 58,75 | 3.472.818.000,00 | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 76,96 | 77,30 | 143.549.725.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang | Penyedia Jasa | 173 | 50 | 350.000.000,00 | |
| 1.03.12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase ketersediaan RTR | Persen | 30,77 | 50,00 | 1.786.100.000,00 | |
| | | Persentase pelayanan pemanfaatan ruang | Persen | 50 | 80,00 | 200.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **1.04** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | **6.472.327.000,00** | |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman | Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | Persen | 80,3 | 85 | 4.102.327.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase PSU di lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | 4,5 | 6,5 | 2.370.000.000,00 | |
| **1.05** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | **7.525.686.200,00** | |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | Persen | 100 | 100 | 3.094.037.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana | Desa/Kelurahan | 277 | 277 | 2.395.865.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 85 | 90 | 2.035.783.800,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **1.06** | **SOSIAL** | | | | | **156.826.625.875,00** | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | 5,42 | 9.03 | 2.325.000.000,00 | |
| | | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | 58,33 | | |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 10,74 | 15,75 | 2.980.000.000,00 | |
| 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | Persen | 100 | 100 | 1.369.905.000,00 | |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 100 | 1.050.000.000,00 | |
| 1.06.07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara | Persen | 100 | 100 | 150.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **II.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | **137.997.347.475,00** | |
| **2.07** | **TENAGA KERJA** | | | | | **1.225.238.200,00** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat | Persen | 100 | 100 | 3.103.897.000,00 | |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 100 | 100 | 624.350.000,00 | |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 600.888.200,00 | |
| **2.08** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | **2.700.000.000,00** | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 12,90 | 29,03 | 975.000.000,00 | |
| 2.08.03 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 100 | 1.050.000.000,00 | |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | Persen | n/a | 42,31 | 400.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Perlindungan Khusus Anak | Persen | 100 | 100 | 275.000.000,00 | |
| **2.09** | **PANGAN** | | | | | **7.700.000.000,00** | |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 100 | 2.020.000.000,00 | |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 92 | 92,5 | 3.040.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 100 | 1.340.000.000,00 | |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 100 | 1.300.000.000,00 | |
| **2.10** | **PERTANAHAN** | | | | | **1.250.000.000,00** | |
| 2.10.04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasiltasi | Persen | 100 | 100 | 250.000.000,00 | |
| 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 1.000.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **2.11** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | **7.300.362.750,00** | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 3 | 4 | 715.000.000,00 | |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase pengujian kualitas air sungai | Persen | 64,29 | 62,96 | 161.555.000,00 | |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati | Persen | 35,71 | 32,33 | 985.107.750,00 | |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 33 | 0 | - | |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | Persen | 36,4 | 40,80 | 107.450.000,00 | |
| 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | Jumlah komunitas kearipan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH | Komunitas | n/a | 0 | - | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan | Persen | 4,07 | 5,24 | 68.000.000,00 | |
| 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Desa/ Kelurahan | n/a | 0 | - | |
| 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal | Persen | 24,99 | 30 | 5.213.250.000,00 | |
| **2.12** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | **5.427.360.000,00** | |
| 2.12.01 | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | | 97 | 1.472.698.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | | 86 | 335.610.000,00 | |
| 2.12.03 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Layanan yang Sesuai Standar Manajemen Mutu | Persen | | 100 | 5.091.750.000,00 | |
| **2.13** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | **5.068.706.800,00** | |
| 2.13.02 | Program Penataan Desa | Cakupan Desa yang Menerima Program Penataan Desa | Persen | | 20 | 525.050.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 2.13.04 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Desa Adminitrasi | Persen | | 100 | 2.996.901.800,00 | |
| 2.13.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan | Persen | | 20 | 2.071.805.000,00 | |
| **2.14** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | **13.924.081.525,00** | |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk | Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan | Sekolah | n/a | 10 | 610.584.850,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan ketersediaan data pengendalian penduduk | Persen | n/a | 100 | | |
| 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 74,77 | 75,07 | 4.039.722.750,00 | |
| | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 9,07 | 9,06 | 6.878.892.225,00 | |
| 2.14.04 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB | Persen | 21,61 | 25,21 | 505.147.850,00 | |
| | | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKR | Persen | 6,91 | 9,3 | 485.563.900,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKL | Persen | 10,83 | 12,69 | 325.147.950,00 | |
| | | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 1,85 | 2,73 | 709.850.000,00 | |
| | | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Tahun | 19,7 | 19,7 | 369.172.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **2.15** | **PERHUBUNGAN** | | | | | **39.787.944.000,00** | |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 42,12 | 51,83 | 31.500.000.000,00 | |
| | | Persentase Pelayanan Angkutan Laik Jalan | Persen | 61,24 | 50 | 7.617.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 30,33 | 33,33 | 670.944.000,00 | |
| **2.16** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | **29.216.782.200,00** | |
| 2.16.02 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Cakupan Media Massa Yang Dikembangkan | Persen | | 100 | 1.937.500.000,00 | |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah | Persen | | 3,60 | 27.279.282.200,00 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **2.17** | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | **10.909.500.000,00** | |
| 2.17.04\5 | Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian | persen | | 5 | 500.000.000,00 | |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 28,34 | 2 | 1.150.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 2,56 | 0,15 | 1.885.000.000,00 | |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,3 | 0,15 | 7.374.500.000,00 | |
| **2.18** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | **1.172.462.000,00** | |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | Persen | 30 | 40 | 150.000.000,00 | |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | Persen | 100 | 5 | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 76 | 80 | 200.000.000,00 | |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 60 | 70 | 446.289.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data PM dan Perizinan yang Valid | Persen | 60 | 100 | 176.173.000,00 | |
| **2.19** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | **7.820.000.000,00** | |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang dibina | Organisasi | 97 | 97 | 350.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 700 | 700 | 1.000.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Jumlah Atlet yang dibina | Orang | 20 | 20 | 550.000.000,00 | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan | Event | 5 | 5 | 5.420.000.000,00 | |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina | Organisasi | 26 | 26 | 500.000.000,00 | |
| **2.20** | **STATISTIK** | | | | | **220.000.000,00** | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Ketersediaan Data Yang Akurat Dan Berkualitas | Persen | 90 | 95 | 220.000.000,00 | |
| **2.21** | **PERSANDIAN** | | | | | **352.700.000,00** | |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen / OPD | | 66.67 / 19 | 352.700.000,00 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **2.22** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Orang | 120 | 120 | 1.254.715.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.05 | Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Lokasi | 14 | 14 | 500.810.000,00 | |
| **2.23** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | **1.205.210.000,00** | |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan | Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan | orang | | 7.7988 | 1.205.210.000,00 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| **2.24** | **KEARSIPAN** | | | | | **2.717.000.000,00** | |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | 40 | 49 | 2.550.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.24.03 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan | Persen | 40 | 46 | 167.000.000,00 | |
| **III** | **UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | **501.512.321.524,97** | |
| **3.25** | **KELAUATAN DAN PERIKANAN** | | | | | **4.294.010.000** | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persen | 100 | 100 | 850.000.000,00 | |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 100 | 2.650.000.000,00 | |
| 3.25.05 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum | Persen | 100 | 100 | 700.000.000,00 | |
| 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Persen | 100 | 100 | 94.010.000,00 | |
| **3.26** | **PARIWISATA** | | | | | **2.740.000.000,00** | |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 5 | 5 | 670.000.000,00 | |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 2 | 2 | 1.350.000.000,00 | |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 16 | 125.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | Orang | | 170 | 595.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **3.27** | **PERTANIAN** | | | | | **490.423.584.524,97** | |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 35 | 35,77 | 434.395.044.980,97 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan pengembangan sarana pertanian | Persen | 65 | 64,23 | 2.250.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | n/a | 100 | 7.100.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1696 | 1.824 | 33.293.339.544,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100 | 100 | 8.300.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persen | 100 | 100 | 725.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95 | 95,00 | 712.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 18 | 15,00 | 812.000.000,00 | |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | | 100 | 75.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 03:27:07 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 45 | 38,77 | 2.761.200.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3.28** | **KEHUTANAN** | | | | | **440.000.000,00** | |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 64 | 68,54 | 440.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3.30** | **PERDAGANGAN** | | | | | **1.669.680.000,00** | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | Persen | 20 | 30 | 1.169.680.000,00 | |
| 3.30.04 | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 4 | 4 | 400.000.000,00 | |
| 3.30.06 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 100 | 100.000.000,00 | |
| **3.31** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | **1.169.597.000,00** | |
| **3.31.02** | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pembangunan Kawasan Industri | Persen | 13 | 15 | 1.169.597.000,00 | |
| **3.32** | **TRANSMIGRASI** | | | | | **775.450.000,00** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi | Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi | Lokasi | 1 | 1 | 508.300.000,00 | |
| 3.32.04 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang dilatih | KK | 10 | 5 | 267.150.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | **36.454.332.900,00** | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | **9.636.852.900,00** | |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase manajemen pemerintahan kecamatan berkategori baik; | Persen | 100 | 100 | 263.040.750,00 | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase tertib administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; | Persen | 100 | 100 | 71.054.000,00 | |
| | | Nilai LPPD | Persen | 3,09 | 3,45 | 71.054.000,00 | |
| | | Persentase tertib administrasi kewilayahan | Persen | 100 | 100 | 178.101.250,00 | |
| | | Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | 4.397.754.000,00 | |
| | | Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan | Persen | 100 | 100 | 1.481.602.900,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih | Persen | 100 | 100 | 442.600.000,00 | |
| | | persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindaklanjut | Persen | 100 | 100 | 456.000.000,00 | |
| | | Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan | Persen | 100 | 100 | 203.646.000,00 | |
| | | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama | Persen | 100 | 100 | 382.800.000,00 | |
| | | Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur | | 100 | 100 | 75.000.000,00 | |
| 4.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | 431.700.000,00 | |
| | | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan Tahunanannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | 464.200.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Tingkat Kematangan UKPBJ | Predikat | | Level 4 | 604.800.000,00 | |
| | | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori ”baik” | Persen | 100 | 100 | 113.500.000,00 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | **26.817.480.000,00** | |
| 4.02.02. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persen | 100 | 100 | 26.817.480.000,00 | Sekretariat DPRD |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | **27.136.766.302,00** | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | **7.905.813.300,00** | |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 2.035.181.250,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 1.209.297.050,00 | |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 1.454.400.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 3.206.935.000,00 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | **11.051.907.402,00** | |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 90 | 94 | 904.415.000,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 100 | 1.390.018.000,00 | |
| | | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 90 | 92 | 1.183.648.000,00 | |
| | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 80 | 92 | 1.028.358.000,00 | |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 87 | 89 | 1.629.181.000,00 | |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 80 | 85 | 4.916.287.402,00 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | **7.838.850.600,00** | |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 98 | 1.231.253.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 95 | 95 | 1.230.150.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 70 | 70 | 5.081.235.000,00 | |
| | | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 100 | 296.212.600,00 | |
| | | | | | | | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | **340.195.000,00** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 100 | 340.195.000,00 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | **8.727.472.800,00** | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | **7.670.461.300,00** | Inspektorat Kabupaten |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 400 | 360 | 1.276.550.000,00 | |
| | | Presentase pemenuhan unsur SPIP pada OPD | Persen | 60% | 80% | 104.926.800,00 | |
| | | Presentase penerapan SAKIP pada OPD | Persen | 6000% | 100 | 100.000.000,00 | |
| | | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 545 | 450 | 4.126.973.000,00 | |
| 6.01.03 | | Presentase pemenuhan elemen IACM | Persen | 66,67 | 100 | 1.057.011.500,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Cakupan Zona Integritas | Persen | 75 | 100 | 1.005.000.000,00 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | **31.669.534.700,00** | |
| **7.01** | **KECAMATAN CIMALAKA** | | | | | **548.236.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 130.803.700,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 342.488.300,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | - | Kecamatan Cimalaka |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 38.526.500,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 36.417.500,00 | |
| | **KECAMATAN BUAHDUA** | | | | | **389.734.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 76.893.000,00 | Kecamatan Buahdua |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 188.367.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 34.474.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 0 | - | |
| | **KECAMATAN RANCAKALONG** | | | | | **398.560.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 106.500.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 170.950.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 82.250.000,00 | Kecamatan Rancakalong |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 18.960.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 19.900.000,00 | |
| | **KECAMATAN SUMEDANG SELATAN** | | | | | **6.072.228.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Poin | 100 | 86,57 | 963.000.000,00 | Kecamatan Sumedang Selatan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 4.819.228.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | | 100 | - | - | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Poin | 100 | 86,57 | 90.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 200.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATIGEDE** | | | | | **575.991.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 101.555.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 352.500.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 22.100.000,00 | Kecamatan Jatigede |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 28.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 71.836.000,00 | |
| | **KECAMATAN TOMO** | | | | | **1.119.000.000,00** | Kecamatan Tomo |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 355.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 439.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 75.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 200.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATINANGOR** | | | | | **462.939.700,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 81.800.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 222.138.200,00 | Kecamatan Jatinangor |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 34.552.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 34.449.500,00 | |
| | **KECAMATAN SITURAJA** | | | | | **1.135.000.000,00** | Kecamatan Situraja |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 486.700.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 339.800.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 58.500.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 200.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CIMANGGUNG** | | | | | **419.248.000,00** | Kecamatan Cimanggung |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 73.500.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 196.998.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 58.750.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 0 | - | |
| | **KECAMATAN SUKASARI** | | | | | **456.743.200,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 59.480.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 231.113.200,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 102.000.000,00 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 14.150.000,00 | |
| | **KECAMATAN SURIAN** | | | | | **1.121.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 283.000.000,00 | Kecamatan Surian |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 543.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 45.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 200.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN DARMARAJA** | | | | | **127.700.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 353,900,000 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 431,600,000 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 23,600,000 | Kecamatan Darmaraja |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 80,700,000 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 127.700.000,00 | |
| | **KECAMATAN CISITU** | | | | | **469.817.600,00** | Kecamatan Cisitu |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 95.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 305.817.600,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | - | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 54.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 15.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CONGGEANG** | | | | | **495.383.200,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 101.183.200,00 | Kecamatan Conggeang |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 294.200.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 15.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 31.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 54.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN PASEH** | | | | | **345.134.500,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 39.492.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 175.362.500,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 95.000.000,00 | Kecamatan Paseh |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 25.280.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 10.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGSARI** | | | | | **1.177.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 253.320.500,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 582.095.500,00 | Kecamatan Tanjungsari |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 36.680.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 44.240.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 260.664.000,00 | |
| | **KECAMATAN PAMULIHAN** | | | | | **529.414.400,00** | Kecamatan Pamulihan |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 149.858.400,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 273.450.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 26.130.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 23.700.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 56.276.000,00 | |
| | **KECAMATAN CISARUA** | | | | | **433.605.000,00** | Kecamatan Cisarua |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 71.830.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 209.625.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 90.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 20.850.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 41.300.000,00 | |
| | **KECAMATAN GANEAS** | | | | | **979.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 205.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 503.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 55.000.000,00 | Kecamatan Ganeas |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 56.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 160.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN UJUNGJAYA** | | | | | **1.215.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 310.741.000,00 | Kecamatan Ujungjaya |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 482.583.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 126.180.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 87.410.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 208.086.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGKERTA** | | | | | **440.116.000,00** | Kecamatan Tanjungkerta |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 113.500.000 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 216.616.000 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 90.000.000 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | - | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 20.000.000 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| | **KECAMATAN SUMEDANG UTARA** | | | | | **4.894.921.000,00** | Kecamatan Sumedang Utara |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 233.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 4.303.921.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 153.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 52.500.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 152.500.000,00 | |
| | **KECAMATAN WADO** | | | | | **1.164.250.000,00** | Kecamatan Wado |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 552.850.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 371.900.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 4.500.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 70.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 165.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CIBUGEL** | | | | | **497.558.400,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 87,12 | 190.000.000,00 | Kecamatan Cibugel |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 87,12 | 212.558.400,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 87,12 | - | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 87,12 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 87,12 | 45.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGMEDAR** | | | | | **1.032.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 380.000.000,00 | Kecamatan Tanjungmedar |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 350.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 36.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 70.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 196.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATINUNGGAL** | | | | | **1.183.908.700,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 321.328.700,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 232.580.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 30.000.000,00 | Kecamatan Jatinunggal |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 600.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | | |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | **3.986.046.000,00** | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | **3.986.046.000,00** | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 102.500.000,00 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2021 | | |
| | | | | | Target | Rp | |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat Pendidikan Partai Politik | Persen | 100 | 100 | 1.171.246.000,00 | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang aktif | Persen | 55,14 | 70,10 | 105.000.000,00 | |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya | Persen | 100 | 100 | 412.000.000,00 | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 100 | 2.195.300.000,00 | |
| **JUMLAH BELANJA URUSAN** | | | | | | **1.680.497.467.292,97** | |
| **JUMLAH BELANJA PENUNJANG URUSAN DAN BELANJA URUSAN** | | | | | | **3.138.975.231.032,97** | |

*Sumber : Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

# Tabel 7.3.c
# Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
# Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023
# (Setelah Perubahan)

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | **NON-URUSAN** | | | | **1.934.897.139.984,00** | | **2.147.365.186.865,00** | | **2.147.365.186.865,00** | |
| X.XX.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 1.604.325.540.114,00 | 100 | 1.767.061.434.118,00 | 100 | 1.767.061.434.118,00 | 29 Perangkat Daerah Kabupaten dan 26 Perangkat Daerah Kecamatan |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Layanan BLUD yang memadai | Persen | 100 | 225.283.024.166,00 | 100 | 263.025.034.959,00 | 100 | 263.025.034.959,00 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Layanan Keuangan dan Administrasi kepada DPRD yang memadai | Persen | 100 | 60.827.708.926,00 | 100 | 70.817.851.010,00 | 100 | 70.817.851.010,00 | Sekretariat DPRD |
| | | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai | Persen | 100 | 44.460.866.778,00 | 100 | 46.460.866.778,00 | 100 | 46.460.866.778,00 | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang memadai | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | | |
| | | Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang memadai | Persen | 85 | | 90 | | 90 | | |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **2.150.660.267.112,00** | | **2.464.652.438.068,00** | | **3.539.949.272.047,00** | |
| **1.01.** | **PENDIDIKAN** | | | | **321.434.080.080,00** | | **385.720.896.096,00** | | **707.154.976.176,00** | |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD | Persen | 100 | 195.786.517.680,00 | 100 | 234.943.821.216,00 | 100 | 430.730.338.896,00 | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP | Persen | 100 | 91.559.372.400,00 | 100 | 109.871.246.880,00 | 100 | 201.430.619.280,00 | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun | Persen | 100 | 11.296.390.800,00 | 100 | 13.555.668.960,00 | 100 | 24.852.059.760,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | dalam Pendidikan kesetaraan | | | | | | | | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Persen | 100 | 22.791.799.200,00 | 100 | 27.350.159.040,00 | 100 | 50.141.958.240,00 | |
| **1.02** | **KESEHATAN** | | | | **769.502.319.149,00** | | **756.080.180.591,00** | | **1.468.957.499.740,00** | |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar | Persen | 100 | 42.639.503.000,00 | 100 | 51.732.503.000,00 | 100 | 94.372.006.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 669.687.816.149,00 | 100 | 645.837.677.591,00 | 100 | 1.315.525.493.740,00 | |
| | | Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan | Persen | 85 | 54.000.000.000,00 | 90 | 54.000.000.000,00 | 90 | 54.000.000.000,00 | |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 80 | 1.575.000.000,00 | 90 | 1.950.000.000,00 | 90 | 1.950.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 100 | 550.000.000,00 | 100 | 960.000.000,00 | 100 | 1.510.000.000,00 | |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri | Persen | 20 | 750.000.000,00 | 25 | 1.000.000.000,00 | 25 | 1.000.000.000,00 | |
| | | Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga | Persen | 60 | 300.000.000,00 | 65 | 600.000.000,00 | 65 | 600.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **1.03** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | **982.243.851.633,00** | | **1.219.118.855.181,00** | | **1.233.709.289.931,00** | |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 46,60 | 86.035.336.000,00 | 47,50 | 34.253.356.006,00 | 47,50 | 34.253.356.006,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak | Persen | 73,6 | 50.157.991.000,00 | 76,90 | 74.386.986.500,00 | 76,90 | 74.386.986.500,00 | |
| 1.03.04 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan | Persen | 18,72 | 10.545.434.750,00 | 19,11 | 9.770.000.000,00 | 19,11 | 24.360.434.750,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak | Persen | 1,57 | 7.650.000.000,00 | 2,31 | 7.650.000.000,00 | 2,31 | 7.650.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Cakupan Drainase Lingkungan yang ditangani | Persen | 6,67 | 2.825.000.000,00 | 9,52 | 3.487.500.000,00 | 9,52 | 3.487.500.000,00 | |
| 1.03.07 | Program Pengembangan Permukiman | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | 18,90 | 41.447.400.000,00 | 24,57 | 62.171.100.000,00 | 24,57 | 62.171.100.000,00 | |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi | Persen | 9 | 260.734.227.000,00 | 9 | 388.601.340.500,00 | 9 | 388.601.340.500,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.09 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata | Persen | 68,75 | 222.200.000.000,00 | 75 | 332.225.000.000,00 | 75 | 332.225.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 81,30 | 292.239.571.883,00 | 85,30 | 299.763.572.175,00 | 85,30 | 299.763.572.175,00 | |
| 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang | Penyedia Jasa | 346 | 2.100.000.000,00 | 432 | 2.550.000.000,00 | 432 | 2.550.000.000,00 | |
| 1.03.12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase ketersediaan RTR | Persen | 60,00 | 5.580.000.000,00 | 70,00 | 3.800.000.000,00 | 70,00 | 3.800.000.000,00 | |
| | | Persentase pelayanan pemanfaatan ruang | Persen | 90,00 | 728.891.000,00 | 100,00 | 460.000.000,00 | 100,00 | 460.000.000,00 | |
| **1.04** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | **17.925.000.000,00** | | **18.700.000.000,00** | | **18.700.000.000,00** | |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana | Persen | 53,3 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 82,7 | 1.125.000.000,00 | 83,33 | 1.125.000.000,00 | 83,33 | 1.125.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.04 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Persen | 26,9 | 7.550.000.000,00 | 0 | 8.325.000.000,00 | 0 | 8.325.000.000,00 | |
| 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Sarana, Prasarana dan Utulitas Umum yang dibangun dan dikembangkan | Persen | 68,8 | 8.950.000.000,00 | 100 | 8.950.000.000,00 | 100 | 8.950.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **1.05** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | **17.023.338.750,00** | | **25.641.735.200,00** | | **31.611.735.200,00** | |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rasio petugas Perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT) | Persen | 85 | 150.000.000,00 | 90 | 400.000.000,00 | 90 | 550.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) | Persen | 100 | 2.050.000.000,00 | 100 | 5.375.000.000,00 | 100 | 7.425.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 1.270.000.000,00 | 100 | 1.650.000.000,00 | 100 | 2.920.000.000,00 | |
| 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | Persen | 100 | 6.953.338.750,00 | 100 | 7.053.338.750,00 | 100 | 7.053.338.750,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 3.500.000.000,00 | 100 | 3.888.396.450,00 | 100 | 3.888.396.450,00 | |
| | | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | |
| 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 90 | 2.500.000.000,00 | 90 | 6.675.000.000,00 | 90 | 9.175.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1.06** | **SOSIAL** | | | | **8.485.000.000,00** | | **8.107.300.600,00** | | **39.957.300.600,00** | Dinas Sosial |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1.06.02 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | 12,64 | 275.000.000,00 | 16,2 | 275.000.000,00 | 16,25 | 550.000.000,00 | |
| | | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | 1.750.000.000,00 | 58,33 | 1.250.000.000,00 | 58,33 | 3.000.000.000,00 | |
| 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 25,75 | 1.425.000.000,00 | 35,75 | 1.530.950.900,00 | 35,75 | 8.700.950.900,00 | |
| 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar | Persen | 98,00 | 3.900.000.000,00 | 98 | 3.916.349.700,00 | 98 | 23.466.349.700,00 | |
| 1.06.06 | Program Penanganan Bencana | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 925.000.000,00 | 100 | 925.000.000,00 | 100 | 3.650.000.000,00 | |
| 1.06.07 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola | Persen | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 590.000.000,00 | |
| **II.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **472.976.228.505,00** | | **552.776.460.984,00** | | **1.057.656.410.989,00** | |
| **2.07** | **TENAGA KERJA** | | | | **6.901.238.200,00** | | **6.749.803.750,00** | | **6.749.803.750,00** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | | 2.000.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 3.550.350.000,00 | | 3.550.350.000,00 | | 7.100.700.000,00 | |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 100 | 1.750.000.000,00 | 100 | 1.597.200.000,00 | 100 | 1.597.200.000,00 | |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan | Persen | 100 | 600.888.200,00 | 100 | 602.253.750,00 | 100 | 602.253.750,00 | |
| **2.08** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | **5.475.000.000,00** | | **5.475.000.000,00** | | **17.642.543.800,00** | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 45,16 | 975.000.000,00 | 61,29 | 975.000.000,00 | 61,29 | 3.982.543.800,00 | |
| 2.08.03 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 1.050.000.000,00 | 100 | 1.050.000.000,00 | 100 | 3.510.000.000,00 | |
| 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan | Persen | 100 | 1.200.000.000,00 | 100 | 1.200.000.000,00 | 100 | 3.600.000.000,00 | |
| 2.08.05 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase Ketersedian Data Gender dan Anak | Persen | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 900.000.000,00 | |
| 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persen | 46,15 | 550.000.000,00 | 65,38 | 550.000.000,00 | 57,69 | 1.450.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan | Persen | 100 | 1.400.000.000,00 | 100 | 1.400.000.000,00 | 100 | 4.200.000.000,00 | |
| **2.09** | **PANGAN** | | | | **12.265.000.000,00** | | **15.314.000.000,00** | | **35.279.000.000,00** | |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 5.110.000.000,00 | 100 | 7.060.000.000,00 | 100 | 14.190.000.000,00 | |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 94,5 | 4.115.000.000,00 | 95 | 4.760.000.000,00 | 95 | 11.915.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 1.420.000.000,00 | 100 | 1.510.000.000,00 | 100 | 4.270.000.000,00 | |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 1.620.000.000,00 | 100 | 1.984.000.000,00 | 100 | 4.904.000.000,00 | |
| **2.10** | **PERTANAHAN** | | | | **247.869.600.000,00** | | **371.804.400.000,00** | | **619.674.000.000,00** | |
| 2.10.04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasiltasi | Persen | 100 | 1.500.000.000,00 | 100 | 2.250.000.000,00 | 100 | 3.750.000.000,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Hektar | 3 | 246.369.600.000,00 | 3 | 369.554.400.000,00 | 3 | 615.924.000.000,00 | |
| **2.11** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | **9.034.700.000,00** | | **9.313.100.000,00** | | **26.286.000.000,00** | |
| 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 4 | 520.000.000,00 | 2 | 100.000.000,00 | 13 | 1.335.000.000,00 | |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persen | 100 | 458.000.000,00 | 100 | 602.000.000,00 | 100 | 1.314.000.000,00 | |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Indeks Tutupan vegetasi (ITV) | Poin | 0,41 | 914.200.000,00 | 0,42 | 1.008.100.000,00 | 0,42 | 2.518.850.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 5 | 20.000.000,00 | 7 | 30.000.000,00 | 45 | 50.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten | Persen | 34,04 | 337.500.000,00 | 36 | 430.000.000,00 | 36 | 1.422.500.000,00 | |
| 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | Jumlah komunitas kearipan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH | Komunitas | n/a | 100.000.000,00 | 2 | 100.000.000,00 | 2 | 200.000.000,00 | |
| 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Lembaga | 36 | 170.000.000,00 | 42 | 190.000.000,00 | 84 | 440.000.000,00 | |
| 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Desa/ Kelurahan | 8 | 120.000.000,00 | 16 | 200.000.000,00 | 24 | 320.000.000,00 | |
| 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penyelesain sengketa PPLH | Persen | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 275.000.000,00 | |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase pengelolaan sampah | Persen | 99,00 | 6.280.000.000,00 | 99,00 | 6.563.000.000,00 | 99,00 | 18.410.650.000,00 | |
| **2.12** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | **4.476.406.860,00** | | **5.147.868.050,00** | | **9.624.274.910,00** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.12.01 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | Persen | 98 | 558.101.860,00 | 98 | 641.817.139,00 | 98 | 1.199.918.999,00 | |
| | | Persentase Kepemilikan KTP | Persen | 97,5 | 873.007.000,00 | 97,5 | 1.003.958.050,00 | 97,5 | 1.876.965.050,00 | |
| | | Persentase Kepemilikan KIA | Persen | 35 | 520.098.000,00 | 40 | 598.112.861,00 | 40 | 1.118.210.861,00 | |
| 2.12.02 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun | Persen | 98 | 957.576.000,00 | 99 | 1.020.240.900,00 | 99 | 1.977.816.900,00 | |
| | | Persentase Kepemilikan Akte Kematian | Persen | 15 | 352.050.000,00 | 20 | 485.829.000,00 | 20 | 837.879.000,00 | |
| | | Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim | Persen | 5 | 98.574.000,00 | 6 | 113.360.100,00 | 6 | 211.934.100,00 | |
| 2.12.03 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Instansi yang mengunakan Data Base Kependudukan | Persen | 63 | 1.117.000.000,00 | 100 | 1.284.550.000,00 | 100 | 2.401.550.000,00 | |
| **2.13** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **8.600.000.000,00** | | **22.870.000.000,00** | | **31.470.000.000,00** | |
| 2.13.02 | Program Penataan Desa | Persentase Fasilitasi Program Penataan Desa Kategori Optimal | Persen | 100 | 680.000.000,00 | 100 | 2.000.000.000,00 | 100 | 2.680.000.000,00 | |
| 2.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | Persen | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan desa tertib administrasi | Persen | 75 | 3.820.000.000,00 | 90 | 8.770.000.000,00 | 90 | 12.590.000.000,00 | |
| 2.13.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | Persen | 85,71 | 3.750.000.000,00 | 100 | 11.850.000.000,00 | 100 | 15.600.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.14** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | **18.681.578.100,00** | | **11.595.705.500,00** | | **11.595.705.500,00** | |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan | Persen | 5 | 200.354.500,00 | 5 | 203.847.600,00 | 10 | 203.847.600,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Cakupan ketersediaan data pengendalian penduduk | Persen | 100 | 502.374.350,00 | 100 | 9.036.787.977,00 | 100 | 9.036.787.977,00 | |
| 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 75,37 | 5.098.848.150,00 | 75,67 | 2.217.189.885,00 | 75,67 | 2.217.189.885,00 | |
| | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 9,05 | 10.918.726.500,00 | 9,04 | 7.814.622.092,00 | 9,04 | 7.814.622.092,00 | |
| 2.14.04 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB, BKR dan BKL) | Persen | 18,30 | 980.637.300,00 | 20,87 | 389.651.962,00 | 20,87 | 389.651.962,00 | |
| | | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 3,53 | 980.637.300,00 | 4,33 | 389.651.961,00 | 4,33 | 389.651.961,00 | |
| **2.15** | **PERHUBUNGAN** | | | | **21.831.500.000,00** | | **24.583.675.000,00** | | **86.203.119.000,00** | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 64,88 | 12.929.000.000,00 | 77,27 | 16.229.000.000,00 | 77,27 | 60.658.000.000,00 | |
| | | Persentase Pelayanan Bidang Perhubungan | Persen | 80 | 7.992.500.000,00 | 90 | 8.094.675.000,00 | 90 | 23.704.175.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 50 | 910.000.000,00 | 66,67 | 260.000.000,00 | 66,67 | 1.840.944.000,00 | |
| **2.16** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | **7.550.000.000,00** | | **7.985.000.000,00** | | **22.165.000.000,00** | |
| 2.16.02 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah | Persen | 50 | 2.180.000.000,00 | 60 | 2.470.000.000,00 | 60 | 6.325.000.000,00 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 95 | 5.370.000.000,00 | 100 | 5.515.000.000,00 | 100 | 15.840.000.000,00 | |
| | | Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 90 | 1.175.000.000,00 | 100 | 1.700.000.000,00 | 100 | 3.803.282.200,00 | |
| **2.17** | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | **17.869.147.000,00** | | **19.353.050.000,00** | | **48.231.697.000,00** | |
| 2.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam | persen | 100 | 110.000.000,00 | 100 | 130.000.000,00 | 100 | 240.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.03 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi | persen | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.17.04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase KSP/USP Yang Sehat | persen | 50,51 | 130.000.000,00 | 70,51 | 250.000.000,00 | 70,51 | 480.000.000,00 | |
| 2.17.05 | Program Pendidkan dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian | persen | 12,08 | 506.097.000,00 | 22,08 | 600.000.000,00 | 22,08 | 1.606.097.000,00 | |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 5,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | 2.343.050.000,00 | 7,15 | 5.836.100.000,00 | |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 0,34 | 7.440.000.000,00 | 0,5 | 8.090.000.000,00 | 0,5 | 17.415.000.000,00 | |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,22 | 7.040.000.000,00 | 0,4 | 7.640.000.000,00 | 0,4 | 22.054.500.000,00 | |
| **2.18** | **PENANAMAN MODAL** | | | | **2.848.699.345,00** | | **2.918.858.684,00** | | **5.767.558.029,00** | |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | Persen | 60 | 1.200.026.650,00 | 90 | 1.236.442.036,00 | 90 | 2.436.468.686,00 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | Persen | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 800.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 83 | 598.672.695,00 | 87 | 632.416.648,00 | 87 | 1.231.089.343,00 | |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 80 | 450.000.000,00 | 85 | 450.000.000,00 | 85 | 900.000.000,00 | |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase data PM dan Perizinan yang Valid | Persen | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | |
| **2.19** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | **29.700.000.000,00** | | **23.900.000.000,00** | | **23.900.000.000,00** | |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang dibina | Organisasi | 97 | 1.300.000.000,00 | 97 | 1.500.000.000,00 | 97 | 1.500.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 700 | 1.250.000.000,00 | 700 | 1.300.000.000,00 | 1.400 | 1.300.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Jumlah Atlet yang berprestasi | Orang | 20 | 1.750.000.000,00 | 20 | 1.150.000.000,00 | 40 | 1.150.000.000,00 | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan | Event | 7 | 24.900.000.000,00 | 10 | 19.450.000.000,00 | 17 | 19.450.000.000,00 | |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina | Organisasi | 26 | 500.000.000,00 | 26 | 500.000.000,00 | 26 | 500.000.000,00 | |
| **2.20** | **STATISTIK** | | | | **320.000.000,00** | | **350.000.000,00** | | **964.000.000,00** | |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik | Persen | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 964.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **2.21** | **PERSANDIAN** | | | | **607.000.000,00** | | **681.000.000,00** | | **1.822.000.000,00** | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi | Persen | 54,26 | 607.000.000,00 | 62,01 | 681.000.000,00 | 62,01 | 1.822.000.000,00 | |
| **2.22** | **KEBUDAYAAN** | | | | **56.811.359.000,00** | | **3.850.000.000,00** | | **62.711.359.000,00** | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase OPK yang dikembangkan | Persen | 72,73 | 38.591.359.000,00 | 100 | 2.500.000.000,00 | 100 | 42.741.359.000,00 | |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | |
| 2.22.04 | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Sejarah Lokal yang dibina | persen | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | |
| 2.22.05 | Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | persen | 15,98 | 470.000.000,00 | 20,62 | 500.000.000,00 | 20,62 | 1.370.000.000,00 | |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | Jumlah Kunjungan wisatawan musieum | orang | 3000 | 17.400.000.000,00 | 4000 | 500.000.000,00 | 4000,00 | 17.900.000.000,00 | |
| **2.23** | **PERPUSTAKAAN** | | | | **15.630.000.000,00** | | **15.880.000.000,00** | | **31.510.000.000,00** | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Pamanfaatan Bahan Pustaka | Persen | 4,12 | 2.600.000.000,00 | 4,42 | 2.700.000.000,00 | 4,42 | 5.300.000.000,00 | |
| | | Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan | Persen | 86 | 12.775.000.000,00 | 90 | 12.900.000.000,00 | 90 | 25.675.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 2.23.03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 100 | 255.000.000,00 | 100 | 280.000.000,00 | 100 | 535.000.000,00 | |
| **2.24** | **KEARSIPAN** | | | | **6.505.000.000,00** | | **5.005.000.000,00** | | **11.510.000.000,00** | |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | 58 | 2.600.000.000,00 | 67 | 2.900.000.000,00 | 67 | 5.500.000.000,00 | |
| | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Arsip yang memadai | Persen | 90 | 3.000.000.000,00 | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 4.000.000.000,00 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.24.03 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan | Persen | 82 | 825.000.000,00 | 100 | 1.025.000.000,00 | 100 | 1.850.000.000,00 | |
| 2.24.04 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase izin penggunaan arsip | Persen | 7 | 80.000.000,00 | 8 | 80.000.000,00 | 8 | 160.000.000,00 | |
| **III** | **UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **606.068.363.644,09** | | **778.994.105.162,19** | | **1.882.452.829.813,25** | |
| **3.25** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | **9.800.000.000,00** | | **10.435.000.000,00** | | **24.835.000.000,00** | |
| 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persen | 100 | 2.125.000.000,00 | 100 | 2.630.000.000,00 | 100 | 5.605.000.000,00 | |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 5.175.000.000,00 | 100 | 5.750.000.000,00 | 100 | 13.575.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.05 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum | Persen | 100 | 1.050.000.000,00 | 100 | 1.250.000.000,00 | 100 | 3.000.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 1.450.000.000,00 | 100 | 805.000.000,00 | 100 | 2.655.000.000,00 | |
| **3.26** | **PARIWISATA** | | | | **8.575.000.000,00** | | **7.650.000.000,00** | | **19.020.000.000,00** | |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 6 | 3.750.000.000,00 | 7 | 1.650.000.000,00 | 25 | 6.070.000.000,00 | |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 14 | 2.650.000.000,00 | 14 | 3.000.000.000,00 | 14 | 7.000.000.000,00 | |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 1.475.000.000,00 | 16 | 2.000.000.000,00 | 16 | 3.600.000.000,00 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya | Orang | 120 | 700.000.000,00 | 140 | 1.000.000.000,00 | 320 | 2.350.000.000,00 | |
| **3.27** | **PERTANIAN** | | | | **536.746.483.244,09** | | **693.191.130.762,19** | | **1.718.011.198.531,25** | |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 52,92 | 459.597.287.831,29 | 70,07 | 609.273.656.266,83 | 70,07 | 1.503.265.989.079,09 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan pengembangan sarana pertanian | Persen | 47,08 | 2.700.000.000,00 | 29,93 | 3.150.000.000,00 | 29,93 | 8.100.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | 100 | 8.900.000.000,00 | 100 | 10.350.000.000,00 | 100 | 24.800.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1.952 | 49.820.395.412,80 | 2.088 | 58.026.474.495,36 | 2.234 | 141.140.209.452,16 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100 | 9.950.000.000,00 | 100 | 5.250.000.000,00 | 100 | 23.500.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persen | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 2.300.000.000,00 | 100 | 2.650.000.000,00 | |
| 03:27:05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95,00 | 725.000.000,00 | 95,00 | 738.000.000,00 | 95,00 | 2.175.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 12,00 | 825.000.000,00 | 10,00 | 838.000.000,00 | 10,00 | 2.475.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 03:27:07 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 34,00 | 3.628.800.000,00 | 27,37 | 2.865.000.000,00 | 100,13 | 9.255.000.000,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **3.28** | **KEHUTANAN** | | | | **1.344.472.200,00** | | **1.313.824.400,00** | | **3.098.296.600,00** | |
| 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 69,66 | 1.344.472.200,00 | 70,79 | 1.313.824.400,00 | 70,79 | 3.098.296.600,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3.30** | **PERDAGANGAN** | | | | **43.125.000.000,00** | | **59.100.000.000,00** | | **105.141.329.482,00** | |
| 3.30.02 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persen | 100,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000.000,00 | |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | Persen | 42,90 | 39.240.000.000,00 | 52,00 | 55.000.000.000,00 | 52,00 | 95.409.680.000,00 | |
| 3.30.04 | Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 12,00 | 370.000.000,00 | 12,00 | 450.000.000,00 | 12,00 | 1.220.000.000,00 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor | Cakupan pengembangan ekspor | kali | 10,00 | 215.000.000,00 | 10,00 | 350.000.000,00 | 22,00 | 765.000.000,00 | |
| 3.30.06 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 1.750.000.000,00 | 100 | 1.750.000.000,00 | 100,00 | 3.600.000.000,00 | |
| 3.30.07 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | kali | 5 | 1.050.000.000,00 | 5 | 1.050.000.000,00 | 15,00 | 3.146.649.482,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| **3.31** | **PERINDUSTRIAN** | | | | **3.873.258.200,00** | | **4.300.000.000,00** | | **9.342.855.200,00** | |
| 3.31.02 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pembangunan Kawasan Industri | Persen | 30,00 | 2.573.258.200,00 | 45,00 | 3.000.000.000,00 | 45,00 | 6.742.855.200,00 | |
| 3.31.03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Jumlah pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota | Laporan | 14 | 400.000.000,00 | 14 | 400.000.000,00 | 28 | 800.000.000,00 | |
| 3.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Jumlah pengelolaan sistem informasi industri nasional | Laporan | 4 | 900.000.000,00 | 12 | 900.000.000,00 | 16 | 1.800.000.000,00 | |
| **3.32** | **TRANSMIGRASI** | | | | **2.604.150.000,00** | | **3.004.150.000,00** | | **3.004.150.000,00** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi | Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi | Lokasi | 1 | 1.754.150.000,00 | 1 | 2.104.150.000,00 | 4 | 2.104.150.000,00 | |
| 3.32.04 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Jumlah transmigran yang dilatih | KK | 5 | 850.000.000,00 | 5 | 900.000.000,00 | 25 | 900.000.000,00 | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **41.530.350.800,00** | | **47.101.475.880,00** | | **90.246.026.680,00** | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **11.716.620.900,00** | | **11.325.000.000,00** | | **24.655.820.900,00** | |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan | Persen | 100 | 650.000.000,00 | 100 | 725.000.000,00 | 100 | 1.375.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| | | Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, | Persen | 100 | 6.906.602.900,00 | 100 | 6.000.000.000,00 | 100 | 12.906.602.900,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelayanan Bagian Hukum | Persen | 100 | 1.256.000.000,00 | 100 | 1.350.000.000,00 | 100 | 2.606.000.000,00 | |
| | | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 100 | 790.000.000,00 | 100 | 850.000.000,00 | 100 | 1.640.000.000,00 | |
| 4.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 475.000.000,00 | 100 | 550.000.000,00 | 100 | 1.456.700.000,00 | |
| | | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan Triwulanannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 550.000.000,00 | 100 | 625.000.000,00 | 100 | 1.639.200.000,00 | |
| | | Tingkat Kematangan UKPBJ | Level | Level 4 | 725.518.000,00 | Level 5 | 825.000.000,00 | Level 5 | 2.155.318.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori ”baik” | Persen | 100 | 363.500.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | 100 | 877.000.000,00 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | **29.813.729.900,00** | | **35.776.475.880,00** | | **65.590.205.780,00** | |
| 4.02.02. | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Kerja Sama dan Pengawasan | Persen | 100 | 18.624.630.400,00 | 100 | 22.968.466.430,00 | 100 | 41.593.096.830,00 | |
| | | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas | Persen | 100 | 7.088.829.500,00 | 100 | 8.297.712.450,00 | 100 | 15.386.541.950,00 | |
| | | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Program dan Keuangan | Persen | 100 | 854.610.000,00 | 100 | 940.071.000,00 | 100 | 1.794.681.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Umum | Persen | 100 | 3.245.660.000,00 | 100 | 3.570.226.000,00 | 100 | 6.815.886.000,00 | |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **601.449.390.000,00** | | **670.535.929.390,00** | | **1.276.658.616.940,00** | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | **12.451.369.300,00** | | **13.208.146.230,00** | | **31.530.147.580,00** | |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 1.410.000.000,00 | 100 | 1.526.000.000,00 | 100 | 2.936.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase Kedtercapaian Target Program Pembangunan Berkategori Baik | Persen | 100 | 1.210.100.000,00 | 100 | 1.234.350.000,00 | 100 | 2.444.450.000,00 | |
| 5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 2.512.500.000,00 | 100 | 2.690.750.000,00 | 100 | 6.412.547.050,00 | |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 2.876.000.000,00 | 100 | 2.940.000.000,00 | 100 | 7.270.400.000,00 | |
| | | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 4.442.769.300,00 | 100 | 4.817.046.230,00 | 100 | 12.466.750.530,00 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | **565.276.135.100,00** | | **631.118.709.000,00** | | **1.188.983.659.000,00** | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 95 | 1.450.000.000,00 | 97 | 1.650.000.000,00 | 97 | 3.100.000.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 2.230.000.000,00 | 100 | 2.900.000.000,00 | 100 | 5.130.000.000,00 | |
| | | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 95 | 550.000.000.000,00 | 97 | 610.000.000.000,00 | 97 | 1.160.000.000.000,00 | |
| | | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 95 | 2.700.000.000,00 | 97 | 3.110.000.000,00 | 97 | 5.810.000.000,00 | |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 90 | 1.484.950.000,00 | 91 | 2.009.709.000,00 | 91 | 3.494.659.000,00 | |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 85 | 7.411.185.100,00 | 90 | 11.449.000.000,00 | 90 | 11.449.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | **22.096.885.600,00** | | **24.306.574.160,00** | | **54.242.310.360,00** | |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 2.730.000.000,00 | 100 | 3.003.000.000,00 | 100 | 6.964.253.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 98 | 1.916.800.000,00 | 100 | 2.108.480.000,00 | 100 | 5.255.430.000,00 | |
| | | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 85 | 16.614.485.600,00 | 100 | 18.275.934.160,00 | 100 | 39.971.654.760,00 | |
| | | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 835.600.000,00 | 100 | 919.160.000,00 | 100 | 2.050.972.600,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | **1.625.000.000,00** | | **1.902.500.000,00** | | **1.902.500.000,00** | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 1.275.000.000,00 | 100 | 1.505.500.000,00 | 100 | 1.505.500.000,00 | |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | Persen | 100 | 530.000.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **8.728.829.045,00** | | **9.992.795.208,00** | | **26.214.535.553,00** | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | **8.728.829.045,00** | | **9.992.795.208,00** | | **26.214.535.553,00** | Inspektorat Kabupaten |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase pemenuhan unsur SPIP | Persen | 100 | 6.254.359.280,00 | 100 | 7.122.595.208,00 | 100 | 18.707.854.288,00 | |
| | | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi | Persen | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 450.000.000,00 | |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Presentase pemenuhan elemen IACM | Persen | 100 | 1.207.469.765,00 | 100 | 1.394.000.000,00 | 100 | 3.658.481.265,00 | |
| | | Cakupan Zona Integritas | Persen | 100 | 1.117.000.000,00 | 100 | 1.276.200.000,00 | 100 | 3.398.200.000,00 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **53.054.259.200,00** | | **56.195.586.947,00** | | **74.354.313.447,00** | |
| **7.01** | **KECAMATAN CIMALAKA** | | | | **1.848.918.800,00** | | **1.955.000.000,00** | | **1.955.000.000,00** | Kecamatan Cimalaka |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 538.254.100,00 | 100 | 570.000.000,00 | 100 | 570.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 832.056.100,00 | 100 | 875.000.000,00 | 100 | 875.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 242.357.600,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 186.251.000,00 | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 210.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN BUAHDUA** | | | | **1.946.000.000,00** | | **1.262.000.000,00** | | **4.452.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 498.000.000,00 | 100 | 270.000.000,00 | 100 | 1.296.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 1.162.000.000,00 | 100 | 820.000.000,00 | 100 | 2.486.000.000,00 | Kecamatan Buahdua |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 37.000.000,00 | 100 | 37.000.000,00 | 100 | 129.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 219.000.000,00 | 100 | 105.000.000,00 | 100 | 441.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN RANCAKALONG** | | | | **803.024.800,00** | | **898.000.000,00** | | **898.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 174.000.000,00 | 100 | 219.000.000,00 | 100 | 219.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 404.000.000,00 | 100 | 414.000.000,00 | 100 | 414.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | 100 | 115.000.000,00 | Kecamatan Rancakalong |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 25.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100.024.800,00 | 100 | 120.000.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | **KECAMATAN SUMEDANG SELATAN** | | | | **6.199.000.000,00** | | **6.416.600.000,00** | | **6.416.600.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Poin | 100 | 355.000.000,00 | 100 | 442.000.000,00 | 100 | 442.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 5.490.000.000,00 | 100 | 5.615.600.000,00 | 100 | 5.615.600.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | | 100 | 85.000.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | Kecamatan Sumedang Selatan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Poin | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 189.000.000,00 | 100 | 194.000.000,00 | 100 | 194.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATIGEDE** | | | | **2.016.000.000,00** | | **2.047.000.000,00** | | **2.047.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 418.000.000,00 | 100 | 418.000.000,00 | 100 | 418.000.000,00 | Kecamatan Jatigede |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 1.219.000.000,00 | 100 | 1.230.000.000,00 | 100 | 1.230.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 95.000.000,00 | 100 | 95.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 229.000.000,00 | 100 | 244.000.000,00 | 100 | 244.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN TOMO** | | | | **1.899.000.000,00** | | **2.084.200.000,00** | | **2.084.200.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 526.000.000 | 100 | 578.600.000 | 100 | 578.600.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 849.000.000 | 100 | 933.900.000 | 100 | 933.900.000,00 | Kecamatan Tomo |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 125.000.000 | 100 | 134.500.000 | 100 | 134.500.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 110.000.000 | 100 | 119.300.000 | 100 | 119.300.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 289.000.000 | 100 | 317.900.000 | 100 | 317.900.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATINANGOR** | | | | **1.796.000.000,00** | | **1.796.000.000,00** | | **1.796.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 488.000.000,00 | 100 | 488.000.000,00 | 100 | 488.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 923.000.000,00 | 100 | 923.000.000,00 | 100 | 923.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Kecamatan Jatinangor |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 56.000.000,00 | 100 | 56.000.000,00 | 100 | 56.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 229.000.000,00 | 100 | 229.000.000,00 | 100 | 229.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | |
| | **KECAMATAN SITURAJA** | | | | **1.822.000.000,00** | | **1.838.000.000,00** | | **1.838.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 473.000.000,00 | 100 | 473.000.000,00 | 100 | 473.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 928.000.000,00 | 100 | 928.000.000,00 | 100 | 928.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 142.000.000,00 | 100 | 142.000.000,00 | 100 | 142.000.000,00 | Kecamatan Situraja |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 65.000.000,00 | 100 | 65.000.000,00 | 100 | 65.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 214.000.000,00 | 100 | 230.000.000,00 | 100 | 230.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CIMANGGUNG** | | | | **1.935.000.000,00** | | **1.940.000.000,00** | | **1.940.000.000,00** | Kecamatan Cimanggung |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 436.000.000,00 | 100 | 418.000.000,00 | 100 | 418.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 1.005.000.000,00 | 100 | 1.034.000.000,00 | 100 | 1.034.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 160.000.000,00 | 100 | 160.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 264.000.000,00 | 100 | 228.000.000,00 | 100 | 228.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN SUKASARI** | | | | **1.655.200.000,00** | | **1.685.200.000,00** | | **1.685.200.000,00** | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 334.400.000,00 | 100 | 349.400.000,00 | 100 | 349.400.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 946.600.000,00 | 100 | 947.600.000,00 | 100 | 947.600.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 95.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 56.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 223.200.000,00 | 100 | 248.200.000,00 | 100 | 248.200.000,00 | |
| | **KECAMATAN SURIAN** | | | | **1.870.000.000,00** | | **1.935.000.000,00** | | **1.935.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 428.000.000,00 | 100 | 458.000.000,00 | 100 | 458.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 1.053.000.000,00 | 100 | 1.058.000.000,00 | 100 | 1.058.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 65.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | Kecamatan Surian |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 55.000.000,00 | 100 | 55.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 274.000.000,00 | 100 | 284.000.000,00 | 100 | 284.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN DARMARAJA** | | | | **1.807.000.000,00** | | **1.807.000.000,00** | | **1.807.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 498.000.000 | 100 | 498.000.000,00 | 100 | 498.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 905.000.000 | 100 | 905.000.000,00 | 100 | 905.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | Kecamatan Darmaraja |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000,00 | 100 | 40.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 264.000.000 | 100 | 264.000.000,00 | 100 | 264.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CISITU** | | | | **1.080.000.000,00** | | **1.188.000.000,00** | | **1.188.000.000,00** | Kecamatan Cisitu |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 337.000.000,00 | 100 | 370.700.000,00 | 100 | 370.700.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 483.000.000,00 | 100 | 531.300.000,00 | 100 | 531.300.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 66.000.000,00 | 100 | 66.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 65.000.000,00 | 100 | 71.500.000,00 | 100 | 71.500.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 135.000.000,00 | 100 | 148.500.000,00 | 100 | 148.500.000,00 | |
| | **KECAMATAN CONGGEANG** | | | | **1.937.000.000,00** | | **2.027.000.000,00** | | **2.027.000.000,00** | Kecamatan Conggeang |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 468.000.000,00 | 100 | 473.000.000,00 | 100 | 473.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 705.000.000,00 | 100 | 710.000.000,00 | 100 | 710.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 435.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | 100 | 85.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 249.000.000,00 | 100 | 259.000.000,00 | 100 | 259.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN PASEH** | | | | **1.383.200.000,00** | | **1.454.000.000,00** | | **3.182.334.500,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 324.400.000,00 | 100 | 340.000.000,00 | 100 | 703.892.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 771.600.000,00 | 100 | 797.000.000,00 | 100 | 1.743.962.500,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 70.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 245.000.000,00 | Kecamatan Paseh |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 40.000.000,00 | 100 | 45.000.000,00 | 100 | 110.280.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 177.200.000,00 | 100 | 192.000.000,00 | 100 | 379.200.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGSARI** | | | | **1.823.000.000,00** | | **2.005.296.000,00** | | **2.005.296.000,00** | Kecamatan Tanjungsari |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 539.739.000,00 | 100 | 593.712.000,00 | 100 | 593.712.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 937.919.850,00 | 100 | 1.031.711.000,00 | 100 | 1.031.711.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 37.786.250,00 | 100 | 41.564.000,00 | 100 | 41.564.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 37.044.000,00 | 100 | 40.748.000,00 | 100 | 40.748.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 270.510.900,00 | 100 | 297.561.000,00 | 100 | 297.561.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | **KECAMATAN PAMULIHAN** | | | | **1.288.169.600,00** | | **1.288.169.600,00** | | **1.288.169.600,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | Persen | 558.049.000,00 | 100 | 558.049.000,00 | 100 | 558.049.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | Persen | 527.000.000,00 | 100 | 527.000.000,00 | 100 | 527.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | Persen | 19.120.600,00 | 100 | 19.120.600,00 | 100 | 19.120.600,00 | Kecamatan Pamulihan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | Persen | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | Persen | 154.000.000,00 | 100 | 154.000.000,00 | 100 | 154.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CISARUA** | | | | **1.589.200.000,00** | | **1.750.000.000,00** | | **1.750.000.000,00** | Kecamatan Cisarua |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 319.400.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | 100 | 350.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 827.600.000,00 | 100 | 875.000.000,00 | 100 | 875.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 180.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 212.200.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN GANEAS** | | | | **1.768.000.000,00** | | **1.768.000.000,00** | | **1.768.000.000,00** | Kecamatan Ganeas |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 453.000.000,00 | 100 | 453.000.000,00 | 100 | 453.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 946.000.000,00 | 100 | 946.000.000,00 | 100 | 946.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 105.000.000,00 | 100 | 105.000.000,00 | 100 | 105.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 35.000.000,00 | 100 | 35.000.000,00 | 100 | 35.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 229.000.000,00 | 100 | 229.000.000,00 | 100 | 229.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN UJUNGJAYA** | | | | **1.226.000.000,00** | | **1.485.675.347,00** | | **1.485.675.347,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 235.000.000,00 | 100 | 284.675.347,00 | 100 | 284.675.347,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 551.000.000,00 | 100 | 726.000.000,00 | 100 | 726.000.000,00 | Kecamatan Ujungjaya |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 85.000.000,00 | 100 | 135.000.000,00 | 100 | 135.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 130.000.000,00 | 100 | 130.000.000,00 | 100 | 130.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 225.000.000,00 | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 210.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGKERTA** | | | | **1.779.000.000,00** | | **1.680.000.000,00** | | **3.460.300.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 428.000.000,00 | 100 | 400.000.000,00 | 100 | 834.300.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 970.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 1.699.000.000,00 | Kecamatan Tanjungkerta |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 45.000.000,00 | 100 | 150.000.000,00 | 100 | 150.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 215.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 306.000.000,00 | 100 | 250.000.000,00 | 100 | 562.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN SUMEDANG UTARA** | | | | **4.392.500.000,00** | | **4.687.200.000,00** | | **4.687.200.000,00** | Kecamatan Sumedang Utara |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 195.500.000,00 | 100 | 282.700.000,00 | 100 | 282.700.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 3.856.500.000,00 | 100 | 4.054.500.000,00 | 100 | 4.054.500.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 152.500.000,00 | 100 | 155.000.000,00 | 100 | 155.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 76.000.000,00 | 100 | 78.000.000,00 | 100 | 78.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 112.000.000,00 | 100 | 117.000.000,00 | 100 | 117.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | **KECAMATAN WADO** | | | | **1.053.000.000,00** | | **750.000.000,00** | | **1.335.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 160.000.000,00 | 100 | 130.000.000,00 | 100 | 325.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 503.000.000,00 | 100 | 440.000.000,00 | 100 | 695.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 20.000.000,00 | 100 | 80.000.000,00 | Kecamatan Wado |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 70.000.000,00 | 100 | 90.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 90.000.000,00 | 100 | 145.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN CIBUGEL** | | | | **1.031.000.000,00** | | **1.125.000.000,00** | | **1.125.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 88,56 | 265.000.000,00 | 90 | 300.000.000,00 | 100 | 300.000.000,00 | Kecamatan Cibugel |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 88,56 | 450.000.000,00 | 90 | 450.000.000,00 | 100 | 450.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 88,56 | 40.000.000,00 | 90 | 75.000.000,00 | 100 | 75.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 88,56 | 96.000.000,00 | 90 | 100.000.000,00 | 100 | 100.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 88,56 | 180.000.000,00 | 90 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN TANJUNGMEDAR** | | | | **1.071.000.000,00** | | **1.141.000.000,00** | | **3.244.000.000,00** | Kecamatan Tanjungmedar |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 211.000.000,00 | 100 | 236.000.000,00 | 100 | 827.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 530.000.000,00 | 100 | 525.000.000,00 | 100 | 1.405.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 60.000.000,00 | 100 | 146.000.000,00 | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 80.000.000,00 | 100 | 120.000.000,00 | 100 | 270.000.000,00 | |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 596.000.000,00 | |
| | **KECAMATAN JATINUNGGAL** | | | | **1.250.000.000,00** | | **1.250.000.000,00** | | **1.250.000.000,00** | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 327.000.000,00 | 100 | 327.000.000,00 | 100 | 327.000.000,00 | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 726.000.000,00 | 100 | 726.000.000,00 | 100 | 726.000.000,00 | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | 100 | 30.000.000,00 | Kecamatan Jatinunggal |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | 100 | 50.000.000,00 | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 117.000.000,00 | 100 | 117.000.000,00 | 100 | 117.000.000,00 | |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | **4.786.046.000,00** | | **6.932.246.000,00** | | **15.704.338.000,00** | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | **4.786.046.000,00** | | **6.932.246.000,00** | | **15.704.338.000,00** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Program (outcome) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 210.000.000,00 | 100 | 370.000.000,00 | 100 | 682.500.000,00 | |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat Pendidikan Partai Politik | Persen | 100 | 1.012.246.000,00 | 100 | 1.027.246.000,00 | 100 | 3.210.738.000,00 | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang aktif | Persen | 85,05 | 400.000.000,00 | 100 | 830.000.000,00 | 100 | 1.335.000.000,00 | |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial, ekonomi dan Budaya | Persen | 100 | 1.000.000.000,00 | 100 | 1.195.000.000,00 | 100 | 2.607.000.000,00 | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 2.163.800.000,00 | 100 | 3.510.000.000,00 | 100 | 7.869.100.000,00 | |
| **JUMLAH BELANJA URUSAN** | | | | | **3.938.253.734.306,09** | | **4.586.181.037.639,19** | | **7.961.236.343.469,25** | |
| **JUMLAH BELANJA PENUNJANG URUSAN DAN BELANJA URUSAN** | | | | | **5.542.579.274.420,09** | | **6.350.939.131.764,59** | | **9.725.994.437.594,65** | |

*Sumber : Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah (indikator tujuan) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel 8.1, pada tabel ini terdapat penyesuaian target dampak dari COVID 19 yang terjadi pada semester I Tahun 2020 baik secara Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, serta untuk menggunakan indikator tujuan atau sasaran penetapan Indikator Utama Daerah tersajikan dalam Tabel 8.2, pada tabel ini menyajikan target dan capaian tahun 2019-2020 dan target kesepakatan Tahun 2021-2023 tersaji pada tabel ini. Lebih lanjut, sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) disajikan pada Tabel 8.3 untuk target dan capaian Tahun 2019-2020 sedangkan target Perubahan RPJMD tersaji pada tabel 8.4. Untuk dan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 8.5 yang berisi capaian Tahun 2019-2020 dan Penetapan indikator dan target Tahun 2021 tersaji pada Tabel 8.6.a dan Tahun 2022-2023 tersaji pada Tabel 8.6.b

**Tabel 8.1.**
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sumedang**
**Tahun 2021-2023**

| No | Variabel | Satuan | Kondisi Awal | | 2019 | | Target RPJMD | | | 2020 | | Terget Perubahan RPJMD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Capaian | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 70,07 | 70,99 | 71,39 | 71,46 | 73,11 | 73,97 | 74,83 | 71,30–71,95 | 71,64 | 71.72–72.00 | 71.93-72.48 | 72.40-73.37 |
| 2 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 10,53 | 9,76 | 8,96 | 9,05 | 7,36 | 6,56 | 5,76 | 10,04 – 9,87 | 10,26 | 10,75-9,71 | 10.41-9,54 | 9,70-7,56 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,15 | 7,04 | 6,55 | 7,63 | 6,15 | 5,96 | 5,68 | 7,90 – 7,87 | 9,89 | 8.51-9.35 | 8.78-7.99 | 8.18-6.95 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 6,33 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | (3) – (1,74) | -1,12 | 3.66 – 4.70 | 4.70-5.70 | 5.20-6.20 |
| 5 | Gini Ratio | Poin | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,344 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,382 | 0,384 | 0,39-0,36 | 0,38-0,35 | 0,37-0,34 |
| 6 | PDRB Per Kapita | Juta rupiah | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,74 | 30.75-32.08 | 32.09-33.84 | 33.85-34.70 |

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 8.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang**
**Tahun 2018-2023**
**(Sebelum Perubahan)**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | REALISASI | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72 | 72,14 | 72,29 | 72,44 | 72,43 |
| 2 | Rata-Rata lama Sekolah | Tahun | 7,98 | 8,17 | 8,27 | 8,48 | 8,51 |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,93 | 12,94 | 12,96 | 13,44 | 12,97 |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 10,53 | 9,76 | 9,05 | 8,16 | 10,26 |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 94,60 | 94,88 | 95,01 | 95,34 | 95,34 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 68,08 | 70,57 | 70,57 | 69.77 | - |
| 7 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | n/a | 72,2 | n/a | 73 | n/a |
| 8 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,23 | 5,83 | 6,32 | 7.01 | -1.12 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | REALISASI | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 9 | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | | 62,8 | 70,75 | 70,80 | 76.96 |
| 10 | Rasio Jaringan Irigasi | Persen | | 60 | 62,02 | 64 | 64.46 |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | | 58,68 | 59,01 | 59,18 | 59,18 |
| 12 | Indeks Resiko Bencana | Poin | | 162 | 157 | 150 | 150 |
| 13 | Oponi BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 14 | Nilai Sakip Kabupaten | Kategori | B | B | B | BB | BB |
| 15 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | | 56,05 | 79,34 | 70 | 70 |
| 16 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | | 80,74 | 82,27 | 83 | 83 |
| 17 | Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan | Rp (Juta) | 9.569 | 10.153 | 10.406 | 10.380 | 10.217 |
| 18 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,15 | 7,52 | 7,63 | 7,9-7,87 | 9,89 |
| 19 | Jumlah UMKM | UMKM | | 15.467 | 2.800 | 17.467 | 1.557 |

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 8.3**
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang**
**Tahun 2018-2023**
**(Setelah Perubahan)**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,43 | 72.51-72.70 | 72.65-72.82 | 72.70-73.20 | 73.20 |
| 2 | Rata-Rata lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,51 | 8.50-8.57 | 8.58-8.80 | 8.81-9.00 | 9.00 |
| 3 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,97 | 12.91-12.98 | 12.99-13.04 | 13.05-13.12 | 13.12 |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 10,26 | 10,75-9,71 | 10.41-9,54 | 9,70-7,56 | 7.56 |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 95,34 | 95,81 | 96,28 | 96,75 | 96,75 |
| 6 | Indeks Pemberdayaan Gender | Poin | 70,78 | 70,80 | 70,84 | 71,37 | 71,37 |
| 7 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | n/a | 73,5 | 74 | 74,5 | 74,5 |
| 8 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persen | -1.46 | 5.38 | 2.20 - 4.15 | 4.15 - 6.40 | 6.40 |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | TARGET SETELAH PERUBAHAN | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Persen | 2.82 | 3.13-4.97 | 3.45-5.28 | 3.76-5.59 | 5,59 |
| 10 | Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Persen | -4.50 | 0.23-1.74 | 4.50-6.01 | 8.77-10.27 | 10.27 |
| 11 | Indeks Kualitas Infrastruktur | Poin | 71,65 | 71,65 | 74,65 | 77,65 | 77,65 |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 59,18 | 63,85 | 64,26 | 64,67 | 64,67 |
| 13 | Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang | Persen | -0,04 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 14 | Indeks Ketahahan Daerah | Poin | n/a | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Skor Pola Pangan Harapan | Persen | 89,1 | 88 | 89,4 | 90,2 | 90,2 |
| 16 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 17 | Nilai Sakip Kabupaten | Kategori | BB | A | A | A | A |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 83 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| 19 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 3,3 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 20 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9,89 | 8.51-9.35 | 8.78-7.99 | 8.18-6.95 | 6.95 |

**Tabel 8.4.a**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah**
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2021**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN WAJIB** | | | | | | | | |
| **1,1** | **URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Angka partisipasi Kasar (APK) SD | Persen | 106,75 | 106,83 | 106,93 | 107,03 | 104,46 | 99,34 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | Persen | 103,42 | 103,62 | 103,72 | 103,82 | 103,80 | 97,96 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | 105,23 | 105,34 | 105,44 | 105,55 | 104,06 | 97,45 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | 102,78 | 102,99 | 103,19 | 103,40 | 103,74 | 88,51 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.5 | Persentase Guru yang Bersertifikasi | Persen | 65,03 | 66,09 | 73,77 | 82,52 | 63,26 | 90,23 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.6 | Sekolah pendidikan Dasar kondisi bangunan baik | Persen | 13,45 | 21,51 | 29,50 | 37,49 | 21,51 | 37,92 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.7 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD) | - | 1 : 27 | 1 : 27 | 1 : 27 | 1:27 | 1 : 27 | 1:17 | Dinas Pendidikan |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1.8 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SMP) | - | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1:32 | 1 : 32 | 1:15 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.9 | APK PAUD | Persen | 88,44 | 89,53 | 89,62 | 89,71 | 89,53 | 80,60114351 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.10 | Persentase PAUD yang terakreditasi | Persen | 31,08 | 52,89 | 74,7 | 96,51 | 74,7 | 45,32 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.11 | Angka partisipasi kasar kesetaraan | Persen | 1,35 | 1,63 | 1,9 | 2,1 | 1,63 | 3 | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.12 | Persentase siswa Bersertifikat Diniyah | Persen | n/a | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | | | | |
| **1.1.2** | **KESEHATAN** | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Jumlah Kematian Ibu | Jiwa | 16 | 13 | 10 | 8 | 14 | 21 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.2 | Jumlah Kematian Bayi | Jiwa | 155 | 140 | 120 | 94 | 114 | 137 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan | Poin | 78,73 | 85 | 87 | 90 | 82,5 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.4 | Persentase Balita Stunting | Persen | 32,2 | 29 | 26 | 23 | 24,4 | 17,5 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.5 | Prevalensi HIV/AIDS | Persen | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0.04 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.6 | Angka Kesakitan Penyakit Menular | Angka | 113/ 100.000 | 111/ 100.000 | 109/ 100.000 | < 107/100.000 | 56/100.000 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.7 | Universal Health Coverage | Persen | 73,17 | 96 | 97 | 98 | 76,46 | 77,06 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.8 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Poin | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,40 | 0,13 | 0,13 | Dinas Kesehatan |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2.9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B | Persen | 98 | 98 | 98 | 100 | 98,92 | 96,12 | Rumas Sakit Umum Daerah |
| 1.1.2.10 | IKM Rumah Sakit | poin | 83,7 | 90 | 91 | 92 | 83,79 | 83,92 | Rumas Sakit Umum Daerah |
| 1.1.2.11 | Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit | Persen | 88,25 | 90 | 91 | 92 | 91,03 | 90 | Rumas Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,8 | 74,80 | 70,75 | 76,96 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.2 | Rasio jaringan irigasi | Persen | 60 | 62 | 64 | 60 | 62,02 | 64,46 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.3 | Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,22 | 75,11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.4 | Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi | Persen | 0 | 20 | 40 | 60 | 23 | 40,06 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.5 | Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata | Persen | 20 | 28,75 | 48,75 | 58,75 | 35 | 58,75 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3.6 | Persentase penanganan sampah | persen | n/a | 80 | 75 | 70 | 99,975 | 99,97333333 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.7 | Persentase pengurangan sampah | persen | n/a | 20 | 25 | 30 | 99,9 | 99,92 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.8 | Persentase RTH Terkelola | Persen | 11,04 | 11,04 | 11,07 | 11,11 | #N/A | #N/A | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| | | | | | | | | | |
| **1.1.4** | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 80 | 80,67 | 81,33 | 82,00 | 80,13 | 80,34 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.4.2 | Persentase lingkungan Pemukiman kumuh | Persen | 0,31 | 0,3 | 0,27 | 0,15 | 0,3 | 0 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.4.3 | Persentase Rumah Tangga berakses air minum | Persen | 79,02 | 80 | 83 | 85 | 79,92 | 80,45 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | pertanahan |
| 1.1.4.4 | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi | Persen | 55 | 60 | 65 | 70 | 55,23 | 55,29 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| | | | | | | | | | |
| **1.1.5** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | Persen | 60,55 | 65 | 70 | 75 | 60,55 | 81,42 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.2 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.3 | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.4 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | Persen | 32,04 | 60 | 70 | 80 | 32,04 | 93,17 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.5 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah | Persen | 87,5 | 87,5 | 90 | 90 | 75,1 | 94,32 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | Manajemen Kebakaran (WMK) | | | | | | | | |
| 1.1.5.6 | Indeks Resiko Bencana | Poin | 162 | 155 | 150 | 145 | 157 | 150 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| | | | | | | | | | |
| **1.1.6** | **SOSIAL** | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persen | 10,05 | 9,25 | 8,45 | 7,65 | 9,11 | 8,1 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | | | | | | | |
| **1,2** | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1.2.1** | **TENAGA KERJA** | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,04 | 6,55 | 6,35 | 6,15 | 7,63 | 9,89 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi |
| 1.2.1.2 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.2** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.2.1 | Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.2 | Kabupaten Layak Anak | Skor | 501 | 601 | 650 | 701 | 549,7 | 0 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.3 | Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkat Ekonomi Keluarganya | Persen | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 3,70 | 0,7 | 9,7 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.3** | **PANGAN** | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Persen | 85 | 87,3 | 88,5 | 89,60 | 87,7 | 89,10 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.4** | **PERTANAHAN** | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,82 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.2.4.2 | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,37 | 99,19 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.5** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | |
| 1.2.5.1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 47,89 | 48,09 | 48,29 | 48,49 | #N/A | #N/A | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 80,29 | 80,49 | 80,69 | 80,89 | #N/A | #N/A | |
| 1.2.5.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | 50,57 | 50,86 | 51,22 | 51,63 | #N/A | #N/A | |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.7** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | | |
| 1.2.7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | Poin | 76 | 80 | 83 | 85 | 80 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.2 | Persentase Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Wajib KTP | Persen | 89 | 97 | 97 | 98 | 97 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.3 | Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran | Persen | 81 | 91 | 91 | 93 | 91,2 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.4 | Persentase Data Ganda dan Anomali | Persen | 17 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.8** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Persentase Desa Berkembang dan Cepat Berkembang | Persen | 56,3 | 74,8 | 92,6 | 100 | 94 | 95,50 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.2 | Persentase Klasifikasi BUMDes Maju dan Berkembang | Persen | 24,8 | 50 | 81,5 | 100 | 29,37 | 82,22 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.3 | Persentase Penerapan Siskudes Kategori Optimal | Persen | 32,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80,47 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 212 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.8.2 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | Persen | 4,12 | 3,71 | 3,3 | 2,88 | 4,01 | 4,51 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | berencana |
| 1.2.8.3 | Persentase Keluarga Sejahtera 1 | Persen | 67,03 | 58,22 | 49,42 | 40,61 | 17,28 | 18,26 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| 1.2.9.1 | Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persen | 25,31 | 31,27 | 42,12 | 51,83 | 98,47 | 79,04 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.9.2 | Cakupan Trayek Angkutan Umum | Persen | 58,45 | 59,85 | 61,24 | 62,64 | 88,32 | 50,74 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.9.3 | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum | orang/hari | 10044 | 10284 | 10524 | 10,764 | 10284 | 10428 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.9.4 | Persentase Kendaraan Laik Jalan | Persen | 83,4 | 86,7 | 90 | 93,30 | 91,92 | 62,59 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.9.5 | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas | Jumlah Pelanggaran | 1787 | 1490 | 1133 | 984 | 30 | 135,48 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.9.6 | Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP) | Persen | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 100 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.10** | **KOMUNIKASI DAN INFORMASI** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.10.1 | Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| 1.2.10.2 | Nilai SPBE | Poin | 2,46 | 3 | 3,3 | 3,60 | 2,51 | 3,81 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.11** | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | |
| 1.2.11.1 | Cakupan Koperasi Aktif | persen | 72,93 | 75 | 78 | 81 | 77,41 | 38,39 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 1.2.11.2 | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 17467 | 18.467 | 2.800 | 1.557 | |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | |
| 1.2.12.1 | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp) | 1,10617E+12 | 1,21679E+12 | 1,33847E+12 | 1.606.158.840.000 | 9,15826E+11 | 1,33847E+12 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| 1.2.12.2 | Indek Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan | Poin | 84,11 | 84,95 | 86,25 | 87,23 | 85,25 | 86,25 | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | |
| 1.2.13.1 | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | Persen | n/a | 80 | 90 | 100 | 80 | 100 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 1.2.13.2 | Jumlah Atlet yang berprestrasi tingkat Nasional | atlet | 14 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.14** | **STATISTIK** | | | | | | | | |
| 1.2.14.1 | Presentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | Persen | 45,5 | 70 | 85 | 95 | 67,8 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.15** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | |
| 1.2.15.1 | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen | n/a | 33,33 | 50 | 66,67 | 27,59 (8 OPD) | 207,14 (29 OPD) | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | |
| 1.2.17.1 | Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan | Orang | 70235 | 73511 | 75716 | 77.988 | 73671 | 12304 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| 1.2.17.2 | Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling | Persen | 22,22 | 31 | 48 | 64 | 31 | 82,27 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| 1.2.17.3 | Tingkat kepuasan pengunjung | Persen | 74,4 | 76 | 80 | 84 | 88,05 | 0,34 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| | | | | | | | | | |
| **1.2.18** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | |
| 1.2.18.1 | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | 3,64 | 21,82 | 40 | | 21,82 | 40 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| | | | | | | | | | |
| 2 | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| 2,1 | **KELAUTAAN DAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | **PERIKANAN** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | laju pertumbuhan Subsektor Perikanan | Persen | 3,15 | 4 | 4,6 | 58,18 | n/a | n/a | Dinas perikanan dan peternakan |
| | | | | | | | | | |
| 2,2 | **PARIWISATA** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 498472 | 598.166 | 717.800 | 861.360 | 81.494 | 717.800 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 2.2.2 | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional | Persen | 44 | 63 | 75 | 100 | 63 | 100 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| | | | | | | | | | |
| **2,3** | **PERTANIAN** | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian : | | | | | | | | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | Tanaman Pangan | Persen | 10,04 | 10,14 | 10,24 | 10,34 | 19,14 | n/a | |
| | Tanaman Hortikultura | Persen | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,40 | 4 | n/a | |
| | Perkebunan | Persen | 4,12 | 4,2 | 4,8 | 5,50 | 18,79 | n/a | |
| 2.3.2 | laju pertumbuhan Subsektor Peternakan | persen | 3,68 | 4,3 | 4,9 | 5,50 | n/a | n/a | Dinas perikanan dan peternakan |
| | | | | | | | | | |
| **2,4** | **KEHUTANAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.1 | Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi | Persen | 60 | 63 | 64 | 66 | #N/A | #N/A | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 2.4.2 | Nilai Pengelolaan Hutan Kota | Nilai | 83 | 83 | 83 | 83 | #N/A | #N/A | |
| | | | | | | | | | |
| **2,5** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | Persen | 4,59 | 4,89 | 5,19 | 5,49 | 4.89 | n/a | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| | | | | | | | | | |
| **2,6** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Laju Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan | Persen | 5,29 | 5,32 | 5,35 | 5,38 | 5.32 | n/a | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| | | | | | | | | | |
| **2,7** | **TRANMIGRASI** | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | KK | 51 | 56 | 61 | 66 | 6 | 56 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi |
| | | | | | | | | | |
| **3** | **URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **3,1** | **INSPEKTORAT** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 20 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | Inspektorat |
| 3.1.2 | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIPnya Berkategori "Baik" | Persen | 36 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | Inspektorat |
| 3.1.3 | Tingkat Kapabilitas APIP/ IACM | Kategori | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | level 3 | Inspektorat |
| 3.1.4 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Persen | n/a | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 | Inspektorat |
| 3.1.5 | Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan sesuai rekomendasi | Persen | 75 | 80 | 90 | 90 | 82 | 85 | Inspektorat |
| 3.1.6 | Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD | Persen | 8,79 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | Inspektorat |
| | | | | | | | | | |
| **3,2** | **PERENCANAAN** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD | Persen | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | daerah |
| 3.2.2 | Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD | Persen | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| 3.2.3 | Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD | Persen | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| 3.2.4 | Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik" | Persen | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| | | | | | | | | | |
| **3.3.** | **KEUANGAN** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.2 | APBD Tepat Waktu | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.3 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 16,47 | 17,03 | 17,77 | 17,03 | #N/A | #N/A | Badan pengelolaan pendapatan |
| 3.3.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah | Poin | 77,34 | 85 | 87 | 90 | #N/A | #N/A | |
| | | | | | | | | | |
| **3,4** | **KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 59 | 65 | 70 | 75,00 | 59,45 | 65,03 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.2 | Indeks Sistem Merit ASN | Poin | 48,9 | 60 | 66,25 | 72,50 | 60,88 | 74,47 | |
| | | | | | | | | | |
| **3,5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan | Persen | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| | | | | | | | | | |
| **3,6** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 3.6.1 | Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.2 | Persentase Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.3 | Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.4 | Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.5 | Persentase Perangkat Daerah Bidang Administrasi Umum Yang Capaian Target Kinerja Tahunannya Berkategori "Baik" | Persen | n/a | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.6 | Nilai LPPD Kabupaten | Angka | 3,092 | 3,15 | 3,3 | 3,45 | 3,15 | n/a | Sekretariat Daerah |
| 3.6.7 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 56,06 | 65 | 70 | 75,00 | 22,38 | n/a | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 3.6.8 | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | B | B | BB | A | B | n/a | Sekretariat Daerah |
| 3.6.9 | Cakupan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.10 | Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama | Persen | 46,67 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.11 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik” | Persen | 60 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.12 | Tingkat Kematangan UKPBJ | Kategori | Level 1 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.13 | Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.14 | Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Program Sumedang Simpati | Persen | 30 | 65 | 70 | 75 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| 3.6.15 | Cakupan Tertib Administrasi Keuangan | Persen | 90 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target | | | Realisasi | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 3.6.16 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persen | 80 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #N/A | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | | | |
| **3,7** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persen | 93,4 | 100 | 100 | 100 | 92,75 | 93,68 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | | | |
| **4** | **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | |
| **4,1** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 72,2 | 72,5 | 73 | 100 | 0 | 0 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.2 | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | Persen | 100 | 100 | 100 | 80,65 | 100 | 100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | Persen | 80,60 | 80,65 | 80,65 | 100 | 83,5 | 79 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.4 | Persentase Ormas yang dibina kategori Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |

*Sumber Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

**Tabel 8.4.b**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah**
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023**

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1 | **URUSAN WAJIB** | | | | | | |
| 1,1 | **URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| 1.1.1 | **PENDIDIKAN** | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | 46,84 | 53,53 | 53,53 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 1.1.1.2 | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | Persen | 26,77 | 30,11 | 30,11 | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.2 | **KESEHATAN** | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Ratio kematian ibu | kelahiran Hidup | 100/100.000 KH | 95/100.000 KH | 95/100.000 KH | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Ratio kematian bayi | kelahiran Hidup | 5/1.000 KH | 3/1.000 KH | 3/1.000 KH | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| 1.1.2.3 | Prevalensi stunting | Persen | 12 | 9 | 9 | | |
| 1.1.2.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan | Persen | 91 | 92 | 92 | | |
| 1.1.2.5 | Angka Kematian Karena Penyakit DBD (CFR DBD) | Persen | < 1 | < 1 | < 1 | | |
| 1.1.2.6 | PHBS Tatanan Rumah Tangga | Persen | 60 | 65 | 65 | | |
| 1.1.2.7 | IKM Rumah Sakit | poin | 93 | 95 | 95 | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1.1.2.8 | Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional | Nilai | 84 | 85 | 85 | | |
| | | | | | | | |
| 1.1.3 | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap | Persen | 81,3 | ;85,30 | 85,3 | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.1.3.2 | Cakupan pelayanan daerah irigasi | ha | 20.633,40 | 21.054,30 | 21.054,30 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.1.3.3 | Ketaatan Terhadap RTR | Persen | 65 | 70 | 70 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| 1.1.3.4 | Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, stamdar, prosedur dan kriteria | Persen | 80 | 100 | 100 | | |
| 1.1.3.5 | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air minum Layak | Persen | 73,6 | 76,9 | 76,86 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |
| 1.1.3.6 | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak | Persen | 1,57 | 2,31 | 2,31 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.1.3.7 | Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata | Persen | 68,75 | 75 | 75 | Program Penataan Bangunan Gedung<br>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.1.4 | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 82,67 | 83,33 | 83,33 | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.1.4.2 | Persentase Luas Kawasan Kumuh | Persen | 44,99 | 40,9 | 40,9 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | |
| 1.1.5 | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Cakupan penanganan pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan ketertiban) | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.2 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 90 | 90 | 90 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.3 | Indeks Ketahanan Daerah | poin | 0,49 | 0,52 | 0,52 | Program Penanggulangan Bencana | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.1.6 | **SOSIAL** | | | | | | |
| 1.1.6.1 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persen | 65 | 75 | 75 | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | | | | |
| 1.2 | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| 1.2.1 | **TENAGA KERJA** | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan | Persen | 20 | 20 | 20 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| | | | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| 1.2.1.2 | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 1.2.2 | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Persentase Perempuan yang Mampu memenuhi kehidupan Keluarga | Persen | 22,65 | 25,15 | 25,15 | Program Perlindungan Perempuan | Dinas Pengendalian Penduduk dan |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.2.2 | Persentase Perempuan Korban tindak Kekerasan | Persen | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.2.2.3 | Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak | Persen | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Program Perlindungan Khusus Anak | |
| 1.2.2.4 | Kabupaten Layak Anak | Skor | 750 | 801 | 801 | | |
| 1.2.3 | **PANGAN** | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok | kg/kapita /tahun | 231 | 231 | 231 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | |
| 1.2.3.2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Persen | 89,4 | 90,2 | 90,2 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | |
| | | | | | | | |
| 1.2.4 | **PERTANAHAN** | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.2.4.2 | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 85,63 | 100 | 100 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | |
| | | | | | | | |
| 1.2.5 | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | |
| 1.2.5.1 | Persentase penanganan sampah | persen | 73 | 72 | 72 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.5.2 | Persentase pengurangan sampah | persen | 26 | 27 | 27 | Program Pengelolaan Persampahan | |
| 1.2.5.3 | Persentase RTH Terkelola | Persen | 11,14 | 11,17 | 11,17 | | |
| 1.2.5.4 | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 48,69 | 48,89 | 48,89 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| | | | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | |
| | | | | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Untuk Masyarakat | |
| 1.2.5.5 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 81,09 | 81,29 | 81,29 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | |
| 1.2.5.6 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | 59,86 | 61,04 | 61,04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | |
| | | | | | | | |
| 1.2.7 | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | |
| 1.2.7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan | Poin | 91 | 93 | 93 | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.2 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 97 | 98 | 98 | Program Pengelolaan Informasi | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Administrasi Kependudukan | |
| 1.2.7.3 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 92 | 93 | 93 | Program Pencatatan Sipil | |
| 1.2.8 | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Persentase Status Desa Mandiri | persen | 30,74 | 40,37 | 40,37 | Program Penataan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 1.2.8.2 | Persentase Status Desa Maju | Persen | 52,22 | 59,63 | 59,63 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | |
| 1.2.8.3 | Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan | Persen | 20 | 20 | 20 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat | |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.9 | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | |
| 1.2.9.1 | Total Fertility Rate (TFR) | Kelahiran | 2.07 | 2.04 | 2.04 | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | |
| 1.2.9.2 | Persentase Keluarga Pra Sejahtera | Persen | 3,97 | 3,76 | 3,76 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | |
| 1.2.9.3 | Persentase Keluarga Sejahtera 1 | Persen | 17,09 | 16,76 | 16,76 | | |
| | | | | | | | |
| 1.2.10 | **PERHUBUNGAN** | | | | | | |
| 1.2.10.1 | Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | persen | 64,96 | 77,98 | 77,98 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.11 | **KOMUNIKASI DAN INFORMASI** | | | | | | |
| 1.2.11.1 | Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang | Persen | 50 | 60 | 60 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 1.2.11.2 | Nilai SPBE | Poin | 4,1 | 4,2 | 4,2 | Program Aplikasi Informatika | |
| 1.2.12 | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | |
| 1.2.12.1 | Jumlah Koperasi Yang Modern | Koperasi | 2 | 3 | 5 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindusrtian Dan Perdagangan |
| | | | | | | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | |
| 1.2.12.2 | Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omset | UMKM | 1000 | 1000 | 2.000 | Program Pemberdayaan | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | |
| **1.2.13** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | |
| 1.2.13.1 | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | (Rp) | 1.927.390.608.000 | 2.505.607.790.400 | 2.505.607.790.400 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Program Promosi Penanaman Modal | |
| | | | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| 1.2.13.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | Poin | 88,31 | 90 | 90 | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.14 | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | |
| 1.2.14.1 | Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif | persen | 100 | 100 | 100 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 1.2.14.2 | Jumlah Atlet berprestasi | orang | 20 | 20 | 20 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | | | | | | | |
| 1.2.15 | **STATISTIK** | | | | | | |
| 1.2.15.1 | Persentase Ketersediaan Data Sesuai dengan Standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.16 | **PERSANDIAN** | | | | | | |
| 1.2.16.1 | Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) | Skor | 350 | 400 | 400 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 1.2.17 | **KEBUDAYAAN** | | | | | | |
| 1.2.17.1 | Cakupan perlindungan/ pengembangan/ pemanfaatan/ pembinaan kebudayaan | persen | 100 | 100 | 100 | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | | | | | | Program Pembinaan Sejarah | |
| | | | | | | Program Pelestraian dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Permuseuman | |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 1.2.18 | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | |
| 1.2.18.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 11,08 | 11,62 | 11,62 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
| 1.2.18.2 | Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Poin | 50,506 | 50,508 | 50,508 | | |
| | | | | | | | |
| 1.2.19 | **KEARSIPAN** | | | | | | |
| 1.2.19.1 | Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal | Kategori | BB | A | A | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Arsip Dan Perpustakaan |
| **2** | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | |
| **2.1** | **URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | |
| 2.1.1 | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1400,54 | 1519,58 | 1519,58 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perikanan |
| | | | | | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 2.1.2 | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 8241,16 | 8405,99 | 8405,99 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | |
| | | | | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | |
| **2.2** | **PARIWISATA** | | | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah kunjungan wisatawan | orang | 700.000 | 875.000 | 2.946.822 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| | | | | | | Program Pemasaran Pariwisata | |
| 2.2.2 | Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan | persen | 100 | 100 | 100 | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | | | |
| **2.3** | **PERTANIAN** | | | | | | |
| 2.3.1 | Jumlah produksi komoditas pertanian : | | 903.027 | 965.324 | 965.324 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | A. Tanaman Pangan : | Ton | 903.027 | 965.324 | 965.324 | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | - Padi | Ton | 647.544 | 691.957 | 691.957 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | - Jagung | Ton | 414.398 | 443.406 | 443.406 | Program Penyuluhan Pertanian | |
| | - Tanaman Pangan Lainnya | Ton | 117.816 | 126.063 | 126.063 | | |
| | B. Holtikultura | Ton | 115.330 | 122.488 | 122.488 | | |
| | C. Perkebunan | Ton | 247.937 | 265.292 | 265.292 | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 2.3.2 | Persentase peningkatan produktivitas peternakan | Persen | 5,18 | 5,18 | 5,18 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perikanan |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| | | | | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | |
| 2.4.3 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | Persen | 80,8 | 80,8 | 80,8 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | | | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |
| | | | | | | | |
| **2.4** | **URUSAN KEHUTANAN** | | | | | | |
| 2.4.1 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Poin | 59,86 | 61,04 | 61,04 | Program Konservasi Sumber Daya | Dinas Lingkungan Hidup dan |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Alam Hayati dan Ekosistemnya | Kehutanan |
| **2.5** | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | | |
| 2.5.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Persen | 1.55 - 2.77 | 2.77 - 4.33 | 4.33 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindusrtian Dan Perdagangan |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | | | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | |
| | | | | | | Rogram Pengembangan Ekspor | |
| | | | | | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | | | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | |
| | | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| **2.6** | **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | |
| 2.6.1 | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | Persen | 2.20 - 4.15 | 4.15 - 6.40 | 6.40 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindusrtian Dan Perdagangan |
| | | | | | | | |
| **2.7** | **TRANMIGRASI** | | | | | | |
| 2.7.1 | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | KK | 5 | 5 | 25 | Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi<br>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| | | | | | | | |
| **3** | **URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG** | | | | | | |
| 3.1 | **INSPEKTORAT** | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase tindaklanjut pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi | Persen | 92 | 95 | 95 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| 3.1.2 | Maturitas SPIP | Persen | Level 3 + | Level 4 | Level 4 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | |
| 3.1.3 | Persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap APBD | Persen | 5 | 4 | 4 | | |
| 3.1.4 | Persentase pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP | Persen | 67,08 | 71,25 | 71,25 | | |
| 3.1.5 | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM | Level | 100 | 100 | 100 | | |
| **3.2** | **PERENCANAAN** | | | | | | |
| 3.2.1 | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 3.2.2 | Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik" | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| **3.3.** | **KEUANGAN** | | | | | | |
| 3.3.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Kategori | WTP | WTP | WTP | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 3.3.2 | Penetapan APBD | Status | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 3.3.3 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 17,77 | 18,99 | 18,99 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | |
| **3.4** | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | |
| 3.4.1 | Indeks Sistem Merit | Poin | 315 | 340 | 340 | Program | Badan |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 3.4.2 | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 74 | 79 | 79 | Kepegawaian Daerah | Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | | |
| **3.5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | |
| 3.5.1 | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| **3.6** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | |
| 3.6.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang | Poin | 74 | 74,5 | 74,5 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 3.6.2 | Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan aministrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persen | 100 | 100 | 100 | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 3.6.3 | Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan aministrasi bidang pembangunan dan ekonomi | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Perekonomian dan Pembangunan | |
| 3.6.4 | Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan aministrasi bidang administrasi umum | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| 3.6.5 | Indeks Reformasi Perangkat Daerah | Poin | 29,04 | 30,86 | 30,86 | | |
| 3.6.6 | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Kategori | A | A | A | | |
| 3.7 | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | |
| 3.7.1 | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD |
| 3.7.2 | Tingkat Kepuasan DPRD atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persen | 80 | 80 | 80 | | |
| | | | | | | | |
| **4** | **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 4.1 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | |
| 4.1.1.1 | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |

| No | Indikator | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| 4.1.1.2 | Tingkat Bina Demokratisasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | |

**Tabel 8.5**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Target Kinerja Daerah**
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020**

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | periode RPJMD | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| 1 | **URUSAN WAJIB** | | | | | |
| 1.1.1 | **PENDIDIKAN** | | | | | |
| 1.1.1.1 | Persentase Siswa Paud yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Persen | n/a | 100 | 100 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 119,01 | 119,13 | 119,25 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.3 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 88,69 | 88,95 | 89,21 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.4 | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,09 | 0,08 | 0,07 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.5 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,81 | 0,80 | 0,79 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.6 | Persentase Sekolah pendidikan Dasar kondisi Bangunan baik | Persen | 13,45 | 21,51 | 29,50 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.7 | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,01 | 0,05 | 0,04 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.8 | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,71 | 0,60 | 0,50 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.9 | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 3,13 | 3,03 | 2,93 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.10 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 97,20 | 97,49 | 98,00 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.11 | Rata rata peningkatan hasil UN | Persen | 46,13 | 49,82 | 53,51 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.12 | Cakupan Pelayanan Pendidikan | Persen | 85,47 | 86,32 | 87,17 | Dinas Pendidiakan |
| 1.1.1.13 | Persentase siswa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan diniyah | Persen | n/a | 0 | 100 | Dinas Pendidiakan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | | | | | |
| 1.1.2 | **KESEHATAN** | | | | | |
| 1.1.2.1 | Persentase Ketersediaan farmasi, reagent dan perbekalan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.2 | Persentase Ketersediaan alat kesehatan | Persen | 60 | 70 | 80 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.3 | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.4 | Persentase capaian SDM Bidang Kesehatan | Persen | 83 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.5 | Cakupan Desa siaga aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.6 | Persentase Lingkungan Bersih Sehat | Persen | 72 | 80 | 85 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.7 | Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.8 | Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.9 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.10 | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.2.11 | Persentase sarana kesehatan yang Terakreditasi | Persen | 77,78 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.12 | Persentase Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi | Persen | 48 | 52 | 60 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.13 | Persentase Anemia Pada Ibu Hamil | Persen | 8,07 | 7,67 | 7,27 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.14 | Persentase BBLR | Persen | 3,09 | 2,49 | 1,81 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.15 | Persentase balita gizi lebih | Persen | 1,01 | 0,95 | 0,79 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.16 | Persentase balita gizi kurus | Persen | 2,11 | 1,01 | 0,91 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.17 | Persentase lansia yang mendapat screening kesehatan | Persen | 54,2 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.18 | Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang | Persen | 73,13 | 95 | 96 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.19 | Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.20 | Persentase Pengadaan kelengkapan Alat kesehatan Rumah Sakit | Persen | 98 | 98 | 98 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.21 | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis | Persen | 86,21 | 90 | 91 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.22 | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan | Persen | 88,64 | 90 | 91 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.23 | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis | Persen | 87,96 | 90 | 91 | Dinas Kesehatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.2.24 | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran | Persen | 89,08 | 90 | 91 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.25 | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan | Persen | 87,64 | 90 | 91 | Dinas Kesehatan |
| 1.1.2.26 | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian | Persen | 90 | 91 | 92 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | |
| 1.1.3 | **PEKERJAAN UMUM** | | | | | |
| 1.1.3.1 | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang | Persen | 62,8 | 66,8 | 70,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.2 | Persentase Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 42 | 43,4 | 44,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.3 | Persentase pembangunan turap di wilayah sungai rawan longsor | Persen | 18 | 18,6 | 19,20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.4 | Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terverfikasi | Persen | 0 | 20 | 40 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.5 | Persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.1.3.6 | Persentase Sarana Air Minum yang terbangun | Persen | 70 | 80 | 83 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.3.7 | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata | Persen | 20 | 28,75 | 48,75 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.3.8 | Persentase Bangunan yang tersertifikasi laik fungsi | Persen | n/a | 4,54 | 12,04 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.3.9 | Timbulan Sampah yang ditangani | Persen | n/a | 80 | 75,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.10 | Indek kepuasan masyarakat; | Persen | 71,31 | 77 | 78,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.11 | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 5,38 | 5,52 | 5,68 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.12 | Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Persen | 68,53 | 69,00 | 69,33 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.13 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal | Persen | 19 | 20 | 25 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.1.3.14 | Persentase Luas RTH terkelola | Persen | 11,04 | 11,04 | 11,07 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| | | | | | | |
| 1.1.4 | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.4.1 | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/Permukiman Tradisional | Persen | 50 | 52,61 | 55,22 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.4.2 | Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | Persen | 80 | 80,13 | 80,30 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.4.3 | Persentase PSU di Lingkungan Kompleks Perumahan/Permukiman (Pengembang) | Persen | 0 | 1,5 | 4,50 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.1.4.4 | Persentase Sanitasi yang terbangun | Persen | 55 | 65 | 70 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| | | | | | | |
| 1.1.5 | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1.1.5.1 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Persen | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.2 | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang Setiap RT) | Persen | 60,55 | 65 | 70 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.3 | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.5.4 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | Persen | 32,04 | 60 | 70 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.5 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 87,5 | 87,5 | 88 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.1.5.6 | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana | Desa/ kelurahan | 277 | 277 | 277 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| 1.1.5.7 | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Desa/ Kelurahan | 0 | 5 | 10 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| 1.1.5.8 | Persentase Kecepatan Respons Bencana Kurang dari 24 Jam | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| 1.1.5.9 | Persentase Korban Bencana yang diberikan bantuan | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| 1.1.5.10 | Persentase pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisikan | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan penanggulangan bencana daerah |
| | | | | | | |
| 1.1.6 | **SOSIAL** | | | | | |
| 1.1.6.1 | Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya | Persen | 1,71 | 2,86 | 4,01 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.1.6.2 | Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar | Persen | 8,53 | 16,88 | 26,17 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.3 | Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 2,77 | 11,17 | 20,74 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.4 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 5,73 | 14,89 | 24,05 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.5 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Persen | 0,68 | 10,61 | 20,54 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.6 | Persentase PMKS yang direhabilitasi | Persen | n/a | 10 | 20 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.7 | Persentase Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang aktif | Persen | 50,00 | 58,33 | 58,33 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.8 | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.9 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | Persen | 52,14 | 53,24 | 53,24 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.1.6.10 | Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2 | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| 1.2.1 | **TENAGA KERJA** | | | | | |
| 1.2.1.1 | Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat | Persen | 60 | 100 | 100 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi |
| 1.2.1.2 | Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 20 | 20 | 20 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi |
| 1.2.1.3 | Persentase kasus yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi |
| | | | | | | |
| 1.2.2 | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | |
| 1.2.2.1 | Persentase OPD Responsif Gender | Persen | 9,68 | 16,13 | 33,87 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.2 | Jumlah Kebijakan Pengarustamaan Gender yang dihasilkan | Perda/ Perbup | 1 | 3 | 4 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.3 | Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.4 | Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | Persen | 3,85 | 19,23 | 30,77 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 1.2.2.5 | Persentase Organisasi wanita yang aktif | Persen | 9,52 | 14,29 | 33,33 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.2.6 | Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga | Persen | 12,84 | 13,96 | 15,07 | Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | | | | | | |
| 1.2.3 | **PANGAN** | | | | | |
| 1.2.3.1 | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 1.2.3.2 | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 91,50 | 92,50 | 93,50 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 1.2.3.3 | Persentase Pembinaan dan Pengasawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | | | | | | |
| 1.2.4 | **PERTANAHAN** | | | | | |
| 1.2.4.1 | Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| 1.2.4.2 | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan |
| | | | | | | |
| 1.2.5 | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.5.1 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | Persen | 26,90 | 30,90 | 36,6 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.2 | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.3 | Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup; | Persen | 15 | 30 | 50 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.4 | Persentase pengujian kualitas air sungai; | Persen | 40,74 | 48,15 | 55,56 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.5 | Persentase kecukupan instrumen pengelolaan lingkungan | Persen | 98,91 | 99,53 | 100,00 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.6 | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan | Persen | 3,16 | 3,39 | 4,08 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.7 | Persentase Pemantuan Kualitas Udara | Persen | 66,67 | 68,89 | 73,33 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.8 | Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati | Persen | 29,86 | 30,55 | 31,37 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 1.2.5.9 | Persentase mata air yang dilindungi | Persen | 12,12 | 13,42 | 15,15 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.7 | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | |
| 1.2.7.1 | Persentase layanan yang sesuai standar manajemen mutu | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.2 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 81 | 94 | 94 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.3 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 74 | 86 | 86 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.2.7.4 | Jumlah Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan | Instansi | 0 | 10 | 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | |
| 1.2.8 | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | |
| 1.2.8.1 | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan | Persen | 30 | 33 | 36 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.2 | Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif | Persen | 35 | 50 | 95 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.3 | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 0 | 10 | 40 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.4 | Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar | Persen | 32,2 | 100 | 100 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| 1.2.8.5 | Persentase Desa yang Pengelolaan aset Desa yang akurat | Persen | 0 | 5 | 40 | Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.9 | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | |
| 1.2.9.1 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 74,28 | 74,47 | 74,77 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.2 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 8,37 | 9,08 | 9,07 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.3 | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif | Persen | 68,94 | 70 | 72 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.4 | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif | Persen | 64,37 | 65 | 65,62 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.5 | Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif | Persen | 62,81 | 63 | 63,41 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.6 | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 49,62 | 50,07 | 51,93 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| 1.2.9.7 | Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita | Tahun | 19,50 | 19,60 | 19,70 | Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| | | | | | | |
| 1.2.10 | **PERHUBUNGAN** | | | | | |
| 1.2.10.1 | Persentase Kelengkapan Dokumen perhubungan | Persen | 5,06 | 6,25 | 8,42 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.2 | Persentase Ketersediaan Rambu – Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas | Persen | 7,59 | 9,38 | 12,64 | Dinas Perhubungan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.10.3 | Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum | Persen | 10,12 | 12,51 | 16,85 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.4 | Persentase ketersedian Terminal/Dermaga | Persen | 2,53 | 3,13 | 4,21 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.5 | Jumlah Trayek Angkutan Umum | trayek | 837 | 857 | 877 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.6 | Jumlah KIR Angkutan Umum | unit | 9.000 | 9.357 | 9.714 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.7 | Peningkatan Penumpang Angkutan Umum/hari | orang/ hari | 10.044 | 10.284 | 10.524 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.8 | Persentase Satuan Ruas Parkir | Persen | 50 | 60 | 70 | Dinas Perhubungan |
| 1.2.10.9 | Jumlah Operasi Lalu Lintas | Kali | 6 | 2 | 17 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | |
| 1.2.11 | **KOMUNIKASI DAN INFORMASI** | | | | | |
| 1.2.11.1 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 27 | 50 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| 1.2.11.2 | Cakupan Media Masa yang dikembangkan | Persen | n/a | 100 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| 1.2.11.3 | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah | Persen | 25,45 | 50 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| 1.2.11.4 | Cakupan Akses Internet di Desa/Kelurahan | Persen | 93,86 | 96,39 | 100 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | |
| 1.2.12 | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.12.1 | Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 423 | 449 | 458 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 1.2.12.2 | Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi | Koperasi | 362 | 72 | 72 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 1.2.12.3 | Peningkatan jumlah koperasi besar | Koperasi | 8 | 10 | 12 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 1.2.12.4 | Jumlah UMKM | UMKM | 15.467 | 16.467 | 17.467 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 1.2.12.5 | Jumlah UMKM yang mendapat Sapras | UMKM | 2.566 | 3.530 | 4.561 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| | | | | | | |
| 1.2.13 | **PENANAMAN MODAL** | | | | | |
| 1.2.13.1 | Persentase peningkatan jumlah investor | Persen | 10 | 20 | 30 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| 1.2.13.2 | Persentase izin yang terbit tepat waktu | Persen | 60 | 75 | 76 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.13.3 | Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| 1.2.13.4 | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 50 | 50 | 60 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| | | | | | | |
| 1.2.14 | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | |
| 1.2.14.1 | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang di bina | Organisasi | n/a | 270 | 304 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 1.2.14.2 | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 1.010 | 2.387 | 2.542 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 1.2.14.3 | Jumlah atlet pemula yang dibina | orang | 14 | 20 | 20 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 1.2.14.4 | Jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan | Kali | 6 | 10 | 15 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| | | | | | | |
| 1.2.15 | **STATISTIK** | | | | | |
| 1.2.15.1 | Persentase Ketersediaan Data yang Akurat dan Berkualitas | Persen | 45,5 | 70 | 85 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | |
| 1.2.16 | **PERSANDIAN** | | | | | |
| 1.2.16.1 | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen | n/a | 33 | 50 | Dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1.2.17 | **KEBUDAYAAN** | | | | | |
| 1.2.17.1 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan Daerah yang di lindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Objek | 11 | 11 | 11 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| | | | | | | |
| 1.2.18 | **PERPUSTAKAAN** | | | | | |
| 1.2.18.1 | Peningkatan Jumlah Pengunjung perpustakaan | Orang | 70.235 | 73.511 | 75.716 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| 1.2.18.2 | Tingkat kepuasan pengunjung | Persen | 74,4 | 76 | 80 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| 1.2.18.3 | Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling | Persen | 22,22 | 31 | 48 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| | | | | | | |
| 1.2.19 | **KEARSIPAN** | | | | | |
| 1.2.19.1 | Persentase Perangkat Daerah yang berstandar Arispnya | Persen | 3,64 | 21,82 | 40,00 | Dinas arsip dan perpustakaan |
| | | | | | | |
| 2 | **URUSAN PILIHAN** | | | | | |
| 2.2 | **PARIWISATA** | | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Kali | 2 | 4 | 5 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 2.2.2 | Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan | Objek | 1 | 5 | 10 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| 2.2.3 | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 7 | 10 | 12 | Dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga |
| | | | | | | |
| 2.3 | **URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| 2.3.1 | Jumlah produksi perikanan | | | | | Dinas perikanan dan peternakan |
| | 1.Ikan Konsumsi | Ton | 8.286 | 8.617 | 9.014 | Dinas perikanan dan peternakan |
| | 2. Ikan Hias | Ekor | 612.470 | 636.969 | 666.269 | Dinas perikanan dan peternakan |
| | 3. Benih Ikan | Ribu Ekor | 179.275 | 186.446 | 195.023 | Dinas perikanan dan peternakan |
| 2.3.2 | Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina | Unit | 45 | 48 | 52 | Dinas perikanan dan peternakan |
| 2.3.3 | Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas perikanan dan peternakan |
| | | | | | | |
| 2.4 | **PERTANIAN** | | | | | |
| 2.4.1 | Jumlah produksi Tanaman Pangan | Ton | 740.732 | 815.842 | 899.384 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 2.4.2 | Jumlah produksi Tanaman Hortikultura | Ton | 151.333 | 157.386 | 164.783 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.3 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan | Ton | 6.462 | 6.733 | 7.057 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.4 | Jumlah penambahan alat mesin pertanian | Unit | 5.752 | 6.052 | 6.352 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.5 | Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) | Persen | 1,85 | 1,95 | 2,05 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.6 | Jumlah penambahan panjang jalan pertanian | Km | 62 | 77 | 92 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.7 | Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian | Kelompok | 105 | 120 | 138 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.8 | Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani | Dokumen | 48 | 53 | 58 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.9 | Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani | teknologi/ penyuluh pertanian | 3 | 6 | 9 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.10 | Penumbuhan Kelompok Tani Baru | Kelompok | 2835 | 275 | 550 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.11 | Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan : | Kelompok | 2.242 | 2.242 | 2.242 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 2.4.12 | -Kelas Pemula (skor 0-250) | Kelompok | 767 | 762 | 757 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.13 | -Kelas Lanjut (skor251-500) | Kelompok | 1.405 | 1.406 | 1.407 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.14 | -Kelas Madya(skor 501-750) | Kelompok | 68 | 71 | 74 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.15 | -Kelas Utama(skor 751-1000) | Kelompok | 2 | 3 | 4 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.16 | Persentase pengendalian penyakit hewan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.17 | Jumlah populasi ternak: | | | | | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 1. Sapi potong | Ekor | 29.783 | 31.064 | 32.586 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 2. Sapi perah | Ekor | 4.149 | 4.327 | 4.539 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 3. Kambing | Ekor | 27.957 | 29.159 | 30.588 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 4. Domba | Ekor | 111.324 | 116.111 | 121.800 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 5. Ayam buras | Ekor | 519.506 | 541.845 | 568.395 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | 6. Ayam ras petelur | Ekor | 111.883 | 116.694 | 122.412 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 7. Ayam ras pedaging | Ekor | 2.866.495 | 2.989.754 | 3.136.252 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 8. Itik | Ekor | 49.553 | 51.684 | 54.216 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.18 | Jumlah Produksi | | | | | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 1. Daging | Ton | 15.474 | 16.139 | 16.930 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 2. Telur | Ton | 1.639 | 1.709 | 1.793 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | 3. Susu | Ton | 12.323 | 12.853 | 13.483 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.19 | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina | Unit | 75 | 84 | 100 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 2.4.20 | Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| | | | | | | |
| 2.6 | **URUSAN KEHUTANAN** | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 2.6.1 | Prosentase Pengelolaan Kawan Konservasi | Persen | 60 | 63 | 64 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| 2.6.2 | Nilai Pengelolaan Hutan Kota | Nilai | 83 | 83 | 83 | Dinas lingkungan hidup dan kehutanan |
| | | | | | | |
| 2.7 | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | |
| 2.7.1 | Cakupan Jenis Pengawasan perdagangan | jenis | 4 | 4 | 4 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.7.2 | Jumlah UTTP yang di tera | UTTP | 28.502 | 28.502 | 28.502 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.7.2 | Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina | orang | 1.503 | 5.043 | 5.884 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.7.3 | Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk | wilayah | 0 | 1 | 2 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.7.3 | Jumlah pasar yang di revitalisasi | Pasar | 10 | 10 | 10 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | | | | | |
| 2.8 | **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| 2.8.1 | Peningkatan Jumlah IKM | IKM | 1.771 | 3.478 | 3.746 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.8.2 | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Sarana dan Prasarana | Jumlah Kelompok | 160 | 169 | 178 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| 2.8.3 | Peningkatan Jumlah Sentra IndustrI | Sentra | 5 | 0 | 7 | Dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan |
| | | | | | | |
| 2.9 | **TRANMIGRASI** | | | | | |
| 2.9.1 | Jumlah transmigran yang telah dilatih dan ditempatkan | KK | 51 | 56 | 61 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi |
| 2.9.2 | Jumlah Transmigran lokal yang terlatih | KK | 30 | 60 | 90 | Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi |
| | | | | | | |
| 3 | **URUSAN PENUNJANG DAN PENDUKUNG** | | | | | |
| 3.1 | **INSPEKTORAT** | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase pemenuhan unsur SPIP | Persen | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |
| 3.1.2 | Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang | Persen | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | dievaluasi | | | | | |
| 3.1.3 | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | Buah | 400 | 380 | 371 | Inspektorat |
| 3.1.4 | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | Buah | 545 | 500 | 475 | Inspektorat |
| 3.1.5 | persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi | Persen | 15,63 | 23,44 | 31,25 | Inspektorat |
| 3.1.6 | Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan | Persen | 25 | 33,33 | 41,67 | Inspektorat |
| 3.1.7 | Persentase elemen IACM yang terpenuhi | Persen | 66,67 | 100 | 100 | Inspektorat |
| 3.1.8 | Persentase Penilaian Zona Integritas | Persen | n/a | 100 | 100 | Inspektorat |
| | | | | | | |
| 3.2 | **PERENCANAAN** | | | | | |
| 3.2.1 | Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah; | Persen | 85 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| 3.2.2 | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah Berkategori “Baik”; | Persen | 95 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| 3.2.3 | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Ekonomi dan SDA berkategori “Baik”; | Persen | 96,5 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3.2.4 | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori “Baik”. | Persen | 98 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| | | | | | | |
| 3.3. | **KEUANGAN** | | | | | |
| 3.3.1 | Tingkat akurasi dokumen penganggaran | Persen | 90 | 92 | 93 | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.2 | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.3 | Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan | Persen | 90 | 91 | 92 | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.4 | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKOPD dan LKPD | Persen | 80 | 85 | 90 | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.5 | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas) | Persen | 86 | 87 | 88 | Badan pengelolaan keuangan dan aset |
| 3.3.6 | Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pajak | poin | 77,34 | 85 | 87 | Badan pengelolaan pendapatan |
| 3.3.7 | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 60 | 75 | 80 | Badan pengelolaan pendapatan |
| 3.3.8 | Persentase Rata Rata Wajib Pajak yang membayar | Persen | 70 | 80 | 85 | Badan pengelolaan pendapatan |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3.3.9 | Cakupan Regulasi PDRD yang Relevan | Persen | 80 | 90 | 100 | Badan pengelolaan pendapatan |
| | | | | | | |
| 3.4 | **KEPEGAWAIAN** | | | | | |
| 3.4.1 | Persentase ASN yang memiliki nilai PPK PNS minimal baik | Persen | 99,74 | 100 | 100 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.2 | Persentase Penempatan Jabatan Eselon ASN sesuai Kualifikasi | Persen | 56,31 | 65 | 74 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.3 | Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS | Persen | 0,020 | 0,018 | 0,016 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.4 | Persentase pemetaan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan | Persen | 7,56 | 26,05 | 45 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.5 | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian | Persen | 90,17 | 95 | 96 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.4.6 | Persentase ketersediaan data pegawai yang akurat | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | | | | | |
| 3.5 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | |
| 3.5.1 | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 17,77 | 30 | 50 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| 3.5.2 | Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi | Persen | 27,74 | 42,19 | 57 | Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia |
| | | | | | | |
| 3.6 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | |
| 3.6.1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 80 | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| 3.6.2 | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi | Persen | n/a | 100 | 100 | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| | | | | | | |
| 3.7 | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| 3.7.1 | persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang berkategori “baik” | Persen | n/a | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.2 | persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3.7.3 | Persentase mediasi penyelesaian masalah pertanahan | Persen | 60 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.4 | Nilai LPPD | Persen | 3,09 | 3,15 | 3,3 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.5 | Persentase tertib administrasi kewilayahan | Persen | 60 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.6 | Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya “B” | Persen | 0 | 60 | 69,23 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.7 | Persentase data tanah HGU yang terferivikasi dan tervalidasi | Persen | n/a | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.8 | Nilai SAKIP Kabupaten | Kategori | B | B | BB | Sekretariat Daerah |
| 3.7.9 | Indeks Reformasi Birokrasi | poin | 56,05 | 65 | 70 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.10 | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kabupaten Sumedang | Persen | 60 | 70 | 80 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.11 | Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpah tindih | Persen | 60 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.12 | Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.13 | Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan | Persen | 70 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.14 | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindak lanjuti kedalam perjanjian kerjasama | Persen | 46,67 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.15 | Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 85 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3.7.16 | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capian target kinerja tahunannya “baik” | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.17 | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori “baik” | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.18 | Persentase Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan KB yang capaian target kinerja tahunannya berkategori“baik” | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.19 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulanannya berkategori “baik” | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.20 | Tingkat Kematangan UKPBJ | Kategori | Level 1 | Level 3 | Level 3 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.21 | Capaian realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap jumlah usulan | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.22 | Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.23 | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Sekretariat Daerah | Persen | 60 | 70 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.24 | Tingkat penggunaan digital office (e-office) Sekretariat Daerah | Persen | 0 | 80 | 100 | Sekretariat Daerah |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3.7.25 | Persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.26 | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik | Persen | 80 | 85 | 85 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.27 | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sumedang Simpati | Persen | 30 | 75 | 80 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.28 | Cakupan Tertib Administrasi Keuangan | Persen | 90 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.29 | Persentase barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien | Persen | 80 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 3.7.30 | Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | |
| 3.8 | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | |
| 3.8.1 | Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan | Persen | 85 | 86 | 87 | Sekretariat DPRD |
| 3.8.2 | Persetujuan APBD Tepat Waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 3.8.3 | Persentase Fungsi Pegawasan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 3.8.4 | Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi | Persen | 95 | 95 | 95 | Sekretariat DPRD |
| 3.8.5 | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 3.8.6 | Prosentase Aktifitas Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | **URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | |
| 4.1 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | |
| 4.1.1.1 | Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.1.2 | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politk | Orang | 1.050 | 1.575 | 2.100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.1.3 | Persentase Ormas yang dibina | Persen | 35,42 | 46,19 | 47,14 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.1.4 | Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya) | Persen | 100 | 100 | 100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.1.5 | Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional | Persen | 100 | 100 | 100 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |
| 4.1.1.6 | Jumlah Konflik Sara dan Keagamaan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | Kantor kesatuan bangsa dan politik |

*Sumber : Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

**Tabel 8.6.a**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah**
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome**
**Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | **NON-URUSAN** | | | | |
| X.XX.01 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 29 Perangkat Daerah Kabupaten dan 26 Perangkat Daerah Kecamatan |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik | Persen | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Medis | Persen | 90,00 | 91 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang perawatan | Persen | 90,00 | 91 | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bidang pelayanan Penunjang medis | Persen | 90,00 | 91 | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian program dan anggaran | Persen | 90,00 | 91 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian keuangan | Persen | 91,00 | 91 | |
| | Presentase pelayanan indikator mutu Bagian umum,aset dan kepegawaian | Persen | 91,00 | 92 | |
| | Persentase Layanan Keuangan dan Administrasi kepada DPRD yang memadai | Persen | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 60,01 | 75,00 | |
| | Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang memadai | Persen | 80 | 80 | |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **1.01.** | **PENDIDIKAN** | | | | |
| 1.01.02 | Persentase Kesiapan Siswa Paud Untuk Melanjutkan Kejenjang SD/MI | Persen | 57,63 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs | Persen | 101,91 | 119,37 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA | Persen | 86,35 | 89,48 | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD | Persen | 0,02 | 0,06 | |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP | Persen | 0,08 | 0,78 | |
| | Persentase Sekolah Pendiidkan Kondisi Bangunan Baik | Persen | 31,84 | 37,4 | |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket A | Persen | 0,04 | 0,03 | |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket B | Persen | 0,45 | 0,40 | |
| | Angka Partisipasi Kasar Paket C | Persen | 2,05 | 2,83 | |
| | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 78,07 | 99,00 | |
| | Rata rata peningkatan hasil UN | Persen | Tdk Dilaksanakan | 57,20 | |
| | Cakupan Pelayanan Pendidikan | Persen | 86,30 | 88,03 | |
| | Persentase siswa yang berpastisipasi aktif dalam pendidikan Diniyah | Persen | n/a | 100 | |
| **1.02** | **KESEHATAN** | | | | |
| 1.02.02 | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar | Persen | 97,47 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | Cakupan SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang memenuhi standar | Persen | 90,12 | 100 | |
| | Cakupan Puskesmas yang Sesuai Standar | Persen | 28,5 | 37 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Cakupan Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan | Persen | 74 | 80 | |
| | Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan Alat kesehatan rumah sakit | Persen | 96,12 | 98 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) |
| 1.02.03 | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 50 | 50 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 | Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 80 | 100 | |
| 1.02.05 | Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri | Persen | 7,9 | 15 | |
| **1.03** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | |
| 1.03.02 | Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 43,79 | 45,20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 | Persentase Sarana Air | Persen | 80 | 85 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.04 | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 65 | 70 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 1.03.05 | Persentase Sanitasi yang Terbangun | Persen | 60 | 65 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.06 | Persentase sistem drainase yang baik di wilayah perkotaan | Persen | n/a | 45 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 1.03.07 | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.08 | Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata | Persen | 9 | 9 | |
| 1.03.09 | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata | Persen | 50 | 58,75 | |
| 1.03.10 | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 76,96 | 77,30 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 | Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang | Penyedia Jasa | 173 | 50 | |
| 1.03.12 | Persentase ketersediaan RTR | Persen | 30,77 | 50,00 | |
| | Persentase pelayanan pemanfaatan ruang | Persen | 50 | 80,00 | |
| **1.04** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | |
| 1.04.03 | Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | Persen | 80,3 | 85 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.05 | Persentase PSU di lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | 4,5 | 6,5 | |
| **1.05** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 1.05.02 | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | Persen | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.03 | Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Peringatan Dini Bencana | Desa/Kelurahan | 277 | 277 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 85 | 90 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1.06** | **SOSIAL** | | | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 1.06.02 | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | 5,42 | 9.03 | |
| | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | 58,33 | |
| 1.06.04 | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 10,74 | 21,91 | |
| 1.06.05 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial | Persen | 100 | 100 | |
| 1.06.06 | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 1.06.07 | Persentase Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara | Persen | 100 | 100 | |
| **II.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2.07** | **TENAGA KERJA** | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.03 | Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat | Persen | 100 | 100 | |
| 2.07.04 | Cakupan Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.07.05 | Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | |
| **2.08** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 12,90 | 29,03 | |
| 2.08.03 | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.08.06 | Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak | Persen | n/a | 42,31 | |
| 2.08.07 | Persentase Perlindungan Khusus Anak | Persen | 100 | 100 | |
| **2.09** | **PANGAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.02 | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.09.03 | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 92 | 92,5 | |
| 2.09.04 | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 100 | |
| 2.09.05 | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 100 | |
| **2.10** | **PERTANAHAN** | | | | |
| 2.10.04 | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasiltasi | Persen | 100 | 100 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.05 | Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Persen | 100 | 100 | |
| **2.11** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| 2.11.02 | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 3 | 4 | |
| 2.11.03 | Persentase pengujian kualitas air sungai | Persen | | 62,96 | |
| 2.11.04 | Persentase Luas lahan berfungsi lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati | Persen | | 32,33 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2.11.05 | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 33 | 0 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.11.06 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten | Persen | | 40,80 | |
| 2.11.07 | Jumlah komunitas kearipan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH | Komunitas | n/a | 0 | |
| 2.11.08 | Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan kapasitas lingkungan | Persen | | 5,24 | |
| 2.11.09 | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Desa/ Kelurahan | 0 | 0 | |
| 2.11.10 | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Persen | | 100 | |
| 2.11.11 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan sektor informal | Persen | | 30 | |
| **2.12** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | |
| 2.12.01 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | | 97 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | | 86 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.12.03 | Persentase Layanan yang Sesuai Standar Manajemen Mutu | Persen | | 100 | |
| **2.13** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.02 | Cakupan Desa yang Menerima Program Penataan Desa | Persen | | 20 | |
| 2.13.04 | Cakupan Desa Adminitrasi | Persen | | 100 | |
| 2.13.05 | Prosentase Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan | Persen | | 20 | |
| **2.14** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | |
| 2.14.02 | Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan | Sekolah | n/a | 10 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Cakupan ketersediaan data pengendalian penduduk | Persen | n/a | 100 | |
| 2.14.03 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 74,77 | 75,07 | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 9,07 | 9,06 | |
| 2.14.04 | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB | Persen | 21,61 | 25,21 | |
| | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKR | Persen | 6,91 | 9,3 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Cakupan keluarga yang menjadi anggota BKL | Persen | 10,83 | 12,69 | |
| | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 1,85 | 2,73 | |
| | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Tahun | 19,7 | 19,7 | |
| | | | | | |
| **2.15** | **PERHUBUNGAN** | | | | |
| P | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 42,12 | 51,83 | |
| | Persentase Pelayanan Angkutan Laik Jalan | Persen | 61,24 | 50 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 30,33 | 33,33 | |
| **2.16** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | |
| 2.16.02 | Cakupan Media Massa Yang Dikembangkan | Persen | | 100 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.16.03 | Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah | Persen | | 3,60 | |
| **2.17** | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | |
| 2.17.04\5 | Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian | persen | | 5 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.17.06 | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 28,34 | 2 | |
| 2.17.07 | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 2,56 | 0,15 | |
| 2.17.08 | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,3 | 0,15 | |
| **2.18** | **PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02 | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | Persen | 30 | 40 | |
| 2.18.03 | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | Persen | 100 | 5 | |
| 2.18.04 | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 76 | 80 | |
| 2.18.05 | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 60 | 70 | |
| 2.18.06 | Persentase data PM dan Perizinan yang Valid | Persen | 60 | 100 | |
| **2.19** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.19.02 | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang dibina | Organisasi | 97 | 97 | |
| | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 700 | 700 | |
| 2.19.03 | Jumlah Atlet yang dibina | Orang | 20 | 20 | |
| | Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan | Event | 5 | 5 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.19.04 | Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina | Organisasi | 26 | 26 | |
| **2.20** | **STATISTIK** | | | | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.20.02 | Persentase Ketersediaan Data Yang Akurat Dan Berkualitas | Persen | 90 | 95 | |
| **2.21** | **PERSANDIAN** | | | | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.21.02 | Cakupan Pengamanan Informasi Daerah | Persen / OPD | | 66.67 / 19 | |
| **2.22** | **KEBUDAYAAN** | | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.02 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Orang | 120 | 120 | |
| 2.22.05 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina | Lokasi | 14 | 14 | |
| **2.23** | **PERPUSTAKAAN** | | | | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.23.02 | Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan | orang | | 7.7988 | |
| **2.24** | **KEARSIPAN** | | | | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.24.02 | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | 40 | 49 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 2.24.03 | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan | Persen | 40 | 46 | |
| **III** | **UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| **3.25** | **KELAUATAN DAN PERIKANAN** | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.03 | Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persen | 100 | 100 | |
| 3.25.04 | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 100 | |
| 3.25.05 | Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum | Persen | 100 | 100 | |
| 3.25.06 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Persen | 100 | 100 | |
| **3.26** | **PARIWISATA** | | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.02 | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 5 | 5 | |
| 3.26.03 | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 2 | 2 | |
| 3.26.04 | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 16 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 3.26.05 | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | Orang | | 170 | |
| **3.27** | **PERTANIAN** | | | | |
| 3.27.02 | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 35 | 35,77 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | Cakupan pengembangan sarana pertanian | Persen | 65 | 64,23 | |
| | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | n/a | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:03 | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1696 | 1.824 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persen | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:05 | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95 | 95,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 18 | 15,00 | |
| 3.27.06 | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:07 | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 45 | 38,77 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| **3.28** | **KEHUTANAN** | | | | |
| 3.28.04 | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 67,42 | 68,54 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3.30** | **PERDAGANGAN** | | | | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | Persen | 20 | 30 | |
| 3.30.04 | Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 4 | 4 | |
| 3.30.06 | Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 100 | |
| **3.31** | **PERINDUSTRIAN** | | | | |
| **3.31.02** | Persentase Pembangunan Kawasan Industri | Persen | 13 | 15 | |
| **3.32** | **TRANSMIGRASI** | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi | Lokasi | 1 | 1 | |
| 3.32.04 | Jumlah transmigran yang dilatih | KK | 10 | 5 | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | |
| 4.01.02 | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Persen | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Kewilayahan | | | | |
| | Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Pelayanan Bagian Hukum | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 100 | 100 | |
| | Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase pemrosesan rancangan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih | Persen | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindaklanjut | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase pemutakhiran data pada website JDIH secara berkelanjutan | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 100 | 100 | |
| 4.01.03 | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan Tahunanannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | |
| | Tingkat Kematangan UKPBJ | Predikat | | Level 4 | |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori ”baik” | Persen | 100 | 100 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| 4.02.02. | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persen | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | |
| 5.01.02 | Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | |
| 5.02.02 | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 90 | 94 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 100 | |
| | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 90 | 92 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 80 | 92 | |
| 5.02.03 | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 87 | 89 | |
| 5.02.04 | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 80 | 85 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | |
| 5.03.02 | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 98 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 95 | 95 | |
| | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 70 | 70 | |
| | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 100 | |
| | | | | | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02 | Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 100 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Kondisi Awal (Tahun 2020) | Target Capaian Setiap Tahun | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2021 | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | Inspektorat Kabupaten |
| 6.01.02 | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 400 | 360 | |
| | Presentase pemenuhan unsur SPIP pada OPD | Persen | 60% | 80% | |
| | Presentase penerapan SAKIP pada OPD | Persen | 6000% | 100 | |
| | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 545 | 450 | |
| 6.01.03 | Presentase pemenuhan elemen IACM | Persen | 66,67 | 100 | |
| | Cakupan Zona Integritas | Persen | 75 | 100 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| 7.01.02 | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 26 Kecamatan |
| 7.01.03 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | |
| 7.01.04 | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | |
| 7.01.05 | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | |
| 7.01.06 | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | |

*Sumber : Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

**Tabel 8.6.b**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023**

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | **NON-URUSAN** | | | | | |
| X.XX.01 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 29 Perangkat Daerah Kabupaten dan 26 Perangkat Daerah Kecamatan |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Layanan BLUD yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | Persentase Layanan Keuangan dan Administrasi kepada DPRD yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| | Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang memadai | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 80,00 | 85,00 | 85,00 | |
| | Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang memadai | Persen | 85 | 90 | 90 | |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| **1.01.** | **PENDIDIKAN** | | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 1.01.02 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **1.02** | **KESEHATAN** | | | | | |
| 1.02.02 | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| | Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 1.02.03 | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 80 | 90 | 90 | |
| 1.02.04 | Cakupan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 1.02.05 | Cakupan Desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri | Persen | 20 | 25 | 25 | |
| | Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga | Persen | 60 | 65 | 65 | |
| **1.03** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | |
| 1.03.02 | Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 46,60 | 47,50 | 47,50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.03 | Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum Layak | Persen | 73,6 | 76,90 | 76,90 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 1.03.04 | Jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik diperkotaan | Persen | 18,72 | | 19,11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 1.03.05 | Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak | Persen | 1,57 | 2,31 | 2,31 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.03.06 | Persentase Cakupan Drainase Lingkungan yang ditangani | Persen | 6,67 | 9,52 | 9,52 | |
| 1.03.07 | Persentase PSU di Lingkungan Perumahan/ Permukiman | Persen | 18,90 | 24,57 | 24,57 | |
| 1.03.08 | Persentase bangunan yang tersertifikasi laik fungsi | Persen | 9 | 9 | 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.09 | Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata | Persen | 68,75 | 75 | 75 | |
| 1.03.10 | Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten yang baik dan sedang | Persen | 81,30 | 85,30 | 85,30 | |
| 1.03.11 | Jumlah usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang | Penyedia Jasa | 200 | 250 | 250 | |
| 1.03.12 | Persentase ketersediaan RTR | Persen | 60,00 | 70,00 | 70,00 | |
| | Persentase pelayanan pemanfaatan ruang | Persen | 90,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **1.04** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.02 | Persentase Penanganan Hunian Rumah Pasca Bencana | Persen | 53,3 | 100 | 100 | |
| 1.04.03 | Rasio Rumah Layak Huni | Persen | 82,7 | 83,33 | 83,33 | |
| 1.04.04 | Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Persen | 26,9 | 0 | 0 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 1.04.05 | Persentase Sarana, Prasarana dan Utulitas Umum yang dibangun dan dikembangkan | Persen | 68,8 | 100 | 100 | |
| **1.05** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 1.05.02 | Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman) | Persen | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Cakupan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 1.05.03 | Persentase Penanganan Pra Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 1.05.04 | Tingkat waktu tanggap (Response Timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | 90 | 90 | 90 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1.06** | **SOSIAL** | | | | | Dinas Sosial |
| 1.06.02 | Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya | Persen | 12,64 | 16,2 | 16,25 | |
| | Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persen | 58,33 | 58,33 | 58,33 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 1.06.04 | Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial kebutuhan Dasar | Persen | 25,75 | 35,75 | 35,75 | |
| 1.06.05 | Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial kebutuhan dasar | Persen | 98,00 | 98 | 98 | |
| 1.06.06 | Persentase Penanganan Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 1.06.07 | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **II.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| **2.07** | **TENAGA KERJA** | | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2.07.03 | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.07.04 | Persentase Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.07.05 | Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.08** | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Persentase OPD Responsip Gender | Persen | 45,16 | 61,29 | 61,29 | |
| 2.08.03 | Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 2.08.04 | Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.08.05 | Persentase Ketersedian Data Gender dan Anak | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.08.06 | Persentase Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Persen | 46,15 | 65,38 | 57,69 | |
| 2.08.07 | Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.09** | **PANGAN** | | | | | |
| 2.09.02 | Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.09.03 | Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita | Persen | 94,5 | 95 | 95 | Dinas Pertaniamn dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04 | Persentase penanganan penduduk rawan pangan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.09.05 | Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.10** | **PERTANAHAN** | | | | | |
| 2.10.04 | Persentase Sengketa Pertanahan yang difasiltasi | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.05 | Persentase (Jumlah Bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | Hektar | 3 | 3 | 3 | |
| **2.11** | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 2.11.02 | Jumlah Instrumen dan/atau rujukan Perencanaan Lingkungan Hidup | Dokumen | 4 | 2 | 13 | dan Kehutanan |
| 2.11.03 | Persentase tindakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.11.04 | Indeks Tutupan vegetasi (ITV) | Poin | 0,41 | 0,42 | 0,42 | |
| 2.11.05 | Jumlah usulan TPS B3 yang mendapat rekomendasi | Usaha/ Kegiatan | 5 | 7 | 45 | |
| 2.11.06 | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten | Persen | 34,04 | 36 | 36 | |
| 2.11.07 | Jumlah komunitas kearipan lokal yang diakui keberadaannya dalam PPLH | Komunitas | n/a | 2 | 2 | |
| 2.11.08 | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat aktivitasnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Lembaga | 36 | 42 | 84 | |
| 2.11.09 | Jumlah Desa/Kelurahan berbudaya lingkungan | Desa/ Kelurahan | 8 | 16 | 24 | |
| 2.11.10 | Persentase penyelesain sengketa PPLH | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.11.11 | Persentase pengelolaan sampah | Persen | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| **2.12** | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 97 | 97 | 97 | |
| 2.12.02 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 93 | 93 | 93 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 2.12.03 | Persentase Instansi yang menggunakan Data Base Kependudukan | Persen | 63 | 100 | 100 | |
| **2.13** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | |
| 2.13.02 | Persentase Fasilitasi Program Penataan Desa Kategori Optimal | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.13.03 | Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 | Cakupan desa tertib administrasi | Persen | 75 | 90 | 90 | |
| 2.13.05 | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | Persen | 85,71 | 100 | 100 | |
| **2.14** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | |
| 2.14.02 | Persentase sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan kependudukan | Persen | 5 | 5 | 10 | |
| | Cakupan ketersediaan data pengendalian penduduk | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.14.03 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | Persen | 75,37 | 75,67 | 75,67 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) | Persen | 9,05 | 9,04 | 9,04 | |
| 2.14.04 | Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok ketahanan (BKB, BKR dan BKL) | Persen | 18,30 | 20,87 | 20,87 | |
| | Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS | Persen | 3,53 | 4,33 | 4,33 | |
| **2.15** | **PERHUBUNGAN** | | | | | Dinas Perhubungan |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 2.15.02 | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan | Persen | 64,88 | 77,27 | 77,27 | |
| | Persentase Pelayanan Bidang Perhubungan | Persen | 80 | 90 | 90 | |
| | Persentase Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Persen | 50 | 66,67 | 66,67 | |
| **2.16** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| 2.16.02 | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah | Persen | 50 | 60 | 60 | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.16.03 | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 95 | 100 | 100 | |
| | Persentase Desa Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik | Persen | 90 | 100 | 100 | |
| **2.17** | **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | |
| 2.17.02 | Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.17.03 | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.17.04 | Persentase KSP/USP Yang Sehat | persen | 50,51 | 70,51 | 70,51 | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.05 | Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian | persen | 12,08 | 22,08 | 22,08 | |
| 2.17.06 | Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapat perlindungan | persen | 5,15 | 7,15 | 7,15 | |
| 2.17.07 | Persentase UMKM yang diberdayakan | persen | 0,34 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.17.08 | persentase UMKM yang di kembangkan | persen | 0,22 | 0,4 | 0,4 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | | | | | | |
| **2.18** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02 | Persentase Peningkatan Jumlah Investor | Persen | 60 | 90 | 90 | |
| 2.18.03 | Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang | Persen | 4 | 4 | 4 | |
| 2.18.04 | Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi | Persen | 83 | 87 | 87 | |
| 2.18.05 | Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP | Persen | 80 | 85 | 85 | |
| 2.18.06 | Persentase data PM dan Perizinan yang Valid | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.19** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.19.02 | Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang dibina | Organisasi | 97 | 97 | 97 | |
| | Jumlah Pemuda yang dibina | Orang | 700 | 700 | 1.400 | |
| 2.19.03 | Jumlah Atlet yang berprestasi | Orang | 20 | 20 | 40 | |
| | Jumlah Penyelenggaraan Keolahragaan | Event | 7 | 10 | 17 | |
| 2.19.04 | Jumlah Anggota dan Organisasi Pramuka yang Dibina | Organisasi | 26 | 26 | 26 | |
| **2.20** | **STATISTIK** | | | | | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.20.02 | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.21** | **PERSANDIAN** | | | | | Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik |
| 2.21.02 | Tingkat Keamanan Informasi | Persen | 54,26 | 62,01 | 62,01 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| **2.22** | **KEBUDAYAAN** | | | | | |
| 2.22.02 | Persentase OPK yang dikembangkan | Persen | 72,73 | 100 | 100 | |
| 2.22.03 | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan | persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.04 | Persentase Sejarah Lokal yang dibina | persen | 100 | 100 | 100 | |
| 2.22.05 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | persen | 15,98 | 20,62 | 20,62 | |
| 2.22.06 | Jumlah Kunjungan wisatawan musieum | orang | 3000 | 4000 | 4000,00 | |
| **2.23** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | |
| 2.23.02 | Persentase Pamanfaatan Bahan Pustaka | Persen | 4,12 | 4,42 | 4,42 | |
| | Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan | Persen | 86 | 90 | 90 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.23.03 | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **2.24** | **KEARSIPAN** | | | | | |
| 2.24.02 | Persentase Perangkat Daerah yang tertata arsipnya sesuai dengan standar | Persen | 58 | 67 | 67 | |
| | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Arsip yang memadai | Persen | 90 | 100 | 100 | |
| 2.24.03 | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan | Persen | 82 | 100 | 100 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 2.24.04 | Persentase izin penggunaan arsip | Persen | 7 | 8 | 8 | |
| **III** | **UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| **3.25** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| 3.25.03 | Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.04 | Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 3.25.05 | Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 3.25.06 | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **3.26** | **PARIWISATA** | | | | | |
| 3.26.02 | Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan | ODTW | 6 | 7 | 25 | Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.03 | Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan | Event | 14 | 14 | 14 | |
| 3.26.04 | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan | Sub Sektor | 16 | 16 | 16 | |
| 3.26.05 | Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitas dan kompetensi sumber dayanya | Orang | 120 | 140 | 320 | |
| **3.27** | **PERTANIAN** | | | | | |
| 3.27.02 | Cakupan ketersediaan sarana pertanian | persen | 53 | 70 | 70 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | Cakupan pengembangan sarana pertanian | Persen | 47 | 30 | 30 | |
| | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 03:27:03 | Luas tambahan lahan pertanian yang terairi | hektar | 1.952 | 2.088 | 2.234 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 03:27:05 | Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian | persen | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian | persen | 12,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan | Persen | 100 | 100 | 100 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.06 | Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 03:27:07 | Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian | persen | 34,00 | 27,37 | 100,13 | Dinas Pertaniamn dan Ketahanan Pangan |
| **3.28** | **KEHUTANAN** | | | | | |
| 3.28.04 | Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi | Persen | 69,66 | 70,79 | 70,79 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3.30** | **PERDAGANGAN** | | | | | Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.02 | Persentase perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3.30.03 | Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | Persen | 42,90 | 52,00 | 52,00 | |
| 3.30.04 | Jumlah Laporan Upaya stabilitasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting | Laporan | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 3.30.05 | Cakupan pengembangan ekspor | kali | 10,00 | 10,00 | 22,00 | |
| 3.30.06 | Persentase Metrologi Legal yang Sesuai Standar | Persen | 100 | 100 | 100,00 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 3.30.07 | Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | kali | 5 | 5 | 15,00 | |
| **3.31** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| 3.31.02 | Persentase pembangunan industri sesuai perencanaan | Persen | 30 | 45 | 45 | |
| 3.31.03 | Jumlah pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota | Laporan | 14 | 14 | 28 | |
| 3.31.04 | Jumlah pengelolaan sistem informasi industri nasional | Laporan | 4 | 12 | 16 | |
| | | | | | | |
| **3.32** | **TRANSMIGRASI** | | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | Jumlah lokasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi | Lokasi | 1 | 1 | 4 | |
| 3.32.04 | Jumlah transmigran yang dilatih | KK | 5 | 5 | 25 | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| 4.01.02 | Presentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| | Presentase Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB; Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang capaian kinerja tahunannya berkategori "baik" serta Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang keagamaan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Pelayanan Bagian Hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | Persentase dokumen kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama serta rencana aksi yang jelas dan terukur | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 4.01.03 | Persentase BUMD dan lembaga keuangan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan Triwulanannya berkategori "baik" | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat Kematangan UKPBJ | Level | Level 4 | Level 5 | Level 5 | |
| | Persentase Perangkat Daerah bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan dan UMKM yang target capaian kinerja tahunannya berkategori ”baik” | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | |
| 4.02.02. | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Kerja Sama dan Pengawasan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Program dan Keuangan | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Tingkat dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Bagian Umum | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | |
| 5.01.02 | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 5.01.03 | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkategori Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | |
| 5.02.02 | Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 95 | 97 | 97 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan | Persen | 95 | 97 | 97 | |
| | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD | Persen | 95 | 97 | 97 | |
| 5.02.03 | Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas) | Persen | 90 | 91 | 91 | |
| 5.02.04 | Persentase Potensi Pajak Daerah | Persen | 85 | 90 | 90 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | Badan Kepegawaian dan |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| 5.03.02 | Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan | Persen | 98 | 100 | 100 | Pengembangan Sumber Daya manusia |
| | Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar kualifikasi jabatan | Persen | 98 | 100 | 100 | |
| | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi | Persen | 85 | 100 | 100 | |
| | Persentase ASN yang berkinerja baik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | |
| 5.05.02 | Persentase Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | |
| 6.01.02 | Jumlah temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 353 | 340 | 340 | Inspektorat Kabupaten |
| | Presentase pemenuhan unsur SPIP pada OPD | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Presentase penerapan Manajemen Resiko pada OPD | Persen | 50 | 100 | 100 | |
| | Presentase penerapan SAKIP pada OPD | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | Jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan | LHP | 425 | 400 | 400 | |
| 6.01.03 | Presentase pemenuhan elemen IACM | Persen | 100 | 100 | 100 | |

| Kode | Indikator Program (outcome) | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | |
| | Cakupan Zona Integritas | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | |
| 7.01.02 | Persentase Layanan kepada Masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 26 Kecamatan |
| 7.01.03 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 7.01.04 | Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 7.01.05 | Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 7.01.06 | Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persen | 85,05 | 100 | 100 | |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persen | 100 | 100 | 100 | |

*Sumber : Hasil Analisis Bappppeda, 2021*

PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

# BAB IX
# PENUTUP

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

# BAB IX
# PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disajikan sebagaimana di bawah ini.

## 9.1 Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan Tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan pandemi COVID-19. Dampak dari ketiga hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

### 9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020

Pada Tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020. Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat *outcome* Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021. Pada RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

### 9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020; rencana Tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020; dan rencana Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target Tahun 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Kabupaten Sumedang akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang

berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional Tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

## 9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi nasional, Provinsi dan Kabupaten Sumedang akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020, rencana Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 dan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.

3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dalam rangka menanggapi dampak pandemi COVID-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumedang, maka disusun 5 (Lima) Prioritas Pembangunan yaitu 1). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/Prioritas Akselerasi Pelayanan Dasar, 2). Prioritas Penguatan Sumedang Agamis, 3). Prioritas Penguatan Ketahanan Daerah, 4). Prioritas Akselerasi Pemulihan ekonomi dan 5). Prioritas Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
4. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
5. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan Pemangku kepentingan, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Bupati dalam hal ini dilakukan oleh Bappppeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Pada Tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 1, 2, dan 3 dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun

berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, dan mengawal ***"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023"***

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR